

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 3

2021

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 08 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2018 - 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
- b. bahwa implikasi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan penerimaan daerah, dan peningkatan belanja daerah dan pembiayaan sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah daerah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian daerah. Rencana penanganan, penyelamatan kesehatan dan perekonomian daerah tersebut tetap harus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan harus direspon dengan perubahan yang mendasar, salah satunya dengan melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

- c. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 perlu dilakukan perubahan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) dan/atau Menghadapai Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) dan/atau Menghadapai Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 8 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 08 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 8 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD meliputi :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
- c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
memuat analisis permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah tahun 2018-2023.
- e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
memuat visi, misi, tujuan dan sasaran.
- f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
memuat strategi, arah kebijakan pembangunan serta program pembangunan prioritas berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.
- g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target kinerja, pagu indikatif, dan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;

memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

i. BAB IX : PENUTUP.

memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir.

- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan dalam Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 16 Maret 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan Di Bekasi
pada tanggal 16 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 3 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT : (
3 / 36 / 2021)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 08 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018-2023

I. UMUM.

Pemerintah Kota Bekasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus mampu mewujudkan agar cita-cita Negara Indonesia tersebut dapat terwujud, oleh karena itu Pemerintah Kota Bekasi mempunyai fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah *Public Service Function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development Function* (fungsi pembangunan), dan *protection function* (fungsi perlindungan). *Good governance* akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai *objective and subjective responsibility*. *Responsibility objective* bersumber pada adanya pengendalian dari luar (*external controls*) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan *three es* (*economy, efficiency and effectiveness*) dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai (Denhardt, 2003).

Dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Bekasi diperlukan sinergitas dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang diwujudkan dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kemajuan pembangunan Kota Bekasi perlu didukung dengan pemberian pelayanan bermutu dan berkualitas serta mempunyai daya saing tinggi. Di sisi lain diperlukan peran serta dunia usaha dan swasta dalam turut serta mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan tetap mengacu dan memperhatikan tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diharapkan menghasilkan perkembangan pembangunan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat khususnya masyarakat Kota Bekasi.

Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selain itu dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila :

Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan Menteri ini; dan
- c. Terjadi perubahan yang mendasar.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 3

Ayat (1) : Perubahan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yang disebabkan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan respon akibat bahwa implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam upaya penyelamatan ekonomi daerah.

- a. memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika penulisan.
- b. memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

- c. memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- d. memuat analisis permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah tahun 2018-2023.
- e. memuat visi, misi, tujuan dan sasaran.
- f. memuat strategi, arah kebijakan pembangunan serta program pembangunan prioritas berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.
- g. memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target kinerja, pagu indikatif, dan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.
- h. memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- i. memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir.

Ayat (2) : Lampiran perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 telah disesuaikan.

Pasal 5

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.

Ayat (4) : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 2



PEMERINTAH KOTA BEKASI

PERUBAHAN RPJMD KOTA BEKASI TAHUN 2018-2023

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KOTA BEKASI TAHUN 2018-2023

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	10
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-7
1.3.1 Agenda Pembangunan <i>Sustainable Development Goals</i>	I-7
1.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025	I-9
1.3.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024	I-9
1.3.4 Hubungan RPJMD Kota Bekasi dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat	I-12
1.3.5 Hubungan RPJMD Kota Bekasi dengan RPJPD Kota Bekasi	I-12
1.3.6 Hubungan RPJMD Kota Bekasi dengan RKPD Kota Bekasi	I-13
1.3.7 Hubungan RPJMD Kota Bekasi dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	I-13
1.3.8 Hubungan RPJMD Kota Bekasi dengan RTRW Kota Bekasi	I-13
1.3.9 Hubungan RPJMD Kota Bekasi dengan KLHS RPJMD Kota Bekasi	I-13
1.4 Profil Kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi	I-14
1.5 Maksud dan Tujuan	I-16
1.6 Sistematika Penulisan	I-16
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	2-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	2-1
2.1.1 Aspek Geografi	2-1
2.1.2 Aspek Demografi	2-10
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2-12
2.2.1 Laju Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi	2-12
2.2.2 Laju Inflasi	2-32
2.2.3 PDRB perKapita	2-33
2.2.4 Indeks Gini	2-35
2.2.5 Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	2-35
2.2.6 Rasio Kesenjangan Kemiskinan	2-36
2.2.7 Proporsi Penduduk dengan Pendapatan kurang dari US\$1 per Kapita per Hari	2-36
2.2.8 Indeks Pembangunan Manusia	2-36
2.2.9 Harapan Lama Sekolah	2-37
2.2.10 Angka Rata-rata Lama Sekolah	2-38
2.2.11 Angka Usia Harapan Hidup	2-39
2.2.12 Persentase Balita Gizi Buruk	2-39
2.2.13 Prevalensi Balita Gizi Kurang	2-40
2.2.14 Cakupan Desa Siaga Aktif	2-40
2.2.15 Angka Partisipasi Angkatan Kerja	2-41
2.2.16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	2-41

2.2.17	Tingkat Pengangguran terbuka	2-42
2.2.18	Rasio Penduduk yang Bekerja	2-42
2.2.19	Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	2-42
2.2.20	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	2-43
2.2.21	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	2-43
2.2.22	Indeks Kepuasan Masyarakat	2-45
2.2.23	Persentase PAD terhadap Pendapatan	2-46
2.2.24	Opini BPK	2-47
2.2.25	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	2-47
2.2.26	Penguatan Cadangan Pangan	2-49
2.2.27	Penanganan Daerah Rawan Pangan	2-49
2.2.28	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	2-49
2.2.29	Kontribusi Sektor Palawija terhadap PDRB Sektor Pertanian	2-50
2.2.30	Produksi Sektor Pertanian	2-51
2.2.31	Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB Sektor Pertanian	2-51
2.2.32	Produksi Subsektor Perkebunan	2-51
2.2.33	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Padi Terhadap PDRB	2-53
2.2.34	Kontribusi Subsektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	2-53
2.2.35	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	2-54
2.2.36	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	2-55
2.2.37	Pertumbuhan Industri	2-56
2.3	Aspek Daya Saing Daerah	2-57
2.3.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	2-57
2.3.2	Nilai Tukar Petani	2-58
2.3.3	Perentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita	2-59
2.3.4	Produtivitas Total Daerah	2-60
2.3.5	Rasio Ekspor Impor Terhadap PDRB	2-61
2.3.6	Angka Kriminalitas yang Tertangani	2-61
2.3.7	Rasio Ketergantungan Penduduk	2-62
2.3.8	BUMD	2-63
2.3.9	Kerjasama Daerah	2-64
2.3.10	Perhubungan	2-98
2.3.11	Lingkungan	2-99
2.4	Aspek Pelayanan Umum	2-101
2.4.1	Pendidikan	2-101
2.4.2	Kesehatan	2-112
2.4.3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2-125
2.4.4	Penataan Ruang	2-136
2.4.5	Perumahan Rakyat dan Pemukiman	2-137
2.4.6	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2-138
2.4.7	Sosial	2-140
2.4.8	Tenaga Kerja	2-142
2.4.9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2-144
2.4.10	Pangan	2-148
2.4.11	Pertanahan	2-148
2.4.12	Lingkungan Hidup	2-148
2.4.13	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2-152

2.4.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2-153
2.4.15	Perhubungan	2-157
2.4.16	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2-158
2.4.17	Penanaman Modal	2-158
2.4.18	Kepemudaan dan Olah Raga	2-159
2.4.19	Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	2-160
2.4.20	Perpustakaan	2-160
2.4.21	Kearsipan	2-161
2.4.22	Pariwisata dan Kebudayaan	2-162
2.4.23	Pertanian, Kelautan dan Perikanan	2-164
2.4.24	Perindustrian dan Perdagangan	2-164
2.4.25	Perencanaan Pembangunan	2-164
2.4.26	Keuangan	2-165
2.4.27	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	2-166
2.4.28	Penelitian dan Pengembangan	2-166
2.4.29	Pengawasan	2-166
2.4.30	Sekretariat Dewan	2-166
2.5	Evaluasi Hasil Pembangunan	2-167
2.5.1	Analisis Kinerja Capaian Standar Pelayanan Minimal dan Kinerja Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah (Permendagri 86/2017)	2-167
2.5.2	Analisis Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 2018-2023	2-187
2.5.3	Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	2-193
BAB III	GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH	3-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	3-1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	3-1
3.1.2	Neraca Daerah	3-13
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	3-17
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	3-17
3.2.2	Analisis Pembiayaan	3-18
3.3	Kerangka Pendanaan	3-20
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	3-21
3.3.2	Perhitungan Kerangka Pendanaan	3-31
3.4	Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya	3-33
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA BEKASI TAHUN 2018-2023	4-1
4.1.	Permasalahan	4-1
4.1.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	4-1
4.1.2	Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	4-25
4.2.	Isu Strategis Pembangunan	4-35

4.2.1	Isu Strategis berdasarkan Kesepakatan Pemangku Kepentingan.....	4-36
4.2.2	Isu Strategis berdasarkan KLHS RTRW Kota Bekasi	4-38
4.2.3	Isu Strategis berdasarkan Perubahan KLHS Pada Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023	4-39
4.2.4	Isu Strategis berdasarkan capaian Indikator Target Pembangunan Berkelanjutan	4-40
4.2.5	Isu Strategis terkait Pemenuhan Kebutuhan Dasar	4-58
4.2.6	Isu Strategis terkait Wilayah Perbatasan	4-60
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	5-1
5.1	Visi.....	5-2
5.2	Misi.....	5-2
5.3	Tujuan dan Sasaran.....	5-3
5.4	Prioritas Pembangunan Daerah Janji Politik.....	5-7
BAB VI	STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM	6-1
6.1	Strategi Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023	6-1
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023.....	6-5
6.2.1	Umum	6-5
6.2.2	Arah Kebijakan Pembangunan yang Menjadi Prioritas.....	6-6
6.3	Tahapan Pembangunan	6-13
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	7-1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	8-1
BAB IX	PENUTUP	9-1
9.1	Kaidah Pelaksanaan	9-1
9.2	Pedoman Transisi.....	9-2

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN	I-1
Tabel 1.1 Daftar Sustainable Developments Goals (SDGs) (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017).....	I-8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	2-1
Tabel 2.1 Luas Kota Bekasi Dirinci Menurut Kecamatan	2-2
Tabel 2.2 Perubahan luas lahan di Kota Bekasi dari tahun 2000 sampai 2015	2-8
Tabel 2.3. Koefisien Wilayah Terbangun Maksimum dan Koefisien Wilayah Terbangun Aktual Kota Bekasi Eksisting	2-9
Tabel 2.4 Perkembangan Penduduk Kota Bekasi menurut JenisKelamin2015-2019	2-10
Tabel 2.5 Distribusi Penduduk menurut Kecamatan Kota Bekasi Tahun 2020	2-10
Tabel 2.6 Struktur Penduduk Kota Bekasi Tahun 2019	2-11
Tabel 2.7. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2020 dan 2021	2-14
Tabel 2.8. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional	2-16
Tabel 2.9. Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat 2019-2021.....	2-21
Tabel 2.10. Risiko Pertumbuhan Ekonomi 2020	2-21
Tabel 2.11. Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Bekasi 2020-2021.....	2-23
Tabel 2.12. Perkembangan Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi Menurut Harga Konstan 2010 Tahun 2015-2019.....	2-24
Tabel 2.13 Perkembangan Sumber Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi	2-27
Tabel 2.14 Perkembangan Nilai PDRB Menurut Harga Berlaku dan Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi di Kota Bekasi, 2015-2019	2-28
Tabel 2.15 Perbandingan Indeks dan Inflasi Maret 2020 Kota-Kota di Provinsi Jawa Barat dengan Jawa Barat dan Nasional.....	2-33
Tabel 2.16 Perkembangan PDRB per Kapita dan Laju Pertumbuhannya di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia, 2015-2019.....	2-34
Tabel 2.17 Perkembangan Persentase Status Gizi Balita di Kota Bekasi 2014-2019 ...	2-39
Tabel 2.18 Indeks Kepuasan Masyarakat (2015-2019).....	2-46
Tabel 2.19 Perkembangan Opini BPK terhadap LKPD Kota Bekasi, 2015-2019	2-47
Tabel 2.20 Nilai Tukar Petani Kota Bekasi	2-59
Tabel 2.21 Angka Kriminalitas Tertangani di Kota Bekasi.....	2-62
Tabel 2.22 Tabel Kerjasama dalam bentuk MoU Pemkot Bekasi 2017-2020.....	2-64
Tabel 2.23 Tabel Kerjasama dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Pemkot Bekasi 2017-2020	2-74
Tabel 2.24 Tabel Perjanjian Pemanfaatan Lahan PSU Pemkot Bekasi 2017-2020.....	2-82
Tabel 2.25 Jumlah Penumpang yang menggunakan kereta api tahun 2017.....	2-98
Tabel 2.26 Perbandingan Panjang Jalan dengan jumlah Kendaraan.....	2-99
Tabel 2.27 Rasio Jumlah Sekolah terhadap Jumlah Penduduk Usia Sekolah Dasar Kota Bekasi Tahun 2015- 2019.....	2-101
Tabel 2.28 Rasio Jumlah Sekolah terhadap Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menengah Kota Bekasi Tahun 2015 - 2019.....	2-102
Tabel 2.29 Rasio Jumlah Murid terhadap Kelas Pendidikan Dasar (SD/MI; SMP/MTS) Kota Bekasi Tahun 2016-2017.....	2-102

Tabel 2.30	Rasio Jumlah Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar Kota Bekasi, 2015- 2019	2-103
Tabel 2.31	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah Kota Bekasi, 2015 - 2019	2-103
Tabel 2.32	Perkembangan Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar, 2015 - 2019	2-104
Tabel 2.33	Capaian APM Menurut Jenjang Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat, 2019.....	2-105
Tabel 2.34	APK Menurut Jenjang Kota Bekasi dan Jawa Barat Tahun 2019	2-107
Tabel 2.35	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 - 2019	2-109
Tabel 2.36	Perkembangan Nilai MYS Kota Bekasi dan Jawa Barat	2-109
Tabel 2.37	Kondisi Akreditasi Sekolah di Kota Bekasi Tahun 2019	2-110
Tabel 2.38	Sarana Kesehatan Skala Kota Bekasi 2019.....	2-112
Tabel 2.39	Sarana Kesehatan Skala Kecamatan di Kota Bekasi.....	2-113
Tabel 2.40	Jumlah Kematian Bayi Kota Bekasi Tahun 2014 - 2020	2-116
Tabel 2.41	Beberapa Indikator Tentang Kematian Bayi dan Balita	2-117
Tabel 2.42	Beberapa Indikator Tentang Kesehatan Bayi dan Balita.....	2-118
Tabel 2.43	Banyaknya Angka Kematian Ibu di Kota Bekasi	2-119
Tabel 2.44	Beberapa Indikator Tentang Kesehatan Ibu	2-119
Tabel 2.45	Status Gizi Balita di Kota Bekasi Tahun 2013 - 2020.....	2-121
Tabel 2.46	Cakupan Layanan Balita Gizi Buruk, 2013-2017	2-121
Tabel 2.47	Jumlah Kasus TB Paru di Kota Bekasi Tahun 2013-2017	2-121
Tabel 2.48	Beberapa Indikator Layanan Penyakit Menular, 2013-2017	2-122
Tabel 2.49	Beberapa Indikator Tentang Layanan Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	2-124
Tabel 2.50	Daerah yang Belum Tersedianya Jaringan Air Bersih	2-129
Tabel 2.51	Tonase, Volume Sampah yang Masuk Ke TPA Sampah Sumur Batu Kota Bekasi.....	2-132
Tabel 2.52	Tingkat Pelayanan Persampahan Kota Bekasi Tahun 2016	2-132
Tabel 2.53	Perubahan stock lahan di Kota Bekasi 2009- 2014.....	2-136
Tabel 2.54	Perubahan penggunaan lahan Kota Bekasi 2009-2014	2-137
Tabel 2.55	Evaluasi Capaian Indikator RPJMD Urusan Sosial, Tahun 2014-2016.....	2-140
Tabel 2.56	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Kecamatan	2-140
Tabel 2.57	Beberapa Indikator Urusan Sosial 2016-2017	2-142
Tabel 2.58	Beberapa Indikator Urusan Tenaga Kerja 2013-2017.....	2-143
Tabel 2.59	Beberapa Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2-145
Tabel 2.60	IPG Kota Bekasi Tahun 2017-2019	2-147
Tabel 2.61	IDG Kota Bekasi Tahun 2018-2019.....	2-147
Tabel 2.62	Beberapa Indikator Urusan Lingkungan Hidup:.....	2-150
Tabel 2.63	Kriteria Indeks Standar Pencemar Udara.....	2-152
Tabel 2.64	Capaian Indikaor Dukcapil dari Tahun 2015-2017	2-153
Tabel 2.65	Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	2-154
Tabel 2.66	Beberapa Indikator Urusan Perhubungan	2-157

Tabel 2.67	Beberapa Indikator Urusan Penanaman Modal Komunikasi Informasi ...	2-159
Tabel 2.68	Beberapa Indikator Urusan Pemuda dan Olahraga	2-159
Tabel 2.69	Beberapa Indikator Urusan Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian	2-160
Tabel 2.70	Beberapa Indikator Urusan Perpustakaan.....	2-161
Tabel 2.71	Beberapa Indikator Urusan Kearsipan	2-162
Tabel 2.72	Beberapa Indikator Urusan Pariwisata	2-163
Tabel 2.73	Beberapa Indikator Urusan Kebudayaan	2-164
Tabel 2.74	Beberapa Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan	2-165
Tabel 2.75	Perkembangan Indikator ASN Kota Bekasi 2013-2017	2-166
Tabel 2.76	Penjelasan SPM Dasar menurut bidang.....	2-168
Tabel 2.77	Jenis Tindakan Menurut Tingkatan Pemerintah.	2-169
Tabel 2.78	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Sesuai Standar Pelayanan Minimum dan Target Pembangunan	2-173
Tabel 2.79	Ketercapaian Kinerja Pemerintahan	2-187
Tabel 2.80	Faktor Keberhasilan Terpenuhinya Atau Terlampauinya Target Kinerja Program	2-189
Tabel 2.81	Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program dan Pemecahan Masalahnya.	2-191
Tabel 2.82	Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kota Bekasi.....	2-194
Tabel 2.83	Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan tapi Belum Mencapai Target Nasional di Kota Bekasi.....	2-195
Tabel 2.84	Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional, dan Indikator yang Tidak Memiliki Data di Kota Bekasi	2-196
Tabel 2.85	Capaian Jumlah Indikator TPB Kota Bekasi Terhadap Target Nasional	2-197
Tabel 2.86	Capaian Indikator TPB Kota Bekasi Terhadap Target Nasional.....	2-198
Tabel 2.87	Potensi Ketersediaan Air di Kota Bekasi Menurut Luasan Eksisting.....	2-199
Tabel 2.88	Potensi Ketersediaan Air di Kota Bekasi Menurut Luasan Rencana Pola Ruang.....	2-200
Tabel 2.89	Kebutuhan Air di Kota Bekasi.....	2-202
Tabel 2.90	Proyeksi Status Daya Dukung Air Kota Bekasi Tahun 2017-2036.....	2-203
Tabel 2.91	Hasil Perhitungan Nilai Produksi Total Kota Bekasi	2-203
BAB III	GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH.....	3-1
Tabel 3.1	Realisasi dan Rata-rata Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2015-2019	3-2
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2015-2019	3-5
Tabel 3.3	Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Bekasi 2013-2019 (Dalam Rupiah)	3-7
Tabel 3.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2015-2019.....	3-9
Tabel 3.5	Proporsi Realisasi Komponen Belanja Terhadap Total Belanja Daerah Kota Bekasi 2013-2019 (Dalam Rupiah dan %).....	3-11
Tabel 3.6	Rata-rata Neraca Daerah Kota Bekasi, 2013-2017	3-14
Tabel 3.7	Analisis Rasio Neraca Daerah Kota Bekasi, 2013-2017	3-16
Tabel 3.8	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bekasi.....	3-18
Tabel 3.9	Defisit Rill Anggaran Kota Bekasi, 2013-2019	3-19

Tabel 3.10	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Bekasi, 2013-2017.....	3-19
Tabel 3.11a	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 s/d tahun 2020 Kota Bekasi (Rupiah)	3-29
Tabel 3.11.b	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2023 Kota Bekasi (Rupiah)	3-30
Tabel 3.12	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Bekasi, 2019-2023	3-32
Tabel 3.13	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bekasi 2019-2023	3-37

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA BEKASI TAHUN

2018-2023		4-1
Tabel 4.1	Struktur Permintaan Akhir Ekonomi Kota Bekasi	4-6
Tabel 4.2	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kategori Lapangan Usaha dan Skala Usaha Tahun 2019	4-8
Tabel 4.3	Banyaknya Pencari Kerja yang Terdaftar dan Penempatannya Menurut Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2016-2019	4-9
Tabel 4.4	Indeks Derajat Kepekaan Ekonomi Kota Bekasi	4-10
Tabel 4.5	Indeks Derajat Penyebaran Ekonomi Kota Bekasi	4-11
Tabel 4.6	Capaian Kinerja APM Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Bekasi Tahun 2015-2019	4-20
Tabel 4.7	Perumusan Isu Berdasarkan Kesepakatan Pemangku Kepentingan	4-37
Tabel 4.8	Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial	4-41
Tabel 4.9	Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi	4-46
Tabel 4.10	Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan	4-49
Tabel 4.11	Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan.....	4-57
Tabel 4.12	Matriks Penelaahan Integrasi KLHS Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023	4-62

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Tabel 5.1	Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023	5-4
Tabel 5.2	Penjabaran Indikator Kinerja	5-5

BAB VI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Bekasi 2018-2023	6-9
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023	6-15
Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif	6-16

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT

DAERAH		7-1
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 – 2023.....	7-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan	7-4

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	8-1
Tabel 8.1 Indikator Kinerja makro Kota Bekasi 2018-2023	8-1
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Bekasi 2018-2023	8-2
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	8-3

DAFTAR GAMBAR	HAL
BAB I PENDAHULUAN	1-1
Gambar 1-1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	1-14
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	 2-1
Gambar 2-1 Peta Batas Administrasi Kota Bekasi	2-1
Gambar 2-2 Kondisi Cuaca	2-3
Gambar 2-3 DAS yang meliputi Kota Bekasi.....	2-4
Gambar 2-4 Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kota Bekasi.....	2-6
Gambar 2-5 Peta Gerakan Tanah yang dikelola dalam SIPD.....	2-7
Gambar 2-6 Piramida Penduduk Kota Bekasi Tahun 2019	2-12
Gambar 2-7 Pertumbuhan Ekonomi Dunia 2009 dan 2020	2-13
Gambar 2-8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulanan (y-o-y), 2016-2020	2-15
Gambar 2-9 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1995-2020	2-16
Gambar 2-10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat dibandingkan Nasional Tahun 2015-2019 yang dikelola dalam SIPD	2-17
Gambar 2-11 Pertumbuhan PDRB Jawa Barat Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2020 (y-on-y).....	2-18
Gambar 2-12 Sumber Pertumbuhan PDRB Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha.....	2-18
Gambar 2-13 Pertumbuhan PDRB Jawa Barat Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2020 (q-to-q).....	2-19
Gambar 2-14 Pertumbuhan PDRB Jawa Barat Beberapa Komponen Triwulan I-2020 (y-on-y).....	2-20
Gambar 2-15 Sumber Pertumbuhan PDRB Jawa Barat Menurut Pengeluaran	2-20
Gambar 2-16 Pertumbuhan Beberapa Komponen PDRB Pengeluaran Jawa Barat....	2-21
Gambar 2-17 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi, Jawa Barat, dan Nasional	2-25
Gambar 2-18 Perbandingan Rencana PAD Tahun 2020 dengan Proyek Realisasi pada Berbagai Skenario Dampak Bencana COVID-19	2-26
Gambar 2-19 Struktur Ekonomi Kota Bekasi, 2019 (Persen)	2-29
Gambar 2-20 Sektor-sektor Ekonomi yang Memiliki Kecenderungan Kontribusi Meningkat di Kota Bekasi, 2013-2019	2-30
Gambar 2-21 Sektor-sektor Ekonomi yang Mengalami Tren Kontribusi Menurun di Kota Bekasi, 2013-2019	2-30
Gambar 2-22 Matriks Empat Kuadran Tren Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi di Kota Bekasi, 2015-2019	2-31
Gambar 2-23 Perkembangan Inflasi Kota Bekasi, Maret 2019-2020 (Persen)	2-33
Gambar 2-24 Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia 2015-2019 yang dikelola dalam SIPD.....	2-35
Gambar 2-25 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020.....	2-35
Gambar 2-26 Garis Kemiskinan Kota Bekasi Tahun 2015-2019	2-35
Gambar 2-27 Perkembangan Rasio Kesenjangan Kemiskinan di Kota Bekasi, 2015-2019	2-36

Gambar 2-28	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya, Tahun 2015-2019	2-37
Gambar 2-29	Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah	2-38
Gambar 2-30	Perkembangan Beberapa Indikator Ketenagakerjaan di Kota Bekasi, 2015-2019	2-41
Gambar 2-31	Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	2-43
Gambar 2-32	Perkembangan Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Bekasi, 2013-2015.....	2-45
Gambar 2-33	Perkembangan Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bekasi, 2015-2019.....	2-46
Gambar 2-34	Perkembangan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan di Kota Bekasi, 2013-2020	2-48
Gambar 2-35	Perkembangan Nilai Tambah dan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kota Bekasi, 2015-2019	2-50
Gambar 2-36	Perkembangan Produksi Palawija di Kota Bekasi, 2015-2019 (Ton).....	2-51
Gambar 2-37	Perkembangan Produksi Sektor Pertanian di Kota Bekasi, 2015-2019 ..	2-51
Gambar 2-38	Perkembangan Produksi Kebun Rakyat di Kota Bekasi, 2015-2019	2-53
Gambar 2-39	Perkembangan Jumlah Perusahaan Perdagangan di Kota Bekasi, 2015-2019.....	2-55
Gambar 2-40	Perkembangan Nilai Tambah dan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Bekasi, 2015-2019	2-55
Gambar 2-41	Perkembangan Nilai Tambah dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB di Kota Bekasi, 2015-2019	2-56
Gambar 2-42	Perkembangan Jumlah Industri dan Tenaga Kerja di Industri Menengah Besar di Kota Bekasi, 2013-2020.....	2-57
Gambar 2-43	Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga 2015-2019.....	2-58
Gambar 2-44	Nilai Tukar Petani	2-58
Gambar 2-45	Komponen Pengeluaran Rumah Tangga.....	2-59
Gambar 2-46	Produktivitas Total Daerah.....	2-60
Gambar 2-47	Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB	2-61
Gambar 2-48	Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Bekasi	2-60
Gambar 2-49	Akses Rumah Tangga terhadap Air Bersih	2-99
Gambar 2-50	Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi	2-100
Gambar 2-51	Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Kota Bekasi Tahun 2015 – 2019.....	2-104
Gambar 2-52	Perkembangan APM SD Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat.....	2-105
Gambar 2-53	Perkembangan APM SMP Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat	2-106
Gambar 2-54	Perkembangan APM SMA Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019	2-106
Gambar 2-55	Perkembangan APK SD Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 -2019	2-107
Gambar 2-56	Perkembangan APK SMP Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2019.....	2-108
Gambar 2-57	Perkembangan APK SMA Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2019.....	2-108
Gambar 2-58	Proporsi Kualifikasi Guru Kota Bekasi 2019 yang dikelola dalam SIPD.....	2-110

Gambar 2-59	Pendidik Tersertifikasi di Kota Bekasi, 2019	2-111
Gambar 2-60	Rata-Rata Hasil UKG Kota Bekasi Menurut Jenjang Tahun 2015	2-111
Gambar 2-61	Kapasitas Jaringan Jalan Utama Kota Bekasi.....	2-126
Gambar 2-62	Peta V/C Rasio Jaringan Jalan Kota Bekasi	2-127
Gambar 2-63	Wilayah Potensi Banjir Kota Bekasi.....	2-135
Gambar 2-64	Kesesuaian rencana alokasi ruang dengan pemanfaatannya	2-137
Gambar 2-65	Sebaran Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Bekasi.....	2-139
Gambar 2-66	Perkembangan Jumlah Wisatawan di Kota Bekasi 2013-2020	2-163
Gambar 2-67	Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kota Bekasi	2-195
Gambar 2-68	Persentase Capaian Jumlah Indikator TPB Terhadap Target Nasional	2-199
BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH		3-1
Gambar 3-1	Pertumbuhan Rata-Rata PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain dan Total Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2013-2019 (%)	3-6
Gambar 3-2	Proporsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2013-2017 (%)	3-8
Gambar 3-3	Pertumbuhan Rata-rata Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Belanja Daerah Kota Bekasi, 2013-2019	3-10
Gambar 3-4	Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah Kota Bekasi, 2013-2017	3-11
Gambar 3-5	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2019-2023	3-22
Gambar 3-6	Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2020-2023 (%)	3-23
Gambar 3-7	Realisasi Pajak Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2020.....	3-24
Gambar 3-8	Realisasi Retribusi Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2020	3-24
Gambar 3-9	Proyeksi Belanja Daerah Kota Bekasi, 2020-2023.....	3-25
Gambar 3-10	Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Bekasi, 2020-2023 (%)	3-26
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA BEKASI TAHUN 2018-2023		4-1
Gambar 4-1	Tahapan Pembangunan Kota Bekasi	4-2
Gambar 4-2	Garis Besar Komponen Struktur Perekonomian Kota	4-3
Gambar 4-3	Kinerja Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Ekonomi	4-4
Gambar 4-4	Struktur Input Ekonomi Kota Bekasi	4-5
Gambar 4-5	Struktur Pasar Produk Ekonomi Kota Bekasi	4-6
Gambar 4-6	Kinerja Struktur Tenaga Kerja Kota Bekasi	4-9
Gambar 4-7	Derajat Tingkat Perkembangan Wilayah Kota Bekasi	4-13
Gambar 4-8	Jumlah Penduduk Miskin Kota Bekasi 2013-2018	4-14
Gambar 4-9	Jumlah Pengangguran Terbuka Kota Bekasi 2013-2018	4-15
Gambar 4-10	Perkembangan Produktivitas Total Daerah Kota Bekasi	4-17
Gambar 4-11	Struktur Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Bekasi	4-24
Gambar 4-12	Rumusan Isu Strategis Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023.....	4-36

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	5-1
Gambar 5-1 Arsitektur Visi Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi 2018-2023	5-4
BAB VI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM	6-1
Gambar 6-1 Kerangka Strategi Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023	6-3
Gambar 6-2 Sinkronisasi Agenda Prioritas Pembangunan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 dengan Arahkan Presiden dan Agenda Pembangunan RPJMN 2019-2024	6-8
Gambar 6-3 Tahapan Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023	6-14



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah lima tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional.

Pemerintah Kota Bekasi telah menyusun RPJMD Tahun 2018-2023 melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023¹. RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih DR. Rahmat Effendi dan DR. Tri Adhianto Cahyono yang dilantik pada tanggal 20 September 2018 untuk masa kerja selama 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi Tahun 2005-2025², Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, dan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024³ dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023⁴. RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan, dan program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka

¹ Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 08 Seri E.

² Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E).

³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).

⁴ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8).

pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang secara substantif memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta bersifat indikatif. Selain dari itu, RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2018 juga digunakan sebagai landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya, dimulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 merupakan peta jalan (*roadmap*) tahap ke-4 dari rencana jangka panjang Kota Bekasi yang tertuang dalam RPJPD Kota Bekasi Tahun 2005-2025. Sesuai amanah RPJPD Kota Bekasi 2005-2025, maka tema pembangunan pada RPJMD Tahun 2018-2023 adalah ”perwujudan struktur perekonomian Kota yang semakin kokoh dan kompetitif guna peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga di masa yang akan datang”. Upaya mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh dan kompetisi tersebut antara lain didukung dengan upaya memperkuat peran sektor ekonomi kreatif kota yang memiliki potensi dan peluang yang cukup besar di Kota Bekasi dalam 5 (lima) tahun terakhir ini. Berdasarkan amanah tersebut serta diintegrasikan dengan permasalahan, isu strategis serta visi misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, maka dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 diharapkan mampu menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bekasi dalam kerangka waktu tahun 2018-2023.

Dalam implementasinya, saat memasuki tahun kedua masa RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Kota Bekasi dan sekitarnya (DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten Bekasi) dilanda kejadian luar biasa, yaitu bencana alam banjir dan bencana non-alam wabah pandemi COVID-19 yang keduanya berdurasi cukup lama, sehingga mengganggu bahkan berpotensi mempengaruhi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Mengawali hari pertama di tahun 2020, wilayah Kota Bekasi terendam banjir yang melanda beberapa permukiman warga serta pusat perbelanjaan dan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga amat mengganggu kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan di sebagian besar wilayah Kota Bekasi.⁵ Berikutnya terjadi bencana non-alam wabah pandemi COVID-19 yang dahsyat dan mengguncang perekonomian serta menurunkan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Selama Triwulan I Tahun 2020 saja Kota Bekasi telah mengalami inflasi yang cukup tinggi⁶. Dampak yang luar biasa dirasakan langsung oleh sektor ketenagakerjaan di kota ini, antara lain terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 36 persen pekerja swasta, jumlah pekerja yang dirumahkan mencapai 20 persen, dan jumlah pekerja yang diliburkan mencapai 44 persen.

Perlu evaluasi dan perubahan/kaji ulang (*review*) dalam menetapkan berbagai asumsi dalam menyusun dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang lebih responsif dan menekankan pada proses pengambilan keputusan sistematis yang berfokus pada isu-isu kekinian

⁵ Rilis resmi Walikota: ini merupakan siklus 20 tahunan yang paling ekstrim sebagai dampak aliran Kali Bekasi, Kali Cileungsi, dan Kali Cikeas. Di beberapa permukiman warga ketinggian air hingga 2,5 meter. Informasi dari Pusdalpos BPBD Kota Bekasi terdata sebanyak 90 titik banjir, lima lokasi longsor, dan 379 jumlah sekolah terendam banjir.

⁶ Berita Resmi Statistik dari Kantor BPS Kota Bekasi menyebut angka inflasi Kota Bekasi selama Triwulan I Tahun 2020 sebesar 1,05 yang terdiri atas bulan Januari 0,38; bulan Februari 0,38; dan bulan Maret 0,39.

seperti terjadinya bencana alam dan bencana non-alam seperti di atas. Setidaknya perlu menyiapkan kebijakan dan upaya antisipatif terhadap melemahnya perekonomian masyarakat melalui review dokumen dengan memanfaatkan dan mempertimbangkan data pendukung yang kekinian. Pada gilirannya, upaya ini akan mereformulasi permasalahan dan isu strategis pemulihan ekonomi sehingga sedapat mungkin tidak akan mengganggu secara signifikan target-target yang ditetapkan dalam misi pembangunan sampai dengan tahun 2023.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang mendasari penyusunan dan review RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus-utamaan Gender dalam Pembangunan;
29. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 39. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 40. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
 42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
 43. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
 44. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);

45. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);
46. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
47. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
48. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
49. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 903/407/Bappelitbangda tentang Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dan Pengadaan Barang/Jasa Sebagai Dampak Pandemi COVID-19 Melalui *Refocussing* Kegiatan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), rencana pembangunan kabupaten/kota merupakan bagian dari rencana pembangunan provinsi, demikian juga rencana pembangunan provinsi merupakan bagian dari rencana pembangunan nasional. Dengan demikian bahwa dokumen RPJP Nasional menjadi pedoman penyusunan RPJP Provinsi dan RPJPD Provinsi menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota. Begitu juga RPJMN Nasional menjadi pedoman penyusunan RPJMD Provinsi dan RPJMD Provinsi menjadi pedoman penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031, dan mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Selain dokumen-dokumen perencanaan tersebut, perlu memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, antara lain: (1) Agenda Pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs); (2) RPJMD dan RTRW kabupaten/kota sekitarnya; dan (3) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bekasi 2018-2023.

1.3.1 Agenda Pembangunan *Sustainable Development Goals*

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan berkelanjutan pasca 2015 yang memberikan arahan tentang pentingnya 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang harus bersinergi dalam pembangunan global ke depan. SDGs dicanangkan untuk melanjutkan tujuan utama MDGs yang belum tercapai, yang antara lain permasalahan kesehatan ibu dan anak, akses terhadap air bersih dan sanitasi, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta status nutrisi. Selain itu, SDGs juga terbuka bagi beberapa isu pembangunan yang muncul sejak MDGs lahir di tahun

2000, seperti ketersediaan anggaran, perubahan iklim, ketersediaan energi, dan lainnya. Agenda ini diimplementasikan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dokumen ini merupakan kiblat pembangunan ekonomi global, dan Indonesia memiliki “batas akhir” pencapaian target-targetnya pada tahun 2030. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator, sebagaimana terinci pada Tabel 1.1.

Terkait dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM, peningkatan kesejahteraan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, penurunan kesenjangan, serta peningkatan kemitraan. Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah Kota Bekasi mengadopsi strategi melalui empat jalur pembangunan, yaitu: *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment*.

Tabel 1.1
Daftar *Sustainable Developments Goals* (SDGs)
(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017)

No	Tujuan Pembangunan	Σ Target
1.	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun	7 target
2.	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan	8 target
3.	Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia	13 target
4.	Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang	10 target
5.	Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan	9 target
6.	Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang	8 target
7.	Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang	5 target
8.	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang	12 target
9.	Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yg inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi	8 target
10.	Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar Negara	10 target
11.	Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan	10 target
12.	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	11 target
13.	Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya	5 target
14.	Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumberdaya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan	10 target
15.	Melindungi, memperbaiki, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati	12 target

16.	Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yg efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan	12 target
17.	Memperkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	19 target

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Kebijakan pembangunan nasional dalam RPJPN Tahun 2005-2025 secara umum adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Kebijakan pembangunan nasional dalam RPJPN Tahun 2005-2025 tersebut memberikan tantangan bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan daya saing daerah melalui keunggulan kompetitif perekonomian, kualitas sumberdaya manusia, dan kemampuan ilmu pengetahuan, serta teknologi yang tinggi.

1.3.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Kebijakan pembangunan nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024. Visi tersebut adalah "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan", yang dilakukan melalui 7 (tujuh) agenda pembangunan lima tahun ke depan:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan mensejahterakan secara adil dan merata.
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.
- 3) Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdayasaing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.
- 4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdayasaing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

- 7) Memperkuat stabilitas polhuhankam dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024, ditetapkan 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai kerangka 17 kaidah pembangunan, yaitu:

1. Membangun Kemandirian

Berupaya memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang mumpuni dalam pembangunan baik pengelolaan sumberdaya alam, tata kelola pemerintahan dan pengambilan keputusan, dengan beberapa kaidah pembangunan antara lain:

- Memiliki kecukupan sumberdaya manusia yang memiliki *skill* dan kecakapan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan;
- Mampu mendorong tumbuhnya ilmu pengetahuan dan teknologi berkualitas dan tidak lagi pada prinsip asimetris terhadap bangsa lain dan bernilai budaya bangsa;
- Memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas, tanggung jawab, dan pelayanan kepada bangsa sendiri;
- Menjadi negara yang selalu aktif, terbuka dalam bekerjasama dalam memberikan pengaruh terhadap kemajuan bangsa dan negara Indonesia; dan
- Melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia.

2. Menjamin Keadilan

Keadilan adalah pembangunan yang dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warganegara, bersifat proporsional, dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, dengan beberapa kaidah pembangunan antara lain:

- Mengembangkan pola distribusi yang berimbang antara input dengan output dalam mempertahankan keseimbangan dalam berbangsa dan bernegara;
- Keseimbangan dan konsistensi dalam upaya penetrasi pembangunan untuk sampai kepada masyarakat pada level minimum yang diharapkan;
- Memberikan *share* yang seimbang dalam pencapaian pembangunan untuk mengurangi kesenjangan wilayah secara bertanggungjawab;
- Bersikap *inclusive* atas setiap pencapaian dan evaluasi pembangunan untuk melakukan koreksi serta perbaikan yang menjunjung tinggi pemerataan;
- Kepercayaan dan tanggung jawab atas keputusan rencana pembangunan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang berkualitas; dan
- Kesetaraan akses dalam setiap perencanaan, program, dan implementasi sehingga tiap orang paham hak & kemampuannya dalam berpartisipasi thd pembangunan.

3. Menjaga Keberlanjutan

Keberlanjutan adalah memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti, dengan beberapa kaidah pembangunan antara lain:

- Melakukan penguatan, percepatan dan pengelolaan pembangunan dengan mempertimbangkan kemampuan dasar bangsa atas kecukupan dan ketersediaan fondasi ekonomi;
- Menciptakan sebuah kerangka pembangunan untuk menumbuhkan sistem ekonomi pembangunan yang sehat antara input, proses, dan output pembangunan sehingga tidak menyebabkan terjadinya defisiensi;
- Mempertimbangkan keberadaan dan pola sosial budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat untuk menumbuhkan tatanan pengelolaan pembangunan *inclusive* dan interaksi sosial sebagai sebuah *supporting system* dalam koherensi pembangunan;
- Terpatrynya orientasi sikap (*attitude*) yang bertanggungjawab sebagai basis nilai dan etika universal untuk mengikat keberagaman bangsa dalam menciptakan tata pembangunan yang maju;
- Penguatan komitmen dalam menjamin terciptanya keseimbangan antara tujuan pembangunan manusia dengan kemampuan alam dan lingkungan; dan
- Bersifat *inclusive* dalam mengadaptasikan berbagai dinamika pembangunan dengan pendekatan dan keilmuan yang mampu menumbuhkan sistem tata nilai yang bertanggung jawab secara integratif.

Lima fokus kerja Presiden Republik Indonesia pada kurun 2020-2024 ini, yaitu:

1. Pembangunan sumberdaya manusia, dengan prioritas utama:
 - membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai iptek;
 - mengundang kerjasama dengan talenta-talenta global;
 - mengoptimalkan kerjasama dengan industri; dan
 - penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.
2. Pembangunan infrastruktur, dengan prioritas utama:
 - menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi;
 - mempermudah akses ke kawasan wisata;
 - mendongkrak lapangan kerja baru; dan
 - mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan regulasi, dengan prioritas utama:
 - menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan
 - merevisi undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM.

4. Penyederhanaan birokrasi, dengan prioritas utama:
 - pemangkasan prosedur dan birokrasi;
 - penyederhanaan eselonisasi dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi; dan
 - serius dalam pencapaian tujuan program pembangunan.
5. Transformasi ekonomi, dengan prioritas utama transformasi dari ketergantungan kepada sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tantangan RPJMN 2020-2024 dan fokus kerja Presiden bagi Pemerintah Daerah Kota Bekasi adalah: (1) mewujudkan kota cerdas dan layak huni; (2) membuka partisipasi publik yang dilandasi nilai-nilai kreatif dan inovatif; (3) membangun daya saing dan anti korupsi untuk menumbuhkan investasi; (4) mewujudkan *open government* serta politik legislasi yang kuat; (5) menjunjung tinggi harkat manusia dan menegakkan HAM; dan (6) perlindungan lingkungan hidup. RPJMN 2020-2024 secara umum mengharuskan pemerintah daerah termasuk Kota Bekasi membuat perencanaan pembangunan dengan memprioritaskan penataan kebijakan dan kelembagaan perangkat daerah yang bersih, demokratis, partisipatif, dan akuntabel untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

1.3.4 Hubungan RPJMD Kota Bekasi dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat

Penyelarasan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah daerah Kota Bekasi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk bidang-bidang pembangunan dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

1.3.5 Hubungan RPJMD Kota Bekasi dengan RPJPD Kota Bekasi

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, sehingga harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RPJPD Kota Bekasi Tahun 2005-2025

merupakan dokumen jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

1.3.6 Hubungan RPJMD Kota Bekasi dengan RKPD Kota Bekasi

Rencana pembangunan tahunan daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan “*RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat*”. Juga, Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan: “*RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat*”.

1.3.7 Hubungan RPJMD Kota Bekasi dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah yang merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD.

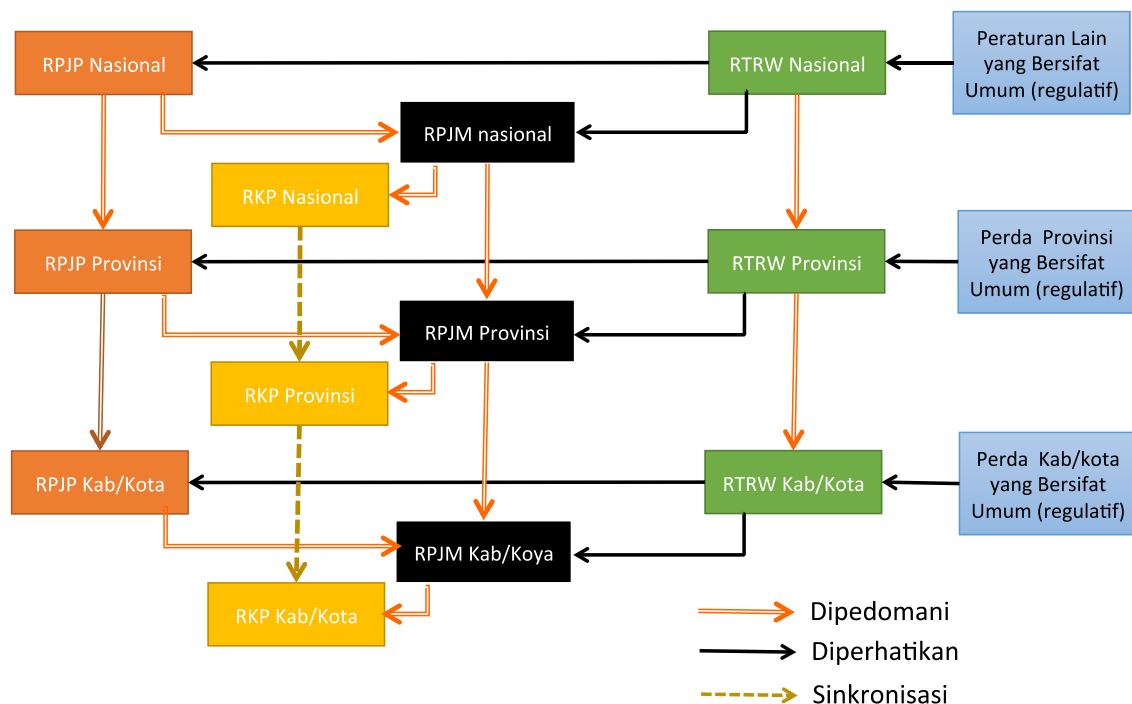
1.3.8 Hubungan RPJMD Kota Bekasi dengan RTRW Kota Bekasi

Penyusunan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031. Berpedoman pada RTRW dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kota Bekasi dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang.

1.3.9 Hubungan RPJMD Kota Bekasi dengan KLHS RPJMD Kota Bekasi

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS RPJMD adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS RPJMD adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam Renstra Perangkat Daerah).

Secara garis besar hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 pada bagian berikutnya.



Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi dalam menentukan prioritas program tahunan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada periode 2019-2023.
2. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah dan memberikan pemahaman mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Bekasi jangka menengah 2018-2023 serta sebagai landasan pencapaian visi misi maupun jangka panjang hingga 2025.
3. Menjamin terciptanya sinkronisasi kebijakan dalam kerangka koordinasi, integrasi, dan sinergi kebijakan antar pelaku pembangunan (*stakeholders*).
4. Menyediakan indikator dan target kinerja untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah pada periode 2018-2023.
5. Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan sesuai arahan dan tahapan pembangunan jangka panjang Kota Bekasi.

1.4. PROFIL KEPEMIMPINAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI

Sejak dilantik pada 20 September 2018 Rahmat Effendi kembali menjadi Walikota dan Tri Adhianto menjadi Wakil Walikota periode 2018 sampai dengan 2023. Kerja keras dalam kepemimpinan selama akhir tahun 2018 sampai awal tahun 2020 berusaha mengoptimalkan

pemasukan target PAD serta merasionalisasi belanja, sehingga proses pembayaran tunda bayar bersama seluruh aparatatur Pemerintah Kota Bekasi dapat memperbaiki keadaan dan berjalan efektif sehingga pada tahun 2019 dapat terselesaikan.

Pada saat kelanjutan pelaksanaan APBD 2018 terjadilah turbulensi yang sangat tinggi, dengan terjadinya ketidakseimbangan fiskal dan dengan tidak tercapainya target maksimal pendapatan dan pembiayaan pelaksanaan pembangunan yang berjalan terus dengan tidak adanya pengendalian dan evaluasi yang terstruktur sehingga terjadilah proses tunda bayar. Selanjutnya, untuk mencegah hal-hal tersebut terulang lagi, dilakukan simplifikasi perijinan, peningkatan kinerja, membuat peraturan mengenai perencanaan dan penganggaran, evaluasi kegiatan, proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan pendampingan terhadap para perangkat daerah. Proses “penyelamatan” tersebut sudah terbukti dengan diraihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD 2018 yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Kota Bekasi.

Gelombang perubahan yang terus-menerus melanda hampir semua sisi kehidupan, pada akhirnya berkembang menjadi perubahan yang berlangsung lama dan memaksa semua kota untuk selalu siap menerima, memahami, mengantisipasi mengelola dan menyesuaikan diri pada perubahan itu sendiri serta harus selalu siap untuk melakukan perubahan. Implementasi dari kepemimpinan dalam berbagai *role* dan *model* terutama dalam konteks kepemimpinan dalam usaha menuju Masyarakat yang Cerdas, Masyarakat yang Kreatif, Masyarakat yang Maju dan Sejahtera serta Masyarakat yang Ihsan, yaitu menjadi Kota berbudaya namun mampu berinteraksi dengan dunia luar yang modern sehingga dapat terus berkembang dan maju. Dalam upaya mewujudkan harapan, tak seperti membalikan telapak tangan, butuh niat dalam menggapai semua impian agar rakyat betul-betul merasakan hadirnya sosok pemimpin yang diidamkan. Kepastian menjawab berbagai tantangan, dari bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, serta aspek perwujudan sebuah karya pembangunan yang benar-benar dapat dirasakan.

Di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan masyarakat menjadi perhatian penuh Pemerintah Kota Bekasi. Hadirnya Kartu Sehat dan Layanan Kesehatan Masyarakat (LKM) sebagai jawaban masyarakat untuk mendapatkan jaminan pembiayaan kesehatan yang layak, pembangunan fasilitas kesehatan yang kini hadir diwujudkan dengan adanya RSUD tipe D yang berada di beberapa kecamatan, perluasan layanan kesehatan bagi masyarakat, serta fasilitas yang dibarengi dengan peralatan modern juga telah terwujud. Di bidang pendidikan, guna merealisasikan Visi Cerdas, Pemerintah Kota Bekasi sangatlah intens dalam membangun generasi unggul, itu diwujudkan melalui pendidikan yang berkualitas, berbagai program beasiswa baik prestasi di bidang akademis maupun non-akademis. Penambahan unit sekolah baru, peningkatan fasilitas penunjang yang mendukung proses belajar-mengajar, serta peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik. Disamping itu, peluncuran Mal Pelayanan Publik (MPP) yang bertujuan semakin mendekatkan jarak dengan pemohon, bukan hanya itu, Pemerintah Kota Bekasi juga memperdekat pelayanan administrasi di setiap kecamatan yang ada di Kota Bekasi. Peluncuran “Transpatriot” telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi yang bertujuan untuk menyediakan layanan transportasi umum yang layak, aman dan nyaman bagi masyarakat. Juga, layanan transportasi ini mengurangi dampak dari polusi dan menjadi solusi bagi kemacetan. Infrastruktur yang telah berjalan yakni Pembangunan Jembatan Simpang Lima Caman-Bekasi dengan lebar 10,5 meter dibangun menggunakan dana APBD Kota Bekasi.

Pembangunan jembatan tersebut bertujuan untuk meminimalisir persoalan macet di Simpang Lima Jatibening. Jembatan Kemang Pekayon yang panjangnya sekitar 60 meter, telah dibangun dengan dana bersumber dari APBD Kota Bekasi. Pembangunan gedung baru imigrasi dilakukan dengan membangun Kantor Imigrasi Kelas II. Dengan kantor baru ini diharapkan pelayanan dapat ditingkatkan dan masyarakat dapat merasakan dampak pembangunan. Sebelumnya, Kantor Imigrasi kelas II berada di Komplek GOR Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Kayuringin, Kota Bekasi. Setelah adanya memorandum kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Imigrasi dipindah ke Jalan Perjuangan, Teluk Pucung, Kota Bekasi.

Pembangunan gedung imigrasi menggunakan APBD Kota Bekasi, dengan luas 4.020 m² dibangun atas dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pemerintah Kota Bekasi juga membangun jalan baru Jakasetia-Pekayon, sepanjang 2,3 kilometer. Walikota Bekasi menegaskan masih banyak kekurangan dalam kepemimpinan bersama Wakil Walikota, akan tetapi akan terus bekerja dengan *think out of the box* dan tidak secara linier karena tetap berkomitmen untuk membuat warga Kota Bekasi merasakan hasil pembangunan dari bayar pajak.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi Tahun 2005-2025, RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031, dan RPJMN Tahun 2020-2024.

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 ini disusun dengan maksud untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan mengikuti, dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan terkait latar belakang penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, dasar hukum perencanaannya, maksud, dan tujuan penyusunan serta sistematika penyajian dokumen.

Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi penjelasan terkait gambaran umum kondisi daerah meliputi kondisi geografi, demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, serta evaluasi capaian pembangunan RPJMD Tahun 2013-2018.

Bab 3 Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini berisi penjelasan terkait gambaran keuangan daerah yang meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan anggaran, dan kerangka pendanaan serta beberapa komponen keuangan lainnya seperti komponen pendapatan, komponen belanja, kapasitas fiskal, neraca pendapatan dan belanja, serta aspek pembiayaan pembangunan.

Bab 4 Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Kota Bekasi

Bab ini berisi penjelasan terkait permasalahan dan isu strategi pembangunan daerah yang terjadi pada masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa mendatang. Permasalahan menggambarkan *gap* antara target pembangunan dengan capaian pembangunan sesuai bidang urusannya, sementara isu strategis membahas terkait permasalahan yang dapat berdampak luas bagi pembangunan Kota Bekasi.

Bab 5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Bab ini berisi penjelasan terkait visi misi pembangunan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang merupakan visi misi kepala daerah terpilih serta penjabarannya pada tujuan, sasaran, dan indikator sasaran pembangunan.

Bab 6 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan

Bab ini berisi penjelasan rumusan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan visi misi tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Bab 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini berisi penjelasan berbagai program pembangunan daerah, indikator kinerja dan target kinerja outcome beserta pagu indikatif seluruh Perangkat Daerah untuk melaksanakan arah kebijakan setiap tahun yang telah dirumuskan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Bab 8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini berisi penjelasan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walokota pada akhir periode masa jabatan, yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah yang merupakan indikator penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bab 9 Penutup

Bab ini berisi penjelasan hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam mengimplementasikan RPJMD secara terpadu dan berkelanjutan.



BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

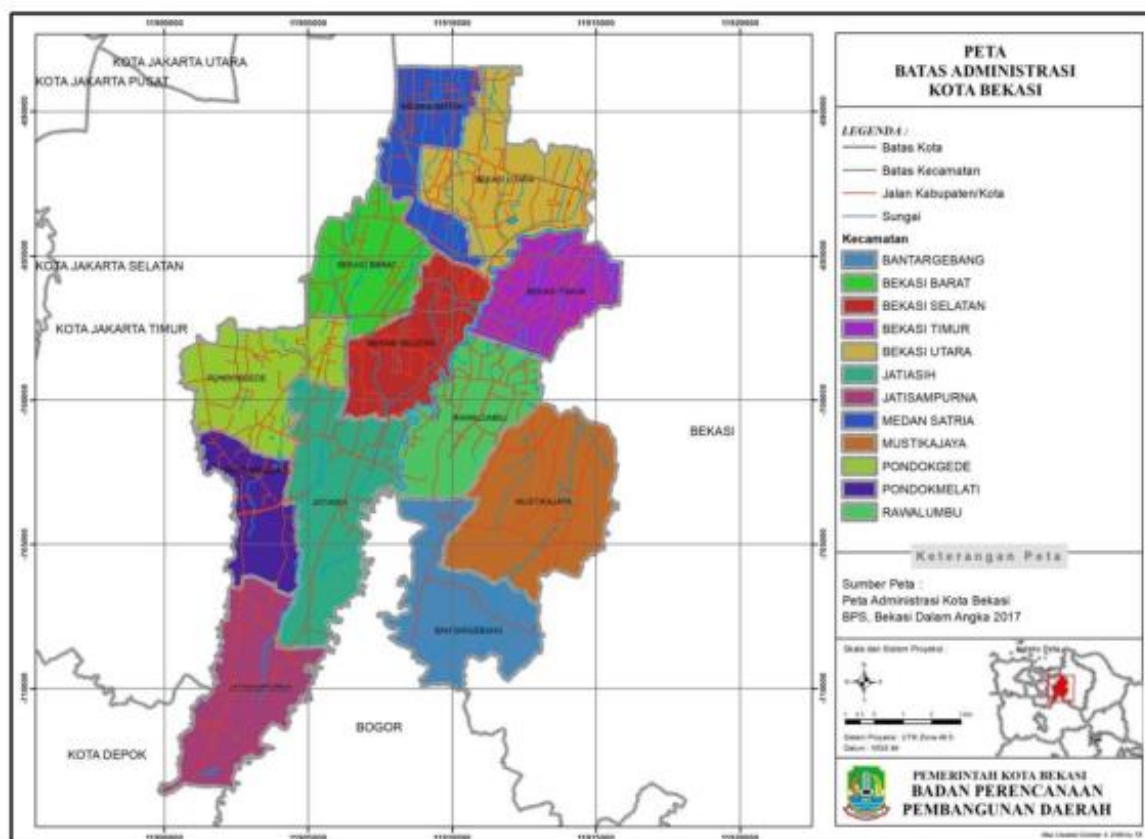
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Aspek Geografi

Kota Bekasi yang merupakan salah satu wilayah bagian dari Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km² atau 21.049 ha, dengan batas administrasi sebagai berikut:

- ✓ Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi.
- ✓ Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok.
- ✓ Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta.
- ✓ Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi.

Sedangkan secara astronomis, wilayah Kota Bekasi terletak pada 106°48'28" – 107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6" – 6°30'6" Lintang Selatan.



Sumber: Bappeda Kota Bekasi, 2017 yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2-1 Peta Batas Administrasi Kota Bekasi

Secara geografis Kota Bekasi merupakan daerah perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta, sekaligus merupakan bagian dari perlintasan atau poros Sumatera – Jakarta – Jawa Tengah – Jawa Timur maupun poros Jakarta – Bandung. Kota Bekasi merupakan penyangga bagi Kota Jakarta. Dalam konteks nasional maupun regional, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kota Bekasi merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat). Kota Bekasi juga merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yang dalam PP tersebut dijelaskan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

Secara administrasi Kota Bekasi dibagi menjadi 12 wilayah kecamatan yaitu: Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Rawa Lumbu, Pondok Gede, Jati Asih, Pondok Melati, Mustika Jaya, Bantar Gebang, dan Jatisampurna. Kecamatan Mustika Jaya mempunyai wilayah yang paling luas yaitu 26,42 km², sedangkan Kecamatan Pondok Melati merupakan wilayah yang paling kecil yaitu 11,80 km². Dari 12 kecamatan, terbagi lagi menjadi 56 kelurahan, dimana setiap kecamatan dibagi sedikitnya menjadi 4 kelurahan. Pusat Kota Bekasi berada pada Kecamatan Bekasi Timur.

Tabel 2.1 Luas Kota Bekasi Dirinci Menurut Kecamatan

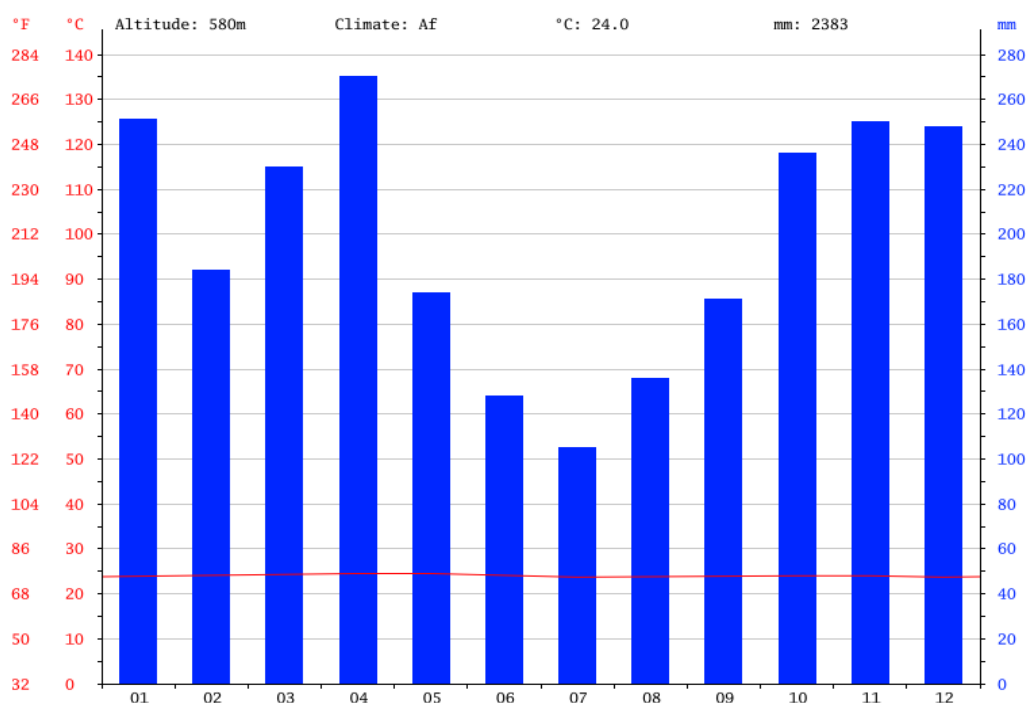
No	Kecamatan	Luas Wilayah	
		km ²	(%)
1	Pondok Gede	15,92	7,56
2	Jatisampurna	19,54	9,28
3	Pondok Melati	11,80	5,61
4	Jatiasih	24,27	11,53
5	Bantar Gebang	18,44	8,76
6	Mustika Jaya	26,42	12,55
7	Bekasi Timur	14,63	6,95
8	Rawalumbu	16,85	8,01
9	Bekasi Selatan	16,06	7,63
10	Bekasi Barat	14,93	7,09
11	Medan Satria	11,88	5,65
12	Bekasi Utara	19,75	9,38
	Kota Bekasi	210,49	100,00

Sumber: Kota Bekasi dalam Angka, 2020 yang dikelola dalam SIPD

Kondisi topografi Kota Bekasi relatif datar dan landai, dengan kemiringan lerengnya antara 0 – 2%. Wilayah Kota Bekasi terletak pada ketinggian antara 11 m sampai 81 m di atas permukaan air laut (dpl). Kecamatan Bekasi Utara dan Bekasi Timur merupakan wilayah yang paling rendah berada pada 0 – 5 m dpl, sehingga wilayahnya banyak genangan, terutama pada musim hujan. Ketinggian kurang dari 30 m dpl berada pada Kecamatan

Bekasi Selatan (sebagian), Pondok Gede, Jatiasih (sebagian), Medan Satria, dan Mustika Jaya. Sedangkan ketinggian di atas 30 dpl berada di Pondok Melati, Jatiasih (sebagian), dan Mustika Jaya (sebagian). Kecamatan Jatisampurna dan Bantar Gebang merupakan wilayah yang memiliki ketinggian di atas 45 m dpl.

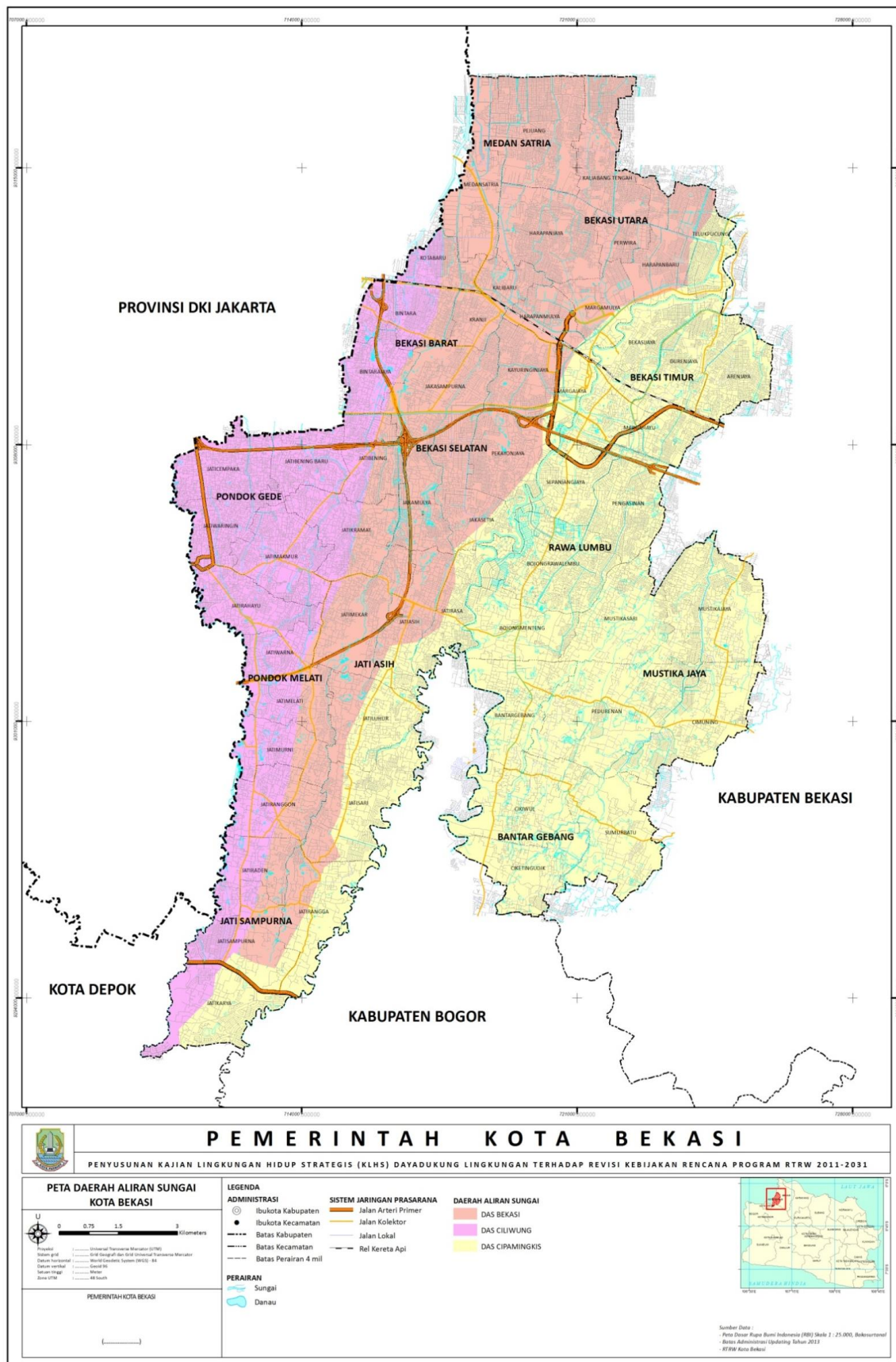
Kota Bekasi memiliki iklim kering dengan tingkat kelembaban rendah dan rata-rata suhu udara tiap tahun sekitar 26,2°C. Pola curah hujan di Kota Bekasi adalah monsunial dimana hanya terdapat satu puncak terjadinya musim hujan. Berdasarkan data Perum Jasa Tirta II tahun 2016 menunjukkan bahwa intensitas curah hujan sebanyak 1.792 mm, dengan jumlah hari hujan 147 hari. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Februari, yaitu sebanyak 112 hari dengan intensitas curah hujan total 332 mm. Data yang sama juga memperlihatkan kondisi iklim yang tidak menentu yaitu terjadinya hujan hampir sepanjang tahun.



Gambar 2-2 Kondisi Cuaca

Wilayah Kota Bekasi dialiri 3 (tiga) sungai utama, yaitu: Sungai Cakung, Sungai Bekasi, dan Sungai Sunter, beserta anak-anak sungainya. Sungai Bekasi mempunyai hulu di Sungai Cikeas yang berasal dari gunung dengan ketinggian kurang lebih 1.500 meter dari permukaan air laut. Air permukaan yang terdapat di wilayah Kota Bekasi meliputi sungai/kali Bekasi dan beberapa sungai/kali kecil serta saluran irigasi Tarum Barat yang selain digunakan untuk mengairi sawah juga merupakan sumber air baku bagi kebutuhan air minum wilayah Bekasi (kota dan kabupaten) dan wilayah DKI Jakarta. Kondisi air permukaan sungai-sungai yang melintasi Kota Bekasi berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Metropolitan Bodebekkapur (2016) saat ini kondisi tercemar sedang

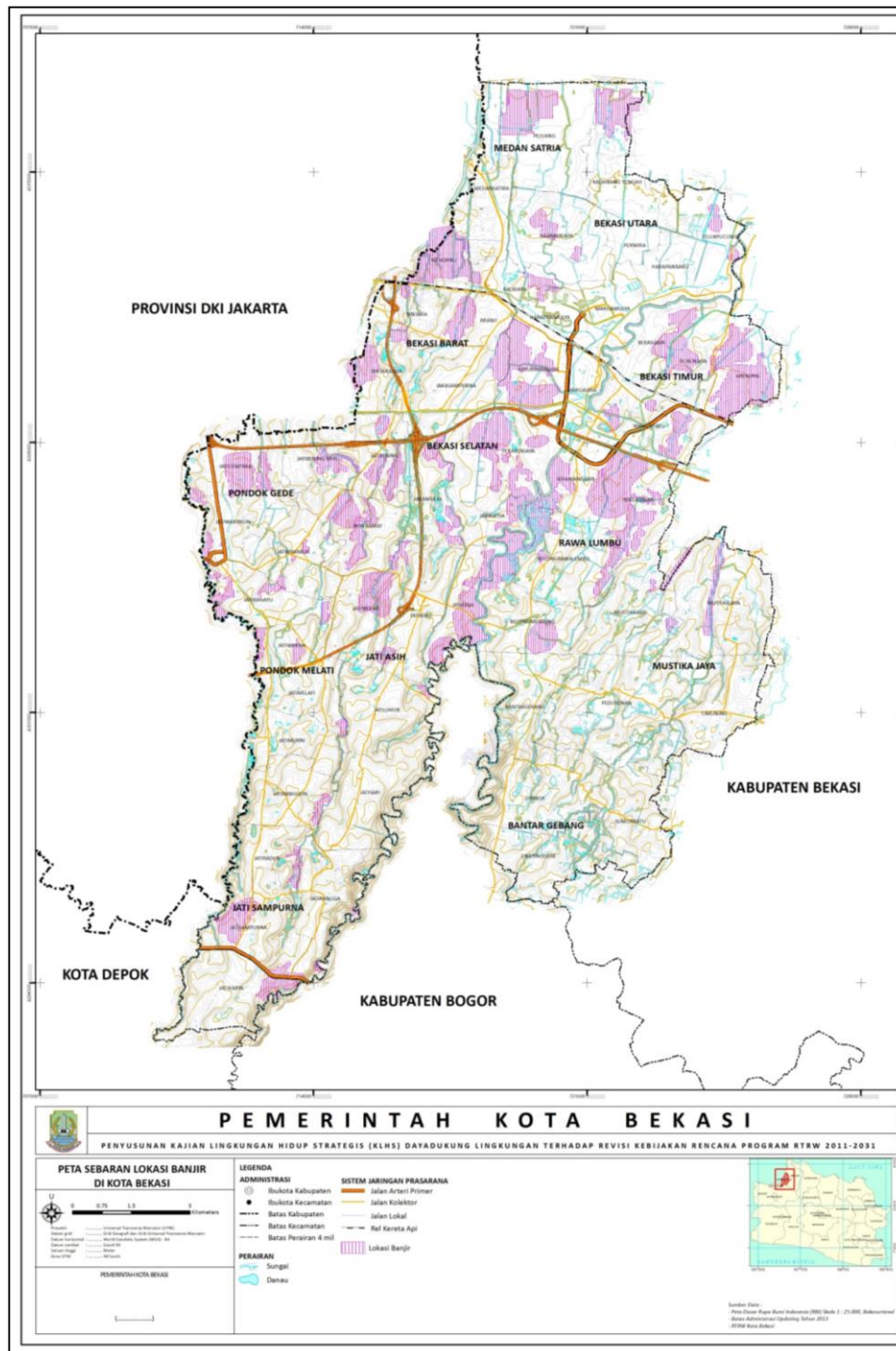
hingga berat. Kemungkinan besar pencemaran ini disebabkan oleh limbah rumah tangga dan limbah industri yang berada di sekitar aliran sungai.



Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi (2019) yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2-3 DAS yang meliputi Kota Bekasi

Kota Bekasi tercatat ada 49 titik rawan banjir yang tersebar di 10 kecamatan. Daerah rawan banjir yang jumlahnya mencapai 49 titik terbagi di Kecamatan Jatiasih delapan titik, Kecamatan Bekasi Selatan tujuh titik, Kecamatan Rawalumbu lima titik, Kecamatan Bekasi Timur delapan titik, Kecamatan Bekasi Utara tiga titik, Kecamatan Bekasi Barat enam titik, Kecamatan Pondok Melati dua titik, Kecamatan Pondok Gede lima titik, Kecamatan Medan Satria tiga titik, dan Kecamatan Mustika Jaya dua titik.

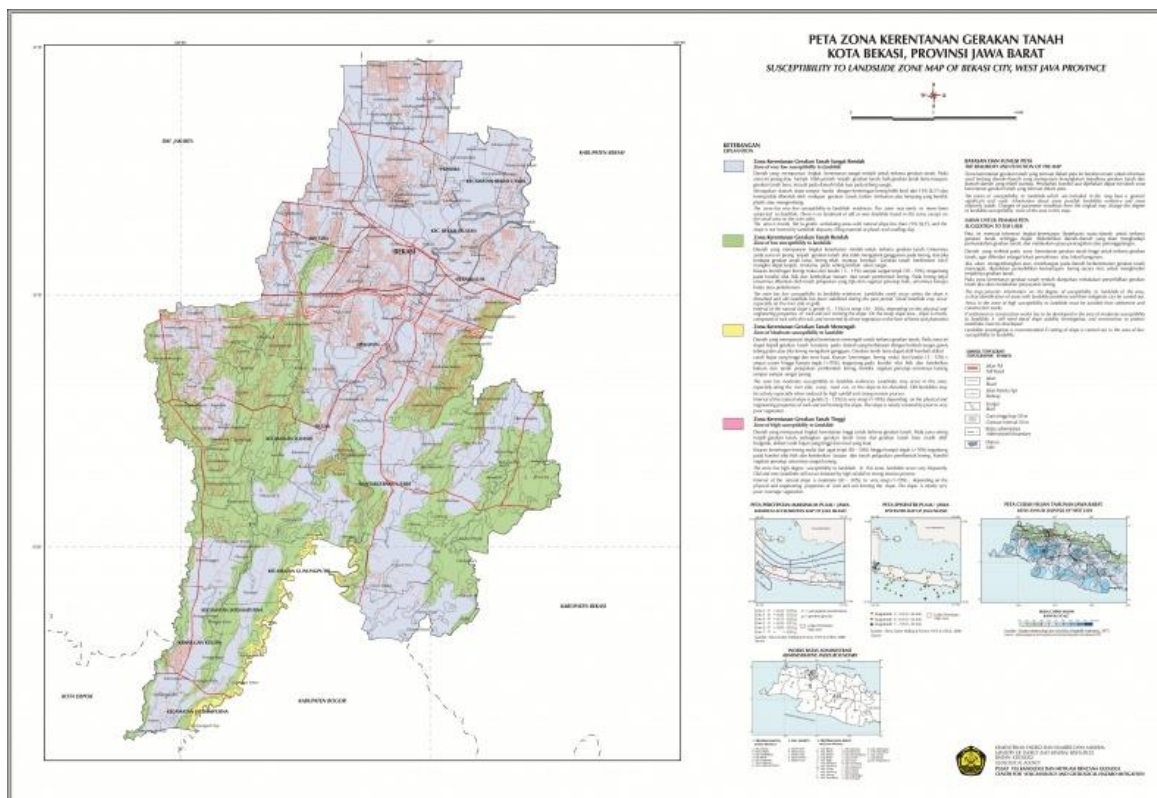


Sumber: KLHS RPJMD Perubahan Kota Bekasi (2020) yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2-4 Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kota Bekasi

Kondisi air tanah di wilayah Kota Bekasi sebagian cukup potensial untuk digunakan sebagai sumber air bersih terutama di wilayah selatan Kota Bekasi, tetapi untuk daerah yang berada di sekitar TPA Bantar Gebang kondisi air tanahnya kemungkinan besar sudah tercemar. Kondisi air tanah yang terdapat di Bekasi Timur sebagian mengandung zat besi. Namun secara umum wilayah Kota Bekasi merupakan kawasan resapan air pada Cekungan Air Tanah (CAT) Bekasi-Karawang. Untuk penggunaan air tanah, baik air tanah dangkal maupun dalam harus dikendalikan, karena menurut Kementerian ESDM, CAT Bekasi-Karawang dinyatakan dalam kondisi kritis.

Struktur geologi wilayah Kota Bekasi didominasi oleh *pleistocene volcanik facies*. Struktur aluvium menempati sebagian kecil wilayah Kota Bekasi bagian utara sedangkan struktur *miocene sedimentary facies* terdapat di bagian timur wilayah Kota Bekasi sepanjang perbatasan dengan DKI Jakarta. Kedalaman efektif tanah sebagian besar di atas 91 cm. Jenis tanah latosol dan aluvial, serta tekstur tanah didominasi tekstur sedang dan halus. Komposisi perbandingan berdasarkan luasnya adalah: tekstur halus seluas 17.260 ha (82%), tekstur sedang seluas 3.368 ha (16%) dan tekstur kasar seluas 421 ha (2%) (BAPPEDA Kota Bekasi, 2005).



Gambar 2-5 Peta Gerakan Tanah yang dikelola dalam SIPD

Pengembangan Kota Bekasi sangat pesat. Jumlah penduduk yang semakin bertambah yang disertai peningkatan kegiatan perekonomian, tentunya membutuhkan ruang dan

lahan. Berdasarkan penelitian Putri (2017) ditunjukkan bahwa secara umum luas lahan terbuka dan lahan bervegetasi mengalami penurunan. Perubahan luas antara lahan bervegetasi dengan lahan terbangun menunjukkan hasil yang berbanding terbalik. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya lahan bervegetasi dan bertambahnya lahan terbangun selama 15 tahun. Luas lahan vegetasi berkurang sebesar 4.805 ha dan lahan terbuka yang berkurang sebesar 752 ha. Sementara lahan terbangun menjadi bertambah sebesar 5.596 ha. Secara lebih rinci hal tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan IMB berupa rumah tinggal tahun 2012 sebanyak 2338 bangunan, tahun 2013 sebanyak 1975 bangunan, dan tahun 2014 sebanyak 1906 bangunan. Sementara IMB untuk perumahan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi tahun 2012 sebanyak 1671 bangunan, tahun 2013 sebanyak 356 bangunan, dan tahun 2014 sebanyak 49 bangunan (Bappeda Kota Bekasi, 2015). Perumahan dan tempat tinggal di Kota Bekasi berpusat di Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan, dan Bekasi Utara. Sedangkan di bagian Selatan Kota Bekasi masih banyak wilayah yang belum terbangun seperti di Kecamatan Jati Asih, Jati Sampurna, Bantar Gebang, dan Mustika Jaya (Dinas Tata Kota Bekasi, 2013).

Tabel 2.2 Perubahan luas lahan di Kota Bekasi dari tahun 2000 sampai 2015

No	Tutupan Lahan	Luas Lahan 2000		Luas Lahan 2015		Perubahan Luas Lahan	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Badan Air	58	0.3	20	0.1	-38	-0.2
2	Lahan Terbangun	12250	56.4	17846	82.1	5596	25.8
3	Lahan Terbuka	2412	11.1	1660	7.6	-752	-3.5
4	Vegetasi	7004	32.2	2199	10.1	-4805	-22.1

Sumber: KLHS perubahan RPJMD Kota Bekasi (2020)

Analisis ketersediaan lahan di Kawasan Bekasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan kemampuan kawasan tersebut untuk meresapkan air. Kemampuan meresapkan air ini tergantung beberapa faktor, seperti: jenis tanah, geologi, curah hujan, kemiringan lereng, dan morfologi. Selanjutnya kemampuan meresapkan air pada setiap zonasi dari hasil analisis perhitungan neraca air digunakan untuk menentukan besaran Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) Maksimum. KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.

Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa daya tampung suatu lahan untuk bisa dikembangkan dengan asumsi peningkatan air larian mencapai 100% dari kondisi awal. Daya tampung lahan terbangun setiap zonasi potensi resapan akan berbeda besarnya, untuk KWT maksimum di zona resapan tinggi akan lebih kecil dibandingkan dengan besaran KWT maksimum di zona potensi resapan rendah. Hal ini disebabkan pada zona potensi resapan tinggi mempunyai fungsi orologis yaitu sebagai pasokan air tanah

untuk daerah hilirnya, sehingga untuk kegiatan pembangunan di zona potensi resapan sedang hingga tinggi perlu adanya rekayasa teknik seperti sumur resapan dan atau kolam resapan. Untuk pembangunan di daerah yang berpotensi resapan rendah bisa dilakukan dengan KWT yang lebih besar, tetapi untuk mencegah terjadi air limpasan terhadap bagian hilir yang tidak menimbulkan banjir maka perlu dibuatkan kolam retensi, yang juga dapat berfungsi untuk penyediaan sumber air.

Guna mengetahui kondisi daya dukung lahan yang ada di suatu kawasan, maka perlu dihitung KWT aktual, yang merupakan kondisi pada saat ini terkait dengan perbandingan (persentase) luas kawasan yang terbangun terhadap kawasan peruntukan seluruhnya di dalam satu kawasan. Selanjutnya KWT aktual dibandingkan dengan KWT maksimal suatu kawasan yang sudah ditentukan sebelumnya. Jika KWT aktual lebih besar atau melampaui KWT maksimal maka berarti kawasan tersebut sudah melebihi daya dukung lahannya. Koefisien Wilayah Terbangun Aktual (KWT_{aktual}) di Kota Bekasi belum melebihi KWT_{maks} . Sehingga banyak lahan yang tersedia untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Koefisien Wilayah Terbangun Maksimum dan Koefisien Wilayah Terbangun Aktual Kota Bekasi Eksisting

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Luas Tertutup Bangunan (Ha)	KWT Aktual (%)	KWT Maksimal (%)	Ketersediaan Ruang Lahan Terbangun (%)	Ketersediaan Ruang Lahan Terbangun (Ha)
1.	Bantar Gebang	2.159	1.353	63	98	35	763
2.	Bekasi Barat	1.489	1.285	86	98	12	174
3.	Bekasi Selatan	1.582	1.355	86	98	12	195
4.	Bekasi Timur	1.407	1.285	91	96	5	65
5.	Bekasi Utara	2.061	1.764	86	98	12	256
6.	Jatiasih	2.536	1.989	78	98	20	496
7.	Jatisampurna	2.248	1.529	68	93	25	562
8.	Medan Satria	1.434	967	67	97	30	424
9.	Mustika Jaya	2.414	1.663	69	85	16	389
10.	Pondok Melati	963	730	76	96	20	194
11.	Pondok Gede	1.501	1.448	96	98	2	23
12.	Rawalumbu	1.772	1.454	82	92	10	175

Sumber : KLHS Metropolitan Bodebekkarpur (2016)

Berdasarkan data ketersediaan lahan dan karakteristik wilayah, maka pengembangan wilayah dapat dilaksanakan sesuai dengan RTRW Kota Bekasi yang ada. Namun yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan dan pemerataan pembangunan antara wilayah di Kota Bekasi. Pembangunan yang ada cenderung lebih ke arah ke pusat Kota Bekasi, dimana daya dukung wilayah sudah hampir terlampaui.

2.1.2 Aspek Demografi

Berdasarkan definisi BPS (2018), penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Penduduk dalam suatu daerah merupakan subyek dan obyek pembangunan. Semakin bagus kualitas penduduk suatu daerah maka akan semakin baik pembangunan daerah tersebut.

Jumlah penduduk Kota Bekasi tahun 2019 mencapai 2.448.830 jiwa. Pada tahun 2018 terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.235.491 dan perempuan sebanyak 1.213.340 dan rasio jenis kelamin 101,83. Terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan, dengan rata-rata rasio periode 2012-2016 sebesar 101,67. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Bekasi selama periode 2014-2018 sebesar 2,99 persen. Secara lengkap data perkembangan penduduk Kota Bekasi selama periode 2014-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Perkembangan Penduduk Kota Bekasi menurut Jenis Kelamin 2015-2019

Tahun	Jumlah penduduk			Rasio jenis kelamin	Laju pertumbuhan (%)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
2019	1.235.490	1.213.340	2.448.830	101.83	0.50%
2018	1.230.001	1.206.576	2.436.577	101.94	0.88%
2017	1.221.623	1.193.468	2.415.091	102.36	0.52%
2016	1.219.312	1.183.153	2.402.465	103.06	0.75%
2015	1.216.260	1.168.153	2.384.413	104.12	0.71 %
Rata-rata				102.66	0.673%

Sumber : Kota Bekasi Dalam Angka, 2019; LKPD Kepala Daerah Kota Bekasi, 2019.

Distribusi penduduk Kota Bekasi, seperti tersaji pada tabel berikut ini. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bekasi Utara sebanyak 329,95 ribu jiwa dan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Bantar Gebang yaitu sebanyak 105,37 ribu jiwa. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata mencapai 11.634 jiwa/km², dimana kepadatan tertinggi pada Kecamatan Bekasi Timur sebesar 18.552 Jiwa/km², dan yang terendah adalah Kecamatan Jatisampurna yaitu 5.435 Jiwa/km².

Tabel 2.5 Distribusi Penduduk menurut Kecamatan Kota Bekasi Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan (Jiwa/km ²)
1	Pondok Gede	228,33	15,92	14.342
2	Jatisampurna	106,20	19,54	5.435
3	Pondok Melati	127,20	11,80	10.780
4	Jatiasih	225,68	24,27	9.299
5	Bantar Gebang	105,37	18,44	5.714
6	Mustika Jaya	195,13	26,42	7.386
7	Bekasi Timur	271,42	14,63	18.552

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan (Jiwa/km ²)
8	Rawalumbu	220,59	16,85	13.091
9	Bekasi Selatan	211,44	16,06	13.165
10	Bekasi Barat	269,85	14,93	18.074
11	Medan Satria	157,68	11,88	13.272
12	Bekasi Utara	329,95	19,75	16.706
Kota Bekasi		2.448,83	210,49	11.634

Sumber : Kota Bekasi Dalam Angka, 2020 Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi (2019) yang dikelola dalam SIPD

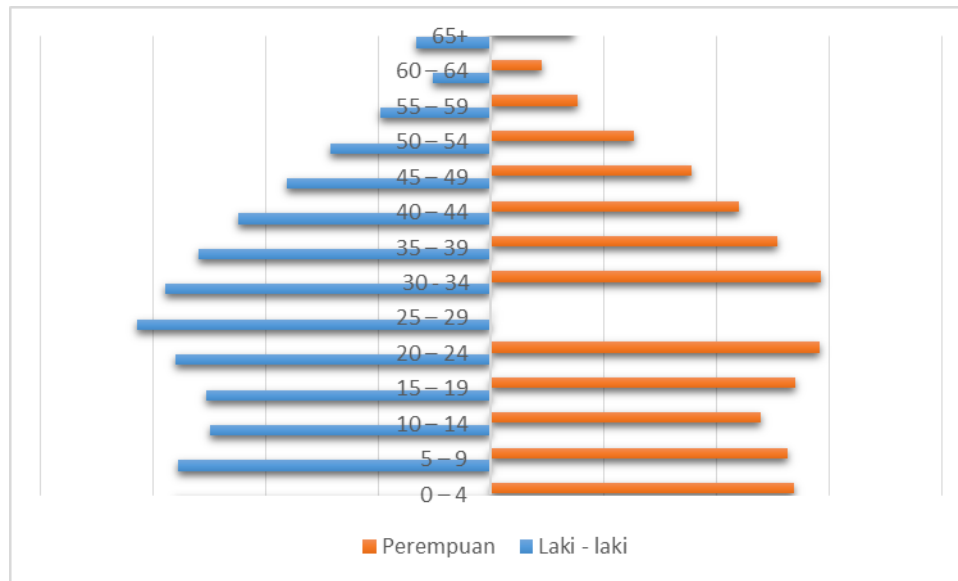
Struktur penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin tahun 2018 menunjukkan bahwa penduduk Kota Bekasi didominasi oleh usia produktif/angkatan kerja yaitu penduduk berusia antara 15 – 64 tahun sebesar 79,13 persen sedangkan sisanya sebesar 20,87 persen merupakan penduduk bukan angkatan kerja yaitu penduduk usia 0 – 14 tahun dan usia > 64 tahun. Hal ini berarti bahwa angka ketergantungan Kota Bekasi sebesar 41,15 persen. Secara rinci struktur penduduk Kota Bekasi terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6 Struktur Penduduk Kota Bekasi Tahun 2019

No	Kecamatan	0-4Thn	5-9Thn	10-14 Thn	15-19 Thn	20-24Thn	25-29 Thn	30-34 Thn	35-39 Thn	40-44 Thn	45-49 Thn	50-54Thn	55-59 Thn	60-64 Thn	65+ Thn	JUMLAH
1	Bekasi Timur	21.201	23.234	21.277	20.519	20.945	23.551	24.635	25.000	20.086	15.994	14.841	14.752	12.304	13.083	271.422
2	Bekasi Barat	19.714	22.623	21.474	20.803	21.366	22.491	22.967	24.005	20.919	17.624	16.096	14.037	11.627	14.100	269.846
3	Bekasi Utara	24.105	27.334	27.478	28.343	28.341	29.029	27.303	26.817	23.761	22.554	22.219	18.175	12.833	11.657	329.949
4	Bekasi Selatan	15.132	17.715	17.220	17.139	16.866	17.648	17.694	19.797	16.346	13.930	12.514	10.834	8.896	10.705	211.436
5	Rawalumbu	15.738	18.153	17.851	18.956	20.358	20.546	18.807	18.464	16.946	14.936	13.769	11.798	7.447	6.819	220.588
6	Medan Satria	11.413	13.183	13.179	13.706	13.381	13.465	13.055	13.317	11.804	11.162	10.171	8.296	5.672	5.872	157.676
7	Bantargebang	8.727	10.150	9.735	9.098	8.415	8.789	9.183	10.500	10.045	7.920	5.096	3.089	2.062	2.564	105.373
8	Pondokgede	16.125	18.981	18.395	17.875	18.166	18.481	19.109	20.453	18.313	15.844	13.524	10.954	9.308	12.798	228.326
9	Jatiasih	16.795	19.953	20.139	20.250	18.941	17.979	17.727	18.820	18.017	16.371	13.956	10.278	7.015	9.439	225.680
10	Jatisampurna	7.724	9.342	9.459	9.601	9.146	8.979	8.207	8.992	8.521	7.596	6.486	5.067	3.287	3.792	106.199
11	Mustika Jaya	14.486	18.557	19.452	18.583	15.653	14.435	14.208	17.016	17.653	15.889	12.048	7.298	4.508	5.347	195.133
12	Pondok Melati	8.466	10.399	10.740	10.444	9.927	9.783	9.734	11.023	10.269	9.365	8.012	6.365	5.180	7.495	127.202
Jumlah		179.626	209.624	206.399	205.317	201.505	205.176	202.629	213.204	192.680	169.185	148.732	120.943	90.139	103.671	2.448.830

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2019

Secara grafis struktur penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin disajikan dalam bentuk piramida penduduk seperti berikut ini.



Sumber: diolah dari data penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2020 yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2-6 Piramida Penduduk Kota Bekasi Tahun 2019

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Laju Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah/negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi bisa pula diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah/nasional.

A. Perekonomian Global

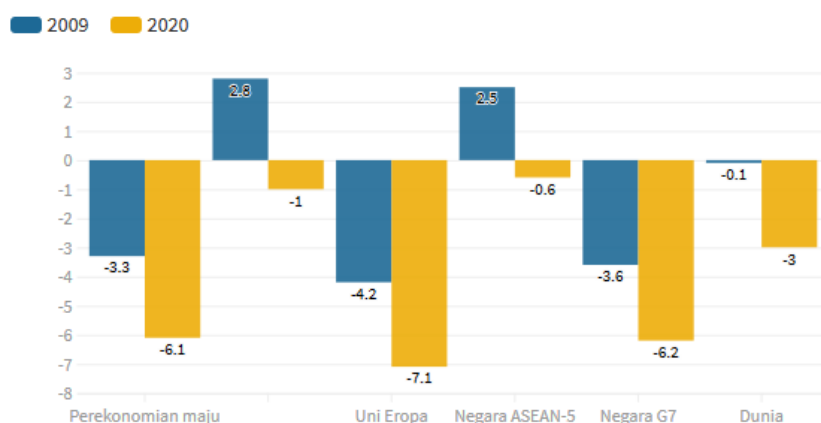
Tahun 2020 baru berjalan hampir setengah tahun, namun berbagai kejutan telah menghantam dunia. Salah satunya adalah penyebaran virus corona baru (SARS-CoV-2) penyebab pandemi COVID-19 yang membuat banyak negara pontang-panting. Penyebaran virus baru itu membuat sejumlah negara mengambil langkah penguncian wilayah (*lockdown*) dan kebijakan *physical distancing* atau jaga jarak fisik kepada warganya. Kebijakan *lockdown* di sejumlah negara ini memberikan dampak negatif bagi sektor perekonomian karena beberapa sektor tidak bisa beroperasi secara normal. Akibatnya tampak pada banyak hal, seperti mulai adanya pengurangan karyawan dan kenaikan harga beberapa komoditas. *International Monetary Fund (IMF)* dalam laporan *World Economic Outlook* edisi April 2020 memangkas angka pertumbuhan ekonomi global. Pada Januari 2020, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,3 persen. Namun pada April prediksi itu dipangkas menjadi minus 3 persen. Prediksi minus ini disertai asumsi tren penyebaran COVID-19 memuncak pada kuartal kedua dan surut pada semester kedua tahun ini. Dengan revisi angka pertumbuhan ekonomi tersebut, IMF menyebut perekonomian pada 2020 menjadi yang terburuk setelah

Great Depression pada 1930-an. IMF juga menyebut tahun 2020 lebih buruk dibandingkan krisis global pada 2008-2009.

Krisis global pada medio 2008-2009 bermula dari krisis *subprime mortgage* yang terjadi di Amerika Serikat pada akhir 2007 dan bangkrutnya perusahaan Lehman Brothers. Krisis keuangan di AS tersebut menjalar ke berbagai negara hingga mengakibatkan krisis keuangan global yang terasa pada akhir 2008 hingga 2009. Pertumbuhan ekonomi global pada 2009 tercatat minus 0,1 persen. Secara umum pertumbuhan minus terjadi pada negara-negara maju. Tercatat pertumbuhan ekonomi pada negara pertumbuhan ekonomi maju sebesar minus 3,3 persen, Uni Eropa minus 4,2 persen, dan negara-negara yang tergabung dalam kelompok G7 sebesar minus 3,6 persen. Sedangkan negara perekonomian berkembang masih mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun tersebut dengan 2,8 persen. Lima negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam) yang tergabung dalam ASEAN-5 juga menorehkan pertumbuhan positif dengan 2,5 persen.

IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2020 sebesar minus 3 persen. Lembaga itu menyebut pandemi COVID-19 membuat biaya yang dikeluarkan masyarakat menjadi lebih tinggi dan ekonomi menjadi terdampak akibat langkah-langkah perlindungan yang diambil pemerintah. Sebagai catatan, pada *World Economic Outlook* edisi Januari 2020, angka proyeksi masih lebih tinggi (3,3 persen) karena penyebaran COVID-19 belum meluas. Proyeksi minus pada 2020 tersebut diikuti oleh negara perekonomian maju (-6,1 persen), Uni Eropa (-7,1 persen), dan negara G7 dengan minus 6,2 persen. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang juga turut diprediksi minus. Negara perekonomian berkembang diprediksi minus 1 persen, sementara ASEAN-5 minus 0,6 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Dunia 2009 & 2020



Sumber: *World Economic Outlook*, IMF • Angka tahun 2020 merupakan proyeksi pada April 2020
 Visualisasi Data: Hanif Gusman

Gambar 2-7 Pertumbuhan Ekonomi Dunia 2009 dan 2020

Sumber: IMF, *World Economic Outlook*, April 2020

Tabel 2.7. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2020 dan 2021

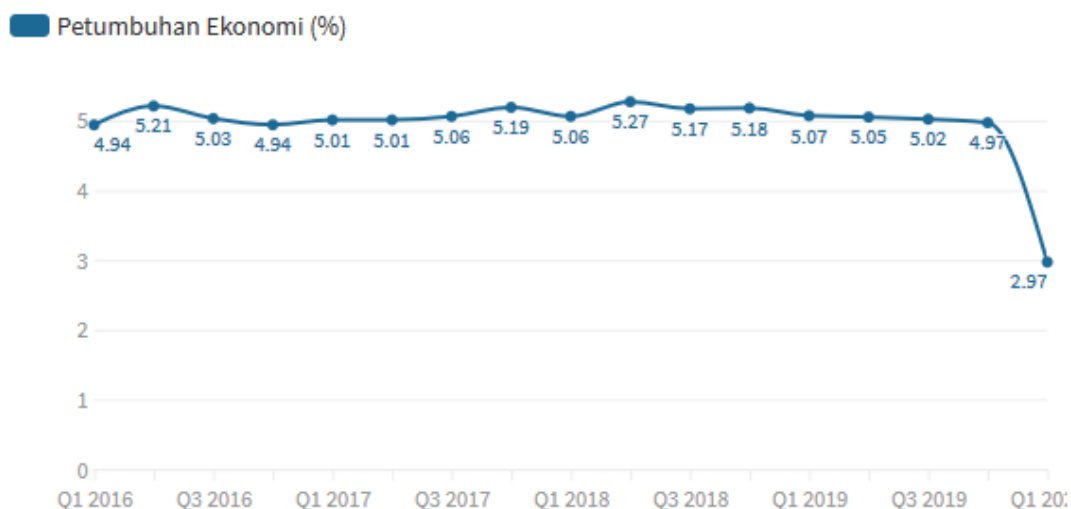
Kawasan/Negara	Estimasi	Proyeksi	
	2019	2020	2021
Dunia	2,9	-3,0	5,8
Negara Maju	1,7	-6,1	4,5
Amerika Serikat	2,3	-5,9	4,7
Kawasan Eropa	1,2	-7,5	4,7
Jepang	0,7	-5,2	3,0
United Kingdom	1,4	-6,5	4,0
Kanada	1,6	-6,2	4,2
Negara Berkembang	3,7	-1,0	6,6
Asia	5,5	1,0	8,5
Tiongkok/China	6,1	1,2	9,2
India	4,2	1,9	7,4
ASEAN-5	4,8	-0,6	7,8

Sumber: IMF, World Economic Outlook, April 2020

Dalam laporan *World Economic Outlook* (WEO) April 2019, IMF memprediksi kelompok negara Asean 5 yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam turut terpengaruh oleh pandemic COVID-19. Indonesia diperkirakan akan tumbuh pada tingkat yang rendah, sedangkan negara lainnya akan mengalami kontraksi besar. Pada tahun 2020, ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh 0,5 persen, dari sebelumnya 5,0 persen di tahun 2019. Namun pertumbuhan diproyeksi bisa membaik di 2021, dengan perkiraan sebesar 8,2 persen. Ini berbanding terbalik dengan negara tetangga seperti Malaysia. IMF mencatat Malaysia akan mengalami pertumbuhan sebesar minus 1,7 persen tahun 2020, dari sebelumnya 4,3 persen di tahun 2019. Namun pada tahun 2028, diperkirakan pertumbuhan Malaysia bisa mencapai 9 persen. Filipina diperkirakan akan tumbuh 0,6 persen di 2020, dari sebelumnya 5,9 persen pada tahun 2019, dan akan mengalami pertumbuhan sebesar 7,6 persen di 2021. Sedangkan Vietnam tumbuh 2,7 persen pada tahun 2020 dari sebelumnya 7,0 persen dan diprediksikan tumbuh sebesar 7 persen pada tahun 2021. Thailand menjadi negara yang mengalami kontraksi paling tinggi, yaitu dengan pertumbuhan minus 6,7 persen, setelah sebelumnya tumbuh 2,4 persen pada tahun 2019 dan diperkirakan akan kembali tumbuh sebesar 6,1 persen pada tahun 2021.

B. Perekonomian Nasional

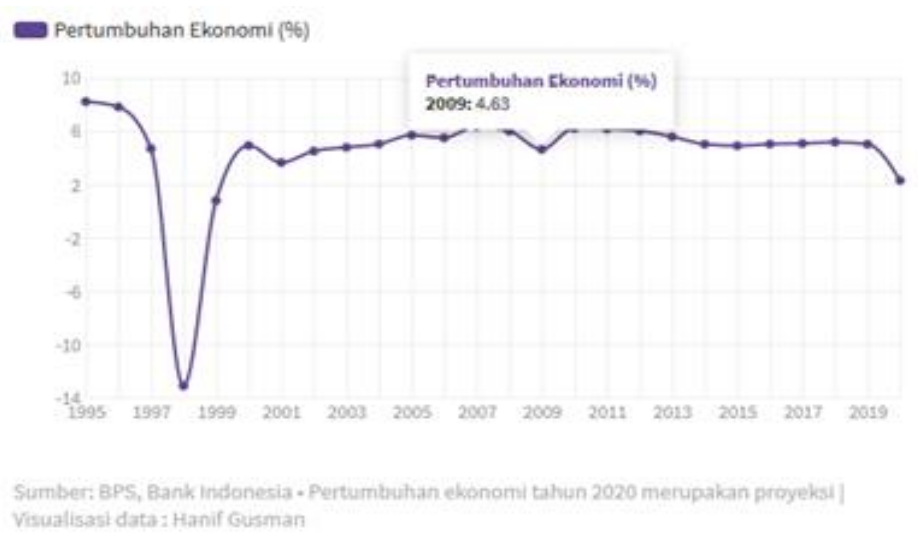
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia Kuartal I/2020 sebesar 2,97 persen (y-o-y). Angka tersebut melambat dibandingkan Kuartal I/2019 sebesar 5,07 persen.



Sumber: BPS • Visualisasi Data: Hanif Gusman

Gambar 2-8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulanan (y-o-y), 2016-2020

Tidak hanya terhadap Kuartal I/2019, setidaknya pertumbuhan ekonomi Kuartal I/2020 menurut BPS lebih rendah dibandingkan kuartal yang sama sejak 2001. Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 sebesar 2,3 persen. BI juga meyakini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan stabil pada level Rp15.000 pada akhir tahun 2020. Prediksi pertumbuhan ekonomi BI ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi IMF. Masih dalam laporan *World Economic Outlook 2020*, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,5 persen. Jika prediksi BI maupun IMF benar-benar terjadi, angka tersebut bakal lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada 2009 saat terjadi krisis keuangan global. Pada 2009, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 4,63 persen. Meskipun begitu, prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 masih lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi pada 1998 saat krisis moneter. Saat itu, Indonesia dilanda krisis moneter dan pergantian kekuasaan sehingga pertumbuhan ekonomi anjlok hingga mencapai angka minus 13,13 persen.



Gambar 2-9. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1995-2020

Berdasarkan asumsi ekonomi makro APBN dari Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 diperkirakan sebesar 5,3 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama akan didukung oleh kuatnya permintaan domestik dan investasi di tengah dorongan belanja infrastruktur pemerintah dan dampak tranmisi *tax amnesty* terhadap perekonomian. Laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 3,5 persen. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp 15.000,- per dolar AS. Sedangkan untuk tahun 2020, pertumbuhan ekonomi diperkirakan antara 5,5 – 6,2 persen dengan laju inflasi 2,0 – 4,0 persen. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak di kisaran Rp 14.200,- - Rp 14.500,- per dolar AS.

Tabel 2.8. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

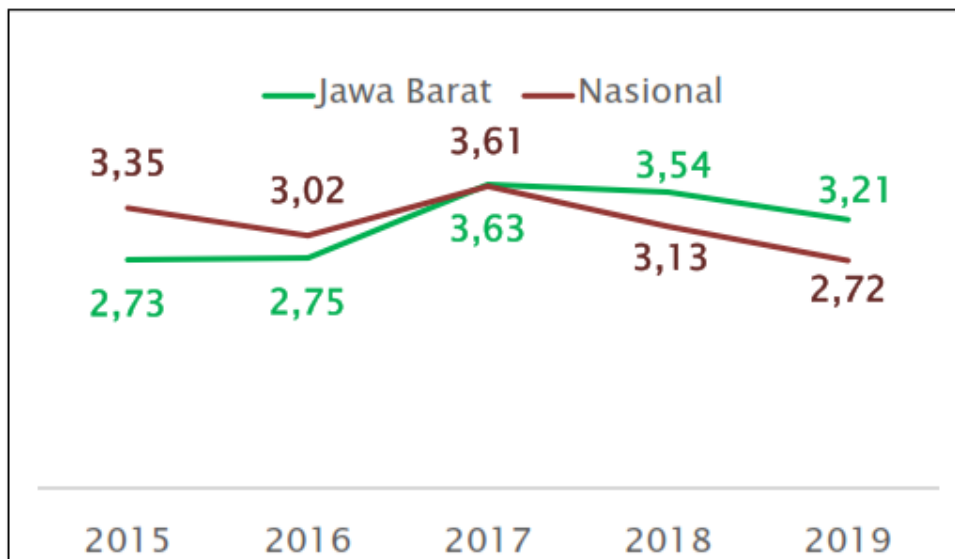
Indikator	2019	2020	2021
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,3	5,5 – 6,2	4,5 - 5,5
Inflasi (% , yoy)	3,5	2,0 – 4,0	2,0 – 4,0
Nilai tukar (Rp/US\$)	15.000	14.300 – 14.500	14.900 – 15.300
Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	5,3	4,4 – 5,4	6,67 – 9,56
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barell)	70	65 – 75	40 - 50
Lifting Minyak Mentah (ribu barell per hari)	775	695 – 840	677 - 737
Lifting Gas (ribu barell setara minyak per hari)	1.250	1.191 – 1.300	1.085 – 1.173

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah Sumber: IMF, World Economic Outlook, April 2020

C. Perekonomian Regional Jawa Barat

Perekonomian Jawa Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Tahun 2019 mencapai Rp2.125,16 triliun dan atas dasar harga konstan Tahun 2010 mencapai Rp1.491,71 triliun. Ekonomi Jawa Barat Tahun 2019 tumbuh 5,07 persen melambat dibanding Tahun 2018 sebesar 5,66 persen (y-on-y). Dari sisi

produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Real Estate sebesar 9,54 persen. Dari sisi Pengeluaran dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh 6,97 persen.

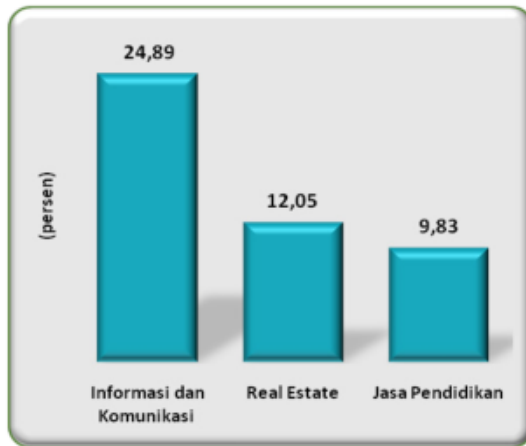


Sumber: BPS Jawa Barat, 2020

Gambar 2-10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat dibandingkan Nasional Tahun 2015-2019 yang dikelola dalam SIPD

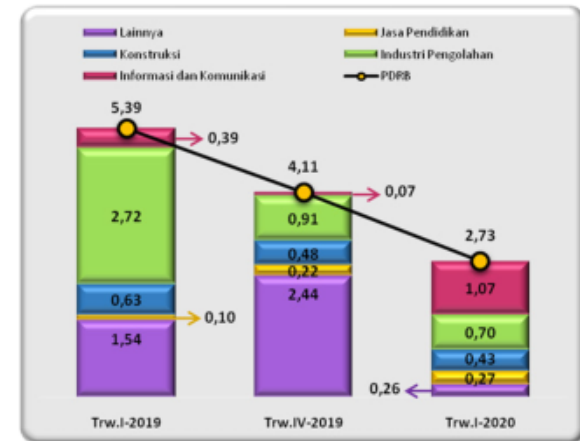
Ekonomi Jawa Barat triwulan I-2020 dibanding triwulan I-2019 (*yon-y*) tumbuh 2,73 persen. Pertumbuhan didukung hampir semua lapangan usaha kecuali Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami penurunan sebesar 10,92 persen yang disebabkan oleh faktor cuaca. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Informasi dan Komunikasai sebesar 24,89 persen; diikuti Real Estate sebesar 12,05 persen; dan Jasa Pendidikan sebesar 9,83 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan I-2020 (*yon-y*), Informasi dan Komunikasi memiliki sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 1,07 persen, diikuti Industri Pengolahan sebesar 0,70 persen; Konstruksi sebesar 0,43 persen; Jasa Pendidikan sebesar 0,27 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,24 persen.



Sumber: BPS Jawa Barat, 2020 Sumber: IMF, World Economic Outlook, April 2020 yang dikelola dalam SIPD

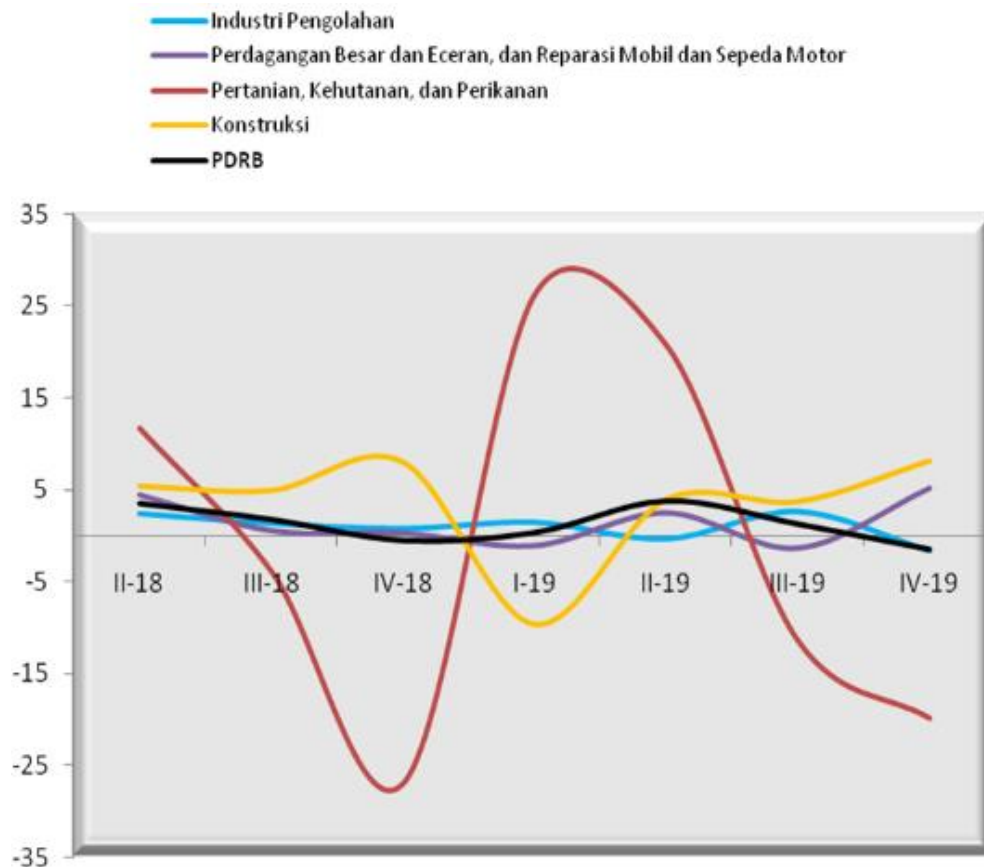
Gambar 2-11. Pertumbuhan PDRB Jawa Barat Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2020 (y-on-y)



Gambar 2-12. Sumber Pertumbuhan PDRB Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha

Struktur perekonomian Jawa Barat triwulan I-2020 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan; diikuti Lapangan Usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil Sepeda Motor; Konstruksi; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan peran masing masing sebesar 42,47 persen, 14,52 persen, 8,38 persen dan 7,52 persen.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan I-2020 terhadap triwulan IV-2019 diwarnai oleh pandemi Covid-19. Penerapan sistem kerja *Work From Home* (WFH) dan sistem belajar secara online yaitu *Learning From Home* (LFH) membuat Lapangan Usaha Informasi dan komunikasi tumbuh ekspansif sebesar 25,95 persen. Pertumbuhan positif juga terjadi pada lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,79 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,97 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 2,94 persen; dan beberapa Lapangan Usaha lainnya. Namun, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I-2020 yang turun sebesar 0,95 persen (*q-to-q*) tertahan oleh kontraksi pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar seperti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Konstruksi.



Sumber: BPS Jawa Barat, 2020 Sumber: IMF, World Economic Outlook, April 2020 yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2-13. Pertumbuhan PDRB Jawa Barat Beberapa Lapangan Usaha 2020 (q-to-q)

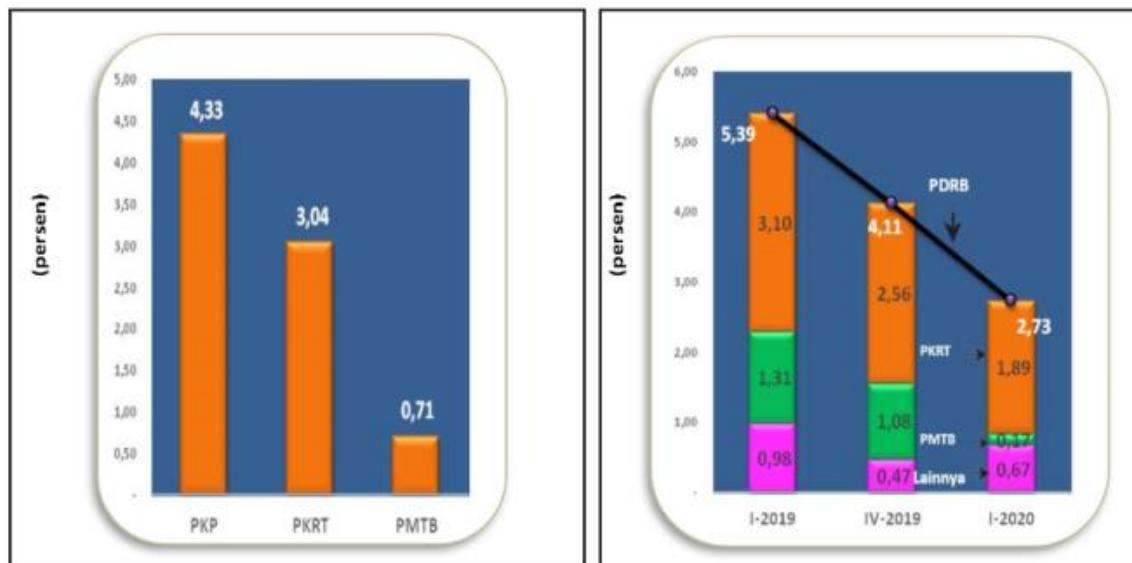
Triwulan I-

Secara umum Pandemi Covid-19 berdampak pada terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I-2020. Pada perekonomian sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi terhadap triwulan I-2019 (y-on-y) hanya mencatatkan pertumbuhan positif pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 4,33 persen; diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,04 persen dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 0,71 persen. Perdagangan internasional terdampak Pandemi Covid 19 serta terjadi penurunan permintaan dari negara tujuan utama ekspor Jawa Barat sehingga terjadi kontraksi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 2,50 persen. Selain itu kontraksi terjadi pada Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga sebesar 1,70 persen; dan Perubahan Inventori sebesar 1,02 persen. Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa yang berlaku sebagai pengurang pertumbuhan ekonomi berkontraksi signifikan sebesar 4,89 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi (SOG) Jawa Barat triwulan I-2020 (y-on-y), Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 1,89 persen,

diikuti Komponen PMTB sebesar 0,17 persen, sementara komponen lainnya sebesar 0,67 persen.

Struktur PDRB Jawa Barat menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Barat. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto; sedangkan peranan Komponen Perubahan Inventori, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Net Ekspor (Ekspor-Impor) dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga memiliki kontribusi relatif kecil.

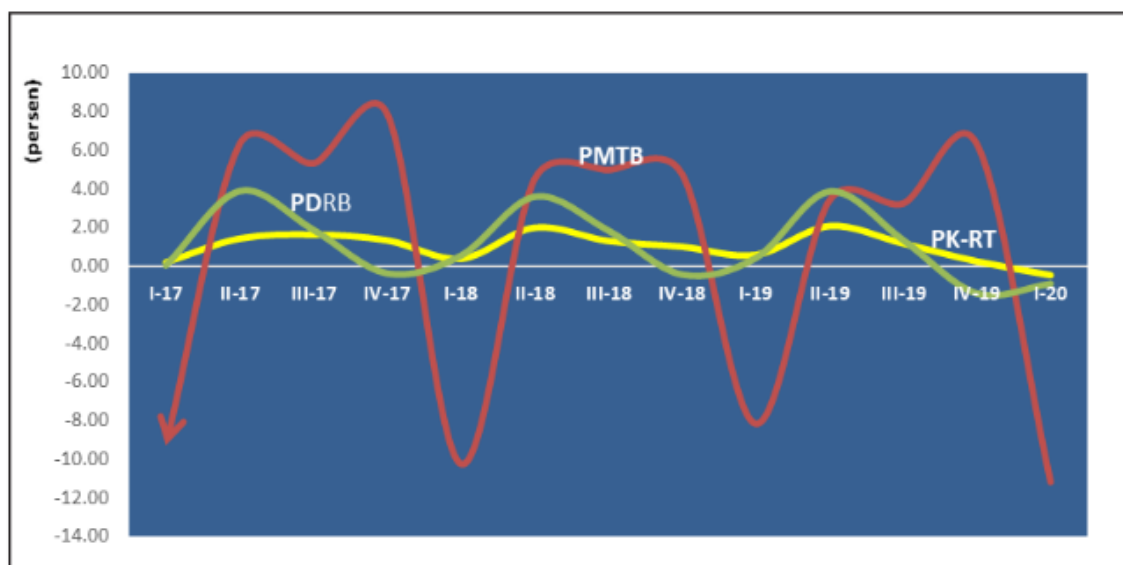


Sumber: BPS Jawa Barat, 2020 Sumber: IMF, World Economic Outlook, April 2020 yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2-14. Pertumbuhan PDRB Jawa Barat Beberapa Komponen Triwulan I-2020 (y-on-y)

Gambar 2-15. Sumber Pertumbuhan PDRB Jawa Barat Menurut Pengeluaran

Lebih jauh, Pandemi Covid-19 yang terjadi pada Maret 2020 di Jawa Barat berdampak terhadap ekonomi Jawa Barat triwulan I-2020 terhadap triwulan IV-2019 (q-to-q) yaitu kontraksi sebesar 0,95 persen. Seluruh komponen PDRB pengeluaran mengalami kontraksi yaitu Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (59,51 persen); Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (11,22 persen); Komponen Ekspor Barang dan Jasa (6,85 persen); Perubahan Inventori (0,86 persen); Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (0,61 persen); Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (0,47 persen) karena penurunan terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat secara umum. Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai pengurang pertumbuhan mengalami kontraksi sebesar 23,87 persen.



Sumber: BPS Jawa Barat, 2020 yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 2-16. Pertumbuhan Beberapa Komponen PDRB Pengeluaran
Jawa Barat (*q-to-q*)**

Pandemi Covid-19 merupakan tantangan bagi perekonomian global, tak terkecuali Indonesia. Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik sisi produksi maupun sisi penggunaan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Barat dengan menyesuaikan asumsi makro pada tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.9 di bawah:

**Tabel 2.9. Proyeksi Indikator Makro Pembangunan
Jawa Barat 2019 – 2021**

Indikator Makro Pembangunan	2019	2020	2021
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,4 - 71,91	71,91 - 72,52	72,52-73,13
LPE (%)	5,4 - 5,7	5,5 - 5,9	4,9-5,4
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,0 - 7,9	7,9 - 7,7	7,5-7,7
Inflasi (%)	3,8 - 4,0	2,50-3,50	2,75-3,75
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,66 - 6,90	6,5 - 6,9	6,0-6,6
Gini Rasio	0,38 - 0,39	0,37 - 0,38	0,37 - 0,38
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,50	1,48	1,45

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Jabar 2021 yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2.10. Risiko Pertumbuhan Ekonomi 2020

KOMPONEN	RISIKO	ARAH
Proyeksi kondisi	Proyeksi WEO IMF Januari 2020 pertumbuhan ekonomi global tahun	↓

KOMPONEN	RISIKO	ARAH
ekonomi global	2020 lebih tinggi dibandingkan dengan 2019, namun mengalami koreksi ke bawah (3,4 persen menjadi 3,3 persen). Perlambatan utamanya terjadi di negara <i>emerging market and developing economies</i>	
COVID-19	Optimisme pemulihan ekonomi global tertahan oleh merebaknya kasus COVID-19 setidaknya pada periode Triwulan I 2020. COVID-19 menekan ekonomi Tiongkok dan meluas ke ekonomi global sehubungan dengan interconnectedness ekonomi Tiongkok terhadap ekonomi global cukup tinggi. Tiongkok memiliki pangsa terbesar dalam perdagangan dunia. Ketidakpastian juga mendorong adanya portofolio adjustment pada pasar keuangan global tercermin dari meningkatnya permintaan pada safe haven asset, peningkatan permintaan komoditas emas yang terlihat dari trend kenaikan harganya, serta menahan inflows ke <i>emerging markets</i> .	↓
Tarif dagang AS pada Indonesia	Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) merubah Indonesia daftar negara berkembang menjadi negara maju dalam perdagangan internasional pada Februari 2020. Hal ini berpotensi membuat Indonesia kehilangan fasilitas Generalize System of Preference (GSP) atau keringan bea masuk impor barang ke AS. AS menduduki posisi kedua dalam porsi ekspor Indonesia. Di Jawa Barat, termasuk Kota Bekasi, AS menempati posisi pertama tujuan ekspor.	↓
Harga Komoditas Global	Masih berlanjutnya penurunan harga komoditas seiring meningkatnya risiko geopolitical di negara-negara penghasil komoditas energi.	↓
Volume perdagangan dunia	Volume perdagangan dunia diperkirakan kembali meningkat pada 2020. Meskipun potensi perbaikan terlambat oleh perkembangan COVID-19 pada awal 2020 sehingga pertumbuhannya mengalami koreksi ke bawah (3,2 persen menjadi 2,9 persen).	↓
Perang dagang AS-Eropa	Eskalasi perang dagang AS-Eropa pada awal 2020. AS telah menetapkan kenaikan tarif impor pesawat produksi Airbus dari Eropa sebesar 15 persen pada 18 Maret 2020. Peningkatan tarif juga diberlakukan untuk komoditas lain seperti wine, keju, kopi, dan buah zaitun sebesar 25 persen. AS juga berencana untuk menaikkan tarif impor mobil dari Uni Eropa yang menyebabkan ketegangan kian meningkat.	↓
Perang dagang AS-Tiongkok	Ketegangan perang dagang AS-Tiongkok mereda setelah penandatanganan kesepakatan fase I pada Januari 2020. Hal ini mendorong optimisme ekonomi global, tercermin dari perbaikan angka Purchasing Manager Index (PMI) berbagai negara dan kawasan. Pemerintah AS menyatakan perjanjian itu akan mengurangi beberapa tarif dan memungkinkan Tiongkok lepas dari pajak tambahan dari hampir US\$ 160 miliar thd barang-barangnya. Adapun Tiongkok akan memangkas tarif impor asal AS senilai US\$ 75 miliar mulai 14 Februari 2020. Tiongkok akan memangkas tarif dari sebelumnya 10 persen menjadi 5 persen dan tarif 5 persen menjadi 2,5 persen yang dikenakan pada lebih dari 1.700 item pada bulan September dan Desember 2019. Produk yang terkena tarif 10 persen termasuk makanan segar, unggas, dan kedelai. AS menerima komitmen Tiongkok untuk membeli produk makanan, pertanian, dan produk makanan laut AS ke Tiongkok bernilai US\$ 200 miliar selama dua tahun ke depan. Di sisi lain, Tiongkok juga akan mengakhiri praktik pemaksaan atau penekanan perusahaan asing untuk mentransfer teknologi mereka ke perusahaan China.	↑
Kebijakan Pemerintah Indonesia	Pemerintah memberikan dana stimulus fiskal total sebesar Rp 10 triliun bagi pariwisata, BUMD dan Pemerintah Daerah sehubungan dengan respon atas dampak COVID-19. Insentif yang akan diberikan pemerintah antara lain: (1) meningkatkan tunjangan Kartu Sembako dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu per bulan atau peningkatan anggaran Rp 4,56 triliun untuk 6 bulan; (2) pengaktifan kembali subsidi untuk	↑

KOMPONEN	RISIKO	ARAH
	pembayaran bunga hipotek perumahan senilai Rp 1,5 triliun; (3) alokasi dana sebesar Rp 443,39 miliar untuk diskon tiket pesawat sebesar 30 persen ke 10 destinasi yang telah ditentukan; (4) dana tambahan khusus untuk menarik wisatawan mancanegara sebesar Rp 298 miliar antara lain Rp 72 miliar untuk influencer menarik wisatawan manca-negara, Rp 103 miliar untuk promosi, Rp 25 miliar untuk kegiatan pariwisata, dan 98,5 miliar untuk maskapai dan biro perjalanan.	
Konsumsi Swasta dan Pemerintah	Konsumsi masyarakat diharapkan masih baik sehubungan dengan adanya kenaikan UMK pada 2020 dan adanya peningkatan realisasi anggaran serta jumlah PKH penerima bansos non tunai.	↑
Kebijakan Moneter Negara Maju	Fed Fund Rate pada Januari 2020 diputuskan berada pada level yang sama. The Fed mempertahankan suku bunga tidak berubah dan mempertahankan sikap wait and see. The Fed memantau dengan cermat munculnya risiko COVID-19, namun menilai terlalu dini untuk berspekulasi tentang ukuran atau persistensi dari efek COVID-19 dan apakah hal tersebut akan mengarah pada perubahan material dalam prospek ekonomi AS.	↔

Dampak COVID-19 diperkirakan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi melambat, karena menurunnya kontribusi sektor pariwisata, industri, dan jasa. Hal ini akan diikuti dengan risiko peningkatan jumlah pengangguran dan potensi peningkatan kerawanan sosial/kriminalitas. Selain itu, inflasi diperkirakan akan terus meningkat. Saat ini, Kota Bekasi memiliki tingkat inflasi tertinggi di Jawa Barat.

Secara nasional, dalam APBN 2020 sebelum COVID-19 diperkirakan tumbuh sebesar 5,3 persen. Namun setelah COVID-19 diperkirakan mengalami penurunan sampai 2,3 persen. Berdasarkan kondisi perekonomian, baik global, nasional, maupun regional sebagaimana diuraikan di atas, perekonomian Kota Bekasi pada tahun 2020 dan 2021 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 2.11. Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Bekasi 2020-2021

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Target 2020	Target 2021
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	81,59	81,59	82,31
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,86	-0,8	3,17
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,23	8,77	8,6
4	Kemiskinan	%	3,81	8,58	5,70
5	Gini Rasio	Nilai	0,35	0,35	0,35

Sumber: BPS Kota Bekasi 2020.

D. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sepanjang kurun masa 2015-2019, laju pertumbuhan ekonomi yang diraih Kota Bekasi pada awal periode cenderung menurun, kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan dan akhir periode kembali menunjukkan tren menurun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bekasi telah bertambah dari Rp55,5 triliun tahun 2015 menjadi Rp69,4 triliun tahun 2019. Pertambahan ini telah menghasilkan laju pertumbuhan

ekonomi Kota Bekasi sebesar 5,56 persen pada tahun 2015, namun pada tahun 2019 terjadi kemerosotan angka hingga 5,41 persen.

Tabel 2.12. Perkembangan Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi Menurut Harga Konstan 2010 Tahun 2015-2019

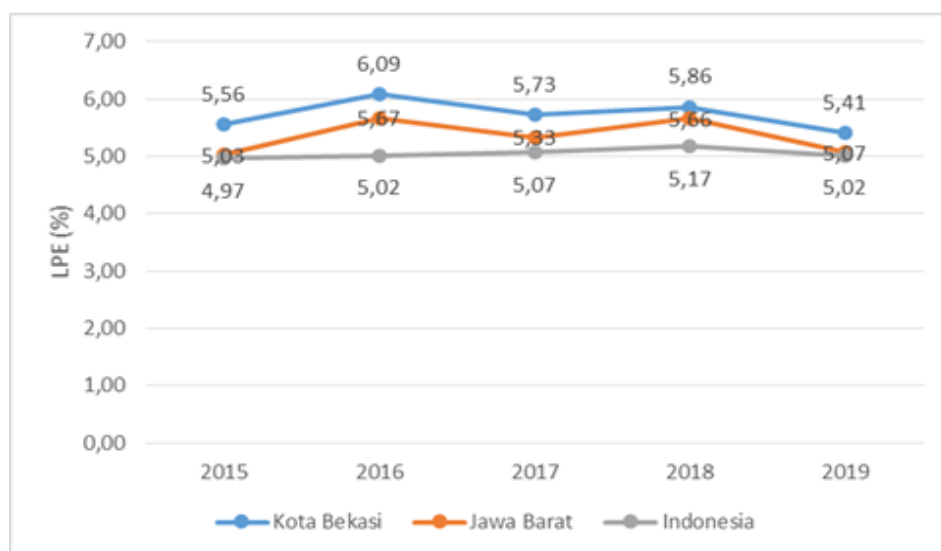
No	LAPANGAN USAHA	2015		2016		2017		2018		2019		Rata-rata
		Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	324,31	0,72	329,28	1,53	330,55	0,39	337,24	2,024	346,09	2,62	1,46
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	19.633,57	3,29	20.450,19	4,16	21.423,43	4,76	22.411,22	4,611	23.242,49	3,71	4,11
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.022,52	-10,56	1.081,09	5,73	841,20	-22,19	809,58	-3,759	808,02	-0,19	-6,19
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	145,21	236,91	48,09	-66,88	551,64	1047,10	54,38	-90,142	57,16	5,11	226,42
6	Konstruksi	5.877,04	10,26	6.407,34	9,02	7.073,07	10,39	7.748,12	9,544	8.500,32	9,71	9,79
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.858,30	4,87	13.583,48	5,64	14.326,49	5,47	15.129,51	5,605	15.905,23	5,13	5,34
8	Transportasi dan Pergudangan	5.199,58	8,78	5.463,65	5,08	5.799,08	6,14	6.117,54	5,492	6.596,75	7,83	6,67
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.027,23	8,23	2.248,29	10,90	2.450,12	8,98	2.681,40	9,440	2.751,72	2,62	8,04
10	Informasi dan Komunikasi	1.333,00	17,92	1.526,91	14,55	1.694,67	10,99	1.848,18	9,058	2000,60	8,25	12,15
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.523,15	7,44	1.698,55	11,52	1.788,20	5,28	1.884,30	5,374	1.924,41	2,13	6,35
12	Real Estat	958,04	7,13	1.021,45	6,62	1.091,85	6,89	1.167,45	6,924	1.255,84	7,57	7,03
13	Jasa Perusahaan	241,88	7,17	262,86	8,67	285,16	8,48	309,45	8,518	888,14	187,01	43,97
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.065,46	1,92	1.086,60	1,98	1.098,70	1,11	1.117,11	1,676	1.127,35	0,92	1,52
15	Jasa Pendidikan	1.165,19	10,20	1.254,04	7,63	1.365,23	8,87	1.461,79	7,073	1.541,22	5,43	7,84
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	618,02	10,82	679,65	9,97	747,48	9,98	807,45	8,023	888,14	9,99	9,76
17	Jasa Lainnya	1.563,58	8,21	1.689,58	8,06	1.838,13	8,79	1.960,34	6,649	2.128,95	8,60	8,06
18	Produk Domestik Regional Bruto	55.456,07	5,56	58.831,08	6,09	62.202,01	5,73	65.845,09	5,857	69.404,62	5,41	5,73

Sumber: BPS Kota Bekasi (2020).

Setelah tahun 2015 dan memasuki tahun 2016, perekonomian Kota Bekasi mampu bangkit kembali untuk meraih laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,09. Namun di tahun 2017 pertumbuhan ekonomi kembali merosot menjadi 5,73 persen dan kemudian terdapat peningkatan pada tahun 2018 menjadi 5,86 persen. Pun pada tahun 2019, terjadi

penurunan menjadi 5,41 persen. Dengan demikian, selama periode 2015-2019 rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi adalah 5,73 persen per tahun (lihat Tabel 2.12).

Angka laju pertumbuhan ekonomi yang diraih Kota Bekasi di atas ternyata lebih besar dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Provinsi Jawa Barat (rata-rata 5,35 persen per tahun) dan laju pertumbuhan ekonomi nasional (5,05 persen per tahun) untuk jangka waktu yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Bekasi memiliki daya saing kuat di level Provinsi Jawa Barat maupun Indonesia. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia selengkapnya dapat diperhatikan dalam Gambar 2-17



Sumber: BPS 2020.

**Gambar 2-17 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kota Bekasi, Jawa Barat, dan Nasional**

Pada tahun 2020 keadaan ekonomi Kota Bekasi turut diguncang dengan adanya bencana banjir pada bulan Januari hingga Februari serta adanya pandemi global COVID-19 yang menyebabkan pemberlakuan pembatasan kegiatan dan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB). Pembatasan kegiatan di Kota Bekasi dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama pada 16 Maret hingga 31 Maret 2020 dan tahap kedua yang dimulai pada 1 April hingga 14 April 2020, sedangkan PSBB diberlakukan pada 15 April hingga 29 April 2020. Pembatasan tersebut berdampak kepada pelaku usaha, daya beli, alokasi anggaran, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan asli daerah karena dilakukan pada kegiatan seperti kegiatan bersekolah dan bekerja, kegiatan keagamaan, kegiatan pada tempat dan/atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, kegiatan pada moda transportasi, serta kegiatan yang terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Adanya COVID-19 berdampak pada perubahan target realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi. Terdapat beberapa proyeksi yang dibuat dengan menyesuaikan situasi yang mungkin akan terjadi sepanjang tahun 2020. Situasi tersebut terbagi atas rencana tahun 2020, tanpa COVID-19, COVID-19 terkendali, COVID-19 lonjakan, dan COVID-19 ekstrim. Komponen PAD pertama yaitu pajak daerah diprediksi akan mendapatkan realisasi

sebesar Rp 1.983.354.342.058 tanpa COVID-19, Rp 1.90.012.652.235 saat COVID-19 terkendali, Rp 991.677.171.029 saat terjadi lonjakan COVID-19, dan menjadi Rp 793.341.736.823 saat ekstrim.



Sumber: Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Bencana COVID-19 di Kota Bekasi, 2020 yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2-18 Perbandingan Rencana PAD Tahun 2020
dengan Proyek Realisasi pada Berbagai Skenario
Dampak Bencana COVID-19

Komponen kedua yaitu retribusi daerah awalnya diproyeksikan akan mendapat sebesar Rp 163.398.144.985, realisasi tanpa COVID-19 sebesar Rp 134.460.926.156, dengan COVID-19 terkendali sebesar Rp 80.676.555.693, saat COVID-19 mengalami lonjakan sebesar Rp 73.953.509.386, dan ketika COVID-19 ekstrim menjadi sebesar Rp 67.230.463.078. Komponen ketiga adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan pada tahun 2020 mendapatkan sebesar Rp 21.614.515.182, prediksi realisasi tanpa COVID-19 sebesar Rp 13.577.508.773, saat COVID-19 terkendali sebesar Rp 6.788.754.386, serta saat COVID-19 mengalami lonjakan dan kondisi ekstrim sebesar Rp 5.431.003.509. Komponen keempat ialah Lain-lain PAD yang Sah yang direncanakan pada tahun 2020 mendapatkan sebesar Rp 718.817.145.039, prediksi realisasi tanpa COVID-19 sebesar Rp 592.335.853.957, saat COVID-19 terkendali diprediksi sebesar Rp 355.401.512.374, saat COVID-19 mengalami lonjakan diprediksi mendapatkan Rp 325.784.719.676, dan ketika COVID-19 ekstrim menjadi sebesar Rp 266.551.134.281.

E. Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2019 lalu, sumber utama pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi berasal dari sektor industri pengolahan. Dari laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,41 persen, sekitar 1,81 persen di antaranya bersumber dari sektor ini. Selanjutnya, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menduduki posisi kedua dengan

memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,24 persen. Sedangkan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sumber pertumbuhan ekonomi yang paling kecil, yakni mendekati 0,00 persen, selain sektor pertambangan dan penggalan yang memang tidak ada kegiatannya di Kota Bekasi (lihat Tabel 2.13).

Tabel 2.13 Perkembangan Sumber Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi, 2015-2019 (%)

No.	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
2	Pertambangan dan Penggalan	-	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	1,97	2,12	1,97	1,99	1,81	1,97
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,11	0,08	0,07	0,06	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,005	0,05	0,005	0,004	0,02
6	Konstruksi	0,59	0,66	0,65	0,69	0,66	0,65
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,29	1,41	1,32	1,35	1,24	1,32
8	Transportasi dan Pergudangan	0,52	0,57	0,53	0,54	0,51	0,54
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,20	0,23	0,23	0,24	0,21	0,22
10	Informasi dan Komunikasi	0,13	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,15	0,18	0,16	0,17	0,15	0,16
12	Real Estat	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
13	Jasa Perusahaan	0,02	0,03	0,03	0,03	0,07	0,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,10
15	Jasa Pendidikan	0,12	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
17	Jasa Lainnya	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
18	Produk Domestik Regional Bruto	5,56	6,09	5,73	5,86	5,41	5,75

Sumber: Kota Bekasi dalam Angka, 2020.

2. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi menggambarkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Struktur ekonomi dapat dilihat dari komposisi persentase nilai tambah (*percentage of added value*) yang dihasilkan oleh setiap sektor ekonomi di dalam suatu daerah/negara pada waktu tertentu.

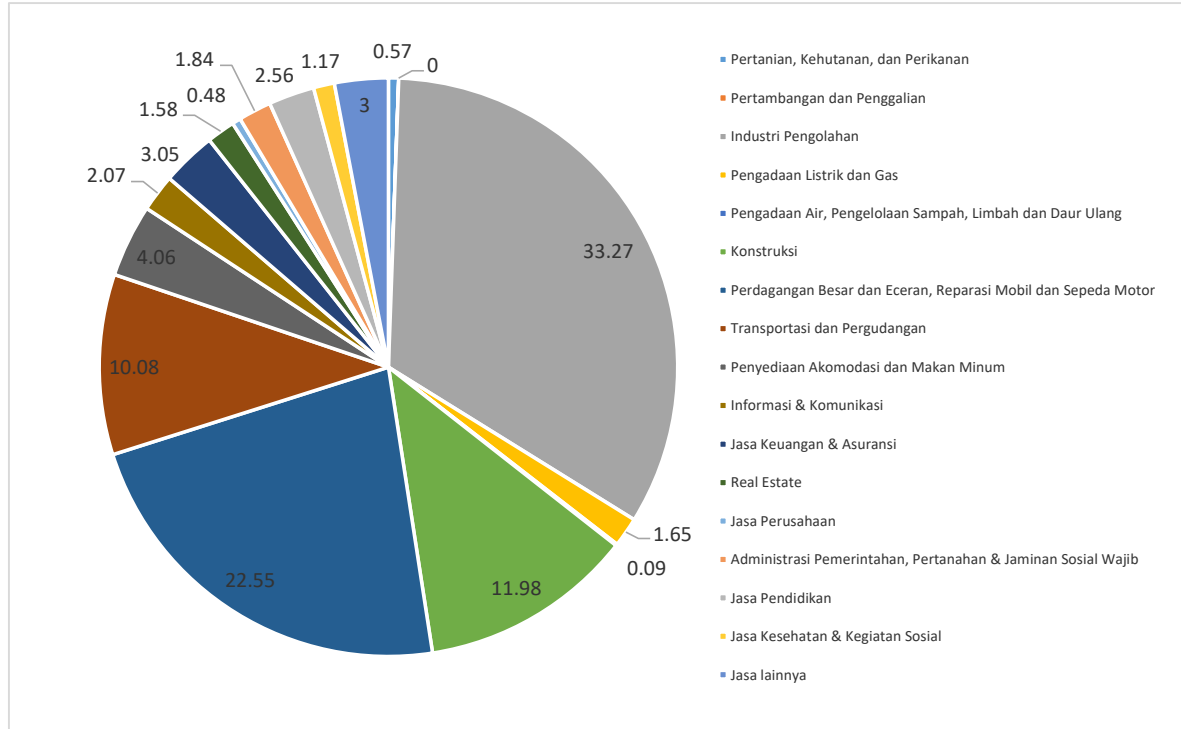
Sampai dengan tahun 2019, PDRB Kota Bekasi menurut harga berlaku telah mencapai angka Rp 98,21 triliun (lihat Tabel 2.14). Dua per tiga dari nilai ini dikuasai oleh tiga sektor, yakni sektor industri pengolahan sebesar 33,27 persen (Rp 32,67 triliun), sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebanyak 22,55 persen (Rp

22,14 triliun), dan sektor konstruksi sekitar 11,98 persen (Rp 11,77 triliun). Sejak tahun 2013 sektor konstruksi berhasil menggeser sektor transportasi dan pergudangan dari posisi ketiga. Keberhasilan ini berkat berkembangnya proyek-proyek besar infrastruktur dan perumahan di Kota Bekasi. Sektor transportasi dan pergudangan itu sendiri memiliki pangsa sebesar 10,08 persen atau senilai Rp 9,9 triliun pada tahun 2019 (lihat Gambar 2-19).

Tabel 2.14 Perkembangan Nilai PDRB Menurut Harga Berlaku dan Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi di Kota Bekasi, 2015-2019

LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB Harga Berlaku (Juta Rupiah) dan Distribusi PDRB (%)					
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	442,22	465,63	493,92	533,77	557,83
	0,62	0,61	0,59	0,59	0,57
2. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
3. Industri Pengolahan	24.925,66	26.619,00	28.615,70	30.819,26	32.672,53
	35,22	34,61	34,34	33,89	33,27
4. Pengadaan Listrik dan Gas	1.934,41	2.042,81	1.619,23	1.585,66	1.617,55
	2,73	2,66	1,94	1,74	1,65
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	52,22	60,50	71,64	80,97	92,74
	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09
6. Konstruksi	7.417,08	8.232,05	9.166,85	10.488,56	11.769,56
	10,48	10,70	11,00	11,53	11,98
7. Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.103,33	17.334,81	18.832,44	20.480,06	22.143,54
	22,76	22,54	22,60	22,52	22,55
8. Transportasi dan Pergudangan	7.093,75	7.709,78	8.482,73	9.153,58	9.898,28
	10,02	10,02	10,18	10,06	10,08
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.530,05	2.930,18	3.236,73	3.707,62	3.989,74
	3,58	3,81	3,88	4,08	4,06
10. Informasi & Komunikasi	1.351,50	1.549,05	1.720,10	1.879,11	2.034,55
	1,91	2,01	2,06	2,07	2,07
11. Jasa Keuangan & Asuransi	2.011,67	2.332,23	2.577,88	2.838,54	2.991,63
	2,84	3,03	3,09	3,12	3,05
12. Real Estate	1.118,28	1.206,53	1.310,05	1.417,48	1.548,90
	1,58	1,57	1,57	1,56	1,58
13. Jasa Perusahaan	202,68	336,52	371,32	418,64	476,17
	0,29	0,44	0,45	0,46	0,48
14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	1.432,25	1.495,98	1.649,22	1.771,70	1.805,39
	2,02	1,95	1,98	1,95	1,84
15. Jasa Pendidikan	1.496,50	1.687,34	1.918,28	2.172,29	2.518,82
	2,11	2,19	2,30	2,39	2,56
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	722,93	834,01	921,11	1.021,93	1.149,42
	1,02	1,08	1,11	1,12	1,17

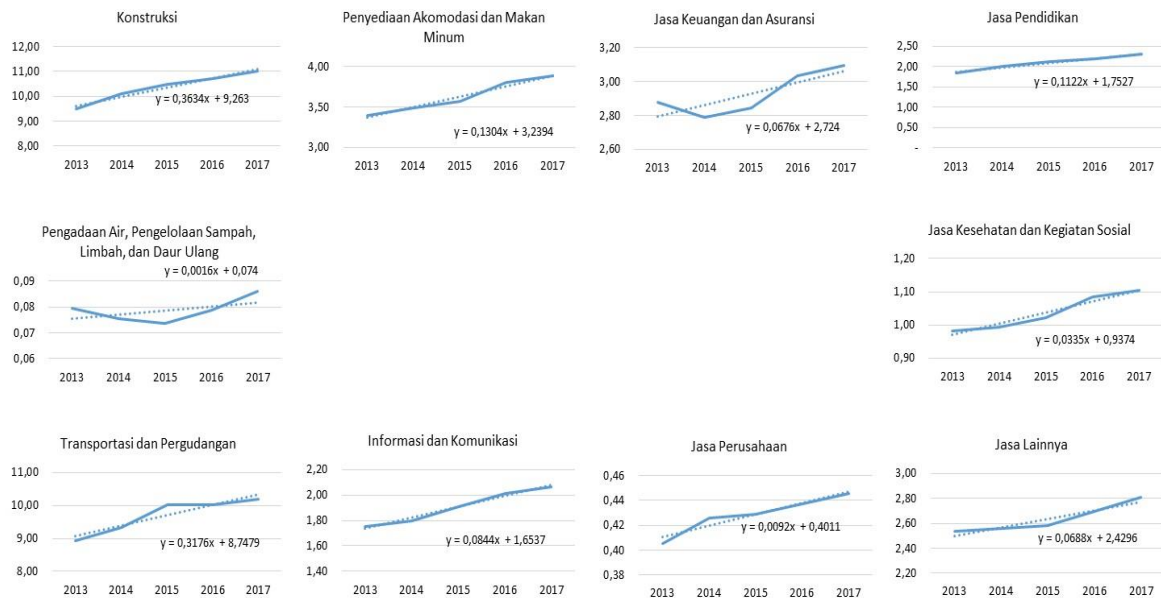
17. Jasa lainnya	1.829,69	2.072,43	2.340,46	2.615,32	2.942,19
	2,59	2,69	2,81	2,88	3,00
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	70.765,23	76.908,86	83.327,49	90.948,49	98.208,84
	100	100	100	100	100



Sumber: Kota Bekasi dalam Angka, 2020

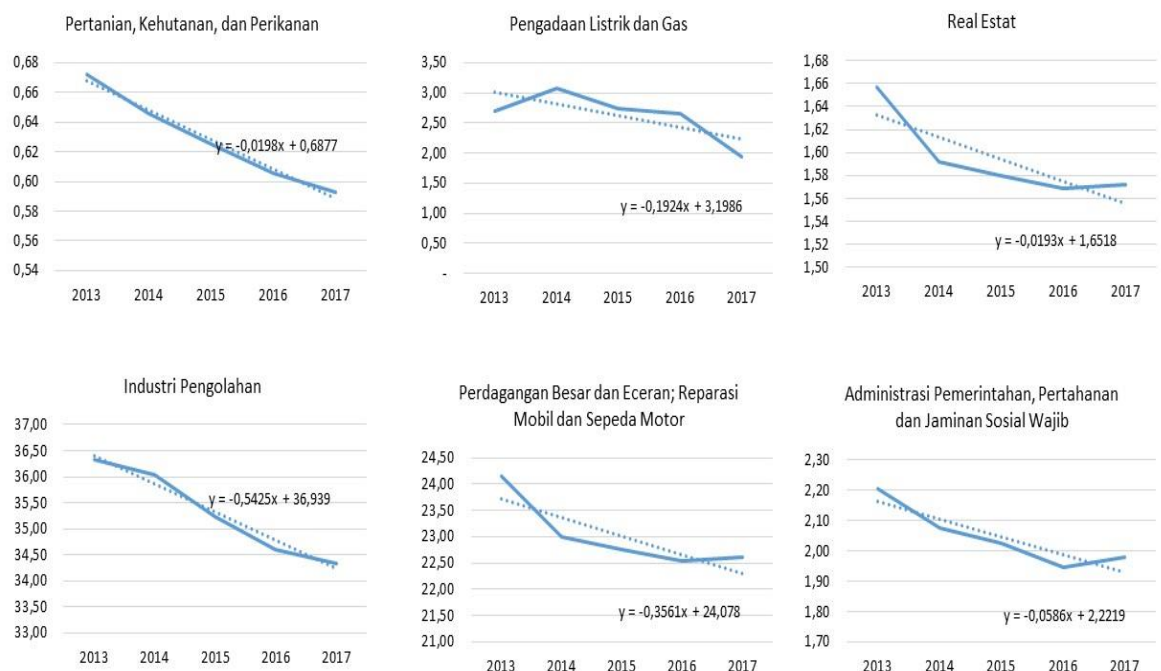
Gambar 2-19 Struktur Ekonomi Kota Bekasi, 2019 (Persen)

Dengan struktur perekonomian seperti di atas, jelaslah bahwa sektor industri pengolahan sangat diandalkan untuk menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi (*engine of growth*) di Kota Bekasi. Dalam empat tahun terakhir, nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor ini terus bergerak naik dari tahun ke tahun, tepatnya meningkat dari Rp 24,5 triliun tahun 2015 menjadi Rp 32,67 triliun tahun 2019.



Gambar 2-20 Sektor-sektor Ekonomi yang Memiliki Kecenderungan Kontribusi Meningkat di Kota Bekasi, 2013-2019

Dari enam belas sektor ekonomi yang berkembang di Kota Bekasi, ada sembilan sektor ekonomi yang kontribusinya terhadap PDRB memiliki tren meningkat selama kurun waktu 2013-2019, sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 2-20. Sebaliknya, Gambar 2-21 menunjukkan tujuh sektor ekonomi yang mengalami kecenderungan penurunan kontribusi terhadap PDRB Kota Bekasi.

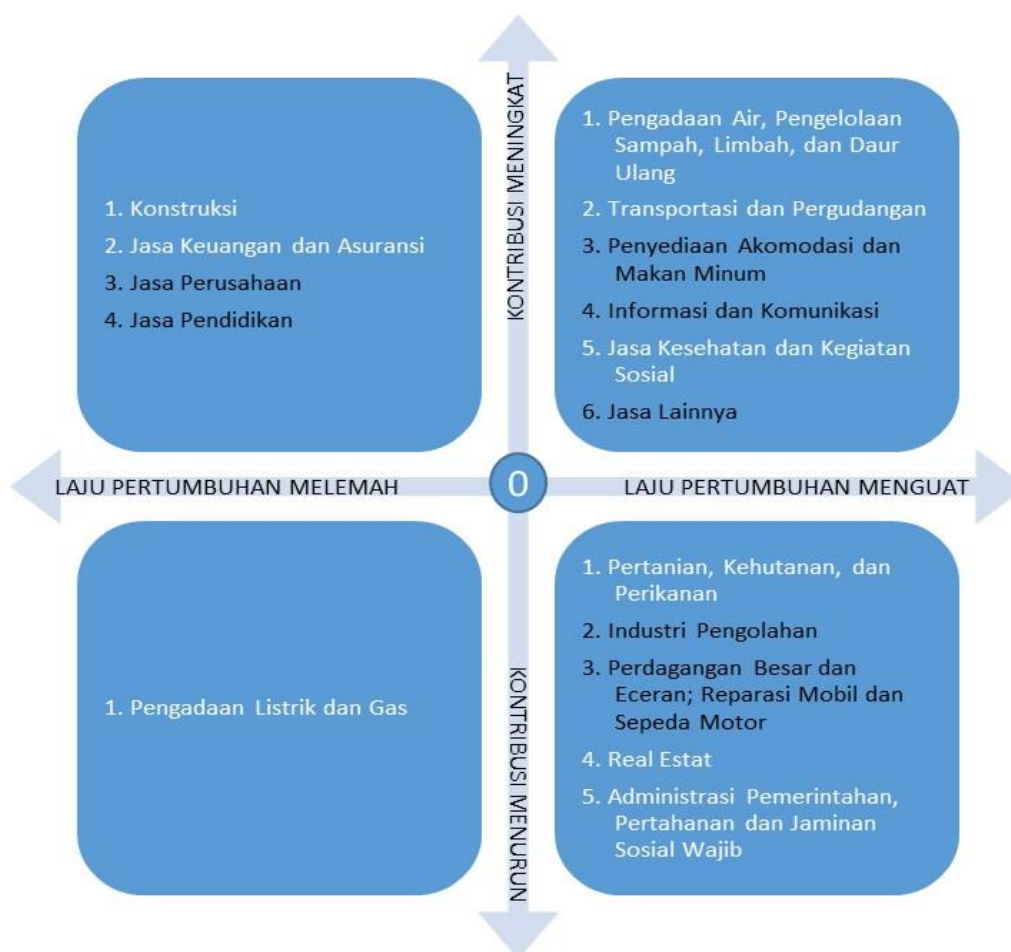


Gambar 2-21 Sektor-sektor Ekonomi yang Mengalami Tren Kontribusi Menurun di Kota Bekasi, 2013-2019

3. Matriks Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi

Berdasarkan tren laju pertumbuhan setiap sektor ekonomi dan tren kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap PDRB, maka dapat disusun matriks empat kuadran laju pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor ekonomi di Kota Bekasi sebagaimana terlihat dalam Gambar 2-22.

Sepanjang periode 2015-2019, ada enam sektor ekonomi yang meraih tren laju pertumbuhan menguat dan tren kontribusinya terhadap PDRB meningkat. Keenam sektor tersebut adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta sektor jasa lainnya. Artinya, keenam sektor ini memiliki daya saing yang kuat dan mampu meraih *economies of scale* dalam lingkup PDRB Kota Bekasi. Sebaliknya, sektor pengadaan listrik dan gas menjadi satu-satunya sektor ekonomi yang berdaya saing lemah karena mengalami tren laju pertumbuhan maupun kecenderungan kontribusi yang menurun.



Gambar 2-22 Matriks Empat Kuadran Tren Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi di Kota Bekasi, 2015-2019

Sementara itu, sektor-sektor ekonomi yang mengalami tren laju pertumbuhan melemah namun tren kontribusinya terhadap PDRB meningkat, terdiri dari sektor

konstruksi, sektor jasa perusahaan, sektor jasa keuangan dan asuransi dan sektor jasa pendidikan.

Sedangkan lima sektor lainnya yang menggoreskan laju pertumbuhan menguat tetapi kontribusinya terhadap PDRB menurun adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor real estate, serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.

2.2.2 Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

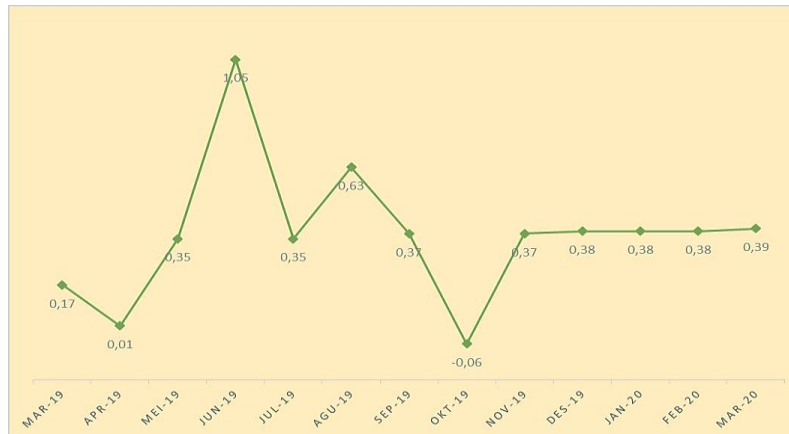
Sementara itu, Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah suatu indeks yang menghitung atau mengukur rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga (*household*) atau masyarakat dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur laju inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Laju inflasi di Jawa Barat dipantau di 7 (tujuh) kota, termasuk Kota Bekasi. Dari 7 Kota pantauan IHK di Provinsi Jawa Barat, tercatat semua kota mengalami inflasi. Pada Maret 2020 Kota Bekasi mengalami inflasi sebesar 0,39 persen atau yang tertinggi di antara kota-kota yang dihitung dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,29. Tingkat inflasi tahun kalender Kota Bekasi (*year to date*) Maret 2020 sebesar 1,15 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (*year on year*), Maret 2020 terhadap Maret 2019) sebesar 4,18 persen (Berita Resmi Statistik BPS Kota Bekasi, 2020). Kedua angka tersebut lebih tinggi dari tingkat inflasi di Jawa Barat pada periode yang sama. Tingkat inflasi tahun kalender Kota Bekasi Maret 2020 tercatat sebesar 1,10 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 3,95 persen (BPS Jawa Barat, April 2020) (perhatikan Bekasi, 2020

Gambar 2-23).

Inflasi di Kota Bekasi sampai dengan Maret 2020 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Dari sebelas kelompok pengeluaran, tujuh kelompok pengeluaran mengalami inflasi, satu kelompok mengalami deflasi, dan tiga kelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan indeks. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya inflasi sebesar 1,65 persen; kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 1,28 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 0,73 persen; kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi sebesar 0,45 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga inflasi sebesar 0,32 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman inflasi sebesar 0,26 persen; dan kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar inflasi sebesar 0,25 persen. Sementara yang mengalami deflasi kelompok

rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,01 persen. Kelompok pengeluaran transportasi; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; dan kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks.



Sumber: BPS Kota Bekasi, 2020

Gambar 2-23 Perkembangan Inflasi Kota Bekasi, Maret 2019-2020 (Persen)

Pada Maret 2020, dari 7 (tujuh) kota di Jawa Barat, seluruh kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bekasi sebesar 0,39 persen. Berturut-turut diikuti Kota Depok inflasi sebesar 0,36 persen, Kota Tasikmalaya inflasi sebesar 0,31 persen, Kota Cirebon inflasi sebesar 0,29 persen, Kota Bandung inflasi sebesar 0,25 persen, Kota Sukabumi inflasi sebesar 0,30 persen, dan terakhir Kota Bekasi inflasi sebesar 0,04 persen.

Tabel 2.15 Perbandingan Indeks dan Inflasi Maret 2020 Kota-Kota di Provinsi Jawa Barat dengan Jawa Barat dan Nasional

KOTA		Maret 2020	
		IHK	Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	
1. BOGOR	105,95	0,04	
2. SUKABUMI	104,75	0,30	
3. BANDUNG	104,89	0,25	
4. CIREBON	102,72	0,29	
5. BEKASI	106,29	0,39	
6. DEPOK	105,82	0,36	
7. TASIKMALAYA	102,78	0,31	
JAWA BARAT	105,62	0,31	
NASIONAL	104,72	0,10	

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2020.

2.2.3 PDRB per Kapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah/negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan

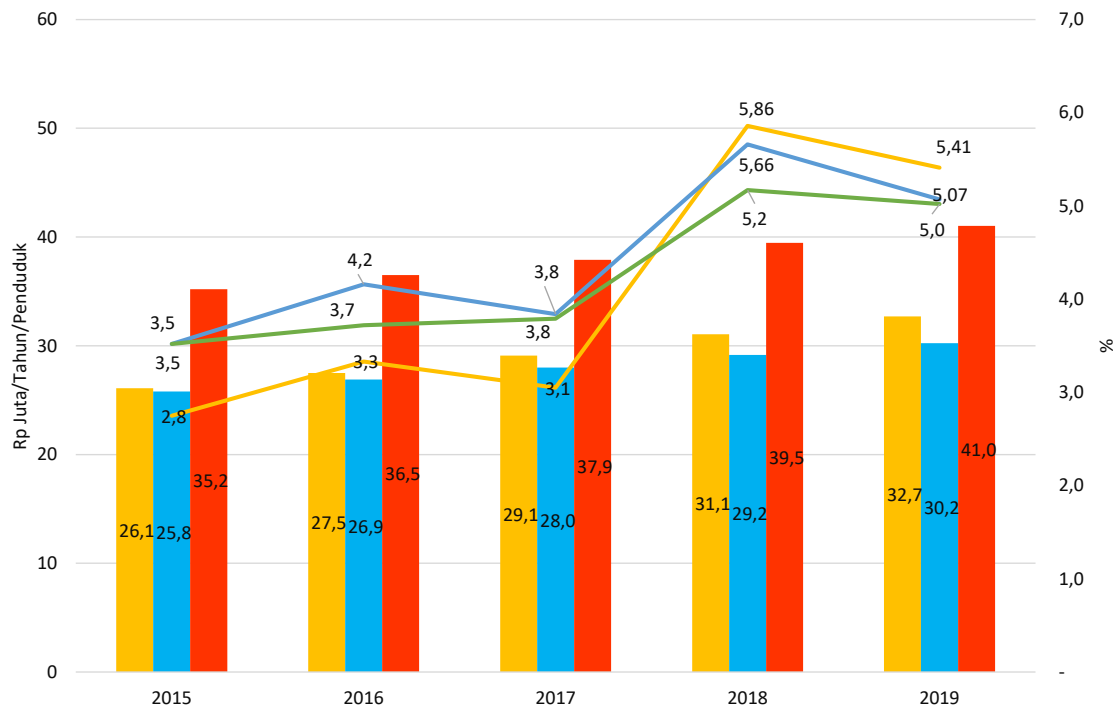
daerah/nasional suatu daerah/negara dengan jumlah penduduk daerah/negara tersebut. Pendapatan daerah/negara di sini direpresentasikan oleh PDRB/PDB. Berikut di bawah ini akan diuraikan PDRB per kapita Kota Bekasi selama kurun waktu 2015-2019.

Seiring dengan pertambahan penduduk di Kota Bekasi dari 2.714.830 jiwa tahun 2015 menjadi 3.003.920 jiwa tahun 2019 (BPS, 2020), produktivitas masyarakat di kota ini juga meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini diindikasikan oleh perkembangan PDRB per kapita sepanjang kurun waktu 2017-2019. Secara nominal, PDRB per kapita Kota Bekasi pada tahun 2017 telah mencapai sekitar Rp 29,1 juta dan semakin bertambah besar hingga mencapai Rp 32,7 juta tahun 2019. Sedangkan secara riil meningkat dari Rp 19,4 juta menjadi Rp 21,63 juta. Apabila dibandingkan dengan penduduk Provinsi Jawa Barat dan Indonesia secara keseluruhan, pendapatan masyarakat (PDRB per kapita) di Kota Bekasi lebih rendah, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2.16 dan Gambar , baik secara nominal maupun riil. Dilihat dari sisi tingkat pertumbuhannya, laju PDRB per kapita Kota Bekasi (rata-rata 2,97% per tahun selama 2013-2017) juga lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat (rata-rata 4,25%) dan nasional (rata-rata 4,02%). Di sisi lain, laju pertumbuhan PDRB per kapita riil masyarakat di Kota Bekasi cenderung meningkat selama periode kajian. Sebaliknya, laju pertumbuhan PDRB per kapita riil masyarakat di Provinsi Jawa Barat maupun Indonesia justru mengalami tren menurun.

Tabel 2.16 Perkembangan PDRB per Kapita dan Laju Pertumbuhannya di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB per Kapita Nominal (Rp Juta)					
Kota Bekasi	26,1	27,6	29,1	37,3	40,1
Provinsi Jawa Barat	32,6	34,9	37,2	40,3	43,09
Indonesia	45,1	48,0	51,9	56,17	59,32
PDRB per Kapita Riil (Rp Juta)					
Kota Bekasi	26,1	27,5	29,1	31,06	32,7
Provinsi Jawa Barat	25,8	26,9	28,0	29,16	30,24
Indonesia	35,2	36,5	37,9	39,46	41,02
Laju Pertumbuhan (%)					
Kota Bekasi	2,75	3,33	3,05	5,86	5,41
Provinsi Jawa Barat	3,52	4,16	3,84	5,66	5,07
Indonesia	3,52	3,72	3,79	5,17	5,02

Sumber: Kota Bekasi dalam Angka, 2020.



Gambar 2-24 Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia 2015-2019 yang dikelola dalam SIPD

2.2.4 Indeks Gini

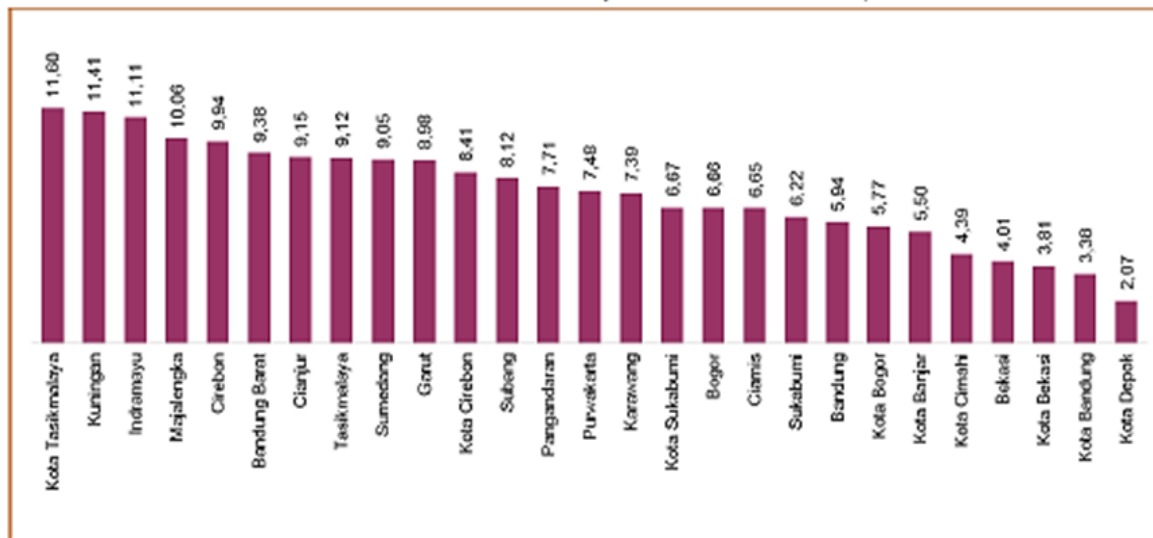
Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di suatu daerah/negara. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna, sedangkan nilai 1 mengindikasikan ketimpangan sempurna. Berikut ini akan diuraikan indeks Gini Kota Bekasi sepanjang rentang waktu 2014-2018. Indeks Gini di Kota Bekasi mengalami fluktuasi selama periode 2014-2018. Pada tahun 2014, indeks Gini di kota ini mencapai angka 0,31 dan melonjak menjadi 0,41 pada tahun 2015 dan kemudian turun pada tahun 2016 menjadi 0,38. Pada tahun 2017 dan 2018, indeks gini Kota Bekasi sama-sama sebesar 0,35. Pun pada tahun 2020 diproyeksikan akan kembali mendapatkan angka 0,35. Secara keseluruhan, indeks Gini di Kota Bekasi berada pada angka rata-rata 0,362, yang berarti termasuk kategori ketimpangan sedang.¹

2.2.5 Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Di Kota Bekasi, persentase penduduk di atas garis kemiskinan mengalami kenaikan dari 95,89 persen pada tahun 2018 menjadi 96,19 persen pada tahun 2019. Kenaikan ini

¹ Arti besaran indeks Gini: $G=0$ pemerataan sempurna, $0 < G < 0,3$ ketimpangan rendah, $0,3 \leq G \leq 0,5$ ketimpangan sedang, $0,5 < G < 1$ ketimpangan tinggi, dan $G=1$ ketimpangan absolut.

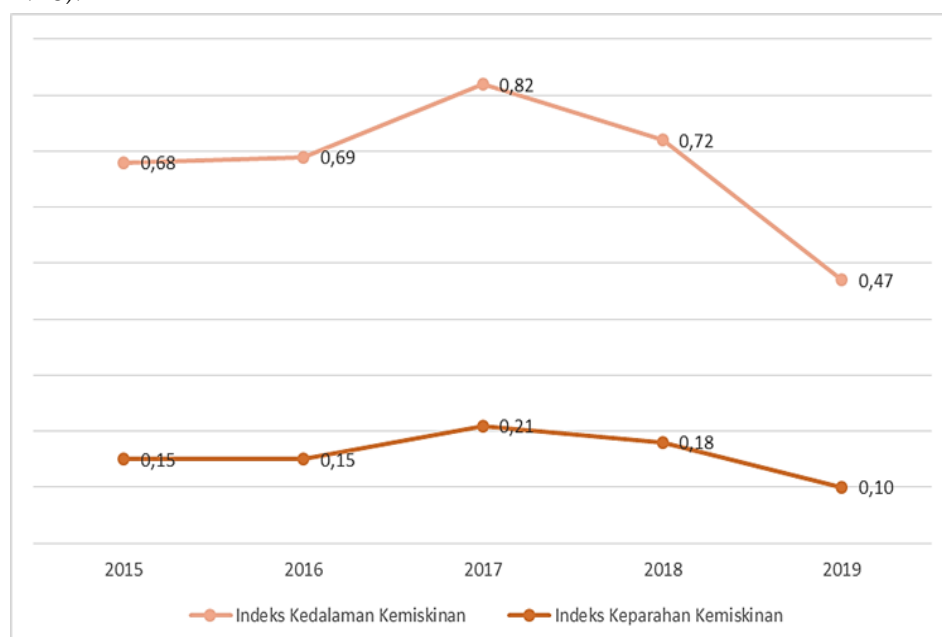
terjadi karena keberhasilan Kota Bekasi dalam menurunkan persentase penduduk miskin dari 4,11 persen pada tahun 2018 menjadi 3,81 persen pada tahun 2019 yang merupakan urutan ketiga terbawah dari antara Kabupaten/Kota di Jawa Barat (perhatikan Gambar 2-25)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2020 yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2-25 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020

Selain itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Bekasi mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2015 Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 0,68 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 mencapai 0,82 dan kemudian menurun hingga tahun 2019 dengan besaran 0,47, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 0,15 dan pada tahun 2017 terjadi kenaikan hingga 0,21 kemudian mengalami penurunan hingga 0,10 pada 2019 (lihat Gambar 2.18).

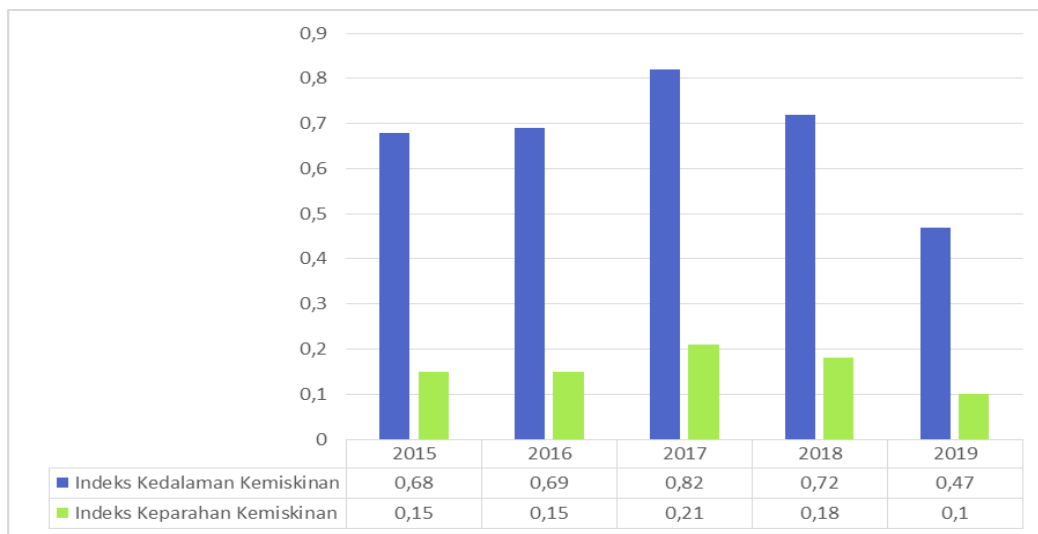


Sumber: Kota Bekasi dalam Angka, 2020 yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2-26 Garis Kemiskinan Kota Bekasi Tahun 2015-2019

2.2.6 Rasio Kesenjangan Kemiskinan

Rasio kesenjangan kemiskinan atau disebut juga indeks kedalaman kemiskinan atau (*poverty gap index*, P_1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.



Sumber: Kota Bekasi dalam Angka, 2020 yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2-27 Perkembangan Rasio Kesenjangan Kemiskinan di Kota Bekasi, 2015-2019

Sepanjang kurun waktu 2015-2019, rasio kesenjangan kemiskinan di Kota Bekasi bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat hingga tahun 2017 dan turun setelahnya. Pada tahun 2015, rasio kesenjangan kemiskinan di kota ini mencapai angka rasio 0,68. Beberapa tahun kemudian, seperti dapat dilihat pada Gambar 2-, meningkat hingga 0,82. Akan tetapi, rasio kesenjangan kemiskinan di Kota Bekasi kembali menurun menjadi 0,72 pada tahun 2018 dan kembali turun menjadi 0,47 pada tahun 2019, yang berarti lebih rendah dibandingkan rasio tahun 2015. Kecenderungan serupa juga diperlihatkan oleh rasio keparahan kemiskinan untuk rentang waktu bersamaan.

2.2.7 Proporsi Penduduk dengan Pendapatan Kurang dari US\$1 per Kapita per Hari

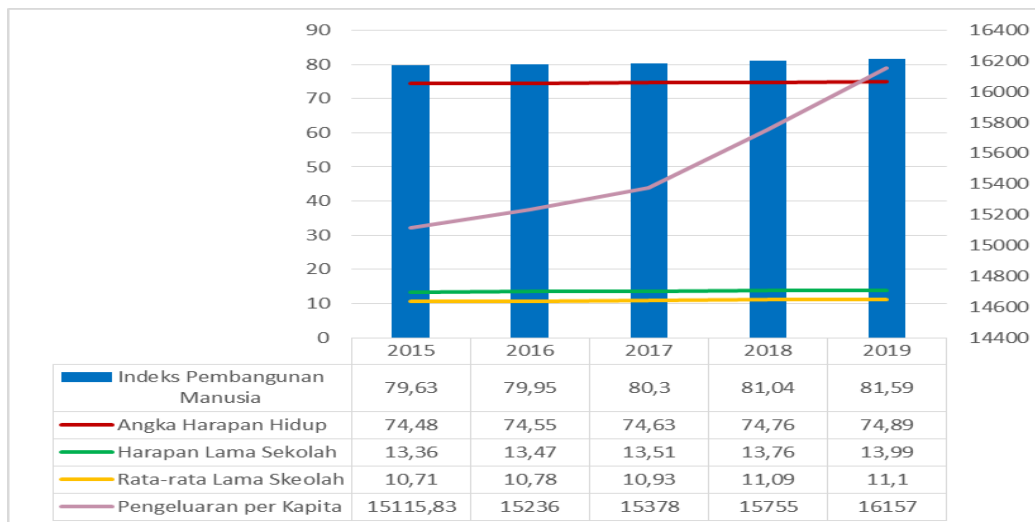
Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US\$1 per kapita per hari lebih dikenal dengan istilah persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin dapat didefinisikan sebagai proporsi penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per hari dibawah garis kemiskinan. Di Kota Bekasi, persentase penduduk miskin berhasil ditekan dari 5,5 persen pada tahun 2014 menjadi 4,11 persen pada tahun 2018.

2.2.8 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Hasil pengukuran IPM dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal berikut:

- Mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia (masy/penduduk).
- Menentukan peringkat atau level pembangunan suatu daerah/negara.
- Menjadi ukuran kinerja pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

- Khusus di Indonesia, digunakan sebagai indikator untuk penentuan besaran DAU.



Sumber: BPS Kota Bekasi, 2019 yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2-28 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya di Kota Bekasi, 2015-2019

Dari 2-28 dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 IPM Kota Bekasi telah berhasil mencapai angka 81,59 persen, meningkat 0,55 dari tahun 2018. Capaian ini menempatkan Kota Bekasi pada status pembangunan manusia “sangat tinggi”. Status ini merupakan babak baru dalam pembangunan kualitas manusia di Kota Bekasi.

Dibandingkan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, indeks pembangunan manusia yang diraih oleh Kota Bekasi jauh lebih tinggi. Pada tahun 2018, IPM Provinsi Jawa Barat dan Indonesia masing-masing adalah 72,03 (kategori tinggi) dan 71,92 (kategori tinggi). Akan tetapi, dari sisi pertambahan kenaikan angka IPM, Kota Bekasi (rata-rata bertambah sebesar 0,485 per tahun) masih di bawah Provinsi Jawa Barat (rata-rata meningkat sebanyak 0,61 setahun) dan Indonesia (rata-rata naik sekitar 0,62 setiap tahunnya) (<https://www.bps.go.id/site/resultTab>). Pada tahun 2019, Kota Bekasi memperoleh IPM sebesar 81,59 yang mana lebih tinggi apabila dibandingkan dengan IPM Jawa Barat pada tahun 2019 yang mendapatkan perolehan sebesar 72,03.

2.2.9 Harapan Lama Sekolah

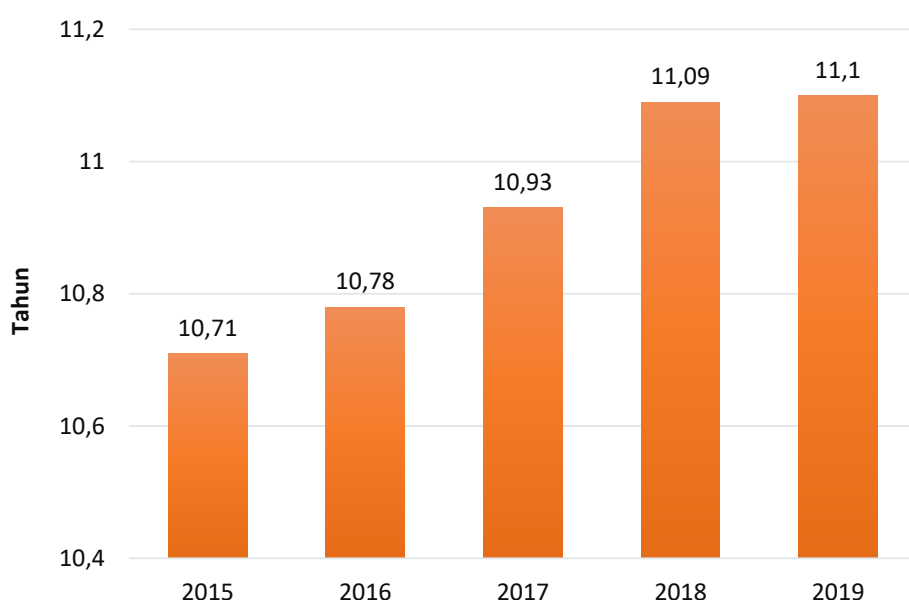
Harapan lama sekolah (HLS) menggantikan komponen Angka Melek Huruf (AMH) pada metode lama. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu program wajib belajar. Standar HLS adalah minimal 0 tahun dan maksimal 18 tahun.

Angka harapan lama sekolah Kota Bekasi tahun 2019 adalah sebesar 13,99 tahun (simak kembali Sumber: *BPS Kota Bekasi, 2019 yang dikelola dalam SIPD*

Gambar 2-2). Artinya, lama sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 13,99 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan jenjang diploma D-II.

2.2.10 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar RLS adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.



Sumber: *BPS Kota Bekasi, 2019 yang dikelola dalam SIPD*

Gambar 2-29 Perkembangan Angka Rata – Rata Lama Sekolah

Gambar di atas tampak bahwa angka rata-rata lama sekolah di Kota Bekasi pada tahun 2019 adalah 11,10 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kota Bekasi usia 15 tahun ke atas sudah menempuh 11,09 tahun masa sekolah atau menyelesaikan pendidikan setara kelas XI. Angka rata-rata lama sekolah yang telah dicapai Kota Bekasi ini mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan rata-rata kenaikan sebesar 3,53 persen tiap tahunnya.

2.2.11 Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup (*age specific rate*) penduduk adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup dapat diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Usia harapan hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi jumlahnya besar,

maka usia harapan hidup akan rendah. Usia harapan hidup di negara-negara maju relatif tinggi karena tingkat kesehatan ibu dan bayinya pada umumnya juga tinggi. Sebaliknya, di negara berkembang biasanya relatif rendah karena buruknya tingkat kesehatan ibu dan bayi. Di Kota Bekasi, sebagaimana terlihat, angka usia harapan hidup saat lahir sudah mencapai 81,59 tahun.

2.2.12 Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah suatu kondisi di mana seseorang dinyatakan kekurangan nutrisi (malnutrisi), atau dengan kata lain status nutrisinya berada di bawah standar rata-rata. Nutrisi yang dimaksud bisa berupa protein, karbohidrat, dan kalori. Gizi buruk merupakan bentuk terparah akibat kurang gizi menahun. Selain akibat kurang mengkonsumsi jenis makanan bernutrisi seimbang, gizi buruk pada balita juga bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang mengakibatkan gangguan pencernaan atau penyerapan zat makanan yang penting untuk tubuh. Kelaparan yang lama bisa berujung kepada status gizi buruk. Masalah gizi buruk merupakan sindrom kemiskinan yang erat kaitannya dengan masalah ketahanan pangan di tingkat rumah tangga serta juga berkaitan dengan aspek pengetahuan dan perilaku yang kurang mendukung pola hidup sehat.

Di Kota Bekasi, persentase balita dengan status gizi sangat kurus (gizi buruk) relatif rendah. Selama jangka waktu 2014-2019, persentase balita dengan status gizi sangat kurus di kota ini sempat meningkat hingga tahun 2018 menjadi 1,92 persen dan kemudian turun pada tahun 2019 menjadi 1,44 persen. Dalam waktu satu tahun (2018 hingga 2019), persentase balita sangat kurus berhasil ditekan sebesar 0,48 persen (lihat Tabel 2.17). Pada tahun 2019 terdapat 201 anak balita yang mengalami gizi buruk dan Kota Bekasi juga merupakan salah satu lokus stunting di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019. Pada tahun tersebut pula, ada sebanyak 11.737 anak yang ditemukan mengalami kasus stunting dan kemudian diberikan perawatan atau pelayanan kesehatan.

**Tabel 2.17 Perkembangan Persentase Status Gizi Balita di Kota Bekasi
2014-2019**

No.	Kecamatan	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sangat Kurus	0,16	0,13	0,21	0,2	1,92	1,44
2	Kurus	4,24	3,61	3,49	3,4	4,0	4,59
3	Normal	85,67	87,09	8,72	87,21	87,21	86,33
4	Gemuk	9,92	9,17	9,11	9,18	9,18	7,64

Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kota Bekasi, 2019 yang dikelola dalam SIPD

2.2.13 Prevalensi Balita Gizi Kurang

Seperti halnya balita gizi buruk, kecenderungan serupa juga diperlihatkan oleh prevalensi balita gizi kurang atau balita dengan status gizi kurus. Selama periode 2014-2019, sebagaimana tampak pada Tabel 2.11, prevalensi balita gizi kurang pada awalnya menurun

dari 4,24 persen menjadi 3,61 persen dan kemudian menurun hingga tahun 2017 menjadi 3,4 persen, namun memasuki tahun 2018 angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,6 persen menjadi 4,0 persen dan kembali naik pada tahun 2019 menjadi 4,59 persen.

2.2.14 Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.² Desa siaga aktif merupakan bentuk peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh desa siaga adalah sebagai berikut (Departemen Kesehatan 2006):

1. Memiliki 1 (satu) orang tenaga bidan yang menetap di desa tersebut dan sekurang-kurangnya 2 orang kader desa.
2. Memiliki minimal 1 (satu) bangunan pos kesehatan desa (poskesdes) beserta peralatan dan perlengkapannya. Poskesdes tersebut dikembangkan oleh masyarakat yang dikenal dengan istilah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan minimal:
 - Pengamatan epidemiologis penyakit menular dan yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa (KLB) serta faktor-faktor risikonya.
 - Penanggulangan penyakit menular dan yang berpotensi menjadi KLB serta kekurangan gizi.
 - Kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan.
 - Pelayanan kesehatan dasar, sesuai dengan kompetensinya.
 - Kegiatan pengembangan seperti promosi kesehatan, kadarzi, PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat), penyehatan lingkungan, dan lain-lain.

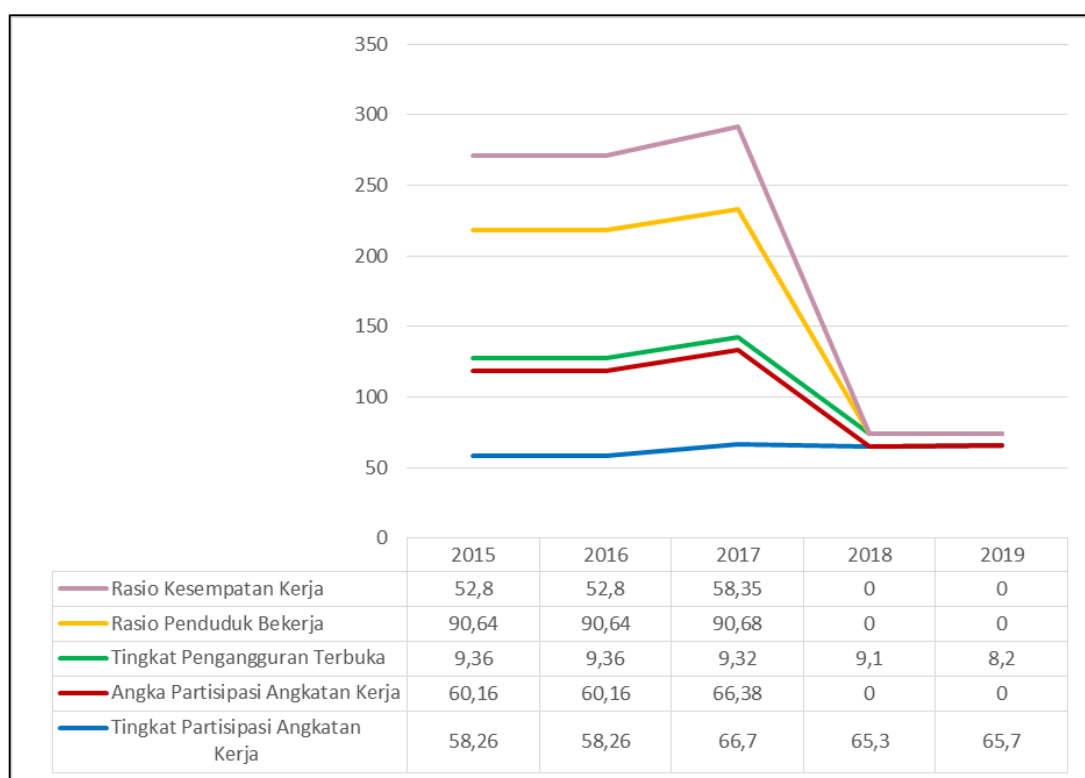
Di Kota Bekasi, ketersediaan data mengenai cakupan desa/kelurahan siaga maupun desa/kelurahan siaga aktif masih minim. Merujuk pada beberapa seri publikasi Profil Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, di Kota Bekasi pada tahun 2016 terdapat 32 kelurahan siaga kategori pratama (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2017: Tabel 71). Tidak diketahui, apakah ke-32 kelurahan siaga ini berstatus aktif semua atau hanya sejumlah tertentu. Sementara itu, pada tahun 2013 di Kota Bekasi ada 47 kelurahan siaga, tetapi kelurahan siaga yang aktif hanya mencakup 19 kelurahan, atau sekitar 40,43% (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2014: Tabel 74A).

² Baca: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/MENKES/SK/VI II/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga.

2.2.15 Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Dengan begitu, angka partisipasi angkatan kerja merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang menunjukkan besarnya persentase partisipasi angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.

Di Kota Bekasi, angka partisipasi angkatan kerja cenderung meningkat selama periode 2015-2017, yakni dari 60,16 persen pada tahun 2015 hingga 2016 menjadi 66,38 persen tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 hingga 2019, belum terdapat data ditemukan terkait angka partisipasi angkatan kerja. (perhatikan Gambar 2-29).



Sumber: Kota Bekasi dalam Angka, 2020 yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2-30 Perkembangan Beberapa Indikator Ketenagakerjaan di Kota Bekasi, 2015-2019

2.2.16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan/kemudahan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia, sehingga untuk mendapatkannya relatif mudah.

Seperti halnya perkembangan angka partisipasi angkatan kerja, selama jangka waktu 2015-2019 tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Bekasi juga mengalami fluktuasi. Pada

awalnya tidak terjadi peningkatan maupun penurunan dari tahun 2015 hingga 2016 dengan capaian sebesar 58,26 persen dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga 66,7 persen (lihat kembali Gambar 2-29). Angka TPAK tahun 2018 naik menjadi 65,3 persen dan pada tahun 2019 kembali naik menjadi 65,7 persen.

2.2.17 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari:

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bekasi menurut dari tahun 2015 dan 2016 ke 2017, yaitu dari 9,36 persen menjadi 9,32 persen dan menurun kembali pada tahun 2018 menjadi 9,1 persen dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 8,2 persen. Menurunnya persentase tingkat pengangguran terbuka ini bukan disebabkan oleh meningkatnya lapangan pekerjaan yang mampu menyerap pengangguran terbuka, tetapi lebih dikarenakan meningkatnya persentase penduduk bukan angkatan kerja selama kurun waktu bersamaan

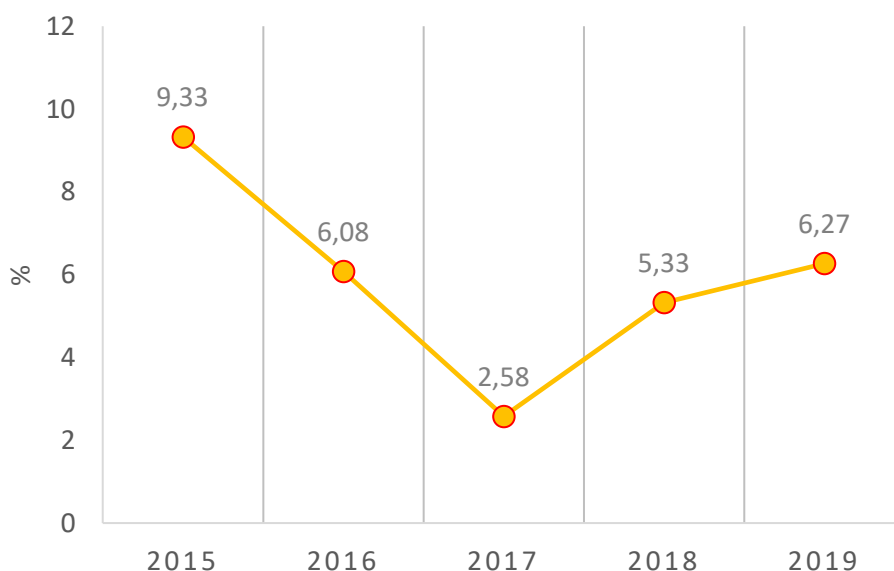
2.2.18 Rasio Penduduk yang Bekerja

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Gambar 2-29 memperlihatkan bahwa rasio penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kota Bekasi memperlihatkan tren meningkat dari 90,64 persen (2015) menjadi 90,68 persen (2017).

2.2.19 Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang berada pada rentang usia kerja yang siap melaksanakan pekerjaan, antara lain mereka yang telah bekerja, mereka yang sedang mencari kerja, mereka yang sedang menempuh pendidikan (sekolah), dan juga mereka yang sedang mengurus rumah tangga.

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja di Kota Bekasi dalam dua tahun terakhir kembali mengalami peningkatan setelah sebelumnya pada periode 2015 - 2017 sempat mengalami penurunan dari 9.3% menjadi 2,58% (lihat Gambar).



Gambar 2-31 Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja di Kota Bekasi, Tahun 2015-2019

2.2.20 Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Kesempatan kerja merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan peluang kerja yang bisa didapatkan oleh para angkatan kerja yang telah siap dan mau bekerja. Kesempatan kerja biasanya menggambarkan lowongan pekerjaan yang masih bisa diisi oleh para pencari kerja. Dengan kata lain, kesempatan kerja adalah lapangan pekerjaan yang masih bisa diisi oleh orang yang mau bekerja.

Sebagaimana dapat dilihat kembali dalam Gambar 2-29, rasio kesempatan kerja di Kota Bekasi pada awalnya meluas dari 55,63 persen tahun 2013 menjadi 56,39 persen tahun 2014. Akan tetapi, seiring dengan penurunan laju pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2015 rasio kesempatan kerja di kota ini menurun hingga 52,80 persen.

2.2.21 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional³, tingkat kesejahteraan sebuah keluarga dapat dibagi ke dalam 5 tahap, yaitu Pra Sejahtera (sangat miskin), Sejahtera Tahap I (miskin), Sejahtera Tahap II (hampir miskin), Sejahtera Tahap III (tidak miskin), dan Sejahtera Tahap III Plus.

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keluarga berencana. Kebutuhan dasar minimal mencakup:

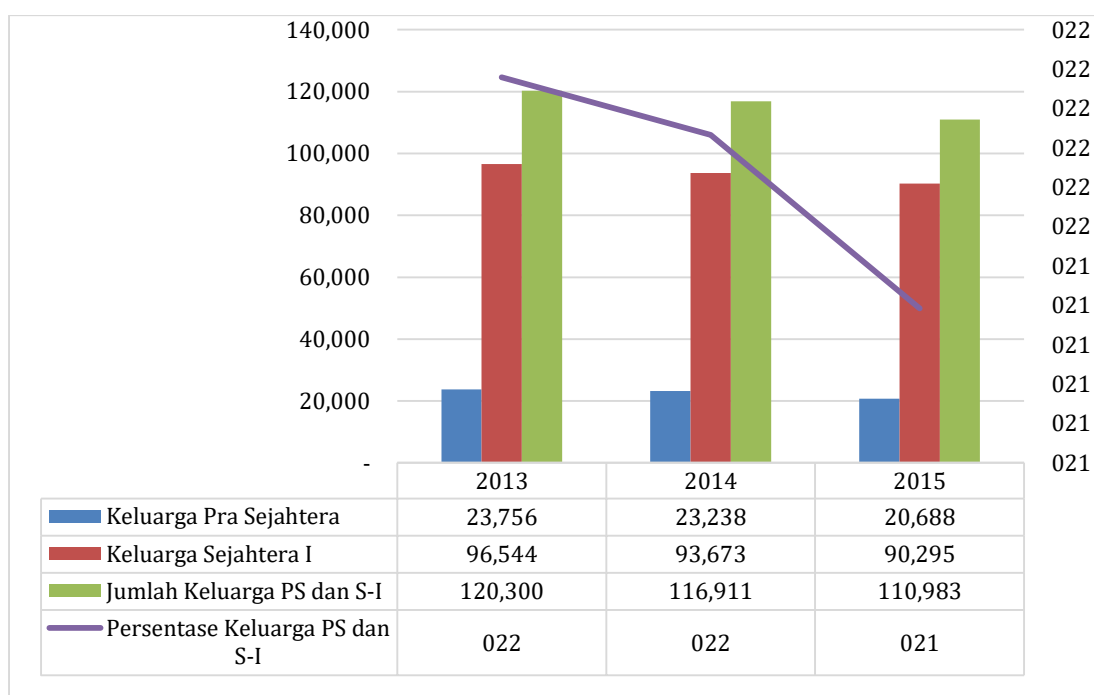
- Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga.
- Seluruh anggota keluarga makan dua kali atau lebih dalam sehari.

³ Baca: Euis Sunarti. 2011. "Kependudukan dan Keluarga Sejahtera". *Tulisan Tidak Dipublikasikan*. Bogor, Juli.

- c. Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian berbeda di rumah, bekerja, sekolah, atau berpergian.
- d. Bagian yang terluas dari lantai bukan dari tanah.
- e. Apabila anak sakit dan atau pasangan usia subur ingin berkeluarga berencana, dibawa ke sasaran kesehatan.

Keluarga Sejahtera Tahap I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi lingkungan tempat tinggal, dan transportasi. Kebutuhan sosial psikologi yang belum terpenuhi meliputi:

- a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
- b. Paling kurang sekali seminggu, keluarga menyediakan daging, ikan atau telur.
- c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 (satu) pasang pakaian baru per tahun.
- d. Luas lantai rumah paling kurang 8 (delapan) meter persegi untuk setiap pengguna rumah.
- e. Seluruh anggota keluarga dalam 3 (tiga) bulan terakhir dalam keadaan sehat.
- f. Paling kurang 1 (satu) anggota keluarga berusia 15 tahun ke atas sudah berpenghasilan tetap.
- g. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun bisa baca tulis huruf latin.
- h. Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini.
- i. Bila anak hidup 2 (dua) atau lebih, keluarga yang usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil).



Gambar 2-32 Perkembangan Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Bekasi, Tahun 2013-2015

Selama kurun waktu 2013-2015, persentase jumlah Keluarga Pra Sejahtera ditambah Keluarga Sejahtera I dibandingkan jumlah seluruh keluarga di Kota Bekasi, memperlihatkan penurunan (lihat Gambar 2-31), yakni dari 21,88% (120.300 keluarga) menjadi 21,29% (110.983 keluarga). Penurunan ini mengindikasikan bahwa secara eksplisit kesejahteraan keluarga di Kota Bekasi mulai meningkat menuju tahapan Keluarga Sejahtera II dan seterusnya. Dengan kata lain, ekonomi masyarakat di Kota Bekasi semakin membaik.

Pada tahun 2015, persentase jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Bekasi lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat yang mencapai angka sekitar 48,05 persen.

2.2.22 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Berdasarkan data LKPJ tahun 2018 serta LKIP tahun 2018-2019, IKM Kota Bekasi dari tahun 2015-2019 adalah terlihat pada Tabel 2.19 berikut:

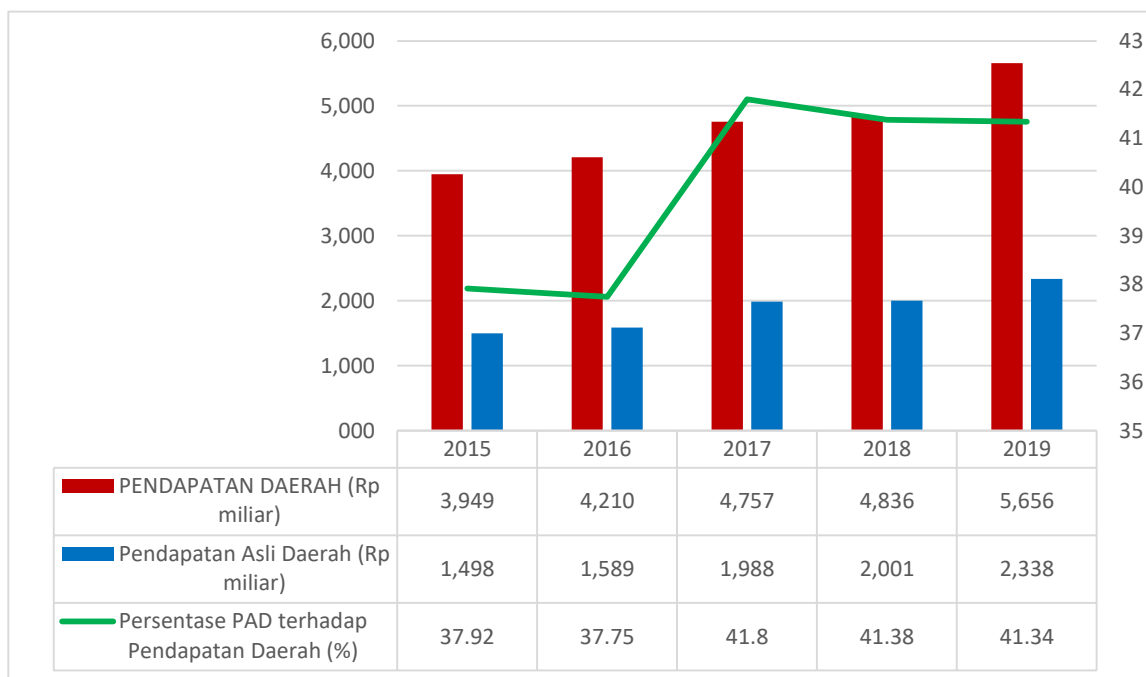
Tabel 2.18 Indeks Kepuasan Masyarakat (2015-2019)

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
IKM	71.48	82.07	76	78.42	80.98	74.7825

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kota Bekasi mengalami fluktuasi dengan nilai terendah adalah 71.48 pada tahun 2015, sedangkan IKM tertinggi dicapai pada tahun 2016 dengan nilai 82.07 yang kemudian disusul penurunan pada tahun 2017 menjadi 76 dan kembali meningkat pada tahun 2018 hingga tahun 2019 menjadi 78.42 dan 80.98.

2.2.23 Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan Pendapatan Daerah adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2017c:43; Kota Bekasi dalam Angka, 2020.

Gambar 2-33 Perkembangan Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bekasi, 2015-2019

Dalam lima tahun terakhir, persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah di Kota Bekasi meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 hingga 2019. Pada tahun 2015, persentase tersebut berada pada angka 37,92 persen, kemudian membesar menjadi 37,75 persen tahun 2016. Memasuki tahun 2017, persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah Kota Bekasi sudah menembus angka 41,80 persen dan kemudian menurun sebesar 0,42 persen pada tahun 2018 menjadi 41,38 persen. Pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 41,34 persen (perhatikan Gambar 2-32).

2.2.24 Opini BPK

Opini BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) di sini adalah penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan badan lainnya. Penilaian opini diselenggarakan setiap tahun.

Dalam beberapa tahun belakangan, opini BPK terhadap LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) Kota Bekasi menunjukkan perhatiannya terhadap kualitas laporan keuangan sehingga dari tahun 2015 hingga tahun 2019, Kota Bekasi mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP (lihat Tabel 2.20).

Tabel 2.19 Perkembangan Opini BPK terhadap LKPD Kota Bekasi, 2015-2019

Tahun	Opini BPK
2015	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2016	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2017	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2018	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2019	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

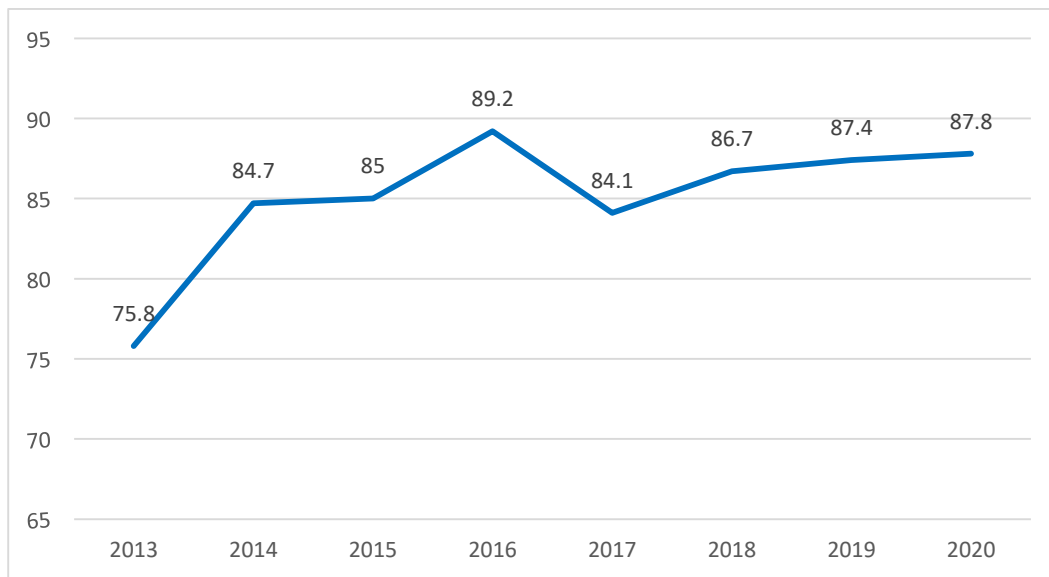
Sumber: BPK RI (2018:345 dan 388), LKIP Kota Bekasi (2018 dan 2019) yang dikelola dalam SIPD

2.2.25 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pola Pangan Harapan (*desirable dietary pattern*) adalah susunan jumlah pangan yang terdiri dari sembilan kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energi yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas, maupun keragaman dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti: aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, dan cita rasa. Dewasa ini, Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi salah satu indikator dari pembangunan nasional di bidang gizi dan pangan yang digunakan sebagai acuan dalam penganeekaragaman pangan. Penganeekaragaman pangan dilihat dari sisi produksi, pengolahan, ataupun konsumsi mengingat pentingnya kecukupan energi dan zat gizi bagi setiap individu.

Melalui pendekatan PPH di atas, kualitas atau mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari skor pangan (*dietaryscore*) dan dikenal sebagai skor PPH. Skor PPH dapat dihitung dengan menggunakan formulasi persentase angka kecukupan gizi dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan (mencakup kelompok padi-padian, umbi-umbian, hewani, minyak dan lemak, biji-bijian, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain-lain). Apabila skor PPH makin tinggi (idealnya 100), maka artinya konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang. Pencapaian skor pola pangan harapan di Kota Bekasi dapat dilihat dalam Gambar 2-33. Sepanjang periode 2013-2016, skor PPH Kota Bekasi cenderung meningkat dari tahun ke tahun, tepatnya bergerak naik dari 75,8 pada tahun 2013 naik menjadi 85,0 tahun 2015 dan meningkat lagi hingga 89,2 tahun 2016. Peningkatan skor PPH ini mengindikasikan bahwa konsumsi pangan di Kota Bekasi semakin beragam dan seimbang selama kurun waktu di atas.

Untuk kategori kota, skor PPH yang diraih Kota Bekasi pada tahun 2016 merupakan skor tertinggi dibandingkan delapan kota lainnya di Provinsi Jawa Barat. Secara keseluruhan, Kota Bekasi menduduki posisi ketiga skor PPH tertinggi di Provinsi Jawa Barat di bawah Kabupaten Indramayu (92,1) dan Kabupaten Majalengka (89,6).



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat (2017-2018:173) yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2-34 Perkembangan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan di Kota Bekasi, 2013-2020

Dinas Ketahanan Pangan mencatat bahwa Ketersediaan Pangan Utama tahun 2017 sebesar 82,17 Kg/jiwa, angka ini diperoleh dari rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama sebesar 236.101.634 Kg dengan jumlah penduduk 2.873.484 jiwa.

Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Tahun 2017 tercatat 26 sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di Kota Bekasi dari 48 total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di Kota Bekasi (54,17%). Pada tahun 2018 sesuai dengan LKPJ Kota Bekasi Tahun 2019, Kota Bekasi mencapai skor Pola Pangan Harapan sebesar 86,7 persen. Sedangkan pada tahun 2019 sampai dengan 2020 trend pola pangan harapan cenderung meningkat sebesar 0.4%.

2.2.26 Penguatan Cadangan Pangan

Cadangan pangan adalah persediaan pangan di sebuah wilayah untuk keperluan konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga pangan, serta keadaan darurat pangan. Cadangan pangan ini terdiri dari persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Pangan itu sendiri adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Khusus untuk beras, Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi menyiapkan cadangan beras

seberat 11,5 ton⁴ pada tahun 2018. Artinya, Kota Bekasi melakukan penguatan cadangan pangan berupa beras sebesar 11,5% pada tahun 2018.

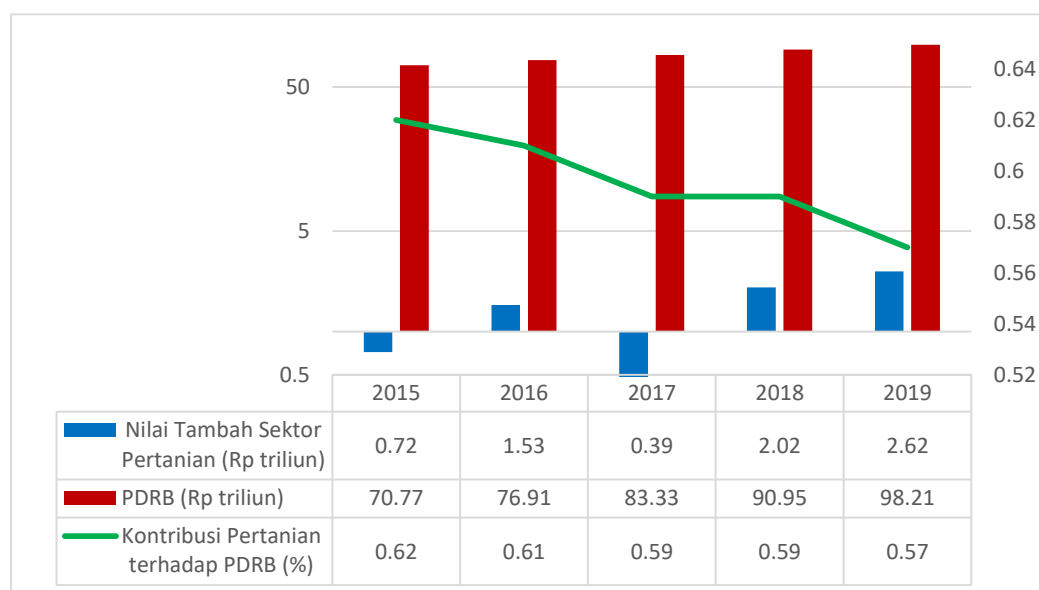
2.2.27 Penanganan Daerah Rawan Pangan

Daerah rawan pangan (*food insecurity district*) dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah yang mengalami kondisi ketidakmampuan untuk menyediakan pangan yang cukup dan sesuai bagi masyarakatnya, baik yang bersifat kronis (*chronical food insecurity*) maupun sementara (*transitory food insecurity*).

Di Kota Bekasi, pada awal tahun 2018 ini diduga ada dua wilayah yang terancam rawan pangan bersifat sementara, yakni Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Bekasi Barat. Dugaan ini diindikasikan oleh menipisnya stok beras dan pada gilirannya akan meningkatkan harga beras di pasar setempat. Persentase penanganan kerawanan pangan di Kota Bekasi pada tahun 2018 sebesar 69,58 persen.

2.2.28 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Sektor pertanian di Kota Bekasi memang tidak berkembang karena wilayah ini termasuk kategori urban, dimana pada umumnya pertanian bukanlah menjadi sektor yang diandalkan. Usaha pertanian di kota ini yang masih dikembangkan oleh masyarakat adalah tanaman pangan, peternakan, dan perikanan. Usaha tanaman pangan terdiri dari budidaya padi (sawah dan ladang), palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah), sayur-sayuran (petsai/sawi, kacang panjang, bayam, ketimun, cabe, terong, kangkung), buah-buahan (jeruk siam, durian, duku, jambu biji, mangga, sawo, pepaya, pisang, rambutan), tanaman obat-obatan (jahe, kencur). Usaha peternakan meliputi sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam ras, ayam buras, itik. Sedangkan perikanan darat mencakup beberapa jenis ikan untuk konsumsi yang dibudidayakan di kolam/tambak serta usaha budidaya ikan hias.



Sumber: BPS Kota Bekasi, 2020 yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2-35 Perkembangan Nilai Tambah dan Kontribusi Sektor Pertanian

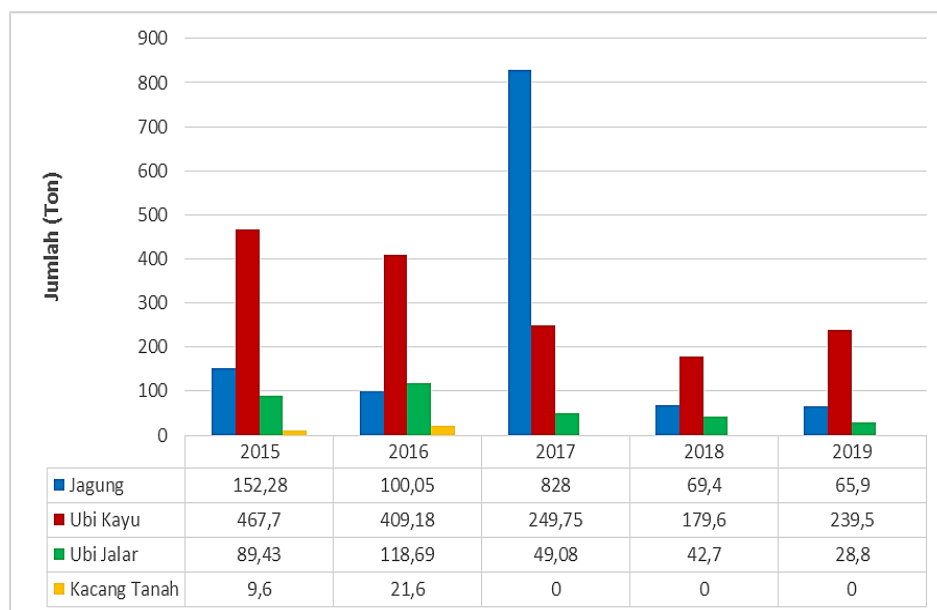
⁴ <https://bisnis.tempo.co/read/1049927/bekasi-mencadangkan-115-ton-beras-untuk-stabilkan-harga>.

terhadap PDRB Kota Bekasi, 2015-2019

Dengan kondisi seperti di atas, maka tidaklah mengherankan apabila kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sangatlah kecil. Sepanjang kurun waktu 2015-2019, nilai tambah yang dihasilkan sektor ini memang naik dari 0,72 persen hingga mencapai angka 2,62 persen. Akan tetapi, nilai tambah sebanyak ini baru mampu memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 0,62 persen pada tahun 2015. Bahkan, sebagaimana tampak pada Gambar 2-34, pada tahun-tahun berikutnya kontribusi sektor pertanian terus menurun hingga hanya 0,57 persen pada tahun 2019.

2.2.29 Kontribusi Subsektor Palawija terhadap PDRB Sektor Pertanian

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, usaha palawija yang berkembang di Kota Bekasi hanya meliputi komoditas jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang tanah. Pada tahun 2019, produksi keempat komoditas secara keseluruhan adalah sebesar 334,2 ton, mengalami penurunan dibandingkan total produksi tahun 2015 yang mencapai 719,01 ton. Sebagian besar produksi palawija di Kota Bekasi adalah berupa ubi kayu, dimana pada tahun 2019 meraih angka 239,5 ton, mengalami peningkatan sebesar 59,9 ton setelah mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018 (lihat Gambar 2-35).



Sumber : Kota Bekasi dalam Angka 2019; Kota Bekasi dalam Angka, 2020 yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2-36 Perkembangan Produksi Palawija di Kota Bekasi, 2015-2019 (Ton)

2.2.30 Produksi Sektor Pertanian

Perkembangan produksi sektor pertanian di Kota Bekasi dapat dilihat dalam Gambar 1-36, Produksi pertanian di kota ini terdiri dari kelompok tanaman pangan (padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan), perkebunan rakyat (tanaman obat-obatan), peternakan, dan perikanan. Dari

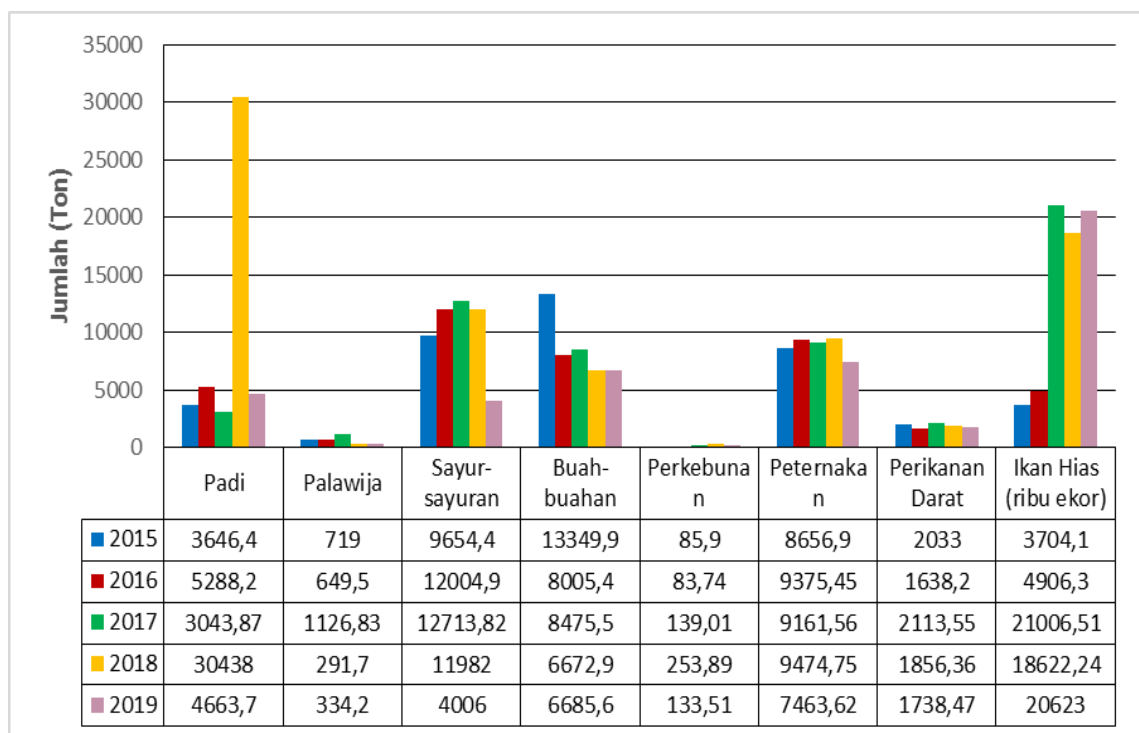
Sumber: Kota Bekasi dalam Angka 2019; 2020 yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2-36 tampak bahwa sebagian besar produksi sektor pertanian dihasilkan oleh kelompok sayur mayuran, dimana pada tahun 2019 produksinya meskipun hanya mencapai

4.006 ton, akan tetapi rata-rata produksi dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mencapai angka 10.000 ton. Produksi tanaman pangan pada tahun 2019 mencapai 15.689,5 ton, jauh menurun dibandingkan produksi tahun 2015 yang sekitar 27.369,7 ton. Sementara itu, produksi peternakan melejit dari 8.656,9 ton (2015) menjadi 9.474,75 ton (2018) dan kemudian mengalami penurunan menjadi 7.463,62 ton (2019). Produksi perkebunan rakyat berupa tanaman obat-obatan naik dari 85,9 ton menjadi 133,51 ton. Sedangkan produksi perikanan darat berkurang dari 2033 ton menjadi 1.738,47 ton. Di Kota Bekasi juga berkembang budidaya ikan hias, dimana pada tahun 2019 produksinya sudah mencapai angka 20,6 juta ekor.

2.2.31 Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB Sektor Pertanian

Karena data nilai tambah subsektor perkebunan di Kota Bekasi tidak tersedia, maka kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB sektor pertanian tidak dapat diuraikan. Adapun dari sisi jumlah produksi, sebagaimana dapat ditelusuri dari data pada Gambar 2-36, kontribusi subsektor perkebunan (tepatnya perkebunan rakyat) terhadap total produksi sektor pertanian pada awalnya adalah sekitar 0,21% (2015) dan kemudian meningkat menjadi 0,29% (2019).



Sumber: Kota Bekasi dalam Angka 2019; 2020 yang dikelola dalam SIPD

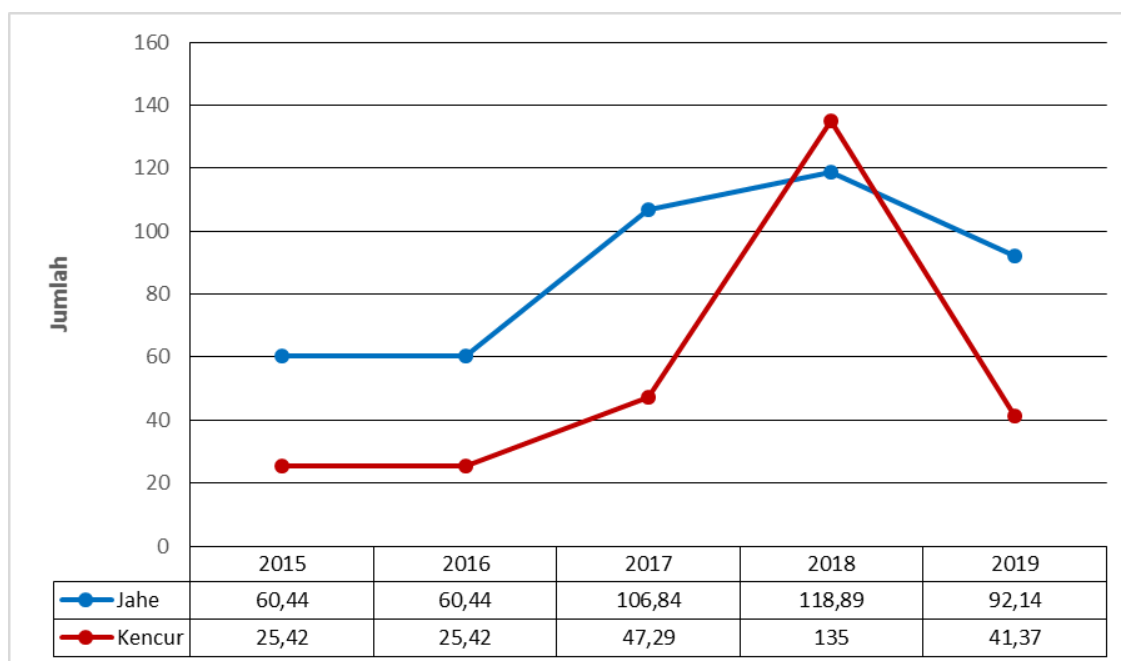
Gambar 2-37 Perkembangan Produksi Sektor Pertanian di Kota Bekasi, 2015-2019 (Ton)

2.2.32 Produksi Subsektor Perkebunan

Kota Bekasi hanya memiliki sedikit perkebunan, tepatnya perkebunan rakyat yang ditanami dengan tanaman obat-obatan berupa jahe dan kencur. Sebagaimana terlihat dalam

Sumber: Kota Bekasi dalam Angka 2019; 2020 yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2-36, produksi perkebunan rakyat ini bergerak naik dari 85,9 ton tahun 2015 menjadi 253,89 ton tahun 2018, namun menurun di tahun 2019 menjadi 133,51 ton. Produksi tanaman jahe bertambah dari 60,44 ton pada tahun 2015 menjadi 92,15 ton di tahun 2019, sedangkan produksi tanaman kencur juga mengalami peningkatan dari 25,42 ton (2015) menjadi 47,29 ton (2019).



Sumber: Kota Bekasi dalam Angka (2019; 2020) yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2-38 Perkembangan Produksi Kebun Rakyat di Kota Bekasi, 2015-2019 (ton)

2.2.33 Kontribusi Produksi Kelompok Petani Padi terhadap PDRB

Karena data produksi kelompok petani (padi) di Kota Bekasi tidak tersedia, maka kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB tidak dapat diuraikan. Akan tetapi, sebagai uraian tambahan, produksi padi di Kota Bekasi secara keseluruhan telah meningkat dari 3.646,4 ton tahun 2015 menjadi 4.663,7 ton tahun 2019. Hampir seluruhnya produksi padi ini berasal dari padi sawah. Produksi padi ladang hanya terjadi pada tahun 2013 dan 2014, yakni masing-masing sebanyak 4,36 ton dan 4,15 ton (BPS Kota Bekasi 2017b: 257). Pada tahun 2015 dan 2016 produksi padi ladang sudah tidak terdata lagi.

2.2.34 Kontribusi Subsektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB

Aktivitas ekonomi di subsektor kelautan dan perikanan di Kota Bekasi yang berkembang hanyalah berupa perikanan darat dan budidaya ikan hias air tawar. Perikanan darat dikembangkan di areal kolam/tambak dan perairan umum, seperti ikan nila, gurame, lele, patin, dan jenis ikan lainnya. Sepanjang periode 2015-2019, produksi perikanan darat sebanyak 2.033 ton tahun 2015 menjadi 1.738,47 ton tahun 2019 (lihat kembali Sumber: Kota Bekasi dalam Angka 2019; 2020 yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2-36). Penurunan produksi ini menyebabkan penerimaan juga merosot dari Rp42,6 miliar (2015) menjadi Rp28,1 miliar (2016)(BPS Kota Bekasi 2017b: 271).

Untuk ikan hias air tawar, sejak tahun 1998 Kota Bekasi menjadi eksportir terbesar di Indonesia. Setiap bulannya jutaan ekor aneka ikan hias air tawar telah didistribusikan ke mancanegara di Asia, Eropa, dan Amerika. Di Kota Bekasi ada 18 eksportir ikan hias, paling banyak di Indonesia. Akan tetapi, jumlah pembudidaya ikan hias air tawar di kota ini mengalami penurunan dari sebelumnya sekitar 700-an orang menjadi 400-an orang pada akhir 2017. Untuk mempertahankan predikat eksportir ikan hias air tawar terbesar di Indonesia, pemerintah Kota Bekasi telah menetapkan beberapa lokasi sentra ikan hias, satu di antaranya adalah di Jalan Pariwisata, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu. Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi juga membantu mensuplai indukan unggul, menyelenggarakan pameran ikan hias secara berkala, dan pendanaan. Adapun produksi ikan hias di Kota Bekasi dalam beberapa tahun terakhir meningkat dari 3.704.090 ekor tahun 2015 menjadi 20.623.000 ekor tahun 2019.

Karena penciptaan nilai tambah di sektor kelautan dan perikanan tidak didata secara khusus, maka kontribusi sektor ini terhadap PDRB tidak dapat diuraikan.

2.2.35 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

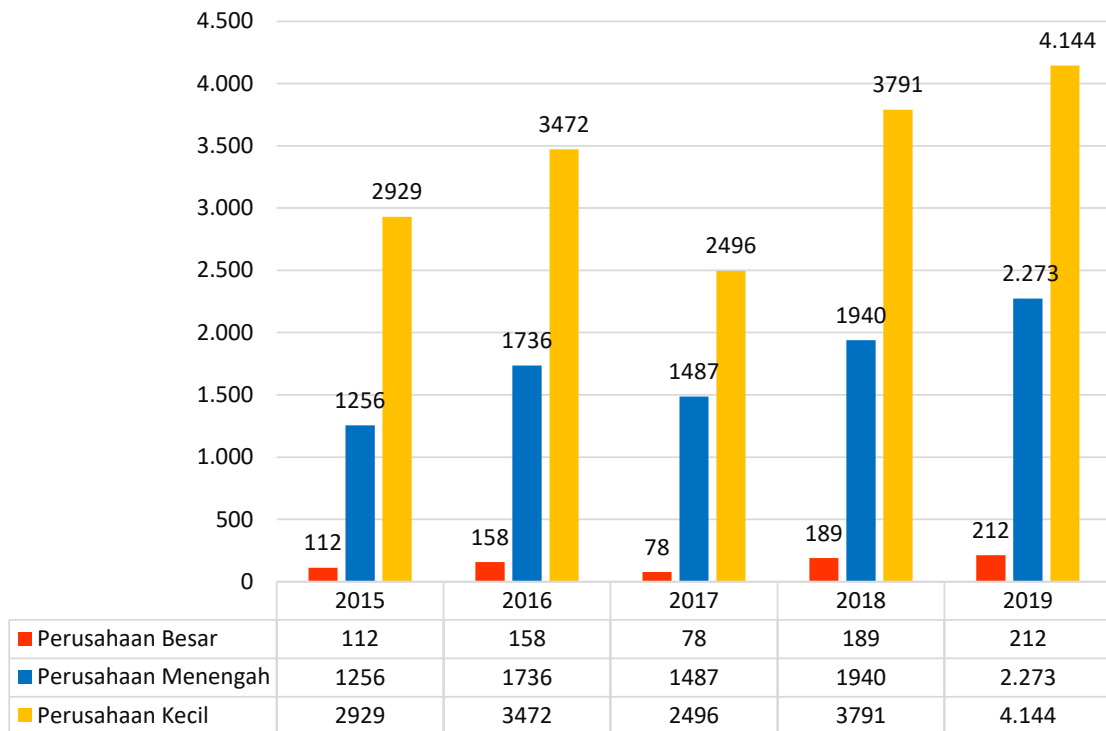
Sampai dengan tahun 2019, pengembangan sektor perdagangan di Kota Bekasi didukung oleh 6.629 perusahaan ber-SIUP, terbagi atas 212 perusahaan besar, 2.273 perusahaan menengah, dan 4.144 perusahaan kecil (BPS Kota Bekasi 2019). Sejak tahun 2015, jumlah perusahaan perdagangan di kota ini memang terus meningkat, seperti tampak pada Gambar 2-38.

Dalam hal penciptaan nilai tambah, sektor perdagangan mampu menjadi kontributor PDRB Kota Bekasi terbesar kedua setelah sektor industri dengan kisaran kontribusi di level 22% - 24% selama periode tahun 2015 - 2019. Dari Gambar 2-39 dapat dilihat tren tersebut. Pada tahun 2015, sektor perdagangan menghasilkan nilai tambah sebanyak Rp. 16 triliun, yang berarti memberikan kontribusi sekitar 22,76% kepada PDRB. Pada tahun-tahun selanjutnya nilai tambah sektor perdagangan cenderung meningkat dengan kontribusi terhadap PDRB yang cenderung stabil.

Meningkatnya nilai tambah dan kontribusi sektor perdagangan didukung dengan nilai ekspor bersih sektor perdagangan yang juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2015 - 2019. Pada tahun 2015 nilai ekspor bersih perdagangan Kota Bekasi tercatat sebesar US\$ 174 Juta dan terus menunjukkan peningkatan hingga di tahun 2019 tercatat sebesar US\$ 357 Juta. Peningkatan nilai ekspor bersih ini menunjukkan angka yang positif di tengah perkembangan nilai impor yang juga terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun selama periode tahun 2015 -2019.

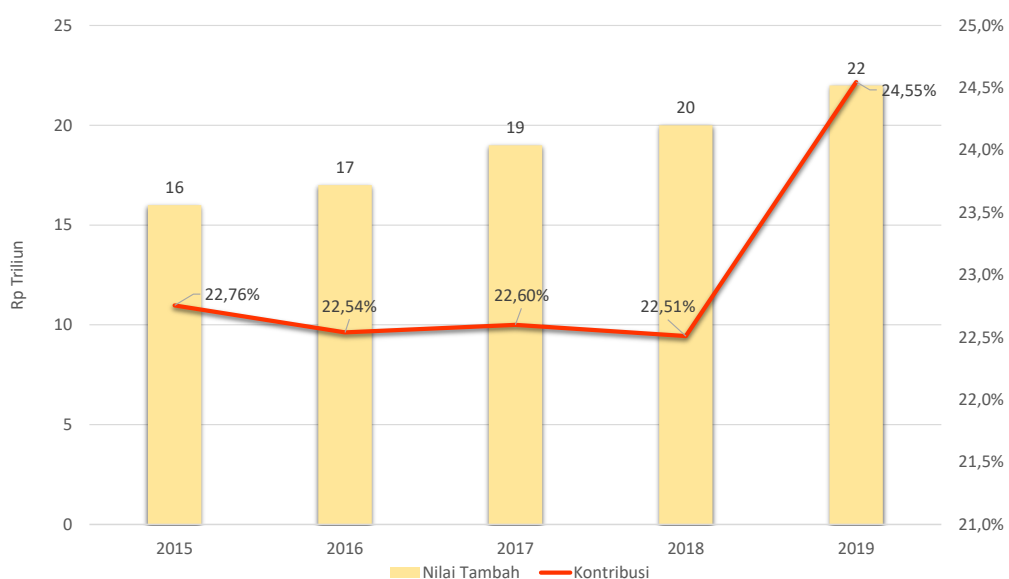
Sektor perdagangan Kota Bekasi juga ditopang dengan pertumbuhan unit-unit usaha koperasi yang cenderung menunjukkan peningkatan. Unit koperasi pada tahun 2015 mencapai 605 unit mengalami peningkatan menjadi 612 unit pada tahun 2019. Pertumbuhan unit koperasi ini dibarengi dengan pertumbuhan UMKM yang setiap

tahunnya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,9%, pada tahun 2015 jumlah UMKM di Kota Bekasi mencapai 2.929 UMKM meningkat ditahun 2019 menjadi 4.144 UMKM, hal ini menunjukkan peningkatan perekonomian kota bekasi akan terus meningkat dengan adanya inidikasi pertumbuhan perdagangan skala mikro dalam masyarakat.



Sumber: BPS Kota Bekasi (2017b:303) yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2-39 Perkembangan Jumlah Perusahaan Perdagangan di Kota Bekasi, 2015-2019

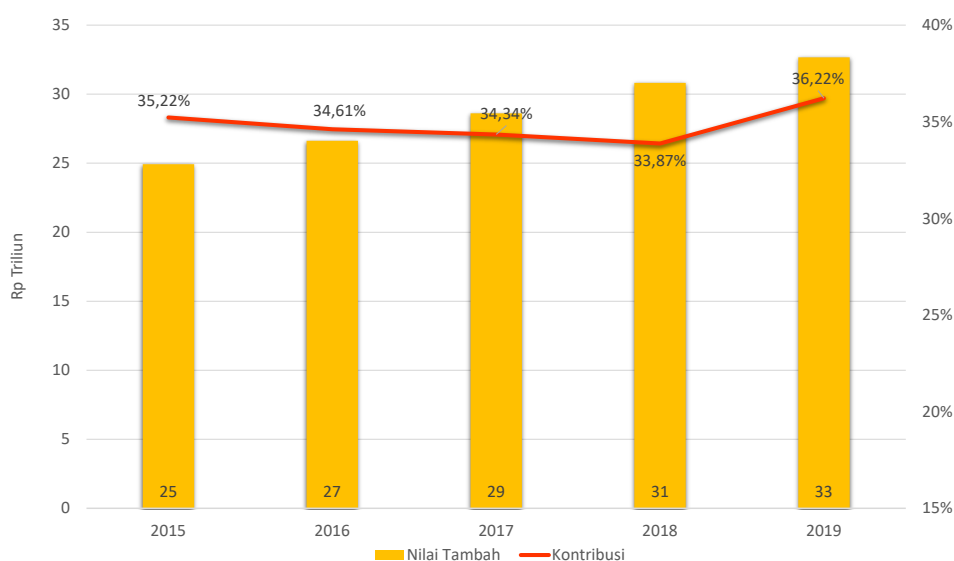


Gambar 2-40 Perkembangan Nilai Tambah dan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Bekasi, 2015-2019

2.2.36 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016, jumlah usaha/perusahaan di sektor industri pengolahan di Kota Bekasi adalah sebanyak 13.042 perusahaan, terdiri dari 12.396 usaha mikro dan kecil serta 646 usaha menengah besar. Jumlah usaha/perusahaan ini mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 105.983 orang, dimana 69.959 orang di antaranya bekerja di perusahaan berskala usaha menengah dan besar (BPS Kota Bekasi 2017b: 281, 283).

Nilai tambah yang berhasil diciptakan oleh sektor industri pada tahun 2016 adalah senilai Rp. 25 triliun. Angka ini menempatkan sektor industri menjadi kontributor terbesar pada PDRB, yakni sebanyak 35,22%. Pada tahun-tahun selanjutnya, nilai tambah sektor industri terus menunjukkan peningkatan hingga di tahun 2019 tercatat sebesar Rp 33 triliun. Dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB Kota Bekasi, dari tahun 2015 hingga 2018, kontribusi sektor industri menunjukkan penurunan kontribusi dari 35,22% di tahun 2015 menjadi 33,87% di tahun 2018. Namun demikian, pada tahun 2019 kontribusi sektor industri kembali mengalami peningkatan menjadi 36,22%.

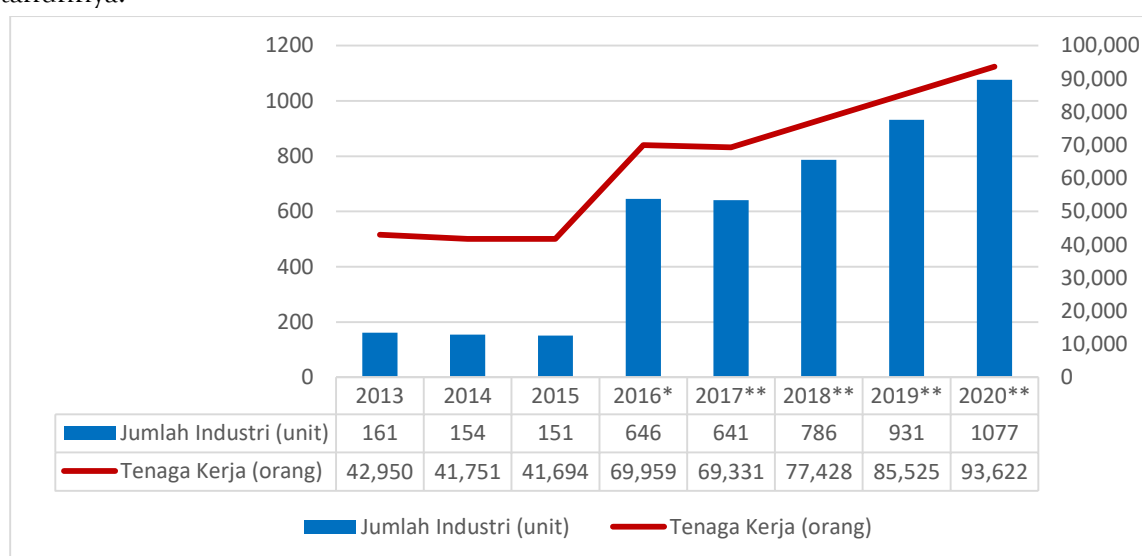


Gambar 2-41 Perkembangan Nilai Tambah dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB di Kota Bekasi, 2015-2019

2.2.37 Pertumbuhan Industri

Jumlah industri menengah besar di Kota Bekasi pada tahun 2015 ada sebanyak 152 perusahaan yang tersebar di semua kecamatan, kecuali Kecamatan Pondok Melati dan Kecamatan Pondok Gede. Jumlah industri menengah besar sebanyak ini mampu menyerap tenaga kerja sekitar 41.694 orang. Industri makanan merupakan jenis industri terbanyak di

Kota Bekasi, yakni 18 perusahaan. Industri makanan juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, yakni 7.889 orang. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah industri yang berada di Kota Bekasi tahun 2015 mengalami penurunan dari sebelumnya 154 perusahaan (2014). Berkurangnya dua perusahaan ini menyebabkan jumlah tenaga kerja turun dari 41.751 orang menjadi 41.694 orang. Bahkan, pada tahun 2013 jumlah industri menengah besar sempat mencapai angka 161 perusahaan, yang mempekerjakan 42.950 orang tenaga kerja (BPS Kota Bekasi, 2016:206-209). Berdasarkan hasil SE tahun 2016, jumlah industri yang berada di Kota Bekasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 646 perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 69.959 orang. Lalu pada tahun 2017 sampai dengan 2020 trend perkembangan jumlah industri dan tenaga kerja di industri menengah besar di Kota Bekasi meningkat rata-rata sebesar 145 perusahaan dan 8.097 tenaga kerja per tahunnya.



Sumber: 2013-2020: BPS Kota Bekasi (2016:206, 209); 2016: BPS Kota Bekasi (2017b:281, 283).

*) Hasil SE 2016. **) Hasil Analisis

Gambar 2-42 Perkembangan Jumlah Industri dan Tenaga Kerja di Industri Menengah Besar di Kota Bekasi, 2013-2020

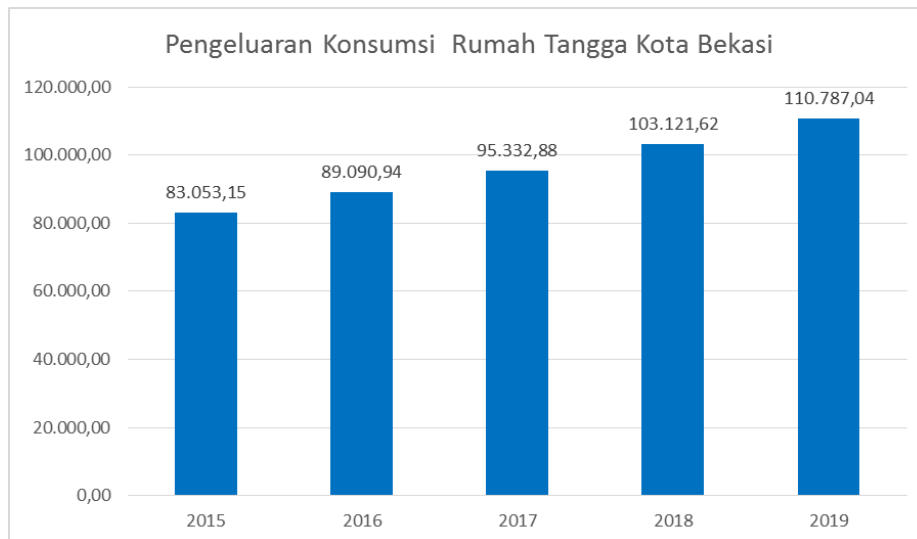
2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek daya saing daerah merupakan salah satu tinjauan tingkat keberhasilan pembangunan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk bertahan dalam menghadapi tantangan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Indikator daya saing daerah di Kota Bekasi ditunjukkan oleh tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, nilai tukar petani, persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa, rasio ekspor-impor terhadap PDRB, rasio Pinjaman terhadap Simpanan di Bank Umum, angka kriminalitas yang tertangani, Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di BPR, angka kriminalitas yang tertangani, rasio ketergantungan penduduk.

A. Fokus Ekonomi

2.3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Bekasi dari tahun ke tahun semakin meningkat sebagaimana grafik di bawah ini:



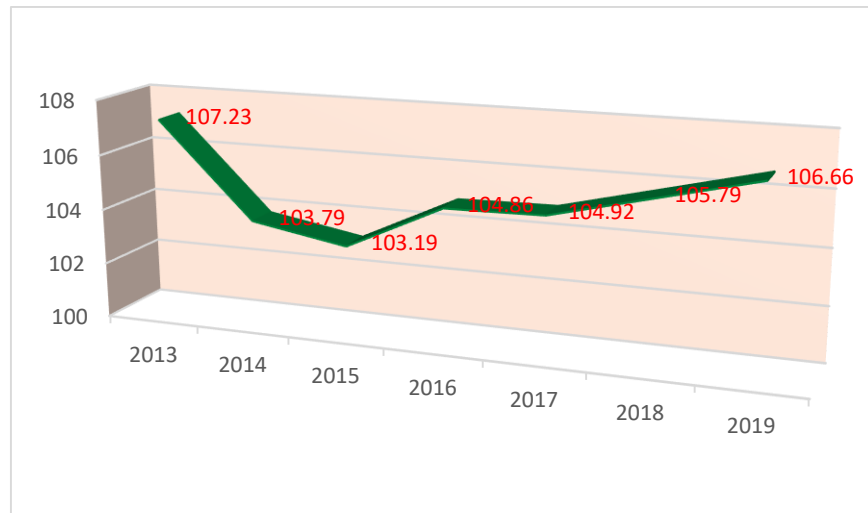
Sumber : Kota Bekasi dalam Angka 2020 yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2-43 Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga 2015-2019

Pengeluaran konsumsi rumah tangga Kota Bekasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 pengeluaran rata-rata rumah tangga di Kota Bekasi sebesar Rp 83.053.150,-. Nilai tersebut semakin meningkat hingga pada tahun 2019 menjadi Rp 110.787.040,-. Dari indikator tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Bekasi lebih baik.

2.3.2 Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Nilai Tukar Petani Kota Bekasi dari tahun 2013 – 2017 adalah sebagai berikut:



Gambar 2-44 Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani pada tahun 2013 sebesar 107.23, kemudian semakin menurun dari pada tahun 2014 dan 2015 menjadi 103.79 dan 103.19. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun tersebut petani mengalami surplus sebesar 7,23 persen, kemudian menurun menjadi 3,78 persen dan 3,19 persen. Jika dibandingkan Provinsi Jawa Barat, NTP Kota Bekasi cenderung lebih kecil.

Sedangkan nilai tukar petani Kota Bekasi selama 2013 s/d 2019 diperlihatkan pada Tabel 2.20.

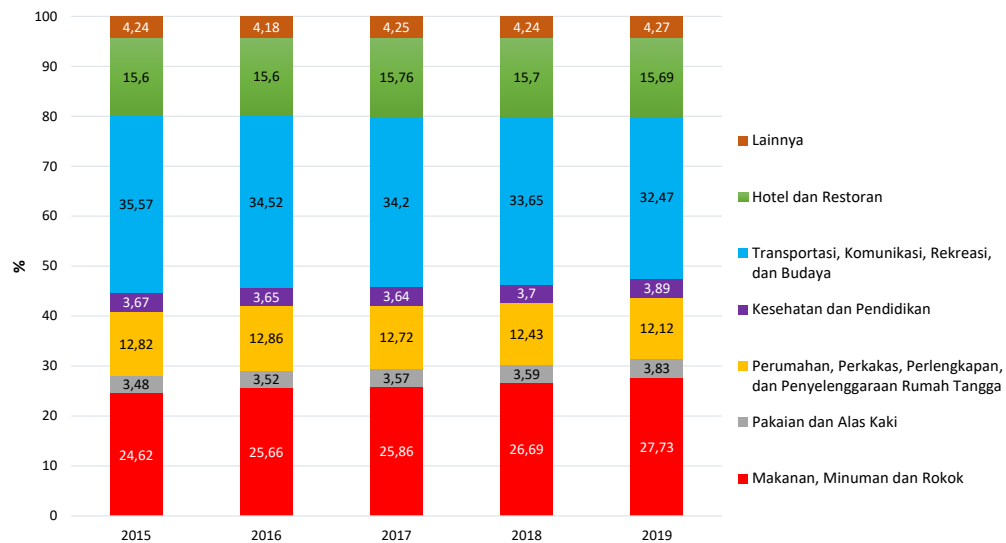
Tabel 2.20 Nilai Tukar Petani Kota Bekasi

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Indeks Diterima Petani	109.55	117.74	126.97	132.25	137.27	145.74	152.74
2	Indeks Dibayar Petani	105.53	112.74	120.83	126.13	130.82	138.40	144.80
3	Nilai Tukar Petani	107.23	103.79	103.19	104.86	104.92	105.79	106.66

NTP Kota Bekasi yang lebih rendah ini dapat disebabkan daya dukung pertanian di Kota Bekasi tidak begitu kondusif.

2.3.3 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non pangan per Kapita

Sebagaimana penjelasan pada sub bab 2.3.1, penjabaran pola konsumsi atau pengeluaran rumah tangga di Kota Bekasi tergambarkan dalam Gambar 2-44 sebagai berikut:



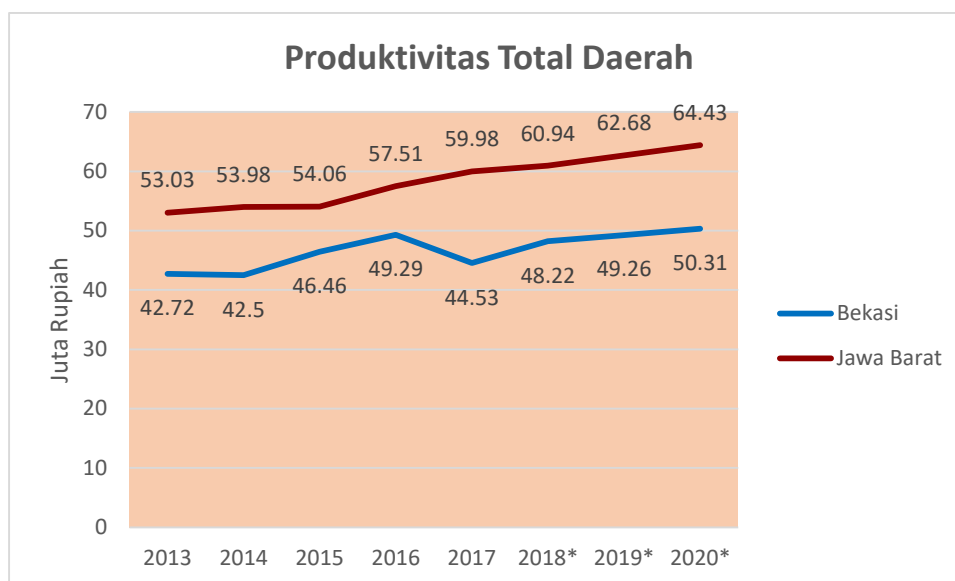
Sumber : PDRB Kota Bekasi 2015-2019 yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2-45 Komponen Pengeluaran Rumah Tangga

Alokasi pengeluaran rumah tangga untuk keperluan makanan dan minuman hanya sekitar 24.62 % pada tahun 2015 dan semakin meningkat hingga 27.73 % pada tahun 2019. Sebagian besar pengeluaran rumah tangga dialokasikan untuk keperluan non pangan, yaitu untuk pengeluaran di bidang transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya, hotel dan restoran, serta perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga. Pola pengeluaran yang demikian dipengaruhi oleh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Melihat komponen pengeluaran ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat sudah cukup baik, kebutuhan pokok untuk bertahan hidup sudah sangat terpenuhi dan kelebihan penghasilan dapat digunakan untuk kebutuhan sekunder dan tersier.

2.3.4 Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah menunjukkan seberapa produktif angkatan kerja yang bekerja pada setiap sektor dan nilai tambah pada sektor tiap PDRB. Tingkat produktivitas total Kota Bekasi disajikan dalam gambar di bawah ini.



Catatan: *) Hasil Analisis

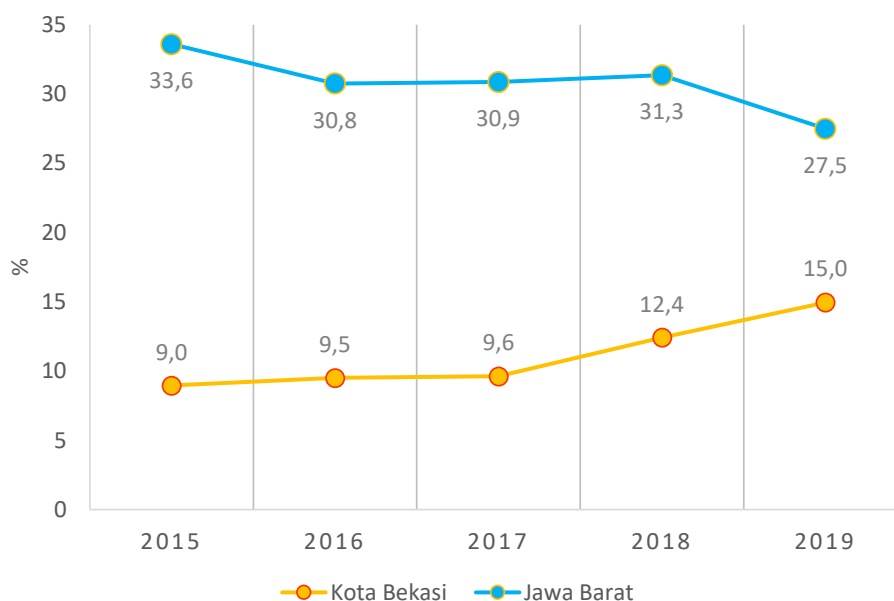
Sumber : PDRB Kota Bekasi 2013-2017

Gambar 2-46 Produktivitas Total Daerah

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa produktivitas total daerah semakin meningkat. Namun demikian, produktivitas total daerah Kota Bekasi masih berada dibawah rata-rata provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2013 produktivitas total per tenaga kerja selama setahun mencapai 42.72 juta rupiah, sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat, rata-rata produktivitas daerah sebesar 53.03 Juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2017, produktivitas tenaga kerja kota Bekasi hanya mencapai 44.53 juta rupiah selama satu tahun, sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat mencapai 59.98 juta rupiah selama satu tahun. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya jumlah angkatan kerja yang ada di kota Bekasi yang melakukan aktivitas ekonomi di luar kota Bekasi (DKI Jakarta dan Kabupaten Bekasi). Hal ini menyebabkan perhitungan output ekonomi diperhitungkan di luar Kota Bekasi, sementara mereka diperhitungkan sebagai kapita yang membagi total output ekonomi kota bekasi. Namun, pada tahun 2018 sampai dengan 2020 trend produktivitas total daerah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1.05 juta rupiah per tahun di Kota Bekasi dan 1.75 juta rupiah di Provinsi Jawa Barat.

2.3.5 Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB

Indikator keterbukaan ekonomi Kota Bekasi dinilai dari rasio jumlah ekspor dan impor terhadap total PDRB di tahun yang sama. Tren rasio ekspor dan impor terhadap PDRB Kota Bekasi menunjukkan adanya peningkatan selama periode tahun 2015 - 2019. Pada tahun 2015, rasio ekspor impor terhadap PDRB Kota Bekasi sebesar 9% dan terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2019 tercatat sebesar 15%. Hal ini menunjukkan tingkat keterbukaan ekonomi di Kota Bekasi yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya nilai PDRB dari tahun ke tahun.



Gambar 2-47 Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, tingkat keterbukaan ekonomi kota Bekasi masih terlihat lebih kecil. Namun demikian rasio ekspor impor terhadap PDRB terlihat cenderung terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015 rasio ekspor impor terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 33,6% dan terus menurun hingga di tahun 2019 sebesar 27,5.

2.3.6 Angka Kriminalitas yang Tertangani

Angka kriminalitas yang tertangani di Kota Bekasi dihitung dengan melakukan pembagian jumlah kasus kriminal yang tertangani/terselesaikan dengan jumlah penduduk Kota Bekasi di tahun yang sama kemudian dikalikan dengan konstanta sebesar 1000. Jumlah kasus kriminal maupun penduduk Kota Bekasi dapat diperoleh dari dokumen Kota Bekasi dalam Angka setiap tahun.

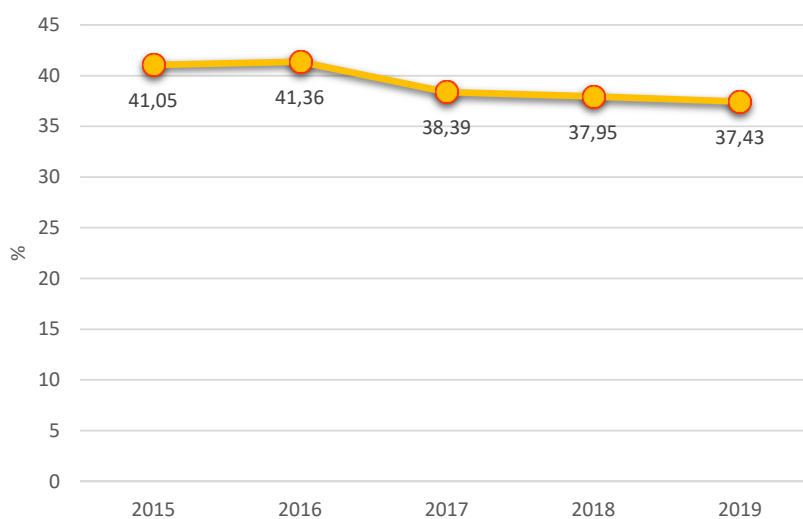
Angka kriminalitas yang tertangani di Kota Bekasi cenderung menurun pada periode tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015 angka kriminalitas per jumlah penduduk sebesar 2,1 sedangkan tahun 2016 dan 2017 memiliki nilai yang tidak jauh berbeda yaitu 7,6 dan 7,5. Pada tahun 2018 dan 2019, angka kriminalitas per jumlah penduduk mengalami penurunan menjadi 4,03 (2018) dan 0,8 (2019).

Tabel 2.21 Angka Kriminalitas Tertangani di Kota Bekasi

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penduduk	2.384.413	2.402.465	2.415.091	2.436.577	2.448.830
Kriminal tertangani	511	1.833	1.833	983	208
Angka Kriminalitas per Penduduk	2,1	7,6	7,5	4,03	0,8

2.3.7 Rasio Ketergantungan Penduduk

Rasio ketergantungan menunjukkan rasio antara penduduk yang tidak produktif terhadap penduduk produktif dalam satu tahun tertentu. Kategori penduduk produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun sedangkan penduduk di luar usia tersebut dikategorikan sebagai penduduk tidak produktif. Data jumlah penduduk berdasarkan usia tersebut tersedia di dokumen Kota Bekasi dalam Angka. Rasio ketergantungan penduduk Kota Bekasi cenderung stabil sebagaimana grafik dibawah ini.



Sumber : Kota Bekasi dalam angka 2020 yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2-48 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Bekasi

Pada tahun 2015 rasio ketergantungan penduduk berada pada angka 41,05%, kemudian pada tahun selanjutnya 41,36% (2016). Pada tahun-tahun selanjutnya rasio ketergantungan penduduk Kota Bekasi cenderung menunjukkan penurunan, di mana pada tahun 2019 tercatat sebesar 37,43%. Rendahnya rasio ketergantungan ini disebabkan karena daya tarik kota Bekasi sebagai tujuan urbanisasi. Beberapa golongan masyarakat banyak yang memilih kembali ke kampung halaman jika sudah memasuki usia yang kurang produktif. Dari aspek daya saing, hal ini merupakan suatu kekuatan dan potensi ekonomi yang baik, karena perbandingan SDM yang produktif relatif lebih tinggi dibandingkan SDM yang menjadi tanggungan, terlebih jika melihat angka-angka di daerah lainnya.

2.3.8 BUMD

Kota Bekasi memiliki 6 BUMD yang bergerak di berbagai sektor usaha. Berikut merupakan gambaran ke-6 BUMD tersebut.

a. PDAM Tirta Patriot

PDAM ini bergerak di bidang pengelolaan air minum di Kota Bekasi. Jumlah penduduk yang dilayani oleh PDAM ini sebanyak 184.944 jiwa (6 % dari jumlah penduduk) dengan total sambungan sebanyak 33.449 SL. Pada RKAP 2018

direncanakan penambahan sambungan pelanggan sebanyak 1.419 SL dari jumlah sambungan sampai akhir tahun 2017. BUMD ini menjual air dengan tarif dasar 4.200/m³. Tingkat kehilangan air BUMD ini cukup kecil yakni hanya sebesar 4.6 % dari distribusi (standar kehilangan air maksimal sebesar 20 %).

Realisasi pendapatan usaha untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp. 88.27.332.974,00 dengan biaya sebesar Rp. 85.027.151.443,00 dan laba sebesar Rp. 3.500.181.531,00. Menurut indikator BPPSPAM kinerja PDAM ini mendapatkan nilai 3.470 yang tergolong sehat, karena *cash* rasio yang cukup tinggi. Selain itu, BUMD ini juga sudah tergolong *Full Cost Recovery* (sudah mampu menutupi biaya operasional).

b. PDAM. Tirta Bhagasasi Bekasi

BUMD ini juga bergerak di bidang pengelolaan air minimum yang melayani 2 wilayah yaitu Kota Bekasi dengan cakupan wilayah 45.74 % dan Kabupaten Bekasi seluar 37.55 % dengan total sambungan pelanggan sebanyak 231.842. Realisasi pendapatan usaha untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp. 466.725.307.369,00 dengan biaya sebesar Rp. 435.298.986.959,00 dan laba sebesar Rp. 31.426.320.411,00.

c. PD. Mitra Partiot Kota Bekasi

BUMD ini bergerak di bidang transportasi dengan mengelola Bus Trans Patriot, Moda Transportasi massal bersubsidi milik Pemerintah Kota Bekasi sebanyak 9 (sembilan) Bus. Selain pengelolaan Bus Trans Partiot, BUMD ini merencanakan kegiatan bisnis (i) Pengelolaan Parkir RSUD dr. Chasbullah, dan (ii) Pengelolaan Pemasangan Reklame Charging Station.

d. PD. Migas Kota Bekasi

BUMD ini didirikan dengan maksud untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi pada wilayah dan di luar wilayah administrasi Kota Bekasi. Pendirian BUMD ini dilatarbelakangi adanya potensi cadangan migas di wilayah Jatineragara, di Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna. PD. Migas Kota Bekasi masih mengalami berbagai kendala usaha. Pendapatan BUMD ini masih sangat kecil sehingga tidak dapat menyumbang ke kas pemerintahan/PAD Kota Bekasi. Karena kecilnya pendapatan PD. Migas ini untuk menutupi kebutuhan operasional mengajukan Finansial Support ke Mitra Usaha.

e. PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi (SBP).

BUMD ini bergerak di bidang gas bumi dengan memanfaatkan sumber gas di daerah Bojong, Kecamatan Rawalumbu. Pengguna gas bumi di Kota Bekasi masih tergolong kecil. Jumlah pelanggan BUMD ini pada tahun 2018 hanya sekitar 4.700-an pelanggan aktif. Pada tahun 2019 jumlah Pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 154.174.070.168,00 dengan pengeluaran selama satu tahun sebesar Rp. 154.061.165.570,00 dan laba sebesar Rp. 112.904.598,00. BUMD ini dalam menjalankan usahanya masih mengalami berbagai kendala yakni kondisi

infrastruktur yang kurang memadai, pembayaran tagihan masih bersifat manual, serta gas losses cukup besar yakni mencapai 30 %.

f. PT. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Partiot Kota Bekasi)

PT. BPRS ini bergerak dibidang jasa keuangan (perbankan). Sebagaimana lembaga keuangan lainnya BPRS ini memiliki berbagai jenis produk baik yang bersifat penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun produk jasa dengan bagi hasil yang kompetitif. Saat ini BUMD ini memiliki sebuah kantor pusat dan 13 kantor kas di seluruh kota Bekasi. Perkembangan aktiva per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 257.437.785.075,00 atau mengalami kenaikan sebesar 33.67 % dari tahun 2018 yakni sebesar Rp.192.580.362.000,00. Sedangkan jumlah Pendapatan Rp. 32.939.874.046,00 dan sandingan biaya pengeluaran sebesar Rp. 27.787.483.063,00. per Desember 2019 sebesar Rp. Dari sisi permodalan, per 31 Desember 2018 Rasio CAR perseroan sebesar 26,96 %. Rasio ini jauh diatas keentuan minimal OJK yakni sebesar 12 %. Dari sisi aktiva, dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0.16 %. Rasio NPF (*Non Performing Financing*) pada tahun 2018 turun sebesar 10.10 % dari tahun buku 2016. Pada tahun buku 2017 Rasio NPF sebesar 1.98. Sedangkan pada tahun 2018 turun menjadi 1.70 %. Dari sisi Pasiva, semua pos mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan peningkatan kepercayaan masyarakat Perseroan dan semakin dikenalnya Perseroan ini oleh masyarakat.

2.3.9 Kerjasama Daerah

Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Kota Bekasi tidak dapat bekerja sendiri dan perlu melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya yang saling membutuhkan. Dari tahun 2017 sampai dengan 2020 Pemerintah Kota Bekasi melakukan kerjasama baik dengan sesama pemerintah daerah lain, maupun institusi non pemerintah. Kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk kesepemahaman bersama (MoU), Perjanjian Kerjasama, dan perjanjian pemanfaatan lahan PSU. Secara lengkap data kerja sama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.22 Tabel Kerjasama dalam bentuk MoU Pemkot Bekasi 2017-2020

No	Nama Mitra	Ruang lingkup
2017		
1	PT. Moya Indonesia	Penyusunan Feasibilty Study (FS) Pengembangan SPAM
2	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Bante, Tbk. Kantor Cabang Bekasi	Pengembangan Sistem Informasi Layanan Pajak Daerah Online Kota Bekasi
3	Universitas Krisnadwipayana	Pengembangan Fasilitas dan Peningkatan Sumber Daya Manusia
4	Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi	Pembangunan Gedung Kantor, Penyediaan Tanah Pembangunan Gudang Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi
5	Kesepakatan Bersama	Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama

No	Nama Mitra	Ruang lingkup
	Antara Pemerintah Kota Bekasi Dengan Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi	Kota Bekasi dengan luas lahan 2.250 M2 yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 11 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Badan Pertanahan Nasional atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Negara Nomor 24 Tanggal 6 Juli 1991 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 67731/12 Tanggal 20 Desember 2012
		Penyediaan Fasilitas Kantor Berupa Meubeulair, Komputer dan Kendaraan Roda 4
6	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Bekasi Dengan Ikatan Apoteker Indonesia	Peningkatan Kompetensi Apoteker dan Implementasi Pelayanan Kefarmasian yang Baik pada Rumah Sakit se-Kota Bekasi
	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Bekasi Dengan Detasemen Polisi Militer Jaya/2	Renovasi Gedung Markas Sub Detasemen Polisi Militer Jaya/2-1 Bekasi dengan luas lahan 1.030 M2 yang berada di Jalan Rawa Tembaga Raya Nomor 3 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Badan Pertanahan Nasional atas nama TNI AD Cq. KODAM JAYA Cq. POM DIM 0507/Bekasi BS Nomor 28 Tahun 1991
7	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk	Penyediaan dan Pemasangan 1000 titik Wifi dan 1000 titik CCTV di Ruang Publik dan Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka Mewujudkan Bekasi Smart City
	PT. Indospec	Pengembangan Smart PJU-LED di Kota Bekasi
8	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Bekasi Dengan Tim Penanganan Banjir	Penanganan Banjir di Kawasan Perumahan Taman Cikas, Perum Pulo Permata Sari, Pondok Timur Mas dan Villa Jakasetia yang terletak di Kecamatan Bekasi Selatan
	Institut Teknologi Bandung	Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kota Bekasi
9	Tim Penanganan Banjir	Penanganan banjir area DAS Kali Buaran di Wilayah Kecamatan Pondokgede
	Stia Menarasiswa	Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana Jenjang Strata Satu (S1) dan Program Pasca Sarjana Jenjang Strata Dua (S2)
10	PEMKOT, BAZNAZ KOTA BEKASI Dan PT. BJB Dan Banten, Tbk	Pengumpulan dan Penyetoran Zakat Profesi Bagi Aparatur Pemerintah Kota Bekasi
11	Unisma 45 Bekasi	Penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Pembangunan di Kota Bekasi
12	Usaid Indonesia Urban Water, Sanitation And Hygiene Penyehatan	Implementasi Program USAID IUWASH PLUS di Kota Bekasi

No	Nama Mitra	Ruang lingkup
	Lingkungan Untuk Semua (Iuwash Plus)	
	Institut Pendidikan Bidang Kesehatan	Program Magang Lulusan Institut Pendidikan Bidang Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi
12	Kantor Pertanahan	Penyelesaian Administrasi Pertanahan di Kota Bekasi
	PT. Trio Propertindo Jaya	Fasilitasi Penyediaan Hunian Vertikal Bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
13	Fkrw Kec. Bekasi Selatan	Penanganan Banjir di Area Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Baru dan percepatan Prioritas Pembangunan di Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan
14	Tim Penanganan Banjir	Penanganan banjir area DAS Bojong Rangkong di Wilayah Kecamatan Bekasi Barat
15	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan milik PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU di Kota Bekasi
	Lembaga Pemasarakatan Kelas Iia Bekasi	Pembangunan dan Renovasi Bangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Bekasi yang disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018
16	Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Kota	Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi TKK di Pemerintah Kota Bekasi
17	Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota	Pembinaan Terhadap Calon Peserta Penerimaan Anggota POLRI di Polres Metro Bekasi Kota Wilayah Kota Bekasi
18	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pemanfaatan layanan jasa dan produk PIHAK KEDUA di Kota Bekasi
19	Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Bekasi Dan Koperasi Pemilik Kios Dan Ruko (Pkr) Bekasi	Pengelolaan Pusat Promosi KUMKM yang terletak di Jalan Narogong Km. 5 RT. 001 RW 001 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi
20	Kejaksaan Negeri Kota Bekasi	Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 1 Kota Bekasi
21	Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kota Bekasi	Pelayanan Persalinan Normal Bagi Masyarakat Kota Bekasi yang menggunakan layanan kesehatan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)
		Pembangunan gedung Sekretariat Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kota Bekasi yang beralamat di RT. 003 RW. 009 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi
22	Pemerintah Kota Bandung	Kerja Sama Antar Daerah

No	Nama Mitra	Ruang lingkup
23	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pemanfaatan jasa layanan perbankan milik PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU sebagai pendukung Bekasi Smart City Kerja sama lainnya yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
24	Lembaga Perlindungan Anak Pusat	Pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan Kota Bekasi sebagai Kota Layak Anak
25	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	Pengembangan, Penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pembangunan Daerah di Kota Bekasi
26	Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan Mustikajaya	Pembangunan Fasilitas Umum dan Penanganan Banjir di Wilayah Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi
27	Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan Mustikasari	Pembangunan Fasilitas Umum dan Penanganan Banjir di Wilayah Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi
28	Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan Padurenan	Pembangunan Fasilitas Umum dan Penanganan Banjir di Wilayah Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi
29	Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan Cimuning	Pembangunan Fasilitas Umum dan Penanganan Banjir di Wilayah Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi
30	PT. Akses Prima Indonesia	Jaringan Sistem Komunikasi Serat Optik (SKSO) dan Nirkabel yang ada di Kota Bekasi berupa Ducting Utilitas Bersama (Single Ducting), jaringan serat optik (FO Network), (Microcell Pole/MCP), Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dan Penerapan IoT, Big Data dan Cloud
2018		
1	PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Patriot Bekasi	Layanan Jasa dan Produk Perbankan Serta Penyediaan Kantor Layanan Kas Di Lingkungan Kantor Pemerintah Kota Bekasi
2	Forum Komunikasi Rukun Warga Kecamatan Jatiasih	Penanggulangan Banjir, Penyelesaian Kemacetan dan Percepatan Prioritas Pembangunan di Kecamatan Jatiasih
3	Forum Komunikasi Rukun Warga Kecamatan Bekasi Timur	Penanganan Banjir dan Percepatan Prioritas Pembangunan di Kecamatan Bekasi Timur
4	Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan Jatimelati	Pembangunan Fasilitas Umum dan Penanganan Banjir di Wilayah Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati
5	Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan Jatiwarna	Pembangunan Fasilitas Umum dan Penanganan Banjir di Wilayah Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondokmelati

No	Nama Mitra	Ruang lingkup
6	Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan Jatimurni	Pembangunan Fasilitas Umum dan Penanganan Banjir di Wilayah Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati
7	Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan Jatirahayu	Pembangunan Fasilitas Umum dan Penanganan Banjir di Wilayah Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati
8	PT. Trio Propertindo Jaya	Addendum tentang Fasilitas Penyediaan Hunian Vertikal Bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
9	Forum Komunikasi Rukun Warga Kecamatan Rawalumbu	Penanggulangan Banjir dan Kemacetan Lalu Lintas Serta Percepatan Pembangunan Puskesmas di Wilayah Kecamatan Rawalumbu
10	Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan Medan Satria	Penanggulangan Banjir dan Penataan Sarana/Prasarana Lingkungan di Kelurahan Medan Satria
11	Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan Kalibaru	Penanggulangan Banjir dan Penataan Sarana/Prasarana Lingkungan di Kelurahan Kalibaru
12	Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan Pejuang	Penanggulangan Banjir dan Penataan Sarana/Prasarana Lingkungan di Kelurahan Pejuang
13	Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan Harapan Mulya	Penanggulangan Banjir dan Penataan Sarana/Prasarana Lingkungan di Kelurahan Harapan Mulya
14	Forum Komunikasi Rukun Warga Kecamatan Jatisampurna	Penanggulangan Banjir dan Penataan Sarana/Prasarana Lingkungan di Kecamatan Jatisampurna
15	Forum Komunikasi Rukun Warga Kecamatan Bekasi Utara	Penanggulangan Banjir, Penataan Sarana/Prasarana Lingkungan dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi di Kecamatan Bekasi Utara
16	Universitas Padjadjaran	Penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pembangunan di Kota Bekasi
17	Organisasi Kemasyarakatan Islam Di Kota Bekasi	Pengelolaan Dana Hibah Bagi Organisasi Kemasyarakatan Islam di Kota Bekasi
18	Forum Komunikasi Rukun Warga Kecamatan Bantargebang	Penanggulangan Banjir dan Penataan Sarana/Prasarana Lingkungan di Kecamatan Bantargebang
19	PT. Asuransi Jiwa Taspen	Penyelenggaraan Produk Asuransi Kumpulan Taspen Save Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

No	Nama Mitra	Ruang lingkup
20	Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia	Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi
21	PT. Aneka Sumber Daya Energi	Pengelolaan Mal Pelayanan Publik
22	Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota	Pembentukan Polisi RW Patriot Polres Metro Bekasi Kota
23	Pengadilan Negeri Bekasi Klas 1.A Khusus	Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Bekasi Klas 1.A Khusus
24	PT. Annisa Bintang Blitar	Revitalisasi dan Pengelolaan Pasar Kranji Baru Kota Bekasi
25	PT. Mukti Sarana Abadi	Revitalisasi dan Pengelolaan Pasar Jatiasih Kota Bekasi
26	PT. Javana Arta Perkasa	Renovasi Pasar Bantargebang Kota Bekasi
27	Komando Distrik Militer 0507 Bekasi	Pembangunan Gedung Komando Distrik Militer (KODIM) 0507 Bekasi
28	Komando Distrik Militer 0507 Bekasi	Pelaksanaan Kerja Sama Oprasional Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
29	PT. Indosat, Tbk	Penyediaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Penunjang Smrat City di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
30	Dewan Masjid Indonesia (Dmi) Kota Bekasi	Pembangunan Gedung Kantor Sekretariat Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Bekasi
31	Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Bekasi	Pembangunan Gedung Kantor Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kota Bekasi.
32	PT. Aditama Satrindo Internusa	Revitalisasi dan Pengelolaan Pasar Family Mart Perumahan Harapan Indah Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satrian Kota Bekasi.
33	Universitas Krisnadwipayana	Pengembangan Fasilitas dan Peningkatan Sumber Daya Manusia
34	Kantor Kemetrian Agama Kota Bekasi Dan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (Fkpp) Kota Bekasi	Peningkatan Kapasitas Pondok Pesantren di Kota Bekasi
35	Forum Lintas Rukun Warga Perumahan Pondokgede Permai Kelurahan Jatirasa Kelurahan Jatiasih	Penanggulangan banjir dan penyediaan infrastruktur di lingkungan perumahan pondokgede permai kelurahan jatirasa kecamatan jatiasih kota bekasi
36	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Bekasi	Penyelenggaraan kegiatan kewaspadaan dini masyarakat dini masyarakat kota bekasi
37	Parisada Hindu Dharma	Pembangunan Gedung Sekolah Khusus Agama Hindu di

No	Nama Mitra	Ruang lingkup
	Indonesia Kota Bekasi	Kota Bekasi
38	Yayasan Iclei-Local Governmens For Sustainabilty Indonesia	Penyusunan komitmen dan strategi Kota Bekasi untuk penurunan emisi gas rumah kaca
39	Pemerintah Kota Tangerang	Kerja Sama Antar Daerah dalam rangka Pemanfaatan aplikasi Smart city dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik
40	PT. Metropolitan Land, Tbk	Pengakhiran Surat Perjanjian Antara PT. Metropolitan Development Dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 663/02-SDK/1997 Tanggal 6 Maret 1997 Tentang Penyerahan Fasos/Fasum Perumahan Taman Villa Baru Dalam Rangka Serah Terima ke Pemda Dati II Bekasi Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Surat Perjanjian Antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Metropolitan Land Nomor 593.1/65-Bakukeda/II/2002 Tanggal 15 Februari 2002 tentang Perpanjangan Pemanfaatan Tanah di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk PT. Metropolitan Land
41	Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi	Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Daerah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat
42	PT. Kitita Alami Propertindo	Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mall Atrium Pondokgede Kota Bekasi
43	Kejaksaan Negeri Kota Bekasi (Addendum)	Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
44	Forum Seniman Bekasi	Peningkatan Peran serta Seniman dalam Pembangunan dan Pengembangan Seni Budaya di Kota Bekasi
45	Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Bekasi	Pembentukan koperasi masjid berbasis syariah di kota bekasi
46	PT. Hasana Damai Putra	Rencana Pembangunan Off Ramp Tol dalam Kota Sunter-Pulogebang di Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi
47	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Bekasi
48	PT. Karsindo Utama	Pengadaan Kartu Sehat di Kota Bekasi melalui Program Corporate Social Responsibility
49	Pemerintah Kabupaten Bekasi	Kerja Sama Pembangunan Wilayah Perbatasan
50	PT. Surya Spektrum Inti	Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Plasa Cibubur Kota Bekasi
2019		
1	PT. Trio Propertindo Jaya	Fasilitas Penyediaan Hunian Vertikal bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
2	Komando Distrik Militer	Pelaksanaan Kerja Sama Kegiatan Karya Bhakti Skala

No	Nama Mitra	Ruang lingkup
	0507/Bekasi	besar Komando Distrik Militer 0507/Bekasi di Wilayah Kota Bekaasi
3	PT. Aneka Sumber Daya Energi	Pengelolaan Mal Pelayanan Publik di Pasar Proyek Trade Center
4	Sekolah Tinggi Manajemen Informasi Dan Komputer Bina Insani, Akademi Akuntansi Bina Insani Serta Akademi Sekretaris Dan Manajemen Bina Insani	Penerapan Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan kualitas Sumber Daya Pembangunan Daerah di Kota Bekasi
5	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antar	Media Layanan Informasi Publik
6	PT. Teknologi Rancang Olah Nusantara	Uji Coba Sistem Angkutan Umum sesuai Permintaan (Bus On Demand) di Kota Bekasi
7	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran	Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan sebagai Pendukung Bekasi Smart City
8	Kantor Pertanahan Kota Bekasi	Persertipikatan Tanah, Pendampingan Pengadaan Tanah, Penanganan Permasalahan Aset Tanah dan Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Perpajakan Daerah
9	PT. Veltratel	Uji Coba E-TAP dan CLOUD-TAP di Kota Bekasi
10	Balai Besar Peningkatan Produktivitas Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	Penyelenggaraan Program Peningkatan Produktivitas Perangkat Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat di Kota Bekasi
11	Lembaga Swadaya Masyarakat Bina Masyarakat Bina Masyarakat Peduli	Penyelenggaraan Edukasi dan Pembiasaan Praktik Perilaku Hidup bersih dan sehat (PHBS) Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Bekasi
12	PT. Mora Telematika Indonesia	Penyusunan Studi Kelayakan Penyediaan dan Pelayanan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Bekasi
13	Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi, Dinas Pariwisata Dan	Peningkatan dan Penerimaan Pajak Hotel, Restoran/Rumah Makam dan Hiburan melalui Simplikasi Perizinan di Kota Bekasi

No	Nama Mitra	Ruang lingkup
	Kebudayaan Kota Bekasi, Kecamatan Se Kota Bekasi	
14	Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi, Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Dan Kecamatan Se-Kota Bekasi	Peningkatan dan Perimaan Pajak Reklame melalui Simplikasi Perizinan di Kota Bekasi
15	Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi, Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Dan Kecamatan Se-Kota Bekasi	Peningkatan dan Penerimaan Pajak melalui Simplikasi Perizinan di Kota Bekasi
16	Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Dengan Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian Kota Bekasi	Penguatan Penarikan Pajak melalui Pajak Sistem Informasi secara On Line di Kota Bekasi
17	PT. Bioelektra Power Indonesia	encana Pembangunan Instalansi Pengelohan Sampah menajdi Energi Listrik Teknologi Ramah Lingkungan di kota Bekasi
18	PT. Matahari Hijau Energy	Pembuatan studi kelayakan atas rencana pembangunan instalasi pengelohan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan di kota Bekasi
19	PT. Mamminasata Dalle Konstruksi	Pembuatan Studi Kelayakan atas Rencana Pembangunan Instalasi Pengelohan Sampah menjadi Energi Listrik Benasis Teknologi Ramah Lingkungan di kota Bekasi.
20	PT. Astrazeneca Indonesia	Penyediaan Jet Nebulizer dan Edukasi Tata Laksana Asma di Kota Bekasi melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR).
21	PT. Karsindo Utama	Pengakhiran Kesepakatan Bersama Nomor 1225 Tahun 2018 dan Nomor 067/KU-MBH/18 Tentang Pengadaan Kartu Sehat di kota Bekasi melalui Program Corporate Social Responsibility
22	Pemerintah Kabupaten Bangka	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bangka

No	Nama Mitra	Ruang lingkup
23	Pemerintah Kabupaten Bogor	Kerja Sama antar Daerah dalam Pelayanan Publik
24	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Kerja Sama di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana
25	Rukun Warga 07 Dan Rukun Warga 08 Kelurahan Jatiluhur	Pembangunan Fasilitas Umum di Wilayah Rw 07 dan Rw 08 Perumahan Sapta Pesona Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih
26	PT. Wasteforchange Alam Indonesia	Kerja sama pembersihan sampah Sungai Bekasi berbasis teknologi perahu pembersih sampah sungai
27	PT. Wira Inkubator Indonesia	Pengembangan pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bekasi melalui Program Bekasi Mart
28	Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia	Pelaksanaan hibah tahap satu lanjutan Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Bulak Kapal Bekasi
29	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Lspr	Penerapan Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pembangunan Daerah di Kota Bekasi
30	Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota Dan PT. Gapura Intiutama	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Bekasi Trade center (BTC) Mal.
2020		
1	Universitas Padjadjaran	Penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Bekasi
2	Pemerintah Kabupaten Asmat Dan Yayasan Generasi Injil Papua	Pembangunan Sarana Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Putra-Putri Papua di Kota Bekasi
3	Pemerintah Kota Bengkulu	Kerja Sama antar Daerah dalam rangka Pendayagunaan Potensi daerah Guna Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Religius
4	Pengadilan Negeri Bekasi Klas 1.A Khusus	Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Bekasi Klas 1.A Khusus
5	PT. Kilap Propertindo	Pembangunan Sky Bridge melalui Program Corporate Social Responsibility
6	Universitas Krisnadwipayana	Pengembangan Fasilitas dan Penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Bekasi
7	Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Bekasi	Pembangunan Krematorium di Kota Bekasi
8	Forum Seniman Bekasi	Addendum Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Forum Seniman Bekasi nomor 1224 TAHUN 2018 dan nomor 25/XI/FSB/2018 Tanggal 19 November 2018 tentang Peningkatan Peran Serta Seniman dalam Pembangunan dan Pengembangan Seni Budaya di Kota Bekasi
9	Universitas Pelita Bangsa	Penerapan dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Bekasi

No	Nama Mitra	Ruang lingkup
10	Persatuan Wartawan Indonesia Bekasi	Rehabilitas gedung kantor Persatuan Wartawan Indonesia Bekasi
11	Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi	Pembangunan Tempat Parkir melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR)
12	Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi	Penyambungan Saluran air di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
13	PT. Adhi Persada Properti Dan Rumah Sakit Awal Bros Bekasi Timur	Pembukaan dan Pembuatan Akses Jalan Kegawardaruratan (Emergency) Rumah sakit Awal Bros Bekasi Timur Kota Bekasi
14	Rumah Sakit Swasta Di Kota Bekasi	Penanganan Pasien Pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19) pada Rumah Sakit Swasta di Kota Bekasi

Tabel 2.23 Tabel Kerjasama dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Pemkot Bekasi 2017-2020

No	Nama Mitra	Ruang Lingkup
2017		
1	PT. Hasana Damai Putra	Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Praasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, Perdagangan dan Industri yang berlokasi di Kawasan Harapan Indah Kelurahan Pejuang dan Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi
2	Walikota Bekasi dan Komisariss Besar Polisi Bekasi	Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bekasi kepada Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota untuk Kantor Polsek Jatisampurna
3	Kepala Bappenda Kota Bekasi – Perangkat Daerah dan Camat	Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017
4	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Perjanjian Perubahan (Addendum) tentang Peningkatan Pemanfaatan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi
5	PT. BPRS Patriot Kota Bekasi	Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Kota Bekasi
6	PT. Trie Kencana Persada	Penyediaan Tong Sampah untuk Sekolah Negeri, Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan di Kota Bekasi
7	PT. Bangun Prima Lestari Kencana	Pengelolaan Pasar Baru Bekasi
8	PT. Triview Geospatial Mandiri	Pemanfaatan Prasana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Sarana Perumahan) Milik Pemerintah Kota Bekasi untuk Bangunan Menara Telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) Type Monopole
9	PT. Mitra Muda inti Berlian	Penggunaan Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi
10	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.	Penyediaan dan Pemasangan 1000 (Seribu) Titik Wifi di Ruang Publik dan Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

No	Nama Mitra	Ruang Lingkup
		dalam Rangka Mewujudkan Bekasi Smart City
11	PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk	Pemanfaatan Tanah Dan /Atau Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Milik Pemerintah Kota Bekasi untuk Pemasangan Base Transceiver Station (BTS) Microcell dan Jaringan Fiber Optik Dengan Metode Kamufase di Kota Bekasi
12	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi	Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Smart City Kota Bandung di Kota Bekasi
13	Camat- Kepala BPJS Cabang Utama Bekasi	Pendaftaran Peserta Bukan Pekerja Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Jaminan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kota Bekasi
2018		
1	PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Patriot Bekasi	Layanan Jasa dan Produk Perbankan Serta Penyediaan Kantor Layanan Kas Di Lingkungan Kantor Pemerintah Kota Bekasi
2	PT. Trio Propertindo Jaya	Addendum tentang Fasilitas Penyediaan Hunian Vertikal Bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
3	Universitas Padjadjaran	Penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pembangunan di Kota Bekasi
4	Organisasi Kemasyarakatan Islam di Kota Bekasi	Pengelolaan Dana Hibah Bagi Organisasi Kemasyarakatan Islam di Kota Bekasi
5	PT. Asuransi Jiwa Taspen	Penyelenggaraan Produk Asuransi Kumpulan Taspen Save Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
6	Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia	Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi
7	Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota PT. Aneka Sumber Daya Energi	Pengelolaan Mal Pelayanan Publik
8	Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota	Pembentukan Polisi RW Patriot Polres Metro Bekasi Kota
9	Pengadilan Negeri Bekasi Klas 1.A Khusus	Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Bekasi Klas 1.A Khusus
10	Komando Distrik Militer 0507 Bekasi	Pembangunan Gedung Komando Distrik Militer (KODIM) 0507 Bekasi
11	Komando Distrik Militer	Pelaksanaan Kerja Sama Oprasional Kegiatan TNI

No	Nama Mitra	Ruang Lingkup
	0507 Bekasi	Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
12	PT. Indosat, Tbk	Penyediaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Penunjang Smart City di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
13	Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Bekasi	Pembangunan Gedung Kantor Sekretariat Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Bekasi
14	Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kota Bekasi	Pembangunan Gedung Kantor Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kota Bekasi.
15	Universitas Krisnadwipayana	Pengembangan Fasilitas dan Peningkatan Sumber Daya Manusia
16	Kantor Kemetrian Agama Kota Bekasi Dan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (Fkpp) Kota Bekasi	Peningkatan Kapasitas Pondok Pesantren di Kota Bekasi
17	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Bekasi	Penyelenggaraan kegiatan kewaspadaan dini masyarakat dini masyarakat kota bekasi
18	Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Bekasi	Pembangunan Gedung Sekolah Khusus Agama Hindu di Kota Bekasi
19	YayasanICLEI-Local Governmens For Sustainability Indonesia	Penyusunan komitmen dan strategi Kota Bekasi untuk penurunan emisi gas rumah kaca
20	Pemerintah Kota Tanggerang	Kerja Sama Antar Daerah
21	Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi	Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Daerah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat
22	PT. Kitita Alami Propertindo	Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mall Atrium Pondokgede Kota Bekasi
23	Kejaksaan Negeri Kota Bekasi (Addendum)	Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
24	Forum Seniman Bekasi	Peningkatan Peran serta Seniman dalam Pembangunan dan Pengembangan Seni Budaya di Kota Bekasi
25	Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Bekasi	Pembentukan koperasi masjid berbasis syariah di kota bekasi
26	PT. Hasana Damai Putra	Rencana Pembangunan Off Ramp Tol dalam Kota Sunter-Pulogebang di Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi
27	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Bekasi
28	PT. Karsindo Utama	Pengadaan Kartu Sehat di Kota Bekasi melalui Program Corporate Social Responsibility
29	Pemerintah Kabupaten Bekasi	Kerja Sama Pembangunan Wilayah Perbatasan

No	Nama Mitra	Ruang Lingkup
2019		
1	BPJS Kesehatan	kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi
2	BPJS Ketenagakerjaan cabang Kota Bekasi dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
3	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan Peralatan dan Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis.
4	PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan Bekasi	Pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan serta pembayaran rekening listrik Pemerintah Kota Bekasi.
5	Klinik Nadya Medical	Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi.
6	Klinik Dr. Rahman Medical Center	Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi.
7	Klinik Tiara Bunda	Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi.
8	Klinik Cahaya Amalia	Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi
9	Klinik Sayang Bunda	Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi
10	Klinik Almuzammil	Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi
11	Klinik Kesuma Medika	Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi
12	Klinik Teratai Dua	Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi
13	Klinik Trimedika	Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi.
14	Klinik Rumah Sehat Keluarga	Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi.

No	Nama Mitra	Ruang Lingkup
15	Klinik Umi Rahma	Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi.
16	Klinik Yosri Medika	Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi.
17	Klinik Warna Ayu Jaya Medika	Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi
18	Klinik Selasih Medika	Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi
19	Klinik Yasyfa Medika	Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi
20	Klinik Ratna Komala	Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi
21	Klinik Alita	Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi
22	Klinik Guci Medika	Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi
23	Klinik Nani Medika	Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi
24	Klinik Balqis	Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi
25	Klinik Fazia Medika	Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi
26	Klinik Cicilian	Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi
27	Klinik Bhakti Medika	Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi
28	Klinik Alifia	Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi
29	Klinik Mitra Medika	Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi
30	PT. Bangunbina	Pengelolaan Pertokoan Kranji Kota Bekasi

No	Nama Mitra	Ruang Lingkup
	Primasarana	
31	PT. Mitra Muda Inti Berlian	Sewa atas Penggunaan Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi untuk <i>Homebase</i> Bhayangkaya Fc
32	PT. Persija Jaya Jakarta	Penggunaan Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi
33	PT. Asuransi Jiwa Taspen	Penyelenggaraan Produk Asuransi kumpulan Taspen SAVE untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
34	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi, Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kepala Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bgekasi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan.	Percepatan Penyelesaian Proses Perizinan di Kota Bekasi
35	PT. Semen Indonesia Beton	Penyediaan Beton siap pakai di Kota Bekasi
36	PT. Motive Mulia	Penyediaan beton siap pakai di Kota Bekasi
37	PT. Benua Multi Guna	Penyediaan beton siap pakai di Kota Bekasi
38	PT. Pionirbeton Industri	Penyediaan beton siap pakai di Kota Bekasi
39	PT. Karya Beton Sudhira	Penyediaan beton siap pakai di Kota Bekasi
40	PT. Yatung Concrete Internasional	Penyediaan beton siap pakai di Kota Bekasi
41	Kantor Pertanahan Kota Bekasi	Pensertipikatan tanah dan penanganan permasalahan Aset Tanah milik Pemerintah Kota Bekasi
42	Kantor Pertanahan Kota Bekasi	Pengintegrasian data pertanahan dengan perpajakan Daerah di Kota Bekasi
43	Kantor Pertanahan Kota Bekasi	Pendampingan Proses Pengadaan Tanah Skala Kecil di Kota Bekasi
44	Balai Besar Peningkatan Produktivitas Direktorat Jenderal Pembinaan Penelitian Dan	Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Produktivitas bagi Perangkat Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat Kota Bekasi

No	Nama Mitra	Ruang Lingkup
	Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	
45	Balai Besar Peningkatan Produktivitas Direktorat Jenderal Pembinaan Penelitian Dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	Pelaksanaan Pengukuran Produktivitas Makro (Regional/sektoral) dan Mikro (Perusahaan) di Kota Bekasi
46	PT. Jasa Marga, Tbk Cabang Jakarta- Cikampek	Pemanfaatan dan penataan Lahan Direktorat Jenderal Bina Marga Serah Operasi PT. Jasa Marga, TBK Cabang Jakarta-Cikampek untuk Pekerjaan Pembangunan Crossing Buaran
47	Universitas Padjadjaran	Assesment Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2019
48	PT. Summarecon Agung, Tbk	Perpanjangan Pengelolaan Landmark, Taman dan Fasilitas Lainnya di Bawah Fly Over K.H. Noer Ali Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Bekasi
49	Sub Garnisun 0507/Bekasi	Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Eks Kantor UPTD Pembinaan TK/SD Kecamatan Bekasi Timur Kepada Sub Garnisun 0507/Bekasi untuk Kantor Sub Garnisun 0507/Bekasi
50	BPJS Kesehatan Kota Bekasi	Kepesertaan Program Jaminan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi
51	Kejaksaan Negeri Kota Bekasi	Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Eks Gedung Kantor Dinas Kesehatan milik Pemerintah Kota Bekasi kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi untuk Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
52	BPJS Kesehatan Kota Bekasi (Addendum)	Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang di daftarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi
52	PT. Gapura Intiutama	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Bekasi Trade Center (BTC) Mal
53	PT. Bankn Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekayon	Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama Penerimaan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bekasi
54	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK kantor Cabang Bekasi	Penerimaan pembayaran Bea perolelahan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan penerimaan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB- P2) di Kota Bekasi.
55	STMIK Bina Insani	Pengembangan dan penerapan Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Bekasi

No	Nama Mitra	Ruang Lingkup
56	Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	Penerapan dan Peningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi pada Bidang Ekonomi di Kota Bekasi
57	Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	Penerapan dan Peningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi pada Bidang Hukum di Kota Bekasi
58	Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	Penerapan dan Peningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi pada Bidang Psikologi di Kota Bekasi
59	Fakultas Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	Penerapan dan Peningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi pada Bidang Komunikasi di Kota Bekasi
60	Fakultas Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	Penerapan dan Peningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi pada Bidang Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP) di Kota Bekasi
61	Fakultas Pendidikan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	Penerapan dan Peningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi pada Bidang Pendidikan di Kota Bekasi
62	Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	Penerapan dan Peningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi pada Bidang Teknik di Kota Bekasi
2020		
1	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran	Pembuatan naskah dan kunci Jawaban penyesuaian Ijazah kenaikan pangkat Pegawai Negeri Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020
2	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Kota dan PT. Bank Bangunan daerah Jawa Barat dan Banten, TBK Cabang Bekasi	Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, TBK Cabang Bekasi nomor 27 TAHUN 2019, PER/58/012019 dan 002/PKS-BKS/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penyelenggaraan Kepesertaan Program Jaminan Sosial bagi Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan, Kelurahan, Kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) DAN Pedamping Kader Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Se-Kota Bekasi
3	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Kota dan PT. Bank Bangunan daerah Jawa Barat dan Banten, TBK Cabang Bekasi	Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, TBK Cabang Bekasi nomor 1250 TAHUN 2018, PER/98/122018 dan 016/PKS- BKS/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang

No	Nama Mitra	Ruang Lingkup
		Penyelenggaraan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pengurus Rukun Tetangga dan Se-Kota Bekasi
4	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Bekasi	Penerapan Alat Transaksi Monitoring Pajak Daerah dalam rangka Optimalisasi asli Daerah
5	PT. Bank Pemabangunan daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Bekasi	Penerapan Alat Transaksi Monitiring Pajak dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
6	PT. Cipta Surya Sejati	Pengelolaan parkir Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
7	BPJS Kesehatan	Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi
8	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Samsat)	Sinergitas Program Intensifikasi, Pengembangan Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kota Bekasi
9	PT. Indomarco Prismatama Cabang Bekasi	Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan Indomaret di Kota Bekasi
10	Wali Kota Bekasi	Optimalisasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Lainnya di Kota Bekasi

Tabel 2.24 Tabel Perjanjian Pemanfaatan Lahan PSU Pemkot Bekasi 2017-2020

No	Nama Mitra	Ruang Lingkup
2017		
1	Yayasan Nurul I'tishom	Perjanjian Antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Yayasan Nurul I'Tishom tentang Perpanjangan Sewa Lahan Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Raudhatul Athfal (RA) Nurul I'Tishom, Masjid Nurul I'Tishom dan Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Nurul I'Tishom Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi
2	Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hikmah	Perjanjian Antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hikmah tentang Sewa Lahan Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Masjid Al-Hikmah Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
3	Yayasan Bina Siswa Utama	Perpanjangan yang ke 6 (Enam) Sewa Tanah Sarana

No	Nama Mitra	Ruang Lingkup
		Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bina Siswa, Sekolah Menengah Atas (SMA) Bina Siswa Utama dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bina Siswa Utama Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi
4	Koperasi Wanita Jati Agung (Kwja)	Perjanjian antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Koperasi Wanita Jatiagung (KWJA) tentang Sewa Tanah Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Kantor Sekretaris Koperasi dan Tempat Usaha Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi
5	Yayasan Pondok Ungu Permai	Perjanjian Antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Yayasan Al Jihad Pondok Ungu Permai tentang Sewa Tanah Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
6	Yayasan Umat	Perjanjian antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Yayasan Umat tentang Perpanjangan yang Ke 3 (tiga) Sewa Tanah Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Diniyah Tamiliyah Awaliyah (DTA) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) / Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKQ) Alfatonah Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi
7	Yayasan Nurul Islam Harapan Baru Bekasi	Perjanjian antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Yayasan Umat tentang Perpanjangan yang Ke 3 (tiga) Sewa Tanah Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), Raudhatul Athfal (RA) dan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi
8	Yayasan Bina Sejahtera Jaya	Perjanjian Antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Yayasan Bina Sejahtera Jaya tentang Perpanjangan Yang Ke 5 (lima) Sewa Tanah Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Taman Kanak-kanak Islam (TKI) dan Sekolah Dasar Islam (SDI) Al Fajar Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi
9	Ketua Rukun Warga 008 Perumahan Setia Bina Sarana Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara	Perjanjian antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Ketua Rukun Warga 008 Perumahan Setia Bina Sarana Kelurahan harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara tentang Perpanjangan yang ke 2 (dua) Sewa Tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan

No	Nama Mitra	Ruang Lingkup
		Milik Pemerintah Kota Bekasi untuk Gedung Olah Raga / Gedung Serba Guna Harapan Nusantara di Perumahan Setia Bina Sarana Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
10	Pt. Artmosfir Kreasi Mandiri	Perjanjian antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Artmosfir Kreasi Mandiri Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, Perdagangan dan Industri untuk Penggunaan Lahan Parkir Dengan Teknologi Pembayaran Secara Real Time yang berlokasi di Ruko Sentra Niaga Kalimalang 1, 2, dan 3 Jl. Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
10	Pt. Artmosfir Kreasi Mandiri	Perjanjian antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Artmosfir Kreasi Mandiri Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, Perdagangan dan Industri untuk Penggunaan Lahan Parkir Dengan Teknologi Pembayaran Secara Real Time yang berlokasi di Ruko Sentra Niaga Kalimalang 1, 2, dan 3 Jl. Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
11	Dewan Kemakmuran Masjid (Dkm) Masjid Jami' Al Muhajirin	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Jami' Al Muhajirin tentang Pemanfaatan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Masjid Jami' Al Muhajirin Perumnas II Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
12	Gereja Katolik Santo Bartolomeus	Perjanjian antara Pemerintah Kota Bekasi Dengan Gereja Katolik Santo Bartolomeus tentang Perpanjangan yang ke 2 (dua) Sewa Tanah Sarana Perumahan Taman Galaxi Indah Milik Pemerintah Kota Bekasi Kepada Gereja Katolik Santo Bartolomeus Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
13	Pt. Artmosfir Kreasi Mandiri	Perjanjian tambahan (Addendum) antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Artmosfir Kreasi Mandiri Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, Perdagangan dan Industri untuk Penggunaan Lahan Parkir Dengan Teknologi Pembayaran Secara Real Time yang berlokasi di Ruko Sentra Niaga Kalimalang 1, 2, dan 3 Jl. Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
14	Dewan Kemakmuran Masjid (Dkm) Masjid Jami'	Perjanjian Antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Jami' Al

No	Nama Mitra	Ruang Lingkup
	Al Hijrah	Hijrah tentang Pemanfaatan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Milik Pemerintah Kota Bekasi di Perumahan Villa Indah Permai Untuk Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al Hijrah Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
38	Yayasan Nurul I'tishom	Perjanjian Antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Yayasan Nurul I'Tishom tentang Perpanjangan Sewa Lahan Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Raudhatul Athfal (RA) Nurul I'Tishom, Masjid Nurul I'Tishom dan Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Nurul I'Tishom Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi
39	Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hikmah	Perjanjian Antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hikmah tentang Sewa Lahan Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Masjid Al-Hikmah Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
40	Yayasan Bina Siswa Utama	Perpanjangan yang ke 6 (Enam) Sewa Tanah Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bina Siswa, Sekolah Menengah Atas (SMA) Bina Siswa Utama dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bina Siswa Utama Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi
41	Koperasi Wanita Jati Agung (Kwja)	Perjanjian antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Koperasi Wanita Jatiagung (KWJA) tentang Sewa Tanah Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Kantor Sekretaris Koperasi dan Tempat Usaha Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi
42	Yayasan Pondok Ungu Permai	Perjanjian Antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Yayasan Al Jihad Pondok Ungu Permai tentang Sewa Tanah Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
43	Yayasan Umat	Perjanjian antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Yayasan Umat tentang Perpanjangan yang Ke 3 (tiga) Sewa Tanah Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Diniyah Tamiliyah Awaliyah (DTA) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) / Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKQ) Alfatonah Kelurahan Jakasampurna Kecamatan

No	Nama Mitra	Ruang Lingkup
		Bekasi Barat Kota Bekasi
44	Yayasan Nurul Islam Harapan Baru Bekasi	Perjanjian antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Yayasan Umat tentang Perpanjangan yang Ke 3 (tiga) Sewa Tanah Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), Raudhatul Athfal (RA) dan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi
45	Yayasan Bina Sejahtera Jaya	Perjanjian Antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Yayasan Bina Sejahtera Jaya tentang Perpanjangan Yang Ke 5 (lima) Sewa Tanah Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Taman Kanak-kanak Islam (TKI) dan Sekolah Dasar Islam (SDI) Al Fajar Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi
46	Ketua Rukun Warga 008 Perumahan Setia Bina Sarana Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara	Perjanjian antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Ketua Rukun Warga 008 Perumahan Setia Bina Sarana Kelurahan harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara tentang Perpanjangan yang ke 2 (dua) Sewa Tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Milik Pemerintah Kota Bekasi untuk Gedung Olah Raga / Gedung Serba Guna Harapan Nusantara di Perumahan Setia Bina Sarana Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
47	Pt. Artmosfir Kreasi Mandiri	Perjanjian antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Artmosfir Kreasi Mandiri Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, Perdagangan dan Industri untuk Penggunaan Lahan Parkir Dengan Teknologi Pembayaran Secara Real Time yang berlokasi di Ruko Sentra Niaga Kalimalang 1, 2, dan 3 Jl. Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
48	Dewan Kemakmuran Masjid (Dkm) Masjid Jami' Al Muhajirin	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Jami' Al Muhajirin tentang Pemanfaatan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Masjid Jami' Al Muhajirin Perumnas II Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
49	Gereja Katolik Santo Bartolomeus	Perjanjian antara Pemerintah Kota Bekasi Dengan Gereja Katolik Santo Bartolomeus tentang Perpanjangan yang ke 2 (dua) Sewa Tanah Sarana Perumahan Taman Galaxi Indah Milik Pemerintah Kota Bekasi Kepada Gereja Katolik Santo Bartolomeus Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi

No	Nama Mitra	Ruang Lingkup
		Selatan Kota Bekasi
50	Pt. Artmosfir Kreasi Mandiri	Perjanjian tambahan (Addendum) antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Artmosfir Kreasi Mandiri Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, Perdagangan dan Industri untuk Penggunaan Lahan Parkir Dengan Teknologi Pembayaran Secara Real Time yang berlokasi di Ruko Sentra Niaga Kalimalang 1, 2, dan 3 Jl. Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
51	Dewan Kemakmuran Masjid (Dkm) Masjid Jami' Al Hijrah	Perjanjian Antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Jami' Al Hijrah tentang Pemanfaatan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Milik Pemerintah Kota Bekasi di Perumahan Villa Indah Permai Untuk Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al Hijrah Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
2018		
1	Yayasan Masjid Jami Al-Ikhlash	Perjanjian antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Yayasan Masjid Jami Al-Ikhlash tentang Pemanfaatan Tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Duren Jaya Milik Pemerintah Kota Bekasi Kepada Yayasan Masjid Jami Al-Ikhlash untuk Masjid Jami Al-Ikhlash dan Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Ikhlash Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur
2	Yayasan Pembina Lembaga pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Perwakilan Kota Bekasi	Perjanjian antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Perwakilan Kota Bekasi tentang Perpajakan yang ke 4 (Empat) Pemanfaatan Tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Tytyan Kencana Milik Pemerintah Kota Bekasi untuk Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Perwakilan Kota Bekasi Untuk Sekolah Menengah Pertama Persatuan Guru Republik Indonesia (SMP PGRI) Astra Insani dan Sekolah Menengah Atas Persatuan Guru Republik Indonesia (SMA PGRI) 2 Kota Bekasi
3	Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman Perwakilan Bekasi	Perpanjangan yang Kesatu Pemanfaatan Tanah Prasarana ,Sarana dan Utilitas Perumahan Villa Indah Permai Milik Pemerintah Kota Bekasi Kepada Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman Untuk Masjid Jami ' Panglima Besar Soedirman dan Sekolah Menengah Pertama Islam Panglima Besar Soedirman Kota Bekasi
4	Pengurus Pimpinan Kolektif Majelis Daerah Korp	Penggunaan Tanah dan Bangunan Gedung Eks Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bekasi Milik

No	Nama Mitra	Ruang Lingkup
	Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Bekasi	Pemerintah Kota Bekasi Kepada Pengurus Pimpinan Kolektif Majelis Daerah Korp Aloumni Himpunan Mahasiswa Islam Bekasi Untuk Kantor Sekretariat
5	Yayasan Baabut Taubah Al_Insani Kemang Pratama	Pemanfatan Tanah Prasarana, Sarana dan Utulitas Perumahan Kemang Pratama Milik Pemerintah Kota Bekasi Kepada Yayasan Baabut Taubah Al-Insani Kemang Pratama untuk Sarana Ibadah
6	Yayaasan Taufiqurrahman Permata Hijau Permai	Perjanjian antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Yayasan Taufiqurrahman Permata Hijau Permai tentang Pemanfaatan Tanah Prasarana, sarana dan utilitas di Perumahan Permata Hijau Permai milik Pemerintah Kota Bekasi kepada Yayasan Taufiqurrahman Permata Hijau untuk Sekolah Dasar Islam Terpadu Taufiqurrahman
7	Dewan Kemakmuran Masjid Jami An-Nur	Pemanfaatan Tanah Prasarana, Saran dan Utilitas Perumahan Setia Bina Sarana Pemerintah Kota Bekasi Kepada Dewan Kemakmuran Masjid Jami' An-Nur untuk Masjid Jami' An-Nur Tempat Pendidikan Al-Quran An-Nur
8	Yayasan Al Hidayah Pondok Cipta	Perjanjian antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Yayasan Al Hidayah tentang Pemanfaatan Tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Pondok Cipta Milik Pemerintah Kota Bekasi untuk Masjid Al Hidayah Kepada Yayasan Al Hidayah Pondok Cipta Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat
9	Yayasan Al Hidayah Pondok Cipta	Pemanfaatan Tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Pondik Cipta Milik Pemerintah Kota Bekasi untuk Masjid Al Hidayah Kepada Yayasan Al Hidayah Pondok Cipta Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat
10	Yayasan Darul Iman Narogong	Perjanjian antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Yayasan Darul Iman Narogong tentang Pemanfaatan Tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Milik Pemerintah Kota Bekasi untuk Masjid Jami' Al Iman Kepada Yayasan Darul Iman Narogong Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu
11	Yayasan Bani Saleh Bekasi	Perpanjangan yang ke lima Pemanfaatan Tanah Prasrana Sarana dan Utilitas Perumahan Tytyan Indah Milik Pemerintah Kota Bekasi Kepada Yayasan Bani Saleh Bekasi untuk Taman Kanak-Kanak Bani saleh III dan sekolah Dasara Asaleh III Keluarahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria
12	Dewan Kemakmuran Masjid An-Nuur	Perjanjian Sewa Antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Dewan Kemakmuran Masjid AN-NUUR tentang Pemanfaatan Tanah Prasarana,Sarana dan Utilitas Perumahan Mutiara Gading Timur Milik

No	Nama Mitra	Ruang Lingkup
		Pemerintah Kota Bekasi Kepada Dewan Kemakmuran Masjid AN-NUUR untuk Masjid, Taman Kanak-kanak Al-Quran dan Taman Pendidikan Al-Quran AN-NUUR Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya
13	Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Mu'minin	Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Bumi Bekasi Baru IV Milik Pemerintah Kota Bekasi kepada Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Mu'Minin untuk Masjid Baitul Mu'minin dan Taman Pendidikan Al-Quran
14	Yayasan Baitul Mukhlisiin Duren Jaya	Pemanfaatan Tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Duren Jaya Milik Pemerintah Kota Bekasi Kepada Yayasan Baitul Mukhlisiin Duren Jaya untuk Masjid Jami' Baitul Mukhlisiin dan Taman Pendidikan Al-Quran Baitul Mukhlisiin
15	Yayasan Pendidikan Al-Huda Aren Jaya	Perpanjangan yang Ke 3 (Tiga) Pemanfaatan Tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Milik Pemerintah Kota Bekasi untuk Yayasan Pendidikan Al-Huda Aren Jaya untuk Raudhatul Athfal, Pendidikan Usia Dini, Taman Pendidikan Al-Quran, Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan sekolah Dasar Islam Terpadu di Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) III Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
16	Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mubarak	Pemanfaatan Tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Perumnas I Milik Pemerintah Kota Bekasi kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mubarak untuk Masjid Al-Mubarak
17	Dewan Kemakmuran Masjid Al-Kautsar	Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Milik Pemerintah Kota Bekasi kepada Dewan Kemakmuran Masjid AL-Kautsar Untuk Masjid AL-Kautsar di Perumahan Masnaga kota bekasi
18	Yayasan Al-Ikhlas 86	Perpanjangan Sewa Pemanfaatan Tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Masnaga Milik Pemerintah Kota Bekasi kepada Yayasan AL-Ikhlas 86 Untuk Masjid Al-Ikhlas, Taman kanak-kanak Islam Al-Ikhlas dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Ikhlas
19	Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Iman	Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Taman Wisma Asri Milik Pemerintah Kota Bekasi Kepada Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Iman Untuk Masjid dan Taman Pendidikan Al'Quran Nurul Iman Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara
20	Pengurus Rukun Warga 012	Penggunaan Tanah Bangunan Prasarana, Sarana dan

No	Nama Mitra	Ruang Lingkup
		Utilitas Perumahan Duren Jaya
21	Dewan Kemekmuran Masjid Baitul Hikmah	Pemanfaatan Tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Taman Bekasi asri Milik Pemerintah Kota Bekasi kepada Dewan Kemakmuran Baitul Hikmah untuk Masjid Baitul Hikmah Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu
22	Rukun Warga 008 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara	Penggunaan Tanah dan Gedung Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Setia Bina Sarana Milik Pemerintah Kota Bekasi Kepada Pengurus Rukun Warga 008 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara untuk Kantor Sekretariat Rukun Warga 008
23	Yayasan Masjid Attaqwwa Vip	
24	Yayasan Baitul Jihad Kemang Pratama	Pemanfaatan Sarana Perumahan di bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untk Masjid Baitul Jihad, Taman Pendidikan Al Quran (TPA) Baitul Jihad, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Baitul Jihad, sekolah Menengah Pratama Islam Terpadu (SMPIT) dan Aula Yayasan Baitul Jihad Kelurahan Bojong Rawa Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi
25	Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Hidayah	Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Taman Wisma Asri Milik Pemerintah Kota Bekasi Kepada Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Iman Untuk Masjid dan Taman Pendidikan Al'Quran Nurul Iman Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara
26	Yayasan Al-Muttaqin Taman Galaxi	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Yayasan Al-Muttaqin Taman Galaxi tentang Pemanfaatan tanah Prasana, Sarana dan Utilitas Perumahan Taman Galaxi milik Pemerintah Kota Bekasi untuk Pemabangunan Mussholla Al-Muttaqin dan Balai pertemuan warag oleh Yayasan Al-Muttaqin Taman Galaxi Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan.
27	Yayasan Al-Ittihaadurrohman	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Yayasan Al Ittihaadurrohman Perpanjangan ke 2 (dua) Pemanfaatantanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan milik Pemerintah Kota Bekasi kepada Yayasan Ittihaadrrohman untuk Masjid Al Ittihad, Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) dan Taman Kanak-Kanak Al Qur'an (TKQ)m Al Ittihad di kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Selatan
28	Yayasan Al Husna Jatibening	Perjanjian sewa Pemerintah Kota Bekasi dengan Yayasan Al Husna tentang Perpanjangan ke 2 (dua)

No	Nama Mitra	Ruang Lingkup
		Pemanfaatan Tanah Prasarana , Sarana dan Utilitas Perumahan milik Pemerintah Kota Bekasi kepada Yayasan Al Husna Jatibening untuk Masjid Al Husna, Playgrup, Taman Pendidikan Al Qur'an dan Taman Kanak-Kanak Islam Al Husna di Perumahan Departemen Kesehatan II Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede
29	Yayasan Masjid Al Furqan Taman Galaxi	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Yayasan Masjid Al furqan Taman Galaxi tentang Perpanjangan ke 3 (tiga) Pemanfaatan tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan milik Pemerintah Kota Bekasi kepada Yayasan Masjid Al furqon Taman Galaxi untuk Taman Kanak-kanak Al Furqan Perumahan Taman Galaxi indah Kelurahann jaksetia Kecamatan Bekasi Selatan
30	Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Ashlah	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Ishlah tentang Pemanfaatan Tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan milik Pemerintah Kota Bekasi kepada Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Ishlah untuk Masjid jami; Al-Ishlah di Perumahan Pertama Harapan Baru Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria
31	Yayasan Masjid Jame' Harapan Jaya	Perjanjian Sewa Pemerintah Kota Bekasi dengan Yayasan Masjid jamie' Harapan Jaya tentang Perpanjangan Ke 3 (tiga) Pemanfaatan Tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Milik Pemerintah Kota Bekasi Kepada Yayasan Masjid Jamie' Harapan Jaya untuk Taman Kanak-Kanak Islam Harapan jaya, Pendidikan Anak Usia Dini Nurul Ikhlas dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul ikhlas Harapan Jaya di Perumahan Harapan Jaya Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara
2019		
1	Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Baitul Jannah	Perumahan Villa Indah Permai Blok H 19 Rt 07 Rw 035 Kelurhan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
2	Panitia Pembangunan Huria Kristen Batak Orotetan Setia Mekar	Jalan Pulau Sumatera Raya Perumnas III No. D3/5 Rt 001 Rw 015 Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur
3	Yayasan Badan Kerjasama Gereja (Bksg) Harapan Baru Bekasi	Jalan Harapan jaya Regency Blok A No. I Komplek Gereja Rt 009 Rw 014 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat
4	Pengurus Musholla Al-Falah	Perumahan Kranggan Permai Jalan Kenanga Raya Rt 011 Rw 011 Kelurahan Jatisampurna Kecamatan

No	Nama Mitra	Ruang Lingkup
		Jatisampurna
5	Dewan Kemakmuran Masjid Darussalam	Perumahan Villa Indah Permai Blok H 25 Rw 036 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara
6	Majelis Gereja Toraja Jemaat Galaxi	Perumahan Taman Galaxi Jalan Gardenia Tengah Blok BA 1 Rt 005 Rw 017 Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi selatan
7	Pengurus Rukun Warga 016	Perumahan Bukit Kencana I Jalan Sentosa Raya Blok C Nomor 4 Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede
8	Badan Pekerja Gereja Batak Karo Protestan Majelis Jemaat Bekasi	Perumahan Villa Galaxi Jalan Gardenia I Blok AA II Nomor 35 Rt 005 Rw 017 Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan
9	Yayasan Masjid At Taqwa Pulosirih Galaksi	Perumahan Taman Galaksi Indah I Jalan Pulo Sirih Utara I Rt 001 Rw 014 Kelurahan Pekayon jaya Kecamatan Bekasi Selatan
10	Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Rahman	Perumahan Grand Bekasi Jalan Taman Apel Hijau Blok A Rt 10 Rw 019 Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustika Jaya
11	Dewan Kemakmuran Nasjid An-Nur	Perumahan Bekasi Timur Regency Jalan Flaminggo 10 Blok F Rw 14 Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya
12	Yayasan Thariq Bin Ziyad Bekasi	Jalan alamanda Blok C3 Nomor 02 Rt 010 Rw 008 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
13	Yayasan Pembina Lemebaga Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah Pgri Kota Bekasi	Jalan Rawa Temabaga IV Nomor 4 Kelurahan Marga Jayan Kecamatan Bekasi Selatan
14	Yayasan Cindera Mata	Harapan Indah Blok JF/01 Rt 001 Rw 017 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria
15	Yayasan Al Hasanah Kayuringin Jaya	Jl. Tawes Raya Rt 001 Rw 006 Perumnas II Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan
16	Yayasan Masjid Jami Al Hidayah Perumnas Tiga	Jl. Pulau Selayar Rt 008 Rw 017 Perumnas III Kelurahanh Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur
17	Yayasan Karya Guna bangsa Bekasi Selatan	Perumahan Duren Jaya Jl. Cirebon Blok O Rt 012 Rw 009 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur
18	Yayasan Al Kautsar Bintara Jaya	Jl. Gunung Galunggung Raya Perumahan Masnaga Rt 003 Rw 12 Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat
19	PT. Bumen Duta Cipta Sarana	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73 Kelurahan Mententeng Dalam, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan
20	Yayasan Masjid Pamglima Besar Soedirman Perwakilan Bekasi	Perumahan Taman Galaxi Jalan Taman Soka II Rt 007 Rw 014 Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan

No	Nama Mitra	Ruang Lingkup
21	Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Bekasi Bandung (KAPEMASI)	Jalan Raya Cikalang Nomor 298 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
22	Yayasan Masjid Jami Al Hidayah Perumnas Tiga	Perumnas III Jalan Pulau Selayar RT. 008 RW. 017 Kel. Arenjaya Kec. Bekasi Timur
23	Yayasan Al Ikhlas Bekasi Jaya Indah	Perumahan Bekasi Jaya Indah Jl. Jakarta Raya RT. 011 RW. 010 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur
24	Yayasan Al Ikhlas Bekasi Jaya Indah	Perumahan Bekasi Jaya Indah Jl. Jakarta Raya RT. 011 RW. 010 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur
25	Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur	Jalan Kusuma Utara XII Rt 016 Rw Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur
26	Yayasan Taufiqurrahman Pertama Hijau Permai	Perumahan Pertama hijau Permai Blok J Nomor 99 Kelurahan kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara
27	Dewan Kemakmuran Masjid Jami'Nurul Huda	Perumahan Piondok Timur Indah Rw 004 Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya
28	Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al- Makmur	Lapangan Multiguna Jl. Ir. H. Juanda Rt 02 Rw 09 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur
29	Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Bekasi-Resort Bekasi	Jalan gunung gede raya no I Perumnas II Bekasi Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan
30	Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Muhim	Perumahan essence Park jalan Masjid Raya Rt 004 Rw 013 Kelurahan Jaticepapak Kecamatan pondokgede Kota Bekasi
31	Yayasan Baiturrahim Nasio	Perumahan Bumim Nasio Indah jalan Anggrek Rt 08 Rw 15 Kelurahanm Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi
32	Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hikmah	Perumahan Bumi Bekasi Baru Jalan Pandega II Blok VI Rt 03 Rw 07 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu kota Bekasi
33	Yayasan Baitul Asri	Perumahan Jatiwaringin Asri II Jalan Lubuk Kasih no. 1 Rt 001 Rw 005 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi
34	Yayasan Al Muhajirin Wijaya Kusuma	Perumahan Bekasi Jaya Indah Jalan Wijaya Kusuma Raya Rt 004 Rw 015 Kelurahan Duren jaya Kecamatan Bekasi Timur
35	Dewan Kemakmuran Masjid Annur	Perumahan puri gading cluster villa bekasi blok H Rt 003 Rw 013 Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokgede
36	Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Muhajirin	Perumahan harapan Baru I jl melinjo raya rt 010 rw 006 kelurahan kota baru kecamatan bekasi barat
37	Yayasan Pendidikan Islam Karya Mulya Jakarta	Perumahan harapan baru jalan salak IX Rt 01 Rw 07 Kelurahan koata baru kecamatan bekasi barat
38	Yayasan Subulussalam Bekasi	Perumahan Pondok Cipta Jalan Blok D Rt 007 Rw 008 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat
2020		

No	Nama Mitra	Ruang Lingkup
1	Dewan Kemakmuran Masjid Daarul Falaah	Perjanjian sewa antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Dewan Kemakmuran Masjid Daarul Falaah tentang Pemanfaatan Lahan Prasarana , sarana dan Utilitas Perumahan kepada Dewan kemakmuran masjid Daarrul Falaah untuk Masjid Daarul Falaah di Perumahan Bumi Bekasi baru Kerlurahan Bojong menteng Kecamayan Rawalumbu kota Bekasi
2	Yayasan Karya Guna Bangsa Bekasi Selatan	Addendum atas Perjanjian sewa nomor 2390 Tahun 2019 dan B.107.A/IX/YKGB/2019 tentang Perpanjangan Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan milik Pemerintah Kota Bekasi kepada Yayasan Karya Guna Bangsa Bekasi Selatan untuk Sekolah Menengah Kejuruan Karya Gunan I di Perumahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.
3	Yayasan Masjid Al Muhajirin Taman Century 2	Pemanfaatan lahan Prasarana, sarana dan Utilitas perumahan kepada Yayasan Masjid Al Muhajirin Taman Century 2 untuk Masjid Al Muhajirin Taman Century 2 di Perumahan Taman Century II Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan
4	DKM Raudhatul Jannah	Perpanjangan Pemanfaatan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan kepada Dewan Kemakmuran Masjid Raudhatul Jannah untuk Masjid Raudhatul Jannah di Perumahan Villa Mas Garden Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
5	Dewan Kemakmuran Masjid Al-ishlah	Perjanjiann Sewa antara Pemerintah Kota Bekasi dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ishlah tentang Pemanfaatan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan kepada Dewan kemakmuran Masjid Al-ishlah untuk Masjid Al-ishlah untuk Masjid Al-Ishlah di Perumahan Harapan Baru Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat kota Bekasi
6	DKM Masjid Baitul Husna	Pemanfaatan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Milikn Pemerintah Kota Bekasi kepada Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Husna untuk Masjid Baaitul husna dan Taman Pendidikan al-Quran Baitul Husna di Perumahan Harapan indah Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi
7	Pengurus Rukun Warga 032-Pejuang	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pengurus Rukun Warga 032-Pejuang tentang Pemanfaatan Lahan Prasarana, sarana dan utilitas Perumahan kepada Pengurus Rukun Warga 032-Pejuang untuk Taman asri dan Usaha Micro Griya 032 di perumahan Griya Harapan Permai Kelurahan

No	Nama Mitra	Ruang Lingkup
		Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi
8	Pengurus Rukun Warga 021-Kotabaru	Pemanfaatan Lahan Prasarana, sarana dan Utilitas Perumahan kepada Pengurus Rukun Warga 021-Kotabaru untuk Pusat kuliner Kedai 21 di Perumahan Harapan baru Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi
9	Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Bekasi (LVRI)	Pinjam Pakai Rumah Dinas Milik Pemerintah Kota Bekasi kepada Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) kota Bekasi untuk Kantor Sekretariat LVRI Republik Indonesia Kota Bekasi
10	Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bekasi Barat	Pinjam Pakai Lahan Kantor Kecamatan Bekasi Barat kepada Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bekasi Barat untuk Kantor Sekretariat Indonesia Najelis Ulama Indonesia Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi
11	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten , Tbk kota Bekasi	Pemanfaatan Lahan milik Pemerintah Kota Bekasi kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, Tbk Cabang Bekasi untuk Penempatan Mesin Anjungan Tunai Mandiri
12	PT. Yakesti Almalindo Centra Fortuna	Pemanfaatan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Milik Pemerintah Kota Bekasi Kepada PT. Yakesti Almalindo Centra Fortuna untuk klinik Pratama Harapan Baru di Perumahan Harapan Baru Kelurahan Kotabaru Kecamatan bekasi Barat kota Bekasi.
13	Yayasan Ra Avicenna	Perubahan atas Perjanjian Nomor 28 2015 dan 026/AVC/B/IV/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Perpanjangan Pemanfaatan Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Avicenna Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
14	Yayasan Bina Siswa Utama	Perubahan Atas Perjanjian Nomor 36 Tahun 2017 dan 128/SP/YPBS/IV.2017 Tentang Perpanjangan yang ke 6 (Enam) Sewa Tanah Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bina Siswa, Sekolah Menengah Atas (SMA) Bina Siswa Utama
15	Dewan Kemakmuran Masjid At-Taubah	Pemanfaatan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Milik Pemerintah Kota Bekasi Kepada Dewan Kemakmuran Masjid At-Taubah Untuk Masjid AT-Taubah di Perumahan Pondok Timur Indah Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi.
16	Dewan Kemakmuran	Pemanfaatan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas

No	Nama Mitra	Ruang Lingkup
	Musholla Al-Kautsar	Perumahan Milik Pemerintah Kota Bekasi Kepada Dewan Kemakmuran Musholla Al-Kautsar Untuk Musholla Al-Kautsar di Perumnas I Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.
17	Dewan Kemakmuran Masjid Jami Nurul Hikmah	Pemanfaatan lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan kepdav Dewan Kemakmuran Masjid Jami Nurul Hikmah untuk Masjid Jami Nurul Hikmah dan Taman Pendidikan al Quran Nurul Hikmah di Perumahan Perumnas 1 Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi barat Kota Bekasi
18	Yayasan Pendidikan Islam Baiturrahman Aren Jaya	Perpanjangan Lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Milik Pemerintah Kota Bekasi Kepada Yayasan Pendidikan Islam Baiturrahman Aren Jaya Untuk Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Baiturrahman dan Masjid Baiturrahmann di Perumnas II Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.
19	Pengurus Musholla Al-Amin	Pemanfaatan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan kepada Pengurus Musholla Al-Amin untuk Musholla Al-Amin di Perumahan Perumnas 1 Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat kota Bekasi
20	Kamar Dagang dan Industri Kota Bekasi	Pinjam Pakai Tanah dan bangunan Milik Pemerintah Kota Bekasi kepada Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bekasi untuk Kantor Sekretariat KADIN Kota Bekasi
21	PT. Komet Infra nusantara	Pemanfaatan lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas milik Pemerintah Kota Bekasi untuk penempatan jaringan Base Transceiver Stasion (BTS) Microcell dan Jaringan Fiber Optik di Kota Bekasi
22	Yayasan Balai Rakyat Perum 3	Pemanfaatan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan milik Pemerintah Kota Bekasi kepada Yayasan Balai Rakyat Perum 3 untuk Gedung Balai Rakyat Perumnas 3 di Perumahan Perumnas 3 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Belasi
23	Yayasan Pendidikan Harapan Baru Berkasi	Perubahan atas Perpanjangan nomor 73 2016 dan 142/SK/YPHB/III/2016 Tanggal 21 Maret 2016 tentang Perpanjangan Pemanfaatan sarana Perumahan di bawah penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk sekolah Menengah Pertama (SMP) Harapan Baru Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
24	Gereja Masehi Advent Hari	Pemanfaatan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas

No	Nama Mitra	Ruang Lingkup
	Ketujuh jemaat Galaxi	Perumahan milik Pemerintah Kota Bekasi kepada Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Galaxi untuk Sarana Ibadah di Perumahan Taman Galaxi Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
25	Gereja Victory Indonesia Hope Bekasi	Pemanfaatan Lahan Prasarana, sarana dan Utilitas Perumahan milik Pemerintah Kota Bekasi kepada Gereja Victory Indonesia Hope Bekasi untuk Sarana Ibadah di Perumahan Taman Galaxy Kelurahan Jaksetia Kecamatan Bekasi selatan Kota Bekasi
26	Yayasan Al Falah Bekasi Permai	Pemanfaatan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan milik Pemerintah Kota Bekasi kepada Yayasan al Falah Bekasi Permai untuk Taman Pendidikan Al-Quran, Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak di Perumahan Bekasi Permai Kelurahan Bekasin Jaya Kecamatan Bekasi Timur
27	Jaja Sujana	Pemanfaatan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan kepada Jaja Sunaja untuk Taman Wisata Kuliner di Perumahan Taman Galaxy Indah Kelurahan Taman Galaxy Indah Kelurahan Jaksetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi

Sumber: BagianKerjasama, Setda Kota Bekasi,yang diolah dalam SIPD 2019

Pemerintah Kota Bekasi juga melaksanakan kerjasama dengan daerah perbatasan dalam menangani infrastruktur, sosial ekonomi masyarakat perkotaan melalui beberapa kesepakatan:

- Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan Perluasan Jaringan Jalan Lintas Batas Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Nomor 434 Tahun 2016;
- Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan Perluasan Jaringan Jalan Lintas Batas Wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat Nomor 435 Tahun 2016;
- Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tentang Pembangunan *Park and Ride* di Wilayah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2018, Nomor 650/1238.1/PEMKSM, Nomor 1254 Tahun 2018.

Pemerintah Kota Bekasi mulai menerapkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Skema KPBU diperlukan mengingat adanya keterbatasan anggaran negara (*funding gap*) dalam membiayai pembangunan infrastruktur. Adanya alternatif sumber pembiayaan menjadi hal yang sangat utama untuk mengurangi beban daerah. Namun demikian, adanya skema KPBU bukanlah menjadi suatu pengalihan kewajiban pemerintah dalam penyediaan

layanan kepada masyarakat tetapi memfasilitasi swasta berkontribusi dalam pembiayaan infrastruktur fasilitas publik.

B. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

2.3.10 Perhubungan

Kota Bekasi yang dikelilingi oleh daratan, mengandalkan sistem transportasi darat sebagai sarana perhubungan dengan wilayah lain disekitarnya. Salah satu moda transportasi yang banyak digunakan masyarakat Kota Bekasi adalah Kereta Api. Berdasarkan data BPS dalam angka tahun 2018, berikut merupakan jumlah penumpang yang menggunakan kereta api selama satu tahun di Kota Bekasi dibandingkan dengan Kota Depok dan Tangerang pada tahun 2017:

Tabel 2.25 Jumlah Penumpang yang menggunakan kereta api tahun 2017

Kota	Stasiun	Jumlah Penumpang	Jumlah Penduduk
Bekasi		20,521,911	2.7 jiwa
	Bekasi	15,030,291	
	Kranji	5,491,620	
Depok		31,451,695	2.2 Jiwa
	Universitas Indonesia	3,864,949	
	Pondok Cina	4,525,113	
	Depok Baru	11,772,140	
	Depok	4,437,241	
	Citayam	6,852,252	
Tangerang		11,651,635	2.1 jiwa

Sumber : Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tangerang dalam angka 2018

Selama tahun 2017, Kota Bekasi yang dengan jumlah penduduk sekitar 2,7 juta jiwa, terdapat sekitar 20,5 juta penumpang yang menggunakan angkutan kereta api melalui stasiun-stasiun yang ada di Kota Bekasi. Jumlah tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan kota Depok dengan jumlah penduduk sekitar 2,2 juta jiwa yang mencapai 31,4 juta dengan 5 stasiun. Namun jumlah tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan kota Tangerang (dengan 2,1 jiwa) yang hanya mencapai 11,6 Juta penumpang per tahun.

Selain angkutan kereta api, moda angkutan lainnya adalah kendaraan bermotor. Berikut merupakan perbandingan panjang jalan dengan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tangerang.

Tabel 2.26 Perbandingan Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan

Kota	Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan
Tangerang	1,402.64	784,314.00
Depok	476.15	1,144,311.00

Bekasi	3,193.04	1,593,978.00

Sumber : Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Depok dalam angka 2018 yang dikelola dalam SIPD

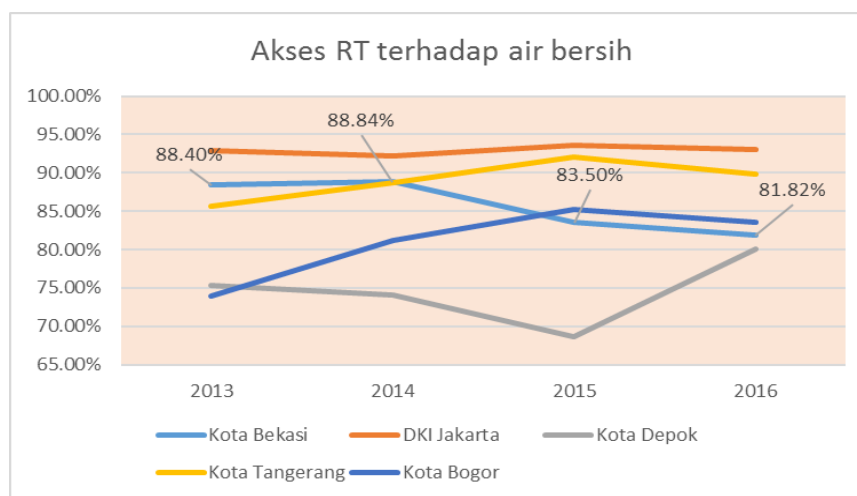
Adapun terkait jumlah penumpang yang menggunakan angkutan darat pada tahun 2016 sejumlah 801.772 orang dan pada tahun 2017 sejumlah 801.772 orang.

2.3.11 Lingkungan

Definisi daya saing sebagaimana dikemukakan Porter (1990), bahwa daya saing merupakan kemampuan suatu ekonomi yang memiliki produktivitas yang tinggi dan masyarakatnya memiliki kehidupan yang baik (*good of living*). Kehidupan masyarakat yang baik salah satu indikatornya tercermin dari, salah satunya, indikator akses terhadap air bersih dan sanitasi. Berikut merupakan gambaran akses rumah tangga terhadap air bersih dan sanitasi di Kota Bekasi dibandingkan dengan kota lain disekitarnya.

- Akses terhadap air bersih

Indikator yang mencerminkan infrastruktur pengelolaan lingkungan antara lain akses rumah tangga terhadap air bersih dan kepemilikan toilet rumah tangga pribadi yang mencerminkan sanitasi yang sehat. Berikut merupakan perbandingan akses rumah tangga terhadap air bersih di kota bekasi dibandingkan dengan kota di sekitarnya.



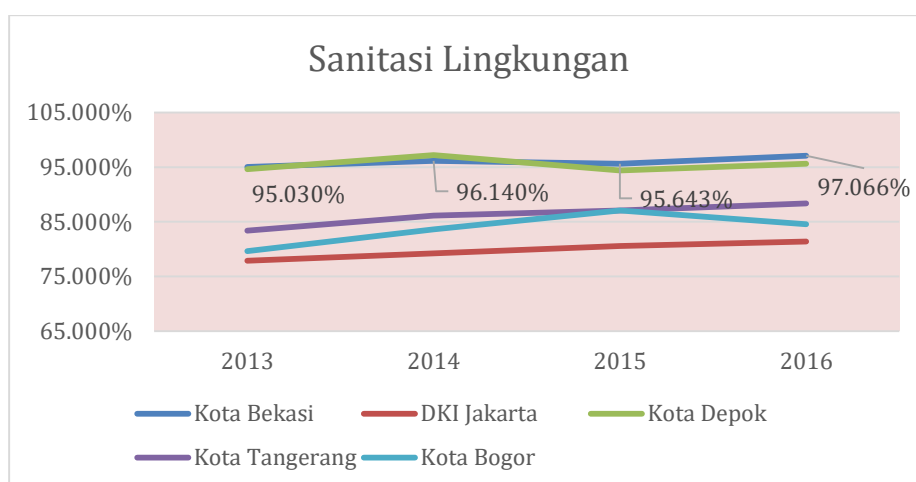
Sumber: data.worldbank.org, 2018

Gambar 2-49 Akses Rumah Tangga terhadap Air Bersih

Akses rumah tangga terhadap air bersih di Kota Bekasi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya yang cenderung meningkat. Pada awal tahun 2013 akses terhadap air bersih di Kota Bekasi menempati peringkat ke-2 dengan persentase 88.40%, namun semakin lama akses terhadap air bersih semakin menurun hingga mencapai angka 81.82 % di peringkat ke-4 dari kota yang dibandingkan. Bahkan jika dilihat trendnya, daerah lain seperti kota bogor dan Tangerang senantiasa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akses rumah tangga terhadap air bersih di Kota Bekasi juga lebih rendah dibandingkan di provinsi DKI Jakarta.

- Sanitasi lingkungan

Sanitation pada umumnya merujuk kepada penyediaan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia seperti urin dan feces. Salah satu indikatornya adalah perentase rumah tangga yang memiliki toilet pribadi sehingga tidak menggunakan toilet umum. Berikut merupakan grafik sanitasi lingkungan di Kota Bekasi.



Sumber: data.worldbank.org, 2018

Gambar 2-50 Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi

Sistem sanitasi lingkungan rumah tangga di Kota Bekasi sudah sangat baik jika dibandingkan dengan kota disekitarnya. Dari tahun 2013 hingga 2016 jumlah rumah tangga yang memiliki toilet sendiri mencapai kisaran 95%. Nilai ini seperti yang kondisi di kota Depok, dan lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, dan Kota Tangerang.

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1 Pendidikan

A. Sarana dan Prasarana Pendidikan

A.1 Ketersediaan Sekolah

Sekolah merupakan prasarana pendidikan utama untuk mencerdaskan bangsa. Ketersediaan prasarana pendidikan harus terus diusahakan sampai memenuhi ketentuan jumlah minimum agar rasio antara peserta didik dengan sarana dan prasarana sekolah mencapai nilai ideal bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar.

- **Rasio ketersediaan Sekolah pendidikan Dasar (SD/MI/ SMP/MTS)**

Pendidikan merupakan salah satu sarana prasarana yang harus dimiliki setiap daerah untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas. Dalam memenuhi program

belajar 9 tahun maka perlu disediakan sarana pendidikan pada tingkat dasar. Pendidikan dasar mencakup Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pada tahun 2017 maka jumlah SD sebesar 690 sekolah, Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 135 sekolah, SMP sebanyak 271 sekolah, serta MTs sebanyak 76 sekolah.

Perkembangan rasio ketersediaan sekolah untuk 10.000 jumlah penduduk usia sekolah tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- Pendidikan dasar tingkat SD/MI mengalami penurunan dari 29.42 pada tahun 2015 menjadi 19.41 pada tahun 2019.
- Pendidikan dasar tingkat SMP/MTS mengalami penurunan dari 22.14 pada tahun 2015 menjadi 13.78 pada tahun 2019.

Hal ini karena terjadi penambahan penduduk usia sekolah tidak diikuti dengan penambahan sekolah, namun demikian angka tersebut masih di atas standar yaitu 52 sekolah per 10.000 penduduk.

Secara lebih rinci data jumlah sekolah dan jumlah penduduk umur sekolah diperlihatkan pada Tabel 2.26.

Tabel 2.27 Rasio Jumlah Sekolah terhadap Jumlah Penduduk Usia Sekolah Dasar Kota Bekasi Tahun 2015-2019

Tahun	SD/MI			SMP/MTS		
	Sekolah	Penduduk (7-12 Th)	Rasio sekolah*)	Sekolah	Penduduk (13-15 Th)	Rasio sekolah*)
2019	653	336,349	19	287	208,229	14
2018	699	311,989	22	277	186,133	15
2017	670	279,505	24	271	156,669	17
2016	690	279,520	25	264	156,680	17
2015	679	230,786	29	249	112,478	22

Catatan: *)Rasio (Jumlah sekolah/Jumlah Penduduk) x 10.000.

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka, 2018; yang dikelola dalam SIPD 2020

- Rasio ketersediaan Sekolah Menengah (SMA/SMK/MA)**

Rasio ketersediaan sekolah tingkat menengah terhadap penduduk usia 16-19 tahun selama 3 tahun terakhir menunjukkan tren yang makin kecil, dari 10 sekolah per 10.000 penduduk pada tahun 2015 menjadi 6 sekolah per 10.000 penduduk pada tahun 2017. Sedangkan hasil proyeksi tahun 2018-2019 menunjukkan tren yang makin besar, dari 14 menjadi 15 sekolah per 10.000 penduduk pada tahun 2019. Secara lengkap terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28 Rasio Jumlah Sekolah terhadap Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menengah Kota Bekasi Tahun 2015-2019

Tahun	SMU/SMK/MA		
	Sekolah	Penduduk (16-19 Th)	Rasio sekolah*)
2019**	187	126.203	15
2018**	162	119.273	14
2017	142	110.033	6
2016	103	110.033	9
2015	92	96.173	10

Catatan: *)Rasio (Jumlah sekolah/Jumlah Penduduk) x 10.000, **)Hasil proyeksi

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka, 2018 yang dikelola dalam SIPD

- **Rasio murid perkelas Sekolah Dasar (SD/MI/SMP/MTS)**

Rasio murid perkelas pendidikan dasar Kota Bekasi tahun 2016-2017 menunjukkan perkembangan baik dimana untuk tingkat SD/MI dari 42 murid/kelas menjadi 39 murid/kelas, sedangkan untuk tingkat SMP/MTS dari 40 murid/kelas menjadi 26 murid/kelas. Secara rinci terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29 Rasio Jumlah Murid terhadap Kelas Pendidikan Dasar (SD/MI; SMP/MTS) Kota Bekasi Tahun 2016-2017

Tahun	SD/MI			SMP/MTS		
	Kelas	Murid	Murid/Kelas	Kelas	Murid	Murid/Kelas
2017	6.512	255.720	39	3.840	99.416	26
2016	6.070	256.405	42	2.336	94.574	40

Sumber: BPS (2018) yang dikelola dalam SIPD

A.2 Ketersediaan tenaga pengajar

Tenaga pengajar atau guru adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pendidikan, tanpa guru pendidikan tidak akan berjalan. Oleh karena itu ketersediaan guru sampai mencapai tingkat rasio tertentu antara jumlah murid dan jumlah guru menjadi sangat penting untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

- **Rasio guru murid Sekolah Dasar (SD/MI/SMP/MTS)**

Rasio guru terhadap murid di Kota Bekasi cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan rasio jumlah guru terhadap murid untuk tingkat pendidikan dasar seperti SD/MI dan SMP/MTs. Untuk tingkat SD/MI di Kota Bekasi maka rasio jumlah guru terhadap murid pada tahun 2015 berkisar 1:28 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi sekitar 1:20. Sedangkan rasio guru terhadap murid untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2015 berkisar 1:19 dan meningkat pada 1:17 pada tahun 2019.

Berikut merupakan tabel rasio jumlah guru terhadap murid pendidikan dasar Kota Bekasi tahun 2015 - 2019.

Tabel 2.30 Rasio Jumlah Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar Kota Bekasi, 2015-2019

Tahun	SD/MI			SMP/MTS		
	Guru	Murid	Murid/Guru	Guru	Murid	Murid/Guru

2019	13.492	280.510	20	6549	113.740	17
2018	12.545	281.056	23	5.890	114.273	19
2017	12.191	283.209	23	6.040	119.227	20
2016	12.371	269.863	22	5.967	175.057	29
2015	10.218	281.909	28	5.919	114.458	19

Sumber: BPS (2018); Kota Bekasi dalam Angka (2020) yang dikelola dalam SIPD

- **Rasio guru murid Sekolah Menengah (SMA/SMK/MA)**

Perkembangan rasio guru terhadap murid pendidikan menengah dari tahun 2015-2019 menunjukkan penurunan rasio dari 1 guru untuk 14 murid pada tahun 2015 menjadi 1 guru untuk 19 murid pada tahun 2019. Secara lengkap perkembangan rasio guru terhadap murid tingkat pendidikan menengah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.31 Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah Kota Bekasi, 2015-2019

Tahun	SMU/SMK/MA		
	Guru	Murid	Murid/Guru
2019	5.866	116.273	19
2018	5.424	113.083	20
2017	7.158	111.119	16
2016	7.235	110.441	15
2015	7.090	96.429	14

Sumber: BPS (2018); Kota Bekasi dalam Angka yang dikelola dalam SIPD 2020

B. Indikator Capaian Pelayanan Pendidikan

B.1 Angka Partisipasi Murni dan Kasar

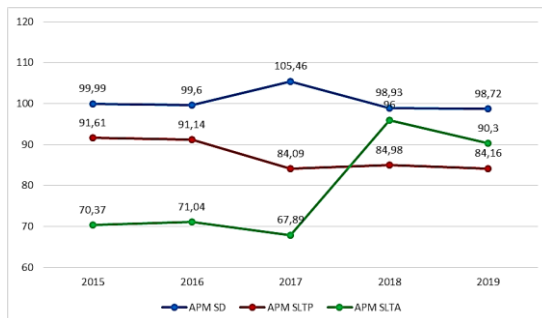
Angka Partisipasi Murni (*Net Enrollment Ratio*) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Sedangkan angka partisipasi kasar (APK) adalah persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mendapatkan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Tabel berikut ini menunjukkan tren capaian APM dan APK Kota Bekasi dari tahun 2015-2019.

Tabel 2.32 Perkembangan Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar, 2015-2019

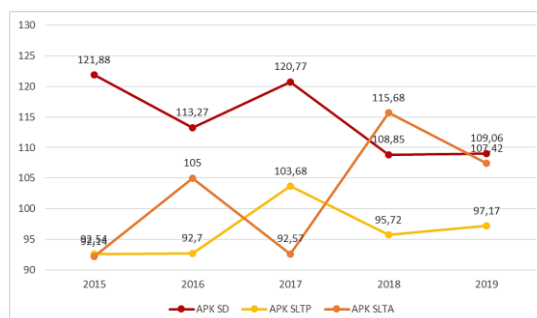
Tahun	Sekolah Dasar		SLTP		SLTA	
	APM	APK	APM	APK	APM	APK
2019	98,72	109,06	84,16	97,17	70,37	107,42
2018	98,93	108,85	84,98	95,72	71,04	115,68
2017	105,46	120,77	84,09	103,68	67,89	92,57
2016	99,60	113,27	91,14	92,70	96,00	105,00

2015	99,99	121,88	91,61	92,54	90,30	92,14

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2018; Kota Bekasi dalam Angka



a. Angka partisipasi murni



b. Angka partisipasi kasar

Gambar 2-51 Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Kota Bekasi Tahun 2015 – 2019 (BPS, 2018; 2020)

Dari Gambar 2-50 di atas terlihat bahwa secara umum baik APM maupun APK untuk semua tingkat pendidikan terdapat kenaikan pada tahun 2015 – 2019. Dari data terlihat bahwa partisipasi anak usia SD hampir semua bersekolah (APM 99,99 persen) pada tahun 2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 98,72 persen, namun demikian terlihat selama 5 tahun terakhir yang masuk/bersekolah di SD usianya bukan usia SD dengan persentase hampir 10 persen hingga 20 persen setiap tahunnya. Sedangkan pada tingkatan pendidikan yang lebih tinggi terlihat untuk jenjang SLTA banyak usia SLTA yang tidak bersekolah dan kecenderungan mengalami peningkatan hal ini ditandai dengan menurunnya tingkat APM SLTA khususnya pada tahun 2017 meskipun pada tahun 2018 kembali mengalami lonjakan.

Kenaikan angka partisipasi disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya terutama usia sekolah dan adanya penduduk usia sekolah dari luar Kota Bekasi bersekolah di Kota Bekasi, serta didirikannya Unit Sekolah Baru (USB) untuk tingkat SMP/Mts dan 4 unit untuk tingkat SMA/SMK/MA di Kota Bekasi.

B.2 Angka Partisipasi Murni

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, APM Kota Bekasi pada tahun 2019 untuk semua jenjang pendidikan lebih tinggi.

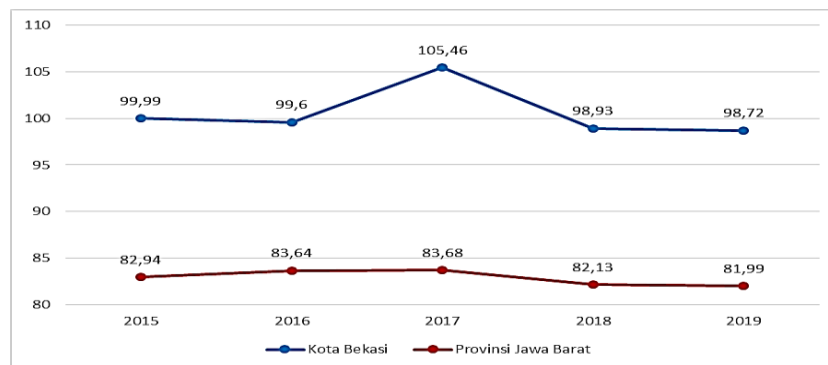
Tabel 2.33 Capaian APM Menurut Jenjang Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat, 2019

No	Keterangan	Jenjang			
		SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/ SMK	PT (2015)
1	Kota Bekasi	98,72	84,16	70,37	33,43
2	Jawa Barat	81,99	59,42	61,45	15,78

Sumber: Kota Bekasi dalam Angka, 2020; http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/apkapmsekolah?kode_wilayah=020000&tahun=&tabs=sd, 2019

Pada jenjang SD Sederajat, APM Kota Bekasi berada pada angka 98,72 persen artinya masih ada 1,28 persen anak usia 7-12 tahun di Kota Bekasi yang masih belum bersekolah,

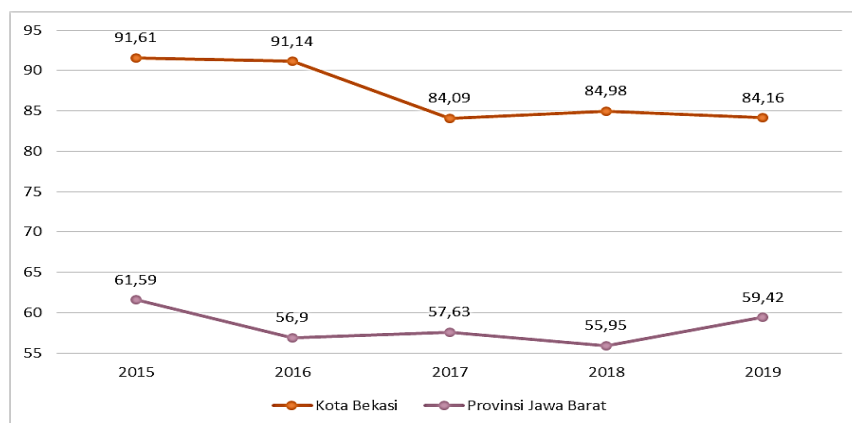
angka ini sudah lebih tinggi dibandingkan dengan APM Jawa Barat yang mencapai angka 81,99 persen. Berikut ini perkembangan nilai APM SD sederajat pada tahun 2015-2019.



Sumber: Kota Bekasi dalam Angka, 2020; http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/apkapmsekolah?kode_wilayah=020000&tahun=&tabs=sd, 2019

Gambar 2-52 Perkembangan APM SD Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat

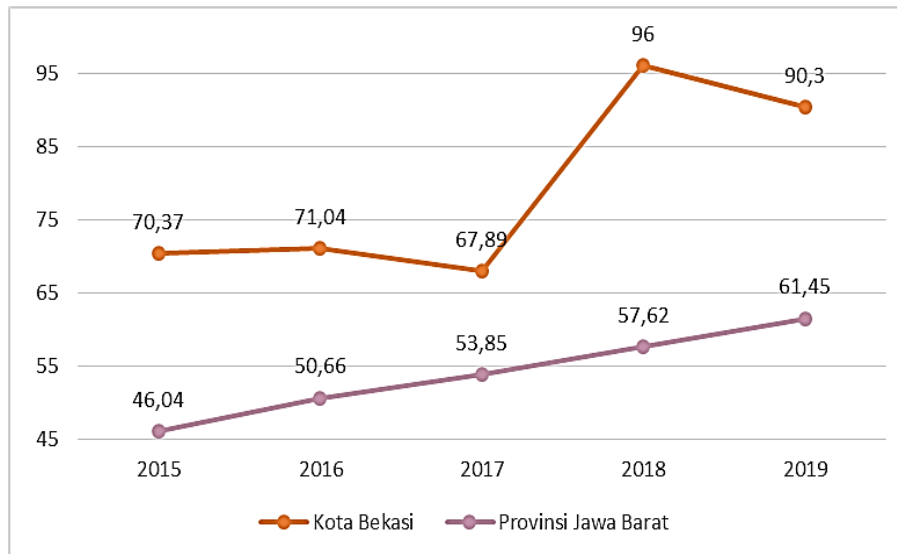
Pada indikator APM SD, nilai indikator Kota Bekasi telah berada di atas nilai APM SD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015-2019. Pada tahun 2019, 1,28 persen anak usia 7-12 tahun di Kota Bekasi masih belum bersekolah. Hal sedikit berbeda terlihat pada jenjang SMP sederajat dimana nilai capaian Kota Bekasi sudah berada di atas nilai capaian Jawa Barat. Pada tahun 2019, APM SMP sederajat Kota Bekasi adalah 84,16 persen sedangkan Provinsi Jawa Barat masih berada pada angka 59,42 persen. Berikut ini perkembangan APM jenjang SMP sederajat Kota Bekasi dan Jawa Barat tahun 2015-2019.



Sumber: Kota Bekasi dalam Angka, 2020; http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/apkapmsekolah?kode_wilayah=020000&tahun=&tabs=sd, 2019

Gambar 2-53 Perkembangan APM SMP Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat

Disparitas APM SMP sederajat antara Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat besar, posisi Kota Bekasi selalu berada di atas nilai capaian Provinsi Jawa Barat pada kurun waktu 2015-2019. Pada jenjang pendidikan menengah, disparitas antara nilai capaian APM Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat menunjukkan posisi yang cukup besar. Pada tahun 2019, APM SMA Kota Bekasi mencapai 90,30 persen sedangkan Provinsi Jawa Barat baru mencapai 61,45 persen.



Sumber: Kota Bekasi dalam Angka, 2020; http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/apkapmsekolah?kode_wilayah=020000&tahun=&tabs=sd, 2019

Gambar 2-54 Perkembangan APM SMA Kota Bekasi dan Provinsi Jabar Tahun 2015-2019

Posisi relatif capaian Kota Bekasi pada tahun 2015-2019 selalu berada di atas nilai capaian APM SM Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa angka partisipasi murni pendidikan menengah di Kota Bekasi sudah jauh mengungguli nilai rata-rata provinsi.

B.3 Angka Partisipasi Kasar

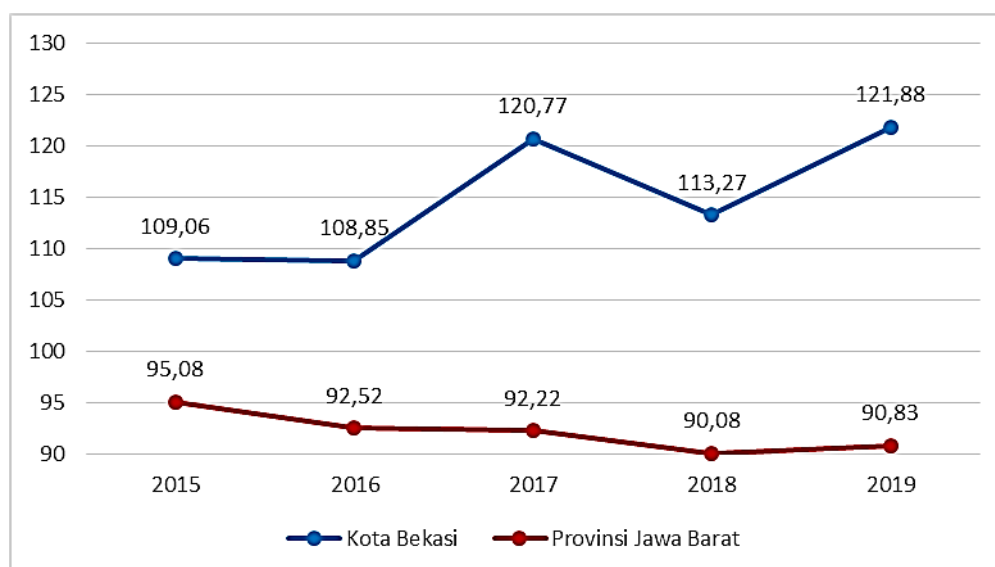
Angka Partisipasi Kasar (*Gross Enrollment Ratio*) adalah Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK tidak memperhatikan ketepatan usia sekolah dengan jenjang yang diikuti misalnya pada jenjang SD tidak harus berusia 7-12 tahun, sehingga angka APK bisa melebihi 100%.

Tabel 2.34 APK Menurut Jenjang Kota Bekasi dan Jawa Barat Tahun 2019

No	Wilayah	Jenjang			
		SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SMA/MA/ SMK/Paket C	PT (2015)
1	Kota Bekasi	121,88	97,17	107,42	35,84
2	Jawa Barat	90,83	75,26	79,26	17,76

Sumber: Kota Bekasi dalam Angka, 2020; http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/apkapmsekolah?kode_wilayah=020000&tahun=&tabs=sd, 2019

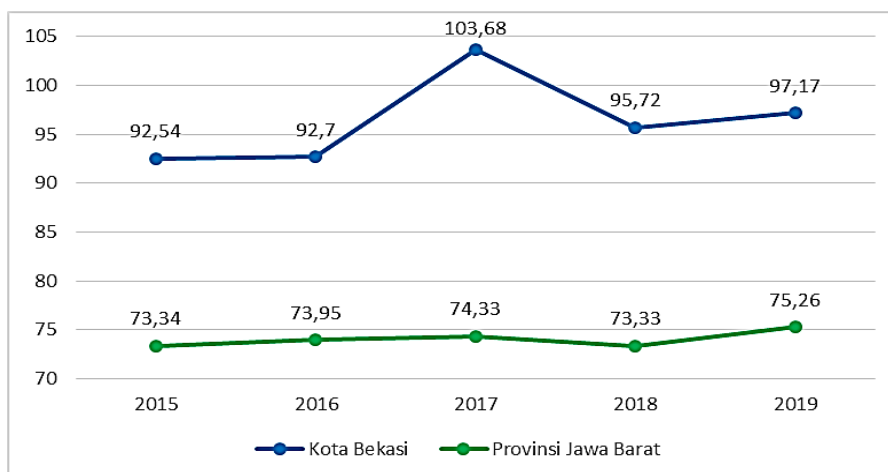
APK Kota Bekasi pada setiap jenjang tahun 2019 sudah jauh melampaui nilai APK Provinsi Jawa Barat kecuali pada jenjang SD sederajat. Pada jenjang SD sederajat, APK Kota Bekasi sebesar 121,88 persen angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan APK SD Provinsi Jawa Barat yaitu 90,83 persen. Pada kurun waktu 2015-2019, nilai APK jenjang SD sederajat Kota Bekasi menunjukkan tren yang menanjak, selain itu peningkatan nilai APK jenjang SD Kota Bekasi telah berada di atas perkembangan APK SD sederajat pada tingkat Provinsi Jawa Barat. Berikut ini perkembangan APK SD sederajat tahun 2015-2019.



Sumber: Kota Bekasi dalam Angka, 2020; http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/apkapmsekolah?kode_wilayah=020000&tahun=&tabs=sd, 2019

Gambar 2-55 Perkembangan APK SD Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019

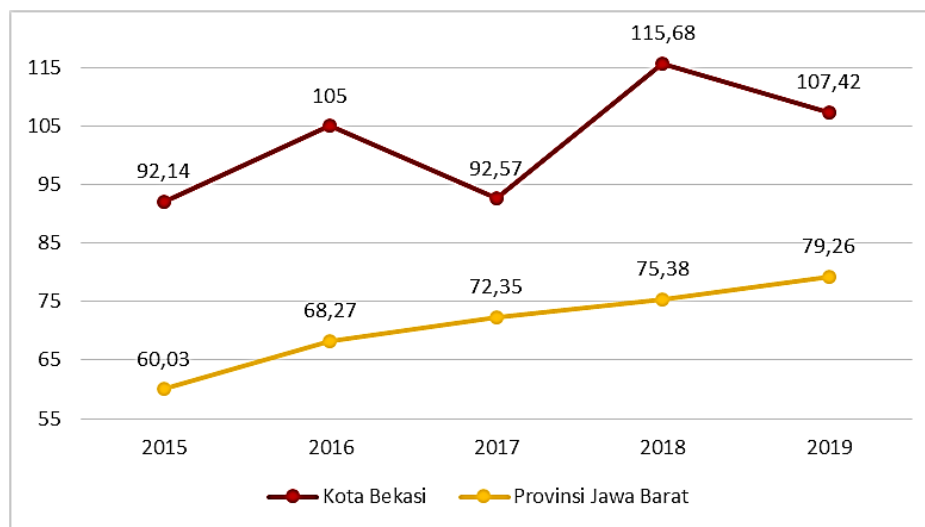
Dari gambar di atas terlihat bahwa nilai APK SD sederajat Kota Bekasi pada tahun 2017 dan 2019 berada di atas nilai capaian provinsi dengan disparitas capaian yang besar. Pada jenjang SMP sederajat, posisi Kota Bekasi pada tahun 2015-2019 sudah berada di atas nilai capaian Provinsi Jawa Barat. Meskipun demikian secara grafis terlihat bahwa ada penurunan nilai APK pada tahun 2015-2019.



Sumber: Kota Bekasi dalam Angka, 2020; http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/apkapmsekolah?kode_wilayah=020000&tahun=&tabs=sd, 2019

Gambar 2-56 Perkembangan APK SMP Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019

Pada jenjang pendidikan menengah, APK SMA sederajat Kota Bekasi tahun 2019 sudah mencapai angka 107,42 persen sangat jauh bila dibandingkan dengan APK SMA sederajat Provinsi Jawa Barat yang masih berada pada angka 79,26 persen. Berikut ini perkembangan nilai APK SMA sederajat tahun 2015-2019.



Sumber: Kota Bekasi dalam Angka, 2020; http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/apkapmsekolah?kode_wilayah=020000&tahun=&tabs=sd, 2019

Gambar 2-57 Perkembangan APK SMA Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2015-2019

B.4 Angka Harapan Lama Sekolah/ *Expected Years School (EYS)*

Angka harapan lama sekolah/*expected years school (EYS)* adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Indikator ini merupakan indikator pemberntuk indeks pembangunan manusia (IPM) menggantikan indikator angka melek huruf pada perhitungan metode baru.

Tabel 2.35 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2014-2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kota Bekasi	13,28	13,36	13,47	13,51	13,76	13,99
2	Jawa Barat	12,08	12,15	12,3	12,42	12,45	12,48

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, yang dikelola dalam SIPD 2020

Nilai EYS Kota Bekasi pada kurun waktu 2014-2019 sudah berada di atas nilai capaian EYS Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2019, EYS Kota Bekasi berada pada angka 13,99 tahun artinya angka harapan sekolah penduduk Kota Bekasi sudah berada pada jenjang pendidikan tinggi sedangkan Jawa Barat dengan 12,48 tahun masih berada pada jenjang pendidikan menengah.

B.5 Angka Rata-Rata Lama Sekolah/ *Mean Years School (MYS)*

Angka rata-rata lama sekolah yaitu jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). MYS masuk dalam indikator sub komposit IPM dalam dimensi pengetahuan bersama dengan indikator angka harapan lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah Kota

Bekasi pada kurun waktu 2014-2019 terus menunjukkan peningkatan dan secara posisi sudah melampaui nilai capaian Provinsi Jawa Barat. Berikut ini nilai capaian MYS Kota Bekasi dan Jawa Barat pada tahun 2014-2019.

**Tabel 2.36 Perkembangan Nilai MYS Kota Bekasi dan Jawa Barat
Tahun 2014-2019**

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kota Bekasi	10,55	10,71	10,78	10,93	11,09	11,10
2	Jawa Barat	7,71	7,86	7,95	8,14	8,15	8,37

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, yang dikelola dalam SIPD 2020

B.6 Mutu Pendidikan

Dalam pembangunan pendidikan selain perluasan akses, juga harus mulai di dorong untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan dapat dilihat dari mutu pendidik melalui hasil uji kompetensi dan kualifikasi pendidikan selain mutu sekolah yang tergambar dari hasil akreditasi yang diperoleh. Berikut ini kondisi akreditasi sekolah di Kota Bekasi tahun 2016.

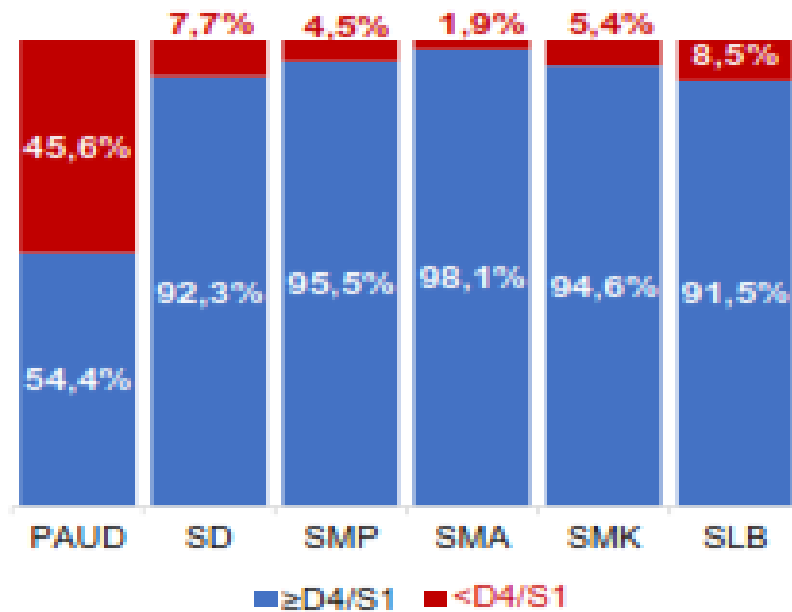
Tabel 2.37 Kondisi Akreditasi Sekolah di Kota Bekasi Tahun 2019

No	Jenjang	Akreditasi			
		A	B	C	Belum
1	SD	80,8	18,9	0,3	0,4
2	SMP	74,5	18,3	2,2	5,0
3	SMA	75,7	19,8	2,7	1,8
4	SMK	58,5	32,7	6,8	2,0

Sumber: Neraca Pendidikan Kemendikbud (diolah) yang dikelola dalam SIPD

Mutu pendidikan dapat ditingkatkan melalui peningkatan mutu sekolah sehingga proses pembelajaran diharapkan dapat lebih berkualitas. Oleh karena itu, idealnya sekolah-sekolah yang ada sudah terakreditasi minimal B bahkan A. Indikator dalam renstra kemendikbud mendorong agar akreditasi sekolah minimal terakreditasi B. Pada tabel di atas terlihat bahwa masih ada sekolah di Kota Bekasi yang masih terakreditasi C bahkan masih ada sekolah yang belum terakreditasi. Pada jenjang SD, terdapat 0,3 persen sekolah yang terakreditasi C dan 0,4 persen yang belum terakreditasi. Pada jenjang SMP, terdapat 2,2% sekolah yang masih terakreditasi C dan 5,0% sekolah belum terakreditasi.

Selain mutu sekolah, agar mutu pendidikan dapat ditingkatkan maka mutu tenaga pendidik (guru) harus terus dikembangkan. Guru sebagai ujung tombak yang langsung bersentuhan dengan siswa harus memiliki kompetensi yang baik. Kompetensi akan dapat diperoleh melalui pendidikan, keterampilan dan pengalaman yang mumpuni. Berikut ini kualifikasi pendidikan di Kota Bekasi pada tahun 2016 menurut jenjang.

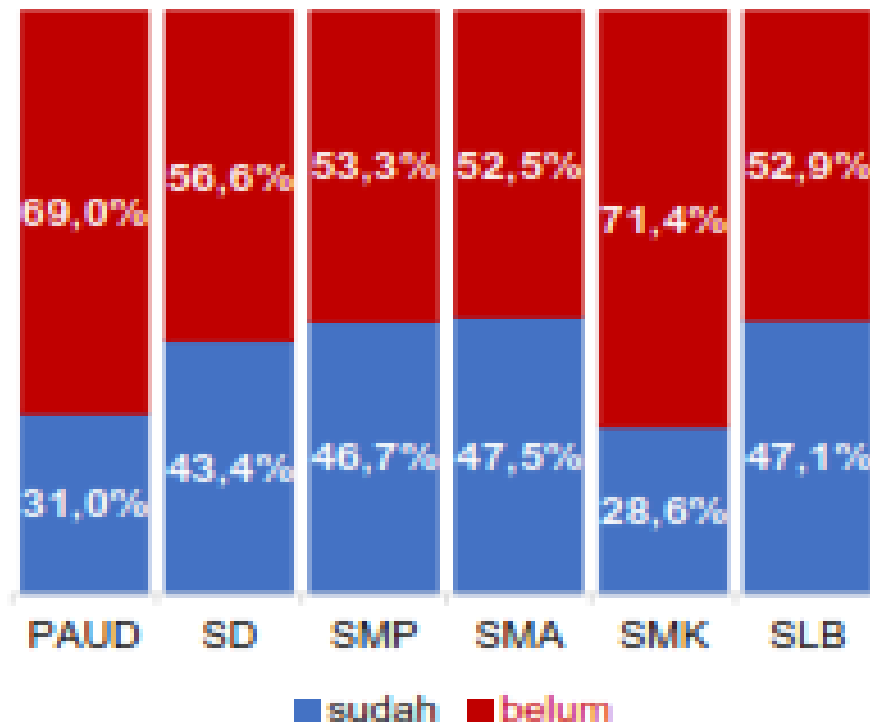


Sumber: Data verifikasi PDSPK, Juli 2019

Gambar 2-58 Proporsi Kualifikasi Guru Kota Bekasi 2019 yang dikelola dalam SIPD

(Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud 2019)

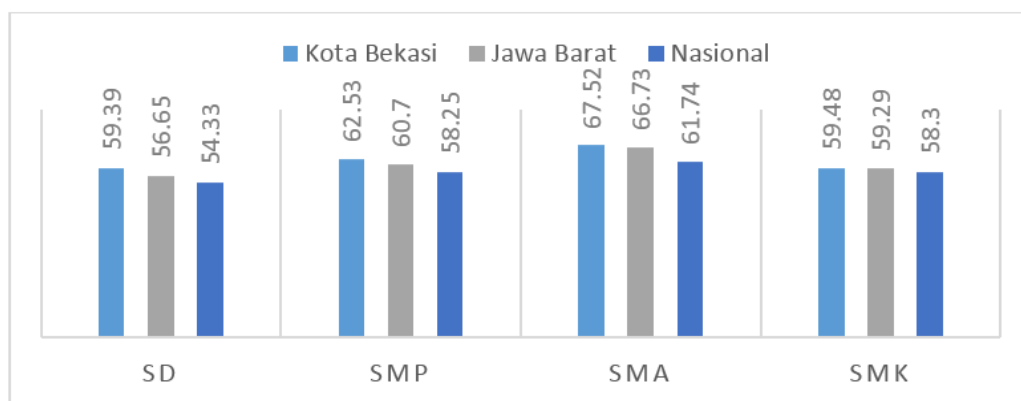
Kualifikasi pendidikan guru di Kota Bekasi menunjukkan kondisi yang cukup baik dimana mayoritas guru sudah memiliki kualifikasi pendidikan $\geq D4$ sesuai dengan standar pelayanan minimal, meskipun belum seluruhnya. Perlu adanya kajian khusus apakah guru yang berkualifikasi pendidikan, D4 tersebut guru senior yang sebentar lagi pensiun atau guru yang masih relatif muda. Guru yang relatif muda bisa ditingkatkan pendidikannya melalui tugas belajar sehingga berkualifikasi pendidikan minimal.



Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud 2019 yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2-59 Pendidik Tersertifikasi di Kota Bekasi, 2019

Indikator lain yang meunjukkan mutu tenaga pendidik adalah sertifikasi telah dilakukan. Berdasarkan grafik di atas, sebagian besar pendidik di Kota Bekasi belum mengikuti sertifikasi. Untuk jenjang pendidikan SD dan SMP, tercatat lebih dari 50 persen pendidik belum mengikuti sertifikasi.



Gambar 2-60 Rata-Rata Hasil UKG Kota Bekasi Menurut Jenjang Tahun 2015
(Ditjen Dikbud, 2017)

Gambar di atas menunjukkan rata-rata hasil UKG Kota Bekasi menurut jenjang pada tahun 2015. Dari setiap jenjang tidak ada hasil UKG yang sudah mencapai angka 70, nilai UKG paling tinggi hanya 67,52 pada jenjang SMA sedangkan yang paling rendah di jenjang SD dengan 59,39. Berdasarkan hasil evaluasi, kompetensi guru yang harus mendapatkan perhatian adalah kompetensi pedagogik bukan profesional. Seorang guru harus memiliki

kompetensi pedagogik yang mumpuni sehingga kompetensi profesional yang dimiliki dapat ditransfer kepada peserta didik pada saat proses pembelajaran.

2.4.2 Kesehatan

A. Sarana dan Prasarana Kesehatan

A.1 Sarana Kesehatan

Kota Bekasi dengan jumlah penduduk yang cukup besar tentu memerlukan pelayanan di bidang kesehatan yang memadai. Dalam upaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, pemerintah Kota Bekasi telah menyediakan sarana dan prasarana kesehatan berupa rumah sakit dan puskesmas yang tersebar di masing-masing kecamatan. Di Kota Bekasi terdapat 26 rumah sakit, 39 puskesmas, dan 12 puskesmas pembantu. Selain itu terdapat 6 keluarahan yang memiliki rumah sakit bersalin dan 55 kelurahan yang memiliki poliklinik pada tahun 2019. Dari 39 puskesmas/puskesmas pembantu, hanya 5 puskesmas yang sudah dilengkapi dengan fasilitas rawat inap meskipun jumlahnya sangat terbatas, seperti: di Puskesmas Pondok Gede, Pejuang, Karang Kitri, Bojong Rawalumbu dan Bantar Gebang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.38.

Tabel 2.38 Sarana Kesehatan Skala Kota Bekasi 2019

Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
Pondok Gede	2	4	1
Jatisampurna	3	2	-
Pondok Melati	1	2	2
Jatiasih	1	2	1
Bantar Gebang	1	1	3
Mustika Jaya	2	3	1
Bekasi Timur	3	4	-
Rawalumbu	2	3	1
Bekasi Selatan	5	5	-
Bekasi Barat	1	5	-
Medan Satria	3	2	1
Bekasi Utara	2	6	1
Kota Bekasi	26	39	12
Tahun 2018	26	40	12
Tahun 2017	42	39	8
Tahun 2016	38	39	16

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka, yang dikelola dalam SIPD 2020

Tabel 2.39 Sarana Kesehatan skala Kecamatan di Kota Bekasi

No.	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Puskesmas	31	31	31	39	39
2	Puskesmas Pembantu	24	24	24	16	8
3	Gudang Obat	1	1	1	1	1
4	Posyandu	1.538	1.541	1.542	1.542	1.542
5	RumahSakit	35	37	38	38	42
6	Balai Pengobatan/ Klinik dan Rumah Bersalin	449	451	386	408	408
7	Apotek	457	558	553	503	503

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka, 2019

Pada tabel tersebut terlihat bahwa jumlah sarana kesehatan skala kecamatan di Kota Bekasi, ada beberapa sarana kesehatan yang meningkat dan juga ada sarana kesehatan yang mengalami penurunan. Beberapa sarana kesehatan yang mengalami penurunan adalah: Balai Pengobatan/ Klinik dan Rumah Bersalin yang turun jumlahnya pada tahun 2015 dan kembali meningkat pada tahun 2016 dan 2017. Sedangkan sarana kesehatan lainnya yang mengalami penurunan adalah: Apotek yang jumlahnya semakin menurun di tahun 2016 dan 2017. Hal tersebut juga dialami oleh Puskesmas Pembantu yang mengalami penurunan di tahun 2017.

A.2 Jaminan Kesehatan

Pemerintah Kota Bekasi sejak RPJMD 2013-2018 telah menyediakan layanan kartu sehat berbasis NIK yang mampu menjangkau pelayanan untuk seluruh warga Kota Bekasi yang memiliki KTP. Dengan adanya kartu Sehat Bekasi yang diperkuat dengan adanya BPJS maka dari sisi jaminan pelayanan kesehatan warga di Kota Bekasi termasuk tinggi. Setelah melewati tahun ke empat dan setahun lagi mencapai target *Universal Health Coverage* pada tahun 2019. Penyelenggaraan BPJS di Kota Bekasi per Mei 2017 telah menjangkau kepesertaan sebanyak 1.370.173 jiwa atau sekitar 50% dari jumlah total penduduk Kota Bekasi. Meliputi kepesertaan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah, perusahaan atau pekerja penerima upah dan peserta mandiri yaitu pekerja bukan penerima upah.

Data yang diperoleh dari BPJS terdapat Rumah Sakit swasta yang bekerjasama sejumlah 32 Rumah Sakit sebagai fasilitas kesehatan rujukan, 110 fasilitas kesehatan dasar (primer) atau klinik pratama serta 3 optik dan 32 apotik di wilayah Kota Bekasi sudah bekerjasama dengan BPJS. Termasuk di dalamnya fasilitas kesehatan milik pemerintah, yang dapat melayani warga dengan kepesertaan BPJS secara berjenjang dan komprehensif. Selain itu portabilitas dapat ke Rumah Sakit lain di seluruh Indonesia sebagai jejaring dengan menyesuaikan kewilayahan, dan berlaku universal saat terjadi kegawat daruratan ataupun keadaan khusus.

Artinya Program JKN tersisa setahun lagi untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat kota dengan jaminan kesehatannya dicover oleh BPJS. Untuk itu peran masing masing

Pemerintah Daerah untuk dapat mensosialisasikan dan mengajak warganya turut mensukseskan program Nasional berupa mendaftarkan semua warganya untuk menjadi peserta BPJS dalam bentuk bantuan atau subsidi premi dari Pemerintah bagi warga yang miskin melalui program JKN Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta semua warga lainnya untuk secara mandiri membayarkan iuran atau premi kesehatan sebagai bentuk gotong royong sesuai Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dari data yang terangkum di Kota Bekasi terdapat sekitar 400.000 penduduk terdaftar JKN KIS sebagai kelompok masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan dibiayai melalui APBN, dan 12.833 dibiayai melalui APBD.

Dalam pelaksanaannya dari pelaporan masyarakat yang masuk ke Pemerintah Daerah Kota Bekasi, masih banyaknya warga yang kesulitan akses terhadap layanan intensif, untuk itu harus segera mendapat penanganan. Adapula dengan antrian yang panjang saat memerlukan tindakan untuk penanganan kasus khusus ke Rumah Sakit rujukan sekunder dan tertier. Hal itu dirasakan belum maksimal dalam aksesibilitas dan kualitas layanan masih kurang. Portabilitas untuk dapat mengakses layanan dari masyarakat ke Rumah Sakit dan antar Rumah Sakit seringkali melibatkan langsung warga untuk mencari akses sendiri melalui portal informasi. Automatisasi rujukan belum berjalan dengan baik, walaupun sistem informasi telah disiapkan. Terjadinya mis-komunikasi disebabkan karena edukasi kepada peserta masih rendah tentang hak dan kewajiban peserta dan provider, dan masih seringnya keluhan warga tentang pembatasan layanan berdasarkan kuota di beberapa rumah Sakit, sehingga masyarakat masih dimintakan iuran biaya.

Keluhan banyak juga dari Rumah Sakit (sebagai provider) tentang masih rendahnya tarif jasa layanan berdasarkan INA CBGs di Rumah Sakit dan bagi fasilitas kesehatan primer yang pembayarannya kapitasinya selama 4 tahun belum ada kenaikan dan dirasakan masih kurang, termasuk ketersediaan obat-obat essensial yg terbatas khususnya obat generik, dan obat yang masuk dalam formularium obat BPJS.

Sebagai tanggung jawab menyiapkan sarana dan prasarana Sumber Daya Manusia (SDM) terutama regulasi untuk mengatasi aksesibilitas , beberapa telah dilakukan dan sedang dilakukan untuk solusi diantaranya:

1. Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas layanan RSUD;
2. Peningkatan status Puskesmas rawat inap menjadi type D, serta Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas. Akan tetapi ini semua masih perlu waktu dan effort yang lebih, upaya percepatan untuk dapat beroperasi. Sedangkan kesiapan layanan kesehatan bagi warga sebagai hal yang tak bisa ditunda.
3. Memudahkan akses masyarakat ke layanan kesehatan khususnya layanan Rumah Sakit yang selama ini BPJS masih ada kendala aksesibilitas pada kasus kasus kegawatan yang memerlukan respon penanganan lebih dan sangat cepat, termasuk rujukan transportasi dari rumah warga yang mengalami kegawatan medik ke fasilitas kesehatan.

Belum Adanya jaminan secara penuh dari BPJS terhadap semua akses kegawat-daruratan tersebut menjadikan suatu keprihatinan yang mendalam sehingga perlu dipikirkan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.

Kartu Sehat Berbasis NIK (KS NIK) sebagai program yang baru diluncurkan oleh Walikota Bekasi DR. Rahmat Effendi pada tahun 2017 ini adalah pengembangan dari Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yg selama beberapa tahun sebelumnya dicover pembiayaan APBD melalui program Surat Keterangan Tak Mampu (SKTM) bagi warga yang tak mampu dan rentan miskin karena penyakitnya.

Kartu Sehat berbasis NIK sesuai Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 27.A tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah bagi Keluarga tidak mampu berbasis kartu keluarga dan nomor induk kependudukan (NIK), Keputusan Wali Kota Bekasi nomor 440/Kep.582.a-Dinkes/XII/2016 tentang Satuan Pelaksana dan Tim Pengendali Pelaksanaan Pelayanan Jamkesda bagi keluarga Tidak Mampu berbasis KK dan NIK di Kota Bekasi, Keputusan Wali Kota Bekasi nomor 460/Kep.346.A-Dinsos/VII/2017 tentang Kepesertaan Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kota Bekasi, dengan tujuan untuk memudahkan, memperpendek alur pelayanan, dan lebih khusus adanya kepastian akan layanan yang dibutuhkan, sebagai jaminan bagi warga oleh pemerintah Daerah.

Strateginya dengan mengembangkan kerjasama lebih luas, dari 33 Rumah Sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS menjadi 42 Rumah Sakit khususnya dari 2 Rumah Sakit Type B yang bekerja sama dengan BPJS menjadi 5 Rumah Sakit, sebagai fasilitas yang dapat melayani kegawatan dan layanan intensif. Jika selama ini masih ditemukan beberapa kendala untuk dapat dilayani di RS swasta, saat ini pemegang Kartu Sehat sudah tidak dibedakan dalam hal aksesibilitas, di lapangan berdasarkan pantauan lebih mudah dibanding pemegang kartu BPJS. Adapun jenis pelayanan kesehatan yang didapat oleh peserta jaminan kesehatan daerah, antara lain : Pelayanan rawat jalan dokter spesialis, Pelayanan ambulance, Pelayanan rawat inap kelas 3, Pelayanan intensif seperti pelayanan IGD, ICU, PICU, NICU, dan Hemodialisa.

Dengan berbasis NIK , menjamin bagi semua warga Kota tanpa kecuali untuk dapat dilayani oleh Rumah Sakit yang bekerja sama baik di Dalam wilayah Kota Bekasi maupun di 20 Rumah Sakit sekitar di luar Kota Bekasi serta mengeliminir penyalahgunaan warga dari luar Kota Bekasi sehingga pemanfaatannya bisa maksimal, dengan jaminan tanpa Batasan jenis penyakit termasuk penyakit katastropik yaitu penyakit yang mengancam jiwa, perlu penanganan komprehensif dan berbiaya tinggi. Dengan sistem yang dimiliki berbasis NIK juga data yang dibutuhkan juga dapat diperoleh secara efektif untuk menilai atau mengevaluasi akuntabilitas program KS NIK oleh Satuan Perangkat Daerah Terkait selama setahun berjalan dan selanjutnya diperbaiki.

B. Indikator Kinerja Layanan Kesehatan

B.1 Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* (IMR)

Angka kematian bayi merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orangtua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolak ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Jumlah kematian bayi pada tahun 2016 adalah sebesar 48 kasus, lebih sedikit dibandingkan dengan kasus di tahun 2015 sebesar 76 meningkat lagi di tahun 2017 menjadi 52 kasus dan di tahun 2018 menjadi 55 kasus. Berdasarkan hasil proyeksi jumlah kematian bayi pada tahun 2019 adalah sebesar 53 kasus, lebih banyak dibandingkan dengan kasus di tahun 2020 sebesar 52 kasus.

Tabel 2.40 Jumlah Kematian Bayi Kota Bekasi Tahun 2014 - 2020

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*
Kematian Bayi	47	76	48	52	55	53	52
Kematian Balita	47	81	50	53	56	54	53
Total	94	157	98	105	111	107	105

Catatan: *) Hasil Analisis

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2015,2016,2017,2020

Selanjutnya dapat disajikan indikator yang lebih rinci berkaitan dengan kesehatan bayi maupun Balita. Tabel berikut ini menunjukkan bahwa AKB dari tahun 2013-2017 berada di sekitar 1, hanya di tahun 2015 sedikit melonjak di sekitar 1,5 yang berarti bahwa angka kematian bayi (AKB) Kota Bekasi adalah 1 di antara 1000 kelahiran hidup, yaitu terjadi kasus kematian bayi rata-rata per tahun 48 orang dari jumlah bayi lahir rata-rata per tahun sekitar 46 ribu orang. Pola dan besaran AKB ini juga diikuti oleh angka kematian balita, jumlah kematian balita per 1000 kelahiran hidup, yaitu di sekitar angka 1, sedikit meningkat di sekitar 1,6 pada tahun 2015. Dengan rendahnya AKB tersebut menyebabkan angka keberlangsungan hidup bayi (AKHB) menjadi besar di sekitar 99,9% artinya setiap bayi lahir di Kota Bekasi akan mempunyai probabilitas hidup sampai usia 1 tahun sebesar 99,9%.

Secara lebih rinci dapat dilihat bahwa kematian bayi tersebut sebagian besar terjadi pada saat bayi berumur sampai satu bulan (28 hari), yang sering disebut sebagai angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal, yaitu banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup) setelah dilahirkan. Pada

umumnya hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Tabel 2.41 Beberapa Indikator Tentang Kematian Bayi dan Balita

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	1.039	1.001	1.546	1.023	1.105	1.189	1.204	1.220
Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu (Orang)	48	47	76	48	52	57	58	59
Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu (Orang)	46,180	46,961	49,168	46,919	47,065	47,777	47,950	48,123
Angka kelangsungan hidup bayi	0.9990	0.9990	0.9985	0.9990	0.9989	0.9988	0.9988	0.9988
Angka Kematian Bayi (AKB)/ Infant Mortality Rate (IMR)	1.039	1.001	1.546	1.023	1.105	1,189	1,204	1,220
Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu (Orang)	48	47	76	48	52	57	58	59
Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu (Orang)	46,180	46,961	49,168	46,919	47,065	47,777	47,950	48,123
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	1.061	1.001	1.647	1.066	1.126	1.239	1.258	1.278
Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu.	49	47	81	50	53	59	60	62
Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	46,180	46,961	49,168	46,919	47,065	47,777	47,950	48,123
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	-	0.8731	1.3830	0.7673	1.0836	1.0307	1.0323	1.0339
Jumlah Kematian Neonatal satu tahun tertentu (Orang)		41	68	36	51	49	48	48
Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu (Orang)	46,180	46,961	49,168	46,919	47,065	47,777	47,950	48,123

Catatan: *) Hasil Analisis

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2018

Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat bahwa data tahun 2013 untuk menghitung Angka Kematian Neonatal (AKN) masih bercampur dengan AKB, sehingga AKN baru bisa disajikan sejak tahun 2014. Berdasarkan table di atas, terlihat bahwa nilai AKN mendekati AKB, artinya sebagian besar kematian bayi terjadi pada 1 bulan pertama sejak dilahirkan. Tahun 2014 tercatat dari 47 bayi berumur kurang dari 1 tahun/ meninggal sebelum ulang tahun pertama, 41 bayi di antaranya meninggal sebelum berumur 1 bulan. Tahun 2015 68 bayi dari 76 bayi meninggal sebelum berumur 1 bulan, demikian juga untuk tahun 2016 (36 dari 48 bayi) dan tahun 2017 (51 dari 52 bayi). Pada tahun 2018 diproyeksikan (49 dari 57 bayi). Tahun 2019 diproyeksikan (48 dari 58 bayi). Tahun 2020 diproyeksikan (48 dari 59 bayi).

Rendahnya angka kematian bayi (AKB), angka kematian balita, dan angka kematian neonatal tidak terlepas dari upaya peningkatan kesehatan bayi, anak, ibu hamil, dan wanita usia subur. Tabel di atas menggambarkan seluruh kelurahan (kecuali tahun 2017) telah tercakup dalam *Universal Child Immunization* (UCI). UCI adalah tercapainya imunisasi dasar

secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur, dan anak usia sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi: 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi: 1 dosis DT, 1 dosis campak, dan 2 dosis TT.

Tabel 2.42 Beberapa Indikator Tentang Kesehatan Bayi dan Balita

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	100.0	100.0	100.0	100	87.5
Jumlah Kelurahan UCI	56	56	56	56	49
Jumlah Seluruh Kelurahan	56	56	56	56	56
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	92	90	93.5	94	91
Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun (Orang)	47,581	48,138	48,561	48,749	47,462
Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama (Orang)	51,859	53,261	51,931	51,794	52,291
Cakupan balita pneumonia yg ditangani (%)	30.5	21.2	25.0	19.3	18.1
Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun (Orang)	6,408	5,650	6,352	5,033	4,561
Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama (Orang)	21,008	26,630	25,400	26,099	25,189
Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yg tepat (%)	100	100	100	100	100
Jumlah penderita diobati dengan ACT dalam 1 tahun (Orang)	2	9	5	13	14
Jumlah penderita positif dalam 1 th (Orang)	2	9	5	13	14
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	100	100	100	100	100
Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani (Kasus)	1,388	1,510	1,886	1,504	2,450
Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada (Kasus)	1,388	1,510	1,886	1,504	2,450
Cakupan kunjungan bayi (%)	82.4	86.0	88.8	94.1	97.2
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Kunjungan)	38,061	40,375	43,650	44,147	45,747
Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama (Orang)	46,180	46,961	49,168	46,919	47,065
Cakupan pelayanan anak balita (%)	24.7	31.2	31.2	46.7	46.9
Jml anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja ada waktu tertentu (Orang)	65,758	66,567	80,988	92,248	93,592
Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama (Orang)	266,525	213,041	259,658	197,678	199,604

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, yang dikelola dalam SIPD 2020

Indikator lainnya, menunjukkan tentang persentase bayi yang diimunisasi (campak), penanganan balita penderita pneumonia, cakupan layanan bayi dan balita, semuanya menunjukkan angka yang sangat baik, hanya ada beberapa yang harus ditingkatkan, seperti cakupan pelayanan anak balita.

B2. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

Angka Kematian Ibu merupakan banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, seperti: kecelakaan, terjatuh, dan lain lain, per 100.000 kelahiran hidup. Informasi mengenai tingginya angka kematian ibu akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu. Selama kurun waktu 2014 - 2017, angka kematian ibu di Kota Bekasi cenderung mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 18 kasus dari tahun 2017 yang merupakan tahun dengan kasus terendah (2014-2018) dengan banyak 11 kasus.

Secara rinci Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat indikator-indikator terkait tentang ibu sebagai capaian dari program yang dijalankan dalam kurun 2014-2018. Angka Kematian Ibu (AKI) terlihat cenderung menurun dari 62,8 orang per 100 ribu kelahiran hidup di tahun 2013, menjadi 23,4 orang per 100 ribu kelahiran hidup tahun 2017.

Tabel 2.43 Banyaknya Angka Kematian Ibu di Kota Bekasi

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Kematian Ibu Hamil	5	4	5	2	3
Kematian Ibu Bersalin	8	5	8	4	6
Kematian Ibu Nifas	8	5	3	5	9
Jumlah	21	14	16	11	18

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka 2015-2019 yang dikelola dalam SIPD 2020

Tabel 2.44 Beberapa Indikator Tentang Kesehatan Ibu

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	62.8	46.8	28.5	34.1	23.4
Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun (Orang)	29	22	14	16	11
Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan	46,180	46,961	49,168	46,919	47,065

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
pada kurun waktu yang sama (Orang)					
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Kasus)	9,803	10,703	3,599	4,399	5,781
Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama (Orang)	9,803	10,703	3,599	4,399	5,781
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	83.8	84.9	90.1	88.3	88.0
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Orang)	45,603	47,505	49,157	46,924	47,152
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama (Orang)	54,450	55,924	54,530	53,151	53,591
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	82.5	85.5	91.5	89.0	92.1
Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu (Orang)	47,054	50,086	52,291	49,565	51,732
Jml sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dlm kurun waktu sama (Orang)	57,041	58,586	57,125	55,682	56,143
Cakupan pelayanan nifas (%)	70.5	73.6	83.3	88.3	83.2
Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Orang)	38,398	41,176	45,397	46,924	44,571
Jumlah seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama (Orang)	54,450	55,924	54,530	53,151	53,591

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2018

Rendahnya angka kematian ibu tidak terlepas dari kinerja layanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan yang cenderung sangat baik. Terlihat dari indikator-indikator yang lain, seperti: cakupan komplikasi kebidanan, cakupan pelayanan tenaga kesehatan, cakupan kunjungan ibu hamil, dan cakupan layanan nifas.

B.3 Prevelensi Balita Gizi Buruk

Tabel di bawah ini memuat tentang Status Gizi Balita di Kota Bekasi, yang menunjukkan bahwa rata-rata balita di Kota Bekasi berada pada kondisi normal. Balita yang status gizinya gemuk mengalami penurunan pada dua tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya pengetahuan tentang obesitas pada balita.

Tabel 2.45 Status Gizi Balita di Kota Bekasi Tahun 2013 -2020

No	Status Gizi	TAHUN							
		2013	2014	2015	2016	2017*	2018*	2019*	2020*

1	Sangat Kurus(%)	0,19	0,16	0,13	0,21	0,18	0,18	0,19	0,19
2	Kurus(%)	5,23	4,24	3,61	3,49	2,68	2,10	1,51	0,92
3	Normal(%)	85,36	85,67	87,09	87,20	88,07	88,76	89,45	90,15
4	Gemuk(%)	9,23	9,92	9,17	9,11	9,08	8,97	8,86	8,75

Catatan: *) Hasil Analisis

Sumber:Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2016

Perbaikan status gizi balita tidak terlepas dari penanganan balita gizi buruk yang semuanya tertangani, seperti tersaji pada tabel berikut ini. Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dan yang tertangani cenderung menurun, dari semula di tahun 2013 sebanyak 174 balita menjadi 141 balita di tahun 2017, walaupun sedikit meningkat di tahun 2015 sebanyak 194 balita. Semua kasus balita gizi buruk tertangani 100 persen.

Tabel 2.46 Cakupan Layanan Balita Gizi Buruk, 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Orang)	174	137	194	142	141
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama (Orang)	174	137	194	142	141

Sumber:Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2018

B.4 Prevalensi Penyakit Menular

Tabel di bawah ini menunjukkan Jumlah Kasus TB Paru di Kota Bekasi. TB Paru BTA (+) mengalami peningkatan setiap tahunnya , hal ini disebabkan udara yang kurang bersih di Kota Bekasi yang mengakibatkan tingginya polusi di Kota Bekasi . Sedangkan TB Paru BTA (-) mengalami penurunan pada tahun 2015 dan meningkat pada tahun 2016 dan meningkat lagi pada tahun 2017.

Tabel 2.47 Jumlah Kasus TB Paru di Kota Bekasi Tahun 2013-2017

Kasus	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
TB Paru BTA (+)	1.390	1.359	1.435	1.401	1.526
TB Paru BTA (-)	1.037	1.063	1.004	1.032	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2018

Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat bahwa tingkat prevalensi TBC per 100 ribu penduduk di tahun 2013 sebesar 55, artinya setiap 100 ribu penduduk terdapat 55 orang

yang menderita TBC. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC baru sekitar 50% dari perkiraan penderita baru. Presentasi penderita TBC yang diobati dan berhasil sembuh sekitar 74%, sehingga dengan penanganan yang baik ini, maka tingkat kematian cenderung menurun, dari 0,79 orang per 100 ribu penduduk di tahun 2014 menjadi 0,70 di tahun 2017.

Tabel 2.48 Beberapa Indikator Layanan Penyakit Menular, 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	50	48	-	-	-
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun (Orang)	1,390	1,359	1,435	1,401	1,526
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) Kurun waktu yang sama (Orang)	2,774	2,849			
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	55	-	-	-	-
Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) (Kasus)	1,432				
Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama (Orang)	2,592,819	2,663,011	2,733,240	2,803,283	2,873,484
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	0.54	-	-	-	-
Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS (Orang)	1,390	1,359	1,435	1,401	1,526
Jumlah pasien baru TB paru BTA diperkirakan ada dalam wilayah tersebut (Orang)	2,594				
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	74	76	77	73.9	74.4
Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun (Orang)	1,122	1,054	1,045	958	1,059
Jumlah Pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama (Orang)	1,514	1,390	1,349	1,296	1,423
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	-	0.79	0.77	0.57	0.70
Jumlah Pasien TB yang meninggal selama pengobatan (Orang)		21	21	16	20
Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama (Orang)	2,592,819	2,663,011	2,733,240	2,803,283	2,873,484
Angka kejadian Malaria (%)	0.001	0.003	0.002	0.005	0.005
Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu (Orang)	2	9	5	13	14
Jumlah penduduk pada pertengahan tahun (Orang)	2,592,819	2,663,011	2,733,240	2,803,283	2,873,484
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%)	0.0002	0.0002	0.0002	0.0003	0.0002
Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Orang)	524	490	465	783	560

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penduduk disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama (Orang)	2,592,819	2,663,011	2,733,240	2,803,283	2,873,484
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun (Orang)	1,415	821	987	3,813	699
Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama (Orang)	1,415	821	987	3,813	699
Penderita diare yang ditangani (%)	57.6	50.5	63.9	29.9	22.5
Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun (Orang)	49,736	28,794	37,370	22,626	17,462
Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk) (Orang)	86,320	56,988	58,491	75,689	77,584
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	1.45	1.13	1.64	2.00	2.21
Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan (Kasus)	10	8	12	15	17
Jumlah penduduk < 15 tahun (Orang)	691,106	710,822	730,827	750,259	769,430
Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	91.3	91.3	90.8	94.3	95.4
Jumlah murid SD Kelas 1 dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Orang)	42,314	48,025	42,008	46,317	53,841
Jumlah murid SD Kelas 1 dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama (Orang)	46,337	52,604	46,251	49,127	56,437
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100	100	100
Pelayanan gawat darurat level 1 (Layanan)	35	37	38	38	42
Jumlah RS (Buah)	35	37	38	38	42
Cakupan kelurahan/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100	100	100	100	100
Jumlah KLB di kelurahan/kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu (Kasus)	11	5	11	15	34
Jumlah KLB di kelurahan/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama (Kasus)	11	5	11	15	34

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2018

Disamping penyakit TB Paru di atas, beberapa indikator penyakit menular lainnya menunjukkan kasus yang kecil dibandingkan jumlah penduduk, dengan penanganan yang baik, seperti: penyakit malaria, diare, HIV/AIDS, demam berdarah, dan polio.

Upaya preventif juga dilakukan, dengan memperluas cakupan penjangkauan kesehatan anak SD klas 1, dimana pada tahun 2017, dari sekitar 56 ribu murid SD kelas 1, sekitar 54 ribu orang yang telah diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan terlatih (sekitar 95%), angka ini meningkat dari tahun 2013 yang cakupan layanannya hanya sekitar 91%.

Layanan gawat darurat level 1 juga menjadi perhatian untuk selalu dipertahankan tersedia dan ditingkatkan kualitasnya di semua rumah sakit yang ada di Kota Bekasi. Tahun 2013 seluruh rumah sakit (35 buah) tersedia layanan gawat darurat level 1, dan seiring waktu meningkat menjadi 42 layanan gawat darurat di 42 rumah sakit tahun 2017.

Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di 11 kelurahan telah ditangani seluruhnya kurang dari 24 jam, dengan penyelidikan epidemiologis.

Sarana dan prasarana kesehatan di Kota Bekasi menunjukkan kondisi yang cukup baik. Walaupun Pembantu Puskesmas belum tersedia di seluruh kelurahan, baru sekitar 25% tahun 2017, namun Puskesmas di tingkat kecamatan tersedia cukup, tahun 2017 tersedia 39 puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan atau rata-rata terdapat 3,25 puskesmas per kecamatan.

Demikian juga untuk rumah sakit, tahun 2017 tersedia 42 rumah sakit untuk melayani 2,8 juta penduduk atau 1,5 rumah sakit melayani sekitar 100 ribu penduduk. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2013 yang hanya 1,3 rumah sakit.

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, juga ditunjang dengan tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, walaupun ada kecenderungan menurun jumlahnya. Tahun 2013 sebanyak 5,6 dokter dan 6,5 tenaga medis melayani 100 ribu penduduk menurun menjadi 4,5 dokter dan 5,2 tenaga medis. Demikian juga pelayanan Posyandu yang cukup tersedia untuk melayani balita di Kota Bekasi.

Tabel 2.49 Beberapa Indikator Tentang Layanan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio posyandu per satuan balita	5.77	5.79	6.09	5.95	6.42
Jumlah posyandu (Buah)	1,538	1,543	1,546	1,552	1,616
Jumlah balita (Orang)	266,525	266,299	254,004	260,989	251,895
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0.19	0.19	0.16	0.12	0.13
Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu (Buah)	504	506	435	349	369
Jumlah penduduk (Orang)	2,592,819	2,663,011	2,733,240	2,803,283	2,873,484
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (1000)	0.013	0.014	0.014	0.014	0.015
Jumlah rumah sakit (Buah)	35	37	38	38	42
Jumlah penduduk (Orang)	2,592,819	2,663,011	2,733,240	2,803,283	2,873,484
Rasio dokter per penduduk (1000)	0.0563	0.0552	0.0074	0.0261	0.0451
Jumlah dokter umum + spesialis (Orang)	1,459	1,471	202	732	1,297
Jumlah penduduk (Orang)	2,592,819	2,663,011	2,733,240	2,803,283	2,873,484
Rasio tenaga medis per satuan	0.0657	0.0645	0.0126	0.0303	0.0528

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
penduduk (1000)					
Jumlah tenaga medis (dr umum, drg, dr spesialis + drg spesialis) (Orang)	1,704	1,717	344	849	1,517
Jumlah penduduk (Orang)	2,592,819	2,663,011	2,733,240	2,803,283	2,873,484
Cakupan puskesmas	2,58	2,58	2,58	2,58	3,25
Jumlah puskesmas	31	31	31	31	39
Jumlah seluruh kecamatan	12	12	12	12	12
Cakupan pembantu puskesmas	0,43	0,43	0,43	0,25	0,25
Jumlah pembantu puskesmas	24	24	24	14	14
Jumlah seluruh kelurahan	56	56	56	56	56

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2018

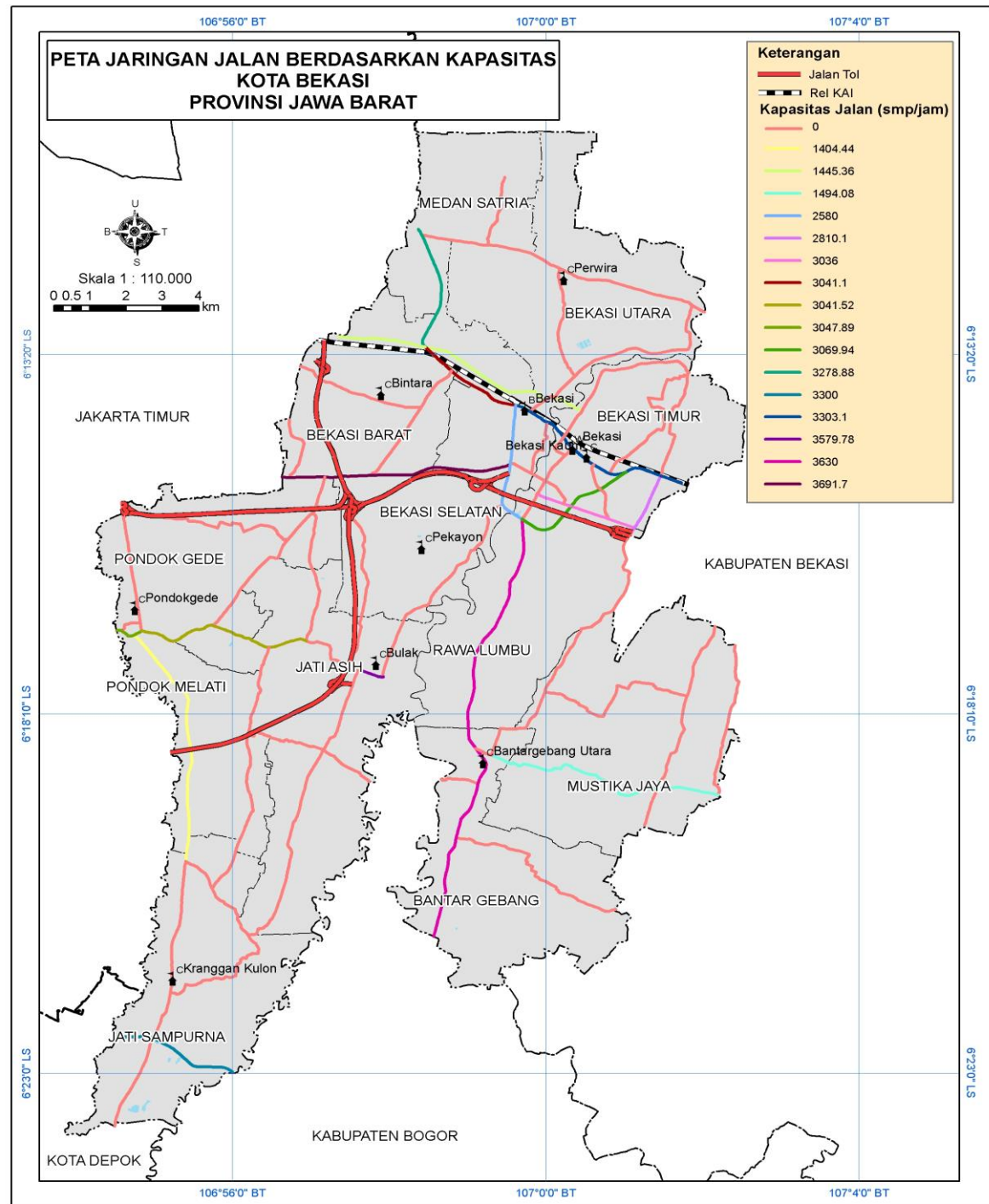
2.4.3 Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

A. Sistem Transportasi

A.1 Prasarana Fisik Jalan

Komponen utama pembentuk sistem transportasi makro di Kota Bekasi lainnya adalah sistem jaringan transportasi. Sistem jaringan transportasi di Kota Bekasi seluruhnya merupakan sistem jaringan transportasi darat, seperti: jaringan jalan dan jalan kereta api. Sampai dengan Tahun 2016, panjang jalan di Kota Bekasi mencapai 3.193,037 km dengan rincian 132,182 km merupakan jalan primer dan 1.527,355 km jalan sekunder. Sedangkan jalan lingkungan yang terdapat di Kota Bekasi tahun 2012 adalah 1.533,50 km. Tingkat pertumbuhan dari tahun 2012 ke tahun 2013 pertumbuhannya hanya mencapai 800 m dalam 1 tahun atau sebesar 0.06% per tahun. Pola perkembangan yang relatif normal terjadi dari tahun 2008-2011 yakni rata-rata 3 % per tahun atau sekitar 21 km per tahun.

Kapasitas ruas jalan didefinisikan sebagai arus lalu lintas maksimum yang dapat melintas dengan stabil pada suatu potongan melintang jalan pada keadaan (geometrik, pemisahan arah, komposisi lalu lintas, lingkungan) tertentu. Untuk jalan dua lajur dua arah, kapasitas ditentukan untuk arus dua arah (kombinasi dua arah), tetapi untuk jalan dengan banyak lajur, arus dipisahkan per arah dan kapasitas ditentukan per lajur. Kapasitas merupakan ukuran kinerja, pada kondisi yang bervariasi dan dapat diterapkan pada suatu lokasi tertentu atau pada suatu jaringan jalan yang sangat kompleks. Berhubung beragamnya geometrik jalan, kendaraan, pengendara dan kondisi lingkungan serta sifat saling keterkaitannya, kapasitas bervariasi menurut kondisi lingkungan. Hasil identifikasi terhadap data dan informasi terkait kapasitas jalan di Kota Bekasi dapat dilihat pada Gambar 2-60 berikut.



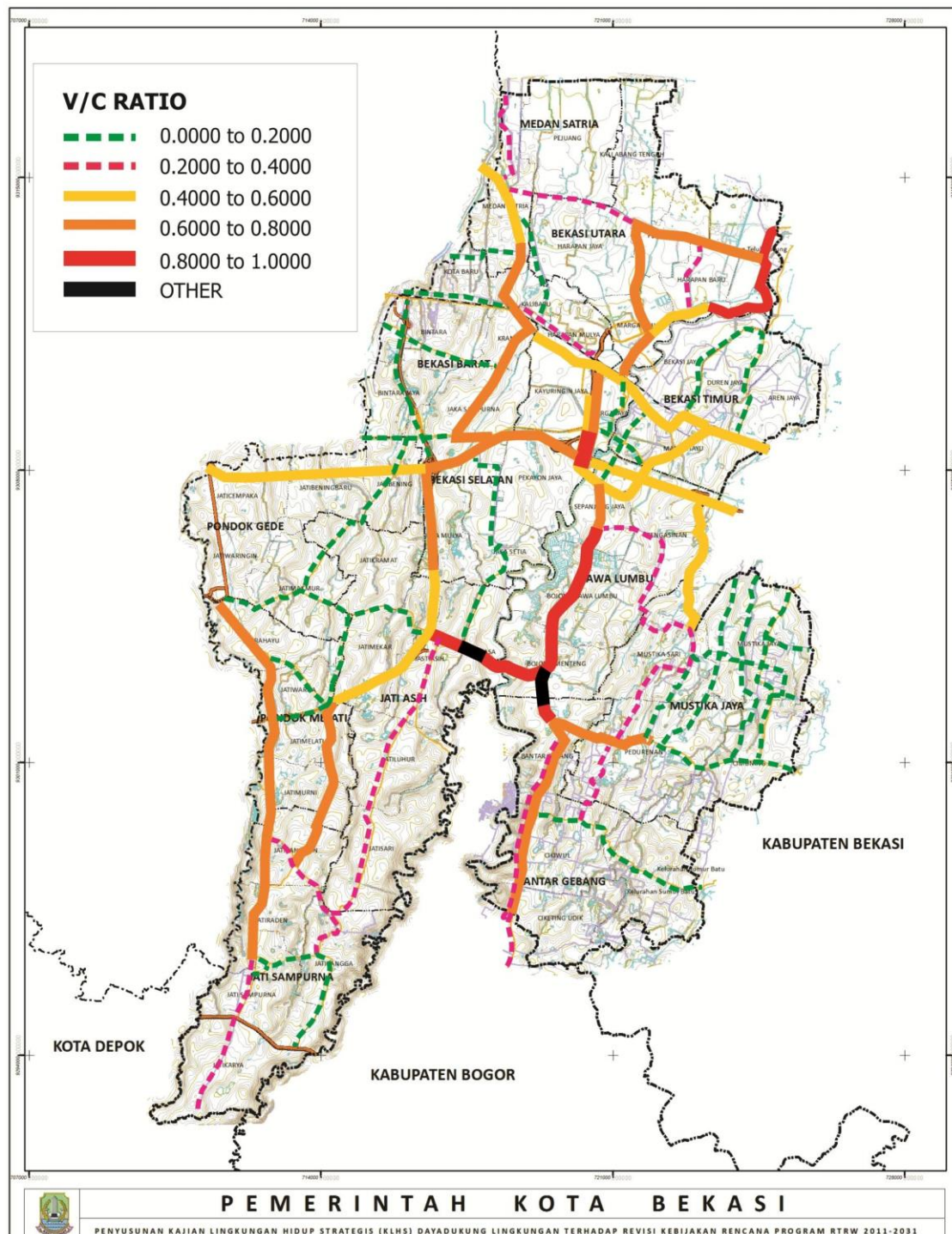
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bekasi. 2014).

Gambar 2-61 Kapasitas Jaringan Jalan Utama Kota Bekasi

A.2 Indikator Kinerja Layanan Sistem Transportasi

Aspek penting terkait jaringan jalan adalah kinerja kapasitas dan tingkat pelayanan jalan (*Level Of Service/LOS*) dalam memenuhi permintaan pergerakan di wilayah Kota Bekasi. Kapasitas ruas jalan didefinisikan sebagai arus lalu lintas maksimum yang dapat melintas dengan stabil pada suatu potongan melintang jalan pada keadaan (geometrik,

pemisahan arah, komposisi lalu lintas, lingkungan) tertentu. Untuk jalan dua lajur dua arah, kapasitas ditentukan untuk arus dua arah (kombinasi dua arah), tetapi untuk jalan dengan banyak lajur, arus dipisahkan per arah dan kapasitas ditentukan per lajur. V/C Ratio atau Derajat kejenuhan adalah perbandingan dari volume (nilai arus) lalu lintas terhadap kapasitasnya. Ini merupakan gambaran apakah suatu ruas jalan mempunyai masalah atau tidak, berdasarkan asumsi jika ruas jalan makin dekat dengan kapasitasnya kemudahan bergerak makin terbatas.



Sumber: KLHS RTRW Kota Bekasi, 2017

Gambar 2-62 Peta V/C Rasio Jaringan Jalan Kota Bekasi

B. Sistem Penyediaan Air Minum

B.1 Prasarana Fisik Penyediaan air Minum

Jaringan sistem penyediaan air bersih sistem perpipaan PDAM di Kota Bekasi dapat dibagi menjadi beberapa sistem wilayah, yaitu:

- IPAB Teluk Buyung, IPA-2 eksisting kapasitasnya dari 500 di tambah 200 liter per detik
- IPA Jati Ranga dan peningkatan sistem perpipaan PDAM
- IPA Poncol kapasitasnya dari 480 liter per detik menjadi 864 liter per detik,
- IPA Rawa Tembaga dari 190 liter per detik menjadi 342 liter per detik dan
- IPA Rawalumbu2 kapasitasnya 267 liter per detik,
- IPA Margahayu kapasitas 800 liter per detik dan peningkatannya dapat di lakukan secara bertahap;
- IPA Jatiasih kapasitas 100 liter per detik yang akan dibangun pada tahun 2016-2017
- IPA Pondok Gede kapasitas 350 liter per detik yang akan dibangun pada tahun 2017-2018
- IPA Mustikajaya kapasitas 200 liter per detik yang akan dibangun pada tahun 2018-2019.

Untuk PDAM Volume air yang terjual pada tahun 2015 sebesar 18.438.570 m³ (PDAM Tirta Bagasasi) dan 11.081.482 m³ (PDAM Tirta Patriot).

Sedangkan sistem perpipaan non PDAM di Kota Bekasi meliputi:

- Tirta Pondok Hijau

Tirta Pondok Hijau (BAMUS) adalah Pengelola air bersih sistem air minum non PDAM yang ada di Kota Bekasi. Tirta Pondok Hijau dikelola oleh warga setempat. Sumber air yang digunakan berasal dari sumur dalam. Saat ini kapasitas terpasang adalah sebanyak 15 l/dtk, dengan kapasitas produksi baru mencapai 5 l/dtk, jumlah sambungan langsung yang dimiliki oleh Tirta Pondok Hijau sebanyak 600 SL.
- Kemang Pratama 1 dan 2

Pengelola Perumahan Kemang Pratama 1 dan 2 saat ini sudah memiliki Instalasi Pengolahan Air tersendiri untuk didistribusikan kepada warga di perumahan tersebut. Kapasitas instalasi saat ini adalah 15 l/dtk untuk Kemang Pratama 1 dan 30 l/dtk untuk Kemang Pratama 2, jumlah pelanggan mencapai 5700 SL. Sumber air diambil dari Kali Bekasi, namun saat ini kondisi dari Kali Bekasi sudah tercemar sehingga air yang dihasilkan kadang-kadang berwarna keruh dan berbau.
- Citra Grand

Pengelola perumahan Citra Grand saat ini sudah memiliki Instalasi Pengolahan Air tersendiri untuk didistribusikan kepada warga di perumahan tersebut. Kapasitas instalasi sebesar 30 l/dtk serta ada yang sedang dalam proses pembangunan instalasi sebesar 25 l/dtk. Sehingga total instalasi yang dimiliki oleh Citra Grand sebesar 55 l/dtk. Jumlah pelanggan sebesar 3000 SL. Instalasi Citra Gand menggunakan sumber air dari sungai Cikeas.

- **SPAM Bantar Gebang**

SPAM Bantar Gebang adalah sistem penyediaan air minum non PDAM yang ada di Kecamatan Bantargebang. SPAM Bantar Gebang ini dikelola oleh warga setempat dengan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Sumber air yang digunakan berasal dari sumur dalam. Saat ini telah dibangun 6 titik sumur dalam yaitu 2 titik di Kel. Cikiwul, 2 titik di Kel. Sumur Batu dan 2 titik di Kel. Ciketing Udik. 1 sumur artesis tersebut digunakan untuk melayani 100 SL. Di tahun 2012, telah dibangun 2 titik penambahan sumur artesis yaitu 1 titik di Kel. Sumur batu dan 1 titik di Kel. Ciketing Udik. Unit tambahan sumur tersebut direncanakan akan mulai beroperasi di tahun 2013. Dari informasi yang didapat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Dinas Kesehatan Kota Bekasi melalui program sanitasi air bersih, akan membangun 2 titik sumur dalam yang berlokasi di Kel.Margajaya dan Kel. Margahayu.

B.2 Indikator Kinerja Layanan Penyediaan Air Minum

Beberapa kelurahan di Kota Bekasi belum terlayani jaringan PDAM, untuk lebih jelasnya mengenai sambungan jaringan air bersih dapat dilihat pada Tabel 2.50 berikut.

Beberapa permasalahan terkait pelayanan sistem air bersih adalah :

- Menurunnya kualitas air baku yang tersedia sehingga mempengaruhi air hasil produksi
- Penurunan kinerja dan keandalan akibat penurunan debit sumber air.
- Keterbatasan fasilitas produksi dan distribusi yang ada terhadap potensi sumber yang dimiliki (*idle* kapasitas).
- Terjadi selisih yang besar antara produksi air dan hasil pembacaan *water meter* pelanggan
- *Water meter* banyak yang rusak/hilang
- Tingginya kebocoran air pada pipa dan meter air pelanggan
- Kualitas air pada saat pendistribusian belum memenuhi syarat

Tabel 2.50 Daerah yang Belum Tersedianya Jaringan Air Bersih

No	Kecamatan	No	Kelurahan	Wilayah	Sambungan
1	Pondok Gede	1	Jati Makmur	Belum ada sambungan	
		2	Jati Waringin	Belum ada sambungan	
		3	Jati Bening	Belum ada sambungan	

No	Kecamatan	No	Kelurahan	Wilayah	Sambungan
		4	Jati Cempaka	Belum ada sambungan	
		5	Jati Bening Baru	Ada sambungan	42
2	Jatisampurna	1	Jati Karya	Belum ada sambungan	
		2	Jatisampurna	Ada sambungan	4
		3	Jati Rangga	Belum ada sambungan	
		4	Jati Ranggon	Ada sambungan	514
		5	Jati Raden	Belum ada sambungan	
3	Pondok Melati	1	Jati Murni	Belum ada sambungan	
		2	Jati Melati	Belum ada sambungan	
		3	Jati Warna	Ada sambungan	480
		4	Jati Rahayu	Belum ada sambungan	
4	Jatiasih	1	Jati Sari	Ada sambungan	823
		2	Jati Luhur	Ada sambungan	398
		3	Jatirasa	Belum ada sambungan	
		4	Jatiasih	Ada sambungan	61
		5	Jati Mekar	Belum ada sambungan	
		6	Jati Kramat	Belum ada sambungan	
5	Bantargebang	1	Ciketing Udik	Ada Sambungan (SPAM Komunal)	638
		2	Sumur Batu	Ada Sambungan (SPAM Komunal)	750
		3	Cikiwul	Ada Sambungan (SPAM Komunal)	522
		4	Bantargebang	Narogong	1.938
6	Bekasi Timur	1	Duren jaya	Ada sambungan	7000
		2	Bekasi Jaya	Ada sambungan	7000
		3	Karangkitri	Ada sambungan	6650
		4	Arenjaya	Ada sambungan	5000
7	Mustika Jaya	1	Pedurenan	Belum ada sambungan	
		2	Cimuning	Belum ada sambungan	
		3	Mustika Jaya	Belum ada sambungan	
		4	Mustika Sari	Belum ada sambungan	
8	Rawalumbu	1	Bojong Menteng	Ada Sambungan	4
		2	Pengasinan	Ada Sambungan	4.573
		3	Bojong Rawalumbu	Ada sambungan	5000
		4	Pengasinan	Ada sambungan	3000
9	Bekasi Selatan	1	Kayuringin	Ada Sambungan	6.711
		2	Jakamulya	Ada Sambungan	372
		3	Pekayonjaya	Ada Sambungan	1.593
		4	Margajaya	Ada Sambungan	1.185
		5	Jakasetia	Ada Sambungan	5.781
10	Bekasi Barat	1	Kota Baru	Ada Sambungan	958
		2	Jakasampurna	Ada Sambungan	4.530
		3	Bintara	Ada Sambungan	1.774
		4	Bintarajaya	Ada Sambungan	698
		5	Kranji	Ada Sambungan	3.514

No	Kecamatan	No	Kelurahan	Wilayah	Sambungan
11	Medansatria	1	Harapan Mulya	Ada Sambungan	739
		2	Medansatria	Ada Sambungan	1.919
		3	Pejuang	Ada Sambungan	17.146
		4	Kalibaru	Ada Sambungan	1.266
12	Bekasi Utara	1	Harapanjaya	Ada Sambungan	10.268
		2	TelukPucung	Ada Sambungan	11.156
		3	Kaliabang Tengah	Ada Sambungan	12.685
		4	Harapan Baru	Ada Sambungan	3.787
		5	Perwira	Ada Sambungan	5.932

C. Sistem Persampahan

C.1 Prasarana Fisik

Kota Bekasi mempunyai fasilitas tempat pembuangan sampah akhir di Sumur Batu, namun kondisinya, di masa yang akan datang akan sulit menemukan lokasi tempat pembuangan sampah selain itu juga akan sangat mahal. Sampah yang dihasilkan kegiatan perkotaan di Kota Bekasi sebagian besar tergolong sampah domestik. Pengolahan Persampahan di Kota Bekasi dilakukan melalui beberapa mekanisme antara lain:

- **Konsep 3 R**
Di Kota Bekasi saat ini memiliki 133 titik komposting dan setiap hari dapat memproduksi 1 m³/hari. Berarti untuk satu bulan produksi kompos dapat dihasilkan $30 \times 121 \text{ m}^3 = 3.630 \text{ m}^3/\text{bulan}$. Pengurangan sampah melalui komposting $\pm 2,05\%$ dari total produksi sampah.
- **Bank Sampah**
Terdapat ± 81 bank sampah sesuai dengan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 660.2/Kep.295-Dinsih/VI/2013 tentang Penetapan Bank Sampah di Kota Bekasi. Dalam kegiatan bank sampah ini sendiri pengelola harus memilah sampah menjadi beberapa golongan yang masih memiliki nilai ekonomi, kemudian di jual ke lapak-lapak. Hasil penjualan ini akan dimasukan ke rekening nasabah nantinya. Dalam penerapannya hingga saat ini Pemerintah Kota Bekasi dibantu oleh warga Kota Bekasi sendiri telah memiliki inisiatif untuk mengembangkan program 3 R dengan mendirikan gerakan peduli lingkungan (GPL) yang di dalamnya terdapat rumah kompos dan kegiatan yang menguntungkan yaitu bank sampah. Namun kegiatan ini belum banyak dilakukan walaupun sangat diperlukan untuk mereduksi sampah yang akan di buang ke TPA Sumur Batu.

Volume sampah yang masuk ke TPA Sumur Batu sebesar 1.311.882,36 m³ dengan rata-rata per hari 898,54 ton /hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.51 berikut.

Tabel 2.51 Tonase, Volume Sampah yang Masuk Ke TPA Sampah Sumur Batu Kota Bekasi

No	Bulan	Ritase (Kali)	Berat Sampah/ Tonase (Ton)	Volume Sampah (m ³)	Rata-Rata (Ton/Hari)
1	Januari	11.015	27.456,91	109.863,64	885,99
2	Februari	9.667	26.225,31	104.901,24	936,61
3	Maret	10.939	27.554,33	110.217,32	888,84
4	April	10.963	27.632,57	110.530,28	921,08
5	Mei	10.564	27.588,10	110.352,40	889,93
6	Juni	10.663	27.590,39	110.361,56	919,67
7	Juli	10.019	27.059,86	108.239,44	872,89
8	Agustus	10.058	27.319,14	109.276,56	881,26
9	September	10.018	27.369,76	109.479,04	912,32
10	Oktober	9.737	27.389,91	109.559,64	883,54
11	November	9.860	27.363,30	10.453,20	912,11
12	Desember	9.895	27.412,01	109.648,04	884,25
	Kota Bekasi	123.398	327.970,59	1.311.882,36	898,54

Sumber : Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2016 yang dikelola dalam SIPD

C.2 Indikator Kinerja Layanan Persampahan

Tingkat pelayanan serta jumlah sampah yang terangkut ke TPA Sumur Batu oleh Dinas Kebersihan berdasarkan kecamatan yang ada di Kota Bekasi yaitu sebesar 27 % pada tahun 2016, jumlah pelayanan paling tinggi adalah Kecamatan Bekasi Selatan dan Kecamatan Jatisampurna yaitu 28 %, sedangkan tingkat pelayanan terendah di Kecamatan Bantar Gebang dimana tingkat pelayanan sebesar 10%, kecamatan lainnya tingkat pelayanannya hanya berkisar antara 12%-27%. Nilai pelayanan ini tentunya sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah sampah yang dihasilkan penduduk Kota Bekasi yang telah tergolong sebagai Kota Metropolitan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52 Tingkat Pelayanan Persampahan Kota Bekasi Tahun 2016

No	Kecamatan	Terangkut (m ³ /hari)	Pelayanan (%)
1	Pondok Gede	92	14
2	Jatisampurna	84	28

No	Kecamatan	Terangkut (m ³ /hari)	Pelayanan (%)
3	Pondok Melati	67	19
4	Jatiasih	67	12
5	Bantar Gebang	25	10
6	Mustikajaya	126	26
7	Bekasi Timur	92	15
8	Bekasi Selatan	92	16
9	Rawalumbu	149	28
10	Bekasi Barat	121	17
11	Medan Satria	115	27
12	Bekasi Utara	101	12
	Kota Bekasi	1.724	27

Sumber : Masterplan Persampahan Kota Bekasi yang dikelola dalam SIPD

Permasalahan Persampahan di Kota Bekasi, yaitu :

- Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
- Belum optimalnya kinerja pengelolaan layanan persampahan.
- Belum optimalnya kebijakan pengelolaan persampahan
- Belum optimalnya investasi dalam layanan pengelolaan persampahan
- Belum optimalnya stimulan dan atau insentif terkait kegiatan 3R (*Reuse Reduce dan Recycle*) pengurangan sampah setempat
- Belum optimalnya kegiatan TPS 3R, bank sampah, dan pengolahan sampah menjadi bahan bakar (gas/minyak) dengan mengikut sertakan peran industri melalui CSR
- Belum optimalnya armada pengumpul dan angkut sampah yang terpilah, dan menambah jumlah TPS, TPS 3R dan SPA (Stasiun Peralihan Antara).
- Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan 3R melalui sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan
- Belum adanya pengawasan secara mendetail terhadap kegiatan pengelolaan persampahan mulai dari sumber hingga ke TPA
- Sarana dan prasarana yang tersedia kurang, baik dari jumlah maupun kondisi
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan kebersihan
- Kurangnya ketersediaan lahan untuk membangun TPS di sumber sampah (RT/RW) skala komunal sehingga pengumpulan sampah masih sistem *door to door* yang menyebabkan ketidakefektifan waktu pengumpulan
- Pewadahan berupa bak sampah permanen yang ditempatkan di atas saluran drainase

D. Sistem Pengolahan Limbah

D.1 Prasarana Fisik

Kota Bekasi juga memiliki sistem prasarana air limbah, yang terdiri dari sistem penanganan air limbah domestik dan sistem penanganan air limbah industri. Sistem

penanganan air limbah domestik terdiri dari sistem penyaluran air bekas cuci (*grey water*); serta sistem penanganan air bekas kakus dan tinja (*black water*). Sedangkan sistem penanganan air limbah industri dilakukan dengan melalui proses pengolahan di IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), terutama bagi limbah yang mengandung bahan beracun.

D.2 Indikator Kinerja Layanan Limbah

Permasalahan Air Limbah di Kota Bekasi, yaitu :

- Cakupan layanan penyedotan lumpur tinja 47% KK di 12 kecamatan yang ada ke IPLT/IPALD Sumur Batu
- Cakupan kepemilikan jamban sehat keluarga dengan penggunaan tangki septik dari 87,2 %
- Bersatunya aliran limbah dengan saluran drainase
- Sistem pengelolaan air bekas kakus dan tinja (*Black Water*) di Kota Bekasi saat ini masih dilakukan secara on site (setempat), yaitu: Kakus dan Septik Tank

E. Sistem Drainase

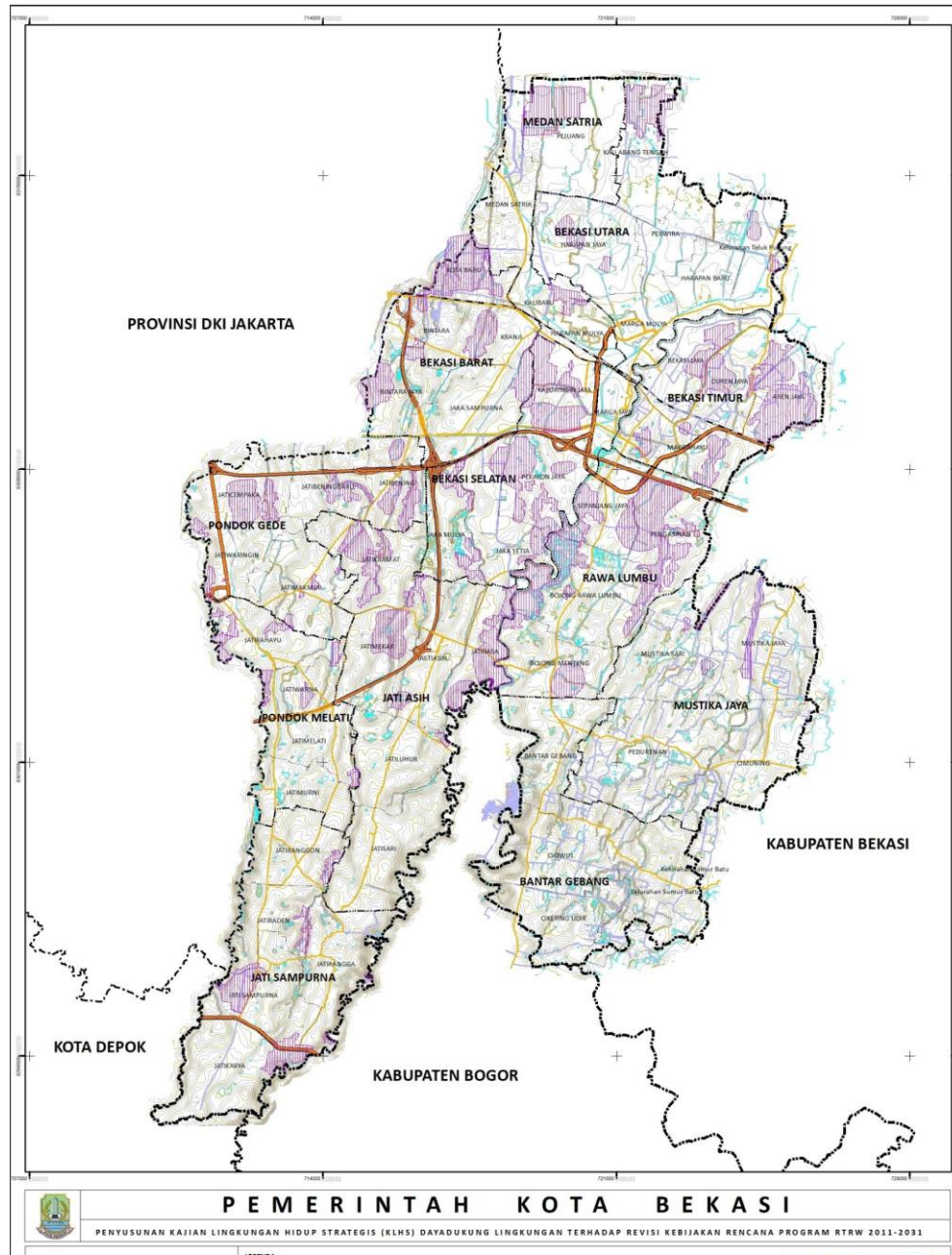
E.1 Prasarana Fisik

Kota Bekasi dilalui oleh 5 (lima) sistem drainase utama/primer yaitu Kali Cakung, Kali Bekasi, Kali Sunter, Kali Cikeas dan Kali Cileungsi. Kelima kali tersebut mempunyai daerah tangkapan air yang cukup luas dan bermuara ke arah utara dan berakhir di Laut Jawa. Sistem drainase Kota Bekasi saat ini mencakup wilayah seluas kurang lebih 9.035 Ha atau 43% dari luas wilayah kota. Terdapat saluran penerus/sekunder dari pusat daerah tangkapan dalam kota ke badan air penerima dengan lebar dan kedalaman saluran bervariasi. Kondisi sistem drainase yang ada telah banyak yang rusak dan kurang terpelihara. Di wilayah Kota Bekasi terdapat 4 kali besar yang berfungsi sebagai saluran primer, yaitu Kali Cileungsi, Kali Cikeas, Kali Bekasi, dan Kali Sunter. Kali Cileungsi dan Kali Cikeas bermuara di Kali Bekasi. Disamping itu terdapat sejumlah Kali yang bersumber di wilayah Kota Bekasi yang berfungsi sebagai saluran sekunder.

Pengelolaan empat sungai besar yang menjadi saluran primer tersebut menjadi wewenang dan tanggungjawab Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane dan Kali lainnya yang terletak di wilayah Kota Bekasi menjadi tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Kota Bekasi. Tiga (3) dari Saluran Primer tersebut di atas, yaitu: Kali Cikeas, Kali Bekasi dan Kali Sunter.

E.2 Indikator Kinerja Layanan Sistem Drainase

Berdasarkan data tahun 2016 lokasi banjir Kota Bekasi sebanyak 85 titik dengan luas kurang lebih 2.873.38 Ha yang tersebar hampir di seluruh Kota Bekasi .



Gambar 2-63 Wilayah Potensi Banjir Kota Bekasi

Tiga sungai penyumbang banjir terbesar di Kota Bekasi adalah: Kali Bekasi, Kali Cikeas, dan Kali Sunter rutin menyumbang banjir tahunan di wilayah berikut :

1. Kecamatan Pondok Gede (Perumahan Bina Lindung)
2. Kecamatan Pondok Melati (Perumahan Chandra RW 15, Perumahan Pondok Melati Indah, Perumahan Nyai Putu Bawah).
3. Kecamatan Bekasi Selatan (Perumahan Jaka Kencana)
4. Kecamatan Jati Asih (Pondok Mitra Lestari, Jati Asih Indah, Kemang IFI Graha, Pondok Gede Permai, Villa Jati Rasa, Perumahan Mandosi).
5. Kecamatan Jati Sampurna (Perumahan Citra Grand).

2.4.4 Penataan Ruang

A. Sarana, Prasarana dan Instrumen Penataan Ruang

Kota Bekasi telah memiliki Dokumen RTRW Kota Bekasi dan RDTR Kota Bekasi yang telah berkuat hukum (Perda). Dengan kedua dokumen rencana tersebut maka pelayanan umum terkait penataan ruang sudah dapat dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bekasi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

B. Indikator Kinerja Penataan Ruang

B.1 Neraca Pemanfaatan Ruang

Stock guna lahan merupakan selisih antara luas alokasi ruang yang direncanakan dalam RTRW dan RDTR Kota dengan tingkat pemanfaatannya saat ini (lahan terpakai). Perubahan stock mencerminkan tingkat pemanfaatan atau transformasi dari alokasi kepada pemanfaatan atau transformasi dari rencana kepada penggunaan. Hasil analisis terhadap data dan informasi terkait diperoleh gambaran perkembangan stock guna lahan di Kota Bekasi seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53 Perubahan stock lahan di Kota Bekasi 2009- 2014

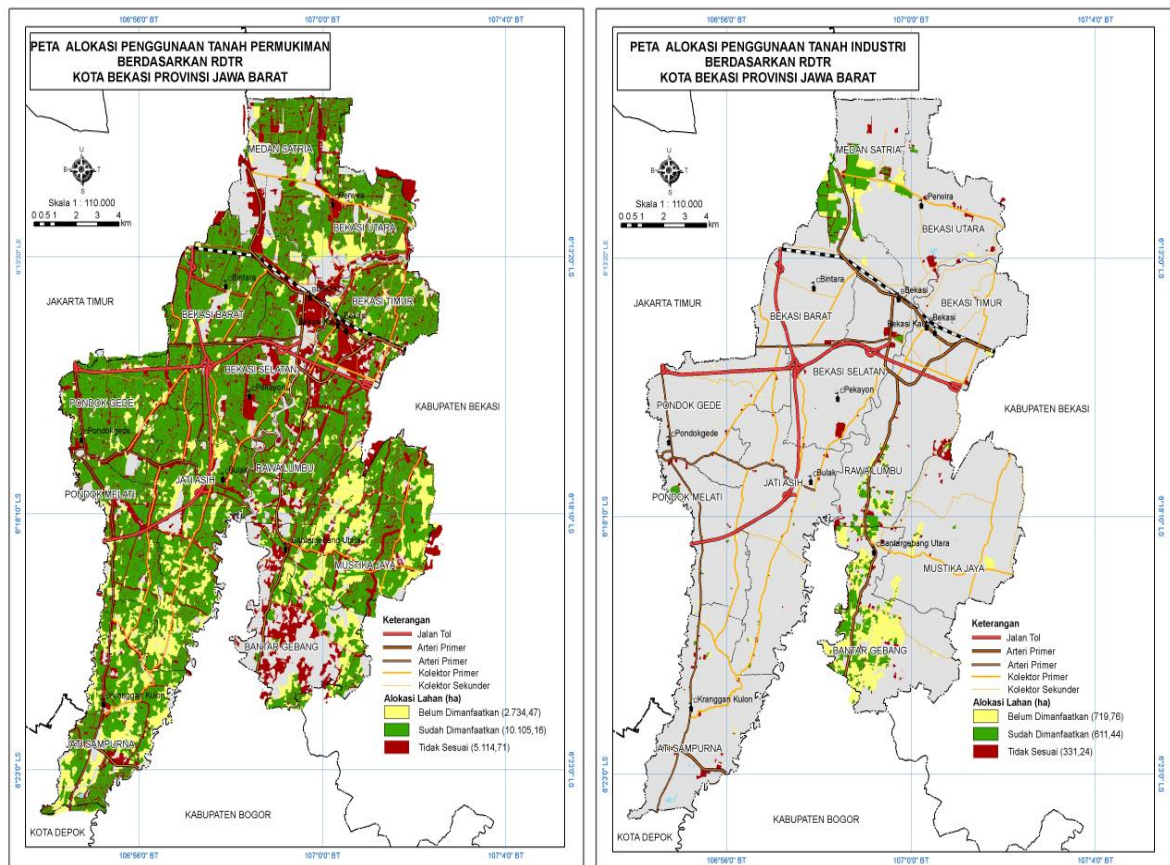
No	Kelas Lahan	Pola Ruang (ha)	Land Use		Stock		Perubahan Stock
			2009	2014	2009	2014	
1	Industri	658.16	567.43	942.64	90.73	-284.48	-193.75
2	Kawasan Lindung	1875.32	109.32	225.14	1766.00	1650.18	115.82
3	Lahan Infrastruktur	357.2547	10.6	142.27	346.65	214.98	131.67
4	Perdagangan dan Jasa	7167.16	166.17	273.69	7000.9	6893.47	107.52
5	Permukiman	11551.23	10708.76	11211.31	842.48	339.93	502.55
6	Total	21609.13	21609.13	21609.13			

Sumber : 1. RTRW Kota Bekasi, 2. Citra Ikonos 2009 dan 2014. yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa perubahan stock terbesar terjadi pada lahan permukiman yang mencapai pengurangan stock hingga mencapai 502 ha pada periode 2009-2014. Perubahan terbesar kedua adalah stock lahan industri. Alokasi lahan industri berdasarkan RTRW Kota Bekasi hingga tahun 2014 telah terpakai seluruhnya, bahkan perkembangan lahan industri di wilayah ini telah melampaui alokasi yang ditetapkan berdasarkan rencana. Sementara stock lahan yang relatif masih besar adalah stock lahan perdagangan dan jasa. Pemanfaatan alokasi lahan perdagangan jasa berdasarkan rencana baru mencapai 3,8% hingga tahun 2014. Sedangkan tingkat pemanfaatan lahan permukiman hingga tahun 2014 telah mencapai 97% dari alokasi yang direncanakan dalam RTRW Kota Bekasi.

B.2 Penyimpangan Pemanfaatan Ruang

Hasil evaluasi terkait penyimpangan pemanfaatan ruang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 11% penyimpangan pemanfaatan ruang yang ada di Kota Bekasi (LKPJ, 2017).



Sumber : Diolah dari RDTR Kota dan Data Citra Ikonos. 2014

Gambar 2-64 Kesesuaian rencana alokasi ruang dengan pemanfaatannya

2.4.5 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

A Ketersediaan Perumahan

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diidentifikasi selama kurun waktu 2009-2014 peningkatan pemanfaatan lahan terbesar di wilayah Kota Bekasi terjadi pada lahan permukiman dengan luas perubahan rata-rata pertahun sebesar 100 ha. Sementara pengurangan lahan terbesar terjadi pada lahan pertanian lahan basah dengan rata-rata perubahan sebesar 101 ha per tahun.

Tabel 2.54 Perubahan penggunaan lahan Kota Bekasi 2009-2014

No	Kelas Lahan	Penggunaan Lahan 2014	Penggunaan Lahan 2009	Perubahan 2009-2014	Perubahan/th

		(ha)	(ha)	(ha)	
1	Badan Air	166.12	125.09	41.03	8.21
2	Hutan Produksi			0.00	0.00
3	Industri	948.72	568.66	380.06	76.01
4	Kawasan Lindung	122.59	6.77	115.82	23.16
5	Lahan Infrastruktur	142.27	10.60	131.67	26.33
6	Perdagangan dan Jasa	273.69	166.17	107.52	21.50
7	Perkebunan	1234.87	1500.07	-265.20	-53.04
8	Permukiman	15218.40	14715.09	503.31	100.66
9	Pertanian Lahan Basah	1413.93	1923.59	-509.66	-101.93
10	Pertanian Lahan Kering	2091.23	2595.80	-504.57	-100.91

Sumber: Noviandi (2017).

B. Indikator Kinerja Pelayanan Perumahan

B.1 *Backlog* Perumahan

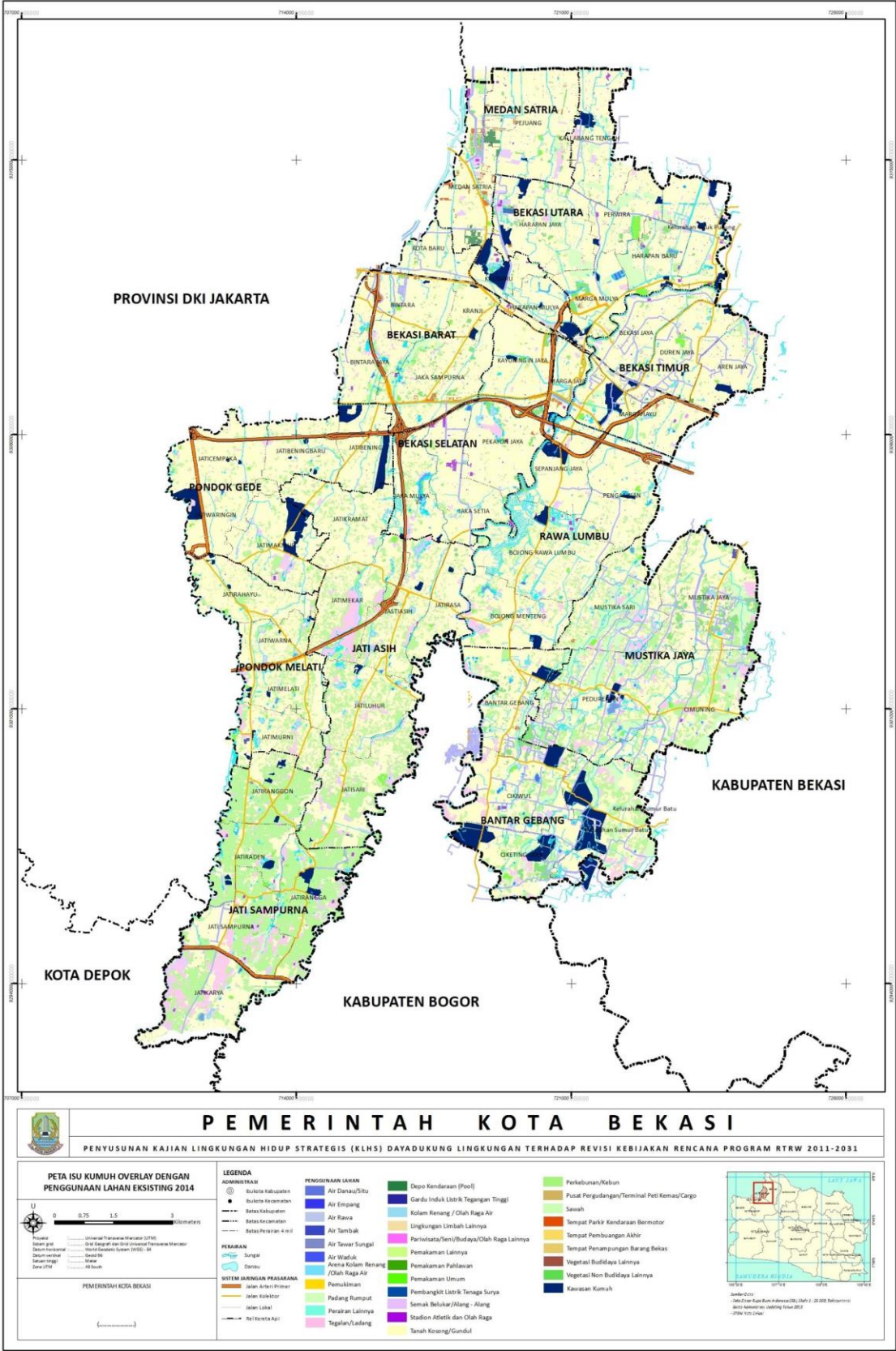
Pertumbuhan penduduk Kota Bekasi berada pada tingkat pertumbuhan yang tinggi. Kondisi perkembangan penduduk tersebut mengakibatkan permintaan lahan permukiman yang tinggi. Rata-rata permintaan lahan permukiman di Kota Bekasi diperkirakan mencapai 105 ha per tahun. Permintaan lahan permukiman yang tinggi mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan lahan terbuka. Sebagian dari proses alih fungsi lahan tersebut bertentangan dengan RTRW kota Bekasi. Ketidaksesuaian perkembangan lahan permukiman tidak hanya terjadi pada alokasi lahan tetapi juga pada arah dan pola penyebarannya.

B.2 Perumahan Kumuh dan Tidak Layak Huni

Tahun 2016, luas Kawasan Kumuh Kota Bekasi 423,73 ha yang tersebar pada 122 titik lokasi. Berdasarkan peta tutupan lahan tahun 2014, lokasi Kawasan Kumuh pada umumnya berada pada kawasan perumahan tidak terstruktur (perumahan perkampungan) dengan kepadatan bangunan tinggi. Selama pembangunan pada periode 2013-2018, kawasan kumuh yang tertangani mencapai 58 %. Selama Tahun 2018-2019 capaian penanganan kawasan kumuh Kota Bekasi adaah sebesar 44 % dengan dukungan sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Program Kotaku, RPKPP, P3BK.

2.4.6 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ini dijalankan untuk menjamin kebutuhan dasar penduduk terhadap ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan. Indikator yang diharapkan dapat dicapai adalah: jumlah petugas perlindungan masyarakat (Linmas), tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan), layanan bencana kebakaran, tingkat waktu tanggap terhadap wilayah kebakaran, dan penegakan Perda.



Gambar 2-65 Sebaran Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Bekasi

2.4.7 Sosial

A. Sarana Pelayanan Sosial

Dinas Sosial Kota Bekasi sudah mengajukan rencana pembangunan gedung rehabilitasi terpadu milik Pemkot Bekasi, dalam APBD Kota Bekasi tahun 2018. Kepala Dinsos Kota Bekasi Junaedi mengatakan, gedung tersebut rencananya berlokasi di Kawasan Pedurenan, Mustikajaya dan sekarang masih dalam pembahasan. Keberadaan gedung rehabilitasi terpadu dipandang mendesak, lantaran panti rehabilitasi yang ada sudah penuh. Selain itu, Dinsos Kota Bekasi tidak hanya melayani orang sakit semata, namun juga orang terlantar hingga orang dengan gangguan kejiwaan. “Walaupun memang secara teknis orang sakit adalah domainnya Dinas Kesehatan, namun kita terpadu antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dalam menangani orang-orang yang sakit dan terlantar. Sebelum adanya gedung rehabilitasi terpadu, Dinsos Kota Bekasi menampung orang yang terlantar di rumah singgah, orang sakit di RSUD, serta mereka yang terjerang rasia seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan PSK ditampung di PSBK Pangudiluhur atau Pasar Rebo (DKI Jakarta).

B. Indikator Kinerja Layanan Sosial

Tabel 2.55 Evaluasi Capaian Indikator RPJMD Urusan Sosial, Tahun 2014-2016

No	Indikator	Target			Capaian		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	80	82	85	80	74	85
2	Tingkat kemiskinan	5,87	5,72	5,62	5,25	5,46	5,06
3	Indeks Gini	$0,3 \leq G \leq 0,5$	$0,3 \leq G \leq 0,5$	$0,3 \leq G \leq 0,5$	0,33	0,41	0,39
4	Penanganan bencana alam	80	90	100	100	100	100

Sumber: Backgroundstudy Bidang PMM, 2017 yang dikelola dalam SIPD

Kewenangan kota dalam urusan sosial ada 6 yaitu: (1) pemberdayaan sosial (2) penanganan warga migran korban kekerasan; (3) rehabilitasi sosial; (4) perlindungan dan jaminan sosial; (5) penanganan bencana dan (6) taman makam pahlawan. Berikut ini evaluasi capaian indikator urusan sosial terhadap target RPJMD Kota Bekasi tahun 2014-2016.

Tabel 2.56 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)					
	Mantan Warga Binaan	Korban NAPZA	Keluarga Bermasalah	Keluarga Fakir Miskin	Korban Bencana Sosial / Pengungsi	Keluarga Berumah Tak Layak Huni
Pondok Gede	-	-	2	644	-	-
Jatisampurna	-	-	-	1249	-	103

Kecamatan	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)					
	Mantan Warga Binaan	Korban NAPZA	Keluarga Bermasalah	Keluarga Fakir Miskin	Korban Bencana Sosial / Pengungsi	Keluarga Berumah Tak Layak Huni
Pondok Melati	-	-	-	1570	-	57
Jatiasih	9	16	18	2484	-	278
Bantar Gebang	0	-	3	437	-	99
Mustika Jaya	11	-	4	167	-	82
Bekasi Timur	-	2	-	1247	-	16
Rawalumbu	4	5	13	105	-	48
Bekasi Selatan	1	5	2	3798	-	68
Bekasi Barat	-	1246	53	1	-	-
Medan Satria	-	2	-	148	-	22
Bekasi Utara	1	18	1	1759	-	187
TOTAL	26	1294	96	13636	-	960
Up Date					147	

Tabel 2.56 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Kecamatan (lanjutan)

Kecamatan	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)						Total
	Korban Bencana Alam	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Pengidap HIV/AIDS (ODHA)	Keluarga Rentan	Trafficking	
Pondok Gede	116	119	-	-	-	-	1.055
Jatisampurna	-	65	-	-	-	-	1.547
Pondok Melati	14	36	-	1	-	-	1.785
Jatiasih	2323	158	3	-	2	2	5.787
Bantar Gebang	93	64	-	-	-	3	816
Mustika Jaya	148	87	-	-	6	-	697
Bekasi Timur	30	52	-	-	-	-	1.807
Rawalumbu	157	83	-	-	1	-	460
Bekasi Selatan	134	151	-	37	5	-	4.776
Bekasi Barat	23	59	3	1	-	-	1.471
Medan Satria	-	64	-	-	6	-	282
Bekasi Utara	134	187	-	22	3	-	2.820
TOTAL	3.172	1.125	6	61	23	5	23.303
Up Date			63	150			46.730

Dari empat indikator RPJMD di atas pada urusan sosial, seluruh indikator sudah mencapai target RPJMD kecuali penanganan PMKS pada tahun 2015. Meskipun nilai capaian sudah cukup baik, berdasarkan hasil FGD, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bekasi terkait dengan urusan sosial yaitu: (1) Penanggulangan kemiskinan mengalami pelambatan; (2) Ketimpangan cenderung tinggi; (3) Tingginya jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); (4) Terbatasnya sarana

dan prasarana rehabilitasi sosial; dan (5) Masih belum optimalnya fungsi masyarakat bagi penduduk yang rentan seperti penyandang cacat atau disabilitas.

Tabel 2.57 Beberapa Indikator Urusan Sosial 2016-2017

Indikator	2016	2017
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	-	38.94
Jumlah PMKS yang diberikan bantuan		27.273
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan		70.033
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	35.01	38.94
Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 Tahun	24.522	27.273
Jumlah PMKS yang Seharusnya memperoleh bantuan sosial dalam 1 Th	70.033	70.033
Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sejenis	25.00	25.00
Jumlah PMKS dalam 1 (satu) Tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE	200	200
Jumlah PMKS dalam 1 (satu) Tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat	800	800
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	28.41	25.00
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun		3.965
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun		15.860

Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi, 2018 yang dikelola dalam SIPD

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian beberapa program/kegiatan sosial belum terlalu menggembirakan. Dari jumlah PMKS (70 ribu) yang seharusnya memperoleh bantuan sosial, baru sekitar 27 ribu yang diberikan bantuan (38%). Dari 800 PMKS yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat (seperti KUBE) baru 200 tersentuh program (25%). Demikian juga untuk penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial, baru dapat memberikan jaminan sosial sekitar 25% dari keseluruhan (3.965 orang dari 15.860 orang).

2.4.8 Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mencatat di tahun 2017 jumlah perusahaan sebanyak 1.503 meningkat dari jumlah tahun 2013 yang 1.110 perusahaan. Dari jumlah tersebut terdapat sekitar 8-10% perusahaan yang mengalami sengketa pengusaha-pekerja (tahun 2013-2017 berkisar 79-161 perusahaan), dan hanya sebagian yang mencatatkan kasus tersebut (16-96 perusahaan). Berdasarkan catatan kasus tersebut, pemerintah Kota Bekasi dapat menyelesaikan semuanya (100%) dengan Perjanjian Bersama (PB).

Tabel 2.58 Beberapa Indikator Urusan Tenaga Kerja 2013-2017

Nama	2013	2014	2015	2016	2017
Angka sengketa pengusaha-pekerja per th (%)	8.83	10.36	7.12	10.56	10.71
Nama	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah sengketa pengusaha pekerja	98	115	79	128	161
Jumlah perusahaan	1,110	1,110	1,110	1,212	1,503
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	100	82.29	100	100	100
Σ kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	82	79	82	18	16
Σ kasus yang dicatatkan	82	96	82	18	16
Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	78.29	29.91	48.03	45.00	0
Σ perusahaan yang telah diperiksa	869	367	365	270	
Σ perusahaan yang terdaftar	1,110	1,227	760	600	
Besaran Pengujian Peralatan di Perush (%)	33.36	36.23	83.82	33.91	0
Σ peralatan yang telah diuji	1,111	1,092	922	784	
Σ peralatan yang telah terdaftar	3,330	3,014	1,100	2,312	
Keselamatan dan perlindungan (%)	69.46	44.95	99.10	92.33	0
Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada Tahun n	771	499	1,100	1,119	
Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten pada Tahun n	1,110	1,110	1,110	1,212	
Besaran pekerja/buruh peserta Jamsostek (%)	43.71	60.45	91.04	91.19	91.23
Σ pekerja/buruh JAMSOSTEK	120,361	166,449	136,192	145,167	145,268
Σ pekerja/buruh	275,360	275,360	149,596	159,200	159,230
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	44.32	60.54	81.58	42.67	42.75
Σ pencari kerja yang ditempatkan	17,711	16,128	20,191	11,225	10,697
Σ pencari kerja yang terdaftar	39,966	26,639	24,749	26,305	25,020
Rasio lulusan S1/S2/S3 (Pencaker) (%)	24.11	11.00	5.97	7.01	9.33
Jumlah lulusan S1/S2/S3 (Pencaker)	9,637	2,930	1,477	1,845	2,334
Jumlah penduduk (Pencaker)	39,966	26,639	24,749	26,305	25,020
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	18.87	50.00	78.50	54.96	96.15
Σ tenaga kerja yang dilatih	200	200	420	72	100
Σ Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	1,060	400	535	131	104
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	68.38	64.00	53.33	36.92	80.00
Σ tenaga kerja yang dilatih	80	64	64	48	80
Σ pendaftar pelatihan berbasis masyarakat	117	100	120	130	100
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	44.20	75.00	64.29	61.35	100.00
Σ tenaga kerja yang dilatih	80	90	90	100	240
Σ pendaftar pelatihan kewirausahaan	181	120	140	163	240

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2018 yang dikelola dalam SIPD

Pemerintah Kota Bekasi juga secara rutin memeriksa perusahaan yang terdaftar, namun dari tahun ke tahun kemampuan memeriksa makin menurun, kalau tahun 2013 mampu memeriksa 78,29% perusahaan yang terdaftar (869 dari 1.110 perusahaan) di tahun-tahun berikutnya hanya bisa diperiksa 29,91-48,03%. Demikian juga pengujian peralatan di perusahaan, prestasi tertinggi dicapai tahun 2015 yang mampu menguji 83,82% peralatan yang terdaftar (922 dari 1100 perusahaan), sedangkan di tahun yang lain capaiannya hanya di kisaran 33-36%.

Hal-hal yang cukup menggembirakan adalah hampir semua perusahaan menerapkan sistem keselamatan dan perlindungan kerja (K3), tertinggi pada tahun 2015 yang mencapai 99,1% (1100 dari 1110 perusahaan), sedikit menurun di tahun 2016 (92,3%) dan cukup di rendah di tahun 2013-2014 yang hanya 69% dan 44%. Demikian juga berkaitan dengan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), hampir semua pekerja/buruh sudah terdaftar sebagai peserta Jamsostek, tahun 2015-2017 tercatat 91% pekerja/buruh yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek (145.268 dari 159.230 pekerja/buruh), meningkat tajam dibandingkan tahun 2013-2014 yang hanya 43 dan 60%.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mencatat jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 39.966 orang tahun 2013 dan cenderung menurun sampai 25.020 orang di tahun 2017. Dari jumlah tersebut yang berhasil ditempatkan sebanyak 17.711 orang (44,32%) dan 10.697 orang (42,75%). Presentasi penempatan pencari kerja tertinggi pada tahun 2015 sebesar 81,58%. Tingkat pendidikan pencari kerja tersebut, 24,11% di antaranya S1/S2/S3 (tahun 2013) dan menjadi hanya 9,33% di tahun 2017.

Untuk meningkatkan ketrampilan pencari kerja, beberapa program pelatihan diberikan agar para pencari kerja siap masuk pasar kerja, ada pelatihan kewirausahaan, pelatihan berbasis masyarakat, dan pelatihan berbasis kompetensi. Dari tahun ke tahun program ini terus ditingkatkan cakupannya. Pada pelatihan kewirausahaan cakupannya meningkat dari 44,20% tahun 2013 menjadi 100% di tahun 2017. Demikian juga untuk pelatihan berbasis masyarakat dan berbasis kompetensi yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu 68,38% dan 18,87% (tahun 2013) menjadi 80% dan 9,15% di tahun 2017.

2.4.9 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peran perempuan dalam pemerintahan, swasta, politik terus didorong dengan memberikan peluang yang sama (laki-laki dan perempuan) dalam mengaktualisasi diri di semua lini kehidupan. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah di sekitar 49 ribu orang, sedangkan yang bekerja di lembaga swasta sekitar 160 ribu orang. Di bidang politik jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan sebesar 16% (8 orang dari 50 orang).

Tabel 2.59 Beberapa Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nama	2013	2014	2015	2016	2017

Nama	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pekerja perempuan di lembaga pemerintah		44,217	49,070	49,070	44,969
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	0	16.00	16.00	16.00	16.00
Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan		8	8	8	8
Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD		50	50	50	50
Jumlah Pekerja perempuan di lembaga swasta		62,706	157,346	172,226	160,842
Rasio KDRT (%)	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
Jumlah KDRT	215	231	213	230	205
Jumlah rumah tangga	532,152	532,904	533,552		
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	215	336	313	202	403
Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	215	336	313	202	403
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu	229	237	230	259	270
Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu	229	237	230	259	270
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	0	0	0	100	100
Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	0	0	0	15	22
Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	0	0	0	15	22
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum	229	237	230	259	270
Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	229	237	230	259	270
Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	0	100.00	100.00	100.00	100.00
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya	0	8	3	13	23
Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial	0	8	3	13	23

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi faktor yang penting dalam rangka membentuk keluarga harmonis, semakin kecil kejadian KDRT maka akan semakin

memperkuat keluarga. Kasus KDRT di Kota Bekasi tahun 2013-2017 tercatat di sekitar 205-231 kasus KDRT dari sekitar 533 ribu rumah tangga.

Cakupan layanan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dari tahun 2013 – 2017 sebesar 100%. Pada tahun 2013 ada sebanyak 215 kasus kekerasan perempuan dan anak dan semua dapat ditangani dengan baik, demikian juga tahun 2017 terdapat 207 kasus dan semua dapat diselesaikan 100%.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas pada tahun 2013-2017 sebesar 100%, tercatat tahun 2013 sebanyak 229 kasus yang meningkat tahun 2017 menjadi 270 kasus, dan semua dapat dilayani kesehatannya.

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Baru tercatat di tahun 2016 sebesar 15 kasus dan meningkat tahun 2017 menjadi 22 kasus, dan semua dapat diselesaikan semua dengan baik (100%).

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum meningkat dari tahun ke tahun, dimana tahun 2013 tercatat 229 perempuan/anak korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum, meningkat di tahun 2017 menjadi 270 perempuan/anak yang mendapat bantuan hukum. Dan dari tahun ke tahun, cakupan layanan hukum untuk perempuan/anak korban kekerasan mencapai 100%.

Perempuan dan anak korban kekerasan selanjutnya dikembalikan kepada keluarga/keluarga lain/masyarakat atau disebut reintegrasi sosial. Kasus seperti ini tercatat di tahun 2014 sebanyak 8 kasus dan meningkat menjadi 23 kasus di tahun 2017. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan sepanjang tahun 2014-2017 mencapai angka 100%.

Peran perempuan dalam pembangunan meliputi peran reproduktif, produktif dan sosial. Yang dimaksud peran reproduktif adalah fungsi perempuan yang dapat hamil, melahirkan, menyusui, dan merawat anak dalam keluarga. Peran produktif adalah perempuan melakukan karya-karya produktif dengan berbagai profesi yang menghasilkan, sedangkan peran sosial adalah peran perempuan yang banyak dilakukan dalam membantu masyarakat.

Tuntutan terhadap perempuan Indonesia untuk lebih berperan dalam pembangunan bangsa terus disuarakan, agar dapat bermitra sejajar dengan kaum laki-laki di berbagai bidang pembangunan. Meskipun demikian dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan masih mengalami berbagai kendala. Dalam publikasi ini nampak adanya beberapa permasalahan yang dihadapi perempuan antara lain dalam bidang ketenagakerjaan meskipun angka pengangguran perempuan berkurang, namun tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan justru mengalami penurunan. Di sisi lain masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan juga membutuhkan perhatian berbagai pihak dalam penanganannya.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan antar wilayah, dan tingkat kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah akan tercermin apabila nilai IPG sama dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang juga menunjukkan adanya pemerataan pembangunan antar wilayah dan kesetaraan gender. IPG Kota Bekasi tahun 2019 adalah 93,02.

Tabel 2.60. IPG Kota Bekasi tahun 2017 - 2019

Tahun	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran perkapita		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
2017	72,73	76,50	13,77	13,48	11,76	10,62	20,953	14,430	84,82	78,96	93,09
2018	72,86	76,63	14,20	13,72	11,77	10,86	21,458	14,785	85,56	79,79	93,26
2019	73,01	76,67	14,21	13,99	11,78	10,87	22,131	15,165	85,95	80,34	93,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2019

Peran aktif perempuan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik diukur dalam Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)/Gender Empowerment Index (GEM). Menurut Badan Pusat Statistik, indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Tabel 2.61. IDG Kota Bekasi tahun 2017 - 2018

Tahun	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	IDG
2017	16,00	43,69	29,05	65,68
2018				65,96

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2018

2.4.10 Pangan

Dinas Ketahanan Pangan mencatat bahwa Ketersediaan Pangan Utama tahun 2017 sebesar 82,17 Kg/jiwa, angka ini diperoleh dari rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama sebesar 236.101.634 Kg dengan jumlah penduduk 2.873.484 jiwa.

Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Tahun 2017 tercatat 26 sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di Kota Bekasi dari 48 total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di Kota Bekasi (54,17%).

Hanya satu indikator yang tidak tersedia data, yaitu Ketersediaan energi dan protein perkapita.

2.4.11 Pertanahan

Ada tiga indikator untuk urusan pertanahan, yaitu: persentase luas lahan yang bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara, dan penyelesaian izin lokasi.

2.4.12 Lingkungan Hidup

A. Indikator Lingkungan Hidup

Kewenangan akan urusan Lingkungan Hidup di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Lampiran K, soal Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. Ada 11 poin sub bidang Urusan Lingkungan Hidup yang dapat dikelola atau diberikan kewenangan dan menjadi tanggung jawab Kabupaten/Kota adalah:

1. Perencanaan Lingkungan Hidup. Kabupaten/Kota membuat Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota;
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kabupaten/Kota membuat KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) Kabupaten/Kota;
3. Keanekaragaman Hayati (Kehati). Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan Kehati di Kabupaten/Kota;
4. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH. Kabupaten/Kota (a) menetapkan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kabupaten/kota, (b) peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kabupaten/Kota;
5. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota;
6. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. Pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat tingkat Kabupaten/Kota;
7. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan

- pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Pengaduan Lingkungan Hidup. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: (a) usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (b) usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah Kabupaten/Kota; dan
 9. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3). Kabupaten/Kota menyediakan (a) penyimpanan sementara LB3, dan (b) pengumpulan LB3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 10. Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Kabupaten/Kota melakukan Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kabupaten/Kota;
 11. Persampahan, yang meliputi: (a) pengelolaan sampah Kabupaten/Kota, (b) penerbitan izin pen-daur-ulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, (c) pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta

Kinerja urusan Lingkungan Hidup Kota Bekasi dapat disajikan dalam tabel berikut ini. Sesuai dengan **Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No:SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 Tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Kabupaten/Kota**, Kota Bekasi telah menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) pada tahun 2017 dan saat ini telah masuk dalam proses legislasi di DPRD untuk di Perda kan tahun 2018 ini. Dengan demikian dokumen RPPLH belum terintegrasi secara formal ke dalam rencana pembangunan Kota Bekasi, namun informal substansi lingkungan hidup telah mewarnai rencana pembangunan Kota Bekasi. Bersamaan dengan rencana penerbitan Perda RPPLH, juga diusulkan Raperda Keanekaragaman Hayati (Kehati).

Dokumen perencanaan lingkungan hidup yang lain adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yaitu rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Payung hukum pelaksanaan KLHS adalah UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan **PP 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**, serta Permen LHK Nomor P.69/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata Cara Penyelenggaraan KLHS. Disamping itu juga diterbitkan Permendagri No. 7 Tahun 2018 **tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD**.

Kota Bekasi telah menyusun KLHS untuk RPJMD periode 2013-2018. Tahun ini kembali disusun KLHS untuk RPJMD 2018-2023 sesuai dengan Permendagri No. 7/2018.

Indikator lainnya adalah Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) tidak dilaksanakan karena di Kota Bekasi tidak ada MHA. Demikian juga Diklat lingkungan hidup bagi masyarakat, pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Kota Bekasi, dan peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) belum dilaksanakan.

Tabel 2.62 Beberapa Indikator Urusan Lingkungan Hidup

Nama	2013	2014	2015	2016	2017
Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA)	tidak ada	0	0	0	0
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	0	0	0	0	0
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	tidak ada				
Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (perusahaan)	0	0	0	0	166
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	0	0	0	0	0
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air		43.50	49.20	42.00	36.80
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara (Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU))					96.76
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	22.38	22.38	22.38	22.39	22.38
Tutupan Hutan	0.0001	0.0001	0.0001	0.000138	0.0001
Timbulan sampah yang ditangani (%)	58.68	61.49	60.29	61.26	47.51
Volume timbunan sampah yang ditangani	1,110,078	1,336,928	1,311,882	1,336,928	1,336,928
Total timbunan sampah	1,891,900	2,174,204	2,175,777	2,182,316	2,813,796
Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	0	0	0	0	0
Persentase cakupan area pelayanan	0	0	0	0	0
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	0	0	0	0	0

Nama	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Tidak ada	0	0	0	0
Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	tidak ada	0	0	0	0
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2018

Dalam hal Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan upaya-upaya yang positif. Salah satunya dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para pihak yang telah mengajukan ijin lingkungan. Tahun 2017 tercatat ada 166 ijin lingkungan yang diberikan kepada perusahaan, berupa dokumen: UKL-UPL, Amdal, Ka Andal, DPLH, DELH, dan Addendum. Dalam pelaksanaannya, dilakukan pengawasan terhadap 166 perusahaan tersebut dan hasilnya semua perusahaan yang mengantongi ijin lingkungan tersebut dinyatakan Tertib Administrasi. Pada tahun yang sama terdapat 38 perusahaan yang mendapat ijin mengelola limbah B3 dan ada 7 perusahaan yang diberikan ijin pembuangan limbah cair.

Upaya lainnya adalah melakukan beberapa pengukuran indikator lingkungan hidup, seperti: indek kualitas air, indek kualitas udara, dan indek tutupan lahan. Indikator-indikator ini akan memberikan peringatan tentang perlu/tidaknya ada tindakan segera untuk memperbaiki kondisi lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehat. Tabel di atas menggambarkan indek kualitas air tahun 2014-2017 di sekitar angka 40, indek tutupan lahan di sekitar 22,3, dan indek kualitas udara melalui Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) tahun 2017 sebesar 96,76 dalam kategori cukup/sedang.

Saat ini Indeks standar kualitas udara yang dipergunakan secara resmi di Indonesia adalah Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP 45 /MENLH /1997 Tentang Indeks Standar Pencemar Udara. Dalam keputusan tersebut yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan diantaranya: bahwa untuk memberikan kemudahan dari keseragaman informasi kualitas udara ambien kepada masyarakat di lokasi dan waktu tertentu serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara perlu disusun Indeks Standar Pencemar Udara. Indeks Standar Pencemar Udara adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Indeks Standar Pencemar Udara ditetapkan dengan cara mengubah kadar pencemar udara yang terukur menjadi suatu angka yang tidak berdimensi. Rentang Indeks Standar Pencemar Udara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.63 Kriteria Indeks Standar Pencemar Udara

Kategori	Nilai	Keterangan
Baik	0 – 50	Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika
Sedang	51 – 100	Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan, tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika
Tidak Sehat	101 – 199	Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika
Sangat Tidak Sehat	200 - 299	Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar
Berbahaya	300 - 3000	Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi

Sumber: KEPMEN LH No. KEP45/MENLH/10/1997 Tentang Indeks Standar Pencemar Udara yang dikelola dalam SIPD

Selanjutnya, indikator lingkungan hidup yang penting adalah tentang pengelolaan sampah. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka produksi sampah rumah tangga juga ikut meningkat. Kalau tahun 2013 jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa dengan volume produksi sampah sekitar 1,9 juta m³ meningkat menjadi 2,8 juta jiwa dan 2,8 juta m³ sampah. Dari produksi sampah yang semakin meningkat tersebut, tidak diiringi dengan baiknya tingkat penanganan timbulan sampah. Tercatat tahun 2013 hanya 58,68% sampah yang tertangani dengan baik (setara dengan 1,11 juta m³), tahun 2017 kondisinya menurun hanya bisa terlayani 47,5%. Turunnya kinerja pelayanan sampah ini, disamping faktor pertumbuhan penduduk juga disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana lingkungan hidup. Rincian dari indikator di atas pada umumnya belum dilakukan oleh OPD terkait, seperti: sampah yang berkurang dengan gerakan 3R, ijin pengelolaan sampah oleh swasta, fasilitas pengurangan sampah di perkotaan, pengelolaan sampah, dan sebagainya.

2.4.13 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ada tujuh indikator untuk urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu: Rasio penduduk ber-KTP, Rasio bayi berakte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah, Ketersediaan database kependudukan skala provinsi, Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Cakupan penerbitan akta kelahiran.

Tabel 2.64 Capaian Indikator Dukcapil dari tahun 2015 – 2017:

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017
1	Rasio penduduk ber-KTP	Rasio	98,30	76,08	80,77	n.a
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	53,76	87,27	54,54	n.a
3	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	na	68,14	71,59	n.a
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	%	n.a	n.a	n.a	n.a

5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	n.a	n.a	n.a	n.a
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	98,30	76,08	n.a	n.a
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran.	%	73,40	87,27	n.a	n.a

Sumber : LKPJ Kota Bekasi tahun 2018

Rasio penduduk ber-KTP, rasio berakte kelahiran, dan pasangan berakte nikah di Kota Bekasi berada diatas 1. Hal ini mengindikasikan terjadi permasalahan dalam administrasi kependudukan, karena bisa jadi terdapat penduduk di luar kota bekasi yang mendaftarkan KTP, akte kelahiran dan akte nikah di Kota Bekasi. Cakupan penertiban KTP di Kota Bekasi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 penertiban KTP sudah mencapai 98,30%, namun pada tahun 2015 menurun menjadi 76,08%. Adapun cakupan penertiban akta kelahiran mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 hanya mencapai sekitar 73,40% yang selanjutnya pada tahun 2015 mengalami kenaikan signifikan hingga 87,27%. Fluktuasi ini menunjukkan belum efektifnya upaya untuk mengendalikan masyarakat dalam membuat akte kelahiran.

2.4.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk menjalankan urusan penduduk dan keluarga berencana, ada beberapa indikator penting yang harus dicapai. Salah satu indikator tersebut adalah infrastruktur dan suprastruktur pengendalian penduduk dan KB. Tabel berikut ini akan menguraikan capaian kinerja urusan ini berdasarkan indikatornya. Pada kurun waktur 2013-2017 belu ada Perda/Perkada yang mengatur tentang pengendalian penduduk, demikian juga karena belum tersdia data profil penduduk maka belum bisa digunakan oleh OPD lain dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Urusan pengendalian penduduk dan KB telah diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah, ada pembagian peran antara pemerintah, emerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah menyusun *grand design* (rancangan induk) Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tahun 2011-2035 tingkat nasional telah selesai dan diluncurkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemendekesra) pada bulan Desember 2012. GDPK ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 27 Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Tim Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035. Keputusan Menkokesra tersebut mengamanahkan penyusunan lima buah *grand design*: *grand design* pengendalian kuantitas penduduk, *grand design* peningkatan kualitas penduduk, *grand design* pembangunan keluarga, *grand design* penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, dan *grand design* pembangunan data basis kependudukan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditunjuk sebagai leading sector penyusunan *grand design* pengendalian kuantitas penduduk tingkat nasional.

Selanjutnya pemerintah provinsi dan kab/kota menyusun rancangan induk pengendalian penduduk sesuai pembagian kewenangan di atas. Sejauh ini Kota Bekasi telah menyusun dokumen tersebut dan telah disosialisasikan ke seluruh OPD, sehingga dianggap

seluruh OPD telah memanfaatkan dokumen tersebut dalam perencanaan pembangunan. Kerjasama pendidikan formal dan informal tentang kependudukan belum dilaksanakan.

Program pengendalian penduduk di Kota Bekasi tahun 2013-2017 menunjukkan capaian yang cukup baik dengan ditandai dengan rata-rata jumlah anak sekitar 1,6 orang per keluarga. Capaian ini tidak terlepas dari peranserta OPD dalam mewujudkan program Kampung KB, 14 dari 43 OPD (32,56%) mendukung program ini. Jumlah petugas KB (PLKB) yang sebanyak 73 orang telah seluruhnya didayagunakan dalam perencanaan pembangunan. Rasio akseptor KB mencapai angka di sekitar 80, artinya setiap 100 pasangan usia subur (PUS), 80 orang di antaranya menjadi peserta KB. Demikian juga untuk rasio pengguna kontrasepsi pada usia subur 15-49 tahun mencapai angka 80, artinya padaaa setiap 100 orang wanita menikah usia 15-49 th terdapat 80 orang pengguna kontrasepsi. Sejalan dengan hal tersebut, hanya terdapat sekitar 10% PUS yang ingin ber KB tidak terlayani (*unmet need*) dan sekitar 30% PUS menggunakan kontrasepsi jangka panjang (MKPJ), serta sekitar 15% tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi.

Tabel 2.65 Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

Nama Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kebijakan (Perda/Perkada) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	belum ada	0	0	0	0
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	belum ada data profil penduduk	0	0	0	0
Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	belum ada	0	0	0	100
Jml perangkat daerah yg menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk					43
Jumlah semua perangkat daerah	0	0	0	0	43
Jml kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, dan non formal yang melakukan pendidikan kependudukan	blm ada	0	0	0	0
Rata-rata jumlah anak per keluarga	1.58	1.55	1.73	1.70	1.69
Jumlah anak	875,262	881,885	889,497	897,429	905,993
Jumlah keluarga	553,933	567,739	514,740	527,407	536,396
Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	0	0	0	0	32.56
Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB				2	14
Jumlah semua perangkat daerah					43
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Nama Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	73	74	76	70	62
Jumlah PKB/PLKB	73	74	76	70	62
Ratio Akseptor KB	73.72	75.36	81.01	81.10	76.89
Jumlah Akseptor KB	352,283	371,207	402,706	370,969	317,991
Jumlah pasangan usia subur	477,854	492,552	497,089	457,440	413,587
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	73.72	75.33	81.01	81.10	76.89
Jumlah peserta KB aktif	352,283	371,027	402,706	370,969	317,991
Jumlah pasangan usia subur	477,854	492,552	497,089	457,440	413,587
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	1.89	2.48	0	0	0
Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th	9,012	12,204			
Jumlah pasangan usia subur	477,854	492,552	497,089	457,440	413,587
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	16.37	9.65	7.78	9.17	10.24
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	78,221	47,508	38,692	41,925	42,354
Jumlah pasangan usia subur	477,854	492,552	497,089	457,440	413,587
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	30.11	29.47	28.26	30.93	31.04
Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	106,068	109,399	113,812	114,731	98,692
Jumlah akseptor KB	352,283	371,207	402,706	370,969	317,991
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	12.13	19.89	14.71	11.30	16.74
Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	42,723	73,837	59,249	41,925	53,242
Jumlah akseptor KB	352,283	371,207	402,706	370,969	317,991
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	144.64	146.43	146.43	148.21	151.79
Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	81	82	82	83	85
Jumlah desa/kelurahan	56	56	56	56	56
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	80.89	66.04	53.53	80.60	78.74
Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	27,607	20,488	10,086	10,374	11,602
Jumlah anggota kelompok BKB	34,128	31,022	18,841	12,871	14,735
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	17.65	17.18	26.39	27.22	35.86
Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	18,509	31,022	18,841	18,864	20,232
Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak	104,876	180,585	71,381	69,311	56,427

Nama Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	85.36	85.86	52.66	70.80	72.37
Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	21,029	20,488	5,201	5,549	6,472
Jumlah anggota kelompok BKR	24,637	23,862	9,877	7,838	8,943
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	45.06	52.06	39.62	75.73	75.02
Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	5,456	5,981	3,325	3,329	3,953
Jumlah anggota kelompok BKL	12,109	11,488	8,393	4,396	5,269
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	0	0	0	0	25.00
Jumlah PPKS				2	3
Jumlah kecamatan					12
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	82.21	85.25	84.41	84.19	86.61
Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	402	474	839	740	802
Jumlah anggota kelompok UPPKS	489	556	994	879	926
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	60.09	161.84	62.59	177.01	394.95
Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota	39,774	129,445	33,222	76,465	186,544
Perkiraan Permintaan Masyarakat	66,191	79,982	53,079	43,198	47,232
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	-	89.29	125.00	151.79	151.79
Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	tidak ada	50	70	85	85
Jumlah Faskes dan jejaring	56	56	56	56	56
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	886	702	648	716	823
Jumlah kelompok kegiatan	886	702	648	716	823

Sumber: Dinas PPKB, 2018 yang dikelola dalam SIPD

Untuk meningkatkan layanan KB telah dibentuk Pembina Pembantu KB Desa (PPKBD) yang tersedia hampir 2 orang tiap desa, dari 56 kelurahan terdapat sekitar 85 orang PPKBD. Disamping itu juga dilakukan pembinaan keluarga sejahtera, mulai dari pembinaan balita, remaja, dan lansia. Demikian juga dilakukan perbaikan ekonomi keluarga, dan mendirikan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang baru didirikan di 3 dari 12 kecamatan yang ada (25%).

Program Bina Keluarga Balita (BKB) dan program Bina Keluarga Remaja (BKR) masing-masing telah mencakup 80% dari seluruh keluarga. Sedangkan program Bina Keluarga Lansia (BKL) baru mencakup sekitar 50% dari seluruh keluarga.

2.4.15 Perhubungan

Urusan perhubungan digambarkan melalui 10 indikator, mulai indikator tentang penumpang, ijin travel, ijin kir kendaraan umum, jumlah pelabuhan/terminal, pemasangan rambu-rambu, jumlah barang yang terangkut, layanan penumpang dan sebagainya. Tabel berikut ini akan menggambarkan kinerja layanan umum untuk urusan perhubungan.

Tabel 2.66 Beberapa Indikator Urusan Perhubungan

Nama	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah arus penumpang angkutan umum					
Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun	1.453.986	1.243.783	1.251.352	989.179	479.301
Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah	1.455.716	1.451.738	1.475.808	1.359.863	658.211
Rasio ijin trayek	0	0	0	0	0
Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	664	2.512	2.357	1.673	655
Jumlah penduduk					
Jumlah uji kir angkutan umum	39.893	43.679	48.660	57.320	61.594
Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor. baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	39.893	43.679	48.660	57.320	61.594
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	2	3	3	3	3
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	2	3	3	3	3
Persentase layanan angkutan darat	0	0	0	0.75	0.55
Jumlah angkutan darat	6.497	6.450	6.405	6.385	6.303
Jumlah penumpang angkutan darat				853.572	1.137.152
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	0	0	0	0	0
Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada Tahun n					
Jumlah angkutan umum pada Tahun n	39.893	43.679	48.660	57.320	61.594
Pemasangan Rambu- rambu	0	0	0	0	0
Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n			1.197	730	409
Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia			180m2. 15 lokasi	250 m2. 4 lokasi. 558 m	2058,36m2 4 lokasi. 558 m

Nama	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	2.909.702	2.695.521	2.727.160	2.349.042	1.137.152
Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	2.909.702	2.695.521	2.727.160	2.349.042	1.137.152
Jumlah barang yang terangkut angkutan umum					
Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	2.909.702	2.695.521	2.727.160	2.349.042	1.137.152
Jumlah orang melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun	2.909.702	2.695.521	2.727.160	2.349.042	1.137.152
Jumlah barang melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun					

Sumber: Dinas Perhubungan, 2018

2.4.16 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Ada tujuh indikator untuk urusan koperasi, usah kecil dan menengah, yaitu: persentase koperasi aktif, persentase UKM aktif, persentase BPR/LKM aktif, persentase UKM, persentase wirausaha muda, cakupan pembinaankeompok pedagang informal, dan cakupan bina kelompo pengrajin.

2.4.17 Penanaman Modal

Pada kurun waktu 2013-2017 telah terjadi kenaikan jumlah investor yang semula 66 menjadi 217 investor, walaupun terjadi penurunan dibandingkan tahun 2015 dan 2016. Sejalan dengan kenaikan jumlah investor, juga diikuti dengan kenaikan nilai investasi. Rasio daya serap tenaga kerja berkisar antara 0,93 – 0,98 artinya setiap 100 PMA/PMDN akan menyerap tenaga kerja 93-98 orang. Indikator yang lain, menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan nilai realisasi PMDN, dari 14.820M di tahun 2013 menjadi 53.200M di tahun 2017. Berdasarkan hasil proyeksi tahun 2018-2020 terjadi kenaikan jumlah investor yang semula 391 menjadi 504 investor. Rasio daya serap tenaga kerja berkisar antara 0,91 – 0,93 artinya setiap 100 PMA/PMDN akan menyerap tenaga kerja 91-93 orang. Pada nilai realisasi PMDN terjadi kenaikan dari 63.585M di tahun 2018 menjadi 86.046M di tahun 2020.

Urusan penanaman modal dijalankan oleh Dinas PM dan PTSP dengan capaian seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.67 Beberapa Indikator Urusan Penanaman Modal

Nama	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	66	114	340	375	217	391	448	504
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.529.660	5.178.564	9.892.062	32.558.856	16.499.936	30.328.069	36.060.153	41.792.238
Rasio daya serap tenaga kerja	0,98	0,97	0,93	0,94	0,95	0,93	0,92	0,91

Nama	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*
Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	3.717	3.822	4.300	5.366	4.061	4.923	5.146	5.369
Jumlah seluruh PMA/PMDN	3.783	3.936	4.640	5.741	4.278	5.314	5.594	5.873
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	14.820	10.658	24.592	46.201	53.200	63.585	74.815	86.046
Realisasi PMDN Tahun evaluasi (Juta)	5.126.645	5.423.839	6.731.170	8.688.493	10.014.890	11.109.351	12.413.465	13.717.579
Realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi (juta)	4.464.951	4.901.446	5.402.591	5.942.850	6.537.140	7.005.530	7.524.108	8.042.687
Realisasi PMDN sebelum evaluasi (juta)	4.464.951	4.901.446	5.402.591	5.942.850	6.537.140	7.005.530	7.524.108	8.042.687

Catatan: *) Hasil Analisis

Sumber: Dinas PM dan PTSP Kota Bekasi, 2018

2.4.18 Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga dijelaskan dalam tabel berikut ini. Di Kota Bekasi pada kurun waktu 2013-2017, terdapat 94 organisasi pemuda.

Dalam hal pembinaan olahraga, telah dilakukan pembinaan terhadap 40 dan 43 cabang olahraga dari 47 cabang olahraga yang terdaftar (91,49%). Jumlah pelatih yang terdaftar sebanyak 78 orang dengan jumlah atlet yang berprestasi sebanyak 26 orang, dan cabang olahraga yang berprestasi sebanyak 30.

Tabel 2.68 Beberapa Indikator Urusan Pemuda dan Olahraga

Nama	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah seluruh organisasi pemuda	94	94	94	94	94
Cakupan pembinaan olahraga	85,11	85,11	85,11	85,11	91,49
Jumlah cabang olahraga yang dibina	40	40	40	40	43
Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	47	47	47	47	47
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	0	0	0	0	0
Jumlah pelatih bersertifikat					
Jumlah seluruh pelatih	78	78	78	78	78
Jumlah atlet berprestasi	0	3	0	19	26
Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun.		3		19	26
Jumlah prestasi olahraga	0	0	0	19	30
Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun				19	30

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2018 yang dikelola dalam SIPD

2.4.19 Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian

Urusan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian di Kota Bekasi dijalankan oleh Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, dengan indikator di sepanjang tahun 2013-2017 digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.69 Beberapa Indikator Urusan Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian

Nama Indikator	2016	2017
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	16,67	16,67
Jumlah KIM	2	2
Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota	12	12
Cakupan Layanan Telekomunikasi	100,00	100,00
Luas Wilayah Yang Tercoverage	210,49	210,49
Luas Wilayah Keseluruhan	210,49	210,49
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak Ada	Tidak Ada
Buku "Kota Dalam Angka"	Ada	Ada
Buku "PDRB"	Ada	Ada
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0	91,30
Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah		42
Jumlah total perangkat daerah		46

Sumber: Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian yang dikelola dalam SIPD

Cakupan telekomunikasi telah melayani seluruh wilayah, namun demikian belum dilakukan pembinaan yang intensif terhadap kelompok masyarakat. Dari 12 kecamatan baru terbentuk 2 Kelompok Komunikasi Masyarakat (KIM) di 2 kecamatan atau 16,67%.

Telah tersedia sistem data dan statistik yang terintegrasi dengan digambarkan bahwa telah tersedia buku Kota Bekasi Dalam Angka dan PDRB.

OPD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah mencapai 91,3% di tahun 2017 (42 dari 46 OPD).

2.4.20 Perpustakaan

Urusan perpustakaan dijalankan oleh Dinas Perpustakaan Daerah. Peran perpustakaan sangat penting untuk menyediakan sumber informasi yang valid dan lengkap terhadap penduduk Kota Bekasi. Dengan tersedianya sumber informasi maka masyarakat dapat memanfaatkan untuk beberapa kepentingan yang berbeda. Pelajar dan mahasiswa akan menggunakan perpustakaan sebagai wahana untuk melengkapi buku teks. Ibu rumah tangga akan mendapatkan sumber bacaan yang variatif, dan sebagainya.

Pada tabel di bawah ini digambarkan mengenai indikator-indikator urusan perpustakaan sebagai berikut.

Tabel 2.70 Beberapa Indikator Urusan Perpustakaan

Nama	2013	2014	2015	2016	2017

Nama	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0	0,0067	0,0056	0,0063	0,0082
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Th	5.791	14.665	12.231	15.679	20.685
Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani (usia 5-64 th)		2.199.603	2.171.733	2.475.900	2.537.818
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,303	0,283	0,270	0,278	0,281
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	7.858	10.316	12.438	13.207	13.607
Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	25.948	36.406	46.060	47.582	48.382
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	5.791	14.665	12.231	15.679	20.685
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	7.858	10.316	12.438	13.207	13.607
Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	0	0	0	0	2

Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, 2018 yang dikelola dalam SIPD

Jumlah pengunjung meningkat cukup besar, dimana tahun 2013 perpustakaan hanya dikunjungi sekitar 5 ribu orang menjadi 20 ribu di tahun 2017. Jika dibandingkan jumlah penduduk yang harus dilayani (umur 5-64 th), maka perpustakaan ini baru melayani sekitar 0,82%.

Jumlah koleksi judul buku juga meningkat dari 7.858 judul buku tahun 2013 menjadi 13.607 judul buku di tahun 2017, dengan jumlah buku di tahun yang sama 25.948 buku meningkat menjadi 48.382 buku. Dengan demikian setiap judul buku rata-rata tersedia 3 buah buku.

Dinas perpustakaan daerah, didukung oleh tersedianya jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikasi.

2.4.21 Kearsipan

Arsip merupakan bagian yang terpenting dalam suatu organisasi pemerintah daerah. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam rangka mendukung kegiatan e-government dalam reformasi birokrasi, maka pengelolaan arsip harus dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan tata cara dan kaidah yang berlaku. Sedangkan kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan warkat menurut sistem tertentu. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi pemerintah daerah, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi. Dalam penyelenggaraan urusan kearsipan arah kebijakan yang dilakukan yaitu :

- 1) Meningkatkan pembinaan kearsipan dinamis, tidak hanya pada SKPD tetapi desa/kelurahan maupun lembaga-lembaga lain agar sistem pengelolaan kearsipan berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan
- 2) Memberi kesadaran atau pemahaman agar terciptanya arsip yang bernilai guna, untuk dan atau sebagai alat bukti hukum yang sah sebagai pedoman kerja lembaga pencipta arsip.
- 3) Memberikan pengertian bahwa arsip adalah pusat refrensi dan ingatan organisasi, sumber informasi alat bukti, serta alat pengawasan sebagai bahan pertanggung jawaban nasional tentang perencanaan pengorganisasian, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan penyelenggaraan suatu kegiatan yang menentukan eksistensi organisasi dalam kehidupan bernegara.
- 4) Membentuk Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada masa mendatang berkaitan dengan pelayanan kearsipan dan kemanfaatan arsip untuk mencapai sistem kearsipan yang berkualitas
- 5) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dan mencukupi kebutuhannya dengan koordinasi dan konsultasi serta berupaya melaksanakan ketrampilan pengelola kearsipan.

Dalam kurun waktu 2013-2017, indikator urusan kearsipan dapat dijelaskan pada table berikut ini. Terjadi kenaikan yang cukup signifikan Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku. Tahun 2014 baru 11,63% menjadi 30,43% di tahun 2017 (14 dari 46 PD). Program peningkatan sumberdaya manusia pengelola kearsipan dijalankan di semua PD tahun 2017 (46 PD), sebelumnya bertahap dilakukan di 28, 22, dan 43 PD tahun 2014-2016. Rata-rata kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan sebanyak 2 kegiatan.

Tabel 2.71 Beberapa Indikator Urusan Kearsipan

Nama	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	0,00	11,63	20,93	23,26	30,43
Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	0	5	9	10	14
Jumlah Perangkat Daerah	0	43	43	43	46
Peningkatan SDM pengelola kearsipan		28	22	43	46
Menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	0	2	1	2	2

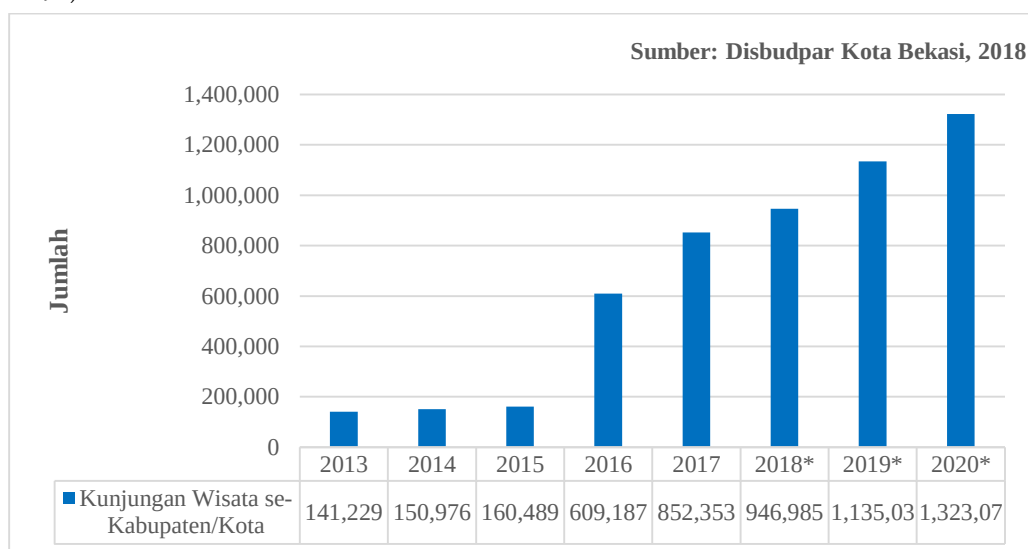
Sumber: Dinas Kearsipan Daerah Kota Bekasi, 2018 yang dikelola dalam SIPD

2.4.22 Pariwisata dan Kebudayaan

Kota Bekasi merupakan salah satu destinasi wisata di Provinsi Jawa Barat yang memiliki karakter sebagai destinasi wisata perkotaan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan variasi produk wisata kota (*urban tourism*), seperti wisata: wisata keluarga, wisata belanja, wisata sejarah, wisata pendidikan dan budaya serta wisata industri.

Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Bekasi dalam beberapa tahun terakhir jumlah wisatawan mengalami peningkatan, jumlah kunjungan wisata di Kota Bekasi mencapai 852.353 wisatawan pada tahun 2017, meningkat

cukup besar dibandingkan tahun 2013 (141.229 wisatawan). Kemudian berdasarkan hasil proyeksi jumlah kunjungan wisata di Kota Bekasi terus meningkat hingga tahun 2020 (1.323.076).



Catatan: *) Hasil Analisis

Gambar 2-66 Perkembangan Jumlah Wisatawan di Kota Bekasi 2013-2020

Namun kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Bekasi tergolong sangat kecil, hanya 0,02 % dari PAD Kota atau senilai Rp.263.899.673,- pada tahun 2016 dan mengalami peningkatan ditahun 2017 dengan nilai pendapatan dari sektor pariwisata mencapai Rp.308.437.146.

Tabel berikut ini juga menunjukkan bahwa dalam kurun 2013-2017 lama kunjungan wisatawan di Kota Bekasi hanya 1-2 hari. Hal ini diduga karena obyek wisata yang di sajikan terutama adalah wisata perkotaan (*urban tourism*) dan belum ditunjang dengan jenis wisata yang lain. Dengan pendeknya lama kunjungan wisatawan mempengaruhi pula pada PAD sektor pariwisata.

Untuk urusan Kebudayaan, tabel berikut ini menjelaskan tentang indikator-indikatornya. Terlihat bahwa ada 16 festival seni dan budaya di tahun 2017, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kota Bekasi memiliki beberapa benda, situs dan kawasan cagar budaya sebanyak 69 buah di tahun 2017 dan hanya 8 buah yang dilestarikan (12%). Ke delapan lokasi kawasan cagar budaya tersebut juga dikelola secara terpadu. Hal ini bisa dijadikan sebagai salah satu daya tarik wisata minat khusus di Bekasi.

Tabel 2.72 Beberapa Indikator Urusan Pariwisata

Nama	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kunjungan Wisata se-Kab/Kota	141.229	150.976	160.489	609.187	852.353
Lama kunjungan Wisata	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari
PAD sektor pariwisata (%)	0	0	0	0,0156	0,0175
PAD sektor pariwisata				263.899.672	308.437.146
Total PAD (Juta)				1.686.661	1.766.290

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2018 yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.73 Beberapa Indikator Urusan Kebudayaan

Nama	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya				13	16
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0,471	0,471	0,471	0,471	0,116
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	8	8	8	8	8
Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	17	17	17	17	69
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	8	8	8	8	8

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2018 yang dikelola dalam SIPD.

2.4.23 Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Ada enam indikator untuk urusan pertanian, yaitu: Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB, Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB, Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB, Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, dan Cakupan bina kelompok petani. Belum adanya data terkait indikator urusan pertanian di atas, maka tidak dapat didiskripsikan di sini.

Ada enam indikator untuk urusan kelautan dan perikanan, yaitu: Produksi perikanan, budidaya (ikan hias), Konsumsi ikan, Cakupan bina kelompok nelayan, Produksi perikanan kelompok nelayan, Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial.

2.4.24 Perindustrian dan Perdagangan

Ada satu indikator untuk urusan perindustrian, yaitu: Cakupan bina kelompok pengrajin. Belum adanya data terkait indikator urusan perindustrian di atas, maka tidak dapat didiskripsikan di sini. Ada dua indikator untuk urusan perdagangan, yaitu: ekspor bersih perdagangan yang merupakan selisih dari total ekspor dan total impor, serta Cakupan bina kelompok usaha/pedagang informal.

2.4.25 Perencanaan Pembangunan

Penunjang urusan Perencanaan Pembangunan mempunyai peran yang sangat strategis, karena seluruh aktivitas pembangunan direncanakan, dimonitor, dan dievaluasi melalui urusan perencanaan pembangunan ini. OPD yang menjalankan urusan ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi.

Tabel berikut ini menjelaskan tentang indikator-indikator perencanaan pembangunan. Pada kurun waktu 2013-2017, dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta RTRW, tersedia dan telah ditetapkan melalui Perda/ Perkada.

Tabel 2.74 Beberapa Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan

Nama	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	96	100	100	105	97
Jumlah program RKPD Tahun berkenaan	103	113	130	126	115
Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	107	113	130	120	119
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	100	95	92	100
Jumlah program APBD Tahun berkenaan	103	113	123	116	115
Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	103	113	130	126	115
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%)	100	100	100	100	100
Kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang	22	22	22	22	22
Jumlah Program yang ada di Dokumen RTRW	22	22	22	22	22

Sumber: Bappeda Kota Bekasi, 2018 yang dikelola dalam SIPD.

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD berkisar di antara 96-105%, artinya jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan bisa lebih banyak daripada jumlah program RKPD tahun berkenaan (tahun 2013: 107 vs 103 program, dan tahun 2017: 119 vs 115 program). Jumlah program RPJMD lebih sedikit daripada RKPD (tahun 2016: 120 vs 126 program), dan tahun 2014 dan 2015 program RPJMD dan RKPD sama banyak.

Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD dalam kurun waktu 2013-2017 tercapai 100%, kecuali tahun 2015 dan 2016 yang mencapai 95% dan 92%.

Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW tahun 2013-2017 mencapai 100%. Angka ini diperoleh dari Kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang dan Jumlah Program yang ada di Dokumen RTRW.

2.4.26 Keuangan

Ada sembilan indikator untuk urusan keuangan, yaitu: Opini BPK terhadap laporan keuangan, Persentase SILPA, Persentase program yang tidak terlaksana, Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana, Persentase belanja pendidikan (20%), Persentase belanja kesehatan (10%), Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung, Bagi hasil kabupaten/kota dan desa, Penetapan APBD. Secara lebih rinci pembahasan aspek keuangan dapat dilihat pada Bab 3.

2.4.27 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Ada enam indikator untuk urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, yaitu: Rata-rata lama pegawai mendapatkan Diklat, Persentase ASN yang mengikuti Diklat formal,

Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat struktural, Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah, dan Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.

Tabel 2.75 Perkembangan Indikator ASN Kota Bekasi 2013-2020

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan Diklat, 2013-2017	Hari	5	5	5	5	5	5	5	5
2	Persentase ASN yang mengikuti Diklat formal, 2013-2017	%	14.13	8.31	10.82	6.27	8.64	5.73	4.43	3.12
3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat struktural, 2013-2017	%	87.33	92.23	91.59	93.40	93.97	96.04	97.48	98.93
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, 2013-2017	orang	36	36	31	36	39	37	38	39
5	Jumlah jabatan administrator pada instansi pemerintah, 2013-2017	orang	169	170	172	155	192	181	184	187
6	Persentase pelanggaran pegawai, 2013-2017	%	0.22	0.61	0.62	1.78	0.78	1.49	1.72	1.95
7	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah. 2013-2017	orang	7,384	7,328	7,357	7,619	6,243	6,589	6,390	6,191

Catatan: *) Hasil Proyeksi

2.4.28 Penelitian dan Pengembangan

Ada empat indikator untuk urusan penelitian dan pengembangan, yaitu: Persentase implementasi rencana kelitbangan, Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Sampai saat ini indikator kinerja kelitbangan masih relatif rendah sejalan dengan pagu anggaran pogram yang relatif rendah.

2.4.29 Pengawasan

Ada tiga indikator untuk urusan pengawasan, yaitu: Persentase tindak lanjut temuan, Persentase pelanggaran pegawai, dan Jumlah temuan BPK.

2.4.30 Sekretariat Dewan

Ada tiga indikator untuk penunjang urusan sekretariat dewan, yaitu: Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD; Tersusun dan terintegrasinya program pengawasan dalam dokumen RPJMD dan RKPD; dan Tersusun dan terintegrasinya program pengawasan dalam dokumen anggaran Sekwan.

2.5. Evaluasi Capaian Hasil Pembangunan

2.5.1 Analisis Kinerja Capaian Standar Pelayanan Minimal dan Kinerja Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah (Permendagri 86/2017)

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 menjelaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar harus berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pelayanan Dasar yang dimaksud dalam hal ini adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Sedangkan Standar Pelayanan Minimal yang dimaksud dalam hal ini adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.⁵

Dalam menjalankan ketentuan pasal 18, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, yang dimaksud dengan Pelayanan dasar dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih mengacu terhadap definisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun dalam Peraturan ini dijelaskan bahwa pelaksanaan SPM tersebut harus didasarkan pada prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.⁶

Pelayanan Dasar yang dilakukan berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Bekasi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 6 bidang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 antara lain:⁷ (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman; (5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (6) Sosial.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di atas sekaligus merupakan jenis layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Bekasi yang harus mencakup Materi muatan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 antara lain:⁸ (1) Jenis Pelayanan Dasar; (2) Mutu Pelayanan Dasar;

⁵ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁶ Pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

⁷ Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

⁸ Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

dan (3) Penerima Pelayanan Dasar. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengatur bahwa setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat: (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; (2) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan (3) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Standar teknis yang dimaksud di atas, ditetapkan oleh Kementerian terkait setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, misalnya bidang pendidikan mengacu terhadap standar teknis yang ditetapkan oleh kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Secara rinci akan dijelaskan tentang layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.76 Penjelasan SPM Dasar menurut bidang

No.	Bidang	Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal
1.	Pendidikan	a. Pendidikan anak usia dini. b. Pendidikan dasar. c. Pendidikan kesetaraan.
2.	Kesehatan	a. pelayanan kesehatan ibu hamil. b. pelayanan kesehatan ibu bersalin. c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir. d. pelayanan kesehatan bayi baru lahir. e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari. b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman	a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota. b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kota.
5.	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum. b. pelayanan informasi rawan bencana. c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban.
6	Sosial	a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti. b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti. c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti. e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota.

Manurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian terkait dilakukan melalui

4 (empat) tahapan: (1) Pengumpulan data; (2) Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (3) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (4) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.⁹ Sedangkan Laporan Standar Pelayanan Minimal termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi muatan laporan penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: (1) Hasil penerapan SPM; (2) Kendala penerapan SPM; dan (3) Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.¹⁰

Khusus bagi Pemerintah Provinsi, Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencantumkan rekapitulasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/Kota. Hasil laporan penerapan SPM dijadikan dasar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melakukan berbagai tindakan yaitu:¹¹

Tabel 2.77 Jenis Tindakan Menurut Tingkatan Pemerintah.

No	Stakeholder	Jenis Tindakan Yang Dilakukan
1.	Pemerintah Pusat	1. Perumusan kebijakan nasional. 2. Pertimbangan pemerintah pusat untuk memberikan insentif dan disinsentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Pemerintah Daerah	1. Penilaian kinerja perangkat daerah. 2. Pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. 3. Penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Satu hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan SPM yaitu bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM, dengan adanya atas dasar prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat. Oleh karena itu, ditegaskan bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Dalam mendukung penyelenggaraan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, maka Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Berbagai jenis Pelayanan Dasar untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Ayat (2) Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 yang terdiri atas:¹²

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar;

⁹ Pasal 11, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

¹⁰ Pasal 17, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

¹¹ Pasal 18, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

¹² Pasal 3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

3. Pendidikan kesetaraan;
4. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
5. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
6. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
7. Pelayanan kesehatan balita;
8. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
9. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
10. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
11. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
12. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
13. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
14. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
15. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus);
16. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
17. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
18. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
19. Pasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
20. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
21. Pelayanan informasi rawan bencana;
22. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
23. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
24. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
25. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
26. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
27. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
28. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
29. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Mutu Pelayanan Dasar yang dilakukan melalui layanan di atas harus sesuai dengan Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Dalam menentukan kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar maka harus dilakukan perhitungan secara akurat dengan cara menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM. Kemudian hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

¹³ Pasal 6, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan Pasal 8, Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD, yang mana Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar tersebut merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.¹⁴ Kemudian, Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.¹⁵

Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018, Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar bahwa Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang sudah dibuat sekaligus menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Selanjutnya, implementasi pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk: (1) Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (2) Memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya sesuai dengan Standar Teknis SPM. Sedangkan dalam hal kerjasama daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Tercapainya kesuksesan penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu didukung dengan dilakukannya koordinasi yang melibatkan berbagai stakeholder, dimana Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM secara nasional, Gubernur berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di daerah provinsi, sedangkan Bupati/Wali Kota berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di daerah kabupaten/kota. Selain itu juga, perlu dibentuk Tim Penerapan SPM daerah provinsi dan kabupaten/kota.¹⁸

¹⁴ Pasal 8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

¹⁵ Pasal 10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

¹⁶ Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

¹⁷ Pasal 12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

¹⁸ Pasal 13, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Konteks koordinasi yang dilakukan meliputi: (1) Penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan (2) Penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.¹⁹

Dalam hal pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal Permendagri nomor 100 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pelaporan penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

¹⁹ Pasal 14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Tabel 2.78 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Sesuai Standar Pelayanan Minimum dan Target Pembangunan

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	
	2015	2016	2017	2018	2019	SPM/ Target Benchmark	Interpretasi
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1. Pertumbuhan PDRB	5,56%	6,09%	5,73%	5,86%	5,41%	5%	Tercapai (+)
2. Perubahan Inflasi	2,22%	2,47%	3,00%	4,23	0,39%	3%	Tercapai (+)
3. PDRB per kapita	26.066.217,87	27.593.519,21	29.139.315,23	31.068.343,23	32.756.201,0	Meningkat	Tercapai (+)
4. Indeks Gini	0,41	0,39	0,35	0,35	0,35	Berkurang	Tercapai (+)
7. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	94,54	94,94	95,21	95,89	96,19	Meningkat	Tercapai (+)
8. Rasio kesenjangan kemiskinan	0,68	0,69	0,82	0,72	0,47	Berkurang	Tercapai (+)
9. Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	5,46	5,06	4,79	4,11	3,81	Berkurang	Tercapai (+)
10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,63	79,95	80,3	81,04	81,59	Meningkat	Tercapai (+)
12. Angka rata-rata lama sekolah	10,71	10,78	10,93	11,09	11,10	Meningkat	Tercapai (+)
13. Angka usia harapan hidup	74,48	74,55	74,63	74,76	74,89	Meningkat	Tercapai (+)
14. Persentase balita gizi buruk	0,13	0,21	0,2	0,11	N/A	Berkurang	Tercapai (+)
15. Prevalensi balita gizi kurang	3,49	3,4	4	3,8	N/A	Berkurang	Tercapai (+)
16. Cakupan Desa Siaga Aktif		32		100%	94,6%	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
17. Angka partisipasi angkatan kerja	60,16	60,16	66,38	N/A	N/A	Meningkat	Tercapai (+)
18. Tingkat partisipasi angkatan kerja	58,26	58,26	64,35	65,3	65,7	Meningkat	Tercapai (+)
19. Tingkat pengangguran terbuka	9,36	9,36	9,32	9,1	8,2	Berkurang	Tidak Tercapai (-)
20. Rasio penduduk yang bekerja	90,64	90,64	90,68	90,9	91,8	Meningkat	Tercapai (+)
21. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	9,33	6,08	2,58	5,33	6,27	Meningkat	Tercapai (+)
22. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	52,8	52,8	58,35	N/A	N/A	Meningkat	Tercapai (+)
23. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	110.983			N/A	N/A	Berkurang	Tercapai (+)
24. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74	76	78	78,42	80,98	Meningkat	Tercapai (+)
25. Persentase PAD terhadap pendapatan	37,92	39,31	40,31	41,38	41,34	Meningkat	Tercapai (+)
26. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai (+)

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	
	2015	2016	2017	2018	2019	SPM/ Target Benchmark	Interpretasi
27. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85	89,2		N/A	86,7	Meningkat	Tercapai (+)
28. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	0,62	0,6	0,59	0,59	0,62	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
29. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	35,19	34,61	34,44	33,87	36,22	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
ASPEK DAYA SAING							
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp. 000)	93.944,40	92.466,84	95.332,88	103.121,62	110.787,04	Meningkat	Tercapai (+)
2. Nilai tukar petani	103,19	104,86	104,92	105,79	106,66	Meningkat	Tercapai (+)
3. Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	75,38	74,34	74,14	73,64	74,26	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
4. Produktivitas total daerah	46,46	49,29	44,53	43,57	45,62	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
5. Indeks keterbukaan ekonomi	0,12					Meningkat	Tidak Tercapai (-)
6. Angka kriminalitas (Crime rate) tertangani (%)	0,0192	0,0187	0,0654	0,0403	0,085	Berkurang	Tidak Tercapai (-)
7. Rasio ketergantungan (Dependency ratio)	41,06	41,11	41,77	42,13	42,49	Berkurang	Tidak Tercapai (-)
ASPEK PELAYANAN UMUM LAYANAN WAJIB							
1. Pendidikan							
1.1 Angka partisipasi kasar							
1.1.1 Angka Partisipasi Kasar SD	121,88	113,27	120,77	108,85	109,06	100%	Tercapai (+)
1.1.2 Angka Partisipasi Kasar SMP	92,54	92,7	103,68	95,72	97,17	100%	Tidak Tercapai (-)
1.1.3 Angka Partisipasi Kasar SMA	92,14	105	92,57	115,68	107,42	100%	Tercapai (+)
1.2 Angka Partisipasi Murni SD	99,99	99,6	105,46	98,93	98,72	100%	Tidak Tercapai (-)
1.3 Angka Partisipasi Murni SMP	91,61	91,14	84,09	84,98	84,16	100%	Tidak Tercapai (-)
1.4. Angka Partisipasi Murni SMA	90,3	96	67,89	71,04	70,37	100%	Tidak Tercapai (-)
2. Kesehatan							
2.1 Angka Kematian Bayi AKB) per 1000 kelahiran hidup	1,546	1,023	1,105	1,120	1,170	Berkurang	Tidak Tercapai (-)
2.2. Angka kelangsungan hidup bayi	0,9985	0,999	0,9989	0,9994	0,9945	Berkurang	Tercapai (+)
2.3 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	1,647	1,066	1,126	1,141	0,0605	Berkurang	Tercapai (+)

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	
	2015	2016	2017	2018	2019	SPM/ Target Benchmark	Interpretasi
2.4 Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	1,383	0,7673	1,0836	1,0145	0,989	Berkurang	Tercapai (+)
2.5 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	28,5	34,1	23,4	38	32,2	Berkurang	Tercapai (+)
2.6 Rasio posyandu per satuan balita	6,09	5,95	6,42	5,47	5,97	Meningkat	Tercapai (+)
2.7 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,16	0,12	0,13	0,15	0,16	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
2.8 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,014	0,014	0,015	0,015	0,015	Meningkat	Tercapai (+)
2.9 Rasio dokter per penduduk	0,0074	0,0261	0,0451	0,464	0,488	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
2.10 Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,0126	0,0303	0,0528	0,073	0,085	Meningkat	Tercapai (+)
2.11 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	100	100	100	100	100%	Tercapai (+)
2.12 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90,1	88,3	88	87,7	91,14	100%	Tidak Tercapai (-)
2.13 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	87,5	89,29	100	100%	Tidak Tercapai (-)
2.14 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100%	Tercapai (+)
2.15 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0,77	0,57	0,7	0,61	0,54	Berkurang	Tidak Tercapai (-)
2.16 Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	77	73,9	74,4	70,7	71,3	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
2.17. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	Berkurang	Tercapai (+)
2.18. Penderita diare yang ditangani	63,9	29,9	22,5	19,2	14,3	Berkurang	Tercapai (+)
2.19. Angka kejadian Malaria	0,002	0,005	0,005	0,002	0,002	Berkurang	Tercapai (+)
2.20. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,0002	0,0003	0,0002	0,001	0,001	Berkurang	Tercapai (+)
2.21. Cakupan kunjungan bayi	88,8	94,1	97,2	94,2	95,25	Meningkat	Tercapai (+)
2.22. Cakupan puskesmas	2,58	2,58	3,25	3,25	3,82	Meningkat	Tercapai (+)
2.23. Cakupan pembantu puskesmas	0,43	0,25	0,25	0,40	0,40	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
2.24. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	91,5	89	92,1	90,3	91,1	100%	Tidak Tercapai (-)
2.25. Cakupan pelayanan nifas	83,3	88,3	83,2	86,4	87,4	100%	Tidak Tercapai (-)

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	
	2015	2016	2017	2018	2019	SPM/ Target Benchmark	Interpretasi
2.25. Cakupan pelayanan anak balita	31,2	46,7	46,9	52,96	74,4	100%	Tidak Tercapai (-)
2.26. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	100	100	100	100%	Tercapai (+)
2.27. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100	100%	Tercapai (+)
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1. Pekerjaan Umum:							
3.1.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	94,99%	95,13%	95,32%	96,30%	96,17%	100%	Tidak Tercapai (-)
3.1.2. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	94,99%	95,13%	95,32%	78,74%	87,65%	100%	Tidak Tercapai (-)
3.1.3. Persentase penduduk berakses air minum	82,50%	92,86%	98,50%	99,63%	99,63%	100%	Tidak Tercapai (-)
3.1.4. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	39%	39%	42%	45,8%	51%	100%	Tidak Tercapai (-)
3.1.5. Persentase areal kawasan kumuh	0,9	0,9	0,59		12%	0%	Tidak Tercapai (-)
3.2. Penataan Ruang:							
3.2.1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	11,04%	11,15%	11,29%	13,2%	15%	30%	Tidak Tercapai (-)
3.2.2. Ketaatan terhadap RTRW	88.00%	89.00%	89.00%	89,71%	90,43%	100%	Tidak Tercapai (-)
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
4.1. Rasio rumah layak huni	NA	NA	100%	98,42%	97.75 %	100%	Tercapai (+)
4.2. Rasio permukiman layak huni	NA	NA	98%	23.88%	37.75%	100%	Tidak Tercapai (-)
4.3. Persentase pemukiman yang tertata	NA	NA	98%	100%	3.92%	100%	Tidak Tercapai (-)
4.4. Persentase lingkungan pemukiman kumuh	NA	NA	1%	29,51%	44,87%	0%	Tidak Tercapai (-)
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
5.1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	65	65	70	15%	100%	100%	Tercapai (+)
5.2 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100%	No Data	68%	73,6%	47%	100%	Tidak Tercapai (-)
5.3 Tingkat waktu tanggap (response time rate)	100%	No Data	68%	69,0%	80,3%	100%	Tidak Tercapai (-)

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	
	2015	2016	2017	2018	2019	SPM/ Target Benchmark	Interpretasi
daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)							
5.4 Persentase Penegakan PERDA	60	60	60	60	64	100%	Tidak Tercapai (-)
6. Sosial							
6.1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	32%	33%	34%	35%	36%	100%	Tidak Tercapai (-)
6.2. Persentase PMKS yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai (+)
6.4. Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sejenis	20	20	0	0	0	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
6.7. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	0%	No Data	100%	100%	100%	100%	Tercapai (+)
ASPEK PELAYANAN UMUM LAYANAN WAJIB							
1. Tenaga Kerja							
1.1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	7,12	10,56	10,71			Berkurang	Tidak Tercapai (-)
1.2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100	100	100	100	100	Berkurang	Tercapai (+)
1.3. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	81,58	42,67	42,75	119,21%	61%	40%	Tercapai (+)
1.4. Keselamatan dan perlindungan	99,1	92,33	92,33	92,33	92,33	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
1.4.1 Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada Tahun n	1,1	1,119	1,119	1,119	1,119	Meningkat	Tercapai (+)
1.5. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	91,04	91,19	91,23	91,33	91,42	50%	Tercapai (+)
1.5.1 1 pekerja/buruh JAMSOSTEK	136.192	145.167	145.268	150.105	155.103	Meningkat	Tercapai (+)
1.6. Besaran Pemeriksaan Perusahaan	48,03	45	46,42	47,88	49,39	45%	Tercapai (+)
1.7. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	83,82	33,91	34,98	37,03	39,21	50%	Tercapai (+)
1.8. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	78,5	54,96	96,15	96,29	97,53	60%	Tercapai (+)
1.9 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	53,33	36,92	80	82,74	85,57	Meningkat	Tercapai (+)

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	
	2015	2016	2017	2018	2019	SPM/ Target Benchmark	Interpretasi
1.10. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	64,29	61,35	100	100	100	60%	Tercapai (+)
1.11. Rasio lulusan S1/S2/S3	5,97	7,01	9,33	11,69	14,64	Meningkat	Tercapai (+)
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	55,75%	56,05%	55,71%	55,95%	56,71%	Meningkat	Tercapai (+)
2.1.1 Jumlah Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	7.214	7.036	6.317	6.118	6.095	Meningkat	Tercapai (+)
2.2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	16	18,8	18,8	18,8	18,8	Meningkat	Tercapai (+)
2.3 Jumlah Pekerja perempuan di lembaga swasta	157.346	172.226	160.842	163.132	165.454	Meningkat	Tercapai (+)
2.4. Rasio KDRT	0,04	0	0	148,75		Berkurang	Tercapai (+)
2.5. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100	100%	Tercapai (+)
2.6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100	100	100	100%	Tercapai (+)
2.7 Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu	230	259	270	288	303	Meningkat	Tercapai (+)
2.8 Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu	230	259	270	293	317	Meningkat	Tercapai (+)
2.9. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100	50%	Tercapai (+)

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	
	2015	2016	2017	2018	2019	SPM/ Target Benchmark	Interpretasi
2.10. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100	50%	Tercapai (+)
2.11 Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan	3	13	23	20	25	Meningkat	Tercapai (+)
2.12. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	75	75	89	97	100	100%	Tercapai (+)
3. Pangan							
3.1. Ketersediaan pangan utama	N/A	N/A	82,17			100	Tercapai (+)
3.2. Ketersediaan energi dan protein perkapita	N/A	N/A	91			90%	Tercapai (+)
3.3. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	N/A	N/A	80		70,5	80%	Tidak Tercapai (-)
4. Pertanian							
4.1 Penyelesaian kasus tanah Negara	75%	82	100	100	100	100	Tercapai (+)
5. Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							
5.1. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	1	1	2			Lengkap	Tercapai (+)
5.2. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	49,2	42	36,8	N/A	50,8	100	Tidak Tercapai (-)
5.3. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	82	82	82	N/A	75,8	100	Tidak Tercapai (-)
5.4. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	22,38	22,39	22,38	N/A	22,5	30	Tidak Tercapai (-)
5.5. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Sertifikat Adipura	Sertifikat Adipura	P1			Adipura	Tidak Tercapai (-)
5.6 Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai (+)
5.7 Timbulan sampah yang ditangani	60,29	61,26	47,51	N/A	64,40%	100	Tidak Tercapai (-)
5.8. Volume timbunan sampah yang ditangani	1.311.882	1.336.928	1.336.928			Meningkat	Tercapai (+)
5.9 Total timbunan sampah	2.175.777	2.182.316	2.813.796			Berkurang	Tidak Tercapai (-)
5.10 Persentase jumlah sampah yang tertangani	60,29%	37%	64%	84,67%	11,6%	100	Tidak Tercapai (-)
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
6.1. Cakupan penduduk ber-KTP per satuan	NA	NA	94,03%	89,67%	100%	100%	Tercapai (+)

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	
	2015	2016	2017	2018	2019	SPM/ Target Benchmark	Interpretasi
penduduk							
6.2. Cakupan bayi berakte kelahiran	NA	NA	66,33%	65,80%	57,77%	100%	Tidak Tercapai (-)
6.3. Cakupan pasangan berakte nikah	NA	NA	60,31%	60,29%	62,60%	100%	Tidak Tercapai (-)
6.4. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	NA	NA	94,03%	93,83%	97,39%	100%	Tidak Tercapai (-)
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
7.1. Persentase LSM aktif	48%	72%	42%	47%	49%	100%	Tidak Tercapai (-)
7.2 Jumlah LPM aktif	NA	NA	85%	85%	85%	100%	Tidak Tercapai (-)
7.3 Persentase PKK aktif	NA	NA	87%	87%	87%	100%	Tidak Tercapai (-)
7.4 Persentase Posyandu aktif	NA	NA	75%	75%	75%	100%	Tidak Tercapai (-)
7.5 Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat	No Data	No Data	40%	40%	40%	40%	Tidak Tercapai (-)
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
8.1. Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,73	1,7	1,69	1,32	1,41	<2	Tercapai (+)
8.2. Ratio Akseptor KB	81,01	81,1	76,89	76,89	76,89	Meningkat	Tercapai (+)
8.3 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	7,78	9,17	10,24	8,72%	8,72%	Meningkat	Tercapai (+)
8.4. Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	38.692	41.925	42.354	42.354	42.354	Berkurang	Tidak Tercapai (-)
8.5. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	28,26	30,93	31,04	29,11	29	Meningkat	Tercapai (+)
8.6. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	14,71	11,3	16,74	18,83	21,18	Meningkat	Tercapai (+)
8.7. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	53,53	80,6	78,74	77,32%	82,46	Meningkat	Tercapai (+)
8.8. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	52,66	70,8	72,37	73,97	87,54	Meningkat	Tercapai (+)
8.9. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	39,62	75,73	75,02	74,32	85,86	Meningkat	Tercapai (+)
8.10. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	0	0	25	25	25	Meningkat	Tercapai (+)

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	
	2015	2016	2017	2018	2019	SPM/ Target Benchmark	Interpretasi
8.11. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100	100	100	100	100	100.00	Tercapai (+)
8.12. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	84,41	84,19	86,61	87,74	88,89	100%	Tidak Tercapai (-)
8.13. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	146,43	148,21	151,79	154,55	157,34	Meningkat	Tercapai (+)
8.14. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	62,59	177,01	394,95	10%		Meningkat	Tercapai (+)
8.15. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	125	151,79	151,79	100	100	100%	Tercapai (+)
8.16. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	100	100	100	100	100%	Tercapai (+)
8.17. Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	26,39	27,22	35,86	42,12	49,46	100%	Tidak Tercapai (-)
9. Perhubungan							
9.1. Jumlah arus penumpang angkutan umum							
9.1.1. Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun	1.251.352	989.179	479.301	N/A	N/A	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
9.1.2. Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah	1.475.808	1.359.863	658.211	N/A	N/A	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
9.2. Rasio ijin trayek							
9.2.1. Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	2.357	1.673	655	544			
9.3. Jumlah uji kir angkutan umum	48.660	57.320	61.594	69.371	78.131	Meningkat	Tercapai (+)
9.4. Persentase layanan angkutan umum	29	30	32	33,62	35,32	Meningkat	Tercapai (+)
9.5 Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n	1.197	730	409				

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	
	2015	2016	2017	2018	2019	SPM/ Target Benchmark	Interpretasi
9.6 Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	180m2, 15 lokasi	250 m2, 4 lokasi, 558 m	2.058,36m2, 4 lokasi, 558 m				
9.7 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	2.727.160	2.349.042	1.137.152			Meningkat	Tidak Tercapai (-)
10. Komunikasi dan Informatika							
10.1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	N/A	16,67	16,67	17.07	17,38	Meningkat	Tercapai (+)
10.2. Cakupan Layanan Telekomunikasi	N/A	100	100	100	100	100	Tercapai (+)
10.2.1. Luas Wilayah Yang Tercoverage	N/A	210,49	210,49	210,49	210,49	Meningkat	
10.2.2. Luas Wilayah Keseluruhan	N/A	210,49	210,49	210,49	210,49	Meningkat	
11. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah							
11.1. Jumlah koperasi aktif	N/A	605	612	613	612	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
11.2. Persentase UKM non BPR/LKM aktif	N/A	987	1000			Meningkat	Tercapai (+)
11.3. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	N/A	2054	2.086	3.791	2.086	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
12. Penanaman Modal							
12.1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	340	375	217	1583	937	Meningkat	Tercapai (+)
12.1.1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	340	375	217	1583	937	Meningkat	Tercapai (+)
12.2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	9.892.062	32.558.856	16.499.936	8.024.803.604.800	7.240.583.700.991	Meningkat	Tercapai (+)
12.2.1. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	9.892.062	32.558.856	16.499.936	8.024.803.604.800	7.240.583.700.991	Meningkat	Tercapai (+)
12.3. Rasio daya serap tenaga kerja	0,93	0,94	0.95	0.26	3.88	1	Tidak Tercapai (-)
12.3.1. Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	4.300	5.366	4.061	2.440	4.310	Meningkat	Tercapai (+)
12.3.2. Jumlah seluruh PMA/PMDN	4.640	5.741	4.278	9.302	1.108	Meningkat	Tercapai (+)
12.4. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	24.592	46.201	53.200	59.584	62.724	Meningkat	Tercapai (+)
12.4.1. Realisasi PMDN Tahun evaluasi	6.731.169.465.836	8.688.493.310.596	10.014.889.796.981	2.674.864.900.000	4.086.281.800.000	Meningkat	Tercapai (+)

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	
	2015	2016	2017	2018	2019	SPM/ Target Benchmark	Interpretasi
12.4.2. Realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi	5.402.590.850.966	5.942.849.936.063	6.537.139.939.669	1.387.221.735.673	2.674.864.900.000	Meningkat	Tercapai (+)
12.4.3. Realisasi PMDN sebelum evaluasi	5.402.590.850.966	5.942.849.936.063	6.537.139.939.669	1.387.221.735.673	2.674.864.900.000	Meningkat	Tercapai (+)
13. Kepemudaan dan Olah Raga							
13.1.2. Jumlah seluruh organisasi pemuda	94	94	94	94	94	Meningkat	Tercapai (+)
13.3. Cakupan pembinaan olahraga	85,11	85,11	91,49	N/A	44	100	Tidak Tercapai (-)
13.6. Jumlah atlet berprestasi	0	19	26			Meningkat	Tercapai (+)
13.7. Jumlah prestasi olahraga	0	19	30			Meningkat	Tercapai (+)
14. Statistik							
14.1. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		100%	Tersedia	Tidak Tercapai (-)
14.2. Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai (+)
14.3. Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	Tercapai (+)
15. Persandian							
15.1. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	NA	NA	91.30	100%	100%	100%	Tidak Tercapai (-)
15.1.1. Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	NA	NA	42	42	42	100%	Tercapai (+)
15.1.2. jumlah total perangkat daerah	NA	NA	46	44	44	100%	Tercapai (+)
16. Kebudayaan							
16.1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya							
16.1.1. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya		13	16	17	17	Meningkat	Tercapai (+)
16.2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	47,06	47,06	11,59	100%	33,33%	100%	Tidak Tercapai (-)
16.2.1. Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	8	8	8	8	8	100%	Tercapai (+)
16.2.2. Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	17	17	69	69	69	100%	Tercapai (+)

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	
	2015	2016	2017	2018	2019	SPM/ Target Benchmark	Interpretasi
16.3. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	Tercapai (+)
16.3.1. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	8	8	8	8	8	100%	Tercapai (+)
17. Perpustakaan							
17.1. Prosentase jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,56	0,63	0,82	18,20	-39,61	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
17.1.1. Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	12.231	15.679	20.685	15.249	9.209	Meningkat	Tercapai (+)
17.1.2. Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	2.171.733	2.402.465	2.415.091	2.436.577	2.448.830	Meningkat	Tercapai (+)
17.2. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,27	0,278	0,281	0,287	0,289	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
17.2.1. Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	12.438	13.207	13.607	14.234	14.777	Meningkat	Tercapai (+)
17.2.2. Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	46.060	47.582	48.382	49.588	50.623	Meningkat	Tercapai (+)
17.3. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	12.231	15.679	20.685	15.249	9.209	Meningkat	Tercapai (+)
17.3.1. Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan/tahun	12.438	13.207	13.607	14.234	14.777	Meningkat	Tercapai (+)
18. Kearsipan							
18.1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	20,93	23,26	30,43	56,52	86,94	100	Tidak Tercapai (-)
Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	9	10	14	19	25	Meningkat	Tercapai (+)
Jumlah Perangkat Daerah	43	43	46	44	44	100%	Tercapai (+)
18.2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan	22	43	46	46	47	Meningkat	Tercapai (+)
URUSAN PILIHAN							
1. Pariwisata							
1.1.2 Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten/Kota	160.489	609.187	852.353	972.675	1.092.996	Meningkat	Tercapai (+)
1.2. Lama kunjungan Wisata (hari)	2	2	2	2	2	Meningkat	Tercapai (+)

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	
	2015	2016	2017	2018	2019	SPM/ Target Benchmark	Interpretasi
1.3. PAD sektor pariwisata	NA	0.016	0,0015	0.012	0.012	Meningkat	Tercapai (+)
1.3.1 PAD sektor pariwisata (Rp. Juta)	NA	264	308	245	302	Meningkat	Tercapai (+)
1.3.2 Total PAD (Rp. Juta)	NA	1.686.661	1.988.356	2.001.150	2.338.000	Meningkat	Tercapai (+)
2. Pertanian							
2.1. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	0.62	0.60	0.60	0,59	0,62	Stabil	Tercapai (+)
2.2. Produksi sektor pertanian (palawija)	NA	100,05	828,00	291,7	334,2	Meningkat	Tercapai (+)
2.3. Produksi sektor perkebunan (Biofarmaka)	NA	267	387	964	573	Meningkat	Tercapai (+)
5. Perdagangan							
5.1 Kontribusi Sektor Perdagangan	22	22	22	22	24	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
5.1. Ekspor Bersih Perdagangan	0.00	US\$174,7 juta	US\$239,2 juta	US\$ 348 juta	US\$ 357 juta	Meningkat	Tercapai (-)
5.1.1 Total ekspor		US\$357,9 juta	US\$417,6 juta	US\$ 567 juta	US\$ 652 juta	Meningkat	Tercapai (-)
5.1.2 Total import		US\$183,2 juta	US\$178,4 juta	US\$ 219,2 juta	US\$ 294,5 juta	Berkurang	Tidak Tercapai (-)
6. Perindustrian							
6.1. Kontribusi Sektor Industri	35	34	34	33	36	Meningkat	Tercapai (+)
6.1.1 Jumlah Industri	151	646	656	646	646	Meningkat	Tercapai (+)
6.1.2 Jumlah kelompok pengrajin							
1. Perencanaan Pembangunan							
1.1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai (+)
1.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai (+)
1.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai (+)
1.4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai (+)
1.5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	105	97	100	100	100	Tercapai (+)
1.6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	95	92	100	100	100	100.00	Tercapai (+)
1.7. Kesesuaian rencana pembangunan dengan	100	100	100	100	100	100.00	Tercapai (+)

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	
	2015	2016	2017	2018	2019	SPM/ Target Benchmark	Interpretasi
RTRW							
2. Keuangan							
2.1. Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai (+)
2.2. Persentase SILPA	NA	17,8508531	11,91	3,39		Berkurang	Tercapai (+)
2.5. Persentase belanja pendidikan (20%)	23	22	27	25,72	22,27	20.00	Tercapai (+)
2.6. Persentase belanja kesehatan (10%)	0,07	0,03	0,1	18,92	24,81	Meningkat	Tercapai (+)
2.7. Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	1,15	1,1	0,98	1,43	1,17	Meningkat	Tercapai (+)

2.5.2 Analisis Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 2018-2023

Analisis capaian kinerja Penyelenggaraan pemerintahan menggambarkan tingkat capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan pada RPJMD periode sebelumnya. Berikut merupakan capaian kinerja RPJMD Kota Bekasi tahun 2019 berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari 6 (enam) indikator kinerja untuk misi #1, sebanyak 5 (lima) indikator di antaranya berhasil menunjukkan capaian kinerja sesuai atau (bahkan) melebihi target tahunan yang ditetapkan. Namun terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023, dari 6 (enam) IKU masing-masing misi sebagai berikut yang sudah memenuhi/melewati target capaian kinerja, yaitu:

Tabel 2.79 Ketercapaian Kinerja Pemerintahan

MISI	TUJUAN-SASARAN	INDIKATOR TU- JUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	KONDISI 2019			CAPAIAN THD RPJMD
				TARGET	HASIL	CAPAIAN	
1.1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	64,36	65,86	66,05	100,29 %	89,86 %
1.1.1.	Meningkatnya akuntabilitas & profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	62,49	64,00	66,28	103,28 %	92,06 %
		Nilai hasil capaian IKK dlm EKPPD	3,1842	3,2193	3,3709	104,71 %	100,33 %
		Nilai kinerja pengelolaan keuangan (Opini BPK thd Laporan Keuangan)	WTP	WTP	WTP	100,00 %	100,00 %
		Persentase peningkatan PAD ²⁰	1.999.018.742.158,68	35,12 %	22,61 %	64,38 %	59,40 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik	78,33	79,00	80,33	100,09 %	96,78 %
	CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN MISI #1					95,46 %	89,74 %
2.1.	Meningkatkan ketersediaan PSU kota yg merata dan memenuhi standar layanan prima yg ramah gender, kreatif, aksesibel	Indeks Infrastruktur Wilayah (IIW)	N/A	25,96	35,63	137,25 %	137,25 %
2.1.1.	Meningkatnya ketersediaan prasarana yg berstandar prima, terintegrasi, berlanjut dan aksesibel	Indeks Prasarana Wilayah (IPW)	38,31	40,40	55,70	137,87 %	93,65 %
2.1.2.	Meningkatnya ketersediaan sarana yg berstandar prima, terintegrasi, berkesinambungan dan aksesibel	Indeks Sarana Wilayah (ISW)	27,41	28,52	23,84	83,59 %	36,69 %
2.1.3.	Meningkatnya ketersediaan utilitas yg berstandar prima, terintegrasi, berkesinambungan dan aksesibel	Indeks Utilitas Wilayah (IUW)	29,11	29,58	19,08	64,50 %	45,02 %
	CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN MISI #2					105,80 %	78,15 %

²⁰ Perhitungan dibuat dengan dasar Kondisi Awal (2018) nilai PAD sebesar Rp 1.999.018.742.158,68 dan Kondisi Akhir (2023) nilai PAD Rp 4.125.916.972.944,80 dengan target persentase peningkatan pertahun sebesar 35,12% pada tahun 2019; sebesar 11,67% pada tahun 2020; sebesar 11,57% pada tahun 2021; sebesar 10,57% pada tahun 2022; dan sebesar 10,89% pada tahun 2023. Rumus yang digunakan untuk menghitung peningkatan PAD ini adalah:

$$\text{Peningkatan PAD} = \frac{[\text{PAD tahun}_n] - [\text{PAD tahun}_{n-1}]}{[\text{PAD tahun}_{n-1}]} \times 100\%$$

MISI	TUJUAN-SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	KONDISI 2019			CAPAIAN THD RPJMD
				TARGET	HASIL	CAPAIAN	
3.1.	Memperkuat struktur perekonomian kota dgn fokus pengembangan pada ekonomi kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,73 %	5,73 %	5,86 %	102,27 %	90,15 %
3.1.1	Meningkatnya iklim usaha dan investasi	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	Rp 10.460.053.504.800	Rp 11.506.058.855.280 (+10,00 %)	Rp 7.822.147.070.999 (-25,33 %)	68,50 %	46,43 %
3.1.2	Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif	Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif ²¹	N/A	6,00 %	7,64 %	127,30 %	50,93 %
3.1.3	Memperkuat daya saing sektor perdagangan dan jasa	Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa	Rp 32.482.110,00 juta (th 2017)*	6,00 %	8,84 %	147,33 %	147,33 %
3.1.4	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Daya Beli (IDB)	83,29	84,01	-	100,00 %	100,00 %
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN MISI #3						109,08 %	86,97 %
4.1.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas & berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,33	80,93	81,04	101,36 %	98,67 %
4.1.1	Tercapainya masyarakat yg berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif	Indeks Pendidikan	74,59	75,23	75,19*	99,95 %	96,66 %
4.1.2	Tercapainya masyarakat Kota Bekasi yang sehat	Indeks Kesehatan	75,21	75,39	84,05*	111,49 %	110,43 %
4.1.3	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Angka Kemiskinan	4,2	N/A	4,11*	100,00 %	100,00 %
4.1.4	Menurunnya angka pencari kerja	Pencari Kerja yang Ditempatkan	N/A	13.500 (9,07%)	13.500 (9,07%)	100,00 %	35,07 %
4.1.5	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah Prestasi Pemuda tk Provinsi, Nasional dan Internasional	N/A	10 TP dan 2 TN	20 TP dan 19 TN	325,00 %	95,12 %
4.1.6	Terbangunnya masyarakat yang religius dan berakhlak mulia	Indeks Toleransi (Beragama)	5,89	5,917	5,890	99,54 %	97,76 %
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN MISI #4						133,91 %	90,53 %
5.1.	Mewujudkan Kota Bekasi yg tertib dan aman	Indeks Keamanan dan Ketertiban	0,37	0,37	-	102,80 %	102,80 %
		Indeks Risiko Bencana	132	132	131,60	99,70 %	116,46 %
5.1.1	Terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase Penurunan Jml Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban	45,00 %	6,00 %	7,20 %	120,00 %	73,50 %
		Kasus Perselisihan SARA & Kelompok Masyarakat yg Berhasil Diselesaikan	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
5.1.2	Terwujudnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	132	132	131,60	99,70 %	116,46 %

²¹ Data bersumber pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISDAGPERIN) Kota Bekasi, lihat Tabel 3.31 Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang Mendukung Indikator Kinerja Utama Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laporan Kinerja (LKJ) Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2019.

MISI	TUJUAN-SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	KONDISI 2019			CAPAIAN THD RPJMD
				TARGET	HASIL	CAPAIAN	
5.2.	Mewujudkan Kota Bekasi yang nyaman	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	47,15	49,00	-	-	-
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN MISI #5						105,63 %	98,19 %

Sumber data : Evaluasi RPJMD 2018-2023, yang dikelola dalam SIPD 2019

Faktor penyebab terpenuhinya atau terlampauinya target kinerja program, antara lain:

Tabel 2.80 Faktor Keberhasilan Terpenuhinya Atau Terlampauinya Target Kinerja Program

No	Indikator Kinerja	Faktor Keberhasilan
1	Opini BPK terhadap akuntabilitas keuangan daerah	Adanya transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan kerangka kerja sesuai dengan aturan yang berlaku
2	Kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap dokumen rencana pembangunan	Adanya keselarasan perencanaan pembangunan tingkat kota sampai PD
3	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Adanya optimalisasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan utilitas perkotaan
4	Pelayanan kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Adanya optimalisasi program peningkatan fasilitas penerangan jalan umum (PJU)
5	Rumah layak huni	Keberhasilan dalam program Pengembangan Perumahan
6	Rasio kapasitas TPU terhadap Jml penduduk (m2/jiwa)	Keberhasilan dalam Program pengelolaan areal pemakaman
7	Penyimpangan pemanfaatan ruang	Optimalisasi pelaksanaan kebijakan Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Bekasi 2011 – 2031
8	Cakupan pelayanan Air minum	Menjalankan kerjasama dengan PDAM Tirta Patriot dan PDAM Tirta Bagasasi dalam upaya pengawasan kualitas air minum, pengawasan kualitas air sumur dan depot air minum. Pengawasan dan Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) melalui e-monev Hygiene Sanitasi Pangan (HSP).
9	Angka Rata-rata lama sekolah	Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam program Wajib Belajar 12 tahun dan program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan sudah tepat dan memberikan hasil yang optimal.
10	APM SD/ sederajat	Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam program Wajib Belajar 12 tahun dan program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan sudah tepat dan memberikan hasil yang optimal.
11	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam program Wajib Belajar 12 tahun dan program

No	Indikator Kinerja	Faktor Keberhasilan
		Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan sudah tepat dan memberikan hasil yang optimal.
12	Angka harapan hidup	Adanya peningkatan pelayanan kesehatan
13	Prevalensi balita gizi buruk	Adanya peningkatan pelayanan kesehatan
14	Persentase Pasangan Usia Subur ber KB	Adanya peningkatan pelayanan kesehatan
15	Pemuda pelopor yang berprestasi	Keberhasilan dalam program : • Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan • Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga • Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga
16	Cabang Olahraga Berprestasi	Keberhasilan dalam program : • Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan • Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga • Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga
17	Laju Peningkatan investasi	Keberhasilan dalam program : • Program peningkatan pelayanan perizinan • Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
18	Laju inflasi	Tidak terjadi kelonjakan harga pangan di Kota Bekasi, hal ini dikarenakan oleh pelaksanaan kegiatan Bazaar yang Dinas Ketahanan Pangan
19	Koperasi aktif	• Keberhasilan dalam melakukan sosialisasi perkoperasian dilingkungan masyarakat • Tingginya minat/animo masyarakat membangun ekonomi rakyat dalam bentuk badan hukum koperasi • Program kegiatan penataan badan hokum sebagai jalan baik sehingga peningkatan jumlah koperasi lebih tinggi dibandingkan dengan koperasi yang tidak aktif, dan pemacuan terhadap peningkatan kualitas koperasi dilaksanakan secara optimal • Perhatian pemerintah daerah dalam menunjang tumbuh kembangnya koperasi di Kota Bekasi, melalui penyediaan anggaran yang terus bertambah
20	Pasar Tradisional Modern dan UMKM Center	Tidak ada penjelasan
21	Penanganan bencana alam	Keberhasilan dalam program : • Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran • Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan • Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

No	Indikator Kinerja	Faktor Keberhasilan
22	Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat	Keberhasilan dalam program : • Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan • Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan

Sumber data : yang dikelola dalam SIPD 2018

Adapun ketidaktercapaian indikator kinerja RPJMD periode sebelumnya disebabkan oleh faktor-faktor sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.81 Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program dan Pemecahan Masalahnya.

No.	Indikator Kinerja	Faktor Penyebab	Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	*Target IKM pada LKPJ tahun 2017 (76) lebih rendah dibandingkan target IKM pada RPJMD tahun 2017 (78). Hal ini menyebabkan tidak terdapat penjelasan mengenai faktor penyebab tidak tercapainya indikator IKM	
2	Cakupan Pelayanan Administrasi kependudukan	Masih ada yang belum melakukan perekaman KTP-elektronik dan masih ada yang KTP-elektronik yang belum dicetak	Melakukan sosialisasi dan jemput bola
3	Tingkat Tanggap Waktu (Respon Time Rate) Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Terbatasnya SDM (Petugas Pemadam Kebakaran)	• Penambahan Personil 256 Orang dan Ruang Simulator untuk Melatih Kemampuan Personil, Ruang Sarana dan Alat-alat Olahraga • Peningkatan Profesional Sopir agar Kendaraan Tidak Cepat Rusak • Peningkatan Kualifikasi SDM (Pelatihan Teknis Damkar) • Peningkatan Kesejahteraan Pasukan Pemadam Kebakaran
4	Luasan Ruang Terbuka Hijau	*Target Luasan RTH pada LKPJ tahun 2017 (11%) lebih rendah dibandingkan target Luasan RTH pada RPJMD tahun 2017 (11,48%). Hal ini menyebabkan tidak terdapat penjelasan mengenai faktor penyebab tidak tercapainya indikator IKM	
5	Perolehan Adipura	Biaya yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan masih belum memenuhi kebutuhan ideal untuk menunjang pelayanan yang optimal untuk mencapai perolehan adipura	Meningkatkan kinerja pengolahan sampah di TPA dan penanganan sampah liar di wilayah dan perlu segera dilakukan langkah-langkah yang menunjang kegiatan untuk memperoleh adipura dengan disertai anggaran yang cukup
6	Persentase penanganan sampah	Telah penuhnya TPA sumur batu dan belum tersedianya Zona buangan di	• pembebasan lahan untuk pengembangan TPA dan

No.	Indikator Kinerja	Faktor Penyebab	Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab
		TPA	konstruksi Zona pengembangan. • Meningkatkan pengolahan sampah di masyarakat. • Meningkatkan ritase pengangkutan dari sumber ke TPA
7	Ketersediaan Prasarana sarana perhubungan	Kurangnya pemeliharaan dan perawatan terminal induk, kurangnya shelter sarana penunjang retribusi parkir dan terminal	• Penataan lingkungan kerja terminal induk • Pembangunan shelter dan pengadaan sarana penunjang retribusi parkir dan terminal
8	Ketersediaan prasarana sarana lalu lintas	• Sarana lalu lintas (rambu, marka, petunjuk arah, traffic light dan lainnya) yang belum berfungsi dengan baik • penempatan petugas lalu lintas pada ruas jalan arteri dan kolektor yang belum memadai	Adanya fasilitas sarana lalu lintas (rambu, marka, petunjuk arah, traffic light dan lainnya) serta penempatan penempatan petugas lalu lintas pada ruas jalan arteri dan kolektor
9	Peningkatan pengunjung perpustakaan daerah per tahun	*Target peningkatan pengunjung perpustakaan pada LKPJ tahun 2017 (30% setara dengan 3.340 orang) lebih rendah dibandingkan target peningkatan pengunjung perpustakaan pada RPJMD tahun 2017 (30% setara dengan 19.000 orang). *Terdapat keanehan pada target capaian pada akhir periode RPJMD dimana target yang diberikan tidak masuk akal. Kondisi awal 2.569 orang sedangkan target akhir 19.000 orang. Hal ini menyebabkan tidak terdapat penjelasan mengenai faktor penyebab tidak tercapainya indikator IKM	Perlu ditelaah kembali untuk target RPJMD periode berikutnya
10	Angka kematian ibu melahirkan	Tingkat kesadaran ibu hamil masih kurang	Gerakan Sayang Ibu, RW Siaga dan P4K.
11	Partisipasi perempuan di lembaga legislatif tingkat Kota	Belum adanya Pilkada yang dilangsungkan di Kota Bekasi sehingga capaian setiap tahun masih sama	Pilkada akan dilaksanakan di tahun 2018 sehingga diharapkan capaian indikator program dapat meningkat
12	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	*Target penanganan PMKS pada LKPJ tahun 2017 (62%) lebih rendah dibandingkan target penanganan PMKS pada RPJMD tahun 2017 (86%). Hal ini menyebabkan tidak terdapat penjelasan mengenai faktor penyebab tidak tercapainya indikator IKM	
13	Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih	Penetapan target peningkatan nilai ekspor dirasa terlalu tinggi melebihi laju pertumbuhan ekonomi	Target pada RPJMD hampir tidak mungkin untuk dicapai. Namun Disdagperin berusaha untuk tetap meningkatkan nilai ekspor melalui jejaring eksportir, dan kebijakan untuk melakukan pendataan dan

No.	Indikator Kinerja	Faktor Penyebab	Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab
			pemblokiran terhadap pelaku usaha yang mengurus SKA di Kota Bekasi namun mendaftarkan ekspor di luar Kota Bekasi
14	UMKM Produktif	Tidak ada penjelasan	
15	Angka Pengangguran Terbuka	• Kelulusan SLTA yang sederajat banyak yang tidak dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan memerlukan biaya besar • Penempatan tenaga kerja di sektor formal terbatas • Pencari kerja untuk dapat mengisi lowongan pekerjaan sesuai yang dibutuhkan, tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan • Keterampilan yang dimiliki pencari, kualitas dan pendidikan yang masih rendah • Jumlah pencari kerja dibanding dengan kesempatan kerja yang tersedia tidak seimbang	• Peningkatan keterampilan kerja para pencari kerja • Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri baik melalui program Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) • Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja luar negeri • Pengembangan dan perluasan lapangan kerja sektor informal/usaha mandiri melalui pengembangan dan pemberian fasilitas yang mendorong sistem kewirausahaan • Perpindahan penduduk melalui program transmigrasi • Melalui Bursa Kerja Khusus (BKK) yang dikelola oleh satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. • Mengadakan Job Fair (bursa kerja)

2.5.3 Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Analisis Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan secara umum bermaksud untuk menganalisis ketercapaian Tujuan, Target, dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Implementasi TPB di Indonesia untuk pencapaian 17 goals dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Analisis pencapaian TPB di Kota Bekasi dilakukan dengan menyandingkan antara target/indikator TPB yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 dan Perpres 59/2017 dengan data TPB Kota Bekasi, sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori :

- 1) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS
- 2) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB

3) Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA

Berdasarkan hasil analisis capaian TPB yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Kota Bekasi adalah 15 TPB (TPB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, dan 17) dan TPB yang tidak sesuai dengan kewenangan dan kondisi Kota Bekasi adalah TPB 7 (energi bersih dan terjangkau), dan TPB 14 (ekosistem laut), sedangkan Jumlah indikator yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Kota Bekasi sebanyak 183 indikator. Indikator yang tersedia datanya adalah sebanyak 88 indikator dari Indikator yang tersedia datanya sebanyak 49 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, sebanyak 39 indikator belum mencapai target nasional (SB) dan sebanyak 95 indikator belum memiliki data (NA). Secara rinci analisis pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di Kota Bekasi akan diuraikan sebagai berikut:

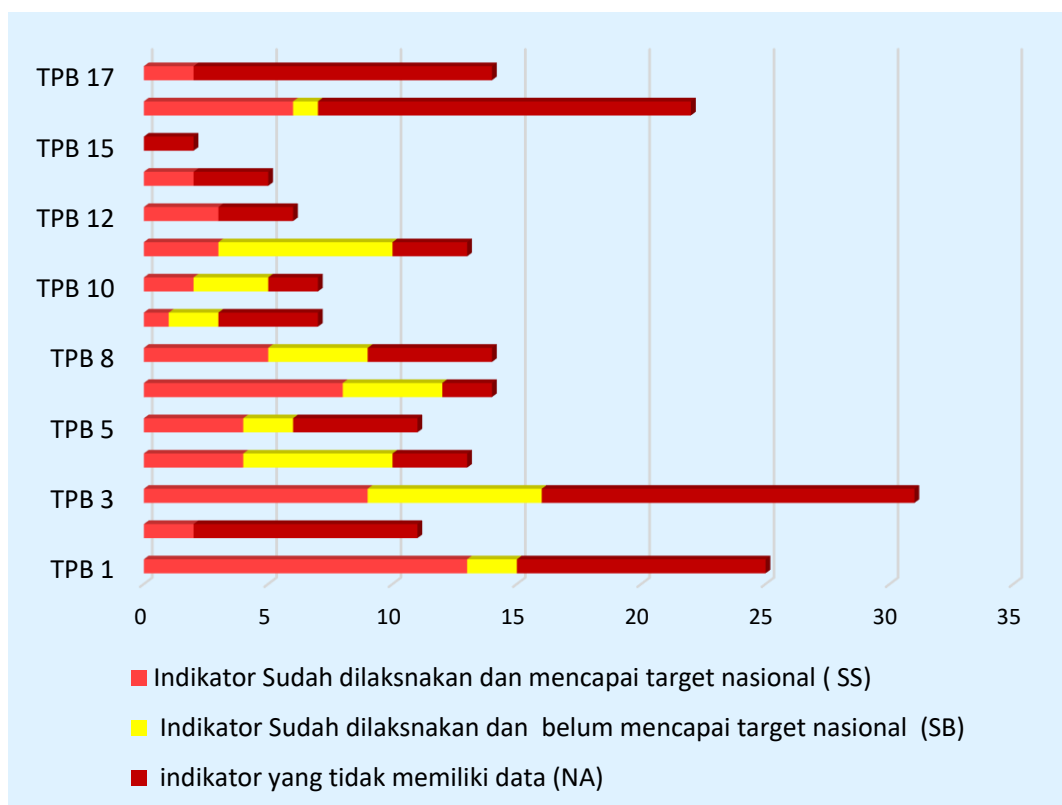
1. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional (SS)

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) di Kota Bekasi sebanyak 50 indikator pada KLHS yang tervalidasi 2019 dan KLHS perubahan RPJMD sebanyak 64 indikator. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2.82 Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kota Bekasi

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	JUMLAH INDIKATOR	SS
1	Tanpa Kemiskinan	25	13
2	Tanpa Kelaparan	11	2
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	31	9
4	Pendidikan Berkualitas	13	4
5	Kesetaraan Gender	11	4
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	14	8
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	14	5
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	7	1
10	Berkurangnya Kesenjangan	7	2
11	Menjadi Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	13	3
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	6	3
13	Penanganan Perubahan Iklim	5	2
15	Ekosistem Daratan	2	0
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	22	6
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	14	2
Total		195	64

Sumber: LAKIP Sektor 2019, SAKIP 2019, LKPJ 2013-2018 dan Hasil Analisis Tahun 2020



Sumber: LAKIP Sektor 2018, SAKIP 2018, LKPJ 2013-2018 dan Hasil Analisis Tahun 2020

Gambar 2-67 Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kota Bekasi

2. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target Nasional (SB)

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional (SB) di Kota Bekasi sebanyak 42 indikator pada KLHS yang tervalidasi 2019 dan KLHS perubahan RPJMD sebanyak 38 indikator. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2.83. Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan tapi Belum Mencapai Target Nasional di Kota Bekasi

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	JUMLAH INDIKATOR	SB
1	Tanpa Kemiskinan	25	2
2	Tanpa Kelaparan	11	0
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	31	7
4	Pendidikan Berkualitas	13	6
5	Kesetaraan Gender	11	2
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	14	4

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	JUMLAH INDIKATOR	SB
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	14	4
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	7	2
10	Berkurangnya Kesenjangan	7	3
11	Menjadi Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	13	7
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	6	0
13	Penanganan Perubahan Iklim	5	0
15	Ekosistem Daratan	2	0
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	22	1
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	14	0
Total		195	38

Sumber: LAKIP Sektor 2018, SAKIP 2019, LKPJ 2013-2018, dan Hasil Analisis, Tahun 2020

Gambar 2-67 Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan tapi Belum Mencapai Target Nasional di Kota Bekasi

3. Indikator yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional, dan Indikator yang Tidak Memiliki Data (BB & NA);

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB) dan indikator yang tidak memiliki data (NA) di Kota Bekasi sebanyak 93 indikator perubahan RPJMD sebanyak 64 indikator. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2.84 Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional, dan Indikator yang Tidak Memiliki Data di Kota Bekasi

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	JUMLAH INDIKATOR	NA/NN
1	Tanpa Kemiskinan	25	10
2	Tanpa Kelaparan	11	9
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	31	15
4	Pendidikan Berkualitas	13	3
5	Kesetaraan Gender	11	5
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	14	2
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	14	5
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	7	4
10	Berkurangnya Kesenjangan	7	2

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	JUMLAH INDIKATOR	NA/NN
11	Menjadi Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	13	3
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	6	3
13	Penanganan Perubahan Iklim	5	3
15	Ekosistem Daratan	2	2
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	22	15
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	14	12
Total		195	93

Sumber: LAKIP Sektor 2018, SAKIP 2018, LKPI 2013-2018, dan Hasil Analisis, Tahun 2020

Gambar 2-68 Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional, dan Indikator yang Tidak Memiliki Data (BB dan NA) di Kota Bekasi

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan gambaran pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Bekasi terdiri dari:

- 1) Indikator TPB yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Kota Bekasi adalah 15 tujuan (tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, dan 17).
- 2) Indikator TPB yang tidak sesuai dengan kewenangan dan kondisi Kota Bekasi adalah tujuan 7 (energi bersih dan terjangkau), dan tujuan 14 (ekosistem laut).
- 3) Jumlah indikator yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Kota Bekasi sebanyak 183 indikator. Indikator yang tersedia datanya adalah sebanyak 91 indikator, dengan kategori sebagai berikut:
 - Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) sebanyak 50 indikator.
 - Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (SB) sebanyak 42 indikator.
 - Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB) dan indikator yang belum memiliki data (NA) sebanyak 91 indikator.

Lebih jelasnya mengenai Capaian TPB di Kota Bekasi dapat di lihat pada tabel capaian jumlah indikator TPB Kota Bekasi Terhadap Target Nasional.

Tabel 2.85 Capaian Jumlah Indikator TPB Kota Bekasi Terhadap Target Nasional

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	JUMLAH INDIKATOR	SS	SB	NA/NN
1	Tanpa Kemiskinan	25	13	2	10
2	Tanpa Kelaparan	11	2	0	9

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	JUMLAH INDIKATOR	SS	SB	NA/NN
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	31	9	7	15
4	Pendidikan Berkualitas	13	4	6	3
5	Kesetaraan Gender	11	4	2	5
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	14	8	4	2
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	14	5	4	5
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	7	1	2	4
10	Berkurangnya Kesenjangan	7	2	3	2
11	Menjadi Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	13	3	7	3
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	6	3	0	3
13	Penanganan Perubahan Iklim	5	2	0	3
15	Ekosistem Daratan	2	0	0	2
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	22	6	1	15
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	14	2	0	12
Total		195	64	38	93

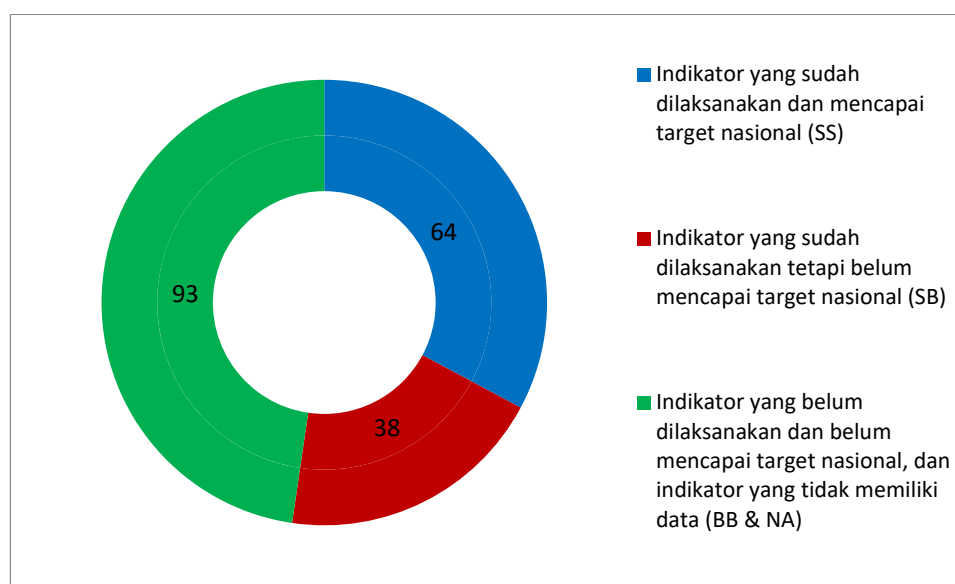
Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2020

Kota Bekasi masih menghadapi tantangan yang panjang dalam pencapaian indikator TPB. Hal ini didasarkan atas capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kota Bekasi yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional baru mencapai 27,32% (50 indikator) dari total 183 indikator dan pada tahun 2020 mencai 32.82 % (64 indikator) dari total 195 indikator yang menjadi kewenangan kota. Capaian indikator TPB Kota Bekasi terhadap target nasional diperoleh proporsi seperti dalam tabel dan gambar di bawah ini:

Tabel 2.86 Capaian Indikator TPB Kota Bekasi Terhadap Target Nasional

No.	Kriteria	Jumlah Indikator	Prosentase (%)
1	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	64	32.82%
2	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	38	19.49%
3	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	93	47.69%
Total indikator yang menjadi kewenangan Kota Bekasi		195	100,00

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2018



Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2020

Gambar 2-68 Persentase Capaian Jumlah Indikator TPB Terhadap Target Nasional

A. Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Bekasi

Daya Dukung Air

• Ketersediaan Air

Berdasarkan dari data curah hujan tahunan di Kota Bekasi yaitu sebesar 2.723 mm/tahun (Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2018). Dari nilai curah hujan maka dengan menggunakan pendekatan *water balance* dapat dihitung potensi ketersediaan air di Kota Bekasi untuk kondisi eksisting (tahun 2017). Perhitungan dari potensi ketersediaan air di Kota Bekasi berdasarkan tata guna lahan eksisting tahun 2017. Dari data luasan tutupan lahan di Kota Bekasi tersebut maka tutupan lahan paling luas adalah permukiman dan pusat kegiatan. Hal ini memperlihatkan bahwa Kota Bekasi menjadi pusat kegiatan perkotaan dan permukiman penduduk.

Untuk hasil perhitungan potensi sumber daya air di Kota Bekasi dengan menggunakan rumus neraca air konvensional dimana terdapat pengaruh dari jenis tutupan lahan terhadap infiltrasi maupun *run off*, maka secara lengkap disajikan neraca air per jenis penggunaan lahan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.87 Potensi Ketersediaan Air di Kota Bekasi Menurut Luasan Eksisting

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luasan (km ²)	Luasan (m ²)	Nilai C*	IK	R (L/detik)	I (L/detik)
1	Danau/Situ	0,15	145.516	0	1	-	23,87
2	Gedung/Bangunan	1,00	995.896	0,65	0,35	106,19	57,18
3	Perkebunan/Kebun	20,88	20.880.408	0,3	0,7	1.027,53	2.397,58
4	Permukiman dan Tempat Kegiatan	121,05	121.052.858	0,65	0,35	12.906,97	6.949,91
5	Sawah	26,47	26.471.763	0,1	0,9	434,23	3.908,06

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luasan (km ²)	Luasan (m ²)	Nilai C*	IK	R (L/detik)	I (L/detik)
6	Sawah Tadah hujan	0,10	95.846	0,1	0,9	1,57	14,15
7	Semak Belukar	1,72	1.723.366	0,25	0,75	70,67	212,02
8	Tanah Kosong	26,40	26.397.831	0,35	0,65	1.515,56	2.814,61
9	Tegalan/Ladang	14,31	14.307.343	0,2	0,8	469,38	1.877,52
10	Vegetasi Non Budidaya Lainnya	0,07	70.704	0,2	0,8	2,32	9,28
TOTAL		212,14	212.141.530	2,80	7,20	16.534,4	18.264,2

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2018

Tabel 2.88 Potensi Ketersediaan Air di Kota Bekasi Menurut Luasan Rencana Pola Ruang

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luasan (km ²)	Luasan (m ²)	Nilai C*	IK	R (L/detik)	I (L/detik)
1	Campuran	15,90	15.896.874	0,2	0,8	521,53	2.086,11
2	Danau	0,21	209.047	0	1	-	34,29
3	Gardu Induk	0,15	152.054	0,65	0,35	16,21	8,73
4	Industri Besar	9,27	9.274.009	0,9	0,1	1.369,13	152,13
5	Industri Kecil	0,09	89.297	0,5	0,5	7,32	7,32
6	Industri Menengah	4,20	4.200.244	0,7	0,3	482,29	206,70
7	IPAL	0,12	122.676	0	1	-	20,12
8	IPLB3	0,03	29.247	0	1	-	4,80
9	Jalan Arteri Primer	1,02	1.022.925	0,85	0,15	142,63	25,17
10	Jalan Arteri Sekunder	0,25	254.855	0,85	0,15	35,53	6,27
11	Jalan Baru	0,37	370.936	0,85	0,15	51,72	9,13
12	Jalan Kereta	0,08	78.994	0,85	0,15	11,01	1,94
13	Jalan Kolektor Primer	0,45	451.555	0,85	0,15	62,96	11,11
14	Jalan Kolektor Sekunder	0,21	211.823	0,85	0,15	29,53	5,21
15	Jalan Lokal	14,64	14.640.362	0,85	0,15	2.041,30	360,23
16	Jalan Tol	1,70	1.701.082	0,85	0,15	237,18	41,86
17	Kawasan Lindung Cagar Budaya	0,01	14.256	0,65	0,35	1,52	0,82
18	Komersial Skala Kawasan	9,63	9.628.952	0,65	0,35	1.026,66	552,82
19	Komersial Skala Kecamatan	0,72	723.444	0,65	0,35	77,14	41,53
20	Komersial Skala Regional/Kota	8,10	8.102.184	0,65	0,35	863,88	465,16
21	Pelebaran Jalan	1,46	1.457.169	0,85	0,15	203,17	35,85
22	Perkantoran Pemerintah	0,73	727.401	0,65	0,35	77,56	41,76
23	Pertahanan dan Keamanan	0,77	771.905	0,65	0,35	82,30	44,32
24	Pertambangan	0,04	39.394	0,65	0,35	4,20	2,26
25	Perumahan Kepadatan Rendah	13,65	13.645.800	0,4	0,6	895,35	1.343,03
26	Perumahan Kepadatan Sedang	34,75	34.748.301	0,5	0,5	2.849,96	2.849,96
27	Perumahan Kepadatan	68,63	68.632.807	0,6	0,4	6.754,90	4.503,27

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luasan (km ²)	Luasan (m ²)	Nilai C*	IK	R (L/detik)	I (L/detik)
28	Perumahan RTH Jalur Hijau Kepadatan Tinggi	0,00	238	0,6	0,4	0,02	0,02
29	Perumahan RTH Jalur Hijau Kepadatan Tinggi	0,00	778	0,6	0,4	0,08	0,05
30	RTH Jalur Hijau	1,13	1.134.496	0,15	0,85	27,91	158,18
31	RTH Pulau Jalan	0,00	164	0,15	0,85	0,00	0,02
32	RTH Kota	2,80	2.801.704	0,15	0,85	68,94	390,64
33	RTH Rekreasi	0,00	1.023	0,15	0,85	0,03	0,14
34	RTH Sabuk Hijau (Buffer)	0,33	332.946	0,15	0,85	8,19	46,42
35	RTH Taman Kecamatan	1,18	1.175.797	0,15	0,85	28,93	163,94
36	RTH Taman Kelurahan	0,69	689.062	0,15	0,85	16,95	96,08
37	Sarana Kesehatan	0,06	57.679	0,65	0,35	6,15	3,31
38	Sarana Pendidikan	2,08	2.077.803	0,65	0,35	221,54	119,29
39	Sarana Peribadatan	0,48	484.601	0,65	0,35	51,67	27,82
40	Sarana Rekreasi dan Olahraga	0,41	409.818	0,65	0,35	43,70	23,53
41	Sarana Sosial dan Budaya	0,02	23.414	0,65	0,35	2,50	1,34
42	Sarana Transportasi	0,14	144.607	0,65	0,35	15,42	8,30
43	Sempadan Jalan Kereta	0,32	317.856	0,35	0,65	18,25	33,89
44	Sempadan Situ/Danau	0,11	109.314	0,35	0,65	6,28	11,66
45	Sempadan Sungai	4,96	4.957.100	0,35	0,65	284,60	528,54
46	Sempadan SUTET	1,87	1.870.803	0,35	0,65	107,41	199,47
47	Situ	0,24	238.955	0	1	-	39,20
48	Sungai dan Saluran	2,33	2.331.922	0	1	-	382,52
49	Tampung Air	0,43	431.787	0	1	-	70,83
50	TPA	2,09	2.087.661	0,35	0,65	119,86	222,59
51	TPU	1,61	1.612.877	0,3	0,7	79,37	185,20
52	(blank)	0,00	0	1	0	0,00	-
TOTAL		210,49	210.490.00	25,85	26,15	18.952,79	15.574,89

Sumber: Rencana Pola Ruang Kota Bekasi Tahun, 2018

Dengan melihat hasil analisa potensi ketersediaan air di Kota Bekasi dapat dilihat bahwa berdasarkan luasan tata guna lahan eksisting dan luasan guna lahan pola ruang RTRW Kota Bekasi terdapat perubahan persentase infiltrasi dan *run off*.

Dimana menurut luasan guna lahan eksisting, nilai *run off* sebesar 47,5% (16.534,4 L/detik) sedangkan infiltrasi sebesar 52,5% (18.264,2 L/detik). Jika menurut luasan guna lahan dari rencana pola ruang RTRW Kota Bekasi tersebut maka nilai *run off* sebesar 54,9% (18.592,8 L/detik) sedangkan infiltrasi sebesar 45,1% (15.574,9 L/detik). Terjadi

peningkatan nilai *run off* sebesar 7,4%, hal ini memperlihatkan bahwa terjadi air larian akibat peningkatan lahan terbangun dari rencana pola ruang Kota Bekasi.

Hal ini mengakibatkan potensi ketersediaan air permukaan lebih besar dibandingkan potensi ketersediaan air tanah. Perlu adanya peningkatan pengelolaan terhadap air permukaan di masa mendatang di Kota Bekasi karena banyaknya perubahan lahan menjadi lahan terbangun.

- **Kebutuhan Air**

Untuk memenuhi kebutuhan air secara minimal yang harus dipenuhi untuk setiap masyarakat Kota Bekasi. Asumsi kebutuhan air dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal pada Permen PU 01/2014 bahwa kebutuhan air bersih domestik minimal yaitu 60 Liter/orang/hari, sedangkan asumsi 20% untuk kebutuhan air bersih non domestik (sekolah, kantor, tempat ibadah, dll). Kebutuhan perkapita untuk air bersih domestik dan non domestik tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk pada setiap kecamatan di Kota Bekasi. Asumsi untuk kebutuhan air dengan melihat kondisi kebocoran air dari pelayanan PDAM sebesar 25% dari kebutuhan air domestik. Adapun untuk jumlah kebutuhan air di Kota Bekasi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.89 Kebutuhan Air di Kota Bekasi

TAHUN	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Air Domestik		Kebutuhan Air Non Domestik	
		L/hari	L/detik	L/hari	L/detik
2021	3.253.179	337.354.688	3.904,57	101.206.406	1.171,37
2026	3.750.804	438.844.071	5.079,21	131.653.221	1.523,76
2031	4.325.535	588.272.783	6.808,71	176.481.835	2.042,61

Lanjutan Tabel Kebutuhan Air di Kota Bekasi

TAHUN	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebocoran 25%		TOTAL	
		L/hari	L/detik	L/hari	(L/detik)
2021	3.253.179	109.640.273,47	1.268,98	548201367,36	6.344,92
2026	3.750.804	142.624.323,15	1.650,74	713121615,74	8.253,72
2031	4.325.535	191.188.654,33	2.212,83	955943271,66	11.064,16

Sumber: Hasil Analisis, 2018

- **Status Daya Dukung Air**

Evaluasi ketersediaan dan kebutuhan air bertujuan untuk mengetahui apakah air yang tersedia dari debit curah hujan mencukupi untuk kebutuhan pemakaian air oleh masyarakat

di Kota Bekasi baik untuk domestik maupun non domestik. Adapun uraian dari ketersediaan air dan kebutuhan air di Kota Bekasi didapat dari nilai rata-rata ketersediaan air tanah dan air permukaan terhadap kebutuhan air domestik dan non domestik. Hasil perbandingan untuk ketersediaan dan kebutuhan air di Kota Bekasi menunjukkan bahwa kondisi daya dukung air saat ini masih mencukupi ataupun surplus. Berdasarkan perhitungan proyeksi ketersediaan dan kebutuhan air maka dalam perhitungan tahun 2021, 2026 dan 2031 masih dalam kondisi surplus, artinya masih memenuhi daya dukung air.

Tabel 2.90 Proyeksi Status Daya Dukung Air Kota Bekasi Tahun 2017-2036

TAHUN	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Air			Total Kebutuhan Air (L/Detik)	Ketersediaan Air		Status Daya Dukung Air
		Kebutuhan Air Domestik (L/detik)	Kebutuhan Air Non Domestik (L/detik)	Kebocoran 25% (L/Detik)		Air Permukaan (L/Detik)	Air Tanah (L/Detik)	
2017	3.253.179	3.449	1.035	1.121	5.604,37	16.534,42	18.264,17	memenuhi daya dukung
2021	3.253.179	3.905	1.171	1.269	6.344,92	16.534,42	18.264,17	memenuhi daya dukung
2026	3.750.804	5.079	1.524	1.651	8.253,72	18.952,79	15.574,89	memenuhi daya dukung
2031	4.325.535	6.809	2.043	2.213	11.064,16	18.952,79	15.574,89	memenuhi daya dukung

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Daya Dukung Lahan

• Analisis Ketersediaan Lahan

Perhitungan daya dukung lahan di Kota Bekasi dengan data yang diperlukan dalam perhitungan ketersediaan lahan yaitu produksi aktual tiap jenis komoditi (P_i) dan harga beras di tingkat produsen (H_b), harga satuan tiap komoditi di tingkat produsen (H_i), dan produktivitas beras di Kota Bekasi (P_t). Data yang digunakan berasal dari jenis-jenis komoditas pangan yang berada di Kota Bekasi, yang terdiri dari pertanian, perkebunan dan buah-buahan. Secara lengkap, perhitungan nilai produksi total dari komoditas pangan tersebut di Kota Bekasi sebagaimana pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.89 Hasil Perhitungan Nilai Produksi Total Kota Bekasi

No	Jenis Komoditas	Produksi Aktual		Harga Satuan Komoditas (Rp/kg)	Nilai Produksi (Rp)
		Ton	Kg		
1	Padi sawah	30.438,7	30.438.700	5.500	167.412.850.000
2	Padi gogo	-	-		-
3	Jagung	828,0	828.000	9.000	7.452.000.000
4	Ubi kayu	249,8	249.750	6.000	1.498.500.000

No	Jenis Komoditas	Produksi Aktual		Harga Satuan Komoditas (Rp/kg)	Nilai Produksi (Rp)
		Ton	Kg		
5	Ubi jalar	49,1	49.080	5.000	245.400.000
6	Bayam	4.807,5	4.807.500	5.000	24.037.500.000
7	Cabe besar	435,0	435.000	30.000	13.050.000.000
8	Kacang panjang	101,7	101.700	6.000	610.200.000
9	Ketimun	90,0	90.000	8.000	720.000.000
10	Kangkung	4.532,4	4.532.420	5.000	22.662.100.000
11	Sawi	2.664,0	2.664.000	3.000	7.992.000.000
12	Terong	83,2	83.200	8.000	665.600.000
13	Durian	659,1	659.090	75.000	49.431.750.000
14	Duku	68,8	68.800	8.000	550.400.000
15	Jambu biji	345,6	345.590	5.600	1.935.304.000
16	Jeruk Siem	28,6	28.600	11.900	340.340.000
17	Mangga	1.491,8	1.491.750	15.000	22.376.250.000
18	Pepaya	1.602,6	1.602.610	7.000	11.218.270.000
19	Pisang	419,6	419.630	7.000	2.937.410.000
20	Rambutan	1.395,2	1.395.150	12.000	16.741.800.000
21	Sawo	775,3	775.310	13.000	10.079.030.000
TOTAL					361.956.704.000

Sumber: Hasil Analisis (2018) dari Kota Bekasi Dalam Angka (2018)

Perhitungan ketersediaan lahan (SL) berdasarkan persamaan sebagai berikut:

$$SL = \frac{Rp\ 361.965.704.000}{Rp\ 12.000} \times \frac{1}{63.020 \frac{kg}{ha}} = 479\ Ha$$

Jadi ketersediaan lahan (SL) di Kota Bekasi yaitu 479 Ha.

• Analisis Kebutuhan Lahan

Kebutuhan lahan diperoleh dengan cara mengalikan jumlah penduduk (N) dengan kebutuhan lahan untuk hidup layak (KHL_L). Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk merupakan kebutuhan hidup layak per penduduk dibagi produktivitas beras lokal. Menurut Permen LH No. 17 Tahun 2009, untuk kebutuhan hidup layak per penduduk diasumsikan sebesar 1 ton setara beras/kapita/tahun. Seperti yang telah diketahui diatas, produktivitas beras di Kota Bekasi adalah 30.438.700 kg/ha/tahun. Perhitungan kebutuhan lahan untuk hidup layak adalah sebagai berikut:

$$KHL = \frac{1\ ton \frac{beras}{orang/tahun}}{23.002.330 \frac{kg}{ha}/tahun}$$

$$= 0,0159 \text{ Ha/orang}$$

Jadi kebutuhan lahan untuk hidup layak di Kota Bekasi adalah 0,0159Ha/orang.

Kebutuhan lahan diperoleh dengan cara mengalikan jumlah penduduk (N) dengan kebutuhan lahan untuk hidup layak (KHL). Perhitungan kebutuhan lahan (DL) pada tahun saat ini dengan jumlah penduduk tahun 2021 sebesar 3.253.179 jiwa, dengan menggunakan persamaan:

$$\begin{aligned} DL &= 3.253.179 \text{ jiwa} \times 0,0159 \text{ jiwa/Ha} \\ &= 51.623,31 \text{ Ha} \end{aligned}$$

Jadi kebutuhan lahan (DL) untuk Kota Bekasi pada tahun 2021 adalah 51.623,31 Ha.

- **Status Daya Dukung Lahan**

Dengan melihat hasil perhitungan untuk ketersediaan dan kebutuhan lahan di Kota Bekasi didapatkan hasil yaitu:

- Ketersediaan lahan (S_L) : 479Ha
- Kebutuhan lahan (D_L) : 51.623,31Ha

Dengan demikian, status daya dukung lahan secara keseluruhan wilayah Kota Bekasi diperoleh pada tahun 2017, maka nilai $SL < DL$ (479 Ha < 51.623,31 Ha) atau dinyatakan defisit atau tidak memenuhi daya dukung. Artinya bahwa dalam lingkup wilayah, maka Kota Bekasi ini tidak memiliki daya dukung lahan yang baik, sehingga dalam keadaan produktifitas pangan yang ada tidak dapat memenuhi ketersediaan pangan untuk kebutuhan daerahnya sendiri.

Begitu juga dengan proyeksi penduduk di tahun 2021 hingga 2031 masih berada dalam kondisi defisit, dimana kebutuhan lahan lebih tinggi dibandingkan ketersediaan lahan yang ada di Kota Bekasi untuk lahan pertanian dan komoditas pangan lainnya.



BAB 3

GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah Kota Bekasi dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam mengelola keuangan daerah, Kota Bekasi telah melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Peninjauan terhadap kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk dapat mengetahui potensi sumber daya keuangan Pemerintah Kota Bekasi. Peninjauan ini dilakukan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Bekasi selama lima tahun terakhir. Kinerja keuangan masa lalu ini mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD ini menguraikan perkembangan kinerja tiga komponen keuangan daerah, yaitu kinerja pengelolaan Pendapatan Daerah, kinerja pengelolaan Belanja Daerah, dan kinerja pengelolaan Pembiayaan Daerah.

Pada Tabel 3.1. berikut ini disajikan, Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2015-2019 yang menggambarkan kinerja pelaksanaan APBD selama periode 5 (lima) Tahun kebelakang, dimana rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah sebesar 11,14 persen dan rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah sebesar 9,57 persen.

Tabel 3.1. Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2015-2019

KODE REK	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	
4	PENDAPATAN	3,949,393,896,129.03	4,225,314,416,408.40	4,756,703,208,558.95	4,835,980,257,174.21	5,963,932,792,508.89	11.14
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,497,596,436,744.03	1,607,389,410,491.40	1,988,356,922,192.95	2,001,150,459,494.21	2,442,151,873,746.89	13.43
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	1,030,224,055,885.00	1,140,925,902,871.00	1,393,372,320,395.00	1,580,754,200,591.00	1,778,314,661,578.00	14.70
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	78,291,147,427.00	83,611,739,483.00	84,381,837,869.00	77,320,468,209.00	120,560,321,129.49	13.82
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,368,258,534.00	12,289,820,024.00	9,424,723,876.00	12,086,694,279.00	12,173,862,434.00	3.44
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	377,712,974,898.03	370,561,948,113.40	501,178,040,052.95	330,989,096,415.21	531,103,028,605.40	14.96
4 . 2	DANA PERIMBANGAN	1,332,517,465,266.00	1,647,365,217,172.00	1,636,851,744,218.00	1,653,956,944,914.00	1,686,699,237,834.00	6.50
4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	103,078,105,266.00	147,700,142,065.00	144,271,830,855.00	146,670,966,840.00	114,680,225,376.00	5.21
4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	1,198,049,800,000.00	1,233,705,774,000.00	1,212,033,531,000.00	1,212,033,531,000.00	1,277,169,857,000.00	1.65
4 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	31,389,560,000.00	265,959,301,107.00	280,546,382,363.00	295,252,447,074.00	294,849,155,458.00	189.47
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1,119,279,994,119.00	970,559,788,745.00	1,131,494,542,148.00	1,180,872,852,766.00	1,835,081,680,928.00	15.76
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	3,857,000,000.00	2,073,000,000.00	2,958,582,352.00	189,471,225,533.00	192,671,706,540.00	1,575.57
4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	673,988,192,639.00	715,262,630,045.00	743,133,859,796.00	791,358,847,775.00	811,483,111,469.00	4.76
4 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	275,366,338,000.00	253,224,158,700.00	52,941,282,000.00		60,780,190,000.00	0.00
4 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	166,068,463,480.00	-	332,460,818,000.00	200,042,779,458.00	770,146,672,919.00	0.00

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	
BELANJA	3,882,237,460,467.00	4,404,495,132,194.82	4,982,347,106,794.00	5,001,748,526,414.14	5,567,923,376,279.03	9.57
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,432,646,830,392.00	1,614,077,501,175.00	1,785,274,492,418.00	2,062,103,244,656.00	1,909,565,700,219.00	7.84
Belanja Pegawai	1,363,650,359,301.00	1,504,471,822,877.00	1,649,362,115,601.00	1,918,768,585,973.00	1,708,561,985,966.00	6.33
Belanja Bunga	120,138,622.00	63,246,793.00	35,569,285.00	8,374,400.00		(66.89)
Belanja Subsidi		0.00	-	394,631,518.00	5,543,886,923.00	-
Belanja Hibah	45,761,627,000.00	74,297,227,000.00	56,483,844,800.00	68,503,996,486.00	94,504,751,250.00	19.08
Belanja Bantuan Sosial	21,126,000,000.00	29,254,800,000.00	78,005,600,000.00	72,251,400,000.00	98,669,460,000.00	58.58
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1,058,182,433.00	964,438,170.00	1,151,746,170.00	1,305,838,500.00	1,546,647,000.00	10.60
Belanja Tidak Terduga	930,523,036.00	5,025,966,335.00	235,616,562.00	870,417,779.00	738,969,080.00	149.78
BELANJA LANGSUNG	2,449,590,630,075.00	2,790,417,631,019.82	3,197,072,614,376.00	2,939,645,281,758.14	3,658,357,676,060.03	11.22
Belanja Pegawai	372,427,851,919.00	478,765,877,324.00	710,589,220,901.00	327,218,562,794.00	191,289,754,047.00	- 4.63
Belanja Barang dan Jasa	827,208,108,778.00	883,617,229,289.82	1,250,396,770,847.00	1,832,330,307,166.17	2,362,558,547,595.29	30.95
Belanja Modal	1,249,954,669,378.00	1,428,034,524,406.00	1,236,086,622,628.00	780,096,411,797.97	1,104,509,374,417.74	1.38

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diolah 2020.

KODE REK	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	
	PEMBIAYAAN DAERAH						
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	4,224,440,554.00	786,239,955,720.40	587,746,870,029.98	306,532,367,874.93	99,360,183,313.14	(35.17)
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	(53,332.00)	786,239,955,720.40	587,746,870,029.98	306,532,367,874.93	99,360,183,313.14	
6 . 1 . 6	Penerimaan Piutang Daerah	4,224,493,886.00				-	-
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	27,869,369,888.00	19,312,369,904.00	55,562,369,920.00	41,368,581,250.00	1,032,000,000.00	18.19
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	27,557,000,000.00	19,000,000,000.00	55,250,000,000.00	41,212,396,200.00	1,032,000,000.00	
6 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Utang	312,369,888.00	312,369,904.00	312,369,920.00	156,185,050.00	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	(23,644,929,334.00)	766,927,585,816.40	532,184,500,109.98	265,163,786,624.93	98,328,183,313.14	(76.57)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diolah 2020.

A. Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2013-2019

Terdapat 3 komponen Pendapatan Daerah, yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

- Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas beberapa jenis pendapatan yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- Dana Perimbangan

Pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan terdiri atas dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau daerah lainnya.

Pendapatan Daerah Kota Bekasi yang disajikan dalam Tabel 3.2 menginformasikan target dan realisasi pendapatan daerah. Berdasarkan Tabel 3.2 terlihat bahwa selama periode 2015-2019 pendapatan daerah cenderung meningkat.

Pada periode tahun 2015-2019, kinerja realisasi pendapatan daerah Kota Bekasi belum mencapai 100 persen atau kurang dari target. Kinerja realisasi Pendapatan daerah tertinggi dicapai pada tahun 2015 yakni sebesar 99,50 persen. Sedangkan kinerja terendahnya terjadi pada tahun 2017, yakni sebesar 87,51 persen. Kinerja realisasi pendapatan daerah yang kurang dari 100 persen menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi belum berhasil menghimpun sumber-sumber pendapatannya untuk memenuhi target yang ditetapkannya pada awal tahun rencana.

Secara lebih rinci target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi periode tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.2. berikut ini.

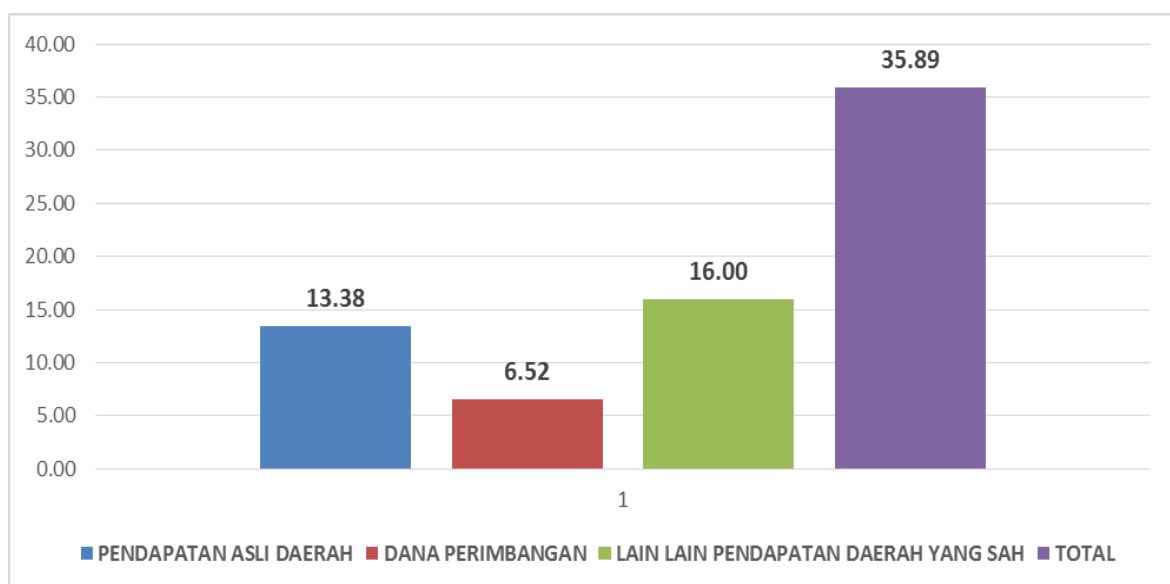
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2015-2019

KODE REK	URAIAN	2015		2016		2017		2018		2019	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
4	PENDAPATAN	3,976,356,352,496.00	3,949,393,896,129.03	4,290,326,129,657.00	4,225,314,416,408.40	5,186,116,074,099.02	4,756,703,208,558.95	5,482,357,446,882.00	4,835,980,257,174.21	6,993,513,097,075.00	5,963,932,792,508.89
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,384,239,968,547.00	1,497,596,436,744.03	1,686,660,486,524.00	1,607,389,410,491.40	2,352,843,540,287.02	1,988,356,922,192.95	2,493,212,141,337.00	2,001,150,459,494.21	3,346,023,558,779.00	2,442,151,873,746.89
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1,006,583,747,200.00	1,030,224,055,885.00	1,240,204,065,300.00	1,140,925,902,871.00	1,505,318,277,800.00	1,393,372,320,395.00	1,742,132,421,869.00	1,580,754,200,591.00	2,295,657,756,755.09	1,778,314,661,578.00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	69,008,240,200.00	78,291,147,427.00	94,743,140,600.00	83,611,739,483.00	220,403,765,300.00	84,381,837,869.00	115,472,947,750.00	77,320,468,209.00	243,413,534,727.34	120,560,321,129.49
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,368,264,400.00	11,368,258,534.00	14,347,038,600.00	12,289,820,024.00	21,199,094,400.00	9,424,723,876.00	18,532,767,100.00	12,086,694,279.00	21,614,515,182.00	12,173,862,434.00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	297,279,716,747.00	377,712,974,898.03	337,366,242,024.00	370,561,948,113.40	605,922,402,787.02	501,178,040,052.95	617,074,004,618.00	330,989,096,415.21	785,337,752,114.57	531,103,028,605.40
4.2	DANA PERIMBANGAN	1,380,385,469,000.00	1,332,517,465,266.00	1,592,275,828,878.00	1,647,365,217,172.00	1,693,703,520,463.00	1,636,851,744,218.00	1,674,387,323,444.00	1,653,956,944,914.00	1,757,403,500,000.00	1,686,699,237,834.00
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	143,098,719,000.00	103,078,105,266.00	167,728,648,336.00	147,700,142,065.00	175,912,640,463.00	144,271,830,855.00	161,949,025,000.00	146,670,966,840.00	157,474,278,000.00	114,680,225,376.00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1,198,049,800,000.00	1,198,049,800,000.00	1,099,677,780,342.00	1,233,705,774,000.00	1,212,033,531,000.00	1,212,033,531,000.00	1,212,033,531,000.00	1,212,033,531,000.00	1,277,169,857,000.00	1,277,169,857,000.00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	39,236,950,000.00	31,389,560,000.00	324,869,400,200.00	265,959,301,107.00	305,757,349,000.00	280,546,382,363.00	300,404,767,444.00	295,252,447,074.00	322,759,365,000.00	294,849,155,458.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1,211,730,914,949.00	1,119,279,994,119.00	1,011,389,814,255.00	970,559,788,745.00	1,139,569,013,349.00	1,131,494,542,148.00	1,314,757,982,101.00	1,180,872,852,766.00	1,890,086,038,296.00	1,835,081,680,928.00
4.3.1	Pendapatan Hibah	4,100,000,000.00	3,857,000,000.00	6,000,000,000.00	2,073,000,000.00	5,266,440,190.00	2,958,582,352.00	191,100,400,000.00	189,471,225,533.00	192,517,000,000.00	192,671,706,540.00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	683,637,471,769.00	673,988,192,639.00	727,544,244,255.00	715,262,630,045.00	746,355,907,159.00	743,133,859,796.00	728,799,775,000.00	791,358,847,775.00	842,942,537,796.00	811,483,111,469.00
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	277,514,338,000.00	275,366,338,000.00	277,845,570,000.00	253,224,158,700.00	52,941,282,000.00	52,941,282,000.00			60,780,190,000.00	60,780,190,000.00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	246,479,105,180.00	166,068,463,480.00		-	335,005,384,000.00	332,460,818,000.00	394,857,807,101.00	200,042,779,458.00	793,846,310,500.00	770,146,672,919.00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, 2020.

Berdasarkan pertumbuhan rata-rata per tahun masing-masing komponen pendapatan daerah, terlihat bahwa PAD tumbuh paling tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan komponen lainnya. Selama periode 2015-2019, pendapatan daerah Kota Bekasi rata-rata tumbuh sebesar 11,15 persen yang disebabkan oleh pertumbuhan rata-rata komponen PAD sebesar 13,38 persen, Dana Perimbangan sebesar 6,52 persen, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 16,00 persen. Pertumbuhan rata-rata komponen PAD yang lebih tinggi dibandingkan komponen lainnya menunjukkan makin berkembangnya kemandirian Kota Bekasi dalam memenuhi kebutuhan pembangunannya.

Pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah dan masing-masing komponen pendapatan daerah Kota Bekasi tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 3-1.



Sumber : Badan Pendapatan Daerah, diolah 2020.

Gambar 3-1 Pertumbuhan Rata-Rata PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain dan Total Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2013-2019 (%)

Proporsi realisasi komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kota Bekasi periode 2013-2017 memperlihatkan kecenderungan terjadinya peningkatan proporsi PAD serta penurunan proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan rata-rata komponen PAD yang lebih tinggi dibandingkan dengan komponen-komponen lainnya.

Proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah pada tahun 2013 sebesar 32,75 persen meningkat menjadi 40,95 persen pada tahun 2019. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan per komponen PAD tahun 2015 sampai tahun 2019 terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yaitu 15,48 persen. Sisanya terdiri dari Hasil Retribusi Daerah sebesar 13,75 persen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 11,51 persen dan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 1,77 persen.

Proporsi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah menurun dari 40,10 persen pada tahun 2013 menjadi 36,07 persen pada tahun 2017. Berdasarkan rata-rata proporsi komponen Dana Perimbangan tahun 2013 sampai tahun 2017 terbesar berasal dari Dana

Alokasi Umum yaitu sebesar 81,88 persen. Sisanya terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 9,28 persen dan Dana Alokasi Khusus sebesar 8,84 persen.

Proporsi komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Pendapatan Daerah menurun dari 26,96 persen pada tahun 2013 menjadi 24,28 persen pada tahun 2017. Berdasarkan rata-rata proporsi komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2013 sampai tahun 2017 terbesar berasal dari Bagi Hasil Pajak/Non Pajak dari Provinsidan Pemerintah Daerah Lainnya yaitu sebesar 64,89 persen. Sisanya terdiri dari Bantuan Keuangan dari Povinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 18,97 persen, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 15,86 persen, Pendapatan Hibah sebesar 0,28 persen, dan Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 0,01 persen.

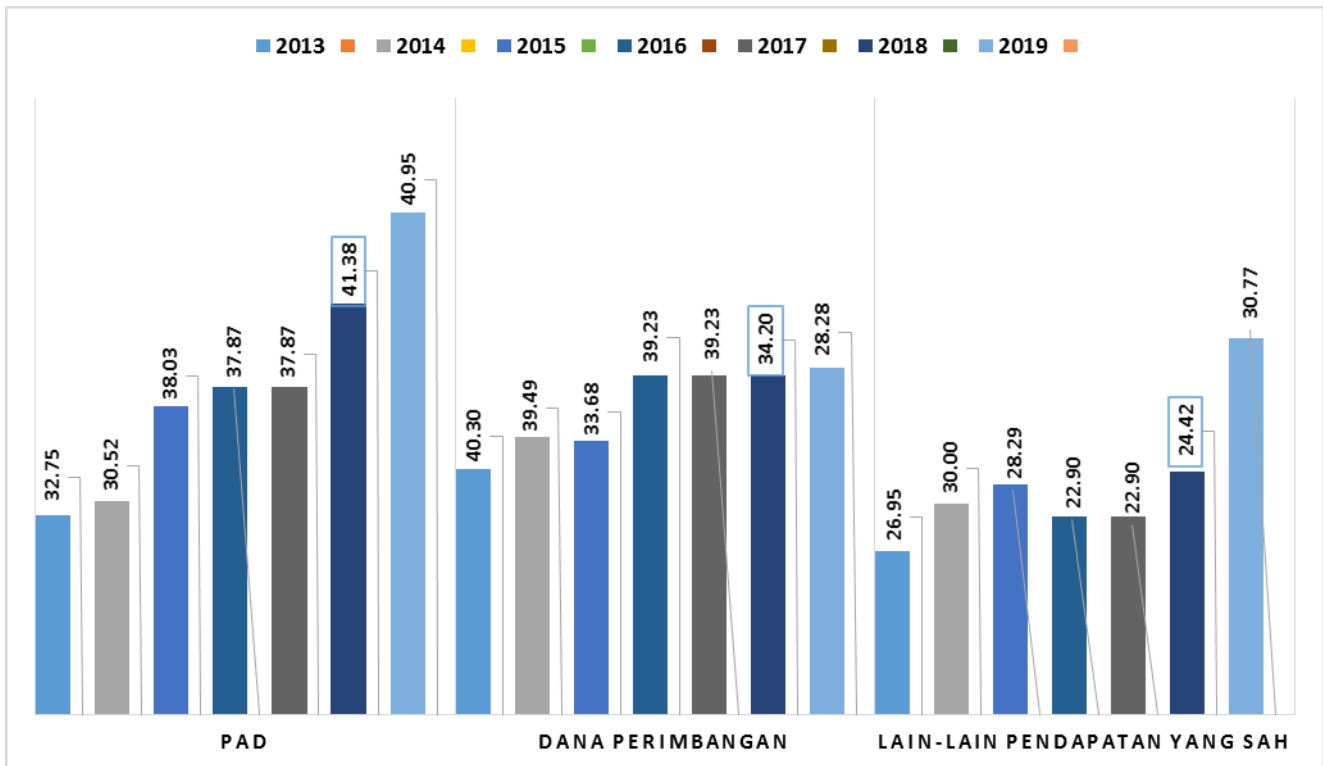
Apabila tahun 2013 PAD Kota Bekasi baru sebesar Rp. 969.664.481.363,- secara bertahap meningkat dari tahun ke tahun menjadi Rp 2.442.148.866.621,89,- pada tahun 2019. Meningkatnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah Kota Bekasi berarti meningkatnya kemandirian daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Secara rinci proporsi realisasi komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kota Bekasi periode 2013-2019 terlihat pada Tabel 3.2. dan Gambar 3-2.

Tabel 3.3 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Bekasi 2013-2019 (Dalam Rupiah)

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Total
2013	969,664,481,363	1,193,018,165,096	797,897,723,130	2,960,580,369,589
	32.75	40.30	26.95	100.00
2014	1,042,728,151,600	1,349,293,645,316	1,025,032,528,063	3,417,054,324,979
	30.52	39.49	30.00	100.00
2015	1,504,510,666,968	1,332,517,465,266	1,119,279,994,119	3,956,308,126,353
	38.03	33.68	28.29	100.00
2016	1,595,714,960,273	1,652,830,067,172	965,094,938,745	4,213,639,966,190
	37.87	39.23	22.90	100.00
2017	1,595,714,960,273	1,652,830,067,172	965,094,938,745	4,213,639,966,190
	37.87	39.23	22.90	100.00
2018	2,001,150,459,494	1,653,956,944,914	1,180,872,852,766	4,835,980,257,174
	41.38	34.20	24.42	100.00
2019	2,442,148,866,622	1,686,699,237,834	1,835,081,680,928	5,963,929,785,384
	40.95	28.28	30.77	100.00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, diolah 2020.



Sumber : Badan Pendapatan Daerah, diolah 2020

Gambar 3-2 Proporsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2013-2017 (%)

B. Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah Kota Bekasi, 2013-2019

Belanja daerah Kota Bekasi terdiri dari komponen:

- 1) Belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- 2) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Belanja daerah Kota Bekasi yang disajikan dalam Tabel 3.3 menginformasikan pagu atau anggaran dan realisasi belanja daerah. Berdasarkan Tabel 3.3 terlihat bahwa selama periode 2015-2019 belanja daerah cenderung meningkat.

Kinerja realisasi belanja daerah Kota Bekasi selama kurun waktu 2015-2019 menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah selalu berada di di bawah pagu atau anggarannya. Kinerja realisasi belanja tertinggi terjadi pada tahun 2016, yakni sebesar 87,67 persen dari pagu/target, sedangkan terendah pada tahun 2019 yakni sebesar 79,60 persen dari pagu/target. Realisasi belanja yang lebih kecil dari anggaran/pagu anggarannya seperti ini disebut sebagai *favourable variance*. Hal ini disatu sisi bisa jadi menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Tetapi disisi lain sebaliknya, bisa jadi karena kelemahan dalam perencanaan anggaran, sehingga kurang tepat dalam mengestimasi belanja, atau adanya program dan kegiatan yang tidak terlaksana.

Kinerja Belanja Daerah Kota Bekasi periode tahun 2015-2019 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini.

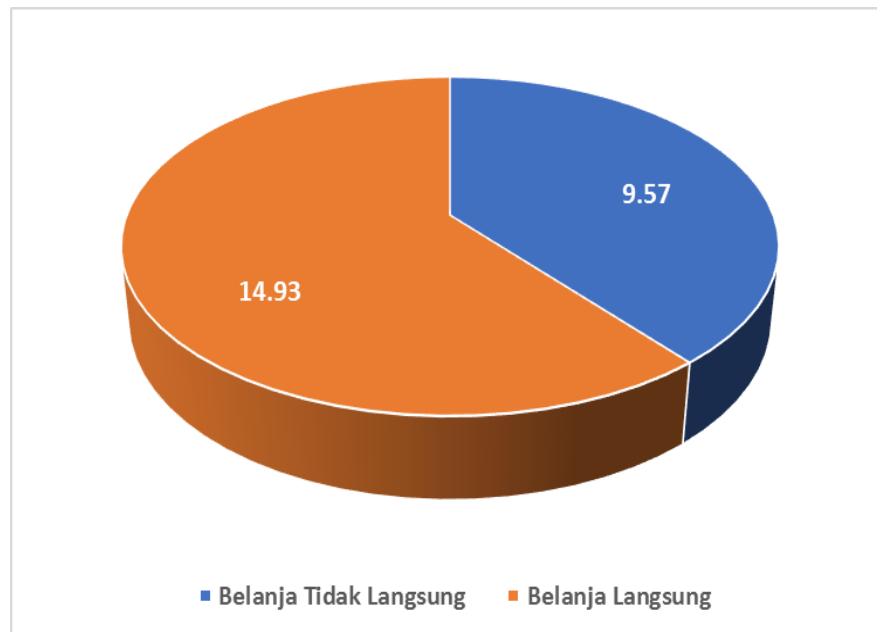
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2015-2019

KODE REK	URAIAN	2015		2016		2017		2018		2019	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
5	BELANJA	4,691,313,300,821.37	3,882,237,460,467.00	5,035,435,715,577.40	4,404,495,132,194.82	5,709,432,093,083.00	4,982,347,106,794.00	5,747,421,232,707.00	5,001,748,526,414.14	7,069,408,614,460.00	5,567,923,376,279.03
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,567,216,713,204.37	1,432,646,830,392.00	1,765,918,053,737.40	1,614,077,501,175.00	1,947,797,154,542.00	1,785,274,492,418.00	2,210,065,320,409.00	2,062,103,244,656.00	2,733,837,213,302.00	1,909,565,700,219.00
5.1.1	Belanja Pegawai	1,487,410,127,404.37	1,363,650,359,301.00	1,633,764,922,436.40	1,504,471,822,877.00	1,789,805,058,168.00	1,649,362,115,601.00	2,045,662,206,537.00	1,918,768,585,973.00	2,106,439,446,064.00	1,708,561,985,966.00
5.1.2	Belanja Bunga	300,000,000.00	120,138,622.00	300,000,000.00	63,246,793.00	300,000,000.00	35,569,285.00	8,374,400.00	8,374,400.00		
5.2.3	Belanja Subsidi				0.00	1,700,000,000.00	-	1,500,000,000.00	394,631,518.00	6,500,000,000.00	5,543,886,923.00
5.1.4	Belanja Hibah	49,007,192,000.00	45,761,627,000.00	82,631,660,000.00	74,297,227,000.00	71,809,638,000.00	56,483,844,800.00	84,795,002,486.00	68,503,996,486.00	161,995,136,800.00	94,504,751,250.00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	25,000,000,000.00	21,126,000,000.00	39,801,797,000.00	29,254,800,000.00	80,030,621,474.00	78,005,600,000.00	73,640,000,000.00	72,251,400,000.00	100,327,460,000.00	98,669,460,000.00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1,058,182,800.00	1,058,182,433.00	1,058,182,800.00	964,438,170.00	1,151,836,900.00	1,151,746,170.00	1,459,736,986.00	1,305,838,500.00	65,313,729,000.00	1,546,647,000.00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	4,441,211,000.00	930,523,036.00	8,361,491,501.00	5,025,966,335.00	3,000,000,000.00	235,616,562.00	3,000,000,000.00	870,417,779.00	293,261,441,438.00	738,969,080.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	3,124,096,587,617.00	2,449,590,630,075.00	3,269,517,661,840.00	2,790,417,631,019.82	3,761,634,938,541.00	3,197,072,614,376.00	3,537,355,912,298.00	2,939,645,281,758.14	4,335,571,401,158.00	3,658,357,676,060.03
5.2.1	Belanja Pegawai	422,571,542,500.00	372,427,851,919.00	513,747,612,530.00	478,765,877,324.00	763,606,340,993.60	710,589,220,901.00	383,141,417,314.00	327,218,562,794.00	216,450,296,975.00	191,289,754,047.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,032,093,832,004.00	827,208,108,778.00	1,011,300,868,281.00	883,617,229,289.82	1,416,635,165,368.40	1,250,396,770,847.00	2,140,857,532,840.00	1,832,330,307,166.17	2,756,702,188,572.00	2,362,558,547,595.29
5.2.3	Belanja Modal	1,669,431,213,113.00	1,249,954,669,378.00	1,744,469,181,029.00	1,428,034,524,406.00	1,581,393,432,179.00	1,236,086,622,628.00	1,013,356,962,144.00	780,096,411,797.97	1,362,418,915,611.00	1,104,509,374,417.74

Sumber : BPKAD Kota Bekasi, diolah 2020.

Pada periode tahun 2015-2019, pertumbuhan tertinggi realisasi belanja daerah terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 13,45 persen dan terendah pada tahun 2018 sebesar 0,39 persen. Sedangkan pertumbuhan rata-rata belanja daerah pada periode tahun 2015-2019 sebesar 9,57 persen per tahun.

Pertumbuhan rata-rata belanja tidak langsung sebesar 7,84 persen per tahun dan belanja langsung sebesar 14,93 persen per tahun. Pertumbuhan realisasi belanja daerah Kota Bekasi dari tahun 2015-2019 yang cukup tinggi menunjukkan perkembangan yang baik. Hal ini berarti bahwa besaran alokasi belanja daerah Kota Bekasi, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan program dan kegiatan makin meningkat.



Sumber : BPKAD, Diolah 2020.

Gambar 3-3 Pertumbuhan Rata-rata Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Belanja Daerah Kota Bekasi, 2015-2019

Proporsi realisasi komponen belanja terhadap Belanja Daerah Kota Bekasi selama kurun waktu 2013-2017 menunjukkan proporsi Belanja Tidak Langsung cenderung turun dan proporsi Belanja Langsung cenderung meningkat. Hal ini berarti bahwa proporsi belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan meningkat dari tahun ke tahun.

Perkembangan komponen belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap belanja daerah Kota Bekasi dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2015-2019

KODE REK	URAIAN	2015		2016		2017		2018		2019	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	PEMBIAYAAN DAERAH										
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	746,952,936,446.37	4,224,440,554.00	786,239,955,720.40	786,239,955,720.40	588,896,388,783.98	587,746,870,029.98	306,532,367,875.00	306,532,367,874.93	99,395,517,385.00	99,360,183,313.14
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	746,952,936,446.37	(53,332.00)	786,239,955,720.40	786,239,955,720.40	588,896,388,783.98	587,746,870,029.98	306,532,367,875.00	306,532,367,874.93	99,395,517,385.00	99,360,183,313.14
6 . 1 . 6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	4,224,493,886.00							-	-
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	31,995,988,121.00	27,869,369,888.00	41,130,369,800.00	19,312,369,904.00	65,580,369,800.00	55,562,369,920.00	41,468,582,050.00	41,368,581,250.00	23,500,000,000.00	1,032,000,000.00
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	31,665,618,321.00	27,557,000,000.00	40,800,000,000.00	19,000,000,000.00	65,250,000,000.00	55,250,000,000.00	41,312,397,000.00	41,212,396,200.00	23,500,000,000.00	1,032,000,000.00
6 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Utang	330,369,800.00	312,369,888.00	330,369,800.00	312,369,904.00	330,369,800.00	312,369,920.00	156,185,050.00	156,185,050.00	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	714,956,948,325.37	(23,644,929,334.00)	745,109,585,920.40	766,927,585,816.40	523,316,018,983.98	532,184,500,109.98	265,063,785,825.00	265,163,786,624.93	75,895,517,385.00	98,328,183,313.14

Sumber : BPKAD Kota Bekasi, diolah 2020.

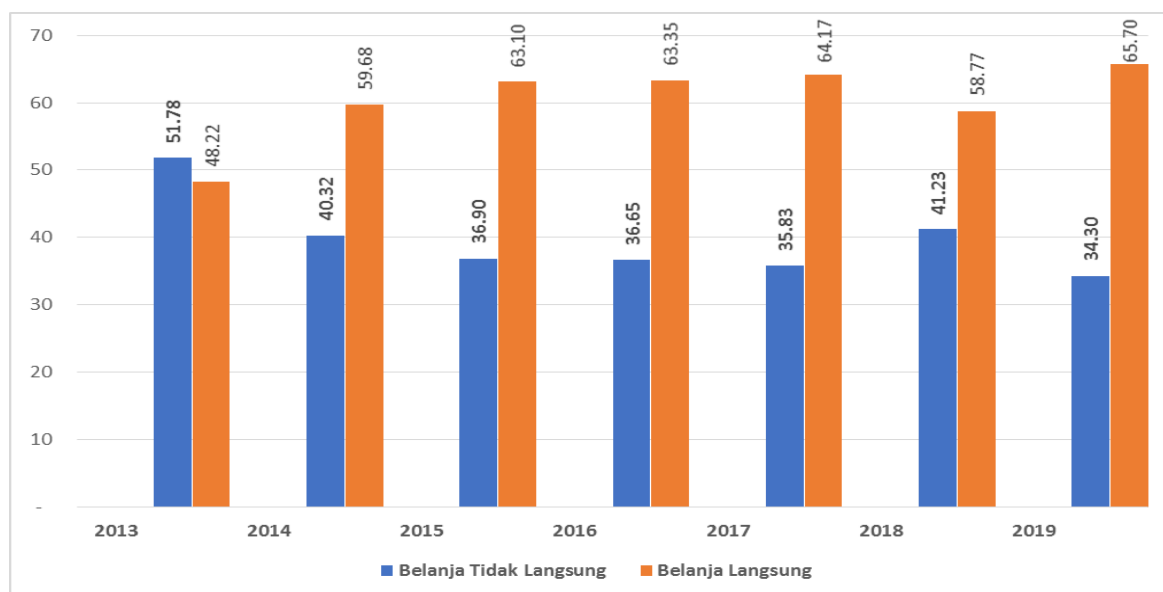
Tabel 3.6 Proporsi Realisasi Komponen Belanja Terhadap Total Belanja Daerah Kota Bekasi 2013-2019 (Dalam Rupiah dan %)

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total
2013	1,532,759,643,777	1,427,130,311,102	2,959,889,954,879
	51.78	48.22	100.00
2014	1,511,751,545,621	2,237,477,936,466	3,749,229,482,087
	40.32	59.68	100.00
2015	1,432,646,830,392	2,449,590,630,075	3,882,237,460,467
	36.90	63.10	100.00
2016	1,614,077,501,175	2,790,417,631,020	4,404,495,132,195
	36.65	63.35	100.00
2017	1,785,274,492,418	3,197,072,614,376	4,982,347,106,794
	35.83	64.17	100.00
2018	2,062,103,244,656	2,939,645,281,758	5,001,748,526,414
	41.23	58.77	100.00
2019	1,909,565,700,219	3,658,357,676,060	5,567,923,376,279
	34.30	65.70	100.00

Sumber : BPKAD, diolah 2020.

Proporsi komponen belanja tidak langsung pada tahun 2013 sebesar Rp1.532.759.643.777,- atau 51,78 persen turun menjadi Rp 2.102.415.564.766,- atau 37,77 persen pada 2019. Sementara proporsi belanja langsung meningkat dari Rp 1.427.130.311.102,- atau 48,22 persen pada tahun 2013 menjadi Rp 3.463.961.164.513,03,- atau 62,23 persen pada tahun 2019.

Perkembangan proporsi komponen belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap total belanja daerah Kota Bekasi periode tahun 2013-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.4 di atas dan Gambar 3.4. di bawah.



Sumber : BPKAD, Diolah 2020.

Gambar 3.4 Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah Kota Bekasi, 2013-2019

A. Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Pendapatan dan belanja daerah Kota Bekasi periode 2013-2019 menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang cukup tinggi. Pendapatan daerah tumbuh rata-rata sebesar 11,15 persen per tahun. Sedangkan belanja daerah tumbuh rata-rata sebesar 9,57 persen per tahun.

Pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah Kota Bekasi tahun 2013-2019 disumbang oleh pertumbuhan rata-rata pertahun PAD sebesar 13,38 persen, dana perimbangan sebesar 6,52 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 16,00 persen. Pertumbuhan PAD Kota Bekasi disumbang oleh pertumbuhan rata-rata per tahun dari Pajak Daerah sebesar 15,48 persen, Retribusi Daerah sebesar 13,75 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 11,51 persen, serta turunnya hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan sebesar 1,77 persen.

Pertumbuhan rata-rata per tahun Dana Perimbangan disumbang oleh tumbuhnya rata-rata per tahun hasil pajak/bukan pajak sebesar 5,64 persen, DAU sebesar 1,70 persen dan DAK sebesar 253,73 persen. Sedangkan pertumbuhan rata-rata per tahun lain-lain pendapatan daerah yang sah disebabkan oleh tumbuhnya dana bagi hasil pajak sebesar 11,72 persen, dan bantuan dari provinsi sebesar 35,63 persen.

Sementara, pertumbuhan rata-rata per tahun belanja daerah disumbang oleh tumbuhnya rata-rata per tahun belanja tidak langsung sebesar 11,24 persen dan belanja langsung sebesar 13,37 persen. Tumbuhnya komponen belanja tidak langsung disumbang oleh belanja pegawai tumbuh dengan rata-rata per tahun 13,05 persen, belanja bunga 13,69 persen, bantuan sosial sebesar 44,93 persen, bantuan keuangan sebesar 8,20 persen dan belanja tak terduga 89,73 persen, serta turunnya belanja bunga rata-rata per tahun sebesar 33,52 persen. Pertumbuhan rata-rata per tahun komponen belanja langsung disebabkan oleh pertumbuhan rata-rata belanja langsung penunjang urusan sebesar 23,26 persen dan belanja langsung urusan sebesar 13,64 persen.

3.1.2. Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Kinerja neraca daerah kota Bekasi periode lalu dapat dilihat pada Tabel 3.6

Tabel 3.7 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Bekasi, 2013-2017

NO.	URAIAN	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	Rata- rata Pertumbuhan
1	ASET	7,082,243,848,883	7,776,755,170,073	8,497,526,233,636	10,002,095,297,618	10,572,349,633,584	10,62%
1.1.	ASET LANCAR	508,177,436,365	270,035,243,876	311,853,299,196	380,451,043,185	345,759,139,295	-4,62%
1.1.1.	Kas	14,310,875,989	32,513,986,251	53,409,124,943	28,744,739,552	-5,947,164,338	6,15%
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.3.	Piutang	452,504,732,787	192,492,946,256	192,822,305,750	553,142,480,226	553,142,480,226	32,39%
1.1.4.	Piutang Lain-lain	18,935,006,330	20,783,481,232	50,678,686,212	16,360,897,171	16,360,897,171	21,47%
1.1.5.	Persediaan	22,426,821,260	24,244,830,138	14,943,182,291	38,417,688,191	38,417,688,191	31,71%
1.1.6.	Penyisihan Piutang	-	-	-	-257,433,189,866	-257,433,189,866	0,00%
1.1.7.	Beban Dibayar Dimuka	-	-	-	1,218,427,911	1,218,427,911	0,00%
1.2.	ASET TETAP	5,950,039,628,486	6,535,465,553,489	7,077,524,971,341	8,729,571,316,659	9,965,657,939,287	13,91%
1.2.1.	Tanah	1,263,598,705,680	1,232,636,330,490	3,142,949,917,238	3,306,513,509,463	3,409,664,043,093	40,21%
1.2.2.	Peralatan dan Mesin	701,172,378,521	793,160,004,928	938,359,845,738	1,176,974,563,366	1,426,087,062,545	19,51%
1.2.3.	Gedung dan Bangunan	1,524,212,186,413	1,883,098,730,347	2,104,408,928,269	2,631,613,029,632	2,817,021,147,021	16,85%
1.2.4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	2,136,492,503,875	2,534,962,712,707	3,165,660,825,253	3,801,233,517,398	4,496,691,893,397	20,48%
1.2.5.	Aset tetap Lainnya	61,015,365,539	66,020,115,886	70,306,569,303	86,275,496,843	89,232,593,274	10,21%
1.2.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	263,548,488,459	25,587,659,131	178,844,280,831	178,844,280,831	178,844,280,831	127,16%
1.2.7.	Akumulasi Penyusutan	-	-	-2,523,005,395,292	-2,451,883,080,874	-2,451,883,080,874	-0,70%
1.3.	ASET LAINNYA	74,459,872,670	52,388,583,110	40,196,034,567	46,131,640,788	46,131,640,788	-9,54%
1.4.	Investasi Jangka Panjang	148,371,478,316	203,913,297,055	214,800,914,214	214,800,914,214	214,800,914,214	10,69%

NO.	URAIAN	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	Rata- rata Pertumbuhan
2	KEWAJIBAN	43,369,935,784	34,000,250,347	75,653,813,105	60,924,518,848	62,653,015,253	21,07%
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek	42,276,641,208	33,219,325,650	74,949,860,547	61,949,062,695	61,949,062,695	21,71%
2.2.	Kewajiban Jangka Panjang	1,093,294,576	780,924,697	703,952,558	500,155,685	703,952,558	-6,66%
3	EKUITAS	7,038,873,913,099	7,742,754,919,727	8,421,872,420,531	11,050,906,057,009	14,033,662,905,962	19,24%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7,082,243,848,883	7,776,755,170,073	8,497,526,233,636	11,113,559,072,262	14,096,315,921,215	19,17%

Sumber : LKPJ Walikota Bekasi 2013-2018, diolah

Dari Tabel 3.6 tersebut dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Kota Bekasi secara rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 10,62 %, sehingga mencapai nilai Rp10.572.349.633.584,- di tahun 2017. Sedangkan untuk kewajiban yang harus dipenuhi, secara rata-rata meningkat sebesar 21,07 %, yaitu sebesar Rp62.653.015.253,- pada tahun 2017

Adapun kinerja rasio neraca daerah yang meliputi rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio utang dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.8 Analisis Rasio Neraca Daerah Kota Bekasi, 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Likuiditas					
	- Rasio Lancar	12,020	8,129	4,161	6,141	5,581
	- Rasio Kas	0,339	0,979	0,713	0,464	-0,096
	- Rasio Cepat	11,490	7,399	3,961	5,521	4,961
	- Rasio Modal kerja terhadap Total Aset	0,066	0,030	0,028	0,032	0,027
2	Rasio Solvabilitas	163,298	228,726	112,321	164,172	168,744
3	Rasio Utang					
	- Rasio Utang terhadap Ekuitas	0,006	0,004	0,009	0,006	0,004
	- Rasio Utang terhadap Aset Modal	0,007	0,005	0,011	0,007	0,006

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Analisis rasio keuangan untuk pemerintah daerah memiliki keterbatasan dibandingkan dengan sektor bisnis, akibat tidak adanya sejumlah informasi yang biasa digunakan di sektor bisnis seperti laba. Namun ada beberapa rasio yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah seperti ditampilkan pada tabel di bawah ini, yaitu :

1. Rasio Likuiditas, yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya :
 - ❖ Rasio lancar untuk pemerintah kota Bekasi menunjukkan angka yang cukup baik, dengan perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar sebesar 5,581:1 pada tahun anggaran 2017. Angka perbandingan yang selalu di atas 2:1 sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 menunjukkan bahwa kota Bekasi memiliki aset lancar yang cukup untuk melunasi utang jangka pendeknya.
 - ❖ Rasio Kas menunjukkan angka yang kurang baik, yaitu sebesar -0,096:1 pada tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa kas yang ada tidak cukup untuk melunasi utang jangka pendeknya.
 - ❖ Rasio Cepat menunjukkan angka yang cukup baik yaitu 4,961:1 pada tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa aktiva lancar yang ada setelah dikurangi dengan persediaan sudah cukup untuk melunasi utang jangka pendeknya.
 - ❖ Rasio Modal kerja terhadap Total Aset menunjukkan proporsi dari modal kerja (aset lancar dikurangi utang lancar) terhadap total aset sebesar 0,027 pada tahun 2017, yang sedikit menurun dari angka tahun sebelumnya sebesar 0,032. Rasio ini

menunjukkan bahwa masih terdapat 2,7 % aset yang bersifat likuid dari total aset pemerintah kota Bekasi setelah melunasi utang jangka pendeknya.

2. Rasio Solvabilitas menunjukkan perbandingan antara total aset dengan total utang yang cukup besar, yaitu sebesar 168,774:1 pada tahun 2017. Angka ini mengindikasikan bahwa pemerintah kota Bekasi dapat memenuhi seluruh kewajibannya, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Angka ini menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2016, setelah sebelumnya terdapat penurunan yang cukup besar dari tahun 2014 ke 2015.
3. Rasio utang :
 - ❖ Rasio Utang terhadap Ekuitas menunjukkan angka yang cukup baik yaitu sebesar 0,004 pada tahun 2016. Angka ini menunjukkan bahwa nilai total utang pemerintah kota Bekasi hanya sebesar 0,4% dari total ekuitas yang dimiliki, sehingga kewajiban yang harus dilunasi tidak terlalu membebani pemerintah. Angka tersebut menunjukkan penurunan rasio utang dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 0,006.
 - ❖ Rasio Utang terhadap Aset Modal juga menunjukkan angka yang cukup baik yaitu sebesar 0,006 pada tahun 2017. Angka ini menunjukkan bahwa nilai total utang pemerintah kota Bekasi hanya sebesar 0,6% dari total aset modal yang dimiliki, sehingga kewajiban yang harus dilunasi tidak terlalu membebani pemerintah. Angka tersebut menunjukkan penurunan rasio utang dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 0,007.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pertumbuhan rata-rata PAD yang lebih tinggi daripada pertumbuhan komponen pendapatan daerah lainnya menunjukkan dijalankannya kebijakan pengelolaan keuangan di masa lalu yang berupaya meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan keuangan daerah pada bantuan pemerintah pusat. Pertumbuhan rata-rata PAD yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan komponen lainnya menyebabkan adanya peningkatan proporsi PAD dan penurunan proporsi komponen dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap total pendapatan daerah Kota Bekasi.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Selama kurun waktu 2013-2017, terjadi peningkatan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur (belanja pegawai) terhadap total pengeluaran, dari 47,44 persen pada tahun 2013 menjadi 44,83 persen pada tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi 47,16 persen pada tahun 2017. Secara nominal belanja pemenuhan kebutuhan aparatur juga meningkat dari Rp1.414.572.740.918,- pada tahun 2013 menjadi Rp1.983.237.700.201,- pada tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi Rp2.359.002.998.502,- pada tahun 2017.

Realisasi Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tersebut dijabarkan pada tabel 3.8 di bawah ini. Sedangkan Tabel 3.9 menunjukkan proporsi belanja untuk pemenuhan aparatur Kota Bekasi selama tahun 2013-2017.

Tabel 3.9 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bekasi

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
		(Rp)	(Rp)	
		(a)	(b)	
1	Tahun anggaran 2013	1.414.572.740.918	2.981.554.255.117	47,44%
2	Tahun anggaran 2014	1.588.325.325.041	3.143.650.785.535	50,52%
3	Tahun anggaran 2015	1.736.078.211.220	3.882.549.830.355	44,71%
4	Tahun anggaran 2016	1.983.237.700.201	4.423.807.502.099	44,83%
5	Tahun anggaran 2017	2.359.002.998.502	5.001.795.465.771	47,16%

Sumber : BPKAD Kota Bekasi, diolah 2018.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Realisasi pendapatan daerah Kota Bekasi menunjukkan peningkatan dari Rp2.960.580.369.589,- pada tahun 2013 menjadi Rp 4.835.980.257.174,- pada tahun 2018 (awal tahun RPJMD) dan meningkat lagi menjadi Rp 5.963.929.785.384,- pada tahun 2019. Sementara pengeluaran daerah Kota Bekasi juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 pengeluaran daerah sebesar Rp 2.981.554.255.117,- terdiri atas belanja daerah sebesar Rp2.959.889.954.879,- dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp21.664.300.238,-, pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp 5.043.117.107.664,- yang terdiri atas belanja daerah sebesar Rp 5.001.748.526.414,- dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 41.368.581.250,-. Pada tahun 2019 pengeluaran daerah Kota Bekasi kembali meningkat menjadi Rp 5.268.697.085.740,- yang terdiri atas belanja daerah sebesar Rp 5.267.665.085.740,- dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.032.000.000,-. Dengan komposisi pendapatan daerah dan pengeluaran daerah seperti tersebut, maka pada tahun 2015 masih terdapat surplus sebesar Rp46.513.665.886,-. Sementara pada tahun 2016-2018 terdapat defisit riil yang cukup besar yaitu senilai Rp 210.167.535.909,- pada tahun 2016, Rp 463.517.081.978,- pada tahun 2017, dan Rp 207.136.850.490 pada tahun 2018. Tahun 2019 kembali surplus sebesar Rp 695.232.699.644,-. Defisit riil anggaran Kota Bekasi periode 2013-2017 terlihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.10 Defisit Rill Anggaran Kota Bekasi, 2013-2019

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Realisasi Pendapatan Daerah	2,960,580,369,589	3,480,340,735,519	3,956,308,126,353	4,213,639,966,190	4,538,278,383,793	4,835,980,257,174	5,963,929,785,384
Dikurangi realisasi							
Belanja Daerah	2,959,889,954,879	3,107,838,415,647	3,882,237,460,467	4,404,495,132,195	4,936,233,095,851	5,001,748,526,414	5,267,665,085,740
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	21,664,300,238	35,812,369,888	27,557,000,000	19,312,369,904	65,562,369,920	41,368,581,250	1,032,000,000
Defisit Riil	-20,973,885,528	336,689,949,984	46,513,665,886	-210,167,535,909	-463,517,081,978	-207,136,850,490	695,232,699,644

Sumber : Hasil Analisis 2020

Tabel 3.11 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Anggaran Kota Bekasi, 2013-2017

No	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	410,240,594,253		746,952,936,446		43,511,506,328		587,746,870,030		306,540,601,875	
2	SiLPA tahun sebelumnya	429,185,663,082	105%	410,240,594,253	55%	53,332	0%	786,239,955,720	134%	587,746,870,030	192%
3	Pelampauan Penerimaan PAD	80,778,094,467	20%	19,079,342,160	3%	-	0%	-	0%	-	0%
4	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	54,655,993,157	13%	17,067,061,627	2%	-	0%	-	0%	-	0%
5	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	121,643,719,656	30%	15,699,791,827	2%	-	0%	-	0%	-	0%
6	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	415,395,295,114	101%	423,928,105,547	57%	-	0%	679,957,406,977	116%	566,756,312,274	185%
7	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
8	Kegiatan Lanjutan	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%

Sumber : BPKAD Kota Bekasi, diolah 2020.

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 tahun ke depan (2019- 2023) dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi.

Pada tahun 2020, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan antisipasi dan penanganan penularan COVID-19. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19. Langkah antisipasi dan penanganan COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang dibebankan pada “Belanja Tidak Terduga” yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Apabila belanja tidak terduga tidak mencukupi, maka dapat menggunakan:

- a. Dana dari penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, dan
- b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat kerja. Mekanisme pergeseran perubahan DPA dilaksanakan melalui perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penangan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk:

1. Melakukan percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas:
 - a. Penanganan kesehatan;
 - b. Penangan dampak ekonomi; dan
 - c. Penyediaan jarring pengaman sosial/ *social safety net*.
2. Melakukan koordinasi dengan Forkopimda organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat/agama untuk:
 - a. Mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat agar tidak mudik guna menghindari penyebaran COVID-19;
 - b. Memberikan arahan secara berjenjang sampai dengan tingkat desa untuk menghindari stigma negative berlebihan terhadap pemudik.
3. Memastikan dan mengawasi:

- a. Kecukupan dan kelancaran distribusi sembako di daerah.
- b. Aktivitas industri dan pabrik serta dunia usaha yang menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan penanganan COVID-19 tetap berjalan.
4. *Refocusing* dan perubahan alokasi anggaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan Instruksi Menteri.
5. Pemerintah Daerah yang belum melaksanakan percepatan *refocusing* dan perubahan alokasi anggaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari akan dilakukan rasionalisasi dana transfer.
6. APIP secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Menteri ini.

Adapun fokus belanja dalam rangka penanganan COVID-19 diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020. Dalam Surat Edaran Bersama ini disebutkan hal-hal yang harus segera dilakukan Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Melakukan **penyesuaian target pendapatan daerah** dalam APBD melalui penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan Dana Desa dan penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Melakukan **penyesuaian belanja daerah** melalui Rasionalisasi Belanja Pegawai, Barang/Jasa, dan Belanja Modal.
3. Penyesuaian pendapatan dan belanja digunakan untuk mendanai **Bidang Kesehatan, Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/*Social Safety Net*, dan Pengamanan Dampak EKonomi.**
4. Melakukan **pengutamaan penggunaan anggaran dan metode pelaksanaan kegiatan dan anggaran.**

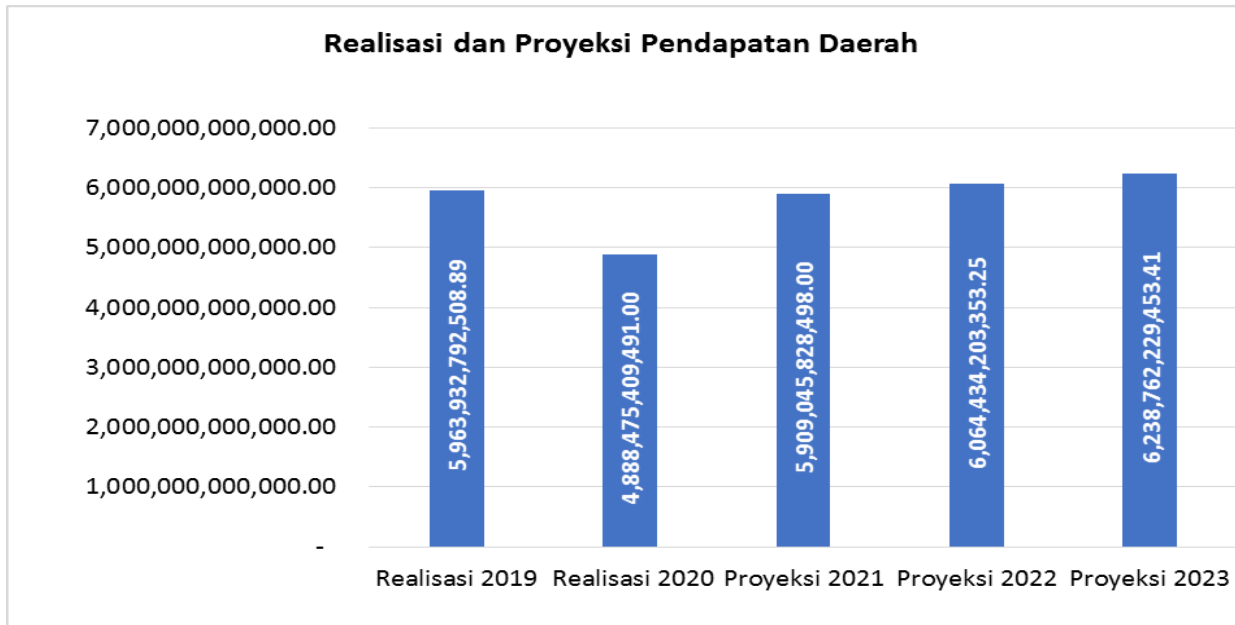
Untuk melaksanakan ketentuan keputusan bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, maka Walikota Bekasi mengeluarkan instruksi Nomor 903/473/SETDA.TU tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Kota Bekasi

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

A. Pendapatan

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Gambar 3-5. Dalam penyusunan proyeksi pendapatan daerah ini perlu mempertimbangkan beberapa asumsi terkait dengan pertumbuhan pendapatan Kota Bekasi selama beberapa tahun ke belakang, potensi pendapatan daerah yang dapat diperoleh

Pemerintah Kota Bekasi selama lima tahun ke depan, dan kebijakan keuangan pemerintah pusat, serta kondisi ekonomi makro Kota Bekasi.



Sumber : Bapenda, 2020

Gambar 3-5 Realisasi & Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2019-2023

Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun 2021-2023 ini sudah memasukkan komponen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya.

Memperhatikan dampak pandemi Covid-19 dan *refocusing* anggaran pada tahun 2020, proyeksi pendapatan daerah Kota Bekasi pada akhir tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp 5.218.205.981.323,- atau turun sebesar 10,45 persen dari proyeksi yang ditetapkan pada APBD Murni Tahun 2020. Tahun 2021, pendapatan daerah Kota Bekasi diproyeksikan masih akan mengalami peningkatan sebesar 14,93 persen menjadi Rp 5.997.539.692,498,- dibandingkan saat proyeksi perubahan APBD tahun 2020. Selanjutnya, pendapatan Kota Bekasi diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan sebesar 7,43 persen pada tahun 2022, dan 7,50 persen pada tahun 2023. Proyeksi pertumbuhan pendapatan daerah Kota Bekasi tahun 2019-2023 dapat dilihat Gambar 3-6.



Sumber : Hasil Analisis, 2020

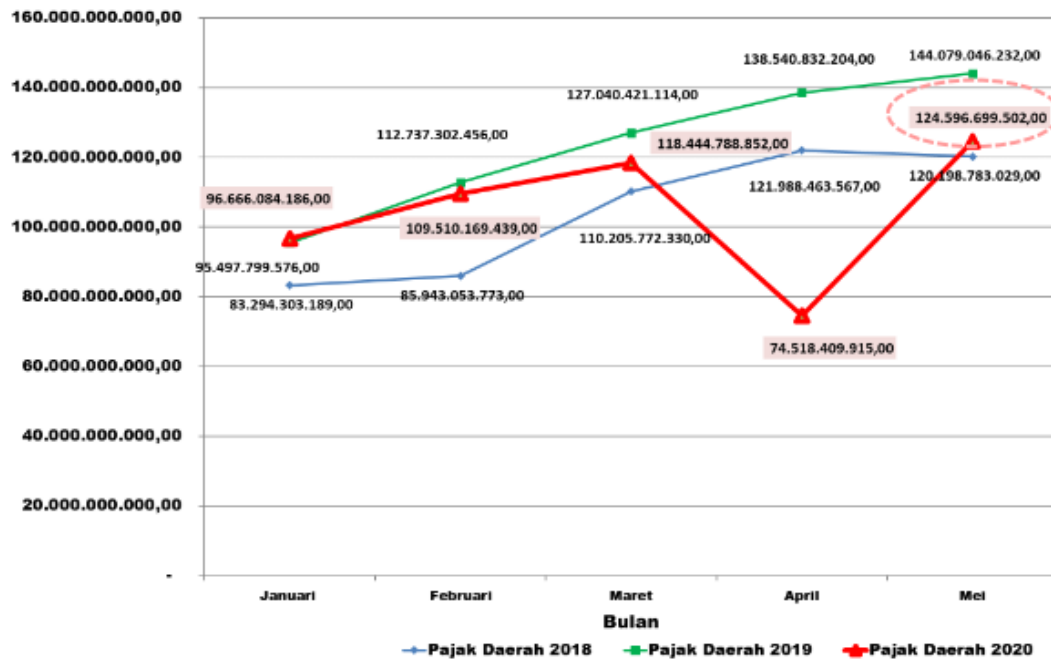
Gambar 3-6 Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2020-2023 (%)

Salah satu sumber utama penerimaan kas daerah adalah pendapatan daerah. Pendapatan Daerah merupakan penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Penerimaan Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah mencakup dana hibah, dana darurat, dan/atau pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Instruksi Walikota Bekasi Nomor 903/473/SETDA.TU tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Kota Bekasi sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020. Dalam instruksi tersebut, penyesuaian Pendapatan Daerah dilakukan dengan ketentuan:

1. Penyesuaian pendapatan Transfer ke Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
2. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Bekasi serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.

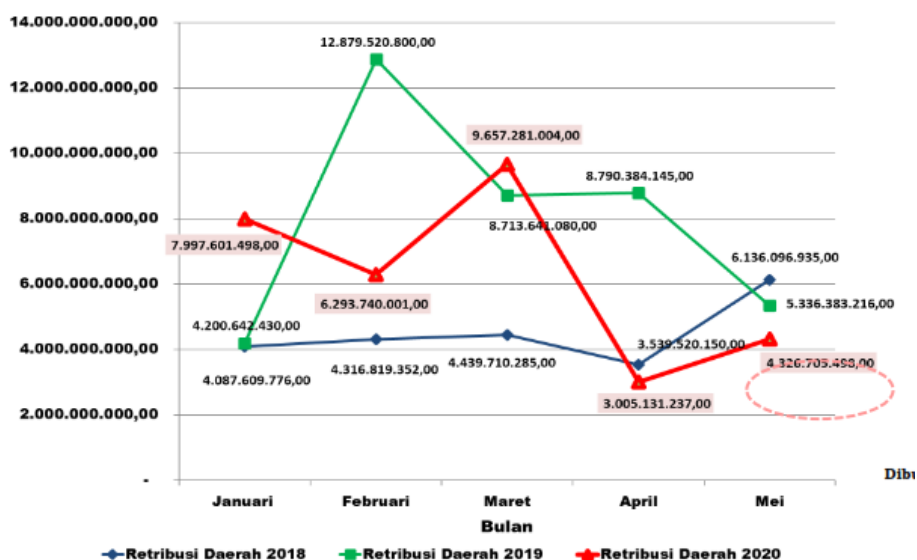
Menurunnya proyeksi pendapatan pada tahun 2020 dipicu karena penurunan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah. Penurunan pajak daerah terutama terjadi pada bulan April 2020, yaitu sebesar Rp 74.518.409.915,- turun sebesar 37,09 persen dari bulan Maret sebesar Rp 118.444.788.852,-



Sumber: Bapenda Kota Bekasi, 2020

Gambar3.7. Realisasi Pajak Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2020

Penurunan yang tajam juga terjadi pada perolehan Hasil Retribusi Daerah. Pada bulan April 2020, pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 3.005.131.237,- turun sebesar 68,88 persen dari bulan sebelumnya sebesar Rp 9.657.281.004,-.



Sumber: Bapenda Kota Bekasi, 2020

Gambar 3.8. Realisasi Retribusi Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2020

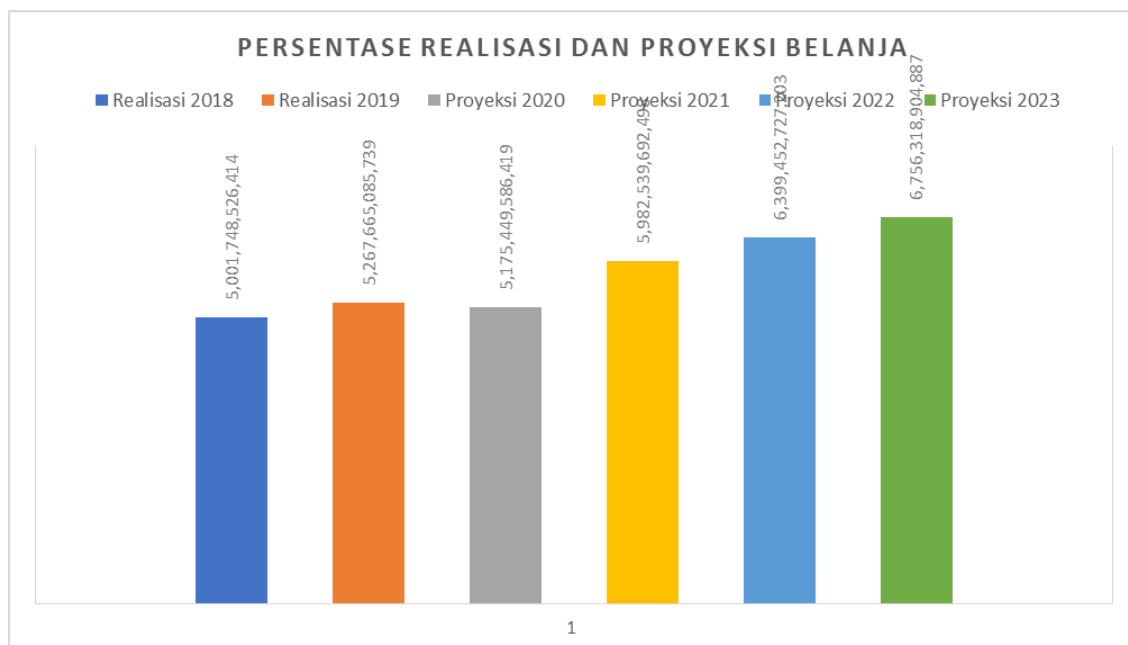
Untuk mencapai proyeksi pendapatan daerah Kota Bekasi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, perlu beberapa kebijakan yang dilakukan di masa mendatang, antara lain:

- 1) Peningkatan pendapatan daerah dari komponen PAD yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah melalui reaktivasi kegiatan usaha, penguatan contributor PDRB, dan pendayagunaan potensi ekonomi baru.
- 2) Penyempurnaan sistem dan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Identifikasi objek-objek wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
- 4) Peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah melalui pengelolaan sumberdaya daerah secara lebih profesional.
- 5) Intensifikasi pendapatan daerah melalui penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah.

B. Belanja

Proyeksi belanja daerah dilakukan dengan memperhatikan proyeksi pendapatan daerah Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun ke depan dan kemampuan keuangan pemerintah daerah Kota Bekasi dalam menutup kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Akan tetapi, kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Bekasi selama ini berpegang pada prinsip keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Untuk itu, belanja daerah Kota Bekasi disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan yang sama dengan pertumbuhan pendapatan daerah Kota Bekasi.

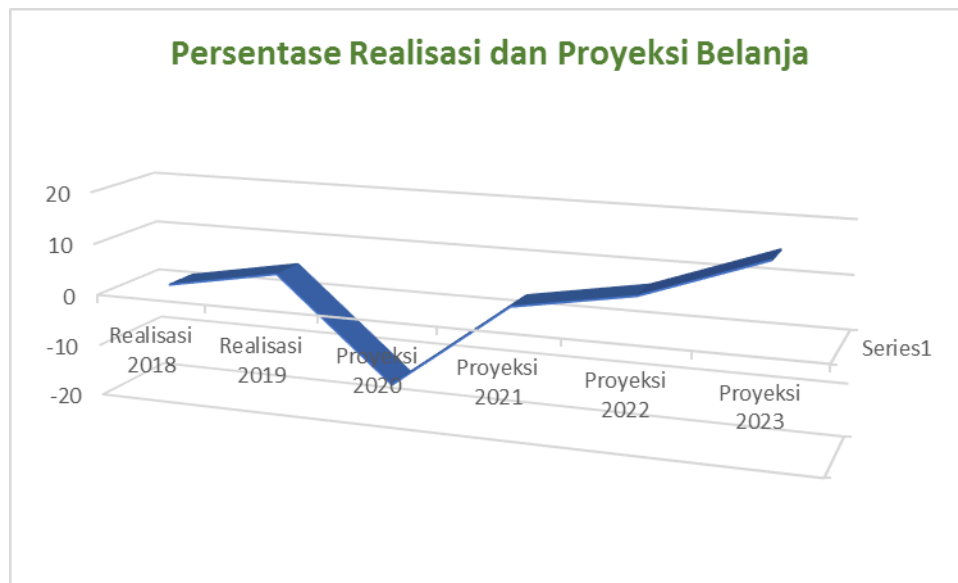
Berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan capaian riil belanja tahun 2018 dan 2019, belanja daerah Kota Bekasi pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp 5.982.539.692.498,- dan akan meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp 6.399.713.169.716,-. Belanja daerah akan tumbuh menjadi Rp 6.647.775.828.202,- pada tahun 2023. Proyeksi belanja Daerah Kota Bekasi kurun waktu 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 3-.



Sumber : Hasil Analisis, 2020

Gambar 3-9 Proyeksi Belanja Daerah Kota Bekasi, 2020-2023

Untuk proyeksi pertumbuhan belanja Daerah Kota Bekasi kurun waktu 2018-2023 dapat dilihat pada Gambar 3-8.



Sumber : Hasil Analisis, 2020

Gambar 3-10 Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Bekasi, 2020-2023 (%)

Grafik di atas menunjukkan pertumbuhan belanja daerah Kota Bekasi tahun 2019-2023. Dari gambar 3-8 dapat dilihat pertumbuhan belanja diperkirakan mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023.

Dalam memproyeksikan belanja pada tahun 2021 dan tahun berikutnya didasarkan atas kebijakan refocusing belanja menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional yang dilakukan pada Perubahan Penjabaran ke 3 (tiga) APBD Tahun 2020 sebagai acuan proyeksi pertumbuhan belanja mulai dari tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya. Pertumbuhan proyeksi belanja dipengaruhi oleh asumsi penerimaan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer baik dari Pemerintah Pusat seperti DAU, DAK, Dana Bagi Hasil dan Dana Insentif Daerah dengan proyeksi sama dengan penerimaan pada tahun 2020 setelah dilakukan penyesuaian pendapatan. Selain itu Pendapatan Transfer Antar Daerah bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 diproyeksikan berdasarkan pengajuan yang sudah disampaikan ke tiap pemerintah provinsi terkait. Penempatan belanja-belanja yang bersumber dari Dana Transfer tersebut merupakan yang bersifat earmark dengan asumsi pertumbuhan disesuaikan dengan rata-rata kenaikan besaran belanja tahunan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan juga menghitung target program tahunan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD diubah dari struktur sebelumnya sehingga jenis Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tidak digunakan. Adapun struktur APBD yang akan disusun pada revisi RPJMD Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , tersebut antara lain :

- a. **Belanja Operasi**, diharapkan mampu meningkatkan kinerja aparatur dan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan memprioritaskan untuk:
 - 1) Membiayai belanja pegawai
 - 2) Membiayai belanja barang;
 - 3) Membiayai Subsidi;
 - 4) Membiayai Hibah;
 - 5) Membiayai Bantuan Sosial.
- b. **Belanja Modal** diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yaitu dengan memprioritaskan untuk :
 - 1) Belanja Modal Tanah;
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- c. **Belanja Tak Terduga** adalah pengeluaran untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, kejadian luar biasa (KLB) dan pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- d. **Belanja Transfer** merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, dan dirinci atas jenis :
 - 1) Belanja Bagi Hasil;
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan, diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pembiayaan

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat melakukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah. Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian melalui pembentukan dan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD adalah :

- a. Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan bagian dari investasi langsung. Untuk itu perlu dilakukan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko atas penyertaan modal tersebut.
- b. Dana untuk penyertaan modal harus berasal dari surplus APBD;
- c. Penyertaan modal harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah;
- d. Penyertaan modal dapat berupa uang atau barang milik daerah,
- e. Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD;
- f. Penyertaan modal pemerintah harus memperhatikan aspek keamanan, sehingga keputusan penyertaan modal harus didasarkan pada analisis investasi agar dana publik terbebas dari risiko kerugian.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Bekasi dimungkinkan memanfaatkan surplus APBD untuk melakukan penyertaan modal kepada BUMD yang ada. Tujuan melakukan penyertaan modal pada BUMD adalah untuk memanfaatkan adanya surplus APBD, mengembangkan jangkauan pelayanan BUMD, dan menambah sumber pendapatan daerah.

Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dilakukan berdasarkan pertumbuhan realisasi besaran SILPA periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Direncanakan proyeksi nilai dan tingkat pertumbuhan SILPA tahun 2018-2023 sebesar minus 25,25%.

Berikut ini disajikan Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2023.

Untuk Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dan 2020 masih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dimana Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebagaimana disajikan pada Tabel 3.12.a berikut ini.

Tabel 3.12a.

**Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019 s/d Tahun 2020 Kota Bekasi
(Rupiah)**

No.	URAIAN	TA. 2019*)	TA. 2020**)
I	PENDAPATAN DAERAH	5,963,932,792,508.89	4,888,475,409,491.00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,442,151,873,746.89	2,044,486,133,856.00
1.1.1.	Pajak Daerah	1,778,314,661,578.00	1,557,393,746,939.00
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	120,560,321,129.49	75,813,251,762.00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	12,173,862,434.00	11,949,321,848.00
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	531,103,028,605.40	399,329,813,307.00
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1,686,699,237,834.00	1,630,792,947,810.00
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	114,680,225,376.00	169,743,592,123.00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1,277,169,857,000.00	1,147,628,323,000.00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	294,849,155,458.00	313,421,032,687.00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1,835,081,680,928.00	1,213,196,327,825.00
1.3.1.	Pendapatan Hibah	192,671,706,540.00	-
1.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	811,483,111,469.00	714,228,381,299.00
1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	60,780,190,000.00	71,382,704,000.00
1.3.4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	770,146,672,919.00	427,585,242,526.00
II	BELANJA DAERAH	5,567,923,376,279.03	4,583,151,980,580.00
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,909,565,700,219.00	2,101,913,801,466.00
2.1.1.	Belanja Pegawai	1,708,561,985,966.00	1,721,275,288,205.00
2.1.2.	Belanja Subsidi	5,543,886,923.00	4,441,356,961.00
2.1.3.	Belanja Hibah	94,504,751,250.00	56,294,150,650.00
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	98,669,460,000.00	99,951,730,000.00
2.1.5.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1,546,647,000.00	1,668,321,000.00
2.1.6.	Belanja Tidak Terduga	738,969,080.00	218,282,954,650.00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	3,658,357,676,060.03	2,481,238,179,114.00
2.2.1.	Belanja Pegawai	191,289,754,047.00	77,328,227,082.00
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,362,558,547,595.29	1,644,318,573,124.00
2.2.3.	Belanja Modal	1,104,509,374,417.74	759,591,378,908.00
	SURPLUS / DEFISIT	396,009,416,229.86	305,323,428,911.00
III	PEMBIAYAAN NETTO	98,328,183,313.14	471,837,599,543.00
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	99,360,183,313.14	494,337,599,543.00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	99,360,183,313.14	494,337,599,543.00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1,032,000,000.00	22,500,000,000.00
3.2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,032,000,000.00	22,500,000,000.00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	494,337,599,543.00	777,161,028,454.00

Catatan :

*) Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019, BPKAD 2020;

**) Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020, BPKAD 2021.

Sedangkan untuk Tahun 2021 hingga Tahun 2023, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Struktur APBD menggunakan struktur baru sebagaimana disajikan pada Tabel. 3.12.b

Tabel 3.12.b
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2023
Kota Bekasi (Rupiah)

URAIAN	TA. 2021	TA. 2022	TA. 2023
PENDAPATAN DAERAH	5,909,045,828,498.00	6,064,434,203,353.25	6,238,762,229,453.41
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,535,157,435,813.00	2,788,644,102,710.00	3,067,650,329,500.00
Pajak Daerah	1,941,249,180,504.00	2,114,682,500,000.00	2,318,366,688,500.00
Hasil Retribusi Daerah	103,960,002,409.00	134,350,000,000.00	158,167,500,000.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	11,579,005,526.00	12,171,200,000.00	12,779,760,000.00
Lain-lain PAD Yang Sah	478,369,247,374.00	527,440,402,710.00	578,336,381,000.00
PENDAPATAN TRANSFER	3,173,518,792,685.00	3,073,484,808,776.25	2,958,691,343,493.06
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,560,971,194,000.00	1,639,019,753,700.00	1,720,970,741,385.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	1,612,547,598,685.00	1,434,465,055,076.25	1,237,720,602,108.06
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	200,369,600,000.00	202,305,291,867.00	212,420,556,460.35
BELANJA DAERAH	6,113,945,828,497.82	6,116,934,203,352.75	6,247,262,229,453.33
BELANJA OPERASI	4,836,049,174,372.82	4,880,950,649,604.00	4,977,199,169,092.12
Belanja Pegawai	2,096,566,061,790.00	2,159,463,043,643.70	2,224,246,934,953.01
Belanja Barang dan Jasa	2,445,539,426,782.82	2,518,905,609,586.30	2,544,472,777,873.89
Belanja Bunga	0	-	-
Belanja Subsidi	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
Belanja Hibah	167,621,445,800.00	72,650,089,174.00	74,829,591,849.22
Belanja Bantuan Sosial	120,322,240,000.00	123,931,907,200.00	127,649,864,416.00
BELANJA MODAL	1,101,228,333,125.00	1,134,265,183,118.75	1,168,293,138,612.31
Belanja Tanah	79,383,496,857.00	81,765,001,762.71	84,217,951,815.59
Belanja Peralatan dan Mesin	107,178,501,670.00	110,393,856,720.10	113,705,672,421.70
Belanja Bangunan dan Gedung	162,404,799,573.00	167,276,943,560.19	172,295,251,867.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	743,933,642,025.00	766,251,651,285.75	789,239,200,824.32
Belanja Aset Tetap lainnya	8,327,893,000.00	8,577,729,790.00	8,835,061,683.70
BELANJA TIDAK TERDUGA	175,000,000,000.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
BELANJA TRANSFER	1,668,321,000.00	1,718,370,630.00	1,769,921,748.90
Belanja Bagi Hasil	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	1,668,321,000.00	1,718,370,630.00	1,769,921,748.90
SURPLUS/ (DEFISIT)	-204,900,000,000.00	-52,500,000,000.00	-8,500,000,000.00

Sumber : TAPD, diolah 2020.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

A. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Bagian ini menguraikan penghitungan kerangka pendanaan yang bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Berdasarkan hasil penghitungan, total penerimaan diproyeksikan menurun dari Rp.7.071.955.372.259,91,- pada Proyeksi APBD Tahun 2019 menjadi Rp 6.238.762.229.453,41,- pada Tahun 2023.

Proyeksi total penerimaan setelah dikurangi dengan proyeksi belanja operasi akan diperoleh angka proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Bekasi. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Bekasi pada Tahun 2023 sebesar Rp.1.168.293.138.612,39,-.

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Bekasi periode tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.13 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Bekasi, 2019-2023

No	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan	6,972,559,854,874.91	5,273,398,386,062.00	5,909,045,828,498.00	6,064,434,203,353.25	6,238,762,229,453.41
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	99,395,517,385.00	419,885,043,312.00	215,000,000,000.00	75,000,000,000.00	31,000,000,000.00
	Total Penerimaan	7,071,955,372,259.91	5,693,283,429,374.00	6,124,045,828,498.00	6,139,434,203,353.25	6,269,762,229,453.41
	Dikurangi :					
4	Belanja Operasi	2,733,837,213,302.00	2,322,206,280,248.00	5,012,717,495,372.82	4,982,669,020,234.00	5,078,969,090,841.02
5	Pengeluaran Pembiayaan	23,500,000,000.00	32,500,000,000.00	10,100,000,000.00	22,500,000,000.00	22,500,000,000.00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	4,314,618,158,957.91	3,338,577,149,126.00	1,101,228,333,125.18	1,134,265,183,119.25	1,168,293,138,612.39

Sumber : Hasil Proyeksi, 2020

B. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia bagi kepentingan masyarakat dan untuk pencapaian efektifitas program. Dalam menentukan alokasi anggaran perlu skala prioritas dan kebutuhan karena adanya keterbatasan anggaran.

Prioritas alokasi anggaran dalam penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 2 (dua). Prioritas I dialokasikan untuk belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Sedangkan Prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Walikota dan Wakil Walikota Bekasi.

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bekasi 2019-2023 disajikan pada Tabel 3.13.

3.4. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan seluruhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pembiayaan lain-lain. Sumber pembiayaan Non APBD tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Total Pembiayaan APBN selama periode 2013-2017 adalah sebesar 970.393.336.735. Pembiayaan tersebut merupakan Dana BOS Pusat dan Bantuan Sosial, dengan nilai terbesar sejumlah 241.338.293.710 pada tahun 2015. Kota Bekasi tidak memperoleh pendanaan dari Provinsi, sedangkan untuk Pembiayaan lain-lain senilai total 1.747.132.830.001 selama periode 2013-2017. Nilai total untuk seluruh Pembiayaan Non APBD di kota Bekasi selama 5 tahun adalah sebesar 2.717.526.166.736.

Sumber pendanaan lain yang ditempuh untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi adalah dengan skema kerjasama, baik kerjasama antar daerah maupun kerjasama dengan pihak ketiga atau yang kini dikenal dengan KPBU (Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha). Untuk kerjasama antar daerah, Pemerintah Kota Bekasi selama ini telah terlibat aktif dalam beberapa pemerintah daerah lain, seperti:

1. Kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung untuk Pengaplikasian Konsep *Smart City*, dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berbasis teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta sinkronisasi dalam tata kelola pemerintahan;
2. Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Peningkatan Pemanfaatan Lahan TPA Sampah menjadi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi. Melalui kerjasama ini pengelolaan sampah di TPST Bantargebang didorong untuk menjadi tempat pengolahan sampah yang menggunakan teknologi modern yang ramah lingkungan berupa sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*), insenerasi, komposting, gasifikasi, *waste to energy*, dan teknologi lainnya. Berdasarkan

perjanjian ini terdapat kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengalokasikan bantuan dana kompensasi yang diberikan kepada wilayah di sekitar TPST Bantar Gebang. Untuk bantuan langsung tunai (BLT) diterima masyarakat pada tiga kelurahan selama tahun 2019 saja jumlahnya Rp 65.559.600.000.;

3. Kerjasama dengan Badan Kerja Sama Pembangunan Jabodetabekjur sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Pembangunan Perluasan Jaringan Jalan Lintas Batas Wilayah Provinsi Jawa Barat di Kota Bekasi. Kerjasama melingkupi penyediaan daftar/repositori aplikasi yang dapat diberikan pemanfaatannya secara cuma-cuma, penetapan aplikasi yang akan diunduh dan diaplikasikan dan/atau dikembangkan, perencanaan, penyiapan infrastruktur, sarana dan prasarana termasuk SDM, administrasi serta penganggaran untuk instalasi, pengembangan dan implementasi aplikasi;
4. Kerjasama dengan Pemerintah Kota Tangerang dalam Pemanfaatan Aplikasi *Smart City* dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Ruang lingkup kerjasama meliputi: (a) pemanfaatan TIK potensial lintas daerah yang saling menguntungkan; (b) integrasi konsep dan *platform smart city* sebagai sebuah solusi pelayanan masyarakat; (c) berbagi aplikasi untuk percepatan dan efisiensi pengembangan *smart city*; (d) kemitraan dan *research smart city*, pengembangan SDM dan *sharing knowledge*; dan (e) bidang-bidang lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan para pihak;
5. Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Pengelolaan Pendidikan SMA/SMK di Kota Bekasi. Ruang lingkup kerjasama meliputi: (a) penyaluran bantuan operasional sekolah (BOS) untuk SMA/SMK Negeri dan SMA/SMK Swasta di Kota Bekasi; (b) pemberian tunjangan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk SMA/SMK di Kota Bekasi; (c) pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana unit sekolah baru negeri tingkat SMA/SMK di Kota Bekasi;
6. Kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya terkait Pengembangan Jaringan Perkotaan. Ruang lingkup kerjasama meliputi: (a) kerjasama jaringan perkotaan; (b) teknologi dan informasi terbatas pada pembelanjaan sistem aplikasi yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya; (c) perdagangan; (d) bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan dan dipandang relevan;
7. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait Pembangunan Wilayah Perbatasan; dan lain sebagainya.

Untuk kerjasama dengan pihak ketiga (KPBU), Pemerintah Kota Bekasi selama ini telah terlibat aktif dalam beberapa kerjasama yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 6 Seri E). Beberapa contoh kerjasama dimaksud adalah:

1. PT. BPRS Patriot Kota Bekasi;

2. PT. Trio Propertindo Jaya;
3. PT. Asuransi Jiwa TASPEN;
4. Universitas Padjadjaran, Bandung;
5. PT. Aneka Sumber Daya Energi;
6. PT. Annisa Bintang Blitar;
7. PT. Mukti Sarana Abadi;
8. PT. Javana Arta Perkasa;
9. PT. Indosat, Tbk;
10. Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Bekasi;
11. Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Bekasi;
12. PT. Aditama Satrindo Internusa;
13. Universitas Krisnadwipayana, Jakarta;
14. Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Bekasi;
15. Yayasan ICLEI-Local Government for Sustainability Indonesia;
16. PT. Metropolitan Land Tbk;
17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
18. Universitas Indonesia, Depok;
19. Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia;
20. Forum Seniman Bekasi;
21. Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Bekasi;
22. PT Hasana Damai Putra terkait Penataan Pemanfaatan dan Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Perdagangan dan Industri yang berlokasi di Kawasan Harapan Indah Kota Bekasi;
23. PT. BPRS Patriot Kota Kencana Bekasi terkait Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Kota Bekasi;
24. PT Bangun Prima Lestari Kencana terkait Pengelolaan Pasar Baru Bekasi ;
25. PT Triview Geospatial Mandiri terkait Pemanfaatan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan untuk Bangun Menara Telekomunikasi *Base Transceiver Station (BTS) Type Monopole*;
26. PT Bali Towerindo Sentra Tbk terkait Pemanfaatan Tanah dan/atau Lahan Prasarana Sarana dan Utilitas untuk Pemasangan *Base Transceiver Station (BTS) Microcell* dan Jaringan Fiber Optik dengan Metode Kamufase di Kota Bekasi;
27. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Bekasi dan PT BJB Cabang Bekasi terkait Penyelenggaraan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
28. Dan lain sebagainya.

Dengan skema kerjasama ini, Pemerintah Kota Bekasi memperoleh cukup sumber pendanaan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi, baik melalui penyertaan maupun swadaya dan sumbangan-sumbangan non-finansial (*in kind*) yang tidak kalah manfaatn

Tabel 3.23 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bekasi 2019-2023

No.	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	4,314,618,158,957.91	3,338,577,149,126.00	1,101,228,333,125.18	1,134,265,183,119.25	1,168,293,138,612.39
	Prioritas I	827,780,589,000.00	869,169,618,450.00	873,515,466,542.00	877,883,043,875.00	882,272,459,094.00
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	770,808,569,000.00	809,348,997,450.00	813,395,742,437.00	817,462,721,149.00	821,550,034,755.00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	49,106,750,000.00	51,562,087,500.00	51,819,897,938.00	52,078,997,427.00	52,339,392,414.00
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	4,445,270,000.00	4,667,533,500.00	4,690,871,168.00	4,714,325,523.00	4,737,897,151.00
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,570,000,000.00	1,648,500,000.00	1,656,742,500.00	1,665,026,213.00	1,673,351,344.00
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,850,000,000.00	1,942,500,000.00	1,952,212,500.00	1,961,973,563.00	1,971,783,430.00
	Prioritas II	3,486,837,569,957.91	2,469,407,530,676.00	227,712,866,583.18	256,382,139,244.25	286,020,679,518.39

Sumber : Hasil Proyeksi, 2020



BAB 4

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PREMBANGUNAN KOTA BEKASI

TAHUN 2018-2023

Permasalahan dan isu-isu strategis merupakan salah satu bagian penting dari dokumen RPJMD karena akan menjadi salah satu pertimbangan dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Bekasi. Penyajian permasalahan dan isu-isu strategis diharapkan dapat menjelaskan butir-butir penting yang akan menentukan kinerja pembangunan Kota Bekasi dalam sisa 3 tahun kepemimpinan mendatang.

4.1 PERMASALAHAN

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang telah dicapai saat ini dan yang telah direncanakan sebelumnya, serta antara kesenjangan antara kondisi yang ingin dicapai pada masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kegagalan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja pembangunan daerah pada masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan untuk memetakan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat 2 (dua) kategori permasalahan yang perlu diidentifikasi yakni permasalahan pembangunan daerah dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, yang keduanya saling terkait satu dengan lainnya.

Pada bulan Maret 2020 masyarakat Kota Bekasi terdampak penyebaran pandemi covid-19, hal ini berdampak pada Pemerintah Kota Bekasi untuk menerapkan kebijakan dalam penanganan COVID-19, yaitu bertindak inisiatif dan bekerja sesuai protokol. Sebagai langkah kesiapsiagaan inisiatif, siaga COVID-19 telah disampaikan kepada publik di Kota Bekasi sejak Bulan Januari 2020, sebelum *World Health Organization* (WHO) menyatakan COVID-19 sebagai pandemik (11 Maret 2020). Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor.440/788/Dinkes tentang Alur Kesiap Siagaan dalam menghadapi Infeksi 2019-NCoV di Kota Bekasi, Tanggal 31 Januari 2020 telah dibuat berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Dinas Kesehatan tentang Kewaspadaan, Kesiap Siagaan dan Antisipasi Penyebaran Penyakit Pneumonia Berat yang Belum Diketahui Etiologinya No 443/349/Dinkes-GADALKIT, Tanggal 24 Januari 2020.

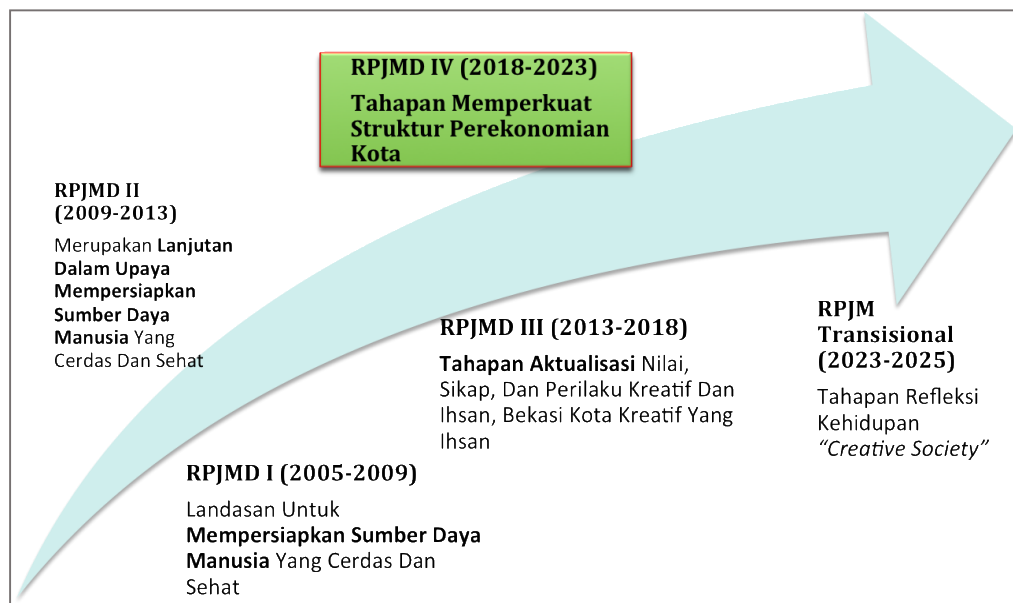
4.1.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 258 terkait pembangunan daerah, menyebutkan bahwa "*Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja,*

lapangan berusaha, akses, dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah”. Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dan yang direncanakan serta antara kondisi yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah.

Permasalahan pembangunan daerah Kota Bekasi pada periode RPJMD tahun 2018-2023 diidentifikasi berdasarkan *gap* antara tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Bekasi Tahun 2005-2025, khususnya tujuan dan sasaran pembangunan pada tahap ke-4 yakni RPJMD 2018-2023 serta diintegrasikan dengan permasalahan yang merupakan *gap* ketidaktercapaian tujuan dan sasaran pembangunan pada periode RPJMD sebelumnya serta permasalahan kekinian yang dihadapi Kota Bekasi yang bersumber dari perubahan lingkungan strategis eksternal maupun internal. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, indikator kinerja pembangunan daerah yang diidentifikasi permasalahannya meliputi 3 (tiga) aspek utama pembangunan daerah yakni kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta pelayanan umum.

- a. Permasalahan terkait Tema Pembangunan Tahap Ke-4 (2018-2023) RPJPD Kota Bekasi



Sumber: Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013.

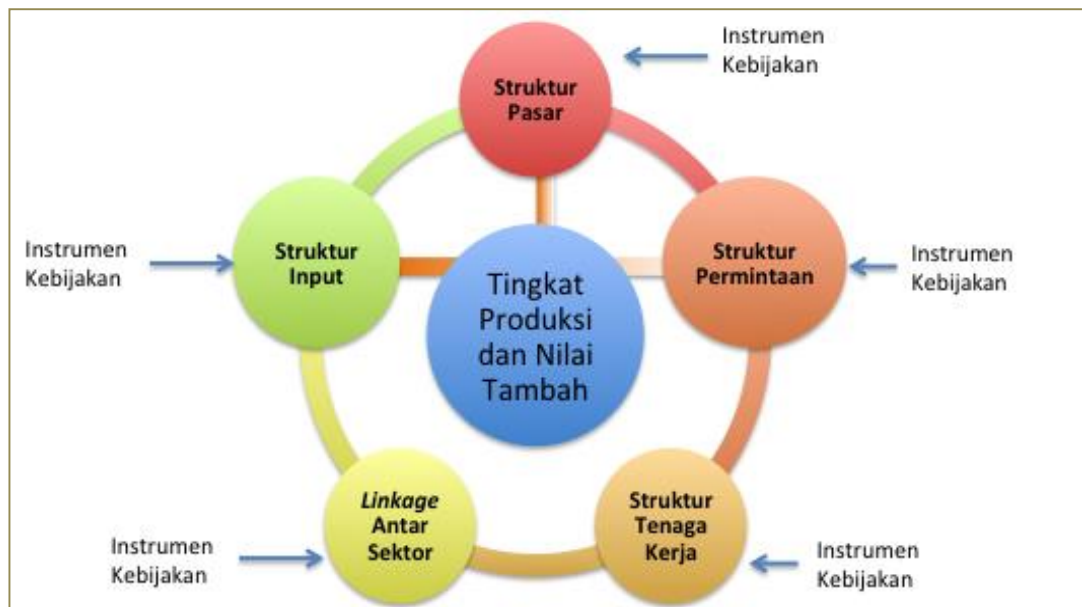
Gambar 4.1. Tahapan Pembangunan Kota Bekasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi Tahun 2005-2025, Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 adalah: “Bekasi Kota Kreatif yang Ihsan”. Upaya mewujudkan visi tersebut dilakukan dengan pentahapan

pembangunan dalam 5 (lima) tahunan dengan fokus tiap tahapan seperti terlihat pada Gambar 4.1 di atas.

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 merupakan tahapan ke-4 dalam kerangka pembangunan jangka panjang Kota Bekasi. Tahap ini bertujuan untuk memperkuat struktur perekonomian kota agar semakin kokoh dan kompetitif guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian. Berdasarkan amanah tersebut maka tujuan pembangunan pada periode 2018-2023 adalah ”memperkuat perekonomian Kota Bekasi agar makin kompetitif dan mandiri”.

Struktur perekonomian kota adalah komposisi dan pola dari berbagai komponen ekonomi seperti: produksi, lapangan kerja, konsumsi, perdagangan, dan produk regional (Thakur, 2011). Upaya memperkuat struktur perekonomian kota perlu memahami kinerja dari komponen-komponen struktur ekonomi kota sebagai pintu masuk perumusan kebijakannya. Secara garis besar komponen utama dari struktur perekonomian kota dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Sumber : Thakur, 2011, diolah 2018.

Gambar 4.2. Garis Besar Komponen Struktur Perekonomian Kota

Upaya untuk membangun dan memperkuat struktur perekonomian Kota Bekasi sesuai amanah RPJPD 2005-2025 dapat diawali dengan mengkaji permasalahan yang dihadapi pada tiap-tiap komponen tersebut. Pembahasan permasalahan pada tiap komponen struktur ekonomi kota dijabarkan pada pembahasan berikutnya.

b. Permasalahan terkait Tingkat Produktivitas Sektor Ekonomi Kota.

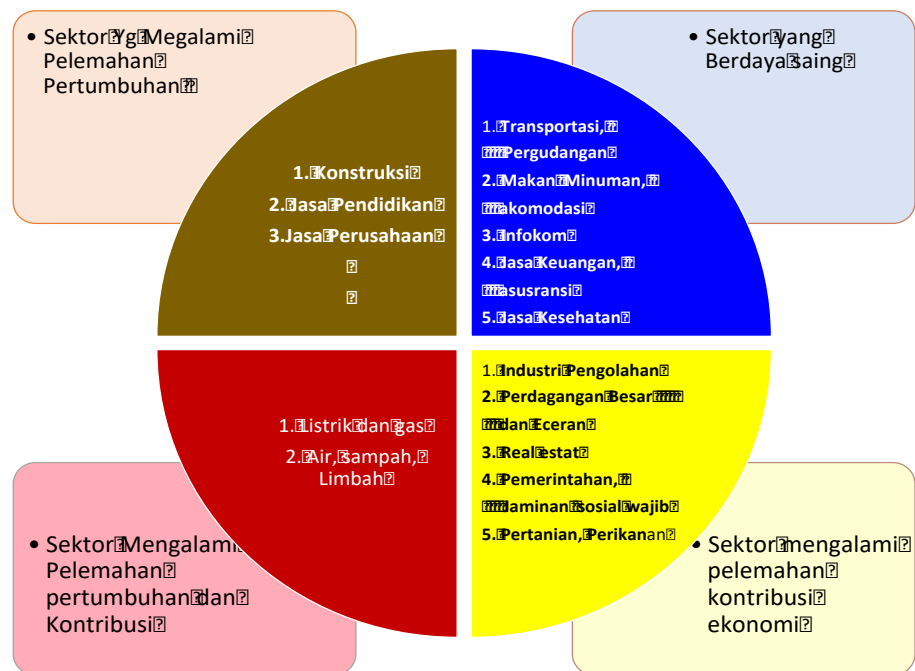
Mengacu pada hasil kajian kinerja pertumbuhan dan kontribusi sektor ekonomi kota pada Bab 2 terdahulu, diperoleh gambaran bahwa dari 16 sektor ekonomi utama Kota Bekasi terdapat 2 (dua) sektor yang menunjukkan permasalahan berupa penurunan/ pelemahan

kinerja pertumbuhan dan penurunan kontribusi. Kedua sektor yang menunjukkan penurunan/pelemahan kinerja pertumbuhan adalah:

- (1) sektor utilitas (listrik, gas dan air minum); dan
- (2) sektor jasa pelayanan umum seperti persampahan dan pengolahan limbah.

Permasalahan juga teridentifikasi dari pelemahan kontribusi sektor-sektor yang saat ini menjadi basis ekonomi Kota Bekasi, yakni sektor industri pengolahan dan perdagangan. Kedua sektor tersebut merupakan sektor yang menyumbang output ekonomi kota terbesar (56 persen terhadap PDRB) serta penghasil pertumbuhan ekonomi terbesar Kota Bekasi saat ini. Ternyata sektor ini dalam kurun waktu 2013-2018 mengalami penurunan kontribusi walaupun pertumbuhannya masih positif. Kondisi ini akan menjadi masalah bila kontribusi yang menurun tersebut diikuti laju pertumbuhan yang menurun sehingga bisa berdampak luas, di antaranya terjadinya pengangguran. Sementara itu sektor jasa pendidikan dan perusahaan dikhawatirkan akan mengalami penurunan kinerja daya saing di masa depan mengingat laju pertumbuhannya yang cenderung terus menurun.

Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan meningkatnya daya saing ekonomi sektor UMKM di masyarakat. Peran pemerintah hadir dalam kebijakan stimulan ekonomi kerakyatan. Lebih jelasnya, gambaran tentang kinerja pertumbuhan dan kontribusi sektor ekonomi Kota Bekasi dapat diikuti pada Gambar 4.3. berikut:

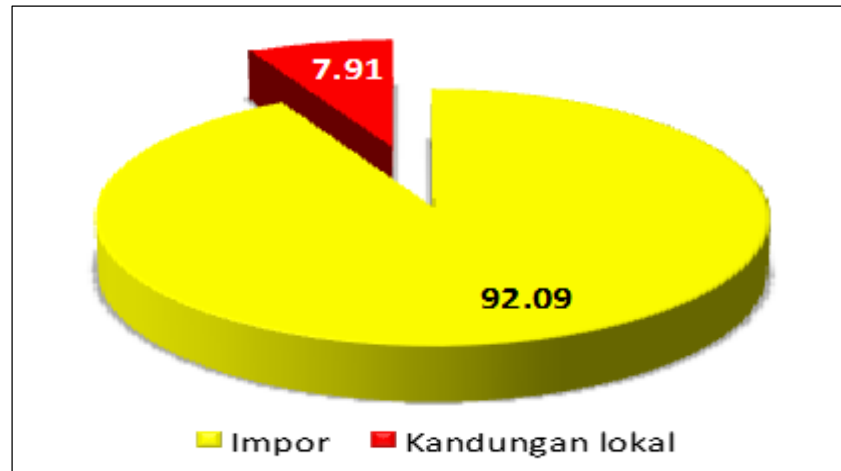


Gambar 4.3. Kinerja Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Ekonomi

- Permasalahan struktur input ekonomi kota

Struktur ekonomi Kota Bekasi yang terbentuk, membutuhkan input berupa bahan baku untuk dapat menghasilkan output ekonominya. Berdasarkan analisis data PDRB maupun tabel I-O Kota Bekasi, maka dapat diidentifikasi bahwa kandungan lokal dari input yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi utama di Kota Bekasi relatif rendah. Kandungan lokal hanya mencapai sekitar delapan persen dari total

kebutuhan input ekonomi Kota Bekasi, sementara sisanya berasal dari luar kota atau impor.



Sumber: PDRB Kota Bekasi 2010-2016, Tabel I-O Kota Bekasi, diolah 2018.

Gambar 4.4. Struktur Input Ekonomi Kota Bekasi

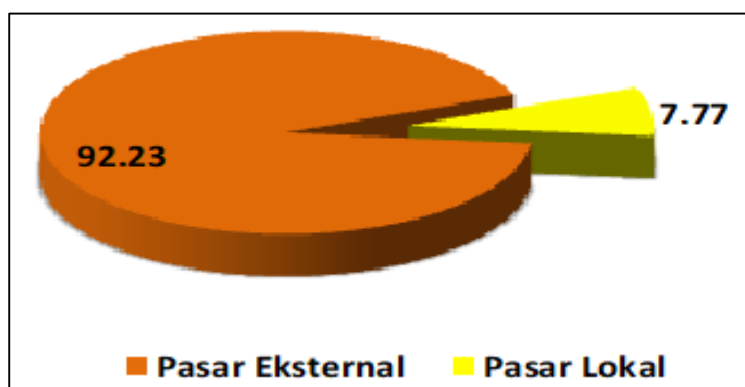
Kandungan lokal yang rendah berpotensi menyebabkan rendahnya nilai tambah dari kegiatan ekonomi Kota Bekasi yang akan berdampak terhadap rendahnya kesejahteraan dan pembangunan Kota Bekasi. Ketergantungan impor juga berpotensi menjadikan Kota Bekasi rentan terhadap dinamika harga-harga yang berlaku di luar kota. Oleh karena itu rendahnya kandungan lokal dalam struktur input ekonomi Kota Bekasi perlu diwaspadai sebagai permasalahan pembangunan ekonomi kota di masa mendatang.

- Permasalahan struktur pasar ekonomi kota

Kinerja ekonomi Kota Bekasi juga dipengaruhi oleh struktur pasar produk yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi Kota Bekasi. Struktur pasar yang terbagi dalam 2 (dua) kategori yakni pasar domestik dan pasar eksternal, mencerminkan sejauh mana keterkaitan ekonomi internal dan eksternal ekonomi kota Bekasi. Dominasi yang besar terhadap pasar domestik berpotensi memperkuat struktur ekonomi yang ada saat ini sehingga memperkuat kemandirian. Sedangkan pasar eksternal yang dominan, selain berpotensi memperkuat keterkaitan ekonomi dengan ekonomi yang lebih luas, di sisi lain juga memiliki risiko ketidakpastian pasar yang tidak bisa diprediksi.

Hasil analisis terhadap data terkait pasar produk kegiatan ekonomi Kota Bekasi menunjukkan bahwa pasar eksternal mendominasi struktur pasar ekonomi Kota Bekasi selama ini. Hal ini bisa berarti bahwa di satu sisi kondisi ekonomi Kota Bekasi memiliki keterkaitan yang kuat dengan ekonomi yang lebih luas, di sisi lain kondisi ini akan memberikan ketidakpastian pasar yang besar dan tidak bisa diprediksi (Gambar 4.5).

Kondisi ideal struktur pasar yang baik adalah struktur pasar yang lebih seimbang antara pasar domestik dengan pasar eksternal. Output sektor ekonomi Kota Bekasi idealnya dapat digunakan sebagai input sektor lain di Kota Bekasi sehingga membentuk *multiplier effect* bagi ekonomi Kota Bekasi yang lebih besar. Dominasi pasar eksternal yang tinggi mengakibatkan *multiplier effect* dari kegiatan ekonomi yang ada saat ini lebih banyak dirasakan di luar wilayah Kota Bekasi.



Sumber: PDRB Kota Bekasi 2010-2016, Tabel I-O, diolah 2018

Gambar 4.5. Struktur Pasar Produk Ekonomi Kota Bekasi

Bila didalami lebih lanjut terkait struktur pasar domestik ekonomi Kota Bekasi, dapat diidentifikasi bahwa permintaan produk dari kegiatan ekonomi Kota Bekasi yang berasal dari wilayah Kota Bekasi didominasi oleh konsumsi rumah tangga sebesar 5,97 persen. Sementara belanja pemerintah hanya menyerap sebesar 0,40 persen dari output kegiatan ekonomi Kota Bekasi.

Tabel 4.1. Struktur Permintaan Akhir Ekonomi Kota Bekasi

Kode	Nama Sektor	Kontribusi sbg Demand Produk Ekonomi Lokal	Distribusi terhadap PDRB*)
301	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,97 %	75,47 %
302	Pengeluaran Pemerintah	0,40 %	5,09 %
303	Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,92 %	11,65 %
304	Perubahan Stok	0,48 %	6,04 %
305	Ekspor	92,23 %	1,75 %
309	Jumlah Permintaan Akhir	100,00 %	

Sumber: Kantor Statistik Kota Bekasi, tahun 2018 diolah.

Kontribusi konsumsi masyarakat pada pembentukan nilai tambah Kota Bekasi (PDRB) mencapai 75,47 persen, sementara pengeluaran pemerintah hanya mencapai 5,09 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa struktur input-output ekonomi Kota Bekasi kurang memiliki keterkaitan yang kuat, sehingga produk kegiatan ekonomi

Kota Bekasi tidak memanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif lainnya.

- Permasalahan struktur tenaga kerja

Seperti telah dibahas pada Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Bekasi, salah satu indikator struktur tenaga kerja Kota Bekasi adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah persentase penduduk angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan/ kemudahan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia, sehingga untuk mendapatkannya relatif mudah.

Di Kota Bekasi, angka partisipasi angkatan kerja cenderung menurun selama periode 2013-2017, yakni dari 63,59 persen tahun 2013 menjadi 60,16 persen tahun 2015, meskipun pada tahun 2014 sempat mencapai angka 64,25 persen. Penurunan angka partisipasi angkatan kerja selama 2013-2015 disebabkan oleh jauh lebih tingginya laju pertumbuhan penduduk bukan angkatan kerja dibandingkan angkatan kerja, yakni rata-rata 8,74 persen berbanding 1,26 persen per tahun sepanjang kurun waktu 2013-2015. Angka partisipasi angkatan kerja pada tahun 2017 naik lagi menjadi 64,35 persen. Sedangkan untuk tahun 2016 tidak dihitung karena adanya pengurangan sampel dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Kota Bekasi dalam Angka, 2018). Dibandingkan Provinsi Jawa Barat maupun Indonesia, *trend* TPAK kedua memang sama-sama fluktuatif. Pada tahun 2017, TPAK di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 60,34 persen (BPS Provinsi Jawa Barat, 2017:87), sedangkan TPAK nasional lebih tinggi lagi, yakni 67,63 persen (BPS, 2017c:109).

Perkembangan penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan usaha di Kota Bekasi tahun 2019, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor lapangan usaha terbesar yang menyerap tenaga kerja, yaitu sebesar 196.947 jiwa, dan yang terkecil sektor lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 304 jiwa.

Beberapa isu strategis bidang ketenagakerjaan yang masih menonjol hingga tahun 2019 antara lain adalah tingginya angka pengangguran terbuka, hingga 9,20 persen. Sesuai target dalam kurun tahun 2018-2023, sesungguhnya target sampai dengan akhir 2018 sebanyak 50.000 lowongan sudah tercapai pada akhir tahun 2019, yaitu sebanyak 61.935 lowongan atau ada kelebihan target sebesar 11.935 lowongan (23,87 persen). Namun demikian, untuk kepentingan menurunkan angka pengangguran, target menciptakan 10.000 lowongan pertahun tetap harus diusulkan dan direalisasikan pada tahun 2019.

Tabel 4.2. Jumlah Tenaga Kerja menurut Kategori Lapangan Usaha dan Skala Usaha Tahun 2019

NO	LAPANGAN USAHA	UMK	UMB	Jumlah
1	Pertambangan dan Penggalian	56	248	304
2	Industri Pengolahan	36.024	69.959	105.983
3	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	1.172	774	1.946
4	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	4.682	959	5.641
5	Konstruksi	9.707	17.937	27.641
6	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	152.749	44.198	196.947
7	Pengangkutan dan Pergudangan	12.881	14.054	26.935
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	77.658	7.588	85.246
9	Informasi dan Komunikasi	7.794	2.848	10.642
10	Aktivitas Keuangan	2.572	13.040	15.612
11	Real Estate	13.883	4.092	17.975
12	Jasa Perusahaan	43.216	14.597	57.813
13	Pendidikan	6.339	11.496	17.835
14	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	24.008	4.401	28.409
15	Jasa Lainnya	56	248	304
	Jumlah	392.741	206.188	598.929

Sumber: LKPj Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2019.

Data statistik menunjukkan terjadi fluktuasi tingkat serapan tenaga kerja yang disesuaikan dengan tingkat pendidikannya yang tergambar selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

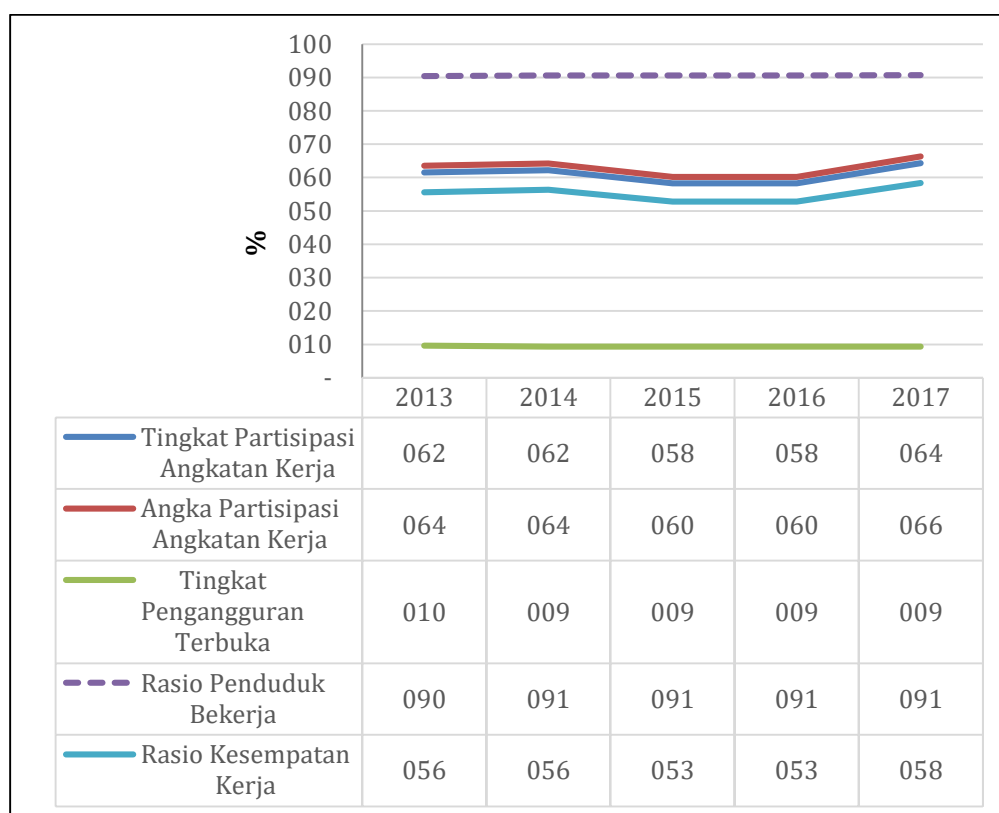
Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, kemanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu Negara.

Tabel 4.3. Banyaknya Pencari Kerja Yang Terdaftar dan Penempatannya Menurut Pendidikan Yang ditamatkan Tahun 2016-2019

Pendidikan yang Ditamatkan	2016		2017		2018		2019	
	Pencari Kerja Terdaftar	Penempatan Tenaga Kerja	Pencari Kerja Terdaftar	Penempatan Tenaga Kerja	Pencari Kerja Terdaftar	Penempatan Tenaga Kerja	Pencari Kerja Terdaftar	Penempatan Tenaga Kerja
Tidak lulus Sekolah	1	-	-	-	18	-	-	1
SD	89	30	165	30	72	6	82	80
SMP Sederajat	781	107	1.300	109	392	34	338	1.386
SMP Kejuruan	-	-	-	-	-	-	-	7.768
SLTA Umum	6.131	2.961	9.678	2.786	4.293	1.426	3.684	1.945
SLTA Kejuruan	15.433	4.922	8.337	4.562	15.253	10.018	14.490	-
Akademi	1.274	3.293	3.393	2.675	1.098	110	745	641
Perguruan Tinggi	2.930	1.068	1.876	374	2.600	372	1.543	1.596
Jumlah	26.638	12.381	24.749	10.536	23.726	11.921	20.882	13.417

Sumber: LKPj Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2019.

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bekasi cenderung menurun dari 9,59 persen tahun 2013 menjadi 9,07 persen tahun 2018. Angka tersebut sempat mengalami stagnasi antara tahun 2014 hingga tahun 2017 yang berkisar di angka 9,32 hingga 9,36 persen. Program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bekasi mulai terasa dampaknya di tahun 2018.



Sumber: BPS Kota Bekasi, Kota Bekasi Dalam Angka, beberapa seri

Gambar 4.6. Kinerja Struktur Tenaga Kerja Kota Bekasi

Menurunnya persentase tingkat pengangguran terbuka ini bukan disebabkan oleh meningkatnya lapangan pekerjaan yang mampu menyerap penganggur terbuka, tetapi lebih dikarenakan menurunnya persentase penduduk bukan angkatan kerja selama kurun waktu bersamaan. Dibandingkan Jawa Barat dan Indonesia, tingkat pengangguran terbuka di Kota Bekasi masih lebih tinggi, dimana pada tahun 2015 kedua wilayah pembandingan tersebut mencatat tingkat pengangguran terbuka masing-masing sebesar 8,56 persen dan 6,00 persen (BPS, 2017c:109).

Angka pengangguran Tahun 2019 yang mencapai 9,08, semakin bertambah dengan reaksi pelaku usaha/investasi pindah lokasi perusahaan karena UMK tinggi di Kota Bekasi, juga pertambahan jumlah pengangguran karena dampak bencana COVID-19. Pencari kerja baru tidak memiliki peluang yang leluasa, sebagaimana diperoleh saat situasi normal, melalui pelatihan berbasis kompetensi, yang hanya bisa dilakukan secara *face-to-face (offline)*.

- Permasalahan sektor ekonomi kota

Struktur perekonomian yang kuat dibentuk oleh keterkaitan input dan output yang kuat antara sektor yang berperan di hulu dan sektor yang berperan di hilir. Secara teknokratis, kekuatan keterkaitan antar sektor dapat diukur melalui kinerja keterkaitan input dan output dalam tabel Input-Output Sektor Ekonomi Kota Bekasi. Salah satu keunggulan dalam analisis Input-Output adalah dapat diketahuinya tingkat keterkaitan antar sektor baik ke depan (*forward linkage*) maupun keterkaitan ke belakang (*backward linkage*).

Tabel 4.4. Indeks Derajat Kepekaan Ekonomi Kota Bekasi

Urutan	Kode Sektor	Sektor	Indeks Derajat Kepekaan (<i>Forward Linkage</i>)
1.	15	Listrik	6,1129
2.	8	Industri Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya	3,0098
3.	5	Pertambangan dan Penggalian	1,9529
4.	29	Jasa Perusahaan	1,5736
5.	36	Jasa Reparasi Kendaraan	1,5450
6.	10	Industri Kimia, Karet, Plastik	1,4042
7.	39	Perorangan dan Rumah Tangga	1,0634
8.	6	Industri Makanan dan Minuman	1,0011
9.	14	Industri Barang Lainnya	0,9275
10.	28	Sewa Bangunan	0,9198

Sumber: Tabel I-O Kota Bekasi, diolah 2018.

Sektor yang memiliki daya penyebaran tinggi memberikan indikasi bahwa sektor tersebut mempunyai keterkaitan ke depan atau daya dorong cukup kuat dibandingkan sektor lainnya. Sebaliknya sektor yang mempunyai derajat kepekaan tinggi berarti sektor tersebut mempunyai ketergantungan (kepekaan) yang tinggi terhadap sektor

lain. Secara teori indeks daya penyebaran memberikan indikasi bahwa sektor-sektor yang memiliki indeks daya penyebaran >1 , berarti daya penyebaran sektor tersebut di atas rata-rata penyebaran secara keseluruhan. Pengertian yang sama berlaku untuk indeks derajat kepekaan lebih dari satu, berarti derajat kepekaan sektor tersebut di atas derajat kepekaan rata-rata secara keseluruhan.

Tabel 4.5 Indeks Derajat Penyebaran Ekonomi Kota Bekasi

Urutan	Kode Sektor	Sektor	Indeks Daya Penyebaran (<i>Backward Linkage</i>)
1.	31	Jasa Pendidikan Pemerintah	0,001
2.	27	Jasa Perusahaan	0,001
3.	35	Hiburan dan Rekreasi	0,001
4.	33	Jasa Pendidikan Swasta	0,001
5.	39	Perorangan dan Rumah Tangga	0,0009
6.	34	Jasa Kesehatan Swasta	0,0009
7.	37	Salon	0,0008
8.	21	Angkutan Rel	0,0008
9.	18	Perdagangan	0,0008
10.	15	Listrik	0,0008

Sumber: Tabel I-O Kota Bekasi, diolah 2018.

Berdasarkan indeks daya penyebarannya maka terlihat bahwa sektor yang berkaitan dengan utilitas kota (listrik) merupakan sektor yang memiliki daya dorong tinggi bagi ekonomi Kota Bekasi. Sektor lain yang memiliki keterkaitan ke depan (hilir) adalah industri barang dari kayu, jasa perusahaan, jasa reparasi kendaraan, industri kimia, karet, dan plastik serta industri makanan dan minuman. Kondisi ini mencerminkan bahwa dari sisi jumlah dan jenisnya, sektor-sektor utama Kota Bekasi (industri dan perdagangan, jasa) memiliki keterkaitan ke depan yang relatif terbatas atau memiliki sektor hilir yang terbatas. Sementara berdasarkan hasil analisis keterkaitan ke belakangnya, terlihat bahwa nilai indeks yang dimiliki sektor ekonomi Kota Bekasi relatif rendah. Kondisi ini mencerminkan bahwa sektor-sektor ekonomi di Kota Bekasi terbatas dalam menggunakan produk yang dihasilkan oleh sektor ekonomi lainnya di Kota Bekasi. Sektor-sektor yang memiliki indeks keterkaitan ke belakang yang relatif sedang adalah sektor jasa, baik jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, hiburan, dan rekreasi. Sektor industri di Kota Bekasi memiliki keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) yang rendah. Hal ini sejalan dengan tingkat impor yang tinggi dalam struktur input ekonomi Kota Bekasi.

- Permasalahan distribusi ekonomi kota

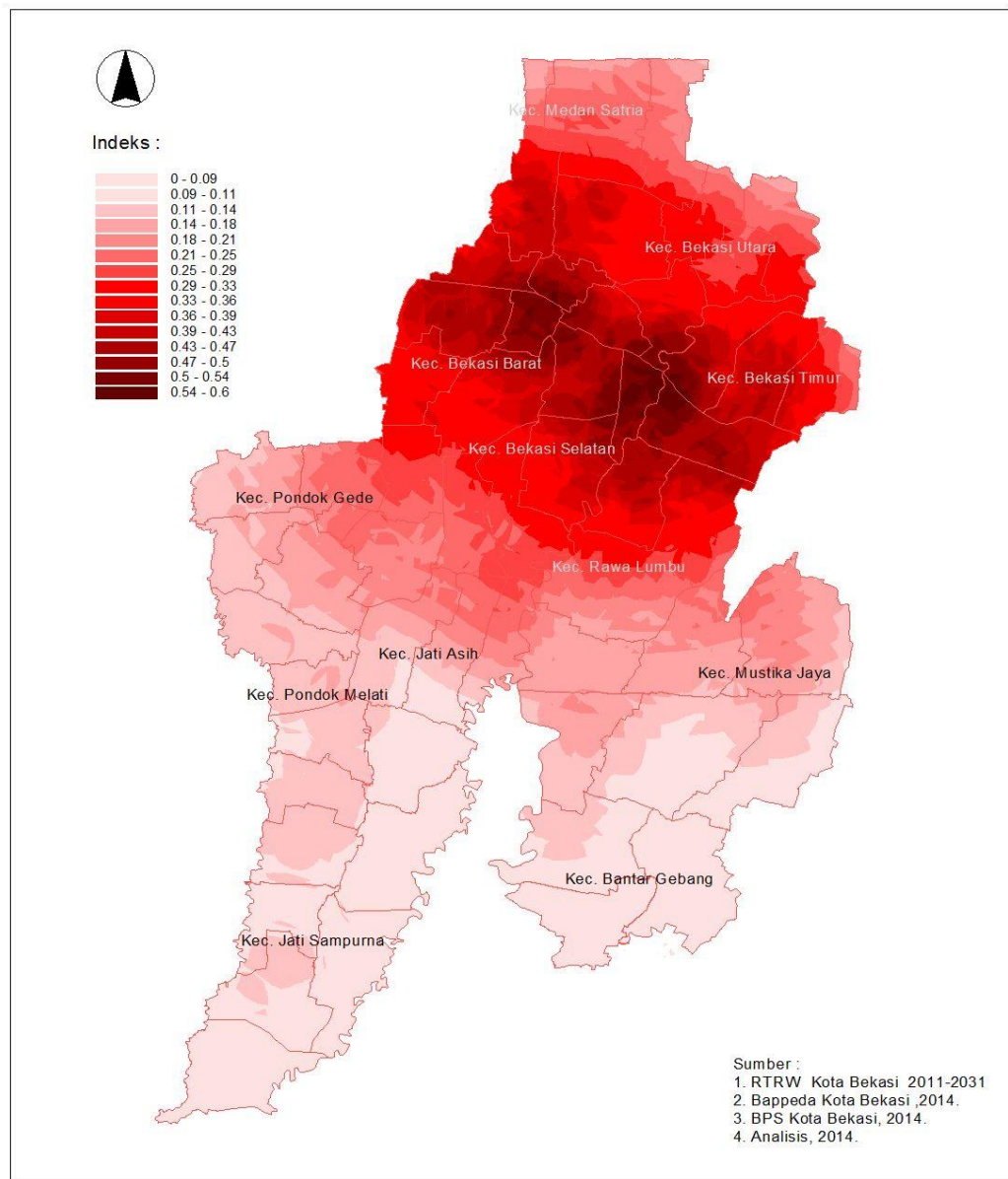
Secara makro, tingkat ketimpangan ekonomi wilayah Kota Bekasi termasuk pada kategori Sedang. Berdasarkan Angka Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini), kondisi pemerataan di Kota Bekasi saat ini tergolong baik dan mengalami perbaikan dari

tahun-tahun sebelumnya. Selama rentang tahun 2014 hingga tahun 2018 *Gini Ratio* terendah Kota Bekasi berada pada tahun 2014 dengan koefisiensi 0,31 yang kemudian meningkat menjadi 0,41 pada tahun 2015. Angka ini kemudian berangsur-angsur turun menjadi 0,39 di tahun 2016 dan 0,35 di tahun 2017 dan 2018. Sedangkan di tahun 2020 diproyeksikan angkanya berkisar pada koefisiensi 0,35. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bekasi terus berupaya tidak hanya mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi tetapi juga berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pemerataan pembangunan yang tercermin dari semakin kecilnya nilai koefisiensi Rasio Gini di Kota Bekasi.

Secara keseluruhan, sepanjang periode kajian indeks gini rasio di Kota Bekasi berada pada angka rata-rata 0,376, yang berarti termasuk kategori ketimpangan Sedang. Bila dilihat secara spasial, perbedaan perkembangan ekonomi wilayah dapat terlihat dari perbedaan kelengkapan fasilitas sosial ekonomi, aksesibilitas hingga pola penggunaan tanahnya. Hasil analisis tingkat perkembangan wilayah berdasarkan kecamatan, menunjukkan bahwa tingkat perkembangan wilayah yang paling cepat terakumulasi di wilayah tengah dan utara. Kondisi ini mencerminkan bahwa secara spasial masih terindikasi adanya distribusi perkembangan wilayah yang belum merata.

Berdasarkan analisis di atas, maka secara ringkas dapat diidentifikasi permasalahan dan tantangan strategis yang dihadapi Kota Bekasi dalam upaya mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh sesuai tema pembangunan pada RPJMD tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- 1) rendahnya kandungan lokal kegiatan ekonomi Kota Bekasi yang dapat menghasilkan *gap* kemandirian ekonomi Kota Bekasi di masa yang akan datang;
- 2) rendahnya daya serap pasar domestik terhadap produk kegiatan ekonomi Kota Bekasi yang mengakibatkan *gap* berupa tidak tercapainya nilai tambah kegiatan ekonomi kota yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal;
- 3) terbatasnya kesempatan kerja dari struktur ekonomi yang ada saat ini yang dapat menghasilkan *gap* kinerja ekonomi kota dalam hal pemenuhan lapangan kerja bagi tambahan angkatan kerja di Kota Bekasi;
- 4) rendahnya keterkaitan input-output kegiatan ekonomi Kota Bekasi yang sehingga menghasilkan *multiplier effect* yang kurang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi; dan
- 5) masih belum meratanya distribusi perkembangan ekonomi secara makro maupun secara spasial. Indeks gini rasio masih dalam kategori Sedang sehingga membutuhkan upaya peningkatan pemerataan pendapatan. Secara spasial distribusi perkembangan masih terlihat terakumulasi pada wilayah tengah dan utara.



Gambar 4.7. Derajat Tingkat Perkembangan Wilayah Kota Bekasi

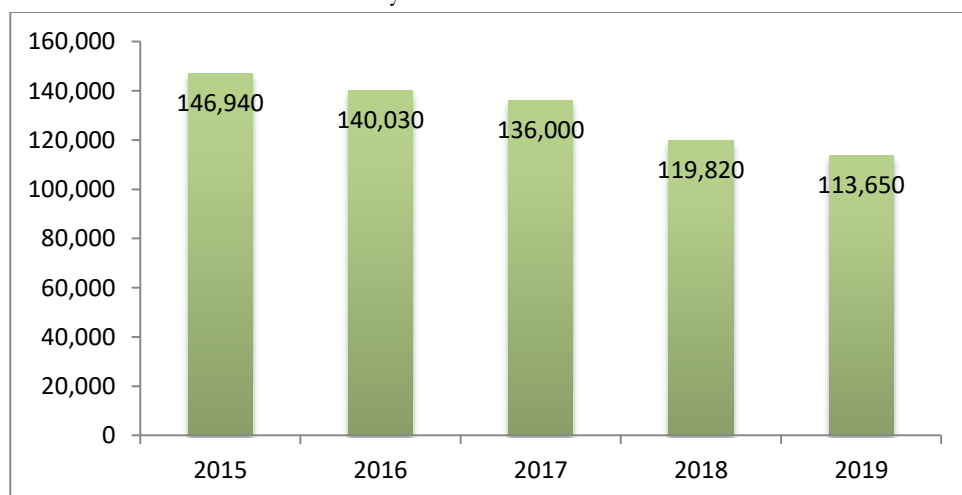
c. Permasalahan terkait Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Sesuai amanah Undang-Undang Pemerintahan Daerah, salah satu indikator pembangunan daerah adalah kinerja kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menjabarkan indikator-indikator kesejahteraan masyarakat secara lebih rinci sebagaimana telah dibahas pada Bab 2 dokumen ini. Permasalahan aspek kesejahteraan masyarakat pada bagian ini merupakan hasil identifikasi terhadap indikator kesejahteraan masyarakat skala kota yang mencerminkan *outcome* serta dampak (*impact*) dari pembangunan daerah yang telah dilakukan selama ini. Beberapa indikator kesejahteraan telah dibahas pada permasalahan tema pembangunan Kota Bekasi Tahun 2018-2023, oleh karena itu indikator yang disajikan pada bagian ini terbatas pada indikator yang mengarah pada kesejahteraan sosial, yang hasil identifikasinya sebagai berikut:

- Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kota Bekasi hingga tahun 2016 mencapai 4,97 persen dari total penduduk Kota Bekasi. Tingkat kemiskinan tersebut tergolong rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat maupun nasional. Namun upaya untuk mengurangi kemiskinan masih perlu dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Bekasi yang lebih merata. Salah satu aspek penting dari tingkat kemiskinan adalah indeks kedalaman kemiskinan yang mencerminkan seberapa dalam perbedaan pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinannya. Penjelasan pada Bab 2 menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan kemiskinan Kota Bekasi berfluktuasi pada kisaran 0,67 - 0,82 selama periode tahun 2013-2017. Indeks kesenjangan kemiskinan dengan nilai tersebut menunjukkan tingkat pendapatan masyarakat miskin Kota Bekasi relatif besar di bawah garis kemiskinan, atau dapat dikatakan sekitar 60-80 persen tingkat pendapatan penduduk miskin Kota Bekasi berada di bawah kemiskinan secara signifikan. Garis kemiskinan di Kota Bekasi merupakan yang tertinggi kedua di Jawa Barat dengan angka 582.723 rupiah pada tahun 2018 setelah Kota Depok dengan 522.934 rupiah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan kemiskinan merupakan masalah laten yang perlu terus diantisipasi oleh pemerintah Kota Bekasi pada masa mendatang.

Jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi dalam empat tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin mencapai 119.820 ribu jiwa dan mengalami penurunan menjadi hanya 113.650 ribu jiwa di tahun 2019. Hal ini merupakan perkembangan yang sangat baik dan menunjukkan beberapa program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir menemukan hasilnya.



Sumber: BPS, 2020.

Gambar 4.8. Jumlah Penduduk Miskin Kota Bekasi 2013-2019

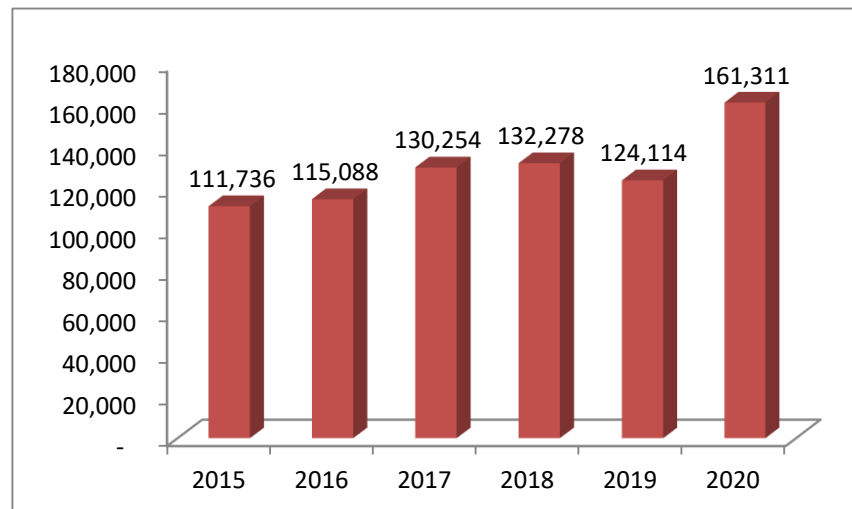
Secara proporsional, terjadi penurunan angka penduduk miskin di Kota Bekasi, yaitu dari 6,06 persen pada tahun 2016 menjadi 4,79 persen tahun 2017, dan terakhir menjadi 4,11 persen pada tahun 2018. Hal ini merupakan perkembangan yang sangat

baik dan menunjukkan beberapa program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir menemukan hasilnya.

Adanya pandemi COVID-19 berdampak pada bertambahnya jumlah keluarga miskin, karena pemutusan hubungan kerja (PHK); usaha keluarga terganggu, bangkrut, dan bahkan terlilit utang; serta anggota keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga mengalami sakit, dirawat, atau bahkan meninggal.

- **Pengangguran**

Jumlah pengangguran terbuka di Kota Bekasi dalam beberapa tahun terakhir memiliki kecenderungan mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 jumlahnya berkisar 111.669 jiwa, kemudian menjadi 115.643 jiwa di tahun 2014. Angka tersebut sempat turun menjadi 111.736 jiwa di tahun 2015 kemudian terus mengalami peningkatan menjadi 115,088 jiwa di tahun 2016 menjadi 132.278 jiwa di tahun 2018, menurun di tahun 2019 menjadi 124.114 jiwa dan di tahun 2020 jumlahnya terus meningkat menjadi 161.311 jiwa dimana salah satunya merupakan dampak covid.



Sumber: BPS,2020.

Gambar 4.9. Jumlah Pengangguran Terbuka Kota Bekasi 2013-2018

Jumlah pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

- **Keluarga Pra-Sejahtera**

Menurut informasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), tingkat kesejahteraan sebuah keluarga dapat dibagi ke dalam 5 (lima) tahap, yaitu: Pra-Sejahtera (sangat miskin), Sejahtera Tahap I (miskin), Sejahtera Tahap II (hampir miskin), Sejahtera Tahap III (tidak miskin), dan Sejahtera Tahap III Plus. Selama kurun waktu tahun 2013-2017, persentase Keluarga Pra-Sejahtera ditambah Keluarga

Sejahtera I dibandingkan jumlah seluruh keluarga di Kota Bekasi, memperlihatkan penurunan, yakni dari 21,88 persen (120.300 keluarga) menjadi 20,47 persen (116.233 keluarga) pada tahun 2015 dan pada tahun 2017 jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I menjadi 267.071 keluarga. Penurunan ini mengindikasikan secara eksplisit kesejahteraan keluarga di Kota Bekasi mulai meningkat menuju tahapan Keluarga Sejahtera II dan seterusnya. Dengan kata lain, ekonomi masyarakat di Kota Bekasi membaik, namun proporsi Keluarga Pra-Sejahtera yang masih di atas 20 persen merupakan masalah yang perlu diantisipasi Pemerintah Kota pada masa mendatang.

d. Permasalahan terkait Aspek Daya Saing Daerah

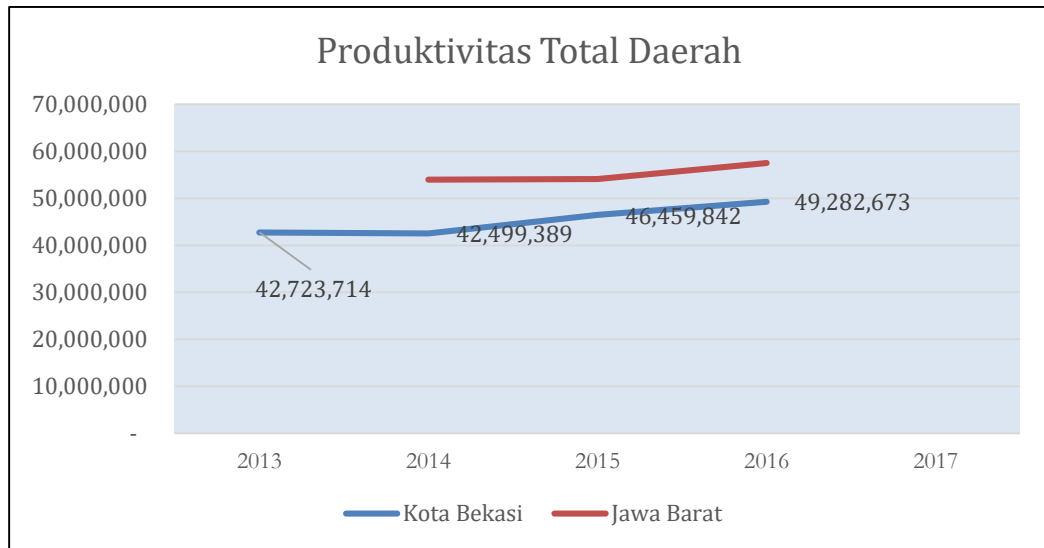
Daya saing daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah. Daya saing daerah merupakan salah satu tinjauan tingkat keberhasilan pembangunan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk bertahan dalam menghadapi tantangan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan analisis terhadap 10 (sepuluh) indikator daya saing daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, terdapat 1(satu) indikator di lingkungan pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja belum optimal, yakni Produktivitas Total Daerah.

Dalam pembahasan ini selain permasalahan terkait indikator daya saing sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, pembahasan dilengkapi dengan indikator daya saing daerah berdasarkan referensi lainnya seperti indikator daya saing daerah dari KPPOD (Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah), dan lain sebagainya. Berikut pembahasan permasalahan terkait aspek daya saing daerah di kota Bekasi:

- Produktivitas total daerah

Produktivitas total daerah menunjukkan seberapa produktif angkatan kerja yang bekerja pada setiap sektor dan nilai tambah pada sektor tiap PDRB. Tingkat produktivitas total daerah Kota Bekasi dalam kurun lima tahun terakhir (2013-2017) disajikan dalam Gambar 4. di bawah.

Berdasarkan grafik Produktivitas Total Daerah tersebut, terlihat bahwa sesungguhnya produktivitas total daerah Kota Bekasi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, secara umum produktivitas total daerah Kota Bekasi masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya jumlah angkatan kerja yang ada di Kota Bekasi.



Sumber : PDRB Kota Bekasi 2013-2017

Gambar 4.10. Perkembangan Produktivitas Total Daerah Kota Bekasi

- **Kapasitas keuangan daerah**

Salah satu aspek daya saing daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan data keuangan yang diperoleh maka pada tahun 2018, keuangan Pemerintah Kota Bekasi berpotensi mengalami defisit. Hal ini terjadi karena beberapa target pendapatan daerah tidak tercapai. Permasalahan keuangan daerah ini penting untuk mendapatkan perhatian mengingat kemampuan Pemerintah Kota Bekasi dalam melaksanakan fungsi layanan masyarakat baik berupa pembangunan infrastruktur maupun jasa layanan umum sering dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah setiap tahunnya. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap beberapa komponen/aspek PAD seperti berikut:

- pajak daerah;
- retribusi daerah;
- hasil pendapatan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- lain-lain PAD yang sah;
- arus kas PAD;
- skenario waktu pemulihan PAD; dan
- skenario kebijakan pemulihan PAD.

- **Kinerja BUMD**

Salah satu komponen penting pada aspek daya saing daerah yang terkait keuangan daerah adalah kinerja BUMD. Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kinerja laporan keuangan 4 (empat) BUMD Kota Bekasi, yakni PDAM "Tirta Patriot", PD Migas, BPR Syariah, dan Mitra Patriot, teridentifikasi kontribusi keempat BUMD terhadap pendapatan Kota Bekasi masih kurang optimal. Permasalahan lain dari kinerja BUMD Kota Bekasi adalah menyangkut penatausahaan dan pengelolaan aset tetap yang belum memadai.

- Keamanan

Angka penanganan kriminalitas di Kota Bekasi tidak mengalami banyak perubahan signifikan dan cenderung *stagnant* antara tahun 2012 hingga 2015. Pada tahun 2012 dan 2015 angka kriminalitas yang terselesaikan sama-sama sejumlah 1,87 sedangkan tahun 2013 dan 2014 identik sebesar 1,92. Namun tahun 2016 terjadi peningkatan luar biasa hingga mencapai 6,54 (hampir 3,5 kali tahun sebelumnya). Peningkatan ini berkaitan dengan meningkatnya jumlah kriminalitas yang tertangani di tahun tersebut yaitu 1.833 perkara dibandingkan tahun 2015 yang hanya berjumlah 511 perkara.

Hingga tahun 2017 Kota Bekasi menjadi wilayah yang paling tinggi tingkat kriminalitasnya se-Provinsi Jawa Barat, baru disusul berikutnya oleh Kota Bandung. Informasi ini dirilis oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data yang diperoleh, angka kriminalitas di Kota Bekasi pada tahun 2013 mencapai 4.133 kasus, lalu pada tahun 2014 mencapai 3.941 kasus (turun 4,65 persen). Kemudian tahun 2015 ada 3.612 kasus (turun 8,35 persen), lalu pada 2016 naik sedikit menjadi 3.632 kasus (0,55 persen), dan tahun 2017 kembali turun menjadi 2.580 kasus (28,97 persen). Konon Statistik Kriminalitas Kota Bekasi Tahun 2018 mencatat jumlah kejahatan yang teridentifikasi untuk tahun 2018 hanya 999 kasus, dengan 983 kasus tertangani atau angka penanganan sebesar 1,60. Dampak pandemi COVID-19, kasus kriminal di Kota Bekasi cenderung meningkat. Berikut potensi dampak pandemi COVID-19:

- potensi meningkatnya gangguan keamanan dengan semakin lamanya pembatasan sosial, jalan sepi, dan rawan begal;
- potensi penjarahan toko/mal;
- potensi kriminalitas dengan menakuti-nakuti risiko penularan; dan
- potensi aksi buruh, karena berada dalam posisi tertekan oleh perusahaan dengan situasi pandemi COVID-19.

- Ketergantungan penduduk

Rasio ketergantungan menunjukkan rasio antara penduduk yang tidak produktif terhadap penduduk produktif dalam satu tahun tertentu. Kategori penduduk produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun sedangkan penduduk di luar usia tersebut dikategorikan sebagai penduduk tidak produktif. Data jumlah penduduk berdasarkan usia tersedia di dokumen Kota Bekasi Dalam Angka. Pada tahun 2013 rasio ketergantungan penduduk berada pada angka 40,88 persen, kemudian perlahan mulai meningkat menjadi 40,96 persen pada tahun 2014, 41,06 persen pada tahun 2015, dan 41,11 persen pada tahun 2016.

Pada tahun 2017, dengan jumlah penduduk sebesar 2.873.484 jiwa rasio ketergantungan penduduk di Kota Bekasi sebesar 41,15 persen. Tahun 2018, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.943.859 jiwa rasio ketergantungan penduduk tercatat sebesar 41,19 persen. Sedangkan tahun 2019, dengan jumlah penduduk 3.003.920 jiwa rasio ketergantungan penduduk tercatat sebesar 40,99 persen.

- Iklim investasi

Setiap tahunnya iklim investasi di Kota Bekasi terus merangkak, bahkan realisasi investasi di Kota Patriot ini telah menembus Rp 17 triliun pada 2017. Angka ini melebihi target yang dipatok Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp 10 triliun untuk periode 2017-2018. Perolehan nilai investasi yang diperoleh terdiri dari pembangunan sejumlah pengembang properti, perusahaan barang dan jasa, serta retail. Pada tahun 2016 lalu, jumlah pengembang properti mencapai 36 pengembang, kemudian naik pada 2017 menjadi 47 pengembang dengan 147 Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Peningkatannya sekitar 20-30 persen untuk sisi pengembang properti seperti apartemen, hunian, dan hotel.

Permasalahan iklim investasi Kota Bekasi bersumber dari keterbatasan lahan untuk pengembangan, dukungan infrastruktur kota serta layanan perizinan. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi melalui pembangunan pada periode RPJMD tahun 2013-2018, namun penguatan tetap dibutuhkan untuk mendukung penguatan struktur perekonomian Kota Bekasi.

- Aksesibilitas dan sistem logistik

Aksesibilitas dan sistem logistik kota merupakan salah satu komponen yang mendukung daya saing daerah. Berdasarkan gambaran terkait sistem transportasi kota, maka secara struktural Kota Bekasi berpotensi memiliki aksesibilitas yang baik untuk mendukung pergerakan dalam dan luar kota. Namun permasalahan muncul dari ketidakseimbangan antara penggunaan kendaraan pribadi dengan angkutan umum yang mengakibatkan kapasitas jaringan jalan terlampaui. Sebagai akibatnya tingkat pelayanan jaringan jalan di Kota Bekasi menjadi rendah dan pada akhirnya mengakibatkan pergerakan menjadi terhambat. Tingkat pelayanan jalan yang semakin menurun juga dipengaruhi oleh sistem logistik (pergerakan angkutan barang) yang belum terencana dengan baik. Pemisahan sistem angkutan orang dan barang belum dilakukan secara optimal sehingga percampuran sistem pergerakan mengakibatkan sistem logistik kota belum optimal kinerjanya.

e. Permasalahan terkait Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan aspek pembangunan daerah yang sangat penting dan menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk dapat memenuhinya, paling tidak sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 terdapat sekitar 327 indikator aspek pelayanan umum yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan indikator tersebut, pembahasan permasalahan pada bagian ini lebih berfokus pada upaya menyajikan permasalahan yang termasuk kategori indikator *outcome* atau *impact* dari aspek pelayanan umum. Hasil identifikasi permasalahan aspek pelayanan umum antara lain meliputi:

- Kualitas pendidikan

Pertama, untuk tingkat Pendidikan Usia Dini (PAUD) dari jumlah penduduk usia 5-6 tahun sebanyak 82.977 orang, realisasi jumlah peserta didik PAUD terdapat 76.954

anak peserta didik PAUD. Dengan persentase 92,74 persen ini maka dari target 50 persen yang direncanakan pada kurun waktu 2013-2018 sudah terpenuhi.

Kedua, penduduk yang berusia >15 tahun ke atas melek huruf (tidak buta aksara) untuk dari target yang diharapkan sebesar 100 persen dari jumlah penduduk usia >15 tahun ke atas sebanyak 1.853.181 jiwa, terealisasi penduduk yang melek huruf usia >15 tahun ke atas yang bisa baca tulis sebanyak 1.846.695 jiwa dengan persentase sebesar 99,65 persen, sehingga pencapaian kinerja belum mencapai 100 persen.

Ketiga, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun yakni sebanyak 246.251 jiwa terdapat 239.527 jiwa penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD sederajat dengan persentase sebesar 101, 98 persen atau melebihi target sebesar 100 persen.

Keempat, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun yakni sebanyak 121.046 orang, sedangkan jumlah siswa usia 13-15 tahun berjumlah 113.674 siswa, maka APM SMP/MTs/Paket B sebesar 93,91 persen dibandingkan dengan target 100 persen maka capaian ini belum terpenuhi sepenuhnya.

Kelima, angka kelulusan UASBN di Kota Bekasi mencapai 100 persen artinya bahwa dari jumlah peserta UASBN sebanyak 37.687 siswa, yang lulus sebanyak 37.687 siswa.

Keenam, jumlah SD/MI yang memiliki tenaga pendidik non-guru untuk melaksanakan tugas mengajar, tugas administrasi, dan kegiatan lainnya. Dari sebanyak 10.823 orang tenaga pendidik di 653 SD Negeri/Swasta yang ada di Kota Bekasi, sebanyak 10.385 orang atau sebesar 95,95 persen yang telah memiliki sertifikat profesi pendidik.

Ketujuh, nilai rata-rata UN SD/MI untuk tahun ajaran 2018/2019 sebesar 7,82 masih di bawah angka yang ditargetkan yaitu sebesar 8,2 dari target capaian tersebut. Perlu dijelaskan bahwa sejak diberlakukan kembali Kurikulum 2013 yang menjadi dasar kelulusan bukan lagi nilai yang tersimbol dalam angka-angka tetapi lebih pada hasil penilaian guru yang didasarkan pada sikap dan perilaku murid.

Kedelapan, nilai rata-rata UN SMP/MTs untuk tahun ajaran 2018/2019 sebesar 5,6 masih di bawah angka yang ditargetkan yaitu sebesar 6,1. Sebagaimana rata-rata UN SD/MI, semenjak diberlakukan Kurikulum 2013, nilai UN menjadi sumir dan kelulusan lebih pada penilaian guru yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Tabel 4.6 Capaian Kinerja APM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Kota Bekasi Tahun 2015-2019

No	Tingkat Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD	99,99%	106,63%	104,54%	97,27%	101,98%
2	SMP	91,61%	112,40%	79,42%	83,82%	93,91%

Sumber: LKPj Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2019.

- Kualitas pelayanan kesehatan

Tingkat pelayanan kesehatan bagi warga Kota Bekasi telah terpenuhi secara luas dengan adanya Kartu Sehat Bekasi berbasis NIK. Dengan demikian, dari sisi aksesibilitas warga terhadap layanan kesehatan di Kota Bekasi dapat dikatakan sudah baik. Berbagai indikator umum layanan kesehatan seperti angka kematian bayi dan kematian ibu melahirkan di Kota Bekasi berada pada nilai yang rendah sehingga mencerminkan tingkat kesehatan warga yang sudah baik. Permasalahan layanan kesehatan yang dihadapi adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bekasi sesuai standar pelayanan yang lebih tinggi, tidak berhenti pada standar pelayanan minimum. Beberapa aspek pelayanan kesehatan yang masih menunjukkan permasalahan antara lain teridentifikasi pada aspek pengelolaan atau manajemen pelayanan, baik pada tingkat pemerintah kota maupun tingkat operasional pada masing-masing sarana/pusat layanan kesehatan.

Dengan visi Bekasi 2025 yang kreatif dan ihsan sesuai dengan yang diinginkan RPJPD tahun 2005-2025, maka pengembangan layanan kesehatan di Kota Bekasi perlu mengarah pada tingkat pelayanan yang lebih inovatif sesuai standar internasional. Kebijakan bidang kesehatan yang mendukung proses pemulihan dari pandemi ke tataran hidup baru mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran ke bidang kesehatan.

- Tingkat pelayanan prasarana dan sarana kota

- 1) tingkat pelayanan sistem transportasi kota

Aspek penting terkait sistem transportasi adalah kinerja kapasitas dan tingkat pelayanan jalan (*level of service/LoS*) dalam memenuhi permintaan pergerakan di wilayah Kota Bekasi. Indikator LoS identik dengan tingkat kemacetan pada ruas jalan tertentu. Kapasitas ruas jalan didefinisikan sebagai arus lalu lintas maksimum yang dapat melintas dengan stabil pada suatu potongan melintang jalan pada keadaan (geometrik, pemisahan arah, komposisi lalu lintas, lingkungan) tertentu. Untuk jalan dua lajur dua arah, kapasitas ditentukan untuk arus dua arah (kombinasi dua arah), tetapi untuk jalan dengan banyak lajur, arus dipisahkan per arah dan kapasitas ditentukan per lajur. *V/C Ratio* atau derajat kejenuhan adalah perbandingan dari volume (nilai arus) lalu lintas terhadap kapasitasnya. Ini merupakan gambaran apakah suatu ruas jalan mempunyai masalah atau tidak, berdasarkan asumsi jika ruas jalan makin dekat dengan kapasitasnya kemudahan bergerak makin terbatas.

- 2) tingkat pelayanan sistem drainase kota

Salah satu indikator kinerja sistem *drainase* kota adalah luas genangan dan cakupan wilayah banjir di Kota Bekasi. Berdasarkan data terkini dari berbagai sumber (Pemerintah Kota Bekasi, BPBD Kota Bekasi, dan BNPB), tercatat sekitar 102 titik banjir terpantau saat cuaca ekstrim di tahun baru 2020. Jumlah korban mengungsi akibat banjir mencapai 366.274 jiwa, menjadikan Kota Bekasi daerah terparah banjir awal tahun 2020 di wilayah Jabodetabek.

Dari sudut luasan, dari 12 kecamatan secara administrasi di Kota Bekasi hampir seluruh kecamatan ada titik banjirnya. Ketinggian air pada banjir awal tahun 2020 di Kota Bekasi antara 30 cm hingga tujuh meter. Namun dilihat berdasarkan kategori kelurahan, maka jumlah genangan banjir terkini di Kota Bekasi sebanyak 43 kelurahan. Dengan jumlah kelurahan yang ada di Kota Bekasi sebanyak 56 kelurahan, maka itu artinya hampir 76,78 persen kelurahan di Kota Bekasi mengalami musibah banjir. Namun, dari seluruh kelurahan yang dimaksud, bukan berarti seluruh wilayah kelurahan tergenang banjir, melainkan hanya di *spot-spot* tertentu. Bisa jadi skala satu perumahan penuh, hanya satu jalan saja, atau juga banjir hanya untuk lokasi satu RT atau satu RW.

Tiga sungai penyumbang banjir terbesar di Kota Bekasi adalah: Kali Bekasi, Kali Cikeas, dan Kali Sunter, yang rutin menyumbang banjir tahunan di wilayah berikut:

- o Kecamatan Pondok Gede (Perumahan Bina Lindung);
- o Kecamatan Pondok Melati (Perumahan Chandra RW 15, Perumahan Pondok Melati Indah, Perumahan Nyai Putu Bawah);
- o Kecamatan Bekasi Selatan (Perumahan Jaka Kencana);
- o Kecamatan Jatiasih (Pondok Mitra Lestari, Jatiasih Indah, Kemang IFI Graha, Pondok Gede Permai, Villa Jati Rasa, Perumahan Mandosi); dan
- o Kecamatan Jatisampurna (Perumahan Citra Grand).

3) tingkat pelayanan sistem persampahan kota

Berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi, jumlah sampah yang dihasilkan penduduk Kota Patriot itu tak seluruhnya dapat terangkut ke tempat penampungan akhir (TPA) Sumur Batu. Setiap hari jumlah sampah yang dihasilkan Kota Bekasi mencapai 1.800 ton, dan dari jumlah tersebut, hanya sekitar 900 ton yang dapat diangkut. Selain karena jumlah armada yang terbatas, juga karena pola pengangkutan yang masih fokus dari rumah ke rumah. Seharusnya dilakukan pembagian beban dengan warga, diantaranya dengan fokus ke pengangkutan di satu titik lewat TPS (tempat pemindahan sampah sementara). Selain itu, persoalan daya tampung TPA Sumur Batu yang sudah *overload*.

Kota Bekasi sebagai penyangga kota Jakarta memiliki jumlah penduduk yang cenderung meningkat setiap tahunnya, yaitu dengan laju pertumbuhan penduduk setiap tahun mencapai 3,73 persen. Konsekuensinya akan terjadi peningkatan jumlah timbulan sampah. Peningkatan jumlah timbulan sampah ini sudah seharusnya diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang sesuai, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dengan lingkungan.

4) tingkat pelayanan sistem pengolahan limbah kota

Permasalahan terkait pelayanan pengolahan air limbah di Kota Bekasi antara lain meliputi:

- cakupan layanan penyedotan lumpur tinja 47 persen KK di 12 kecamatan yang ada ke IPLT/IPALD Sumur Batu;
- cakupan kepemilikan jamban sehat keluarga dengan penggunaan tangki septik dari 87,2 persen;
- bersatunya aliran limbah dengan saluran drainase;
- sistem pengelolaan air bekas kakus dan tinja (*black water*) di Kota Bekasi saat ini masih dilakukan secara *on site* (setempat), yaitu: kakus dan *septic tank*.

- Ketersediaan perumahan

Pertumbuhan penduduk Kota Bekasi berada pada tingkat pertumbuhan yang tinggi. Kondisi perkembangan penduduk tersebut mengakibatkan permintaan lahan permukiman yang tinggi. Rata-rata permintaan lahan permukiman di Kota Bekasi diperkirakan mencapai 105 ha per tahun. Permintaan lahan permukiman yang tinggi mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan lahan terbuka. Sebagian dari proses alih fungsi lahan tersebut bertentangan dengan RTRW Kota Bekasi. Ketidaksiuaian perkembangan lahan permukiman tidak hanya terjadi pada alokasi lahan tetapi juga pada arah dan pola penyebarannya.

Luas kawasan kumuh Kota Bekasi 423,73 ha yang tersebar pada 122 titik lokasi kawasan kumuh. Berdasarkan peta tutupan lahan terakhir tahun 2014, lokasi kawasan kumuh umumnya berada di kawasan tidak terstruktur (perumahan perkampungan) dengan kepadatan bangunan tinggi. Selama pembangunan pada periode 2013-2018, kawasan kumuh yang tertangani mencapai 58 persen.

- Kinerja layanan penataan ruang

Stock guna lahan merupakan selisih antara luas alokasi ruang yang direncanakan dalam RTRW dan RDTR Kota dengan tingkat pemanfaatannya saat ini (lahan terpakai). Perubahan *stock* mencerminkan tingkat pemanfaatan atau transformasi dari alokasi kepada pemanfaatan atau transformasi dari rencana kepada penggunaan. Berdasarkan data yang diperoleh, perubahan *stock* terbesar terjadi pada lahan permukiman yang mencapai pengurangan *stock* hingga mencapai 502 ha pada periode 2009-2014. Perubahan terbesar kedua adalah *stock* lahan industri. Alokasi lahan industri berdasarkan RTRW Kota Bekasi hingga tahun 2014 telah terpakai seluruhnya, bahkan perkembangan lahan industri di wilayah ini telah melampaui alokasi yang ditetapkan berdasarkan rencana. Sementara *stock* lahan yang relatif masih besar adalah *stock* lahan perdagangan dan jasa. Pemanfaatan alokasi lahan perdagangan jasa berdasarkan rencana baru mencapai 3,8 persen hingga tahun 2014. Tingkat pemanfaatan lahan permukiman hingga tahun 2014 telah mencapai 97 persen dari alokasi yang direncanakan dalam RTRW Kota Bekasi. Berdasarkan hasil analisis Sukmarini dan Mufidah, diperoleh hasil bahwa dari luas lahan kawasan sebesar 123.938 Ha, terjadi pergeseran perubahan peruntukan sebanyak 65,80 persen dengan luas 81.539 Ha yang didominasi oleh kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa (Jurnal Ilmiah Plano Krisna Vol. 13 No. 1, Juni 2019).

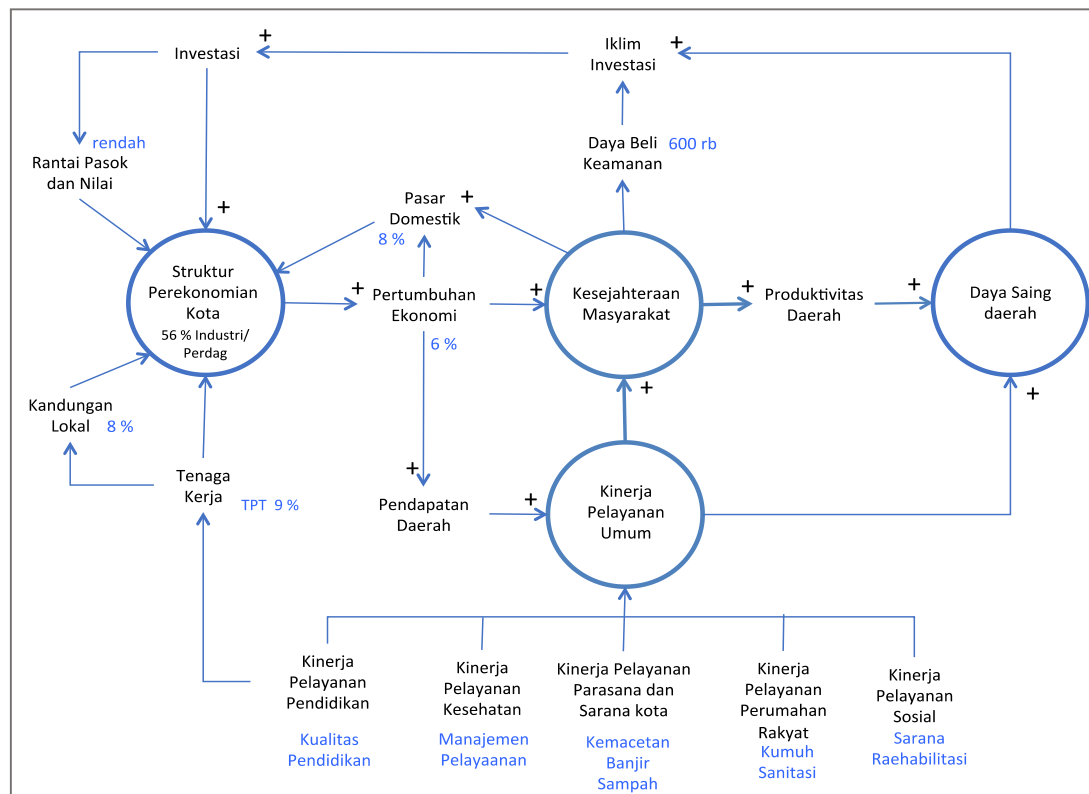
- Pelayanan sosial

Dari empat indikator pelayanan sosial yang direncanakan pada RPJMD 2013-2018 seluruh indikator sudah mencapai target Perubahan RPJMD kecuali penanganan Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) pada tahun 2015. Meskipun nilai capaian sudah cukup baik, berdasarkan hasil FGD, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bekasi terkait dengan urusan sosial yaitu:

- (1) penanggulangan kemiskinan mengalami pelambatan;
- (2) ketimpangan cenderung tinggi;
- (3) tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- (4) terbatasnya sarana dan prasarana rehabilitasi sosial; dan
- (5) masih belum optimalnya fungsi masyarakat bagi penduduk yang rentan seperti penyandang cacat atau disabilitas.

f. Struktur permasalahan pembangunan daerah Kota Bekasi

Permasalahan pada tiap aspek pembangunan daerah secara struktural memiliki kaitan satu dengan lainnya. Secara garis besar keterkaitan permasalahan yang melekat pada masing-masing aspek dapat digambarkan pada seperti Gambar 4.1111.



Gambar 4.11 Struktur Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Bekasi

Berdasarkan tersebut di atas maka keterkaitan struktur permasalahan pada masing-masing aspek dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kesejahteraan masyarakat merupakan aspek pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur kunci keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dari

berbagai bidang maupun urusan. Beberapa aspek kesejahteraan masyarakat seperti tingkat kemiskinan, kesejahteraan keluarga, pengangguran terbuka, kesempatan kerja dan indikator lainnya merupakan indikator kunci yang mencerminkan permasalahan yang harus dijadikan dasar perumusan tujuan pembangunan Kota Bekasi. Indikator kesejahteraan tersebut merupakan *outcome* atau *impact* dari pembangunan pada aspek atau urusan penyelenggaraan pemerintah pada berbagai bidang sesuai peraturan perundangan.

- Struktur perekonomian Kota Bekasi yang menjadi tema RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 sesuai amanah RPJPD Kota Bekasi 2005-2025, merupakan salah satu komponen pembangunan kota yang berkontribusi pada capaian indikator kesejahteraan masyarakat kota. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari struktur ekonomi yang terbentuk merupakan salah satu indikator kunci perekonomian kota yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Penguatan struktur perekonomian Kota Bekasi membutuhkan penguatan pada beberapa faktor ekonomi kota yang saat ini memiliki kelemahan antara lain kandungan lokal yang rendah, daya serap pasar domestik yang terbatas, rantai pasok antar sektor ekonomi yang rendah serta kesempatan kerja yang terbatas. Tingkat kesejahteraan masyarakat kota akan memberikan umpan balik terhadap perekonomian kota melalui peningkatan iklim investasi kota akibat meningkatnya daya beli dan keamanan sehingga mempengaruhi daya tarik investasi kota.
- Daya saing daerah merupakan komponen pembangunan daerah yang dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan masyarakat. Produktivitas daerah yang dihasilkan oleh kinerja struktur perekonomian kota serta produktivitas tenaga kerja kota, merupakan indikator daya saing daerah yang cukup penting. Daya saing daerah yang terbentuk akan memberikan umpan balik terhadap struktur perekonomian kota melalui peningkatan iklim investasi yang dihasilkan dari komponen daya saing daerah seperti daya dukung sarana dan prasarana kota, kesejahteraan sosial (keamanan, tingkat kriminalitas yang rendah) hingga daya beli masyarakat Kota Bekasi.
- Aspek pelayanan umum merupakan salah satu pilar utama pembangunan daerah yang menentukan kinerja dari aspek pembangunan daerah lainnya. Pelayanan umum yang merupakan area utama penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkontribusi terhadap kinerja kesejahteraan daerah melalui pemenuhan standar pelayanan minimal beberapa komponen pelayanan umum wajib, seperti kualitas pendidikan, kualitas layanan kesehatan, kualitas penyediaan sarana dan prasarana kota, kualitas penataan ruang, kinerja penyediaan perumahan, pelayanan sosial hingga reformasi birokrasi. Aspek kesejahteraan umum, daya saing daerah serta struktur ekonomi kota akan memberikan umpan balik terhadap aspek pelayanan umum berupa peningkatan pendapatan daerah yang menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan urusan pelayanan umum oleh pemerintah kota.

4.1.2 Permasalahan terkait Penyelenggaran Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan sesuai urusan pemerintah, yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

90 Tahun 2019 tentang Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Permasalahan yang disajikan pada bagian ini merupakan hasil dari kajian masing-masing bidang/urusan yang ada di Pemerintahan Kota Bekasi terhadap kinerja capaian masing-masing urusan selama periode 2013-2018. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019, penyajian permasalahan dilakukan dengan memadukan dan mempertimbangkan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi.

Klasifikasi dan kodefikasi urusan pemerintahan konkuren menurut Peraturan Menteri ini terbagi menjadi 32 (tiga puluh dua) bidang urusan, yang di Kota Bekasi di antaranya:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1.01 Urusan Pendidikan

Untuk bidang Pendidikan, kewenangan Pemerintah Kota pada urusan pendidikan diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat 4 (empat) kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bekasi terkait dengan urusan pendidikan, yaitu:

- (1) manajemen pendidikan;
- (2) pendidik dan tenaga pendidikan;
- (3) perizinan pendidikan; dan
- (4) bahasa dan sastra.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target RPJMD urusan pendidikan Kota Bekasi tahun 2013-2018, permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan (DISDIK) dalam penyelenggaraan urusan pendidikan yaitu:

- pemerataan akses dan partisipasi pendidikan masih belum optimal, tergambar dari nilai APM yang belum mencapai target;
- pendidikan belum berfokus kepada mutu dan daya saing, hal ini tergambar dari indikator dan program/kegiatan dalam RPJMD 2013-2018 yang masih berfokus kepada akses dan partisipasi;
- belum terpenuhinya beberapa aspek dalam standar nasional pendidikan, misalnya sarana dan prasarana, rasio guru murid; dan
- belum optimalnya tata kelola satuan pendidikan.

1.02 Urusan Kesehatan

Urusan bidang Kesehatan, permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan (DINKES) dan RSUD "Chasbullah Abdul Madjid" Kota Bekasi yaitu:

- belum seluruh lembaga kesehatan terakreditasi;
- angka harapan hidup rata-rata masih di bawah kota-kota besar di Indonesia;
- belum terintegrasinya sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat Kota Bekasi;
- rendahnya persentase pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; dan

- gaya hidup dan lingkungan di Kota Bekasi menyebabkan berkembangnya penyakit akibat gaya hidup, tidak lagi penyakit menular.

1.03 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah melampaui targetnya. Hanya terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang realisasinya belum melampaui target capaian di tahun 2016. Permasalahan yang menjadi penentu dalam ketercapaian kinerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang menurut Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air (DBMSDA) dan Dinas Tata Ruang (DISTARU) antara lain:

- rendahnya kapasitas jaringan *drainase*;
- adanya pendangkalan sungai;
- belum terpenuhinya proporsi ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bekasi;
- banyaknya hambatan samping dan persimpangan;
- adanya alih fungsi lahan;
- sulitnya pengadaan lahan untuk pembangunan fisik Kota Bekasi;
- keterbatasan SDM dan keterbatasan anggaran menjadi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan indikator kinerja untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- ketidakjelasan terhadap definisi dan pengukuran indikator kinerja sehingga capaian realisasinya tidak dapat terukur dan tercapai.

Beberapa permasalahan umum yang terjadi lainnya adalah adanya irisan kewenangan antar instansi di Kota Bekasi dalam menjalankan indikator kinerja terkait penataan ruang.

1.04 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan hasil evaluasi dalam studi pendahuluan menunjukkan bahwa data terkait ketercapaian tiap indikator urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dikatakan sangat minim bahkan tidak ada. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya database terpusat terkait pengukuran kinerja dan akses data publik. Hasilnya, sangat sulit menilai apakah indikator yang ada saat ini sudah tercapai atau belum. Adanya inkonsistensi penggunaan satuan pengukuran juga mengakibatkan sulitnya menentukan pencapaian dari beberapa indikator.

Permasalahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTAN) dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah:

- belum terpenuhinya target *septic tank* rumah tangga, *septic tank* komunal, IPAL kawasan, dan prasarana sanitasi masyarakat;
- belum terpenuhinya cakupan layanan air bersih;
- kurangnya kapasitas penyediaan sumber air baku;
- TPA hampir penuh sehingga terjadi antrian bongkar;
- masih adanya titik lokasi kawasan kumuh yang perlu diatasi;

- belum berkelanjutannya kawasan kumuh yang sudah ditata;
- tata kelola kawasan kumuh yang belum berkelanjutan; dan
- sarana prasarana pemukiman belum memadai.

1.05 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Stabilitas keamanan dan ketertiban mutlak harus dapat dijaga Kota Bekasi agar tetap berkembang sektor industri pengolahan dan salah satu tempat untuk berinvestasi. Permasalahan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang ada di Kota Bekasi menurut perspektif Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) adalah:

- tingginya angka kriminalitas di Kota Bekasi;
- tingkat pendidikan politik masyarakat yang masih rendah; dan
- *zero accident conflict* masyarakat di Kota Bekasi.

Pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat juga memiliki permasalahan terkait Kebakaran yang mengganggu perlindungan masyarakat menurut Dinas Pemadam Kebakaran (DISDAMKAR), adalah:

- kualitas SDM yang ahli dalam penanganan bencana belum mencukupi;
- ketersediaan sarana dan prasarana penanganan bencana belum memadai;
- kemampuan masyarakat dalam tanggap darurat bencana;
- belum optimalnya cakupan pelayanan wilayah penanganan kebakaran;
- pos pelayanan kecamatan belum merata;
- terbatasnya tandon air/pasokan air;
- terbatasnya anggaran;
- belum terpenuhinya tingkat ketercapaian *response time* 15 menit;
- kurangnya komunikasi korban/masyarakat di sekitar wilayah TKP;
- kurangnya ketersediaan armada kebakaran;
- terbatasnya sarana pendukung peralatan dan perlengkapan pasukan pemadam;
- terbatasnya Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi kualifikasi;
- terbatasnya diklat aparatur; dan
- kesulitan menghadapi wilayah masyarakat rawan kebakaran dan potensi kebakaran.

1.06 Urusan Sosial

Berdasarkan hasil evaluasi dalam studi pendahuluan menunjukkan bahwa seluruh indikator sudah mencapai target RPJMD kecuali penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2015. Namun demikian, Pemerintah Kota Bekasi masih memiliki permasalahan yang dihadapi, khususnya oleh Dinas Sosial (DINSOS) terkait dengan urusan Sosial, yaitu:

- penanggulangan kemiskinan mengalami pelambatan;
- ketimpangan cenderung tinggi;

- tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- terbatasnya sarana dan prasarana rehabilitasi sosial; dan
- masih belum optimalnya fungsi masyarakat bagi penduduk yang rentan seperti penyandang cacat atau disabilitas.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.07 Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi oleh Kota Bekasi dalam urusan Ketenagakerjaan menurut persepsi Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) adalah:

- jumlah angkatan kerja yang banyak;
- terjadinya penambahan pengangguran;
- kualitas tenaga kerja relatif rendah;
- kesempatan kerja masih terbatas;
- rendahnya produktivitas tenaga kerja; dan
- penerapan hubungan industrial dan pengupahan yang belum efektif.

2.08 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa permasalahan terkait dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dihadapi oleh Kota Bekasi berdasarkan tinjauan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) yaitu:

- masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman;
- tingkat kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap program perlindungan anak masih kurang;
- belum tersedianya rumah aman bagi korban/keluarga korban;
- masih rendahnya peran serta perempuan dalam pembangunan;
- masih rendahnya peran serta perempuan dalam berpolitik; dan
- pembangunan perempuan lebih lambat dibandingkan dengan laki-laki.

2.09 Urusan Pangan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Pangan di Kota Bekasi menurut kacamata Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) adalah:

- keamanan pangan siap saji;
- pangan dan gizi;
- keluarga rawan pangan;
- keamanan pangan;
- inovasi pangan lokal yang sehat dan berkualitas;
- masih rendahnya ketersediaan pangan lokal;
- masih rendahnya ketersediaan cadangan pangan utama;

- tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan pokok/beras;
- masih rendahnya ketersediaan pangan utama;
- rantai pasok (*supply chain*);
- penyusunan raperda tentang ketahanan pangan;
- pangan B2SA (beragam, bergizi, seimbang, dan aman);
- ketersediaan beras masih tergantung dari luar daerah;
- peningkatan sumberdaya pangan;
- teknologi pengolahan pangan lokal;
- manajemen analisis usaha olahan pangan;
- pola pangan harapan ideal;
- promosi hasil olahan pangan lokal dan diversifikasi pangan;
- pembentukan pekarangan pangan lestari (PPL); dan
- gerakan *one day no rice*.

2.10 Urusan Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DISPERKIMTAN) adalah:

- tidak semua kegiatan memiliki dokumen perencanaan pengadaan tanah yang memadai;
- masalah sengketa tanah;
- administrasi tidak lengkap;
- tidak ada kesepakatan antar pihak yang bersengketa; dan
- proses pembebasan tanah yang belum efisien.

2.11 Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Lingkungan Hidup di Kota Bekasi berdasarkan rangkuman dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yaitu:

- masih rendahnya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bank sampah;
- belum adanya pengelolaan sampah menjadi sumber energi terbarukan;
- pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah;
- optimalisasi pengelolaan persampahan;
- terpeliharanya daerah resapan air dan sumber air;
- masih rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; dan
- penciptaan iklim usaha yang kondusif.

2.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan identifikasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) adalah terkait kepemilikan dokumen kependudukan dan dokumen catatan sipil terutama untuk penduduk miskin, serta akurasi data

kependudukan, pemanfaatan data kependudukan, dan permasalahan terkait administrasi kependudukan lainnya.

2.14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Bekasi berdasarkan kajian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) adalah:

- terus meningkatnya jumlah penduduk;
- tingginya kepadatan penduduk;
- kualitas pelayanan belum maksimal sehingga intensifikasi pelayanan KB sangat penting; dan
- belum optimalnya ketahanan keluarga.

2.15 Urusan Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Perhubungan di Kota Bekasi menurut inventarisasi Dinas Perhubungan (DISHUB) adalah:

- tingkat pelayanan jaringan jalan (LOS) yang rendah; dan
- belum optimalnya angkutan umum dan massal di Kota Bekasi.

2.16 Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Bekasi menurut Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (DISKOMINFOSTANDI) adalah:

- belum tersedianya infrastruktur jaringan telekomunikasi yang memadai;
- pelayanan publik yang belum didukung sepenuhnya oleh sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

2.17 Urusan Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kota Bekasi menurut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKUKM) adalah:

- masih rendahnya daya saing koperasi dan UMKM;
- rendahnya kemampuan dan sumberdaya UMKM dalam penguasaan teknologi;
- pengembangan sarana promosi UMKM;
- penciptaan iklim usaha yang kondusif;
- belum semua pelaku UMKM mempunyai sertifikasi halal untuk produknya;
- koperasi sangat vital dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di Kota Bekasi; dan
- koperasi sebagai *agent of development and change* dalam memperkuat perekonomian masyarakat.

2.18 Urusan Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam urusan Penanaman Modal di Kota Bekasi adalah:

- belum optimalnya mutu pelayanan perizinan melalui pengembangan sistem *online* dan pengembangan aplikasi terintegrasi;
- peningkatan pemeliharaan sistem dan *server*, layanan *provider* secara rutin;
- penataan kebijakan investasi;
- masih rendahnya kinerja pelayanan investasi peningkatan nilai investasi dan terciptanya iklim investasi;
- peningkatan pemahaman masyarakat tentang layanan DPMPPTSP;
- peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal;
- optimalisasi penerapan teknologi informasi dan komunikasi;
- peningkatan kapasitas SDM aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, prasarana, sarana, dan pengelolaan aset dinas;
- penataan ulang sistem aplikasi dan *database* pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- efektivitas pelaksanaan SOP perizinan;
- peningkatan kerjasama promosi dan kerjasama investasi;
- pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; dan
- perbaikan sistem pengendalian internal di lingkungan DPMPPTSP.

2.19 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan utama dalam bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kota Bekasi berdasarkan informasi Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) adalah:

- kurangnya aktivitas rutin kepemudaan dan olah raga di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota;
- masih kurangnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga di setiap kecamatan; dan
- pembinaan olahraga terutama olah raga prestasi masih belum optimal, hal ini tercermin dari minimnya prestasi olah raga pada tingkat nasional maupun internasional.

2.20 Urusan Statistik

Permasalahan terkait dengan penyelenggaran urusan Statistik di Kota Bekasi menurut informasi yang digali Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian (DISKOMINFOSTANDI) yaitu belum didukungnya tata kelola pemerintahan dengan *data base* yang terintegrasi.

2.21 Urusan Persandian

Permasalahan terkait penyelenggaraan urusan Persandian di Kota Bekasi menurut informasi yang digali Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian (DISKOMINFOSTANDI) yaitu belum didukungnya tata kelola pemerintahan dengan *data base* yang terintegrasi dan belum terjaminnya keamanan informasi.

2.22 Urusan Kebudayaan

Permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan Kebudayaan di Kota Bekasi berdasarkan kajian Dinas Pariwisata dan Budaya (DISPARBUD) adalah:

- masih rendahnya pemahaman nilai-nilai budaya di masyarakat;
- masih rendahnya pemahaman nilai-nilai kearifan lokal dan penghormatan tradisi lokal;
- pengembangan sarana dan prasarana seni dan budaya di Kota Bekasi;
- sosialisasi seni, budaya, tradisi, dan sejarah lokal;
- pembinaan terhadap nilai seni, budaya, tradisi, dan sejarah lokal; dan
- pelestarian nilai-nilai seni, budaya, tradisi, dan sejarah lokal.

2.23 Urusan Perpustakaan

Permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan Perpustakaan di Kota Bekasi menurut perspektif Dinas Arsip & Perpustakaan Daerah (DISARPUSDA) adalah:

- terbatasnya jumlah dan koleksi perpustakaan;
- terbatasnya SDM perpustakaan;
- kurang *update*-nya koleksi perpustakaan daerah;
- gedung yang belum representatif;
- pelayanan perpustakaan yang belum merata ke seluruh wilayah; dan
- pembinaan perpustakaan yang masih belum optimal.

2.24 Urusan Kearsipan

Beberapa permasalahan urusan Kearsipan yang dihadapi oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (DISARPUSDA) Kota Bekasi yaitu:

- tingginya volume arsip pada pencinta arsip dan LKD;
- terbatasnya tempat penyimpanan (*record center* dan tempat penyimpanan arsip aktif);
- terbatasnya arsiparis;
- rendahnya kesadaran dan komitmen aparaturnya untuk tertib arsip;
- belum tersedianya peraturan daerah tentang kearsipan;
- belum tersosialisasi secara merata pengetahuan pengelolaan arsip dinamis dan statis secara baku pada perangkat daerah serta pemahaman tata acara pengelolaan arsip dari mulai penciptaan sampai penyusutan; dan

- lokasi kantor yang jauh dari pusat perkantoran Pemerintah Kota Bekasi, sehingga koordinasi kurang maksimal.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

3.25 Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang terkait dengan urusan Kelautan dan Perikanan yang ada di Kota Bekasi menurut identifikasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) adalah terkait dengan peningkatan usaha perikanan budidaya.

3.26 Urusan Pariwisata

Permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan Pariwisata di Kota Bekasi berdasarkan informasi dari Dinas Pariwisata dan Budaya (DISPARBUD) adalah:

- penggalan dan pengembangan destinasi wisata;
- mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata;
- pengembangan destinasi wisata edukasi;
- pengembangan wisata belanja dan kuliner secara optimal;
- optimalisasi lahan untuk destinasi wisata buatan;
- sosialisasi destinasi wisata;
- optimalisasi pemanfaatan situs dan cagar budaya untuk wisata edukasi; dan
- optimalisasi wisata perkotaan (*urban tourism*).

3.27 Urusan Pertanian

Permasalahan yang terkait urusan Pertanian yang ada di Kota Bekasi menurut identifikasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) adalah:

- penerapan *urban farming*;
- pemanfaatan lahan sempit untuk meningkatkan hasil produksi pertanian;
- komoditi pertanian sehat sebagai upaya mewujudkan pelestarian alam (*go green*);
- jaringan promosi dan pemasaran produk pertanian masih kecil;
- pengembangan SDM pertanian, penyuluhan, dan peningkatan kesejahteraan petani;
- penyelenggaraan penyuluhan pertanian sebagai upaya pengembangan sektor pertanian;
- optimalisasi kebun bibit untuk pengadaan bibit tanaman;
- tidak terpenuhinya kebutuhan produk peternakan di Kota Bekasi;
- jaminan keamanan pangan produk peternakan;
- potensi ancaman penyakit hewan menular terutama yang bersifat *zoonosis*;
- pembinaan dan pendampingan belum maksimal;
- besarnya biaya pakan;
- keterbatasan akses permodalan; dan
- kurangnya tenaga penyuluhan pertanian perkotaan.

3.28 Urusan Kehutanan

Permasalahan umum terkait dengan urusan Kehutanan yang ada di Kota Bekasi menurut identifikasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) adalah terkait dengan pengembangan hutan kota.

3.30 Urusan Perdagangan

Permasalahan terkait dengan urusan Perdagangan yang ada di Kota Bekasi menurut identifikasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISDAGPERIN) adalah:

- peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran kemetrolagian dalam perlindungan konsumen;
- pembangunan gedung laboratorium dan instalasi uji kemetrolagian yang memadai;
- peningkatan pelayanan kemetrolagian (tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya);
- peningkatan pertumbuhan ekonomi makro;
- peningkatan nilai ekspor daerah; dan
- perluasan akses pasar dalam dan luar negeri.

3.31 Urusan Perindustrian

Permasalahan terkait dengan urusan Perindustrian yang ada di Kota Bekasi menurut identifikasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISDAGPERIN) adalah:

- masih rendahnya daya saing industri;
- adanya keterbatasan lahan sebagai ruang usaha baru;
- peningkatan jumlah/rasio industri yang menerapkan SNI/ISO; dan
- pengembangan potensi industri kreatif Kota Bekasi.

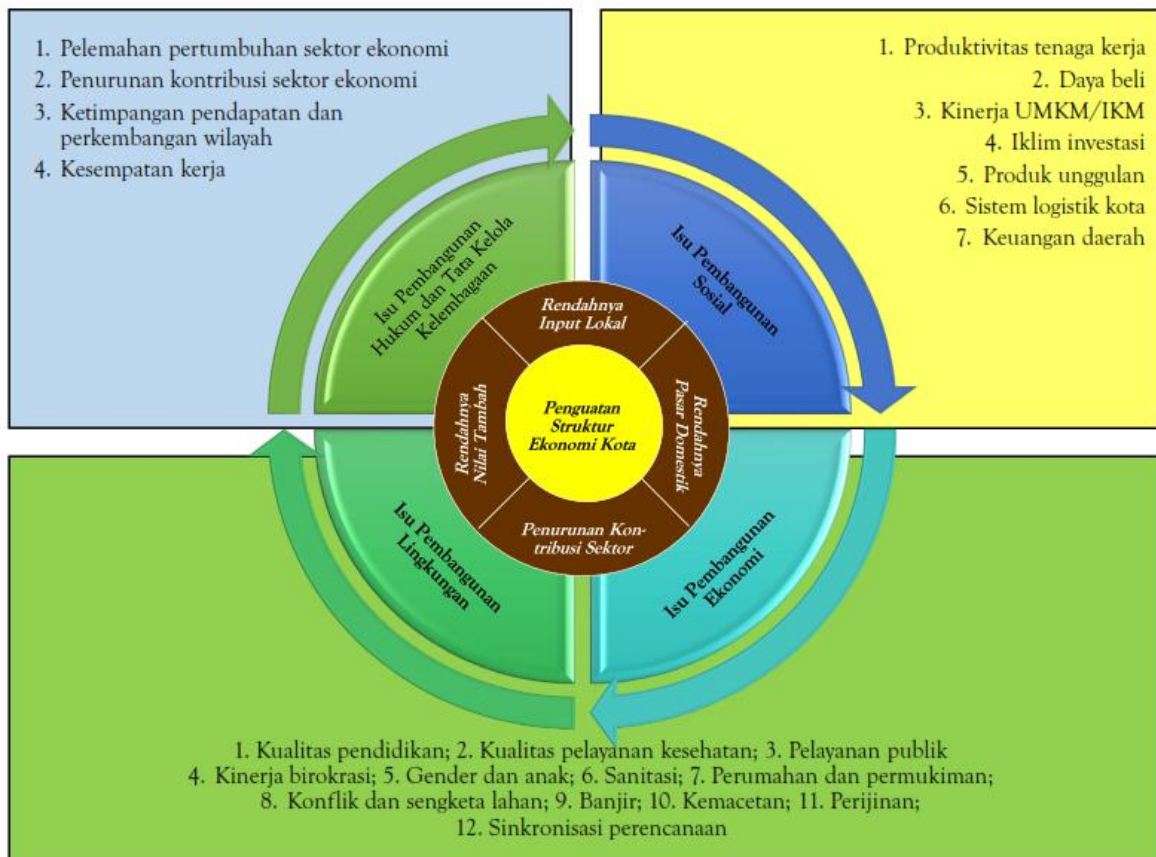
4.2 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan sehingga suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Penentuan isu strategis ini mengacu dari berbagai sumber yaitu:

- (1) *background study* tahun 2017;
- (2) isu strategis baik di tingkat internasional, nasional, maupun provinsi yang mempengaruhi Kota Bekasi lima tahun ke depan (2019-2023);
- (3) kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kota Bekasi, khususnya RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
- (4) kebijakan pembangunan Kota Bekasi yang antara lain terdiri dari RPJPD Kota Bekasi Tahun 2005-2025 dan RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031; dan

- (5) KLHS RPJMD terkini yang telah divalidasi. Dokumen ini penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs) telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan dan perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka isu strategis pembangunan Kota Bekasi 2018-2023 secara garis besar dapat dirumuskan seperti pada Gambar 4.12. Isu strategis pembangunan Kota Bekasi 2018-2023 menempatkan isu penguatan struktur ekonomi kota sebagai inti dari isu strategis pembangunan kota yang terintegrasi dengan isu strategis pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang meliputi beberapa perspektif, yaitu: (1) isu pembangunan pilar Sosial, (2) isu pembangunan pilar Ekonomi, (3) isu pembangunan pilar Lingkungan, dan (4) isu pembangunan pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan.



Gambar 4.12 Rumusan Isu Strategis Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023

4.2.1 Isu Strategis berdasarkan Kesepakatan Pemangku Kepentingan

Berdasarkan hasil diskusi, FGD dan uji publik dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi terhadap kondisi Kota Bekasi, baik atas nama individu maupun lembaga maka di sepakati beberapa isu prioritas Kota Bekasi, lebih jelasnya mengenai isu prioritas berdasarkan yang telah di sepakati oleh pemangku kepentingan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.7 Perumusan Isu Berdasarkan Kesepakatan Pemangku Kepentingan

ISU PRIORITAS/ PB PRIORITAS	PENYEBAB/ISU PB	AKIBAT/ISU PB
Alih Fungsi Lahan	▪ Kebutuhan ruang/lahan untuk pembangunan fisik ▪ Tekanan ekonomi ▪ Produktivitas lahan rendah	▪ Kemacetan ▪ Kriminalitas ▪ Masalah kesejahteraan sosial ▪ Bangkitan sampah ▪ Pencemaran udara ▪ Pencemaran air ▪ Banjir ▪ Kemiskinan ▪ Kebakaran ▪ Kumuh ▪ Penurunan Muka Air tanah ▪ Sedimentasi sungai ▪ Terganggunyaresapan air ▪ Pencemaran tanah ▪ Hilangnya KEHATI ▪ Kurangnya RTH
Kuantitas dan Kualitas Air	▪ Kapasitas pengelolaan sampah ▪ Alih fungsi lahan/resapan air ▪ Banjir dan limbah kiriman ▪ Pembuangan air limbah ▪ Eksploitasi air tanah ▪ Kapasitas SPAM ▪ Sistem/kapasitas utilitas Kota ▪ Perilaku masyarakat ▪ Topografi sangat datar ▪ Porositas tanah ▪ Erosi	▪ Kesehatan buruk ▪ Kemiskinan ▪ Kekeringan ▪ Banjir ▪ Hilangnya kehati ▪ Turunnya produktivitas lahan pertanian ▪ Deplesi air tanah ▪ <i>Land subsidence</i>
Tata Kelola	▪ Kapasitas SDM/lembaga ▪ Sistem kelembagaan ▪ Regulasi	▪ Kemacetan ▪ Kriminalitas ▪ Masalah kesejahteraan Sosial ▪ Bangkitan sampah ▪ Kapasitas pengelolaan sampah rendah ▪ Pencemaran udara ▪ Pencemaran air ▪ Banjir ▪ Kemiskinan ▪ Kebakaran ▪ Kumuh ▪ Penurunan muka air tanah ▪ Sedimentasi sungai ▪ Terganggunya resapan air ▪ Pencemaran tanah ▪ Hilangnya KEHATI ▪ Kurangnya RTH ▪ Masalah kesejahteraan sosial ▪ Apatisme

ISU PRIORITAS/ PB PRIORITAS	PENYEBAB/ISU PB	AKIBAT/ISU PB
		▪ Konflik horizontal/vertikal ▪ Hilangnya kearifan Lokal ▪ Tingkat pendidikan buruk ▪ Tingkat kesehatan masyarakat buruk ▪ Kekeringan • Banjir • Hilangnya KEHATI • Turunnya produktivitas lahan • Deplesi air tanah • <i>Land subsidence</i>
Penghidupan Masyarakat	▪ Biaya tinggi ▪ Daya beli rendah ▪ Pelayanan kesehatan buruk ▪ Akses terhadap layanan dasar	▪ Masalah kesejahteraan sosial ▪ Kriminalitas ▪ Kumuh ▪ Apatisme ▪ Konflik horizontal/vertikal ▪ Hilangnya kearifan lokal ▪ Tingkat kesehatan masyarakat buruk ▪ Tingkat pendidikan buruk ▪ Hilangnya modal sosial

Sumber: Hasil KLHS RPJMD Tahun 2018-2023.

Isu strategis pembangunan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 menempatkan isu penguatan struktur ekonomi kota sebagai inti dari isu strategis pembangunan kota yang terintegrasi dengan isu strategis pada urusan pemerintah daerah yang meliputi aspek urusan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan umum. Penjelasan dari rumusan isu strategis KLHS Perubahan RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
2. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
3. Pelayanan Sosial
4. Penguatan Kelembagaan dan Kerjasama
5. Peningkatan Perekonomian Kota
6. Peningkatan Layanan dan Sanitasi Air Bersih yang Aman dan Berkelanjutan
7. Kebencanaan
8. Peningkatan Infrastruktur

4.2.2 Isu Strategis berdasarkan KLHS RTRW Kota Bekasi

Dalam kajian RTRW identifikasi dan perumusan isu PB Prioritas didasarkan pada:

1. Rapat pembahasan (*focused group discussion* = FGD);
2. Hasil 7 (tujuh) Isu PB Prioritas;
3. Hasil Isu PB Prioritas dianalisis pembobotan dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941)

Isu pembangunan berkelanjutan prioritas yang telah dirumuskan dalam KLHS Perubahan RTRW Kota Bekasi 2018-2023 yang telah di validasi meliputi:

1. Banjir
2. Kemacetan
3. Permukiman Kumuh
4. Keterbatasan Air
5. Persampahan
6. Alih Fungsi Lahan
7. Pencemaran Udara
8. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau

4.2.3 Isu Strategis berdasarkan Perubahan KLHS Pada Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023

Isu strategis pembangunan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 merupakan salah satu dasar dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran hingga program prioritas pembangunan Kota Bekasi pada periode tahun 2018-2023. Mengacu pada hasil pembahasan terkait proses penentuan isu strategis maka beberapa pertimbangan dalam merumuskan isu strategis pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023 seperti telah dibahas sebelumnya meliputi:

1. Amanah RPJPD Kota Bekasi 2018-2023;
2. Kinerja Gambaran Umum Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah;
3. Analisis Struktur Permasalahan Strategis Kota, Provinsi dan nasional;
4. Analisis dampak Permasalahan terhadap kinerja pembangunan Kota;
5. Identifikasi Isu strategis urusan pemerintahan;
6. Keterkaitan dengan Isu Strategis Nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Isu strategis pembangunan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 menempatkan isu penguatan struktur ekonomi kota sebagai inti dari isu strategis pembangunan kota yang terintegrasi dengan isu strategis pada urusan pemerintah daerah yang meliputi aspek urusan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan umum. Penjelasan dari rumusan isu strategis pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Struktur Perekonomian Kota

Isu strategis penguatan struktur perekonomian Kota Bekasi memiliki beberapa lingkup permasalahan strategis yakni:

- a. Rendahnya kandungan lokal dalam sistem ekonomi kota saat ini;
- b. Terbatasnya pasar domestik untuk produk ekonomi kota;
- c. Rendahnya nilai tambah ekonomi kota;
- d. Penurunan kontribusi dan laju pertumbuhan beberapa sektor ekonomi utama Kota;
- e. Rendahnya keterkaitan antar sektor hingga aspek geografi ekonomi yang belum merata.

2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Isu strategis peningkatan kesejahteraan masyarakat memiliki lingkup permasalahan strategis yang meliputi:

- a. Penurunan laju dan kontribusi sektor ekonomi utama kota;
- b. Ketimpangan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. Keterbatasan kesempatan kerja.

3. Penguatan Daya Saing daerah

Isu strategis penguatan daya saing daerah memiliki lingkup permasalahan strategis yang meliputi :

- a. Rendahnya daya beli;
- b. Peningkatan kapasitas dan pengelolaan keuangan daerah;
- c. Peningkatan masalah keamanan dan iklim investasi; dan
- d. Keterbatasan kapasitas keuangan daerah.

4. Peningkatan Pelayanan Umum.

Isu strategis peningkatan pelayanan umum memiliki lingkup permasalahan strategis yang meliputi:

- a. Kualitas pendidikan yang belum merata;
- b. Tata kelola pelayanan kesehatan yang belum optimal;
- c. Rendahnya kinerja reformasi birokrasi;
- d. Masih terbatasnya layanan umum bagi gender dan anak;
- e. Kemacetan;
- f. Banjir;
- g. *Backlog* perumahan dan kekumuhan;
- h. Sanitasi yang belum merata;
- i. Konflik lahan dan penataan ruang;
- j. Perizinan; dan
- k. Pelayanan sosial.

4.2.4 Isu Strategis berdasarkan Capaian Indikator Target Pembangunan Berkelanjutan

Rumusan isu strategis merupakan capaian TPB dalam kelompok yang belum mencapai target (SB), memiliki data tetapi belum menjadi target dalam RPJMD (IT) dan yang belum memiliki data (NA). Selain ketiga kelompok hasil capaian TPB, isu strategis juga dikaitkan dengan kondisi dan perubahan 6 muatan lingkungan hidup dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang meliputi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, risiko lingkungan hidup, sumber daya alam, kerentanan dan adaptasi perubahan iklim, emisi gas rumah kaca dan kemampuan penyediaan lingkungan hidup. Secara umum strategi terhadap capaian TPB untuk masing-masing kelompok adalah sebagai berikut:

- a. Indikator yang telah ada dalam RPJMD tetapi belum mencapai target adalah mendorong pencapaian indikator tersebut agar dapat mencapai target nasional;

- b. Indikator yang memiliki data tetapi belum ada dalam target RPJMD dan belum mencapai target nasional; dan
- c. Indikator yang belum memiliki data dan ada target yang ditetapkan secara nasional.

Sedangkan untuk indikator TPB yang telah ada dalam RPJMD dan telah mencapai target maka perlu untuk tetap dipertahankan kinerja agar tidak turun. Berdasarkan analisis terhadap masing-masing capaian TPB dan kondisi lingkungan hidup Kota Bekasi, berikut adalah rumusan isu strategis berdasarkan capaian TPB yang dibagi dalam empat pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Dari isu strategis berdasarkan capaian TPB yang terbagi dalam empat pilar maka di rumuskan isu prioritas, metoda pendekatan yang dilakukan untuk menentukan isu PB prioritas adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 pasal 20 ayat (2) bahwa hasil identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan dibuat dalam bentuk prioritas isu dengan mempertimbangkan unsur-unsur paling sedikit:

- a. karakteristik wilayah;
- b. tingkat pentingnya potensi dampak dan risiko;
- c. keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan;
- d. keterkaitan dengan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
- e. muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- f. Hasil FGD melalui pendekatan perumusan isu prioritas bedasar pohon masalah

Perumusan isu berdasarkan capaian TPB dan isu prioritas diuraikan sebagai berikut:

a. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu:

- i. tujuan 1 mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
- ii. tujuan 2 menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan;
- iii. tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
- iii. tujuan 4 menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat; dan
- iv. tujuan 5 mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

Tabel 4.8.
Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial

TPB Pilar Sosial	Permasalahan Yang Masih Muncul	Skenario dan Rekomendasi
Tujuan 1: Mengakhiri kemiskinan dlm segala bentuk di manapun. 1. Isu strategis Pe-nguatan	• Tingkat kemiskinan di Kota Bekasi hi-ngga tahun 2018 mencapai 4,11%, na-mun dengan adanya bencana banjir dan juga pandemi COVID-19 angka kemiskinan pada tahun 2020 mening-kat menjadi sebesar 8,56%	Perlu adanya upaya tambahan agar angka kemiskinan setelah terjadinya pandemi COVID-19 menurun kembali sesuai tar-get nasional & target Kota Bekasi sebesar 4,01% pada tahun 2023. Rekomendasinya adalah:

TPB Pilar Sosial	Permasalahan Yang Masih Muncul	Skenario dan Rekomendasi
pereko nomian kota		1. Pendataan & validasi penduduk mis-kin dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem layanan ru-jukan terpadu; 2. Peningkatan, penguatan dan pengem-bangan terhadap UMKM; 3. Peningkatan dan pengembangan ke-wirausahaan; 4. Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro; 5. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro; 6. Pemberiaan bantuan kepada pendu-duk miskin dan masyarakat yg terkena dampak COVID-19 secara simultan; 7. Pengembangan ekonomi kreatif untuk membuka peluang usaha/pekerjaan; 8. Pemberdayaan masyarakat miskin me-lalui bantuan modal & keterampilan usaha kreatif; 9. Pemberiaan bantuan dengan melibat-kan berbagai pihak non-pemerintah, spt BAZNAS, lembaga zakat, BUMN, dan pihak swasta; 10. Program bantuan pangan warga mis-kin dan penyediaan rumah layak huni bagi warga miskin; 11. Pelatihan peningkatan usaha dan pe-masaran secara <i>online</i>.
2. Isu strategis Pe- ningkatan laya-nan air bersih dan sanitasi yg aman dan ber- kelanjutan	• Peningkatan layanan air bersih dan sa-nitasi yang aman dan berkelanjutan, dengan fakta: - masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani sebesar 29,07%; - cakupan ketersediaan rumah layak huni 23,88% (2018); - sistem pengelolaan persampahan yg belum optimal; - masih terdapatnya rumah tangga yg membuang limbah domestik ke salu-ran; dan - persentase penduduk berakses air minum baru mencapai 26,70%.	Perlu adanya upaya tambahan agar persen tase rumah tangga yg memiliki akses thd layanan sanitasi layak dan berkelanjutan meningkat sesuai target nasional 100,00% serta target kawasan kumuh 0,00%. Rekomendasinya adalah: 1. Penataan kawasan kumuh dan perba-ikan rumah tidak layak huni secara simultan; 2. Peningkatan layanan sanitasi berbasis masyarakat melalui pembangunan MCK++ dan pembangunan <i>septic tank</i> komunal;

TPB Pilar Sosial	Permasalahan Yang Masih Muncul	Skenario dan Rekomendasi
		- Pembangunan infrastruktur air limbah sistem terpusat; - Peningkatan kinerja pelayanan serta sarana dan prasarana pengelolaan per-sampahan; - Peningkatan kualitas lingkungan me-lalui revitalisasi; - Peningkatan dan pembangunan salur-an drainase yang terintegrasi; - Membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan jaringan prasarana & sarana dasar perkotaan; - Peningkatan sistem penyediaan air mi-num perpipaan; dan - Peningkatan akses thd ketersediaan air bersih pada lingkungan perumahan melalui pengumpulan air hujan (<i>rain harvesting</i>).
Tujuan 2: Menghentikan ke-laparan, mening-katkan ketahanan pangan, mempro-mosikan pertani-an berkelanjutan 1. Isu strategis Da-ya dukung dan daya tampung lingkungan.	- Masih rendahnya ketersediaan pangan lokal; - Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan pokok/beras; - Masih rendahnya ketersediaan pangan utama; - Skor Pola Pangan Harapan masih di bawah target nasional yaitu baru men-capai 87,4% (tahun 2019); - Persentase penanganan kerawanan pa-ngan baru mencapai 69,58%; - Kondisi daya dukung lahan pertanian di Kota Bekasi sudah defisit; dan - Kondisi jasa ekosistem penyediaan pa-ngan di Kota Bekasi pada umumnya di katagorikan sangat rendah.	Perlu ada upaya tambahan agar: - Skor Pola Pangan Harapan meningkat sesuai dengan target nasional 92,5%; - Kondisi daya dukung lahan pertanian tanaman pangan di Kota Bekasi tidak semakin defisit. Rekomendasinya adalah: - Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B); - Pengembangan lahan pertanian pada kawasan yang berfungsi lindung; - Menjalin pola kerjasama dengan kab. yang memiliki daya dukung pangan surplus untuk pemenuhan kebutuhan pangan Kota Bekasi; - Pengembangan dan penerapan <i>urban farming</i> dgn pengembangan kampung hidroponik; - Melakukan diversifikasi pangan agar peningkatan skor Pola Pangan Harap-an sampai

TPB Pilar Sosial	Permasalahan Yang Masih Muncul	Skenario dan Rekomendasi
		dengan 92,5% sesuai skor pola pangan harapan nasional; 6. Penyelenggaraan penyuluhan petani-an sbg upaya pengembangan sektor pertanian; 7. Meningkatkan produktivitas padi/ha; 8. Diversifikasi pangan; 9. Pemberian insentif bagi pemilik lahan pertanian berupa keringanan PBB,ban tuan saprotan (sarana produksi pertanian) & pelatihan pemasaran <i>online</i>; 10. Optimalisasi pemanfaatan lahan peka-rangan; dan 11. Melakukan gerakan <i>one day no rice</i> sbg upaya pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap beras.
Tujuan 3: Menjamin kehidupan yang sehat & meningkatkan kesejahteraan se-luruh penduduk semua usia. 1. Isu strategis Pe- ningkatan Pe-layanan Kese-hatan	• Proporsi perempuan pernah kawin u-mur 15-49 tahun yg proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kese-hatan terlatih baru mencapai 88%; dan • Angka Kematian Balita (AKBa) dan ke-matian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran anak masih di atas target nasional (1,1 tahun 2017).	Perlu upaya tambahan agar angka kema-tian balita menurun sesuai dengan target nasional sebesar 0,00%. Rekomendasinya adalah: 1. Meningkatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan pelayanan persalinan; 2. Melakukan inovasi-inovasi pelayanan kesehatan tingkat Puskesmas; 3. Meningkatkan kinerja layanan keseha-tan ibu hamil dan melahirkan; 4. Meningkatkan kinerja layanan keseha-tan untuk balita; 5. Penyuluhan kesehatan ibu hamil dan balita secara simultan; 6. Optimalisasi penanganan COVID-19; 7. Upaya pencapaian indikator SPM; dan 8. Penguatan & peningkatan layanan pos yandu untuk pemeriksaan ibu hamil dan balita.
Tujuan 4: Menjamin kualitas pendidikan yg inklusif dan	• Sarana pendidikan yang berakreditasi minimal B belum mencapai target nasi-onal; • Nilai APK yang belum mencapai target nasional;	Perlu upaya tambahan agar: 1. Sarana pendidikan yang terakreditasi minimal B

TPB Pilar Sosial	Permasalahan Yang Masih Muncul	Skenario dan Rekomendasi
merata dan meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat 1. Isu strategis Pe- ningkatan Pela-yanan & Fasili-tas Pendidikan	• Nilai APK SMP/MTs/ sederajat dari 95,32 (2017) menurun menjadi 94,81 namun demikian Nilai APK selama ku-run waktu 1 tahun meningkat. Hal ini tergambar dari: - APK SD/MI/ sederajat dari 95,32% (2017) menjadi 110% (2019); - APK SMA/SMK/MA/ sederajat dari 75,89% (2017) meningkat menjadi 107% (2019); dan - APK PAUD meningkat menjadi se-besar 92,75% (2019).	meningkat sesuai dengan target nasional; 2. Nilai APK sesuai target nasional yang meliputi: • Meningkatnya APK SD/MI/ se-derajat dari 94,81% menjadi 114,09%; • Meningkatnya APK SMP/MTs/ se-derajat dari 110% menjadi 106,94% Rekomendasinya adalah: 1. Peningkatan kualitas/mutu pendidik-an dan tenaga pendidik; 2. Peningkatan kualitas sarana dan prasa-rana pendidikan; 3. Peningkatan capaian APK pada tingkat pendidikan SD sederajat dan SMP se-derajat sesuai target nasional; 4. Peningkatan pelayanan pendidikan ber basis IT; 5. Peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan yang menghasilkan lulu-san yang bersertifikasi; 6. Pemberiaan bantuan biaya pendidikan kepada sekolah/ mahasiswa berprestasi yang kurang mampu; 7. Pengembangan sarana & prasana pen-didikan non-formal; dan 8. Peningkatan kemampuan akses terha-dap internet (<i>hardware & software</i>) bagi pelajar dan mahasiswa.
Tujuan 5: Mencapai keseta-raan gender dan memberdayaka n kaum perempuan 1. Isu strategis Pe-layanan Sosial dan Pelayanan terhadap Anak dan Perempuan	• Belum optimalnya pemberdayaan pe-rempuan dan perlindungan anak	Perlu upaya menurunkan prevalensi keke-rasan terhadap anak dan perempuan. Rekomendasinya adalah: 1. Pembentukan UPTD di Kota Bekasi; 2. Pemeliharaan kamtramtibnas dan pen-cegahan tindak kriminal di sarana pu-blik; 3. Fasilitasi kasus perlindungan kekeras-an perempuan;

TPB Pilar Sosial	Permasalahan Yang Masih Muncul	Skenario dan Rekomendasi
		4. Memberikan pendidikan & pelatihan keterampilan bagi perempuan; dan 5. Sosialisasi dan edukasi pencegahan se-gala bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.

Sumber: Hasil Analisis Dan Uji Publik , Tahun 2020

b. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi ini mencakup tiga tujuan sebagaimana tertuang dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu:

- Tujuan 8 meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
- Tujuan 9 membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi; dan
- Tujuan 10 mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.

Untuk lebih jelasnya mengenai isu pembangunan berkelanjutan Pilar Ekonomi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.9.
Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi

TPB Pilar Ekonomi	Permasalahan Yang Masih Muncul	Skenario dan Rekomendasi
Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yg inklusif & berkelanjutan, kesempatan kerja yg produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yg layak untuk semua 1. Isu strategis Peningkatan Pelayanan & Fasilitas Pendidikan	- Kenaikan laju pertumbuhan PDRB dan total PDRB per kapita belum sesuai dengan target nasional; - Menurunnya kemandirian ekonomi daerah; dan - Dampak adanya pandemi COVID-19: - laju pertumbuhan ekonomi menurun; dan - prosentase peningkatan PDA diprediksi akan menurun. Berdasarkan hasil perhitungan <i>rate</i> BAU dengan laju pertumbuhan PDB 0,51%/ tahun, maka pada tahun 2023 target yang akan dicapai baru mencapai 6,50%.	Untuk mencapai laju pertumbuhan 7% perlu adanya upaya tambahan. Rekomendasinya adalah: - Meningkatkan PDRB per kapita sesuai target nasional; - Melakukan efisiensi belanja daerah; - Mencari sumber pertumbuhan baru dari perekonomian berbasis kreatif; - Pemberian stimulus PBB pada MBR; - Peningkatan dan peluasan basis data pajak dan retribusi daerah; - Digitasi <i>platform</i> pelayanan pajak dan retribusi daerah; - Peningkatan & penguatan kompetensi dan <i>skill</i> integritas SDM operator pajak & retribusi daerah; - Peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah melalui

TPB Pilar Ekonomi	Permasalahan Yang Masih Muncul	Skenario dan Rekomendasi
		pengelolaan sumber daya daerah secara lebih profesional; 9. Penyempurnaan sistem dan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah; 10. Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional; dan 11. Peningkatan kemampuan pemasaran dan usaha secara <i>online</i>.
2. Isu strategis Penguatan Perekonomian Ko-ta Bekasi	Masih tingginya tingkat pengangguran yaitu sebesar 8,20% dengan adanya pan-demi COVID-19 tingkat pengangguran akan cenderung naik/meningkat.	Menurunkan tingkat pengangguran lebih rendah dibanding tingkat pengangguran nasional (5,5%) perlu adanya upaya tambahan. Rekomendasinya adalah: 1. Memasukkan indikator dlm rencana pembangunan untuk tingkat pengang-guran terbuka agar mencapai target nasional 5,5%; 2. Peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru UMKM, UMKM <i>On-line</i>, <i>Startup</i>; 3. Penyelenggaraan bursa tenaga kerja; 4. Pengembangan industri kreatif untuk membuka peluang kerja; 5. Memasukan indikator program pem-bangunan untuk membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas; 6. Memberikan upah yang sama bagi pe-kerjaan penyandang disabilitas sesuai dengan UMR yang telah ditetapkan; 7. Membuka peluang pekerjaan dari berbagai sektor yang potensial; 8. Peningkatan kompetensi & kapasitas wirausaha dalam bentuk pelatihan; 9. Membuat aplikasi berbasis <i>mobile</i> yang berisi data & informasi UMKM yg ada di Kota Bekasi sekaligus tersedia menu untuk membeli produk UMKM tsb; 10. Penyelenggaraan <i>job fair</i> yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan <i>back-ground</i>.

TPB Pilar Ekonomi	Permasalahan Yang Masih Muncul	Skenario dan Rekomendasi
Tujuan 9: Meningkatkan in-dustri inklusif & berkelanjutan 1. Isu strategis Pe nguatan Pere-konomian Ko-ta Bekasi	• Laju pertumbuhan PDB industri manu faktur (di Kota Bekasi selama kurun waktu 5 tahun (2013-2017) yang terus menurun. Dari data LPP industri ma-nufaktur di Kota Bekasi tahun 2018 sebesar 3,71%; dan • Kontribusi sektor industri thd PDRB dalam beberapa tahun terakhir terus menurun. Pada tahun 2013 sektor ini mampu menyumbang sebesar 36,34% (Rp 20,97 triliun), namun merosot hi-ngga 35,19% tahun 2015, dan kemu-dian 26,58% pada tahun 2017.	Perlu adanya upaya tambahan agar: 1. Meningkatkan laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih ti-nggi dari pertumbuhan PDB nasional (4,3%); dan 2. Mempertahankan kontribusi sektor in-dustri terhadap PDRB jangan sampai di bawah standar nasional. Rekomendasinya adalah: 1. Meningkatkan jumlah industri manu-faktur; 2. Peningkatan kemampuan teknologi in-dustri kreatif dan inovatif ; 3. Pengembangan industri yang mampu menjaga ekosistem, memelihara sum-berdaya yang berkelanjutan; 4. Pengembangan ekonomi kreatif; 5. Peningkatan infrastruktur industri; 6. Program peningkatan kualitas SDM dalam sektor industri; 7. Program peningkatan daya saing indus- tri; dan 8. Pengembangan sains dan <i>creative centre</i>.
Tujuan 17: Kemitraan untuk mencapai tujuan 1. Isu strategis Pe nguatan Pere-konomian Ko-ta Bekasi	Dampak adanya pandemic COVID-19: • Laju pertumbuhan ekonomi menurun; • Persentase peningkatan PAD dipredik-si akan menurun.	Perlu adanya upaya tambahan agar sesuai dengan target. Rekomendasinya adalah: 1. Meningkatkan PDRB perkapita sesuai target nasional; 2. Melakukan efisiensi belanja daerah; 3. Mencari sumber pertumbuhan baru dari perekonomian berbasis kreatif; 4. Pemberiaan stimulus PBB kepada ma-syarakat berpenghasilan rendah; 5. Peningkatan dan peluasan basis data pajak dan retribusi daerah; 6. Digitasi <i>platform</i> pelayanan pajak dan retribusi daerah; 7. Peningkatan dan pengutan kompetisi dan <i>skill</i> integritas SDM operator pa-jak dan retribusi daerah; 8. Peningkatan hasil pengelolaan kekaya-an daerah melalui

TPB Pilar Ekonomi	Permasalahan Yang Masih Muncul	Skenario dan Rekomendasi
		pengelolaan sum-berdaya daerah scr lebih profesional; 9. Penyempurnaan sistem dan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah; 10. Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional; dan 11. Peningkatan kemampuan pemasaran dan usaha secara <i>online</i>.

Sumber: Hasil Analisis Dan Uji Publik , Tahun 2020

c. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan mencakup 4 (empat) tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu sebagai berikut:

- Tujuan 6 menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
- Tujuan 11 menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan;
- Tujuan 12 menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; dan
- Tujuan 13 mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

Tabel 4.10.
Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan

TPB Pilar Lingkungan	Permasalahan Yang Masih Muncul	Skenario dan Rekomendasi
Tujuan 6: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yg berkelanjutan 1. Isu strategis Peningkatan Layanan Air Bersih dan Sanitasi yang Aman dan Berkelanjutan	- Persentase penduduk berakses air minum 26,7% (2018); - Daya dukung dan daya tampung ketersediaan air akan menurun seiring dgn meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan yang membutuhkan ketersediaan air; - Kondisi jasa ekosistem penyedia air di Kota Bekasi pada umumnya dikategorikan sangat rendah 70%, kategori sedang 17,40%); - Daya dukung jasa ekosistem pemurnian air pada umumnya rendah sekitar 54,6% dan sedang 34,55%.	Perlu adanya upaya tambahan agar: - Meningkatkan presentase penduduk berakses air minum hingga 100%. Sesuai target hingga akhir tahun 2023 baru mencapai 31,32%, sehingga untuk mencapai target nasional perlu upaya tambahan; - Mempertahankan daya dukung air sehingga tidak terus menurun. Rekomendasinya adalah: - Meningkatkan sistem pelayanan air minum melalui sistem perpipaan PDAM Kota Bekasi dan melalui pembangunan SPAM Swasta; - Membangun pola kerjasama dengan kabupaten lain untuk penyediaan air baku dan pengembangan sistem perpipaan air minum;

		3. Meningkatkan penangkapan air melalui revitalisasi dan pembangunan <i>embung/polder</i>; 4. Mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai sempadan sungai dan <i>situ</i>; 5. Meningkatkan efisiensi pemakaian air domestik dan non-domestik; 6. Pengawasan thd kualitas air minum PDAM/Non PDAM; 7. Pengawasan pembuatan/eksploitasi air tanah; 8. Pembangunan instalasi penyediaan dan pengolahan air baku; dan 9. Mengadaptasi teknologi pemanenan air hujan (<i>rain water harvesting</i>) untuk kebutuhan rumah tangga.
	• Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani sebesar 29,07% tahun 2018; • Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestik baru mencapai 3,39% (tahun 2018); • Sistem pengelolaan persampahan yang belum optimal dimana cakupan area pelayanan baru mencapai 70,00%; dan • Kondisi daya dukung jasa ekosistem pe ngelola dan penguraian limbah sangat rendah 57,5% dan 26,19%.	Perlu ada upaya tambahan untuk peningkatan penyediaan sanitasi layak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (air minum, persampahan, limbah dan jaringan drainase). Rekomendasinya adalah: 1. Peningkatan penanganan kawasan kumuh pada lokasi-lokasi yang belum tertangani 2. Penataan kawasan kumuh secara simultan 3. Sosialisasi & pendampingan program Sanimas;
	Berdasarkan hasil perhitungan rate BAU, laju pertumbuhan tingkat layanan sanitasi 0,69% pertahun, maka pada tahun 2023 target yang akan dicapai sebesar 91,88% sehingga untuk mencapai target nasional 100%.	4. Peningkatan jaringan air minum sistem perpipaan; 5. Pembangunan & peningkatan sistem pengelolaan limbah padat dan cair secara terpadu; 6. Membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan jaringan prasarana & sarana dasar perkotaan; 7. Pembangunan prasarana dan utilitas kota secara terpadu; dan 8. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dan terhubung langsung dengan

		sungai dan saluran.
Tujuan 11: Menjadi kota & permukiman inklusif, aman, ta-ngguh dan berke-lanjutan. 1. Isu strategis Peningkatan Layanan Air Bersih dan Sanitasi yg Aman & Berkelanjutan dan Daya Dukung & Daya Tampung	• Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani sebesar 29,07% (2018); • Cakupan ketersediaan rumah layak huni 23,88% (2018); • Kondisi daya dukung jasa ekosistem pengelola & penguraian limbah sangat rendah 57,5% dan 26,19%; • Kemampuan lahan di Kota Bekasi se-bagian besar termasuk kelas II, yaitu 70,12% dengan demikian kemampuan lahan Kota Bekasi merupakan lahan potensial untuk pengembangan kawas-an budidaya perkotaan; dan • Daya dukung jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup sangat tinggi 57,16% dan sedang 40,56%.	Untuk menurunkan kawasan kumuh per-kotaan sehingga sesuai target nasional 0% perlu upaya tambahan. Rekomendasinya adalah: 1. Peningkatan kualitas lingkungan per-mukiman kumuh melalui peremajaan, pemugaran dan revitalisasi kawasan; 2. Peningkatan penanganan kawasan ku-muh pada lokasi-lokasi yang belum ter tangani; 3. Penataan kawasan kumuh secara simul-tan; 4. Penyusunan rencana tapak (<i>sit plan</i>) dan DED peremajaan/pemugaran per mukiman kumuh; 5. Peningkatan perbaikan rumah tidak layak huni serta PSU; dan 6. Peningkatan dan pembangunan PSU secara terpadu. Untuk meningkatkan proporsi rumah ta-ngga yg memiliki akses terhadap hunian yg layak dan terjangkau sesuai target nasional perlu upaya tambahan. Rekomendasinya adalah: 1. Pengembangan dan pembangunan hunian vertikal (rusunawa/rusunami); 2. Penyediaan rumah bagi masyarakat ber penghasilan rendah (MBR); 3. Pemberiaan subsidi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); 4. Pengembangan jaringan masyarakat da-lam pengelolaan prasarana sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman.
2. Isu strategis Peningkatan Infrastruktur	• Belum optimalnya pengguna moda ang kutan umum. Pengguna moda transportasi umum Kota Bekasi baru mencapai 28,00%; • Persentase layanan angkutan umum massal 50,00%; dan • Rendahnya sarana & prasarana transportasi yg memenuhi kriteria pengguna dengan katagori kebutuhan khusus. Proporsi pengguna moda transportasi massal di Kota	Perlu beberapa upaya tambahan rekomendasinya : 1. Pengembangan angkutan massal kota berbasis jalan dan rel yang terintegrasi dengan moda angkutan yang ada; 2. Peningkatan & pembangunan sarana dan prasarana perhubungan; dan 3. Pengembangan sistem jaringan transportasi dan angkutan massal yang ramah lingkungan

	Bekasi sesuai target nasional baru mencapai 28,00%.	dan masyarakat berkebutuhan khusus lainnya.
3. Isu strategis Penguatan Perekonomian dan Pembangunan Infrastruktur	Belum optimalnya pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata di Kota Bekasi	Kota Bekasi memiliki beberapa benda, situs, kawasan cagar budaya, situ & pengembangan wisata buatan, maka perlu upaya tambahan untuk melestarikan serta mengembangkan. Rekomendasinya adalah: 1. Pengembangan pariwisata yang ada di Kota Bekasi; 2. Pengembangan kawasan budaya dan olahraga; 3. Pengembangan kawasan edukasi; 4. Pengembangan wisata bisnis perkota-an dengan daya tarik wisata belanja, wisata kreatif, rekreasi buatan wisata konferensi; 5. Pengembangan & pembangunan sa-rana & prasarana pendukung obyek2 wisata.
4. Isu strategis Peningkatan Layanan Air Bersih dan Sanitasi yang Aman dan Berkelanjutan, serta DDDT (risiko dampak)	• Persentase jumlah sampah yang terkura-angi melalui 3R baru mencapai 24,94% • Persentase sampah yang terangkut ke TPA baru mencapai 67,15%; • Persentase cakupan area pelayanan ba-ru mencapai 70,00%; • Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA baru mencapai 71,72%; • Kondisi daya dukung jasa ekosistem pengelola & penguraian limbah sangat rendah 57,5% dan 26,19%. Berdasarkan hasil perhitungan rate BAU laju pertumbuhan sampah yg tertangani setiap tahun rata-rata sekitar 1,39%	Pada tahun 2023 target yang akan dicapai sebesar 72,15%, maka untuk mencapai target nasional sebesar 80% tahun 2019 perlu ada upaya tambahan. Rekomendasinya adalah: 1. Penerapan sanksi atau Perda terhadap perorangan atau institusi yang melakukan pembuangan sampah secara ilegal 2. Penggunaan teknologi dalam pengolahan sampah baik di TPA maupun di TPST antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemprov DKI yang dituangkan dalam PKS; 3. Peningkatan mekanisme pengelolaan sampah dari sistem <i>sanitary landfill</i> menjadi pemusnahan sampah melalui penggunaan teknologi dan armada pengangkutan sesuai jenis sampah;

		4. Edukasi dan sosialisasi pemahaman ttg pengelolaan sampah sejak dini bagi anak sekolah; 5. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat/swakelola persampahan di 12 kecamatan; 6. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan minimalisasi sam-pah skala rumah tangga (<i>Reduce, Rense, Recycle, Replace, dan Repair</i>); 7. Pengurangan timbulan sampah semak simal mungkin dimulai dari sumber: - pengurangan produksi dan pengu-rangan penggunaan kantong plastik - pembangunan sarana daur ulang sampah di 12 kecamatan; 8. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan; 9. Prog. pengurangan sampah “PESAN MAMA” (Peduli Sampah Bersama-sama); 10. Penambahan armada angkut sampah sehingga sampah di pasar rakyat dapat diangkut ke TPA setiap hari; 11. Peningkatan koordinasi penanganan limbah industri;
5. Isu strategis Daya Dukung & Daya Tampung	• Belum terpenuhinya proporsi 30% RTH di Kota Bekasi • Adanya alih fungsi lahan; dan • Masih kurangnya ruang terbuka publik • Daya dukung fungsi lindung belum optimal.	Skenarionya adalah: 1. Meningkatkan proporsi luas RTH sehingga mencapai target nasional; 2. Mewujudkan peruntukan ruang kawasan lindung sesuai dengan RTRW & RDTR Kota Bekasi Rekomendasinya adalah: 1. Pengendalian Pemanfaatan ruang terutama untuk menjamin daya dukung dan daya tampung lingkungan; 2. Pengembangan ruang terbuka hijau sesuai RTRW & RDTR Kota Bekasi; 3. Pemanfaatan RTH instansi/swasta sabagai RTH Publik dengan pola kerjasama. 4. Pemberiaan insentif bagi pengembang /pihak swasta yang menyediakan RTH Publik melebihi kewajiban yang disyaratkan; 5. Penyediaan RTH dengan pola kerjasama/CSR;

Sumber: Hasil Analisis Dan Uji Publik , Tahun 2020

		6. Peningkatan aksesibilitas terhadap sarana & ruang publik bagi penyandang disabilitas; 7. Pengadaan sarana pendukung dan sarana bermain rumah pintar; 8. Penyelenggaraan TESA (Telepon Sahabat Anak); 9. Pengenaan disinsentif bagi pihak swasta/pengembang yg tidak menyediakan RTH sesuai ketentuan; 10. Pengembangan situs ekologi sebagai salah satu RTH publik dengan fungsi wisata edukasi ekologi masih adanya korban kekerasan yang belum tertangani meskipun setiap tahun korban kekerasan di Kota Bekasi mengalami penurunan; 11. Meningkatkan penanganan korban tindak kekerasan dengan target semua korban kekerasan setiap tahun bisa tertangani.
6. Isu strategis Peningkatan Pelayanan Sosial	Pelayanan sosial masih kurang	Untuk peningkatan pelayanan sosial, rekomendasinya adalah: 1. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal; 2. Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan; 3. Peningkatan perlindungan perempuan anak dan manula; 4. Penerapan UU No.8/2018 tentang Penyandang Disabilitas; 5. Pendampingan penanganan kasus KDRT Pembentukan Pokja Gugus Tugas KDRT tingkat kelurahan.
Tujuan 12: Konsumsi & produksi yang bertanggungjawab. 1. Isu strategis Peningkatan Layanan Air Bersih & Sanitasi yang Aman dan Berkelanjutan dan DDDT (risiko dampak)	- Kondisi daya dukung jasa ekosistem pengelolaan dan penguraian limbah sangat rendah 57,5% dan 26,19%; dan - Pengelolaan limbah B3 belum optimal. Hal ini terlihat dari persentase usaha kegiatan yang memiliki TPS limbah B3 baru mencapai 40%.	Meningkatkan penanganan/pengelolaan limbah sehingga mencapai target nasional. Rekomendasinya adalah: 1. Meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah B3; 2. Menerapkan prinsip industri bersih (<i>clean production</i>); 3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan dan penegakan hukum lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan; dan 4. Menerapkan konsep 5R (Rethink, Reuse, Reduction,

		Recovery, dan Recycle) pada industri.
Tujuan 12: Konsumsi & produksi yg bertanggungjawab. 1. Isu strategis Peningkatan Layanan Air Bersih & Sanitasi Yg Aman dan Berkelanjutan dan DDDT (risiko dampak) Tujuan 13: Penanggulangan perubahan iklim 1. Isu strategis Daya Dukung dan Daya Tampung Kebencanaan	• Persentase jumlah sampah yang terkura-angi melalui 3R baru mencapai 24,94% • Persentase sampah yang terangkut ke TPA baru mencapai 67,15%; • Persentase cakupan area pelayanan ba-ru mencapai 70,00%; • Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA baru mencapai 71,72%; dan • Kondisi daya dukung jasa ekosistem pe-ngelola dan penguraian limbah sangat rendah 57,5% dan 26,19%. Berdasarkan hasil perhitungan rate BAU laju pertumbuhan sampah yang tertangani setiap tahun rata-rata sekitar 1,39% maka pada tahun 2023 target yang akan dicapai sebe-sar 72,15%.	Untuk mencapai target nasional sebesar 80% (2019), perlu ada berbagai upaya tambahan. Rekomendasinya adalah: 1. Penerapan sanksi atau Perda terhadap perorangan/institusi yang melakukan pembuangan sampah secara ilegal; 2. Penggunaan teknologi dalam pengola-han sampah baik di TPA mupun di TPST antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta yg dituang-kan dalam PKS; 3. Peningkatan mekanisme pengelolaan sampah dari sistem <i>sanitary landfill</i> ke sistem pemusnahan sampah melalui penggunaan teknologi dan armada pe-ngangkutan sesuai jenis sampah; 4. Edukasi & sosialisasi pemahaman ttg pengelolaan sampah sejak dini bagi anak sekolah; 5. Pengelolaan sampah berbasis masyara-kat/swakelola persampahan di 12 kec. 6. Peningkatan pemberdayaan masyara-kat melalui gerakan minimalisasi sam-pah skala rumah tangga 5R (<i>Rethink, Reuse, Reduction, Recovery, dan Recycle</i>); 7. Pengurangan timbulan sampah semak simal mungkin dimulai dari sumbernya melalui: - pengurangan produksi dan pengurangan penggunaan kantong plastik - pembangunan sarana daur ulang sampah di 12 kecamatan; 8. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan; 9. Program pengurangan sampah “PESAN MAMA” (Peduli Sampah Bersama-sama)

		10. Penambahan armada angkut sampah sehingga sampah di pasar rakyat dapat diangkut ke TPA setiap hari; 11. Peningkatan koordinasi penanganan limbah industri; dan 12. Kerjasama pengolahan sampah organik dan non-organik di pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan pasar modern.
	• Kondisi daya dukung jasa ekosistem pengatur tata air dan banjir di Kota Bekasi umumnya memiliki kategori sangat rendah sebesar 57,5%; • Kota Bekasi merupakan wilayah yang rawan terjadinya bencana banjir, terdapat 85 titik banjir dengan luas kurang lebih 2.873,38 ha; dan Rawan terjadinya kebakaran.	Untuk meminimalkan jumlah korban yang terkena bencana alam, setiap tahun perlu adanya upaya penanganan bencana banjir sehingga tahun 2023 diharapkan Kota Bekasi bebas banjir. Untuk itu, perlu adanya upaya yang konsisten terhadap pengendalian dan penanggulangan banjir dan pandemi COVID-19. Skenario yang diusulkan adalah peningkatan jasa ekosistem pengatur tata air dan banjir. Rekomendasinya adalah: 1. Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana melalui: - penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana; - pengembangan dan pemanfaatan IPTEK untuk pencegahan & kesiapsiagaan menghadapi bencana; dan - penyediaan infrastruktur mitigasi & kesiapsiagaan menghadapi bencana; 2. Pengendalian pembangunan pada lahan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air; 3. Pembangunan polder/kolam-kolam retensi; 4. Penanganan kawasan banjir secara berkesinambungan; 5. Peningkatan IKA (indeks kerentanan adaptif) terhadap banjir melalui penyesuaian bentuk bangunan & drainase; 6. Penguatan falsafah gotong royong sebagai upaya tanggap darurat dalam penanggulangan banjir; 7. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada penanggulangan banjir dan pascabencana;

		8. Peningkatan penyediaan rumah bagi korban bencana; dan 9. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

d. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata kelola Kelembagaan

Pilar ini mencakup tujuan 16, yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh.

Tabel 4.11.

Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

TPB Pilar Hukum dan Tata kelola Kelembagaan	Permasalahan Yang Masih Muncul	Skenario dan Rekomendasi
Tujuan 16: Perdamaian Keadilan & kelembagaan yg tangguh 1. Isu strategis Pe-layanan Sosial	Masih adanya korban kekerasan yang belum tertangani meskipun setiap tahun korban kekerasan di Kota Bekasi mengalami penurunan.	Meningkatkan penanganan korban kekerasan dengan target semua korban kekerasan setiap tahun bisa tertangani. Rekomendasinya adalah: - Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal; - Pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan untuk menjaga ketertiban dan keamanan; - Pendampingan penanganan kasus KDRT; dan - Pemeliharaan kantrantibmas dan pe-ningkatan ketentraman masyarakat.
	- Belum optimalnya pelayanan publik yang berkualitas; - Belum optimalnya pelaksanaan <i>e-government</i>; - Belum optimalnya akuntabilitas kinerja.	Meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Rekomendasinya adalah: - Meningkatkan kerjasama antar wilayah perbatasan yang efektif (<i>executing agency</i>); - Peningkatan kapasitas pembuatan sistem pelayanan publik berbasis IT/ digital; - Penyamaan standar kompetensi aparatur secara nasional;

		4. Peningkatan jenjang pendidikan formal, melalui beasiswa, pendidikan lanjutan; 5. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan modal sosial, dan sinergitas antar masyarakat dan aparatur pemda dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan; 6. Peningkatan kompetensi aparatur sesuai dengan standar nasional; 7. Peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan formal, diklat teknis dan fungsional; dan 8. Penerapan IT dalam pengendalian & penilaian kinerja aparatur.

Sumber: Hasil Analisis Dan Uji Publik , Tahun 2020

4.2.5 Isu Strategis terkait Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Berdasarkan capaian standar pelayanan minimal (SPM) tahun 2013-2017 maka isu strategi bisa dikembangkan dari target dan indikator yang berdasarkan standar SPM atau berdasarkan target patok banding (*benchmark*) menunjukkan kondisi “tidak tercapai”. Isu strategis diidentifikasi berdasarkan pengelompokan sebagai berikut:

- a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 1. Cakupan desa siaga aktif;
 2. Tingkat pengangguran terbuka;
 3. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB; dan
 4. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.
- b. Aspek Daya Saing
 1. Nilai tukar petani;
 2. Persentase pengeluaran konsumsi non-pangan perkapita;
 3. Produktivitas total daerah;
 4. Indeks keterbukaan ekonomi;
 5. Angka kriminalitas (*crime rate*) tertangani; dan
 6. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*).
- c. Aspek Pelayanan Umum:
 - Untuk layanan dasar:
 1. Angka partisipasi murni (APM) tingkat SD;
 2. Angka partisipasi murni (APM) tingkat SMP;
 3. Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup;
 4. Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup;

5. Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup;
 6. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk;
 7. Rasio dokter per penduduk;
 8. Rasio tenaga medis per satuan penduduk;
 9. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;
 10. Cakupan desa/kelurahan yang termasuk *universal child immunization* (UCI);
 11. Tingkat kematian karena *tuberculosis* (per 100.000 penduduk);
 12. Proporsi kasus *tuberculosis* yang diobati dan sembuh dalam program DOTS;
 13. Angka kejadian malaria;
 14. Cakupan pembantu puskesmas;
 15. Cakupan kunjungan ibu hamil K4;
 16. Cakupan pelayanan nifas;
 17. Cakupan pelayanan anak balita;
 18. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik;
 19. Persentase drainase dlm kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat;
 20. Persentase penduduk berakses air minum;
 21. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan;
 22. Persentase areal kawasan kumuh;
 23. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah;
 24. Ketaatan terhadap RTRW;
 25. Rasio permukiman layak huni;
 26. Persentase pemukiman yang tertata;
 27. Persentase lingkungan pemukiman kumuh;
 28. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan);
 29. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota;
 30. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK);
 31. Persentase penegakan Perda;
 32. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial; dan
 33. Persentase PMKS yang tertangani.
- Untuk layanan non-dasar:
 1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun;
 2. Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja;
 3. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 4. Hasil pengukuran indeks kualitas air;
 5. Hasil pengukuran indeks kualitas udara;
 6. Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan;
 7. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup;
 8. Timbulan sampah yang ditangani;
 9. Total timbunan sampah;
 10. Persentase jumlah sampah yang tertangani;

11. Cakupan penduduk ber-KTP per satuan penduduk;
12. Cakupan bayi berakte kelahiran;
13. Cakupan pasangan berakte nikah;
14. Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP);
15. Persentase LSM aktif;
16. Jumlah LPM aktif;
17. Persentase PKK aktif;
18. Persentase posyandu aktif;
19. Partisipasi swadaya masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat;
20. Jumlah PUS (pasangan usia subur) yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani;
21. Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri;
22. Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh-kembang anak;
23. Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun;
24. Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah;
25. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum;
26. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan;
27. Rasio daya serap tenaga kerja;
28. Cakupan pembinaan olahraga;
29. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi;
30. Persentase perangkat daerah yg telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah;
31. Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan;
32. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah;
33. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku;
34. Kontribusi sektor perdagangan;
35. Ekspor bersih perdagangan;
36. Total ekspor; dan
37. Total impor.

4.2.6 Isu Strategis terkait Wilayah Perbatasan

Secara spesifik ada 2 (dua) isu strategis terkait wilayah perbatasan di Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- a. Prasarana dan sarana perhubungan, khususnya yang terkait dengan kondisi dan ketersediaan jalan, khususnya terkait dengan kebutuhan pelebaran jalan, serta kebutuhan pembangunan/pengembangan fasilitas transportasi publik. Persoalan moda angkutan seperti monorel yang sedang dikerjakan oleh BUMN jelas memiliki rute awal Bekasi-Jakarta-Tangerang. Oleh sebab itu, harus ada koordinasi yang rapih dan intensif antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Tangerang, dan Pemerintah Kabupaten Tangerang, terutama sebelum mulai membangun.

Juga khusus Pemprov DKI Jakarta harus didorong untuk menambah rute angkutan perbatasan terintegrasi *busway* (APTB) yang berbatasan dengan Kota Bekasi. Untuk itu, kata kuncinya adalah kerjasama antarpemerintah daerah.

- b. Kebijakan wilayah perbatasan Jawa Barat – DKI Jakarta dikelola oleh Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok , Tangerang, Bekasi dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 yang bertujuan untuk membina pola permukiman penduduk dan penyebaran kesempatan kerja lebih merata atas dasar kebijakan pemerintah serta penyerasian perencanaan Pengembangan Wilayah Jabodetabek dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur.
- c. Prasarana dan prasarana lingkungan hidup, khususnya yang terkait dengan kebutuhan drainase untuk mencegah banjir dan rencana pengelolaan sampah terpadu.

Tabel 4.12
Matriks Penelaahan Integrasi KLHS Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
MISI 1 : Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik						
Keuangan	16.6.1(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten /Kota).	ISU: Penguatan Kelembagaan dan kerjasama antar lembaga.	1. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah ;	BPKAD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	- Ketepatan Waktu Penetapan APBD
			2. Peningkatan pelayanan publik melalui pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis IT;			
		Beberapa permasalahan terkait isu pb strategis:	3. Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan pemerintahan ;			- Persentase Kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD
		1. Belum optimalnya pelayanan publik yang berkualitas;	4. Peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme pemerintahan;			
		2. Belum optimalnya pelaksanaan <i>e-government</i> ;	5. perlu adanya pendataan terkait target dan indikator-indikator ini.			- Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan Dengan SAP dan tepat waktu
		3. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja.				
						- Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPM yang Diterima

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
						- Presentase OPD yang melaksanakan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah dengan Tertib
Sekretariat Daerah	16.6.1(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lemba ga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).			Setda (Bagian Tapem)	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas
Sekretariat Daerah	16.6.1(c) Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.			Setda (Bagian KLPBJ)	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Sekretariat Daerah	16.6.1(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lemba ga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).			Setda (Bagian Organisasi)	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada pemerintah Kota Bekasi
Penanaman Modal	16.6.2(a) Persentase Kepatuhan			Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARA	

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
	pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/				AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat
	Kabupaten/Kota).					
Misi 2: Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai						
Perumahan	1.4.1.(e) Persentase rumah tangga	Isu peningkatan layanan air bersih dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan	1. penataan kawasan kumuh dan perbaikan rumah tidak layak huni secara simultan;	Disperkimtan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestik
	yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Beberapa Permasalahan terkait Isu:	2. Peningkatan layanan sanitasi berbasis masyarakat melalui pembangunan MCK ++ dan pembangunan septiktank komunal;			
		1. Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani sebesar 29,07%;	3. Pembangunan infrastruktur air limbah sistem terpusat ;			
		2. Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni 23,88% (Tahun 2018);	4. Peningkatan kinerja pelayanan dan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;			
		3. Sistem pengelolaan persampahan yang belum optimal;	5. Peningkatan kualitas lingkungan melalui revitalisasi;	DBMSDA	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
		4. masih terdapatnya rumah tangga yang membuang limbah domestik ke saluran;	6. Peningkatan dan pembangunan saluran drainase yang terintegrasi;			

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
		5. Persentase Penduduk Berakses Air Minum baru mencapai 26,7%.	7. Membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan jaringan prasarana dan sarana dasar perkotaan;		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	- Presentase Pembangunan Polder
			8. Peningkatan sistem penyediaan air minum perpipaan;			- Presentase Pemeliharaan Polder
			9. Peningkatan akses terhadap ketersediaan air bersih pada lingkungan perumahan melalui pengumpulan air hujan (rain harvesting).	DLH	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	- Presentase Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R
						- Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA
						- Presentase sampah yang terangkut ke TPA
						- Presentase Cakupan Area Pelayanan
Perumahan	6.1.1 (a) Persentase rumah tangga	Isu peningkatan layanan air bersih dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan	1. Meningkatkan sistem pelayanan air minum melalui sistem perpipaan PDAM Kota Bekasi Dan melalui pembangunan SPAM Swasta;	Disperkimtan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum
	yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum	Isu daya dukung dan daya tampung lingkungan	2. Membangun pola kerjasama dengan kabupaten lain untuk penyediaan air baku dan pengembangan sistem perpipaan air minum;			
	layak.		3. Meningkatkan penangkapan air melalui revitalisasi dan pembangunan embung /polder;			

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
		Beberapa Permasalahan terkait Isu:	4. mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai sempadan sungai dan situ;			
		1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum 26,7% tahun 2018;	5. Meningkatkan efisiensi pemakaian air domestik dan non domestik;			
		2. Daya dukung dan daya tampung ketersediaan air akan menurun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan yang membutuhkan ketersediaan air;	6. Pengawasan kualitas air minum PDAM/Non PDAM;			
		3. Kondisi Jasa ekosistem penyedia air di Kota Bekasi pada umumnya di katagorikan sangat rendah sebesar 70%, katagori sedang sebesar 17,40%;	7. Pengawasan pembuatan/exploitasi air tanah;			
		4. Daya dukung jasa ekosistem pemurnian air pada umumnya rendah sekitar 54,6 % dan sedang 34,55 %.	8. pengembangan SPAM non PDAM/Swasta di prioritaskan untuk wilayah-wilayah yang belum terlayani sistem penyediaan air minum sistem perpipaan;			
			9. Pembangunan Instalasi penyediaan dan pengolahan air baku;			
			10. Mengadaptasi teknologi pemanenan air hujan (rain water harvesting) untuk kebutuhan rumah tangga			
			11. Peningkatan kualitas air sungai agar layak dimanfaatkan sebagai sumber air baku dengan mengurangi beban			

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
			cemar pada air dari kegiatan industri dan rumah tangga; 12. Penerapan sistem produksi bersih pada kegiatan industri agar dapat menghemat penggunaan air.			
Perumahan	6.1.1 (c) Proporsi populasi yang	Isu peningkatan layanan air bersih dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan;	1. Meningkatkan sistem pelayanan air minum melalui sistem perpipaan PDAM Kota Bekasi Dan melalui pembangunan SPAM Swasta;			
	memiliki akses layanan	Isu daya dukung dan daya tampung lingkungan.	2. Membangun pola kerjasama dengan kabupaten lain untuk penyediaan air baku dan pengembangan sistem perpipaan air minum;			
	sumber air minum aman dan		3. Meningkatkan penangkapan air melalui revitalisasi dan pembangunan embung /polder;			
	berkelanjutan.	Beberapa Permasalahan terkait Isu:	4. mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai sempadan sungai dan situ;			
		1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum 26,7% tahun 2018;	5. Meningkatkan efisiensi pemakaian air domestik dan non domestik;			
		2. Daya dukung dan daya tampung ketersediaan air akan menurun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan yang membutuhkan ketersediaan air;	6. Pengawasan kualitas air minum PDAM/Non PDAM;			

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
			7. Pengawasan pembuatan/exploitasi air tanah;			
		3. Kondisi Jasa ekosistem penyedia air di Kota Bekasi pada umumnya di katagorikan sangat rendah sebesar 70%, katagori sedang sebesar 17,40%;	8. pengembangan SPAM non PDAM/Swasta di prioritaskan untuk wilayah-wilayah yang belum terlayani sistem penyediaan air minum sistem perpipaan;			
		4. Daya dukung jasa ekosistem pemurnian air pada umumnya rendah sekitar 54,6 % dan sedang 34,55 %.	9. Pembangunan Instalasi penyediaan dan pengolahan air baku;	Disperkimtan		
			10. Mengadaptasi teknologi pemanenan air hujan (rain water harvesting) untuk kebutuhan rumah tangga			
			11. Peningkatan kualitas air sungai agar layak dimanfaatkan sebagai sumber air baku dengan mengurangi beban cemar pada air dari kegiatan industri dan rumah tangga;			
			12. Penerapan sistem produksi bersih			
			pada kegiatan industri agar dapat menghemat penggunaan air.			
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
Perumahan	6.2.1 (b) Persentase rumah tangga	Isu peningkatan layanan air bersih dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan	Peningkatan penyediaan sanitasi layak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (air minum, persampahan, limbah dan jaringan drainase) melalui:	Disperkimtan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestik
	yang memiliki akses terhadap	Beberapa Permasalahan terkait Isu:	1. Peningkatan penangan kawasan kumuh pada lokasi-lokasi yang belum tertangani;			
	layanan sanitasi layak.	1. Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani sebesar 29,07% tahun 2018;	2. Penataan kawasan kumuh secara simultan;			
	6.2.1 (d) Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem	2. Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestik baru mencapai 3,39% (tahun 2018);	3. Sosialisasi dan pendampingan program sanitas;			
	pengelolaan air limbah terpusat.	3. Sistem pengelolaan persampahan yang belum optimal dimana cakupan Area Pelayanan baru mencapai 70,00%;	4. Peningkatan jaringan air minum sistem perpipaan;		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
			5. Pembangunan dan peningkatan sistem pengelolaan limbah padat dan cair secara terpadu;			

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
		4. kondisi daya dukung jasa ekosistem pengelola dan penguraian limbah sangat rendah 57,5 % dan 26,19 %.	6. Membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan jaringan prasarana dan sarana dasar perkotaan;	DBMSDA	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
			7. pembangunan prasarana dan utilitas kota secara terpadu;	LH	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	- Persentase Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R
						- Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA
						- Persentase sampah yang terangkut ke TPA
			8. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terintegrasi dan terhubung langsung dengan sungai dan saluran.			- Persentase Cakupan Area Pelayanan
Perumahan dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.1.1(a) Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	Isu peningkatan layanan air bersih dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan	1. Peningkatan penanganan kawasan kumuh melalui:	DISPERKIMTAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	- Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni
	11.1.1.(b) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Isu daya dukung dan daya tampung lingkungan	a. peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh melalui peremajaan, pemugaran dan revitalisasi kawasan;			

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
			b. Peningkatan penangan kawasan kumuh pada lokasi-lokasi yang belum tertangani;			- Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau
		Beberapa Permasalahan terkait Isu:	c. Penataan kawasan kumuh secara simultan;			
		1. Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani sebesar 29,07% tahun 2018;	d. Penyusunan Rencana Tapak (<i>Site Plan</i>) dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh;			
		2. Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni 23,88% (Tahun 2018);	e. Peningkatan perbaikan rumah tidak layak huni serta PSU;			
		3. kondisi daya dukung jasa ekosistem pengelola dan penguraian limbah sangat rendah 57,5 % dan 26,19 %;	f. Peningkatan dan pembangunan PSU secara terpadu;			
		4. kemampuan lahan di Kota Bekasi sebagian besar termasuk kelas II (70,12%) dengan demikian kemampuan lahan Kota Bekasi merupakan lahan potensial untuk pengembangan kawasan budidaya perkotaan;	2. Pembangunan hunian/rumah yang layak dan terjangkau melalui:			
		5. Daya dukung jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup sangat tinggi 57,16 % dan sedang 40,56% .	a. pengembangan dan pembangunan hunian vertikal (rusunawa dan rusunami);			
			b. Penyediaan rumah bagi MBR;			
			c. Pemberiaan subsidi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah;			

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
			d. Pengembangan jaringan masyarakat dalam pengelolaan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan pemukiman.		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan hunian yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
Perhubungan	11.2.1 (a) Persentase pengguna moda	ISU PENINGKATAN INFRASTRUKTUR	1. pengembangan angkutan massal kota berbasis jalan dan rel l yang terintegrasi dengan moda angkutan yang ada;	DISHUB	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	- Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan
	transportasi umum di perkotaan.	Beberapa Permasalahan terkait Isu	2. Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
		1. Belum optimalnya pengguna moda angkutan umum, pengguna moda transportasi umum Kota Bekasi baru mencapai 28 %;	3. pengembangan sistem jaringan transportasi dan angkutan massal yang ramah lingkungan .			- Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi
		2. Persentase layanan angkutan umum massal 50%;				
		3. Rendahnya sarana dan prasarana transportasi yang memenuhi kriteria pengguna dengan katagori kebutuhan khusus.				- Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas
						- Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal
						- Persentase kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
Perhubungan	11.4.1 Presentase pelayanan			DISHUB	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	- Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan
	angkutan umum yang baik, aman dan nyaman					
						- Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi
						- Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas
						- Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal
						- Persentase kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor
				DBMSDA	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	- Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi baik
	- Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (> 40km/jam)					
	- Presentase Pembangunan Jembatan Baru					
	- Persentase Pemeliharaan Jembatan					

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
	11.6.1 Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota	Isu peningkatan layanan air bersih dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan	1. Penerapan sanksi atau Perda terhadap perorangan atau institusi yang melakukan pembuangan sampah secara ilegal;	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	- Persentase Jalan yang memiliki Trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)
		Isu daya dukung dan daya tampung lingkungan	2. Penggunaan teknologi dalam pengolahan sampah baik di TPA maupun di TPST antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemprov DKI yang dituangkan dalam PKS;			- Persentase Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R
			3. Peningkatan mekanisme pengelolaan sampah dari sistem sanitasi landfill menjadi pemusnahan sampah melalui penggunaan teknologi dan armada pengangkutan sesuai dengan jenis sampah;			- Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Beberapa Permasalahan terkait Isu	4. Edukasi dan sosialisasi pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini bagi anak sekolah;			

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
	11.6.1 Persentase sampah perkotaan yang tertangani	1. Persentase Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R baru mencapai 24,94%'	5. pengelolaan sampah berbasis masyarakat/swakelola persampahan di 12 Kecamatan;			- Persentase sampah yang terangkut ke TPA
		2. Persentase sampah yang terangkut ke TPA baru mencapai 67,15%	6. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan minimalisasi sampah kepada skala rumah tangga (<i>Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Repair</i>);			
		3. Persentase Cakupan Area Pelayanan baru mencapai 70,00%	7. Pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dari dimulai dari sumbernya:			- Persentase Cakupan Area Pelayanan
		4. Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA baru mencapai 71,72%;	• pengurangan produksi dan pengurangan penggunaan kantong plastik;			
		5. 3) Semakin berkurangnya daya tampung TPA	• pembangunan sarana daur ulang sampah di 12 kecamatan.			
		Sumur Batu dalam menerima timbulan	8. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan;			
		sampah, sedangkan produksi sampah	9. Program pengurangan sampah “ PESAN MAMA” (Peduli Sampah Bersama-Sama);			
		diperkirakan akan terus meningkat;	10 .Penambahan armada angkut sampah sehingga sampah di pasar rakyat dapat diangkut ke TPA setiap hari;			
		6. kondisi daya dukung jasa ekosistem pengelola dan penguraian limbah sangat rendah 57,5 % dan 26,19 %	11 .Peningkatan koordinasi penanganan limbah industri			
			Kerjasama untuk pengolahan sampah organik dan non organik di pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan pasar modern dalam pemusnahan sampah;			

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
Misi 3: Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing						
Pariwisata dan Kebudayaan	8.1.1 Laju pertumbuhan PDB perkapita	ISU PENGUATAN PEREKONOMIAN		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kawasan wisata yang ditata
Perdagangan dan Perindustrian	8.1.1 (a) PDB perkapita/tahun	Beberapa Permasalahan terkait Isu 1. Kenaikan laju pertumbuhan PDRB dan total PDRB per kapita belum sesuai dengan target nasional;	1. Meningkatkan PDRB per kapita sesuai target nasional; 2. Melakukan efisiensi belanja daerah;		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan
		2. Menurunnya kemandirian ekonomi daerah.	3. Mencari sumber pertumbuhan baru dari perekonomian berbasis kreatif;		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan dan Tren Kepariwisata
		3. Dampak adanya pandemik covid.	4. Pemberiaan stimulus PBB (pajak Bumi Dan Bangunan) kepada masyarakat berpenghasilan rendah;		PROGRAM PENINGKATAN SARANA	Jumlah pasar rakyat yang aman, bersih, dan nyaman

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
		- Laju pertumbuhan ekonomi menurun; - prosentase peningkatan PDA di prediksi akan menurun;	5. peningkatan dan perluasan basis data pajak dan redistribusi daerah; 6. Digitasi platpom pelayanan pajak dan redistribusi daerah;	Disdagperin	DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
					PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah yang memiliki legalitas
			7. peningkatan dan penguatan kompetisi dan skill integritas SDM operator pajak dan redistribusi daerah; 8. peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah melalui pengelolaan sumberdaya daerah secara lebih profesional; 10. Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional; 11. Peningkatan kemampuan pemasaran dan usaha secara online.	Diskukm	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi usaha Kecil
						Persentase jumlah pelaku UMKM kreatif
					PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang telah Tersertifikasi Keselamatannya
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Peningkatan Skala Usaha Koperasi

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
Ketenagakerjaan	8.5.2 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (angka pengangguran terbuka)	ISU PENGUATAN PEREKONOMIAN	1. Memasukkan indikator dalam rencana pembangunan untuk tingkat pengangguran terbuka agar mencapai target nasional yaitu 5,5%;			
			2. peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru UMKM, UMKM Online, Startup;			
		Beberapa Permasalahan terkait Isu	3. penyelenggaraan bursa tenaga kerja;			
		• Masih tingginya tingkat pengangguran yaitu sebesar 8,20 % dengan adanya pandemi <i>Covid</i> tingkat pengangguran akan cenderung naik/meningkat;	4. pengembangan industri kreatif untuk membuka peluang kerja;			
		• Jumlah angkatan kerja yang besar.	5. Memasukan indikator program pembangunan untuk membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas ;			
			6. Memberikan upah yang sama bagi pekerjaan penyandang disabilitas sesuai dengan UMR yang telah ditetapkan;			
			7. membuka peluang pekerjaan dari berbagai sektor yang potensial;		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja
			8. Peningkatan kompetensi dan kapasitas wirausaha dalam bentuk pelatihan;			

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
			9. Membuat aplikasi berbasis mobile yang berisi data dan informasi UMKM yang ada di Kota Bekasi sekaligus tersedia menu untuk membeli produk UMKM tersebut;	Disnaker		Persentase peningkatan keterampilan bagi pencari kerja
			10. Penyelenggaraan Job fair yg sesuai dengan kebutuhan pasar dan background.		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan
						Persentase Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) berizin
					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penanganan sengketa pengusaha dengan pekerja
Perindustrian	9.2.1 (a) Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	ISU PENGUATAN PEREKONOMIAN	1. Meningkatkan jumlah industri manufaktur;	Disdagperin	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah pasar rakyat yang aman, bersih, dan nyaman
	9.2.1 (b) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (Laju Pertumbuhan Ekonomi industri pengolahan).		2. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri kreatif dan inovatif ;			
		Beberapa Permasalahan terkait Isu	3. Pengembangan industri yang mampu menjaga ekosistem, memelihara sumber daya yang berkelanjutan;			
		• Masih tingginya tingkat pengangguran yaitu sebesar 8,20 % dengan adanya pandemi	4. pengembangan ekonomi kreatif ;			

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
		Covid tingkat pengangguran akan cenderung naik/meningkat.				
		• Jumlah angkatan kerja yang besar;	5. peningkatan infrastruktur industri;			
		• Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (di Kota Bekasi selama kurun waktu 5 tahun (2013-2017) yang terus menurun, dari data LPP ndustri manupaktur tahun 2018 sebesar 3,71%;	6. Program peningkatan kualitas SDM dalam sektor industri;			
		• kontribusi sektor industri terhadap PDRB dalam beberapa tahun terakhir terus menurun. Pada tahun 2013 sektor ini mampu menyumbang sebesar 36,34 persen (Rp20,97 triliun), namun merosot hingga 35,19 persen tahun 2015 dan kemudian 26,58 (tahun 2017).	7. Program peningkatan daya saing industry;		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA A	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah yang memiliki legalitas
			8. Pengembangan saint dan kreatif centre.			
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor Kota Bekasi

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	ISU PENGUATAN PEREKONOMIAN	1. Meningkatkan PDRB per kapita sesuai target nasional;			
			2. Melakukan efisiensi belanja daerah;			
		Beberapa Permasalahan terkait Isu	3. Mencari sumber pertumbuhan baru dari perekonomian berbasis kreatif;			
		1. Laju pertumbuhan ekonomi menurun;	4. Pemberiaan stimulus PBB (pajak Bumi Dan Bangunan} kepada masyarakat berpenghasilan rendah;			
		2. prosentase peningkatan PDA di prediksi akan menurun;	5. peningkatan dan peluasan basis data pajak dan restribusi daerah;			
			6. Digitasi platpom pelayanan pajak dan restribusi daerah;			
			7. peningkatan dan pengutan kompetisi dan skill integritas SDM operator pajak dan restribusi daerah;			
			8. peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah melalui pengelolaan sumberdaya daerah secara lebih profesional;			
			9. Penyempurnaan sistem dan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah;			
			10. Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional;			
			11. Peningkatan kemampuan pemasaran dan usaha secara online untuk UMKM;			

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
			12. Meningkatkan kemudahan perijinan untuk mendorong investasi baik diindustri kecil, menengah dan besar.			
Misi 4: Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif						
Pangan	2.1.2 Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	ISU DAYADUKUNG DAN DAYA TAMPUNG (DAYA DUKUNG PENYEDIA PANGAN T DAN JASA EKOSISTEM PENYEDIA PANGAN))	1. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B);	Dinas Kesehatan/ (Dinas Ketahanan Pangan)	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan kerawanan pangan
	2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai dan tingkat konsumsi ikan.		2. pengembangan lahan pertanian pada kawasan yang berfungsi lindung;			
		Beberapa Permasalahan terkait Isu	3. Menjalin pola kerjasama dengan kabupaten yang memiliki dayadukung pangan surplus untuk pemenuhan kebutuhan pangan Kota Bekasi;			
		1. Masih rendahnya ketersediaan pangan lokal;	4. Pengembangan dan penerapan Urban Farming dengan pengembangan kampung hidroponik;			
		2. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan pokok/ beras;	5. Melakukan diversifikasi pangan agar Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan sampai dengan 92,5% sesuai dengan			

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
			skor pola pangan harapan nasional;			
		3. Masih rendahnya ketersediaan pangan utama;	6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian sebagai upaya pengembangan sektor pertanian.			
			7. Meningkatkan produktivitas padi/ha;			
			8. Diversifikasi pangan;			
			9. Pemberian insentif bagi pemilik lahan pertanian berupa keringanan PBB, bantuan saprotan (sarana Prorduksi pertanian), dan pelatihan pemasaran secara online;			
			10. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan;			
		4. Skor Pola Pangan Harapan masih di bawah target nasional yaitu baru mencapai 87,4% (tahun 2019);	11. Melakukan gerakan <i>one day no rice</i> sebagai upaya pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap beras.			
		5. Persentase Penanganan kerawanan pangan baru mencapai 69,58%;				
		6. kondisi daya dukung lahan pertanian di Kota Bekasi sudah defisit;				
		7. kondisi jasa ekosistem penyediaan pangan di Kota Bekasi pada umumnya di katagorikan sangat rendah.				

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
Kesehatan	3.1.2 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	ISU PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATA	1. Meningkatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan pelayanan persalinan;	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)
			2. Melakukan inovasi-inovasi pelayanan kesehatan tingkat Puskesmas ;			
		Beberapa Permasalahan terkait Isu	3. Meningkatkan kinerja layanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan;			- Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi
			4. meningkatkan kinerja layanan kesehatan untuk balita;			
		proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih baru mencapai 88%	5. penyuluhan kesehatan ibu hamil dan balita secara simultan;			- persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas
			6. Mengoptimalkan penanganan Covid-19;			
			7. Upaya pencapaian semua indikator SPM;			- persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Type B
			8. Penguatan dan peningkatan layanan posyandu untuk pemeriksaan ibu hamil dan balita.			

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
						- persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Type D
						- Persentase PKM Terakreditasi
						- persentase RS Terakreditasi
						- Terpenuhinya pemeliharaan 10 jenis sarana dan prasarana rumah sakit
						- Capaian IKM Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Type B
						- persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan RS
						- Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas
						- Persentase cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan
						- Prevalensi Balita Status Gizi Stunting
						- persentase Institusi dan fasilitas umum

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
						memenuhi syarat kesehatan
						- Ketersediaan Puskesmas di Kelurahan
						- Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan
		- Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan				
		- Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan				
		- Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan				
		- Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan				
		- Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan				
		- Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan				

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
						- Persentase Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan
Kesehatan	3.1.2 (a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.					
Kesehatan	3.2.1 Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran anak.	Angka kematian balita dan kematian balita per1000 kelahiran anak masih di atas target nasional (1,1 tahun 2017)				- Persentase Warga Negara penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
						- Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan
						- Persentase Warga Negara penderita terduga Tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
						- Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan
Pendidikan	4.1.1 (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat	Peningkatan Pelayanan dan kualitas Pendidikan	1. peningkatan kualitas/mutu pendidikan dan tenaga pendidik;	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	- Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik
			2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;			
			3. Peningkatan capaian APK pada tingkat pendidikan SD sederajat dan SMP sederajat sesuai target nasional;			- Persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam Kondisi Baik
		Beberapa Permasalahan terkait Isu:	4. peningkatan pelayanan pendidikan berbasis IT;			
		1. Sarana pendidikan yang berakreditasi minimal B belum mencapai target nasional;	5. Peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan yang menghasilkan lulusan yang bersertifikasi;			- Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik
		2. nilai APK yang belum mencapai target nasional;	6. pemberian bantuan biaya pendidikan kepada sekolah/mahasiswa berprestasi yang kurang mampu;			

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
		3. Nilai APK APK SMP/MTs/ sederajat dari 95,32 pada tahun 2017 menurun menjadi 94,81% namun demikian Nilai APK selama kurun waktu 1 tahun meningkat, hal ini tergambar dari:	7. pengembangan sarana dan prasana pendidikan non formal;			- APM SD
		• Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat dari 95,32% pada tahun 2017 meningkat menjadi 110% pada tahun 2019;	8.Peningkatan kemampuan akses terhadap internet (hardware dan soft ware) bagi pelajar dan mahasiswa.			
		• Angka Partisipasi Kasar (APK)SMA/SMK/MA/ sederajat dari 75,89% pada tahun 2017 meningkat menjadi 107% pada tahun 2019 ;				- APM SMP
		• Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meningkat menjadi 92,75% tahun 2019				
						- APM PAUD
						- Angka kelulusan pendidikan kesetaraan
						- SD Negeri Terakreditasi A
						- SMP Negeri Terakreditasi A

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
	4.1.1.e Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat.				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Bersertifikat
	4.1.1 (f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat.				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	- Presentase pendidikan Dasar terakreditasi B
						- PAUD Terakreditasi
						- Lembaga Pendidikan Non Formal Terakreditasi
	4.2.2 (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).					
Pemberdayaan Perempuan	5.2.1 (a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	ISU Pelayanan sosial dan pelayanan	1. Pemeliharaan kontrantibnas dan penjegahan tindak kriminal di sarana publik;	DPPPA	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan
		Permasalahan terkait Isu Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2. Fasilitasi kasus perlindungan kekerasan perempuan;			
			3. Memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan;			

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
			4. Sosialisasi dan edukasi pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.			
					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak
					PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Tingkat Capaian Kota Layak Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.6.1 (b) Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern belum mencapai target nasional.	1. Pembentukan Pembina Pembantu KB Desa (PPKBD);	DPPKB	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	- Jumlah PPKS Aktif di Kecamatan
			2. Melakukan pembinaan keluarga sejahtera, mulai dari pembinaan balita, remaja, dan lansia;			
			3. Perbaiki ekonomi keluarga;			- Persentase Cakupan anggota poktan yang ber KB,

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.6.2 Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.		4. Menirikan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).			
					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan Menikah
					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Presentase Cakupan Data Mikro Keluarga
Tenaga Kerja	8.3.1 Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian, berdasarkan jenis kelamin	ISU PENGUATAN PEREKONOMIAN	1. Memasukkan indikator dalam rencana pembangunan untuk tingkat pengangguran terbuka agar mencapai target nasional yaitu 5,5%;	DISNAKER	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan Ketersediaan dokumen ketenakerjaan
			2. kompetensi, pengembangan usaha baru UMKM, UMKM Online, Startup;			
		Beberapa Permasalahan terkait Isu	3. penyelenggaraan bursa tenaga kerja;			
		• Masih tingginya tingkat pengangguran yaitu sebesar 8,20 % dengan adanya pandemi Covid tingkat pengangguran akan cenderung naik/meningkat.	4. pengembangan industri kreatif untuk membuka peluang kerja;			

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD		
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program	
		Jumlah angkatan kerja yang besar;	5. Memasukan indikator program pembangunan untuk membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas ;				
Tenaga Kerja	8.3.1 (a) Presentase tenaga kerja formal		6. Memberikan upah yang sama bagi pekerjaan penyandang disabilitas sesuai dengan UMR yang telah di tetapkan;				
Tenaga Kerja	8.5.2 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dankelompok umur (angka pengangguran terbuka)		7. membuka peluang pekerjaan dari berbagai sektor yang potensial;		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	- Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja	
			8. Peningkatan kompetensi dan kapasitas wirausaha dalam bentuk pelatihan;				
			9. Membuat aplikasi berbasis mobile yang berisi data dan informasi UMKM yang ada di Kota Bekasi sekaligus tersedia menu untuk membeli produk UMKM tersebut;			- Persentase peningkatan keterampilan bagi pencari kerja	
	8.8.1 (a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3		10. Penyelenggaraan Job fair yg sesuai dengan kebutuhan pasar dan background.			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	- Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan
							- Persentase Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) berizin
					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penanganan sengketa pengusaha dengan pekerja	
Misi 5: Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman							

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
Lingkungan Hidup	11.7.1 proporsi ruang terbuka hijau perkotaan untuk semua menurut kelompok usia jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	ISU DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG	1. Pengendalian Pemanfaatan ruang terutama untuk menjamin daya dukung dan daya tampung lingkungan;	Dinas Tata Ruang / Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan / Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	- Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW
		Beberapa permasalahan terkait isu:	2. Pengembangan ruang terbuka hijau sesuai RTRW dan RDTR Kota Bekasi;			
	11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	1. Belum terpenuhinya proporsi 30% RTH di Kota Bekasi;	3. Pemanfaatan RTH instansi/swasta sebagai RTH Publik dengan pola kerjasama;			- Jumlah Rencana Pembangunan Infrastruktur Kota yang Sesuai dengan Tata Ruang Kota
		2. adanya alih fungsi lahan;	4. Pemberiaan insentif bagi pengembang / pihak swasta yang menyediakan RTH Publik melebihi kewajiban yang disyaratkan;			
		3. masih kurangnya ruang terbuka publik;	5. Penyediaan RTH dengan pola kerjasama / CSR;			- Jumlah Rencana Penataan Kawasan Strategis Kota yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota
		4. Daya dukung fungsi lindung belum optimal.	6. Peningkatan aksesibilitas terhadap sarana dan ruang publik bagi penyandang disabilitas;			
			7. pengadaan sarana pendukung dan sarana bermain rumah pintar ;			- Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
						luas wilayah atau kawasan perkotaan
			8. penyelenggaraan TESA (Telepon Sahabat Anak);			
			9. Pengenaan disisantik bagi pihak swasta /pengembang yang tidak menyediakan RTH sesuai ketentuan;			- Persentase Penyerahan 150 PSU pada tahun 2023
			10. Pengembangan situs ekologi sebagai salah satu RTH publik dengan fungsi wisata edukasi ekologi.			
						- Persentase penataan dan pemeliharaan reklame
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.7.2 Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).	isu Peningkatan pelayanan sosial Permasalahan terkait isu yaitu masih adanya korban kekerasan yang belum tertangani meskipun setiap tahun korban kekerasan di Kota Bekasi Mengalami penurunan .	1. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal;	Kesbangpol	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan
			2. Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan untuk menjaga ketertiban dan keamanan;			
			3. Meningkatkan kerjasama antar kelompok Sara guna mengurangi konflik sosial;			
			4. Peningkatan perlindungan perempuan anak dan manula;			

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
Kecamatan			5. Penerapan UU N0 8 tahun 2018 tentang penyandang disabilitas;	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Persentase wilayah tertib K3 - Kasus Perselisihan Sara dan Kelompok Masyarakat yang diselesaikan
			6. Pendampingan penanganan kasus KDRT;			
			7. pembentukan Pokja Gugus Tugas KDRT Tingkat Kelurahan.			
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.1.1 Jumlah Korban Bencana Alam per 100.000 orang	isu daya dukung dan daya tampung	1. Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana melalui:	BPBD	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kemampuan aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana
		isu bencana	Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana;			
			Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;			
		Beberapa permasalahan terkait isu	Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;			
		Kondisi daya dukung Jasa ekosistem pengatur tata air dan banjir di Kota Bekasi umumnya memiliki katagori sangat rendah sebesar 57,5%;	Kecepatan Respon dalam menangani bencana baik alam maupun non alam;			
			2. Pengendalian pembangunan pada lahan yang			

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
		Kota Bekasi merupakan wilayah yang rawan terjadinya bencana banjir, terdapat 85 titik banjir dengan luas kurang lebih 2873,38 ha;	berfungsi sebagai kawasan resapan air;			
			3. Pembangunan polder /kolam-kolam resistensi;			
		■ rawan terjadinya kebakaran	4. penanganan kawasan banjir secara berkala dan berkesinambungan;			
			5. Peningkatan Indeks Infrastruktur wilayah yang meliputi :			
			• IndeksInfrastruktur ke PU-an;			
			• Indeks sarana prasarana perhubungan;			
			• Indeks penataan ruang;			
			• Indeks perumahan permukiman dan pertanian			
			6. Penguatan falsafah gotong royong sebagai upaya tanggap darurat dalam penanggulangan banjir ;			Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
			7. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada penanggulangan banjir dan pasca bencana;			Persentase program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan
			8. Peningkatan penyediaan rumah bagi korban bencana;			persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

KLHS RPJMD					INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
			9. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi.			persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
				DINSOS	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial
Kecamatan	16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	isu Peningkatan pelayanan sosial	1. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal ;	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Persentase wilayah tertib K3
		(masih adanya korban kekerasan yang belum tertangani meskipun setiap tahun korban kekerasan di Kota Bekasi Mengalami penurunan)	2. Pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan untuk menjaga ketertiban dan keamanan;			
			3. Pendampingan penanganan kasus KDRT;			- Kasus Perselisihan Sara dan Kelompok Masyarakat yang diselesaikan
			4. Pemeliharaan Kontrantibnas dan peningkatan ketentraman masyarakat.			



BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi merupakan pandangan dan langkah-langkah ke depan menuju bagaimana mewujudkan Kota Bekasi sebagai kota yang maju secara konsisten, antisipatif, inovatif, dan produktif. Pandangan tersebut adalah suatu gambaran yang dituju tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, melalui penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan di Kota Bekasi. Pernyataan Visi Kota Bekasi adalah:

“Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan”

Penetapan visi tersebut di samping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada di Kota Bekasi Hulu. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintah Kota Bekasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bekasi yang **Cerdas** bahwa Kota Bekasi senantiasa memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung program-program kota menuju kota cerdas (*smart City*), kota layak huni secara efisien dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.
2. Bekasi yang **Kreatif** bahwa warga Kota Bekasi memiliki semangat untuk membangun wilayah dan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kreatif dan inovatif, mengingat kehidupan dan kemajuan masa depan masyarakat Kota Bekasi tidak dapat mengandalkan terhadap daya dukung sumber daya alam, dibutuhkan nilai, sikap, dan perilaku kreatif dari aparatur, masyarakat, dan pelaku usaha dalam beraktivitas, berkehidupan, dan berusaha.
3. Bekasi yang **Maju** mengandung arti bahwa pembangunan perekonomian masyarakat berkembang dengan baik dan mempunyai daya saing tinggi yang disertai dengan tumbuhnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta meningkatnya dukungan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan secara berkesinambungan.
4. Bekasi yang **Sejahtera**, mengandung arti bahwa suatu kondisi keadaan masyarakat Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, dan maju dilengkapi dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin sehingga tercipta suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman dan damai.
5. Bekasi yang **Ihsan** mengandung arti bahwa dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kesadaran berperilaku bagi warga kota dalam mentaati peraturan/perundangan yang berlaku. Makna ihsan bagi masyarakat luas adalah

meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama. Demikian pula warga Kota Bekasi senantiasa mengembangkan derajat keihisanannya melalui kedisiplinan dan ketertiban sosial dalam membangun ketahanan sosial masyarakat perkotaan.

5.2.Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah, dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Misi yang ditetapkan Pemerintah Kota Bekasi untuk mencapai Visi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Misi Pertama adalah pengembangan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023 dilakukan melalui fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan, serta menempatkan aparatur sebagai pamong praja yang menjunjung tinggi integritas terhadap amanah, tugas, dan tanggung jawab berdasarkan 10 (sepuluh) prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: 1) partisipasi masyarakat; 2) tegaknya supremasi hukum; 3) transparansi; 4) kesetaraan; 5) daya tanggap kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*); 6) berorientasi kepada visi; 7) akuntabilitas; 8) pengawasan; 9) efektivitas dan efisiensi; dan 10) profesionalisme. Pendekatan yang dilakukan untuk aktualisasi misi ini melalui penataan sistem, peningkatan kinerja, dan penguatan integritas aparatur.

Misi kedua bermakna bahwa pembangunan prasarana diarahkan untuk terpenuhinya kelengkapan dasar fisik lingkungan kota bagi kehidupan yang layak, sehat, aman, dan nyaman; terpenuhinya sarana perkotaan untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi; serta terpenuhinya kelengkapan penunjang (utilitas) untuk pelayanan warga kota. Misi ini juga ditujukan untuk mengarahkan pembangunan prasarana dan sarana yang meningkat dan serasi; untuk memenuhi kehidupan warga kota dengan memperhatikan prinsip pengelolaan, pengendalian, dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan kota yang maju, tumbuh, dan berkembang secara berkelanjutan.

Misi ketiga bermakna bahwa memiliki makna upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintah dan pembangunan perekonomian ditempuh melalui peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha dan pengembangan pelaku usaha, pembangunan basis-basis industri

kreatif, peningkatan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kompetitif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja dan usaha baru, yang pada akhirnya akan membentuk daya saing kota Bekasi menjadi lebih meningkat.

Misi Keempat memiliki makna bahwa pembangunan dan layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya diarahkan untuk meningkatkan derajat kehidupan sosial masyarakat seiring dengan terbangunnya kehidupan keluarga sejahtera, terkelolanya persoalan dan dampak sosial perkotaan, meningkatnya partisipasi perempuan dan peran serta pemuda dalam pembangunan, aktivitas olahraga pendidikan, rekreasi, dan prestasi serta aktualisasi budaya daerah sebagai fungsi sosial, normatif dan apresiasi.

Misi Kelima bermakna bahwa di dalam era digital pembangunan kota Bekasi dituntut untuk mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada warga Bekasi secara cepat, tepat, dan transparan, serta melaksanakan percepatan program-program kota Bekasi menuju kota cerdas (*Smart City*), kota layak huni secara efisien dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Pembangunan adalah tahap perumusan sasaran strategis dalam pembangunan Kota Bekasi dengan penetapan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Bekasi yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rancangan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran adalah salah satu tahap perencanaan kebijakan yang strategis dalam menjabarkan Visi dan Misi pembangunan Kota Bekasi periode 2018-2023 ke dalam tahapan rencana pembangunan tahunan secara operasional.

Tujuan adalah rumusan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan Kota Bekasi. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan Pembangunan dirumuskan dari penjelasan visi dan misi pembangunan Kota Bekasi periode 2018-2023 akan dijabarkan ke dalam standar kinerja yang harus dicapai pada sasaran pembangunan. Dengan memperhatikan penjelasan visi dan misi pembangunan Kota Bekasi periode 2018-2023, maka tujuan pembangunan Kota Bekasi dirumuskan seperti terlihat pada gambar 5.1 dan Tabel 5.1.

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN						
MISI	MISI 1 : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	MISI 2 : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai	MISI 3 : Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing	MISI 4 : Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif.	MISI 5 : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.	
TUJUAN	TUJUAN 1.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	TUJUAN 2.1 Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah, kreatif dan aksesibel	TUJUAN 3.1 Memperkuat struktur perekonomian kota dengan fokus pengembangan ekonomi kreatif.	TUJUAN 4.1 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berakhlak Mulia	TUJUAN 5.1 Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman	TUJUAN 5.2 Mewujudkan Kota Bekasi yang nyaman
SASARAN	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar	- Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi - Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka - Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif - Menguatnya daya saing sektor perdagangan dan jasa - Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	- Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif - Terwujudnya masyarakat Kota bekasi yang sehat - Meningkatnya kesejahteraan sosial dan keluarga - Meningkatnya partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	- Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat - Terwujudnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana	Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan Kota yang Berkelanjutan

Gambar 5-1 Arsitektur Visi Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

Tabel 5.1

Visi Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023

VISI-MISI	TUJUAN - SASARAN
VISI : KOTA BEKASI CERDAS. KREATIF. MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN	
MISI 1 :	MENINGKATKAN KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
1.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah
MISI 2 :	MEMBANGUN. MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN PRASARANA DAN SARANA KOTA YANG MAJU DAN MEMADAI
1.2	Meningkatkan ketersediaan prasarana. sarana dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah, kreatif dan aksesibel
1.2.1	Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat. aman. ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana. sarana. dan utilitas yang merata dan memenuhi standar
MISI 3 :	MENINGKATKAN PEREKONOMIAN BERBASIS POTENSI JASA KREATIF DAN PERDAGANGAN YANG BERDAYA SAING
3.1	Memperkuat struktur perekonomian kota dengan fokus pengembangan ekonomi kreatif.
3.1.1	Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi
3.1.2	Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka
3.1.3	Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif
3.1.4	Menguatnya daya saing sektor perdagangan dan jasa
3.1.5	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
MISI 4 :	MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERPENGETAHUAN. SEHAT. BERAKHLAK MULIA. KREATIF DAN INOVATIF.
4.1	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berakhlak Mulia
4.1.1	Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi. kreatif dan inovatif
4.1.2	Terwujudnya masyarakat Kota bekasi yang sehat
4.1.3	Meningkatnya kesejahteraan sosial dan keluarga
4.1.5	Meningkatnya partisipasi Pemuda dalam Pembangunan
MISI 5 :	MEMBANGUN. MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN KOTA YANG AMAN DAN CERDAS. SERTA LINGKUNGAN HIDUP YANG NYAMAN
5.1	Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman
5.1.1	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat
5.1.2	Terwujudnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana
5.2	Mewujudkan Kota Bekasi yang nyaman
5.1.2	Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan Kota yang Berkelanjutan

Tabel 5.2.
Penjabaran Indikator Kinerja

VISI- MISI	TUJUAN-SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET TAHUN KE -					KONDISI AKHIR	
					2019	2020	2021	2022	2023		
VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN											
MISI 1 : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik											
1.1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	a	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	64.36	66.05	70.01	72.40	74.65	75.75	75.75
1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	1	Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	63,49	66.28	70.05	73.25	75.00	77.00	77.00
		2	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Nilai	3.25	3.33	3.37	3.40	3.43	3.47	3.47
		3	Nilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		4	Persentase Peningkatan PAD	%	11.10	21.53	11.67	16.91	10.00	10.01	10.01
		5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	78.42	80.98	82.87	84.80	86.77	88.80	88.80
MISI 2 : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai											
2.1	Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utiltas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah, kreatif dan aksesibel	a	Indeks Infrastruktur wilayah	%	35.99	N/A	N/A	44.96	48.44	52.35	56.92
2.1.1	Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar	1	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	%	19.96	N/A	N/A	20.18	20.38	20.57	20.94
		2	Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	%	67.60	N/A	N/A	74.24	80.08	89.34	89.34
		3	Indeks Penataan Ruang	%	48.28	44.76	49.48	57.95	62.67	67.19	89.27
		4	Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan	%	24.15	36.65	45.03	52.25	58.70	64.09	64.09

VISI- MISI	TUJUAN-SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET TAHUN KE -					KONDISI AKHIR	
					2019	2020	2021	2022	2023		
MISI 3 : Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing											
3.1.	Memperkuat struktur perkonomian kota dengan fokus pengembangan ekonomi kreatif.	a	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.86	5.86	0.08	3.17	4.25	5.32	5.32
3.1.1	Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi	1	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	Rp10,460,053, 504,800	10.00	10.00	4.00	4.00	4.00	4.00
3.1.2	Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka	2	Angka Kemiskinan	%	4.11	3.81	8.58	5.70	4.72	4.01	4.01
		3	Gini Ratio	Nilai	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34
		4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9.07	8.23	8.77	8.60	8.40	8.30	8.30
3.1.3	Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif	5	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor ekonomi kreatif	%	N/A	7.64	9.43	11.63	14.35	17.70	17.70
3.1.4	Menguatnya daya saing sektor perdagangan dan jasa	6	Persentase peningkatan nilai sektor perdagangan dan jasa	%	Rp20,480,000, 000,000	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84
3.1.5	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	7	Peningkatan Pengeluaran perkapita	%	15,755.000	2.55	-10.00	3.00	3.00	3.00	3.00
		8	Laju Inflasi	%	4.23	3.89	2.00	2.92	3.21	3.53	3.53
MISI 4 : Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif.											
4.1	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berakhlak Mulia	a	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81.04	81.59	81.59	82.31	82.67	83.04	83.04
4.1.1	Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif	1	Indeks Pendidikan	Nilai	73.96	75.19	75.63	76.06	76.51	76.95	76.95
4.1.2	Terwujudnya masyarakat Kota bekasi yang sehat	2	Indeks Kesehatan	Nilai	84,45	84.50	84.50	84.55	84.60	84.65	84.65
4.1.3	Meningkatnya kesejahteraan sosial dan keluarga	3	Indeks pembangunan gender	Nilai	93.26	93.02	93.29	93.56	93.83	94.10	94.10
4.1.4	Meningkatnya partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	4	Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	Prestasi	N.A	10 TP, 2 TN	15 TP, 4 TN	20 TP, 6 TN	25 TP, 8 TN	30 TP, 10 TN, 1 TI	30 TP, 10 TN, 1 TI
MISI 5 : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.											

VISI-MISI	TUJUAN-SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET TAHUN KE -					KONDISI AKHIR
						2019	2020	2021	2022	2023	
5.1	Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman	a	Persentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	%	45	7.20	5.96	4.94	4.09	3.39	3.39
		b	Indeks risiko bencana	Nilai	132	132	127	122	118	113	113
5.1.1	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	1	Persentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	%	45.00	7.20	5.96	4.94	4.09	3.39	3.39
		2	Prosentase kerjasama antar kelompok sara	%	0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5.1.2	Terwujudnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana	3	Indeks risiko bencana	Nilai	132	132	127	122	118	113	113
		4	Indeks Penanggulangan Kebakaran	Nilai	56.24	59.13	64.03	68.28	73.43	78.68	78.68
5.2.	Mewujudkan Kota Bekasi yang nyaman	a	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	N/A	49.00	52.00	61.02	61.93	62.85	62.85
5.2.1	Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan Kota yang Berkelanjutan	1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	N/A	49.00	52.00	61.02	61.93	62.85	62.85

5.4. Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Janji Politik

Isu Strategis yang telah dibahas pada bab IV menjelaskan bagaimana upaya pemerintah Kota Bekasi melakukan capaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Bagi pemerintahan kabupaten/kota, memahami dampak sosial dan ekonomi COVID-19 dapat membantu dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang diperlukan baik dalam penanganan maupun dalam pemulihan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya, secara lebih efektif. Kepentingan merumuskan konsep kebijakan jangka menengah, perlu pemahaman dampak sosial dan ekonomi pandemi COVID-19 yang mendalam, sejalan dengan langkah-langkah responsif yang telah dilakukan dalam jangka pendek, baik berupa *ANALISIS DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI BENCANA CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) TERHADAP MASYARAKAT DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2020* bantuan sosial (*social assistance*) dan kebijakan fiskal daerah berupa stimulus ekonomi (*fiscal stimuli*). Pemerintah daerah dipandang perlu untuk melakukan berbagai intervensi terhadap aktivitas sosial kemasyarakatan dan pemulihan serta pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah. Adanya Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan setelah penyusunan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2018-2023 juga menjadi pertimbangan isu strategis Pemerintah Kota Bekasi.

Selain itu Janji politik merupakan hal yang sangat penting karena dari sanalah masyarakat dapat membaca tekad, visi, misi, dan intensi seseorang maju menjadi kandidat untuk menduduki jabatan tertentu. Kandidat yang tidak mempunyai janji politik adalah kandidat yang tidak mempunyai visi dan misi. Prioritas pembangunan yang merupakan janji-janji kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan janji politik yang perlu diwujudkan melalui suatu tahapan yang dimulai dari dokumen perencanaan. RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yang disusun telah memperhatikan dan menterjemahkan janji-janji politik Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kota Bekasi. Adapun Prioritas Pembangunan Daerah yang merupakan janji-janji politik Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kota Bekasi meliputi 45 (empat puluh lima) janji sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas skim pendidikan dasar 9 tahun gratis dan subsidi siswa keluarga miskin;
2. Peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan yang menghasilkan lulusan yang tersertifikasi;
3. Peningkatan layanan pendidikan bagi siswa, orang tua, dan masyarakat berbasis teknologi informasi (*smart school*);
4. Pemberian beasiswa berbasis prestasi akademik, minat/bakat, dan Tahfidz Al-Qur'an;
5. Penguatan sistem tata kelola layanan Kartu Sehat (KS) Berbasis NIK yang selaras dengan jaminan kesehatan nasional;
6. Peningkatan kapasitas layanan sistem informasi kesehatan (*perwujudan smart health*);
7. Pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas;
8. Revitalisasi dan aktivasi 65% kelembagaan koperasi di Kota Bekasi;
9. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pencari kerja dan pelaku UMKM;

10. Pembukaan peluang 150.000 tenaga kerja baru melalui peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru, dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja;
11. Pembentukan “*Bekasi City Start-Up*”, melalui kerjasama pengembangan inkubator bisnis untuk melahirkan wirausaha baru;
12. Pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi digital untuk stabilisasi pasokan dan harga sembako;
13. Pengembangan “*urban tourism*” untuk meningkatkan daya tarik wisata Kota Bekasi;
14. Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan “*Bekasi City Techno Park*”;
15. Pengembangan *creative society* melalui penyelenggaraan event “*Bekasi Creative*” di tingkat kota dan kecamatan.
16. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga dalam rangka pemasaran olahraga, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, di tingkat kota dan lingkungan masyarakat;
17. Penguatan keshalehan spiritual, ketahanan sosial, dan kearifan budaya dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur dan kehidupan masyarakat yang ihsan.
18. Pengembangan Sistem Layanan Sosial Terpadu (pendidikan, kesehatan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial);
19. Pembangunan Panti Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
20. Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana sosial;
21. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi;
22. Pengembangan layanan publik berbasis IT;
23. Pengembangan sistem layanan cepat tanggap penanganan sampah, jalan, saluran, PJU, dan kemacetan berbasis IT;
24. Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif bagi Ketua RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid, dan kelompok penggerak sosial lainnya;
25. Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan lansia Kota Bekasi;
26. Pengembangan kawasan ramah bersepeda (*Bekasi City Bike*);
27. Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu (tematis: budaya Bekasi, patriotis, kreatif, dll.);
28. Peningkatan kapasitas TPA Sumur Batu melalui ekstensifikasi teknologi dan kerjasama TPA Bantar Gebang untuk memastikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Bekasi;
29. Penataan dan pengendalian estetika papan reklame (mengarahkan pada reklame digital bersumber energi surya);
30. Peningkatan perilaku pemilahan sampah rumah tangga, revitalisasi “*Smart Waste Management*”, dan konversi “*Waste to Energy*”;
31. Bedah rumah pada kawasan kumuh;
32. Pembangunan Rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
33. Pengendalian komposisi ruang yang proporsional dan serasi untuk RTH, permukiman, dan aktivitas usaha;

34. Pengelolaan TPU dengan standar pemakaman untuk menjamin ketersediaan dan keasrian sehingga dapat berfungsi sebagai RTH;
35. Penanggulangan banjir melalui penerapan penanganan banjir berwawasan lingkungan (*eco drainage*);
36. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
37. Pemberdayaan minat dan kiat usaha bagi perempuan;
38. Peningkatan layanan penerbitan akte kelahiran dan layanan administrasi kependudukan lainnya;
39. Penyediaan angkutan publik massal;
40. Pemeliharaan prasarana dan sarana LLAJ;
41. Pembangunan gedung *commuter transit parking* (stasiun KA dan LRT);
42. Pengenalan dan pemberlakuan *smart parking* di pusat perbelanjaan;
43. Pembangunan sarana transportasi *City Tourism*;
44. Pembangunan dan penataan jalur pejalan kaki dan jalur khusus sepeda; dan
45. Pengelolaan event “*car free day*” yang berkontribusi terhadap promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan.



BAB 6 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam mengatur setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan menentukan rumusan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

6.1 Strategi Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023

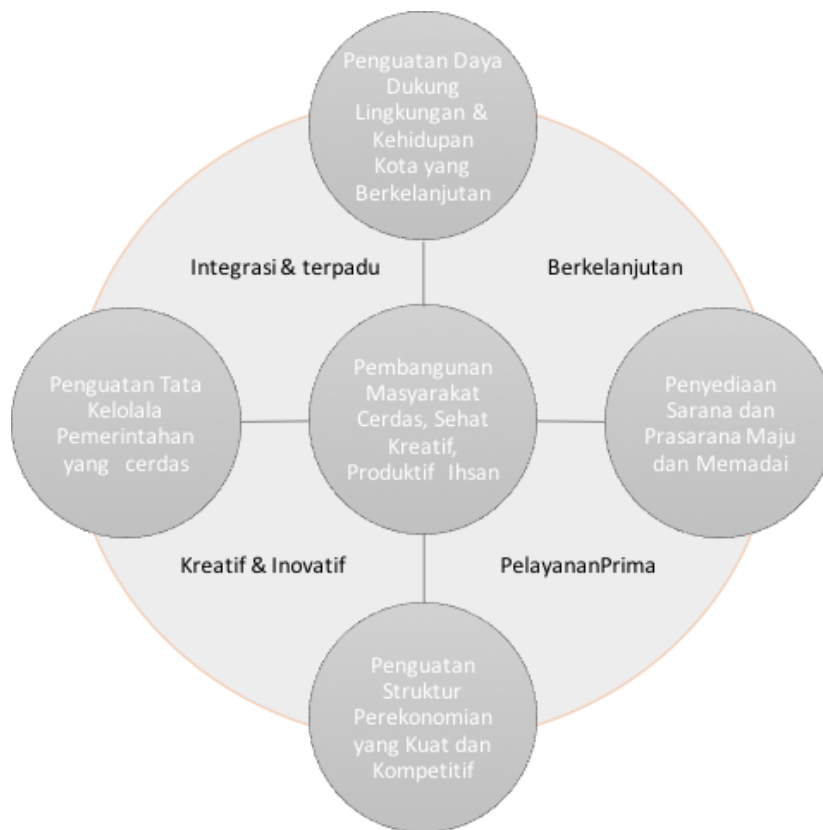
Perumusan strategi pembangunan Kota Bekasi 2018-2023 mempertimbangkan aspek teknokratis dan politis yang tercermin dari integrasi antara strategi untuk mengatasi isu strategis pembangunan kota dengan strategi untuk mencapai visi, misi tujuan, dan sasaran pembangunan Kota Bekasi sesuai janji politik Kepala Daerah terpilih 2018-2023. Visi Kota Bekasi **“Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan,”** mengandung makna bahwa tahapan pengembangan Kota Bekasi pada Periode Pembangunan 2018-2023 adalah menuju kota cerdas

yang tercermin pada kualitas kehidupan masyarakatnya yang kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan. Dengan demikian secara jelas tergambar dalam visi pembangunan Kota Bekasi, bahwa *platform* dari strategi pembangunan kota yang dapat digunakan adalah strategi pengembangan kota Cerdas.

Konsep kota cerdas (*smart city*) yang menjadi isu besar di kota-kota besar di seluruh dunia mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota menggunakan pendekatan *citizen centric* sehingga terjadi interaksi yang lebih dinamis dan erat antara warga dengan penyedia layanan, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota. Arti “cerdas” menurut Nam & Pardo (dalam Djunaedi, 2014) adalah: (1) dalam bidang perencanaan kota, “cerdas” diartikan sebagai strategis, terutama dalam memilih prioritas, arah, kebijakan, dan sebagainya, dan (2) terkait teknologi, maka “cerdas” mengandung prinsip komputasi otomatis (*self-configuration, self-healing, self-protection, self-optimization*), ditunjukkan antara lain memiliki *sensors* dan *actuators*.

Secara sederhana sebuah kota cerdas (*smart city*) memiliki 6 dimensi, yaitu: (1) *Smart Economy*; (2) *Smart Mobility*; (3) *Smart Environment*; (4) *Smart People*; (5) *Smart Living*; dan (6) *Smart Governance*. Griffinger dkk (2007:10-14) menjelaskan 6 (enam) dimensi dalam konsep *smart city* sebagai dasar dari penerapan *smart city* yang kemudian digunakan dalam menghitung indeks *smart city* sebagai indikator kinerja kecerdasan suatu kota.

Platform strategi pengembangan kota cerdas yang dikembangkan dalam kerangka mewujudkan visi Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan,” adalah dengan menerapkan pendekatan perencanaan kota yang berfokus pada upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan layanan masyarakat melalui pengintegrasian beberapa elemen utama pembangunan kota yang ada yakni pemerintahan, ekonomi, kualitas hidup, lingkungan, sumber daya manusia, dan transportasi. Kerangka strategi pembangunan Kota Bekasi 2018-2023 tersebut telah tercermin dalam penjabaran visi Kota Bekasi pada misi pembangunannya. Visi kota Bekasi dikembangkan dalam 5 (lima) misi yang secara prinsip merupakan pilar-pilar pengembangan kota Bekasi yang cerdas yakni penguatan tata kelola pemerintahan, pemantapan sarana dan prasarana maju, penguatan dan pengembangan ekonomi kreatif, penguatan masyarakat yang kreatif, produktif, sejahtera, dan ihsan serta penguatan daya dukung lingkungan hidup.



Gambar 6-1 Kerangka Strategi Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023

5 (lima) kerangka dasar strategi pembangunan yang sinergi dengan 5 (lima) misi pembangunan Kota memberikan gambaran fokus-fokus prioritas pembangunan yang perlu dikembangkan pada periode 2018-2023. Kelima strategi tersebut dilaksanakan secara terintegrasi satu dengan lainnya pada setiap tahapan pembangunan. Penekanan bobot strategi disesuaikan dengan fokus prioritas pembangunan setiap tahunnya. Selanjutnya mengacu pada kerangka dasar strategi pembangunan Kota Bekasi tersebut, maka dirumuskan strategi rinci yang lebih operasional seperti dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Perumusan alternatif skenario berdasarkan rekomendasi dalam penyusunan KLHS perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 meliputi:

1. Alternatif skenario dengan upaya tambahan untuk daya dukung dan daya tampung adalah:
 - a. Untuk mempertahankan daya dukung air agar tetap ideal/ tidak terus menurun beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah:
 - Meningkatkan penangkapan air melalui revitalisasi dan pembangunan embung/polder,
 - Pemanenan air hujan (rain water harvesting), Sumur resapan dan biopori
 - Mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai sempadan sungai dan situ;
 - Peningkatan kualitas air sungai agar layak dimanfaatkan sebagai sumber air baku
 - dengan mengurangi beban cemar pada air dari kegiatan industri dan rumah tangga;
 - Penerapan sistem produksi bersih pada kegiatan industri agar dapat menghemat

- penggunaan air, daur ulang pemakaian air, peningkatan kualitas pengolahan limbah cair;
- Penerapan insentif bagi kegiatan produksi baik pertanian maupun industri yang dapat menekan atau menghemat penggunaan air;
- Memenuhi kebutuhan air melalui kerjasama dengan daerah lain yang memiliki ketersediaan air;

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Peningkatan pendidikan lingkungan untuk masyarakat seperti cinta lingkungan, hemat energi dan air, dan pemanfaatan materi dan energi terbarukan

- b. Untuk menjaga ketersediaan pangan Kota Bekasi tetap ada meskipun tidak surplus maka beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya:
 - Adanya kebijakan penyediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang didukung peningkatan layanan sistem irigasi;
 - Menjalin pola kerjasama dengan kabupaten yang memiliki daya dukung pangan surplus untuk pemenuhan kebutuhan pangan Kota Bekasi;
 - Pengembangan dan penerapan Urban Farming dengan pengembangan kampung hidroponik Pengembangan lahan pertanian pada kawasan yang berfungsi lindung
 - Meningkatkan produktivitas padi/ha;
 - Diversifikasi pangan;
 - Meningkatkan luasan lahan pertanian tanaman pangan;
 - Mengoptimalkan fungsi RTH privat sebagai penghasil pangan; dan
 - Meningkatkan daya beli masyarakat untuk dapat memicu adanya pasokan pangan dari luar Kota Bekasi.
2. Alternatif skenario dan rekomendasi tanpa upaya tambahan meliputi 59 (lima puluh Sembilan) indikator yang telah mencapai target RPJMN Tahun 2019. Alternatif skenario dilakukan dengan mempertahankan atau memantapkan program dan kegiatan yang sudah mencapai target nasional;
3. Alternatif skenario dan rekomendasi dengan upaya tambahan meliputi 136 (seratus tiga puluh enam) indikator dengan komposisi 55 (lima puluh lima) indikator yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target RPJMN tahun 2019 dan 81 (delapan puluh satu) indikator yang belum tersedia data.
 - a. Untuk 81 (delapan puluh satu) indikator yang belum tersedia data maka perlu dilakukan pendataan dan penyediaan anggaran khusus;
 - b. untuk 55 (lima puluh lima) indikator yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target RPJMN tahun 2019

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023

6.2.1 Umum

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap dalam penyusunan dokumen RPJMD.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan RPJMD secara khusus dan sasaran perencanaan jangka panjang pada umumnya. Oleh karena itu, dalam menyusun arah kebijakan perlu adanya sinergitas antara berbagai dokumen perencanaan guna menyelaraskan berbagai program pembangunan antar periode maupun antar tingkatan administrasi pemerintahan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi 2018-2023 dirumuskan berdasarkan pertimbangan akan kebutuhan dalam memenuhi atau mencapai target indikator sasaran yang telah ditetapkan pada setiap misi dan strategi yang dijalankannya. Rumusan arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi 2018-2023 mencerminkan upaya pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan sekaligus mengatasi isu strategis yang dihadapi Kota Bekasi pada periode 2018-2023. Hasil perumusan kebijakan Pembangunan kota Bekasi 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Adapun arah kebijakan Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah :

1. Kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat jadi prioritas;
2. Kementerian Keuangan telah menetapkan peraturan untuk mendorong pemda melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19;

3. Pemda akan mendapatkan Dana Transfer untuk penanganan Covid-19 setelah menyerahkan Laporan Kinerja di Bidang Kesehatan.
4. Pemerintah merevisi postur APBN dalam Perpres 54 Tahun 2020 dengan Perpres 72 Tahun 2020 untuk mengakomodir kebutuhan belanja negara yang meningkat terkait penanganan pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
5. Dalam Perpres 72 Tahun 2020, Menteri Keuangan (Menkeu) dapat melakukan pergeseran rincian belanja negara dan pembiayaan anggaran terkait Program PEN.
6. Untuk memperkuat perekonomian domestik tahun 2020, pemerintah mendorong percepatan belanja dan kebijakan mendorong padat karya. Melalui TKDD, pemerintah mendorong dan mempercepat pelaksanaan kegiatan dan desa, untuk kegiatan produktif yang menyerap tenaga kerja di desa.
7. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 yaitu PMK tentang mekanisme pelaksanaan APBN dalam rangka penanganan Covid-19. Penetapan aturan tersebut guna mendorong percepatan disburse berbagai belanja untuk penanganan Covid-19 dengan menyederhanakan mekanisme dan simplifikasi dokumen.
8. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Bersama untuk mempercepat penyaluran TKDD dan realisasi APBD 2020 (SEB Nomor SE-35/MK.07/2020 dan Nomor 4404918/SJ). Gubernur/Bupati/Wali Kota diminta agar segera melakukan percepatan realisasi belanja APBD, melaksanakan pengadaan barang dan jasa belanja APBD dengan mengutamakan produk dalam negeri/produk daerah/UMKM, melaksanakan percepatan belanja infrastruktur daerah dengan mengutamakan padat karya, dan melakukan percepatan pelaksanaan jaring pengaman sosial yang didanai APBD.

6.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan yang Menjadi Prioritas

Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan membutuhkan strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk mewujudkannya. Kerangka strategi yang dikembangkan dirumuskan dengan menerjemahkan visi misi kota dan mengintegrasikannya dengan *platform* strategi pengembangan kota cerdas. Selanjutnya dalam rangka memberikan arah yang lebih jelas terhadap pelaksanaan program pembangunan Kota Bekasi 2018-2023, maka perlu dirumuskan arah kebijakan yang menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti melalui program pembangunan. Arah Kebijakan pembangunan yang menjadi prioritas pada pembangunan Kota Bekasi 2018- 2023 ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan kota, janji politik serta pertimbangan strategis lainnya yang dinilai penting. Hasil perumusan arah kebijakan yang menjadi prioritas dapat dilihat pada Gambar 6.2.

Bahwa arah kebijakan pemerintah daerah setelah pandemi covid adalah pada sektor pendidikan, kesehatan, dunia usaha dan jaringan sosial. Hal tersebut dapat terlihat pada prioritas masing-masing urusan yang disertai dengan pagu Indikatif. Prioritas pada sisa masa pembangunan 2021-2022 adalah :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman Standart Pelayanan Minimal (SPM);

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman Norma, Standart, Prosedur, dan kaidah.

Hal tersebut dilanjutkan dalam pembahasan bab 7, adapun pendanaan dan Penanganan Program/Kegiatan Koperasi dan UMKM disampaikan bahwa Urusan Koperasi dan UMKM merupakan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, sehingga untuk menjadi prioritas utama terkalahkan oleh Urusan Wajib terkait dengan pelayanan dasar, akan tetapi dengan adanya Pandemi Covid 19 ini urusan Koperasi dan UMKM menjadi prioritas utama penanganan Pemerintah baik dari Tingkat Pusat, Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang termasuk dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) seperti :

1. Pemerintah Pusat :

- Pendanaan melalui beberapa program Pendanaan dari Pemerintah Pusat (melalui Kementerian KOPUKM) seperti : BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk UMKM yang mendaftarkan diri di Dinas KopUKM Daerah sebesar Rp. 2,4 Juta untuk setiap UMKM, Bantuan Subsidi Bunga Pinjaman melalui Perbankan untuk KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang dipinjam UMKM,
- Penanganan melalui program pelatihan yang langsung dilaksanakan pusat dan yang diserahkan ke Daerah Kota dalam bentuk DAK Non Fisik, yang sebelumnya belum pernah didapat Daerah Kota Bekasi,
- Keringanan Perpajakan untuk UMKM, dan kemudahan pengurusan perizinan Usaha Mikro (Gratis) dan pengurusan perizinan sudah dipermudah di Kecamatan masing-masing..

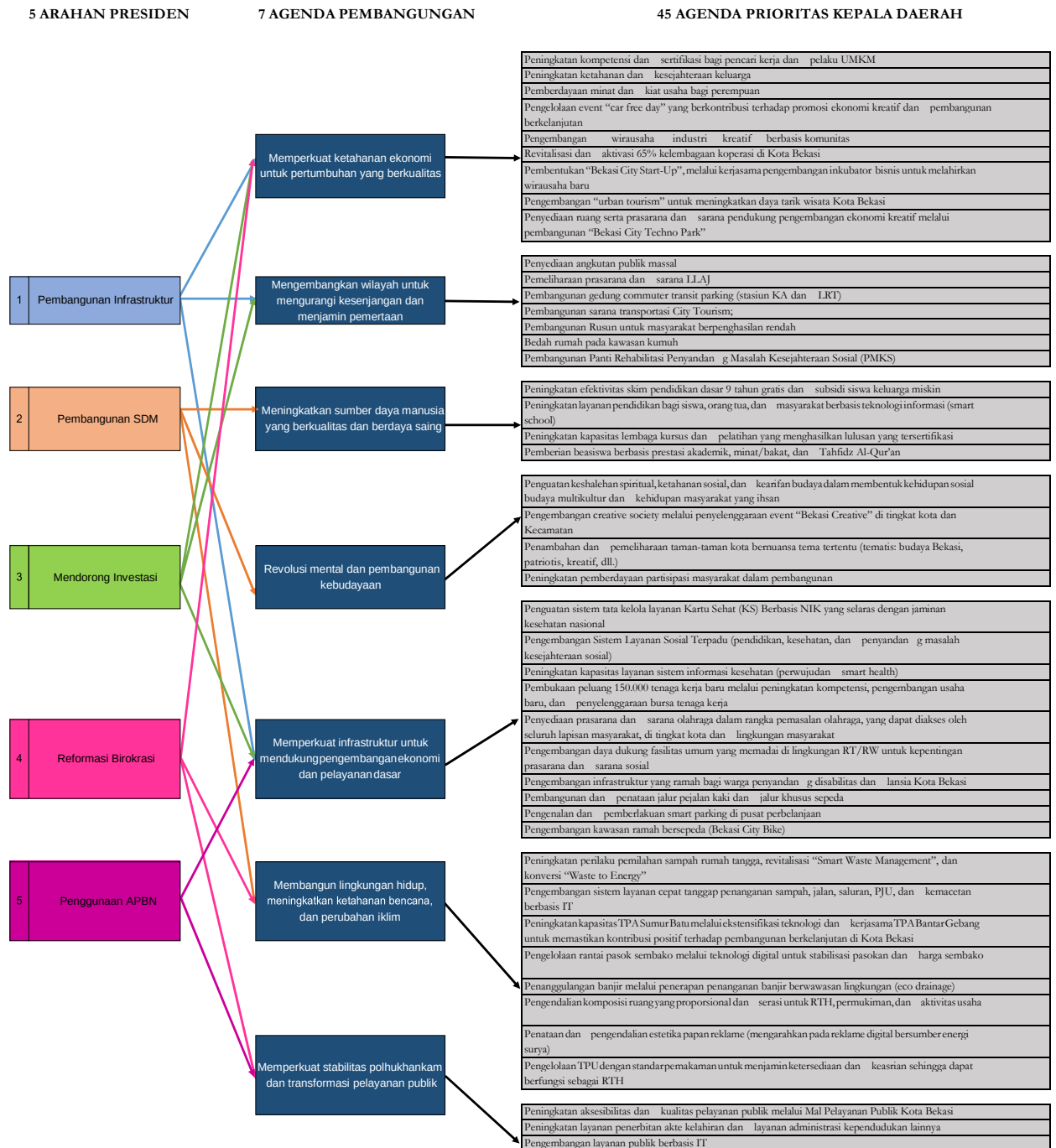
2. Pemerintah Propinsi :

- Bantuan Revitalisasi Pasar Tradisional/Pasar Rakyat melalui program PEN dari sisi pemasaran produk UMKM,

3. Pemerintah Kota :

- Memberikan pelatihan Pengurus Koperasi dan Pelaku Usaha (UMKM, IKM dan Pelaku Ekonomi Kreatif);
- Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk UMKM;
- Fasilitasi HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) bagi Pelaku Usaha;
- Fasilitasi Sertifikasi Lembaga Usaha Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Fasilitasi Akta Pendirian Koperasi UMKM;
- Dana Bergulir dengan Bunga 0 – 3 % untuk Koperasi dan UMKM melalui BPR Syariah Patriot.
- Fasilitasi Promosi melalui Pameran, Expo dan Event Kreatif lainnya.

Selain itu, Urusan Koperasi dan UMKMinijuga dengan adanya Pandemi ini dikelola juga oleh Perangkat Daerah lain seperti SDM/Tenaga Kerja dari Dinas Tenaga Kerja/ Kementerian Tenaga Kerja, Pelatihan terkait Pendanaan dari DPMPSTP (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu) terkait Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), juga untuk UMKM kreatif (16 Subsektor Usaha) juga diberi pelatihan Bisnis dan Desain Produk oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan baik Pemerintah Kota Bekasi, maupun Pemerintah Propinsi Jawa Barat.



Gambar 6-2 Sinkronisasi Agenda Prioritas Pembangunan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 dengan Arahkan Presiden dan Agenda Pembangunan RPJMN 2019-2024

Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Bekasi 2018-2023

Visi : Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik			
Tujuan 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntable	Sasaran 1.1: Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	1 Peningkatan kinerja penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan pemerin-tahan daerah yang inovatif, melalui pengembangan Sumberdaya Aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui penyederhaan birokrasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai proses bisnis dan pengembangan SDM Aparatur berbasis kompetensi.
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pengembangan SOP dan optimali-sasi pemanfaatan IT
MISI 2 : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai			
Tujuan 2: Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utiltas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah, kreatif dan aksesibel	Sasaran 2.1: Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar	1 Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas kota yang yang sehat, aman, ramah dan aksesibel	Meningkatkan keselarasan dan keterpaduan antara jumlah ketersediaan PSU dengan ketersediaan ruang publik yang sehat, aman dan ramah bagi masyarakat
		2 Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang terinte-grasi sesuai dengan dinamika pertum-buhan kota dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan tata ruang kota yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang terintegrasi sesuai dengan dinamika pertumbuhan kota dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan tata ruang kota yang berkelanjutan
MISI 3 : Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing			
Tujuan 3: Memperkuat struktur perkonomian kota dengan fokus pengembangan ekonomi kreatif.	Sasaran 3.1: Meningkatnya iklim usaha dan investasi	Penyederhanaan perizinan dan non perizinan serta promosi penanaman modal	Menciptakan Iklim Usaha Yang Berdaya Saing
	Sasaran 3.2: Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka	Meningkatkan peluang usaha	Meningkatkan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja
			Mendorong penciptaan wirausaha baru

Visi : Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan					
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
	Sasaran 3.3: Meningkatkan nilai PDRB sektor ekonomi kreatif	1	Peningkatan keunggulan, daya tarik dan promosi wisata	Mengembangkan potensi dan daya tarik wisata melalui pengembangan <i>creative society</i> dan daya dukung infrastruktur perdagangan dan <i>urban tourism</i> .	
		2	Peningkatan daya saing industri kreatif, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Menyediakan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif.	
				Mendorong peningkatan koperasidan UMKM yang mandiri dan berdaya saing.	
				Mengembangkan inkubator bisnis untuk mendorong lahirnya wirausaha baru berbasis <i>start-up</i> .	
		Sasaran 3.4: Menguatnya daya saing sektor perdagangan dan jasa	1	Peningkatan Persentase Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi	Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdagangan dan Jasa
			Sasaran 3.5:Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	1	Menjaga stabilitas Harga Komoditas
				Pengendalian laju inflasi	
	2	Harmonisasi Tingkat Upah		Harmonisasi UMK	
				Penyediaan stimulan untuk mendorong peningkatan pendapatan	
	MISI 4 : Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif,				
Tujuan 4: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berakhlak Mulia	Sasaran 4.1: Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif	1	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan untuk mendukung pencapaian rata-rata lama sekolah dan indeks pendidikan Kota Bekasi	
				Meningkatkan layanan pendidikan non formal untuk mendukung ketersediaan	

Visi : Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Sasaran 4.2: Terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang sehat	Pengembangan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur dan pengembangan sistem layanan kesehatan.
	Sasaran 4.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial dan keluarga	1. Penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang g Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 2. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Melaksanakan Pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberian jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui program keluarga berencana dan perlindungan bagi perempuan dan anak
	Sasaran 4.4: Meningkatnya partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan prestasi keolahragaan	Mengembangkan kapasitas daya saing kpemudaan dan prestasi keolahragaan melalui pembedayaan pemuda dan pengelolaan pendidikan dan organisasi olahraga
MISI 5 : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman,			
Tujuan 5: Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman	Sasaran 5,1: Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	1 Peningkatkan kemitraan dan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat Meningkatkan ketentraman dan ketertiban melalui pengembangan wawasan kebangsaan Meningkatkan forum komunikasi antar umat beragama.
	Sasaran 5,2: Terwujudnya upaya dan	1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana,	Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan untuk mengurangi bencana.

Visi : Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	kesiapsiagaan dalam mengurangi resiko bencana	baik pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.	Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinas Meningkatkan pemulihan wilayah pasca bencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan
Tujuan 6: Mewujudkan Kota Bekasi yang nyaman	Sasaran 6,1,: Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan Kota yang Berkelanjutan	1 Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, penegakan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati melalui peningkatan pengawasan, penanganan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk Mendukung lingkungan berkelanjutan

6.2.3. Standart Pelayanan Minimal Kota Bekasi

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 menjelaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar harus berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Pelayanan Dasar yang dimaksud dalam hal ini adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Sedangkan Standar Pelayanan Minimal yang dimaksud dalam hal ini adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam menjalankan ketentuan pasal 18, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, yang dimaksud dengan Pelayanan dasar dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih mengacu terhadap definisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun dalam Peraturan ini dijelaskan bahwa pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal tersebut harus didasarkan pada prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Pelayanan Dasar yang dilakukan berdasarkan pada Standar

Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Bekasi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 6 urusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 antara lain: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman; (5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (6) Sosial. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diatas sekaligus merupakan jenis layanan dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Bekasi yang harus mencakup materi muatan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 antara lain: (1) Jenis Pelayanan Dasar; (2) Mutu Pelayanan Dasar; dan (3) Penerima Pelayanan Dasar. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengatur bahwa setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat: (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan /atau jasa; (2) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan (3) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Secara rinci akan dijelaskan tentang layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Bekasi.

Dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal maka dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Bekasi pada 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ada beberapa hal yang akan menjadi perhatian pemerintah Kota Bekasi diantaranya:

1. Beberapa Perangkat Daerah diberikan pendampingan dalam menyusun standar pelayanan minimal menjadi tanggung jawab OPD-nya, oleh karena itu beberapa perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar belum memasukan indikator Standar Pelayanan Minimal pada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Perangkat daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal yang telah memasukan indikator Standar Pelayanan Minimal pada Rencana Strategis Perangkat Daerah harus berani menetapkan target 100 persen.
3. Pemahaman Perangkat Daerah dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal masih terbatas pada pemenuhan capaian. kinerja saja, sementara pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bukan hanya mencakup aspek capaian kinerja (hasil) saja, tetapi juga pemenuhan proses harus dipenuhi yaitu pemenuhan barang/jasa, personil, anggaran, dan faktor pendukung lainnya.
4. Memberikan pemahaman pencapaian Standar Pelayanan Minimal masing-masing urusan seharusnya dipahami secara komprehensif dimana dalam memenuhi pencapaian kinerja Standar

Pelayanan Minimal suatu urusan dengan melibatkan lintas sektor yang saling terkait, baik dalam pemenuhan capaian kinerja, barang/jasa, personil maupun anggaran.

Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan optimalisasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Bekasi dengan membuat delapan Instruksi Wali Kota Bekasi, delapan Instruksi Wali Kota yang dimaksud antara lain:

1. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 100/1794/SETDA.Tapem 20- 12-2019 Tentang penerapan Standar Pelayanan (SPM) Sub Urusan Kesehatan di Kota Bekasi;
2. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 100/1795/SETDA.Tapem 2112-2019 Tentang Penerapan Standar Pelayanan (SPM) Sub Urusan Pendidikan di Kota Bekasi;
3. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 100/1796/SETDA.Tapem 2212-2019 Tentang Penerapan Standar Pelayanan (SPM) Sub Urusan Pekerjaan Umum di Kota Bekasi;
4. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 100/1797/SETDA.Tapem 2312-2019 Tentang Penerapan Standar Pelayanan (SPM) Sub Urusan Pemadam Kebakaran di Kota Bekasi;
5. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 100/1798/SETDA.Tapem 2412-2019 Tentang Penerapan Standar Pelayanan (SPM) Sub Urusan Sosial di Kota Bekasi;
6. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 100/1799/SETDA.Tapem 2512-2019 Tentang Penerapan Standar Pelayanan (SPM) Sub Urusan Perumahan Rakyat di Kota Bekasi;
7. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 100/1855/SETDA.Tapem 2312-2019 Tentang Penerapan Standar Pelayanan (SPM) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bekasi;
8. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 100/1856/SETDA.Tapem 2312-2019 Tentang Penerapan Standar Pelayanan (SPM) Sub Urusan Bencana di Kota Bekasi.

6.3. Tahapan Pembangunan

Setelah dirumuskan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah, maka setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horizon waktu pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Urutan arah kebijakan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dijadikan dasar untuk penyusunan RPJMD.

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang terpadu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Hasil perumusan pentahapan pembangunan Kota Bekasi 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 6.2.



Gambar 6-3 Tahapan Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023

Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023

2019	2020	2021	2022	2023
Tema :	Tema :	Tema :	Tema :	Tema :
Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Tata Kelola Pembangunan	Pemantapan Ketersediaan dan Pembangunan Parasana sarana Kota	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kapasitas Pelaku Ekonomi	Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian Melalui Pembangunan Industri Kreatif	Konsolidasi Ketercapaian Hasil Pembangunan
Fokus Prioritas :	Fokus Prioritas :	Fokus Prioritas :	Fokus Prioritas :	Fokus Prioritas :
Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan Pemerintahan	Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kota yang terintegrasi , Pelayanan prima dan berkelanjutan	Peningkatan akses masyarakat pada pendidikan yang lebih tinggi	Penguatan dan pengembangan ekonomi kreatif kota	Penguatan Tingkat Kematangan Bekasi sebagai kota Cerdas
Peningkatan akuntabilitas dan Profesionalisme Pemerintahan	Peningkatan pemanfaatan IT dalam pelayanan PSU Kota	Peningkatan kapasitas dan Kualitas layanan pendidikan	Pengembangan Iklim dan kemampuan entrepreneurship masyarakat	Penguatan daya dukung lingkungan kota
Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	Penyediaan PSU Ramah Anak, Gender, Disabilitas, Pejalan Kaki dan sepeda	Penguatan kapasitas dan Peningkatan Kualitas layanan kesehatan	Pemberdayaan sumber daya ekonomi lokal dan pasar domestik	Penguatan ketahanan kota terhadap bencana sosial, ekonomi maupun alam
Peningkatan kemitraan dan kolaborasi pemerintah masyarakat dalam pembangunan	Penataan kawasan kumuh dan penatagunaan tanah serta tata ruang	Penguatan keshalehan spiritual, ketahanan sosial, dan kearifan budaya	Peningkatan iklim usaha Kota Bekasi dan peluang kerja	
Peningkatan kapasitas penanganan masalah pembangunan kota	Menyediakan kawasan permukiman yang layak huni, cerdas dan hijau	Pengembangan creative society	Pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi digital	
		Penguatan Kohesi sosial yang makin kuat	Pembentukan “BEKASI CITY START-UP” dan Pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas	

TABEL 6.3
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF

KODEFIKASI URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM	NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB	
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Milyar)		
						Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)				
				VISI : KOTA BEKASI CERDAS. KREATIF. MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN															
				MISI 1 : MENINGKATKAN KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK															
																			Sekretariat Daerah (Bag. Tata Pemerintahan, BA. Tata Usaha, Bag. Humas, Bag. Organisasi, Bag. Perlengkapan, Bag. Umum, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, Inspektorat Kota, Seluruh OPD), Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi, Bag. Tata Pemerintahan, Bag. Kesejahteraan Sosial, Bag. Kerjasama, Bag. Hukum), Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, Kecamatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Sekretariat Daerah (Bag. Pembangunan, Bag. Perekonomian, Bag. Pengadaan barang dan Jasa), Badan Pendapatan Daerah

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
									2019		2020		2021		2022		2023				
									Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
					SASARAN 1 : Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	63,49	66.28		70.05		73.25		75.00		77.00		77.00		Sekretariat Daerah (Bag. Tata Pemerintahan, BA. Tata Usaha, Bag. Humas, Bag. Organisasi, Bag. Perlengkapan, Bag. Umum, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, Inspektorat Kota, Seluruh OPD)
4	1	4		1	Program Administrasi Umum					8.09		9.81		158.23		160.91		165.53		165.53	Sekretariat Daerah (Bag. Tata Pemerintahan, Bag. Tata Usah, Bag. Humas, Bag. Organiasi, Bag. Perlengkapan, Bag. Umum),
						Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah	%	-	-		-		50.00		60.00		75.00		75.00		Sekretariat Daerah (Bag. Tata Pemerintahan)
						Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	%	-	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat Daerah (Bag. Tata Usaha)
						Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	%	-	9300		9300		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat Daerah (Bag. Humas)
						persentase keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi	%						100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
						Presentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai	%	100	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat Daerah (Bag. Perlengkapan)

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
									2019		2020		2021		2022		2023				
									Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
						dengan kebutuhan															
						Presentase Ketersediaan gedung pemerintahan dalam kondisi baik	%	N/A	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
5	5	2		2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				0.65	0.6		1.50		2.62		2.63		2.63		2.63	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
						Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidan g Sosial dan Pemerintahan	%	N/A	10.00	10.00		20.00		40.00		60.00		60.00		60.00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
						Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidan g Ekonomi dan Pembangunan	%	-	10.00	10.00		20.00		40.00		60.00		60.00		60.00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
						Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidan g Inovasi dan Teknologi	%	-	10.00	10.00		20.00		40.00		60.00		60.00		60.00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
						Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang mendapatkan predikat	Jumlah	N/A	1	1		1		1		2		2		2	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
									2019		2020		2021		2022		2023				
									Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
5	1	2		3	Program Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					5.56		5.02		3.59		3.67		3.86		3.86	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
						Persentase kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan	%	61.29	75.00		75.00		80.00		90.00		100.00		100.00		Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
5	1	3		4	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					1.15		1.15		4.2		4.3		4.4		4.4	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
						Persentase kesesuaian antara capaian target pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama Bidan g Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	N/A	75.00		75.00		80.00		90.00		100.00		100.00		Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
						Persentase kesesuaian antara capaian target pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama Bidan g Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	N/A	75.00		75.00		80.00		90.00		100.00		100.00		Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB		
									2019		2020		2021		2022		2023						
									Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)					
						Persentase kesesuaian antara capaian target pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama Bidan g Infrastruktur dan Kewilayahan	%	N/A	75.00		75.00		80.00		90.00		100.00		100.00		Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
6	1	2		5	Program Penyelenggaraan Pengawasan					0.95		1.15		1.65		3.05		3.15		3.15	Inspektorat Kota		
						Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	N/A	74.00		77.00		84.25		84.30		84.35		84.35		Inspektorat Kota		
						Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP BB keatas	%	-	-		-		98.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Inspektorat Kota
						Persentase perangkat daerah dengan nilai mturitas SPIP minimal 3.01	%	-	-		-		36.00		39.00		41.00		41.00		41.00		Inspektorat Kota
						Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal	%	85.00	85.00		85.00		90.00		90.00		92.00		92.00		92.00		Inspektorat Kota
						Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal	%	71.00	71.00		75.00		75.00		80.00		80.00		80.00		80.00		80.00
6	1	3		6	Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan dan Asistensi					0.95		1.15		2.85		2.92		3.00		3.00	Inspektorat Kota		

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB		
2019		2020							2021		2022		2023		Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)		Target	Rp (Milyar)
Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)						Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)									
						Jumlah perangkat daerah dengan nilai evaluasi ZI Minimal 70	OPD	-	-	-		5		5		5		5		Inspektorat Kota			
						Jumlah Perangkat Daerah yang mampu mempertahanka n predikat WBBM	OPD	-	-	-		0		1		1		1		Inspektorat Kota			
						Persentase perangkat daerah dengan nilai evaluasi persepsi korupsi minimal 3.71	%	-	-	-		100.00		100.00		100.00		100.00		Inspektorat Kota			
						Persentase perangkat daerah dengan penatausahaan aset salah saji yang tidak melebihi nilai material	%	-	-	-		100.00		100.00		100.00		100.00		Inspektorat Kota			
						Persentase perangkat daerah dengan nilai kesalahan pertanggungjawa ban keuangan tidak melebihi nilai material	%	-	-	-		100.00		100.00		100.00		100.00		Inspektorat Kota			
						Level kapabilitas APIP Inspektorat 3 keatas	Level	-	-	-		3		3		3		3		Inspektorat Kota			
						Indeks Penerapan Manajaemen Resiko (MR)	Level	-	-	-		1.94		1.97		2		2		Inspektorat Kota			

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
									2019		2020		2021		2022		2023				
									Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
x	x	1		7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					827.80		869.91		2,602.0 0		2,800.0 0		2,879.9 5		2,879.9 5	Seluruh OPD
						Optimalisasi Disiplin Aparatur	%		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Seluruh OPD
						Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Seluruh OPD
						Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Seluruh OPD
						Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Seluruh OPD
						Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Seluruh OPD
						Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Nilai	3.25	3.33		3.37		3.40		3.43		3.47		3.47		Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi, Bag. Tata Pemerintahan, Bag. Kesejahteraan Sosial, Bag. Kerjasama, Bag. Hukum), Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, Kecamatan
4	1	2		8	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					10.57		10.57		27.47		44.15		45.42		45.42	Sekretariat Daerah (Bag. Tata Pemerintahan, BAG. Humas, Bag. Kesejahteraan Sosial, BAG. Kerjasama, Bag. Hukum)

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB		
2019		2020							2021		2022		2023		Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)		Target	Rp (Milyar)
Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)						Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)									
						Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang g pemerintahan	%	-		70.00			70.00			70.00			70.00			Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)	
						Persentase Peraturan Perundan g-undan gan dan Produk Hukum Daerah yang diundan gkan	%			100.00			100.00			100.00			100.00			Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	
						Persentase peningkatan pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah	%	-		-			50.00			60.00			75.00			Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)	
						Presentase peningkatan profile kelurahan	%	-		-			75.00			75.00			25.00			Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)	
						Persentase Fasilitasi kegiatan keagamaan. hari besar Nasional dan hari besar lainnya	%	-		100.00			100.00			100.00			100.00			Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Sosial)	
						Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial	%			35.00			40.00			100.00			100.00			Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Sosial)	

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM					NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB	
2019		2020		2021						2022		2023		Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)		
Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target						Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target										Rp (Milyar)
							Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah	%			20.00		40.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat Daerah (Bagian Kerja Sama)
							Persentase penyelesaian perkara yang dihadapi pemerintah daerah	%			90.00		93.00		95.00		97.00		100.00		100.00		Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
4	2	2		9	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota						-		-		84.36		103.82		125.46		125.26		Sekretariat DPRD
							Optimalisasi peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD	%	-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat DPRD
							Optimalisasi Disiplin Aparatur Sekretariat DPRD	%	-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat DPRD
							Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD	%			100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat DPRD
							Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%			100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat DPRD

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM					NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
										2019		2020		2021		2022		2023				
										Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)			
							Sekretariat DPRD															
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD	%			100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	Sekretariat DPRD		
							Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD	%			100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	Sekretariat DPRD		
4	2	3		10	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD						32.47		39.39		93.58		112.88		149.95	149.95	Sekretariat DPRD	
							Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD	%	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat DPRD	
							Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA	%	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat DPRD	
							Persentase Terfasilitasinya informasi DPRD	%	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat DPRD	
							Persentase Terfasilitasinya kegiatan DPRD	%	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat DPRD	
5	3	2		11	Program Kepegawaian Daerah						1.32		1,287		7.63		7.83		8.05	8.05	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	

KODE/FIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM					NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
										2019		2020		2021		2022		2023				
										Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)			
						Mutu Pelayanan Administrasi Kepegawaian Bernilai Baik	Nilai	Baik (76.77)	0	0		Baik (82.39)		Baik (82.89)		Baik (83.39)		Baik (83.39)		Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah		
						Persentase Prestasi Kerja ASN bernilai Baik	%	64.5	0	0		93.00		93.50		94.00		94.00		Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah		
						Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	39.63	0	0		40.00		45.00		50.00		50.00		Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah		
2	24	2		12	Program Pengelolaan Arsip					0.6		0.73		0.83		0.95		0.98		0.98	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
						Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Tertib	%	50.00	50.00		54.00		60.00		70.00		80.00		80.00		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
2	24	3		13	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip					-		-		-		0.57		0.68		0.68	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
						Penambahan khasanah arsip statis pada depo arsip	Boks	2	2		5		10		20		30		30		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
7	1	3		14	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					20.02		170.11		183.25		184.28		184.83		184.83	Kecamatan	
						Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Kecamatan	
7	1	5		15	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					0		0		12.48		12.56		12.84		12.84	Kecamatan	

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
									2019		2020		2021		2022		2023				
									Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)			
						Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Kecamatan
						Nilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)	Nilai	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Sekretariat Daerah (Bag. Pembangunan, Bag. Perekonomian, Bag. Pengadaan barang dan Jasa)
5	2	2		16	Program Pengelolaan Keuangan Daerah					2.76		3.35		3.59		3.64		3.71		3.71	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
						Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Grade	A	A		A		A		A		A		A		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
						Persentase Kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
						Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan Dengan SAP dan tepat waktu	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
						Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPM yang Diterima	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM					NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB	
2019		2020		2021						2022		2023		Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)		
Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target						Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target										Rp (Milyar)
							Presentase OPD yang melaksanakan Administrasi Penatausahaan Keuangan dengan Tertib	%	-		-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3		17		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					0.55		0.67		1.59		1.64		1.74		1.74		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
							Persentase Nilai Aset Antara LBMD Dengan LKPD	%	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
							Jumlah Bidang tanah milik pemkot yang bersertifikat	Sertifikat	241		15		20		554		554		555		2302		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
							Persentase Peningkatan PAD	%	11.10		21.53		11.67		16.91		10.00		10.01		10.01		Sekretariat Daerah (Bag. Pembangunan, Bag. Perekonomian, Bag. Pengadaan barang dan Jasa), Badan Pendapatan Daerah
4	1	3		18		Program Perekonomian dan Pembangunan					0.58		0.70		5.10		7.38		7.59		7.59		Sekretariat Daerah (Bag. Pembangunan, Bag. Perekonomian, Bag. Pengadaan barang dan Jasa)
							Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan	%	-		70.00		70.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan)
							Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi	%	-		10.00		10.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM					NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB				
2019		2020		2021						2022		2023		Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)					
Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target						Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target										Rp (Milyar)			
							Persentase fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	%	-		70.00			70.00			100.00			100.00			100.00			Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)
							Jumlah Bidang Usaha BUMD	Jumlah Bidan g Usaha	-		-			-			5			5			5			Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
							Persentase Peningkatan Deviden BUMD	%	-		2.00			2.00			1.25			2.25			3.00			Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
5	2	4		19	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah							0.678		0.678		3.67		4.48		4.64		4.64			Badan Pendapatan Daerah	
							Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	%	693.072		1.00			1.00		0.80		0.80		0.80		0.80			Badan Pendapatan Daerah	
							Persentase Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	43.04		35.12			56.81		48.67		49.83		50.99		50.99			Badan Pendapatan Daerah	
							Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	%	90.60		91.00			92.00		97.67		97.69		97.71		97.71			Badan Pendapatan Daerah	
							Nilai IKM	Nilai	76.5		77			77.25		76		77.75		79.25		79.25			Badan Pendapatan Daerah	
							Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	78.42		80.98			82.87		84.80		86.77		88.80		88.80			Sekretariat Daerah (Bag. Tata Pemerintahan), Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian, Kecamatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,	

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB	
									2019		2020		2021		2022		2023					
									Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)				
2	21	2		20	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi						0.25		0.25		0.50		1.20		1.01		3.21	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
						Indeks penyelenggaraan pengamanan informasi	Indeks						5		5		5		5		5	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
2	16	3		21	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika						2.89		3.93		11.45		16.56		19.23		54.06	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
						Indeks Pengelolaan sitem Layanan Publik Berbasis Digital	Indeks						3.18		4.08		4.96		4.96		4.96	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
2	16	2		22	Program Informasi dan Komunikasi Publik						0.15		0.06		0.38		2.39		2.46		5.44	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
						Indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan pengaduan dan informasi publik	Indeks	-	-		-		4.28		4.33		4.38		4.38		4.38	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
2	20	2		23	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral						-		-		0.36		0.45		0.45		1.26	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
						Indeks ketersediaan data sektoral berbasis digital	Indeks						3.5		4		5		5		5	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
7	1	2		24	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						40.05		48.60		2.56		3.56		4.65		4.65	Kecamatan

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
									2019		2020		2021		2022		2023				
									Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)			
						Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Kecamatan
2	18	4		25	Program Pelayanan Penanaman Modal					4.35		5.45		6.12		6.38		6.49		6.49	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Persentase penerbitan Perizinan Sesuai SOP pada Pelayanan Publik	%	98.96	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Jumlah Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Mall Pelayanan Publik	Jumlah	32	55		60		105		110		113		113		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	6		26	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal					0.12		0.80		1.20		1.28		1.32		1.32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Persentase Sistem Pelayanan Perizinan yang terintegrasi	%	43.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	10	9		27	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah					15.83		15.89		3.96		4.21		4.56		4.56	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
						Penerbitan Izin Membuka Tanah	%	0.00	23.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
2	12	2		28	Program Pendaftaran Penduduk					9.40		11.40		4.00		4.10		4.22		4.22	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
									2019		2020		2021		2022		2023				
									Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
						cakupan kepemilikan KTP el	%	-	91.4		93.16		94.51		94.82		95.23		95.23		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
						cakupan kepemilikan kartu keluarga	%	-	66.33		94.24		94.97		97.75		99.60		99.60		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
						Cakupan Penerbitan KIA	%	-	-		-		65.00		80.00		95.00		95.00		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	3		29	Program Pencatatan Sipil					0.27		0.27		2.00		2.05		2.11		2.11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
						Cakupan kepemilikan akte kelahiran	%	N/A	66.33		66.96		67.29		67.62		67.96		67.96		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
						Cakupan Kepemilikan akte perkawinan	%	N/A	60.31		60.52		60.55		60.63		60.71		60.71		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
						Cakupan kepemilikan akte kematian	%	N/A	64.23		64.24		64.26		64.32		64.32		64.32		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	4		30	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					0.16		0.16		3.42		3.51		3.57		3.57	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
						persentase ketersediaan data catatan sipil dan administrasi kependudukan yang lengkap dan terbaru	%	-	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	5		31	Program Pengelolaan Profil Kependudukan					0.13		0.13		0.45		0.46		0.47		0.47	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
						Pemutakhiran profil kependudukan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
									2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Milyar)	
									Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)			
					MISI 2 : MEMBANGUN. MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN PRASARANA DAN SARANA KOTA YANG MAJU DAN MEMADAI																
					TUJUAN : Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah, kreatif dan aksesibel	Indeks Infrastruktur wilayah	%	35.99	N/A		N/A		44.96		48.44		52.35		56.92		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
					SASARAN : Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	%	19.96	N/A		N/A		20.18		20.38		20.57		20.94		Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air,
1	3	4		32	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional								15.43		16.26		17.23		48.92		Dinas Lingkungan Hidup
						Luasan Zona Buang Yang Terbangun	Ha					1		1		1		3		Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	11		33	Program Pengelolaan Persampahan					26.09		31.66		25.17		85.49		87.94		80.77	Dinas Lingkungan Hidup
						Persentase Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	24.94	26.00		27.00		24.00		26.00		27.00		27.00		Dinas Lingkungan Hidup
						Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA	Point	71.72	73.00		73.00		73.00		73.00		73.00		73.00		Dinas Lingkungan Hidup

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
									2019		2020		2021		2022		2023				
									Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)			
						Persentase sampah yang terangkut ke TPA	%	67.15	74.00		70.00		64.00		63.00		62.00		Dinas Lingkungan Hidup		
						Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	70.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Lingkungan Hidup		
1	3	6		34	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase				107.79		130.79		230.23		241.49		235.87		235.87	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air	
						Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	65%	N/A		N/A		67.14		67.92		68.89		68.89	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air	
1	3	2		35	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				46.74		46.74		48.25		48.65		48.72		48.72	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air	
						Presentase Pembangunan Polder	%	3.074.498 m³	N/A		N/A		64.48		71.37		74.29		3.284.498.00 m³	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air	
						Presentase Pemeliharaan Polder	%	149.889 m³	N/A		N/A		5.14		6.24		7.34		225.58 5.37 m³	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air	
1	3	10		36	Program Penyelenggaraan Jalan				239.55		256.66		208.86		210,34		210,45		210,45	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air	
						Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi baik	Point	0.715	N/A		N/A		0.73		0.74		0.751		0.751	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air	
						Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (> 40km/jam)	%	91.3	N/A		N/A		95.76		97.20		98.60		98.60	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air	
						Presentase Pembangunan Jembatan Baru	%	44.9	N/A		N/A		47.88		53.09		53.24		53.24	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air	

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
									2019		2020		2021		2022		2023				
									Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)			
						Persentase Pemeliharaan Jembatan	%	90	N/A		N/A		93.03		92.70		93.38		93.38	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air	
						Persentase Jalan yang memiliki Trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)	%	18.50%	N/A		N/A		19.69		20.08		20.48		20.48	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air	
						Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	%	67.60	N/A		N/A		74.24		80.08		89.34		89.34	Dinas Perhubungan	
2	15	2		37	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)					15.75		15.75		15.84		15.92		15.97		15.7	Dinas Perhubungan
						Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan	%	80.00	n/a		n/a		85.00		91.00		91.70		91.70	Dinas Perhubungan	
						Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi	%	20.00	n/a		n/a		40.00		60.00		100.00		100.00	Dinas Perhubungan	
						Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas	%	2.00	n/a		n/a		2.26		10.60		11.70		11.70	Dinas Perhubungan	
						Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal	%	50.00	n/a		n/a		50.00		60.00		70.00		70.00	Dinas Perhubungan	
						persentase kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor	%	70,00 (59.000 kendaraan)	75,00 (63.750 kendaraan)		76,00 (64.450 kendaraan)		77,00 (65.450 kendaraan)		78,00 (66.300 kendaraan)		80,00 (68.000 kendaraan)		80,00 (68.000 kendaraan)	Dinas Perhubungan	

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
									2019		2020		2021		2022		2023				
									Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)			
						Indeks Penataan Ruang	%	48.28	44.76		49.48		57.95		62.67		67.19		89.27		Dinas Tata Ruang, Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
1	3	1 2		38	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang					7,74		7,98		8.23		8.47		8.73		8.73	Dinas Tata Ruang/Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
						Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	%	50.00	60.00		65.00		70.00		75.00		80.00		80.00		Dinas Tata Ruang/Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
						Jumlah Rencana Pembangunan Infrastruktur Kota yang Sesuai dengan Tata Ruang Kota	Dokumen	1	1		1		1		1		1		6		Dinas Tata Ruang
						Jumlah Rencana Penataan Kawasan Strategis Kota yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota	Dokumen	3	1		1		1		1		1		8		Dinas Tata Ruang
						Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan	%	18.17	18.64		18.76		18.88		19.00		19.12		19.12		Dinas Tata Ruang
						Persentase Penyerahan 150 PSU pada tahun 2023	%	17.00	34.00		51.00		68.00		85.00		100.00		100.00		Dinas Tata Ruang
						Persentase penataan dan pemeliharaan reklame	Buah	16 bh	N/A		N/A		8		8		8		16		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM					NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
										2019		2020		2021		2022		2023				
										Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
							Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan	%	24.15	36.65		45.03		52.25		58.70		64.09		64.09		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan, Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air, Dinas Tata Ruang
1	3	5			39	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah					22.17		22.49		8.45		9.85		10.45		10.45	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
							Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestik	%	3.39	6.40		9.42		13.10		17.02		20.94		20.94		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
1	4	2			40	Program Pengembangan Perumahan					28,505		34,587		28,093		29,607		31,115		31,115	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
							Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	%	23.88	37.75		44.68		51.61		59.85		66.79		66.79		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
							Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	%	5.32	7.99		10.65		13.30		15.97		18.64		18.64		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
							Persentase Penyediaan/ Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	%	0	91.56		93.70		95.84		97.98		100.00		100.00		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
1	4	4			41	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh					22.17		26.90		25.85		26.51		27.18		27.18	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
							Persentase Luasan Permukiman kumuh	%	29.07	44.87		53.22		66.76		84.41		100.00		100.00		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM					NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB	
2019		2020		2021						2022		2023		Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)		
Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target						Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target										Rp (Milyar)
							dikasawan perkotaan																
1	3	7		42	Program Pengembangan Permukiman						0.00		0.00		106.56		108.67		109.85	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air/Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan			
						Persentase peningkatan pembangunan PJU Baru	%	49.98%	N/A		N/A		52.41		53.3		54.18		54.18	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air			
						Presentase Pemeliharaan PJU	titik	45004 titik	N/A		N/A		11250 titik		11250 titik		11250 titik		45004 titik	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air			
						Persentase Luasan Permukiman yang tertata	%					7.84		9.80		11.76		11.76		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan			
2	10	4		43	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan						0.15		0.15		0.15		0.18		0.21	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan			
						Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan			
2	10	5		44	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan						305.74		230.69		222.19		209.13		210.25	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan			
						Persentase Pemenuhan pengadaan tanah	%	67,333	23.00		43.00		63.00		81.00		100.00		100.00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan			

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM					NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
										2019		2020		2021		2022		2023				
										Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
1	3	3		45	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					13		17.75		9.73		12.86		13.78		13.78	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan	
						Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	26.7	27.14		28.19		29.23		30.27		31.32		31.32		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan	
1	4	5		46	Program Peningkatan Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum (PSU)					46.11		56.11		72.47		73.16		74.61		74.61	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan	
						Cakupan Yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	1840	28.01		29.65		33.18		36.71		40.23		36.71		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan	
						Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum	Rasio	6	6.13		6.3		6.5		6.7		6.91		4.76		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan	
1	3	8		47	Program Penataan Bangunan Gedung					19.00		23.05		98.56		100.57		100.73		100.73	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan	
						Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi	%	50.00	25.53		63.83		82.98		93.62		100.00		100.00		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan	
						Persentase dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan	%	-	-		-		-		90.00		90.00		90.00		Dinas Tata Ruang	
					MISI 3 : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN BERBASIS POTENSI JASA KREATIF DAN PERDAGANGAN YANG BERDAYA SAING																	

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM					NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
										2019		2020		2021		2022		2023				
										Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
						TUJUAN : Memperkuat struktur perkonomian kota dengan fokus pengembangan ekonomi kreatif.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.86	5.86		0.08		3.17		4.25		5.32	5.32		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan,	
						SASARAN 1 : Meningkatnya Iklim Usaha danInvestasi	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	Rp10.460.0 53.504.800	10.00		10.00		4.00		4.00		4.00	4.00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	2		48	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal						0.19		0.23		0.87		0.89		0.92	0.92	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
							Persentase Kenaikan Penanaman Modal berdasarkan LKPM	%	Rp. 6.372.571.6 00.000.00	10.00		10.00		4.00		4.00		4.00	4.00			
2	18	3		49	Program Promosi Penanaman Modal						0.32		0.39		0.42		0.54		0.65	0.65	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
							Jumlah izin terbit dan izin terbit dengan pemenuhan komitmen pada DPMPISP	Jumlah	49.973 izin	-		-		12,103		7.866		5.113	5.113		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	5		50	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal						0.19		0.23		0.68		0.73		0.78	0.78	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
									2019		2020		2021		2022		2023				
									Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
						Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	%	397 Perusahaan	25.00		38.00		24.00		26.00		28.00		28.00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				SASARAN 2 : Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka	Angka Kemiskinan	%	4.11	3.81		8.58		5.70		4.72		4.01		4.01		Dinas Sosial	
					Gini Ratio	Nilai	0.35	0.35		0.35		0.35		0.34		0.34		0.34		Dinas Sosial	
1	6	5		51	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					1.03		1.25		2.45		2.51		2.62		2.62	Dinas Sosial
					Prosentase Peningkatan Pendayagunaan data dan informasi Penyandang g Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS)	%	-	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Sosial	
						Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9.07	8.23		8.77		8.60		8.40		8.30		8.30		Dinas Tenaga Kerja
2	7	2		52	Program Perencanaan Tenaga Kerja					0.20		0.24		0.25		0.60		0.60		0.60	Dinas Tenaga Kerja
					Prosentase Cakupan Ketersedian dokumen	%							20.00		20.00		20.00		20.00		Dinas Tenaga Kerja

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM					NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
										2019		2020		2021		2022		2023				
										Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
2	7	3			53	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja					0.20		0.24		2.05		2.10		2.16		2.60	Dinas Tenaga Kerja
						Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja		%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Tenaga Kerja
						Persentase peningkatan kompetensi bagi pencari kerja		%				20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		Dinas Tenaga Kerja
2	7	4			54	Program Penempatan Tenaga Kerja					0.26		0.32		0.50		0.51		0.53		0.53	Dinas Tenaga Kerja
						Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan		%	60.83	60.83		61.15		61.22		61.78		62.09		62.09		Dinas Tenaga Kerja
						Persentase Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) berizin		%	-	-		-		10.00		10.00		10.00		10.00		Dinas Tenaga Kerja
2	7	5			55	Program Hubungan Industrial					0.26		0.32		0.60		0.62		0.63		0.63	Dinas Tenaga Kerja
						Persentase penanganan seengketa pengusaha dengan pekerja		%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Tenaga Kerja
						SASARAN 3: Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor ekonomi kreatif	%	N/A	7.64		9.43		11.63		14.35		17.70		17.70		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian,

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM					NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
										2019		2020		2021		2022		2023				
										Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
2	17	7		56	Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. dan Usaha Mikro (UMKM)						0.479		0.581		1.05		1.27		1.30		1.30	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
						Persentase PKL yang Menempati Tempat yang telah Ditetapkan	%	613 PKL	5.00		15.00		15.00		15.00		10.00		988 PKL		Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	
3	26	2		57	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata						0.5		0.6		0.69		0.74		0.79		0.79	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
						Jumlah kawasan wisata yang ditata	Lokasi	2	1		1		1		1		1		7		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3	26	3		58	Program Pemasaran Pariwisata						0.50		0.61		0.34		0.37		0.40		0.40	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
						Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	907729	925883		944,40 0		963,28 8		982,55 3		1,002, 204		10022 04 orang		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3	26	5		59	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						0.15		0.15		0.15		0.18		0.21		0.21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
						Jumlah SDM yang ditingkatkan kopetensinya sesuai dengan perkembangan dan Tren Kepariwisataan	orang	N/A	0		75		75		150		150		300		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2	22	5		60	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya						1.25		1.52		0.70		0.72		0.74		0.74	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
									2019		2020		2021		2022		2023				
									Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
						Jumlah Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Situs	8	3		3		4		4		5		27		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	3		61	Program Pengembangan Kesenian Tradisional					0.25		0.30		0.35		0.36		0.37		0.37	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
						Jumlah Penyelenggaraan event bekasi kreatif	Event	6	8		5		7		9		11		16 event		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	17	2		62	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam					0.07		0.07		0.15		0.18		0.23		0.23	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
						Persentase Koperasi yang memiliki Izin Simpan Pinjam	%	N/A					3.27		13.07		8.17		150 unit		Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
2	17	8		63	Program Pengembangan UMKM					0.24		0.24		1.89		1.95		2.17		2.17	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
						Persentase peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi usaha Kecil	%	2.086 Usaha Mikro	2.00		2.00		1.00		1.00		1.00		115 Usaha Kecil		Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
						Persentase jumlah pelaku UMKM kreatif	%	1.000 Unit	10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		1300 unit		Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
2	17	3		64	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi					0.19		0.23		0.27		0.31		0.36		0.36	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
						Jumlah Koperasi yang Beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	unit	N/A	0		0		100 Unit		100 Unit		100 Unit		376 Unit		Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM					NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB	
										2019		2020		2021		2022		2023					
										Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)		Target
2	17	4		65	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi						0.03		0.03		0.54		0.61		0.72		0.72	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	
						Persentase Koperasi yang telah Tersertifikasi Kesehatannya	%	30 Koperasi (data tahun 2017-2019)					8.17		8.17		8.17		180 Unit			Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	6		66	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi						0.28		0.34		0.36		0.39		0.42		0.42	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	
						Peningkatan Skala Usaha Koperasi	Koperasi	N/A	2 Unit		2 Unit		2		2		2		10 Koperasi			Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	5		67	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian								0.35		0.41		0.48		0.48		0.48	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	
						Jumlah Pengurus Koperasi yang telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian	Orang	100 orang pengurus dan pengawas				100 orang pengu rus		100 orang pengu rus		100 orang pengu rus		100 orang pengu rus		400 orang pengu rus			Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
3	31	3		68	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri						0.62		0.75		0.81		0.83		0.85		0.85	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
						Persentase peningkatan fasilitas terhadap Industri kecil dan menengah	%	-	-	-	-	-	3.00		3.00		3.00		3.00			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM					NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
										2019		2020		2021		2022		2023				
										Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
					SASARAN 4: Menguatnya daya saing sektor perdagangan dan jasa	Persentase peningkatan nilai sektor perdagangan dan jasa	%	Rp20.480.0 00.000.000	8.84		8.84		8.84		8.84		8.84		Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan			
3	30	5		69	Program Pengembangan Ekspor					0.31		0.38		0.38		0.41		0.45		Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
						Nilai ekspor Kota Bekasi	US Dollar	USD 263.574.932	USD 266.210. 681		USD 268.87 2.788		USD 450.00 0.000		USD 475.00 0.000		USD 500.00 0.000		Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
3	30	3		70	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					0.62		0.75		0.61		0.64		0.67		Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
						Jumlah pasar rakyat bersih yang berbasis modern	Unit	5	7		9		8		9		10		10		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3	30	6		71	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen					0.62		0.75		0.86		0.89		0.93		Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
						Persentase pertumbuhan alat UTTP yang ditera/tera ulang	%	13.000 unit	18.9		13,792		4.00		5.00		6.00		23.150 unit		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
2	9	3		72	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat					0.15		0.16		1.46		1.48		1.54		Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan		
						Stabilisasi harga pangan	%	3.7	<5.00		<5.00		<5.00		<5.00		<5.00		<5.00		Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan	
						Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	%	86.7	88		88.5		87.94		87.97		88.00		88.00		Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan	

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
									2019		2020		2021		2022		2023				
									Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)			
					SASARAN 5 : Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Peningkatan Pengeluaran perkapita	%	15,755.00	2.55		-10.00		3.00		3.00		3.00		3.00	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan	
2	9	4		73	Program Penanganan Kerawanan Pangan					0.17		0.21		14.85		14.93		16.87		16.87	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan
						Persentase Penanganan kerawanan pangan	%	69.58	73.76		76.76		80.58		84.00		86.80		86.80	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan	
2	9	5		74	Program Pengawasan Keamanan Pangan					0.35		0.42		0.48		0.53		0.56		0.56	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan
						Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	69.07	75.26		82.00		84.00		85.60		88.00		88.00	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan	
3	27	2		75	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian					0.73		0.89		0.92		0.94		0.97		0.97	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan
						Produksi komoditas pertanian	Ton	23,185	27.882.5 0		30.670 .7		34.25. 000		32.442 .17		33.515 .00		33.515 .00	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan	
						Jumlah produksi peternakan	Ton	10.416.00	15.420.0 0		10.657 .00		10.765 .00		10.877 .00		10.985 .00		10.985 .00	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan	
						Jumlah produksi olahan Hasil peternakan	Ton	3.511.24	3.582.24		3.654. 3		3700		3.721. 50		3.777. 24		3.777. 24	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan	
3	27	4		76	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					0.36		0.44		0.48		0.52		0.56		0.56	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM					NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB		
										2019		2020		2021		2022		2023						
										Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)		Target	Rp (Milyar)
							Terkendalnya Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis	Kasus	tidak ada	tidak ada		tidak ada		tidak ada		tidak ada	-	tidak ada		Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan				
							Unit Usaha Pernakan Kesehatan dan Produk hewan yang bersertifikat teknis	unit	53	61		69		65		70		90	-	75	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan			
							Persentase produk PAH yang ASUH	%	42.50	42.93		43.35		44.00		44.70		46.00		46.00	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan			
3	25	3		77	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya						0.27		0.28				0.85		0.87		0.90		0.90	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan
							Jumlah produksi ikan konsumsi	Ton	1.856,36	1.874,92		1.893, 6		1.910		1.946, 42		1.955, 24		1.955, 24				Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan
							Jumlah Produksi Ikan Hias	ekor	18.622.238	20.616.8 36		21.649 .777		22.737 .661		23.863 .844		25.110 .221		25.110 .221				Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan
3	25	5		78	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan						0.7		0.7		0.72		0.76		0.80				2.28	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan
							Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	82.745.20	86.882.4 6		88.135 .58		89.130 .50		90.207 .31		92.036 .18		92.036 .18				Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan
							Laju Inflasi	%	4.23	3.89		2.00		2.92		3.21		3.53		3.53				Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	4		79	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting						0.62		0.75		0.78		0.81		0.85				0.85	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
							Laju inflasi kelompok	%	<1.50	<1.50		<1.50		<4.00		<4.00		<4.00		<4.00				Dinas Perdagangan dan Perindustrian

KODEFIKASI URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
									2019		2020		2021		2022		2023				
									Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)			
						pengeluaran bahan makanan															
				MISI 4 : MENINGKATKAN DAN MENGEKSPANSI KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERPENGETAHUAN, SEHAT, BERAKHLAK MULIA, KREATIF DAN INOVATIF.																	
					TUJUAN : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berakhlak Mulia	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81.04	81.59		81.59		82.31		82.67		83.04		83.04	Dinas Pendidikan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, Dinas Kesehatan. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan. Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemuda dan Olahraga	
					SASARAN 1 : Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif	Indeks Pendidikan	Nilai	73.96	75.19		75.63		76.06		76.51		76.95		76.95	Dinas Pendidikan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, Dinas Kesehatan. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan.	
2	23	2		80	Program Pembinaan Perpustakaan					0.3		0.3		1.21		1.32		1.38		1.38	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
						Presentase Perpustakaan Aktif	%	N/A	2.00		2.00		5.00		10.00		15.00		20.00		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
						Presentase Pengunjung Perpustakaan	%	18.20	35.00		35.00		15.00		20.00		25.00		25.00		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
1	1	2		81	Program Pengelolaan Pendidikan					148.7		180.43		697.36		700.69		702.62		702.62	Dinas Pendidikan /Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
						Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik	%	359	36.11		50.00		66.67		83.33		100.00		100.00		Dinas Pendidikan /Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB		
2019		2020							2021		2022		2023		Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)		Target	Rp (Milyar)
Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)						Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)									
						Persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam Kondisi Baik	%	59.00	28.57		38.10		57.14		76.19		100.00		100.00		Dinas Pendidikan /Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan		
						Persentase Sarana dan Prasarana PendidikanAnak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	%	6.00	20.00		40.00		60.00		80.00		100.00		100.00		Dinas Pendidikan /Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan		
						APM SD	%	97.27	114		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Pendidikan		
						APM SMP	%	83.82	83.93		95.25		97.56		96.16		100.00		84.86		Dinas Pendidikan		
						APM PAUD	%		49.81		54.00		56.43		58.84		61.43		61.43		Dinas Pendidikan		
						Angka kelulusan pendidikan kesetaraan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Pendidikan		
						SD Negeri Terakreditasi A	%	77.83	89.85		90.00		90.25		90.4		90.45		90.00		Dinas Pendidikan		
						SMP Negeri Terakreditasi A	%				90.00		90.00		90.00		90.00		86.00		Dinas Pendidikan		
						Capaian Perolehan Prestasi Tingkat Propinsi, Nasional, Internasional Jenjang Pendidikan Dasar	Jumlah	50	52		54		56		58		60		280		Dinas Pendidikan		
1	1	4		82	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan					32.42		39.34		40.82		40.97		41.14		41.14	Dinas Pendidikan		
						Persentase pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan	%						70.00		75.00		80.00		80.00		Dinas Pendidikan		

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
									2019		2020		2021		2022		2023				
									Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
						pendidikan dasar															
						Cakupan Pelayanan Berbasis IT	%					20.00		30.00		40.00		40.00		Dinas Pendidikan	
1	1	5		83	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan					4.2		4.24		5.35		5.52		5.65		5.65	Dinas Pendidikan
						Presentase pendidikan Dasar terakreditasi B	%	77.83	89.85		90.00		90.25		90.40		90.45		90.00		Dinas Pendidikan
						PAUD Terakreditasi	%				10.00		15.00		20.00		25.00		38.04		Dinas Pendidikan
						Lembaga Pendidikan Non Formal Terakreditasi	%	8.59	24.00		33.43		35.97		36.11		38.04		100.00		Dinas Pendidikan
					SASARAN 2 : Terwujudnya masyarakat Kota bekasi yang sehat	Indeks Kesehatan	Nilai	84.45	84.5		84.5		84.55		84.6		84.65		84.65		Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kesehatan. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
1	2	5		84	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					23.3		28.27		28.89		29.38		29.45		29.45	Dinas Kesehatan.
						Cakupan rumah tangga Ber- PHBS	%	58	61.9		60.00		61.90		64.00		65.00		65.00		Dinas Kesehatan
1	2	2		85	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					99.31		120.5		983.21		984.89		987.03		987.03	Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
									2019		2020		2021		2022		2023				
									Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)			
						Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)	%	34.00	11.00		22.00		22.00		22.00		23.00		100.00		Dinas Kesehatan. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan. Rumah Sakit Umum Daerah
						Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi	%	5.00	33.33		50.00		66.67		83.33		100.00		100.00		Dinas Kesehatan. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
						persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas	%	60.00	60.00		60.00		60.00		60.00		60.00		60.00		Dinas Kesehatan
						persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Type B	%	82.00	82.00		83.50		82.50		82.75		83.00		83.00		Rumah Sakit Umum Daerah
						persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Type D	%	60.00	60.00		60.00		60.00		60.00		60.00		60.00		Dinas Kesehatan
						Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	47.62	64.29		71.43		71.43		83.33		84.61		83.33		Dinas Kesehatan
						persentase Rumah sakit Terakreditasi	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah
						terpenuhinya pemeliharaan 10 jenis sarana dan prasarana rumah sakit	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		12.00		12.00		Rumah Sakit Umum Daerah

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
									2019		2020		2021		2022		2023				
									Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)			
						Capaian IKM Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Type B	Indeks	80.00	80.00		81.00		81.00		82.00		83.00		83.00		Rumah Sakit Umum Daerah
						persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan Rumah Sakit	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah
						Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Kesehatan
						Persentase cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah
						Prevalensi Balita Status Gizi Stunting	%	12.16	10.69		10.20		10.00		9.80		9.50		9.50		Dinas Kesehatan
						persentase Institusi dan fasilitas umum memenuhi syarat kesehatan	%	62.00	62.00		65.00		66.97		72.00		75.00		75.00		Dinas Kesehatan
						Ketersediaan Puskesmas di Kelurahan	Puskemas	42.00	42.00		43.00		43.00		52.00		56.00		56.00		Dinas Kesehatan
						Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Kesehatan
						Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Kesehatan

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
									2019		2020		2021		2022		2023				
									Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)			
						Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Kesehatan		
						Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Kesehatan		
						Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Kesehatan		
						Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Kesehatan		
						Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Kesehatan		
						Persentase Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Kesehatan		
						Persentase Warga Negara penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Kesehatan		

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
									2019		2020		2021		2022		2023				
									Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)			
						Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	Dinas Kesehatan		
						Persentase Warga Negara penderita terduga Tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	Dinas Kesehatan		
						Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficien cy Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	Dinas Kesehatan		
1	2	4		86	Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan dan Makanan Minuman				69.9	84.81		84.87		84.97		85.01		85.01	Dinas Kesehatan		
						persentase jumlah sarana kefarmasian yang memenuhi standar kesehatan	%	90.00	90.00	91.00		91.72		93.00		95.00		95.00	Dinas Kesehatan		

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
									2019		2020		2021		2022		2023				
									Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
						persentase jumlah produk pangan industri rumah tangga (PIRT) berlabel yang memenuhi standar kesehatan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	Dinas Kesehatan	
1	2	3		87	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					42.18		43.21		45.21		45.59		45.96		45.96	Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
						persentase ketersediaan SDM kesehatan di puskesmas dan RS	%	70.00	70.00		80.00		81.20		100.00		100.00		100.00	Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
					SASARAN 3 : Meningkatnya kesejahteraan sosial dan keluarga	Indeks pembangunan gender	Nilai	93.26	93.02		93.29		93.56		93.83		94.10		94.10	Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	6	2		88	Program Pemberdayaan Sosial					0.69		0.83		5.45		5.59		5.75		5.75	Dinas Sosial
						Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ditangani oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat	%	null	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	Dinas Sosial	

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
									2019		2020		2021		2022		2023				
									Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)			
						Persentase Peningkatan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat	%	-	-	-		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Sosial	
1	6	4		89	Program Rehabilitasi Sosial					1.03		1.25		14.15		14.47		14.83		14.83	Dinas Sosial
						Persentase penyandan g disabilitas telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Sosial
						Persentase anak telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Sosial
						Persentase lanjut usia telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Sosial
						Persentase tuna sosial khususnya gelandan gan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Sosial
1	6	6		90	Program Penanganan Bencana								2.21		2.43		2.60		2.60		Dinas Sosial

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM					NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB	
2019		2020		2021						2022		2023		Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)		
Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target						Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target										Rp (Milyar)
							Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Sosial			
2	14	4		91	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)						0.98		1.19		1.56		1.76		1.85	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
						Jumlah PPKS Aktif di Kecamatan	unit	3	3	5		6		7		8		8		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
						Persentase Cakupan anggota poktan yang ber KB.	%	50.00	50.00	53.00		55.00		60.00		65.00		65.00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2	14	3		92	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)						0.59		0.59		2.95		3.03		3.12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
						Persentase pemakaian kontrasepsi/CP R bagi perempuan Menikah	%	60.00	75.50	76.50		77.00		77.50		78.00		78.00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2	14	2		93	Program Pengendalian Penduduk						75.5		2.37		2.43		2.49		2.56	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
						Presentase Cakupan Data Mikro Keluarga	%	60.00	60.00	70.00		75.00		80.00		85.00		85.00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2	8	3		94	Program Perlindungan Perempuan						0.83		0.5		1.00		1.03		1.06	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
						Presentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
									2019		2020		2021		2022		2023				
									Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
2	8	7		95	Program Perlindungan Khusus Anak					0.5		0.5		2.48		2.55		2.58		2.58	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2		96	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan					0.50		0.6		2.00		2.05		2.11		2.11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	49.00	49.00		49.90		49.90		49.90		49.90		49.90		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6		97	Program Pemenuhan Hak Anak					0.9		0.9		1.53		1.57		1.62		1.62	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Presentase Peningkatan Pemenuhan 5 Klaster KLA	%	-	-		69.00		73.00		76.00		79.00		79.00		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					SASARAN 4 : Meningkatnya partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Jumlah prestasi pemuda tingkat provisis, nasional dan internasional	Prestasi	NA	10 TP, 2 TN		15 TP, 4 TN		20 TP, 6 TN		25 TP, 8 TN		30 TP, 10 TN, 1 TI		30 TP, 10 TN, 1 TI		Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	2		98	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					0.51		0.62		1.77		1.82		1.87		1.87	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	50.00	60.00		70.00		80.00		90.00		100.00		100.00		Dinas Pemuda dan Olahraga

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM					NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
										2019		2020		2021		2022		2023				
										Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
							Persentase Komunitas Kreatif yang berperan dalam pembangunan	%	N/A	0		20.00		35.00		50.00		65.00		65.00		Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	3		99	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					1.27		1.54		12.54		13.68		14.89		14.89		Dinas Pemuda dan Olahraga
						Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	N/A	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		Dinas Pemuda dan Olahraga	
						Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Representatif	%	N/A	50.00		55.00		60.00		65.00		70.00		70.00		Dinas Pemuda dan Olahraga	
						Cakupan Pembinaan Olahraga	%	N/A	60.00		65.00		70.00		75.00		80.00		80.00		Dinas Pemuda dan Olahraga	
						Persentase Pelatih Yang Bersertifikat	%	N/A	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	4		100	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan								1.09		1.12		1.15		1.15		Dinas Pemuda dan Olahraga	
						Presentase Gugus Depan Aktif	%						50.00		60.00		70.00		70.00		Dinas Pemuda dan Olahraga	
				MISI 5 : MEMBANGUN. MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN KOTA YANG AMAN DAN CERDAS. SERTA LINGKUNGAN HIDUP YANG NYAMAN																		
					TUJUAN 1 : Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman	Persentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	%	45.00	7.20		5.96		4.94		4.09		3.39		3.39		SATPOL PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pemadam Kebakaran	
						Indeks risiko bencana	Nilai	132	132		127		122		118		113		113		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM					NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
										2019		2020		2021		2022		2023				
										Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
					SASARAN 1: Terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	%	45.00	7.20		5.96		4.94		4.09		3.39		3.39		SATPOL PP, Kecamatan,	
1	5	2		101	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					8,071		9,792		18.86		20.72		22.54		22.54	SATPOL PP	
						Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	Rasio	1:31	1:31		-		1:31		1:31		1:31		1:31		SATPOL PP	
						Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketenteraman. keindahan)	%	60.00	60.00		-		100.00		100.00		100.00		100.00		SATPOL PP	
						Persentase penegakan pelanggaran perda	%	60.00	5.00		-		100.00		100.00		100.00		100.00		SATPOL PP	
7	1	4		102	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum					1.028		1.302		1.95		2.12		2.45		2.45	Kecamatan	
						Persentase wilayah tertib K3	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Kecamatan	
						Prosentase kerjasama antar kelompok sara	%	-	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM					NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
										2019		2020		2021		2022		2023				
										Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)			
8	1	3			103	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					0.35		0.35		1.97		2.02		2.08		2.08	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							Persentase Pembinaan Politik Daerah	%	1.65	3.00		5.00		5.00		5.00		5.00		23.00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4			104	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					0.39		0.47		2.84		2.91		2.99		2.99	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina	%	-	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5			105	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					0.7		0.75		0.80		0.80		0.90		0.90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							Cakupan Masyarakat yang mebnapat pembinaan peningkatan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya	%	-	-		-		0.15		0.17		0.18		0.18		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM					NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
										2019		2020		2021		2022		2023				
										Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
8	1	2			106	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					4.00		8.00		1.00		1.03		1.06		1.06	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	5.00	10.00		10.00		15.00		30.00		50.00		50.00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6			107	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial					0.40		0.80		0.82		0.84		0.86		0.86	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							Persentase penanganan konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan	%	1000 Pantauan	200 Pantauan		200 Pantauan		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						SASARAN 2: Terwujudnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risio bencana	Indeks risiko bencana	Nilai	132	132		127		122		118		113		113		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3			108	Program Penanggulangan Bencana					1.88		1.88		1.88		1.98		2.05		2.05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							Persentase kemampuan aparaturnya dan masyarakat dalam	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM					NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB	
2019		2020		2021						2022		2023		Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)		
Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target						Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target										Rp (Milyar)
							menghadapi bencana																
							Presentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
							Persentase program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
							persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
							persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
							Indeks Penanggulangan Kebakaran	Nilai	56.24	59.13		64.03		68.28		73.43		78.68		78.68		Dinas Pemadam Kebakaran	
1	5	4		109	Program Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						0.89		1.08		12.00		13.27		14.56		14.56	Dinas Pemadam Kebakaran	

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
									2019		2020		2021		2022		2023				
									Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)			
						Persentase layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran (BALAKR)	%	30.00	40.00		50.00		60.00		70.00		75.00		75.00		Dinas Pemadam Kebakaran
						Persentase pencapaian layanan150 publikasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	%	25.80	11.70		15.60		15.60		15.60		15.70		100.00		Dinas Pemadam Kebakaran
						Persentase layanan pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran	%	15.00	25.00		35.00		40.00		45.00		50.00		50.00		Dinas Pemadam Kebakaran
						Persentase layanan pendataan dan inspeksi dan investigasi pasca kebakaran	%	73.00	78.00		83.00		88.00		93.00		100.00		100.00		Dinas Pemadam Kebakaran
						Persentase layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran	%	73.00	75.00		77.00		79.00		80.00		81.00		81.00		Dinas Pemadam Kebakaran
						Persentase Layanan Penyelematan dan evakuasi korban kebakran serta non kebakaran	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Pemadam Kebakaran

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM					NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
										2019		2020		2021		2022		2023				
										Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)			
							Presentase penyediaan sarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan	%	17.00	25.00		32.00		39.00		46.00		53.00		53.00		Dinas Pemadam Kebakaran
							Presentase penyediaan Prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan	%	50.00	50.00		58.00		67.00		83.00		100.00		100.00		Dinas Pemadam Kebakaran
					TUJUAN 2 : Mewujudkan Kota Bekasi yang nyaman		Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	N/A	49.00		52.00		61.02		61.93		62.85		62.85		Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air, Dinas Sosial, Dinas Sosial
					SAARAN 1 : Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan Kota yang Berkelanjutan		Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	N/A	49.00		52.00		61.02		61.93		62.85		62.85		Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air, Dinas Sosial, Dinas Sosial
2	11	3		110	Program Pengendalian Pencemaran dan /Atau Kerusakan Lingkungan Hidup						41.04		49.8		25.08		29.9		30.87		85.85	Dinas Lingkungan Hidup
							Indeks kualitas air	Nilai	4 (6.44)	3 (IP=1- 5)		3 (IP=1 -5)		3 (IP=1 -5)		3 (IP=1 -5)		3 (IP=1 -5)		3 (IP=1 -5)		Dinas Lingkungan Hidup
							Indeks kualitas udara	Nilai	82	83		83.4		83.8		84.2		84.6		84.6		Dinas Lingkungan Hidup
2	11	5		111	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)						1.50		1.72		1.80		1.92		1.97		1.97	Dinas Lingkungan Hidup

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
									2019		2020		2021		2022		2023				
									Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
						Persentase Usaha Kegiatan yang Memiliki TPS Limbah B3	%	40.00	45.00		50.00		55.00		60.00		65.00		65.00		Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6		112	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					0.80		0.85		0.90		0.95		1.00		1.00	Dinas Lingkungan Hidup
						Persentase pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	40.35	50.00		52.00		55.00		60.00		65.00		65.00		Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4		113	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)					5.00		5.00		7.03		7.24		7.36		7.45	Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
						Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Laporan	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Dinas Lingkungan Hidup
						Presentase Pembangunan Taman Baru	%	15.70	NA		NA		18.03		18.82		19.60		19.60		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air

KODEFIKASI URUSAN/ URUSAN/ BIDAN G URUSAN/ PROGRAM				NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB	
									2019		2020		2021		2022		2023					
									Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)		Target
						Presentase Pemeliharaan Taman	%	44.39					64.95		78.65		94.13		94.13		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air	
2	11	10		114	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup						15.39		18.67		2.38		2.45		2.85		2.85	Dinas Lingkungan Hidup
						Persentase Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat tentang Permasalahan Lingkungan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	8		115	Program Peningkatan Pendidikan. Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat						1.22		1.46		1.62		1.85		2.10		2.10	Dinas Lingkungan Hidup
						Persentase institusi/ kelompok masyarakat/ lingkungan yang peduli lingkungan	%	NA	30.00		40.00		50.00		60.00		70.00		70.00		Dinas Lingkungan Hidup	
1	6	7		116	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan						0.14		0.17		2.15		2.21		2.26		2.26	Dinas Sosial
						Prosentase Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	1.00	1.00		1.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Sosial	



BAB 7

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu: 1. Penjabaran visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih; 2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah; 3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM); 4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses, dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup; dan 5. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi.

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi/Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Tahun 2018-2023 disajikan pada tabel 7.1. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

- Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
- Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
- Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
- Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Rencana program perangkat daerah Kota Bekasi untuk periode Tahun 2019 sampai dengan 2023 berjumlah 112 program sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019 dan dalam Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2018-2023 setelah diselaraskan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku menjadi 116 Program, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Kota Bekasi, serta fungsi

penunjang urusan pemerintahan daerah. Program perangkat daerah Kota Bekasi disajikan berdasarkan urusan/fungsi penunjang pada Tabel 7.2. Untuk mendukung pelaksanaan program dianalisis pada Bab III RPJMD ini. Sebagaimana telah dijelaskan perangkat daerah, maka dialokasikan anggaran belanja langsung sebagaimana telah dihitung dan dalam bab 3 terdapat 2 (dua) kategori belanja langsung yang dijabarkan dalam rencana belanja Kota Bekasi 2019-2023 yakni prioritas 1 dan prioritas 2. Prioritas 1 adalah belanja langsung yang berkaitan dengan kegiatan penunjang urusan di tiap perangkat daerah. Sementara prioritas 2 adalah belanja langsung yang mendukung pelaksanaan program sesuai visi, misi pembangunan dan urusan penyelenggaraan pemerintahan. Adapun jabaran program dengan alokasi anggaran prioritas 2 dimaksud disajikan pada Tabel 7.2.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kota Bekasi Tahun 2019-2023

	URAIAN	TA. 2019	TA.2020
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN		
II	BELANJA DAERAH	5,567,923,376,279.03	4,583,151,980,580.00
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,909,565,700,219.00	2,101,913,801,466.00
2.1.1.	Belanja Pegawai	1,708,561,985,966.00	1,721,275,288,205.00
2.1.2.	Belanja Subsidi	5,543,886,923.00	4,441,356,961.00
2.1.3.	Belanja Hibah	94,504,751,250.00	56,294,150,650.00
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	98,669,460,000.00	99,951,730,000.00
2.1.5.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1,546,647,000.00	1,668,321,000.00
2.1.6.	Belanja Tidak Terduga	738,969,080.00	218,282,954,650.00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	3,658,357,676,060.03	2,481,238,179,114.00
2.2.1.	Belanja Pegawai	191,289,754,047.00	77,328,227,082.00
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,362,558,547,595.29	1,644,318,573,124.00
2.2.3.	Belanja Modal	1,104,509,374,417.74	759,591,378,908.00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 dan 2020, BPKAD.

	URAIAN	TA. 2021	TA.2022	TA.2023
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN			
II	BELANJA DAERAH	6,113,945,828,497.82	6,116,934,203,352.75	6,247,262,229,453.33
2.1.	BELANJA OPERASI	4,836,049,174,372.82	4,880,950,649,604.00	4,977,199,169,092.12
2.1.1.	Belanja Pegawai	2,096,566,061,790.00	2,159,463,043,643.70	2,224,246,934,953.01
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,445,539,426,782.82	2,518,905,609,586.30	2,544,472,777,873.89
2.1.3.	Belanja Bunga	0	-	-
2.1.4.	Belanja Subsidi	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
2.1.5.	Belanja Hibah	167,621,445,800.00	72,650,089,174.00	74,829,591,849.22
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	120,322,240,000.00	123,931,907,200.00	127,649,864,416.00
2.2.	BELANJA MODAL	1,101,228,333,125.00	1,134,265,183,118.75	1,168,293,138,612.31
2.2.1.	Belanja Tanah	79,383,496,857.00	81,765,001,762.71	84,217,951,815.59
2.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	107,178,501,670.00	110,393,856,720.10	113,705,672,421.70
2.2.3.	Belanja Bangunan dan Gedung	162,404,799,573.00	167,276,943,560.19	172,295,251,867.00
2.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	743,933,642,025.00	766,251,651,285.75	789,239,200,824.32
2.2.5.	Belanja Aset Tetap lainnya	8,327,893,000.00	8,577,729,790.00	8,835,061,683.70
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	175,000,000,000.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
2.4.	BELANJA TRANSFER	1,668,321,000.00	1,718,370,630.00	1,769,921,748.90
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	-	-	-
2.4.1.	Belanja Bantuan Keuangan	1,668,321,000.00	1,718,370,630.00	1,769,921,748.90

Sumber : Hasil Analisis TAPD, 2020.

TABEL 7.2
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
1	01			URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN																
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					148.7		180.43		697.36		700.69		702.62		702.62	Dinas Pendidikan /Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
					Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik	%	359	36.11		50.00		66.67		83.33		100.00		100.00		Dinas Pendidikan /Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
					Persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam Kondisi Baik	%	59.00	28.57		38.1		57.14		76.19		100.00		100.00		Dinas Pendidikan /Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
					Persentase Sarana dan Prasarana PendidikanAnak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	%	6.00	20.00		40.00		60.00		80.00		100.00		100.00		Dinas Pendidikan /Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
					APM SD	%	97.27	114		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Pendidikan
					APM SMP	%	83.82	83.93		95.25		97.56		96.16		100		84.86		Dinas Pendidikan
					APM PAUD	%		49.81		54		56.43		58.84		61.43		61.43		Dinas Pendidikan
					Angka kelulusan pendidikan kesetaraan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Pendidikan
					SD Negeri Terakreditasi A	%	77.83	89.85		90.00		90.25		90.4		90.45		90.00		Dinas Pendidikan
					SMP Negeri Terakreditasi A	%				90.00		90.00		90.00		90.00		86.00		Dinas Pendidikan
					Capaian Perolehan Prestasi Tingkat Propinsi, Nasional, Internasional Jenjang Pendidikan Dasar	Jumlah	50	52		54		56		58		60		280		Dinas Pendidikan

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)			
1	01	04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					32.42		39.34		40.82		40.97		41.14		41.14	Dinas Pendidikan
					Persentase pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar	%						70.00		75.00		80.00		80.00		Dinas Pendidikan
					Cakupan Pelayanan Berbasis IT	%						20.00		30.00		40.00		40.00		Dinas Pendidikan
1	01	05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					4.2		4.24		5.35		5.52		5.65		5.65	Dinas Pendidikan
					Presentase pendidikan Dasar terakreditas B	%	77.83	89.85		90.00		90.25		90.40		90.45		90.00		Dinas Pendidikan
					PAUD Terakreditasi	%				10.00		15.00		20.00		25.00		38.04		Dinas Pendidikan
					Lembaga Pendidikan Non Formal Terakreditasi	%	8.59	24.00		33.43		35.97		36.11		38.04		100.00		Dinas Pendidikan
1	02			URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN																
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					23.3		28.27		28.89		29.38		29.45		29.45	Dinas Kesehatan. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
					Cakupan rumah tangga Ber- PHBS	%	58.00	61.90		60.00		61.90		64.00		65.00		65.00		Dinas Kesehatan
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					99.31		120.5		983.21		984.89		987.03		987.03	Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB		
								2019		2020		2021		2022					2023	
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)		Target	Rp (Milyar)
					Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)	%	34.00	11.00		22.00		22.00		22.00		23.00		100.00		Dinas Kesehatan. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan. Rumah Sakit Umum Daerah
					Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi	%	5.00	33.33		50.00		66.67		83.33		100.00		100.00		Dinas Kesehatan. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
					persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas	%	60.00	60.00		60.00		60.00		60.00		60.00		60.00		Dinas Kesehatan
					persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Type B	%	82.00	82.00		83.50		82.50		82.75		83.00		83.00		Rumah Sakit Umum Daerah
					persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Type D	%	60.00	60.00		60.00		60.00		60.00		60.00		60.00		Dinas Kesehatan
					Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	47.62	64.29		71.43		71.43		83.33		84.61		83.33		Dinas Kesehatan
					persentase Rumah sakit Terakreditasi	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah
					terpenuhinya pemeliharaan 10 jenis sarana dan prasarana rumah sakit	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		12.00		12.00		Rumah Sakit Umum Daerah
					Capaian IKM Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Type B	Indeks	80.00	80.00		81.00		81.00		82.00		83.00		83.00		Rumah Sakit Umum Daerah
					persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan Rumah Sakit	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
					Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Kesehatan		
					Persentase cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah		
					Prevalensi Balita Status Gizi Stunting	%	12.16	10.69		10.20		10.00		9.80		9.50		Dinas Kesehatan		
					persentase Institusi dan fasilitas umum memenuhi syarat kesehatan	%	62.00	62.00		65.00		66.97		72.00		75.00		Dinas Kesehatan		
					Ketersediaan Puskesmas di Kelurahan	Puskemas	42.00	42.00		43.00		43.00		52.00		56.00		Dinas Kesehatan		
					Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Kesehatan		
					Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Kesehatan		
					Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Kesehatan		
					Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Kesehatan		
					Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Kesehatan		
					Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Kesehatan		

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
					Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	Dinas Kesehatan	
					Persentase Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	Dinas Kesehatan	
					Persentase Warga Negara penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	Dinas Kesehatan	
					Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	Dinas Kesehatan	
					Persentase Warga Negara penderita terduga Tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	Dinas Kesehatan	
					Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	Dinas Kesehatan	
1	02	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					69.9		84.81		84.87		84.97		85.01		85.01	Dinas Kesehatan

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
					persentase jumlah sarana kefarmasian yang memenuhi standar kesehatan	%	90.00	90.00		91.00		91.72		93.00		95.00		95.00		Dinas Kesehatan
					persentase jumlah produk pangan industri rumah tangga(PIRT) berlabel yang memenuhi standar kesehatan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Kesehatan
1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					42.18		43.21		45.21		45.59		45.96		45.96	Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
					persentase ketersediaan SDM kesehatan di puskesmas dan RS	%	70.00	70.00		80.00		81.20		100.00		100.00		100.00		Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUAN																
1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					22.17		22.49		8.45		9.85		10.45		10.45	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
					Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestik	%	3.39	6.40		9.42		13.10		17.02		20.94		20.94		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
1	03	07		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					0.00		0.00		106.56		108.67		109.85		109.85	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air/Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
					Persentase peningkatan pembangunan PJU Baru	%	49.98%	N/A		N/A		52.41		53.30		54.18		54.18		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
					Presentase Pemeliharaan PJU	titik	45004 titik	N/A		N/A		11250 titik		11250 titik		11250 titik		45004 titik		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
					Persentase Luasan Permukiman yang tertata	%						7.84		9.80		11.76		11.76		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
1	03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					107.79		130.79		230.23		241.49		235.87		235.87	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
					Persetase Drainase Dalam Kondisi Baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	65%	N/A		N/A		67.14		67.92		68.89		68.89		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					46.74		46.74		48.25		48.65		48.72		48.72	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
					Presentase Pembangunan Polder	%	3.074.498 m³	N/A		N/A		64.48		71.37		74.29		3.284.498.00m³		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
					Presentase Pemeliharaan Polder	%	149.889 m³	N/A		N/A		5.14		6.24		7.34		225.585.37 m³		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					13		17.75		9.73		12.86		13.78		13.78	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
					Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	26.7	27.14		28.19		29.23		30.27		31.32		31.32		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
1	03	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL							15.43		16.26		17.23		48.92	Dinas Lingkungan Hidup		
					Luasan Zona Buang Yang Terbangun	Ha					1		1		1		3	Dinas Lingkungan Hidup		
1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				19.00		23.05		98.56		100.57		100.73		100.73	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan	
					Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi	%	50	25.53		63.83		82.98		93.62		100.00		100.00	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan	
					Persentase dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan	%	-	-		-		-		90.00		90.00		90.00	Dinas Tata Ruang	
1	03	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					239.55		256.66		208.86		210,34		210,45		210,45	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
					Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi baik	Point	0,715	N/A		N/A		0.73		0.74		0.751		0.751	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air	
					Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (> 40km/jam)	%	91,30	N/A		N/A		95.76		97.20		98.60		98.60	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air	
					Presentase Pembangunan Jembatan Baru	%	44,90	N/A		N/A		47.88		53.09		53.24		53.24	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air	
					Persentase Pemeliharaan Jembatan	%	90.00	N/A		N/A		93.03		92.7		93.38		93.38	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air	
					Persentase Jalan yang memiliki Trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	18.50	N/A		N/A		19.69		20.08		20.48		20.48	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air	

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
1	03	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					7,74		7,98		8.23		8.47		8.73		8.73	Dinas Tata Ruang/Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
					Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	%	50.00	60.00		65.00		70.00		75.00		80.00		80.00		Dinas Tata Ruang/Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
					Jumlah Rencana Pembangunan Infrastruktur Kota yang Sesuai dengan Tata Ruang Kota	Dokumen	1	1		1		1		1		1		6		Dinas Tata Ruang
					Jumlah Rencana Penataan Kawasan Strategis Kota yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota	Dokumen	3	1		1		1		1		1		8		Dinas Tata Ruang
					Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan	%	18.17	18.64		18.76		18.88		19.00		19.12		19.12		Dinas Tata Ruang
					Persentase Penyerahan 150 PSU pada tahun 2023	%	17.00	34.00		51.00		68.00		85.00		100.00		100.00		Dinas Tata Ruang
					Persentase penataan dan pemeliharaan reklame	Buah	16 bh	N/A		N/A		8		8		8		16		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
1	04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					28,505		34,587		28,093		29,607		31,115		31,115	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
					Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	%	23.88	37.75		44.68		51.61		59.85		66.79		66.79		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
					Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	%	5.32	7.99		10.65		13.30		15.97		18.64		18.64		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
					Persentase Penyediaan/ Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	%	0	91.56		93.70		95.84		97.98		100.00		100.00		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
1	04	04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					22.17		26.90		25.85		26.51		27.18		27.18	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
					Persentase Luasan Permukiman kumuh dikawasan perkotaan	%	29.07	44.87		53.22		66.76		84.41		100.00		100.00		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
1	04	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					46.11		56.11		72.47		73.16		74.61		74.61	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
					Cakupan Yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	18.40	28.01		29.65		33.18		36.71		40.23		40.23		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
					Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum	Rasio	6.00	6,13		6,30		6,50		6,70		6,91		4,76		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
1	05	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					8,071		9,792		18.86		20.72		22.54		22.54	SATPOL PP
					Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	Rasio	1:31	1:31		-		1:31		1:31		1:31		1:31		SATPOL PP

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
					Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	60,00	60,00		-		100,00		100,00		100,00		100,00		SATPOL PP
					Persentase penegakan pelanggaran perda	%	60,00	5,00		-		100,00		100,00		100,00		100,00		SATPOL PP
1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.88		1.88		1.88		1.98		2.05		2.05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Persentase kemampuan aparaturnya dan masyarakat dalam menghadapi bencana	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Presentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Persentase program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					0.89		1.08		12.00		13.27		14.56		14.56	Dinas Pemadam Kebakaran

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
					Persentase layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran (BALAKR)	%	30.00	40.00		50.00		60.00		70.00		75.00		75.00	Dinas Pemadam Kebakaran	
					Persentase pencapaian layanan150 publikasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	%	25.80	11.70		15.60		15.60		15.60		15.70		100.00		Dinas Pemadam Kebakaran
					Persentase layanan pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran	%	15.00	25.00		35.00		40.00		45.00		50.00		50.00		Dinas Pemadam Kebakaran
					Persentase layanan pendataan dan inspeksi dan investigasi pasca kebakaran	%	73.00	78.00		83.00		88.00		93.00		100.00		100.00		Dinas Pemadam Kebakaran
					Persentase layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran	%	73.00	75.00		77.00		79.00		80.00		81.00		81.00		Dinas Pemadam Kebakaran
					Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakran serta non kebakaran	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Pemadam Kebakaran
					Presentase penyediaan sarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan	%	17.00	25.00		32.00		39.00		46.00		53.00		53.00		Dinas Pemadam Kebakaran
					Presentase penyediaan Prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan	%	50.00	50.00		58.00		67.00		83.00		100.00		100.00		Dinas Pemadam Kebakaran
1	06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					0.69		0.83		5.45		5.59		5.75		5.75	Dinas Sosial
					Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) ditangani oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat	%	null	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		Dinas Sosial
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat	Sekretariat	133	187		260		280		300		320		320		Dinas Sosial
1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.03		1.25		14.15		14.47		14.83		14.83	Dinas Sosial
					Persentase penyandang disabilitas telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Sosial
					Persentase anak telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Sosial
					Persentase lanjut usia telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Sosial
					Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Sosial

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
1	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					1.03		1.25		2.45		2.51		2.62		2.62	Dinas Sosial
					Prosentase Peningkatan Pendayagunaan data dan informasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS)	Dokumen	1	1		2		1		2		1		1		Dinas Sosial
1	06	06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA								2.21		2.43		2.60		2.60		Dinas Sosial
					Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Sosial
1	06	07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					0.14		0.17		2.15		2.21		2.26		2.26	Dinas Sosial
					Prosentase Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	1	1		1		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Sosial
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																
2	07	02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					0.20		0.24		0.25		0.60		0.60		0.60	Dinas Tenaga Kerja
					Prosentase Cakupan Ketersediaan dokumen	%						20.00		20.00		20.00		20.00		Dinas Tenaga Kerja
2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					0.20		0.24		2.05		2.10		2.16		2.60	Dinas Tenaga Kerja

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB	
								2019		2020		2021		2022		2023					
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)		
					Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Tenaga Kerja	
					Persentase peningkatan kompetensi bagi pencari kerja	%					20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		Dinas Tenaga Kerja
2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					0.26		0.32		0.50		0.51		0.53		0.53		Dinas Tenaga Kerja
					Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan	%	60.83	60.83		61,15		61.22		61.78		62,09		62.09		Dinas Tenaga Kerja	
					Persentase Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) berizin	%	-	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Tenaga Kerja	
2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					0.26		0.32		0.60		0.62		0.63		0.63		Dinas Tenaga Kerja
					Persentase penanganan sengketa pengusaha dengan pekerja	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Tenaga Kerja	
2	08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANA																	
2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					0.83		0.5		1.00		1.03		1.06		1.06		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Presentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					0.5		0.5		2.48		2.55		2.58		2.58		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
					Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	02		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					0.50		0.6		2.00		2.05		2.11		2.11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	49.00	49.00		49.00		49.00		49.00		49.00		49.00		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK					0.9		0.9		1.53		1.57		1.62		1.62	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Presentase Peningkatan Pemenuhan 5 Klaster KLA	Predikat	Madya	Madya		Madya		Nindya		Nindya		Nindya		Nindya		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																
2	09	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					0.15		0.16		1.46		1.48		1.54		1.54	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					Stabilisasi harga pangan	%	3,70	<5,00		<5,00		<5,00		<5,00		<5,00		<5,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	%	86.70	88.00		88.50		87.94		87.97		88.00		88.00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					0.17		0.21		14.85		14.93		16.87		16.87	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
					Persentase Penanganan kerawanan pangan	%	69.58	73.76		76.76		80.58		84.00		86.80		86.80		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	09	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					0.35		0.42		0.48		0.53		0.56		0.56	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	69.07	75.26		82.00		84.00		85.60		88.00		88.00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																
2	10	04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					0.15		0.15		0.15		0.18		0.21		0.21	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
					Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
2	10	05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					305.74		230.69		222.19		209.13		210.25		210.25	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
					Persentase Pemenuhan pengadaan tanah	%	67,333	23.00		43.00		63.00		81.00		100,00		100,00		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
2	10	09		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					15.83		15.89		3.96		4.21		4.56		4.56	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
					Penerbitan Izin Membuka Tanah	%	0	23.00		20.00		20.00	21.00		22.00		23.00			Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
2	11	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					41.04		49.8		25.08		29.9		30.87		85.85	Dinas Lingkungan Hidup
					Indeks kualitas air	Nilai	4 (6,44)	3 (IP=1-5)		3 (IP=1-5)	9.96	3 (IP=1-5)		3 (IP=1-5)	11	3 (IP=1-5)		3 (IP=1-5)		Dinas Lingkungan Hidup
					Indeks kualitas udara	Nilai	82	83		83.4		83.8		84.2		84.6		84.6		Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					1.50		1.72		1.80		1.92		1.97		1.97	Dinas Lingkungan Hidup
					Persentase Usaha Kegiatan yang Memiliki TPS Limbah B3	%	40.00	45.00		50.00		55.00		60.00		65.00		65.00		Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					0.80		0.85		0.90		0.95		1.00		1.00	Dinas Lingkungan Hidup
					Persentase pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	40.35	50.00		52.00		55.00		60.00		65.00		65.00		Dinas Lingkungan Hidup

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
2	11	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					15.39		18.67		2.38		2.45		2.85		2.85	Dinas Lingkungan Hidup
					Persentase Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat tentang Permasalahan Lingkungan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					1.22		1.46		1.62		1.85		2.10		2.10	Dinas Lingkungan Hidup
					Persentase institusi/kelompok masyarakat/lingkungan yang peduli lingkungan	%	NA	30.00		40.00		50.00		60.00		70.00		70.00		Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					5.00		5.00		7.03		7.24		7.36		7.45	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
					Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Laporan	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Dinas Lingkungan Hidup
					Presentase Pembangunan Taman Baru	%	15,70	NA		NA		18.03		18.82		19.60		19.60		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
					Presentase Pemeliharaan Taman	%	44,39					64.95		78.65		94.13		94.13		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					26.09		31.66		25.17		85.49		87.94		80.77	Dinas Lingkungan Hidup

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB	
								2019		2020		2021		2022		2023					
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)				
					Persentase Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	24.94	26.00		27.00		24.00		26.00		27.00		27.00	Dinas Lingkungan Hidup		
					Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA	Point	71.72	73.00		73.00		73.00		73.00		73.00		73.00	Dinas Lingkungan Hidup		
					Persentase sampah yang terangkut ke TPA	%	67.15	74.00		70.00		64.00		63.00		62.00		62.00	Dinas Lingkungan Hidup		
					Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	70.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	Dinas Lingkungan Hidup		
2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
2	12	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						9.40		11.40		4.00		4.10		4.22		4.22	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
					cakupan kepemilikan KTP el	%	-	91.4		93.16		94.51		94.82		95.23		95.23		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
					cakupan kepemilikan kartu keluarga	%	-	66.33		94.24		94.97		97.75		99.60		99.60		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
					Cakupan Penerbitan KIA	%	-	-		-		65.00		80.00		95.00		95.00		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	12	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL						0.27		0.27		2.00		2.05		2.11		2.11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
					Cakupan kepemilikan akte kelahiran	%	N/A	66.33		66.96		67.29		67.62		67.96		67.96		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
					Cakupan Kepemilikan akte perkawinan	%	N/A	60.31		60.52		60.55		60.63		60.71		60.71		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
					Cakupan kepemilikan akte kematian	%	N/A	64.23		64.24		64.26		64.32		64.32		64.32		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
2	12	04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					0.16		0.16		3.42		3.51		3.57		3.57	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
					persentase ketersediaan data catatan sipil dan administrasi kependudukan yang lengkap dan terbaru	%	-	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					0.13		0.13		0.45		0.46		0.47		0.47	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
					Pemutakhiran profil kependudukan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCA																
2	14	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					0.98		1.19		1.56		1.76		1.85		1.85	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Jumlah PPKS Aktif di Kecamatan	unit	3	3		5		6		7		8		8		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Persentase Cakupan anggota poktan yang ber KB.	%	50.00	50.00		53.00		55.00		60.00		65.00				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					0.59		0.59		2.95		3.03		3.12		3.12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Persentase pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan Menikah	%	60.00	75.50		76.50		77.00		77.50		78.00		78.00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB	
								2019		2020		2021		2022		2023					
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)		
2	14	02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					75.5		2.37		2.43		2.49		2.56		2.56	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					Presentase Cakupan Data Mikro Keluarga	%	60.00	60.00		70.00		75.00		80.00		85.00		85.00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	
2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						15.75		15.75		15.84		15.92		15.97		15.7	Dinas Perhubungan
					Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan	%	80.00	n/a		n/a		85.00		91.00		91.70		91.70		Dinas Perhubungan	
					Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi	%	20.00	n/a		n/a		40.00		60.00		100.00		100.00		Dinas Perhubungan	
					Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas	%	2.00	n/a		n/a		26	2	0.60	1	1.70	1	1.70	1	Dinas Perhubungan	
					Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal	%	50.00	n/a		n/a		50.00		60.00		70.00		70.00		Dinas Perhubungan	
					persentase kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor	%	70,00 (59.000 kendaraan)	75,00 (63.750 kendara aan)		76,00 (64.450 kendara an)		77,00 (65.450 kendara an)		78,00 (66.300 kendara an)		80,00 (68.000 kendara an)		80,00 (68.000 kendara an)		Dinas Perhubungan	
2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIK																	
2	16	03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2.89		3.93		11.45		16.56		19.23		54.06	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian	

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
					Indeks Pengelolaan sitem Layanan Publik Berbasis Digital	Indeks						3.18		4.08		4.96		4.96		Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
2	16	02		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					0.15		0.06		0.38		2.39		2.46		5.44	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
					Indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan pengaduan dan informasi publik	Indeks	-	-		-		4.28		4.33		4.38		4.38		Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
2	17	02		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					0.07		0.07		0.15		0.18		0.23		0.23	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
					Persentase Koperasi yang memiliki Izin Simpan Pinjam	%	N/A					3.27		13.07		8.17		150 unit		Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					0.479		0.581		1.05		1.27		1.30		1.30	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
					Persentase PKL yang Menempati Tempat yang telah Ditetapkan	%	613 PKL	5.00		15.00		15.00		15.00		10.00		988 PKL		Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					0.24		0.24		1.89		1.95		2.17		2.17	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
					Persentase peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi usaha Kecil	%	2.086 Usaha Mikro	2.00		2.00		1.00		1.00		1.00		115 Usaha Kecil		Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
					Persentase jumlah pelaku UMKM kreatif	%	1.000 Unit	10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		1300 unit		Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
2	17	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					0.19		0.23		0.27		0.31		0.36		0.36	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
					Jumlah Koperasi yang Beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	unit	N/A	0		0		100 Unit		100 Unit		100 Unit		376 Unit		Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
2	17	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					0.03		0.03		0.54		0.61		0.72		0.72	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
					Persentase Koperasi yang telah Tersertifikasi Keselihatannya	%	30 Koperasi (data tahun 2017-2019)					8.17		8.17		8.17		180 Unit		Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
2	17	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					0.28		0.34		0.36		0.39		0.42		0.42	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
					Peningkatan Skala Usaha Koperasi	Koperasi	N/A	2 Unit		2 Unit		2		2		2		10 Koperasi		Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
2	17	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN									0.35		0.41		0.48		0.48	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
					Jumlah Pengurus Koperasi yang telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian	Orang	100 orang pengurus dan pengawas					100 orang pengurus		100 orang pengurus		100 orang pengurus		400 orang pengurus		Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB		
								2019		2020		2021		2022					2023	
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)		Target	Rp (Milyar)
2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																
2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					4.35		5.45		6.12		6.38		6.49		6.49	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Persentase penerbitan Perizinan Sesuai SOP pada Pelayanan Publik	%	98.96	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Jumlah Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Mall Pelayanan Publik	Jumlah	32	55		60		105		110		113		113		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					0.12		0.80		1.20		1.28		1.32		1.32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Persentase Sistem Pelayanan Perizinan yang terintegrasi	%	43.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					0.19		0.23		0.87		0.89		0.92		0.92	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Persentase Kenaikan Penanaman Modal berdasarkan LKPM	%	Rp. 6.372.571.60 0.000.00	10.00		10.00		4.00		4.00		4.00		4.00		
2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					0.32		0.39		0.42		0.54		0.65		0.65	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB		
								2019		2020		2021		2022					2023	
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)		Target	Rp (Milyar)
					Jumlah izin terbit dan izin terbit dengan pemenuhan komitmen pada DPMPTSP	Jumlah	49.973 izin	-		-		12,103		7.866		5.113		5.113	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					0.19		0.23		0.68		0.73		0.78		0.78	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	%	397 Perusahaan	25.00		38.00		24.00		26.00		28.00		28.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAG																
2	19	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					0.51		0.62		1.77		1.82		1.87		1.87	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	50.00	60.00		70.00		80.00		90.00		100.00		100.00		Dinas Pemuda dan Olahraga
					Persentase Komunitas Kreatif yang berperan dalam pembangunan	%	N/A	0		20.00		35.00		50.00		65.00		65.00		Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					1.27		1.54		12.54		13.68		14.89		14.89	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	N/A	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		Dinas Pemuda dan Olahraga
					Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Representatif	%	N/A	50.00		55.00		60.00		65.00		70.00		70.00		Dinas Pemuda dan Olahraga
					Cakupan Pembinaan Olahraga	%	N/A	60.00		65.00		70.00		75.00		80.00		80.00		Dinas Pemuda dan Olahraga

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
					Persentase Pelatih Yang Bersertifikat	%	N/A	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN								1.09		1.12		1.15		1.15		Dinas Pemuda dan Olahraga
					Presentase Gugus Depan Aktif	%						50.00		60.00		70.00		70.00		Dinas Pemuda dan Olahraga
2	20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
2	20	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					-		-		0.36		0.45		0.45		1.26	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
					Indeks ketersediaan data sektoral berbasis digital	Indeks						3.5		4		5		5		Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
2	21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																
2	21	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					0.25		0.25		0.50		1.20		1.01		3.21	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
					Indeks penyelenggaraan pengamanan informasi	Indeks						5		5		5		5		Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																
2	22	05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					1.25		1.52		0.70		0.72		0.74		0.74	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Jumlah Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Situs	8	3		3		4		4		5		27		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB		
								2019		2020		2021		2022		2023						
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)					
2	22	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					0.50		0.61		0.34		0.37		0.40		0.40	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
					Jumlah Penyelenggaraan event bekasi kreatif	Event	6	8		5		7		9		11		16 event		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
2	23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																		
2	23	02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					0.3		0.3		1.21		1.32		1.38		1.38	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah		
					Persentase Perpustakaan Aktif	%	N/A	2.00		2.00		5.00		10.00		15.00		20.00		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah		
					Persentase Pengunjung Perpustakaan	%	18.20	35.00		35.00		15.00		20.00		25.00		25.00		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah		
2	24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																		
2	24	02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					0.6		0.73		0.83		0.95		0.98		0.98	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah		
					Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Tertib	%	50.00	50.00		54.00		60.00		70.00		80.00		80.00		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah		
2	24	03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					-		-		-		0.57		0.68		0.68	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah		
					Penambahan khasanah arsip statis pada depo arsip	Boks	2	2		5		10		20		30		30		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah		
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					0.27		0.28		0.85		0.87		0.90		0.90	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
					Jumlah produksi ikan konsumsi	Ton	1.856,36	1.874,9 2		1.893,6		1.910		1.946,4 2		1.955,2 4		1.955,2 4		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					Jumlah Produksi Ikan Hias	ekor	18.622.238	20.616. 836		21.649. 777		22.737. 661		23.863. 844		25.110. 221		25.110. 221		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	25	05		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					0.7		0.7		0.72		0.76		0.80		2.28	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	82.745.20	86.882. 46		88.135. 58		89.130. 50		90.207. 31		92.036. 18		92.036. 18		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																
3	26	02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					0.5		0.6		0.69		0.74		0.79		0.79	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Jumlah kawasan wisata yang ditata	Lokasi	2	1		1		1		1		1		7		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					0.50		0.61		0.34		0.37		0.40		0.40	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	907729	925883		944,400		963,288		982,553		1,002,2 04		100220 4 orang		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					0.15		0.15		0.15		0.18		0.21		0.21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
					Jumlah SDM yang ditingkatkan kopetensinya sesuai dengan perkembangan dan Tren Kepariwisataan	orang	N/A	0		75		75		150		150		300		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					0.73		0.89		0.92		0.94		0.97		0.97	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					Produksi komoditas pertanian	Ton	23,185	27.882.50		30.670.7		34.25.000		32.442.17		33.515.00		33.515.00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					Jumlah produksi peternakan	Ton	10.416.00	15.420.00		10.657.00		10.765.00		10.877.00		10.985.00		10.985.00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					Jumlah produksi olahan Hasil peternakan	Ton	3.511.24	3.582.24		3.654.3		3700		3.721.50		3.777.24		3.777.24		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					0.36		0.44		0.48		0.52		0.56		0.56	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					Terkendalinya Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis	Kasus	tidak ada	tidak ada		tidak ada		tidak ada		tidak ada		tidak ada	-	tidak ada		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					Unit Usaha Peternakan Kesehatan dan Produk hewan yang bersertifikat teknis	unit	53	61		69		65		70		90	-	75		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
					Persentase produk PAH yang ASUH	%	42.50	42.93		43.35		44.00		44.70		46.00		46.00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					0.62		0.75		0.61		0.64		0.67		3.13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Jumlah pasar rakyat bersih yang berbasis modern			Unit	5	7		9		8		9		10		10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					0.62		0.75		0.78		0.81		0.85		0.85	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Laju inflasi kelompok pengeluaran bahan makanan			%	<1.50	<1.50		<1.50		<4.00		<4.00		<4.00		<4.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					0.62		0.75		0.86		0.89		0.93		0.93	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Persentase pertumbuhan alat UTTP yang ditera/tera ulang			%	13.000 unit	18.9		13,792		4.00		5.00		6.00		23.150 unit	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					0.31		0.38		0.38		0.41		0.45		0.45	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
					Nilai ekspor Kota Bekasi	US Dollar	USD 263.574.932	USD 266.21 0.681		USD 268.872 .788		USD 450.000 .000		USD 475.000 .000		USD 500.000 .000		USD 500.000 .000		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
3	31	03		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					0.62		0.75		0.81		0.83		0.85		0.85	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
					Persentase peningkatan fasilitasi terhadap Industri kecil dan menengah	%	-	-	-	-	-	3.00		3.00		3.00		3.00		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01			SEKRE'TARIAT DAERAH																
4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					10.57		10.57		27.47		44.15		45.42		45.42	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
					Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan	%	-	70.00		70.00		70.00		70.00		70.00		70.00		Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)
					Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan	%		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
					Persentase peningkatan pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah	%	-	-	-	-	-	50.00		60.00		75.00		75.00		Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)
					Presentase peningkatan profile kelurahan	%	-	-	-	-	-	75.00		75.00		25.00		25.00		Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)
					Persentase Fasilitas kegiatan keagamaan, hari besar Nasional dan hari besar lainnya	%	-	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Sosial)
					Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial	%		35.00		40.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Sosial)

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
					Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah	%		20.00		40.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat Daerah (Bagian Kerja Sama)
					Persentase penyelesaian perkara yang dihadapi pemerintah daerah	%		90.00		93.00		95.00		97.00		100.00		100.00		Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					0.58		0.70		5.10		7.38		7.59		7.59	Sekretariat Daerah (Bag. Pembangunan)
					Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan	%	-	70.00		70.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan)
					Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi	%	-	10.00		10.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
					Persentase fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	%	-	70.00		70.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)
					Jumlah Bidang Usaha BUMD	Jumlah Bidang Usaha	-	-		-		5		5		5		5		Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
					Persentase Peningkatan Deviden BUMD	%	-	2.00		2.00		1.25		2.25		3.00		3.00		Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
4	01	04		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM					8.09		9.81		158.23		160.91		165.53		165.53	Sekretariat Daerah
					Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah	%	-	-		-		50.00		60.00		75.00		75.00		Sekretariat Daerah (Bag. Tata Pemerintahan)
					Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	%	-	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat Daerah (Bag. Tata Usaha)

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB	
								2019		2020		2021		2022		2023					
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)				
					Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	%	-	9300		9300		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat Daerah (Bag. Humas)	
					persentase keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi	%					100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
					Presentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan	%	100	100.00		100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat Daerah (Bag. Perlengkapan)
					Presentase Ketersediaan gedung pemerintahan dalam kondisi baik	%	N/A	100.00		100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
4	02			SEKRETARIAT DPRD																	
4	02	02		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA			-		-		84.36		103.82		125.46		125.26		Sekretariat DPRD		
					Optimalisasi peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD	%		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat DPRD	
					Optimalisasi Disiplin Aparatur Sekretariat DPRD	%		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat DPRD	
					Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD	%		100.00		100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat DPRD

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)			
					Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD	%		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat DPRD
					Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD	%		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat DPRD
					Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD	%		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat DPRD
4	02	03		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				32.47		39.39		93.58		112.88		149.95		149.95	Sekretariat DPRD	
					Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat DPRD
					Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat DPRD
					Persentase Terfasilitasinya informasi DPRD	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat DPRD
					Persentase Terfasilitasinya kegiatan DPRD	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Sekretariat DPRD
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	01			PERENCANAAN																

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
5	01	02		PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					5.56		5.02		3.59		3.67		3.86		3.86	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
					Persentase kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan	%	61.29	75.00		75.00		80.00		90.00		100.00		100.00		Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
5	01	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.15		1.15		4.2		4.3		4.4		4.4	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
					Persentase kesesuaian antara capaian target pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	N/A	75.00		75.00		80.00		90.00		100.00		100.00		Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
					Persentase kesesuaian antara capaian target pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	N/A	75.00		75.00		80.00		90.00		100.00		100.00		Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB		
								2019		2020		2021		2022		2023						
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)					
					Persentase kesesuaian antara capaian target pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	N/A	75.00		75.00		80.00		90.00		100.00		100.00		Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5	02			KEUANGAN																		
5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					2.76		3.35		3.59		3.64		3.71		3.71	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
					Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Grade	A	A		A		A		A		A		A		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
					Persentase Kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan Dengan SAP dan tepat waktu	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPM yang Diterima	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					Presentase OPD yang melaksanakan Administrasi Penatausahaan Keuangan dengan Tertib	%	-	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					0.55		0.67		1.59		1.64		1.74		1.74	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
					Persentase Nilai Aset Antara LBMD Dengan LKPD	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
					Jumlah Bidang tanah milik pemkot yang bersertifikat	Sertifikat	241	15		20		554		554		555		2302		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.32		1,287		7.63		7.83		8.05		8.05	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
					Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	%	693.072	1.00		1.00		0.80		0.80		0.80		0.80		Badan Pendapatan Daerah
					Persentase Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	43.04	35.12		56.81		48.67		49.83		50.99		50.99		Badan Pendapatan Daerah
					Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	%	90.60	91.00		92.00		97.67		97.69		97.71		97.71		Badan Pendapatan Daerah
					Nilai IKM	Nilai	76.5	77		77.25		76		77.75		79.25		79.25		Badan Pendapatan Daerah
5	03			KEPEGAWAIAN DAERAH																
5	03	02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.32		1,287		7.63		7.83		8.05		8.05	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
					Mutu Pelayanan Administrasi Kepegawaian Bernilai Baik	Nilai	Baik (76.77)	0		0		Baik (82.39)		Baik (82.89)		Baik (83.39)		Baik (83.39)		Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
					Persentase Prestasi Kerja ASN bernilai Baik	%	64.5	0		0		93.00		93.50		94.00		94.00		Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
					Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	39.63	0		0		40.00		45.00		50.00		50.00		Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5	05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
5	05	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					0.65		0.6		1.50		2.62		2.63		2.63	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
					Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	%	N/A	10.00		10.00		20.00		40.00		60.00		60.00		Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
					Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	%		10.00		10.00		20.00		40.00		60.00		60.00		Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
					Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi	%		10.00		10.00		20.00		40.00		60.00		60.00		Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
					Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang mendapatkan predikat	Jumlah	N/A	1		1		1		1		2		2		Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
6	01			INSPEKTORAT DAERAH																
6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					0.95		1.15		1.65		3.05		3.15		3.15	Inspektorat Kota
					Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	N/A	74.00		77.00		84.25		84.30		84.35		84.35		Inspektorat Kota
					Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP BB keatas	%	-	-		-		98.00		100.00		100.00		100.00		Inspektorat Kota
					Persentase perangkat daerah dengan nilai mturitas SPIP minimal 3.01	%	-	-		-		36.00		39.00		41.00		41.00		Inspektorat Kota
					Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal	%	85.00	85.00		85.00		90.00		90.00		92.00		92.00		Inspektorat Kota

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)			
					Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal	%	71.00	71.00		75.00		75.00		80.00		80.00		80.00		Inspektorat Kota
6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					0.95		1.15		2.85		2.92		3.00		3.00	Inspektorat Kota
					Jumlah perangkat daerah dengan nilai evaluasi ZI Minimal 70	OPD	-	-		-		5		5		5		5		Inspektorat Kota
					Jumlah Perangkat Daerah yang mampu mempertahankan predikat WBBM	OPD	-	-		-		0		1		1		1		Inspektorat Kota
					Persentase perangkat daerah dengan nilai evaluasi persepsi korupsi minimal 3.71	%	-	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		Inspektorat Kota
					Persentase perangkat daerah dengan penatausahaan aset salah saji yang tidak melebihi nilai material	%	-	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		Inspektorat Kota
					Persentase perangkat daerah dengan nilai kesalahan pertanggungjawaban keuangan tidak melebihi nilai material	%	-	-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		Inspektorat Kota
					Level kapabilitas APIP Inspektorat 3 keatas	Level	-	-		-		3		3		3		3		Inspektorat Kota
					Indeks Penerapan Manajaemen Resiko (MR)	Level	-	-		-		1.94		1.97		2		2		Inspektorat Kota

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
7				UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01			KECAMATAN																
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					40.05		48.60		2.56		3.56		4.65		4.65	Kecamatan
					Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Kecamatan
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		%			20.02		170.11		183.25		184.28		184.83		184.83	Kecamatan
					Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Kecamatan
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					0		0		12.48		12.56		12.84		12.84	Kecamatan
					Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Kecamatan
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.028		1.302		1.95		2.12		2.45		2.45	Kecamatan
					Persentase wilayah tertib K3	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Kecamatan
8				URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB		
								2019		2020		2021		2022					2023	
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)		Target	Rp (Milyar)
8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
8	01	02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					4.00		8.00		1.00		1.03		1.06		1.06	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	5.00	10.00		10.00		15.00		30.00		50.00		50.00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					0.40		0.80		0.82		0.84		0.86		0.86	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Persentase penanganan konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan	%	1000 Pantauan	200 Pantau an		200 Pantau an		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					0.35		0.35		1.97		2.02		2.08		2.08	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Persentase Pembinaan Politik Daerah	%	1.65	3.00		5.00		5.00		5.00		5.00		23.00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	Target	Rp (Milyar)	
8	01	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					0.39		0.47		2.84		2.91		2.99		2.99	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina	%						100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA					0.7		0.75		0.80		0.80		0.90		0.90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Cakupan Masyarakat yang mebnapat pembinaan peningkatan pengembangan ketahanan ekonomi. sosial. budaya	%						0.15		0.17		0.18		0.18		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
x	x			PENUNJANG URUSAN																
x	x	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					827.80		869.91		2,602.00		2,800.00		2,879.95		2,879.95	Seluruh OPD
					Optimalisasi Disiplin Aparatur	%			100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	Seluruh OPD
					Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%			100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	Seluruh OPD
					Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%			100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	Seluruh OPD
					Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%			100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	Seluruh OPD
					Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%			100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	Seluruh OPD



BAB 8

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran, dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi periode 2018-2023 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut IKU daerah, memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran sebagai tolok ukur penilaian kinerja Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi periode 2018-2023.

Indikator makro Dalam setahun terakhir, TPT di Kota Bekasi turun menjadi 8,98 persen pada 2019 menjadi 8,77 tahun 2020 karena pertumbuhan sektor informal yang justru meningkat di masa pandemi. Indikator makro lain yang juga menunjukkan penurunan kinerja untuk angka kemiskinan meningkat dari 8,48 persen tahun 2019 menjadi 8,58 Persen di tahun 2020, hal tersebut disebabkan oleh Pemutusan Hubungan Kerja sebagai dampak covid. Laju pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi -0,8 % yang disebabkan karena banyak nya sektor formal yang kinerjanya menurun di Kota Bekasi sebagai dampak covid 19, hal terbut disajikan pada tabel 8.1

Tabel 8.1.
Indikator Kinerja Makro Kota Bekasi 2018-2023

NO	INDIKATOR	INDIKATOR MAKRO KOTA BEKASI					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	81,04	81,59	81,59	82,31	82,67	83,04
2	Rata Rata Lama Sekolah	11,09	11,10	11,11	11,12	11,13	11,14
3	Harapan Lama Sekolah	13,76	13,99	14,19	14,29	14,59	14,79
4	Angka Harapan Hidup	74,76	74,89	74,93	74,96	74,99	75,02
5	Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan	15.755	16.157	14.139,33	14.563,50	15.000,40	15.450,42
6	Persentase Kemiskinan / Angka Kemiskinan	8,88	8,41	8,58	5,70	4,72	4,01
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,06	8,98	8,77	8,6	8,4	8,3

NO	INDIKATOR	INDIKATOR MAKRO KOTA BEKASI					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,21	5,41	-0,8	3,17	4,25	5,32

IKU daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebutlah secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kota Bekasi. IKU daerah maupun IKU perangkat daerah merupakan indikator kinerja dampak (*impact*) untuk mengukur tujuan dan/atau sasaran RPJMD, disajikan pada Tabel 8.2. Sementara indikator kinerja hasil (*outcome*) yang digunakan untuk menggambarkan kinerja program disajikan pada Tabel 8.3. Pemilahan kinerja mulai dari IKU daerah, IKU perangkat daerah dan indikator kinerja program diharapkan dapat memberikan gambaran arsitektur kinerja pembangunan jangka menengah.

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Bekasi 2018-2023

INDIKATOR SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET TAHUN KE -					KONDISI AKHIR
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	63,49	66.28	70.05	73.25	75.00	77.00	77.00
2	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Nilai	3.25	3.33	3.37	3.40	3.43	3.47	3.47
3	Nilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Persentase Peningkatan PAD	%	11.10	21.53	11.67	16.91	10.00	10.01	10.01
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	78.42	80.98	82.87	84.80	86.77	88.80	88.80
6	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	%	19.96	N/A	N/A	20.18	20.38	20.57	20.94
7	Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	%	67.60	N/A	N/A	74.24	80.08	89.34	89.34
8	Indeks Penataan Ruang	%	48.28	44.76	49.48	57.95	62.67	67.19	89.27
9	Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan	%	24.15	36.65	45.03	52.25	58.70	64.09	64.09
10	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	Rp10,460,053,504,800	10.00	10.00	4.00	4.00	4.00	4.00
11	Angka Kemiskinan	%	4.11	3.81	8.58	5.70	4.72	4.01	4.01
12	Gini Ratio	Nilai	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9.07	8.23	8.77	8.60	8.40	8.30	8.30
14	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor ekonomi kreatif	%	N/A	7.64	9.43	11.63	14.35	17.70	17.70

INDIKATOR SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET TAHUN KE -					KONDISI AKHIR
				2019	2020	2021	2022	2023	
15	Persentase peningkatan nilai sektor perdagangan dan jasa	%	Rp20,480,000,000,000	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84
16	Peningkatan Pengeluaran perkapita	%	15,755.000	2.55	-10.00	3.00	3.00	3.00	3.00
17	Laju Inflasi	%	4.23	3.89	2.00	2.92	3.21	3.53	3.53
18	Indeks Pendidikan	Nilai	73.96	75.19	75.63	76.06	76.51	76.95	76.95
19	Indeks Kesehatan	Nilai	84,45	84.50	84.50	84.55	84.60	84.65	84.65
20	Indeks pembangunan gender	Nilai	93.26	93.02	93.29	93.56	93.83	94.10	94.10
21	Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	Prestasi	N.A	10 TP, 2 TN	15 TP, 4 TN	20 TP, 6 TN	25 TP, 8 TN	30 TP, 10 TN, 1 TI	30 TP, 10 TN, 1 TI
22	Persentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	%	45.00	7.20	5.96	4.94	4.09	3.39	3.39
23	Prosentase kerjasama antar kelompok sara	%	0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
24	Indeks risiko bencana	Nilai	132	132	127	122	118	113	113
25	Indeks Penanggulangan Kebakaran	Nilai	56.24	59.13	64.03	68.28	73.43	78.68	78.68
26	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	N/A	49.00	52.00	61.02	61.93	62.85	62.85

Tabel 8.3

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

KODEFIKASI URUSAN				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	
							Target	Target	Target	Target	Target	
1	01			URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN								
				Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik	%	359	36.11	50.00	66.67	83.33	100.00	100.00
				Persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam Kondisi Baik	%	59.00	28.57	38.1	57.14	76.19	100.00	100.00
				Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	%	6.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	100.00
				APM SD	%	97.27	114	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				APM SMP	%	83.82	83.93	95.25	97.56	96.16	100	84.86
				APM PAUD	%		49.81	54	56.43	58.84	61.43	61.43

KODEFIKASI URUSAN				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	
							Target	Target	Target	Target	Target	
				Angka kelulusan pendidikan kesetaraan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				SD Negeri Terakreditasi A	%	77.83	89.85	90.00	90.25	90.4	90.45	90.00
				SMP Negeri Terakreditasi A	%			90.00	90.00	90.00	90.00	86.00
				Capaian Perolehan Prestasi Tingkat Propinsi, Nasional, Internasional Jenjang Pendidikan Dasar	Jumlah	50	52	54	56	58	60	280
				Persentase pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar	%				70.00	75.00	80.00	80.00
				Cakupan Pelayanan Berbasis IT	%				20.00	30.00	40.00	40.00
				Presentase pendidikan Dasar terakreditas B	%	77.83	89.85	90.00	90.25	90.40	90.45	90.00
				PAUD Terakreditasi	%			10.00	15.00	20.00	25.00	38.04
				Lembaga Pendidikan Non Formal Terakreditasi	%	8.59	24.00	33.43	35.97	36.11	38.04	100.00
1	02			URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN								
				Cakupan rumah tangga Ber-PHBS	%	58.00	61.90	60.00	61.90	64.00	65.00	65.00
				Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)	%	34.00	11.00	22.00	22.00	22.00	23.00	100.00
				Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi	%	5.00	33.33	50.00	66.67	83.33	100.00	100.00
				persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas	%	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
				persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Type B	%	82.00	82.00	83.50	82.50	82.75	83.00	83.00
				persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Type D	%	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
				Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	47.62	64.29	71.43	71.43	83.33	84.61	83.33
				persentase Rumah sakit Terakreditasi	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				terpenuhinya pemeliharaan 10 jenis sarana dan prasarana rumah sakit	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	12.00	12.00

KODEFIKASI URUSAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
				2019	2020	2021	2022	2023	
				Target	Target	Target	Target	Target	
	Capaian IKM Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Type B	Indeks	80.00	80.00	81.00	81.00	82.00	83.00	83.00
	persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan Rumah Sakit	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Prevalensi Balita Status Gizi Stunting	%	12.16	10.69	10.20	10.00	9.80	9.50	9.50
	persentase Institusi dan fasilitas umum memenuhi syarat kesehatan	%	62.00	62.00	65.00	66.97	72.00	75.00	75.00
	Ketersediaan Puskesmas di Kelurahan	Puskemas	42.00	42.00	43.00	43.00	52.00	56.00	56.00
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase Warga Negara penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

KODEFIKASI URUSAN				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	
							Target	Target	Target	Target	Target	
				Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase Warga Negara penderita terduga Tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				persentase jumlah sarana kefarmasian yang memenuhi standar kesehatan	%	90.00	90.00	91.00	91.72	93.00	95.00	95.00
				persentase jumlah produk pangan industri rumah tangga(PIRT) berlabel yang memenuhi standar kesehatan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				persentase ketersediaan SDM kesehatan di puskesmas dan RS	%	70.00	70.00	80.00	81.20	100.00	100.00	100.00
1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
				Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestik	%	3.39	6.40	9.42	13.10	17.02	20.94	20.94
				Persentase peningkatan pembangunan PJU Baru	%	49.98%	N/A	N/A	52.41	53.30	54.18	54.18
				Presentase Pemeliharaan PJU	titik	45004 titik	N/A	N/A	11250 titik	11250 titik	11250 titik	45004 titik
				Persentase Luasan Permukiman yang tertata	%				7.84	9.80	11.76	11.76
				Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	65%	N/A	N/A	67.14	67.92	68.89	68.89
				Presentase Pembangunan Polder	%	3.074.498 m ³	N/A	N/A	64.48	71.37	74.29	3.284.498.00 m ³
				Presentase Pemeliharaan Polder	%	149.889 m ³	N/A	N/A	5.14	6.24	7.34	225.585.37 m ³

KODEFIKASI URUSAN				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	
							Target	Target	Target	Target	Target	
				Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	26.7	27.14	28.19	29.23	30.27	31.32	31.32
				Luasan Zona Buang Yang Terbangun	Ha				1	1	1	3
				Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi	%	50	25.53	63.83	82.98	93.62	100.00	100.00
				Persentase dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan	%	-	-	-	-	90.00	90.00	90.00
				Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi baik	Point	0,715	N/A	N/A	0.73	0.74	0.751	0.751
				Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (> 40km/jam)	%	91,30	N/A	N/A	95.76	97.20	98.60	98.60
				Presentase Pembangunan Jembatan Baru	%	44,90	N/A	N/A	47.88	53.09	53.24	53.24
				Persentase Pemeliharaan Jembatan	%	90.00	N/A	N/A	93.03	92.7	93.38	93.38
				Persentase Jalan yang memiliki Trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	18.50	N/A	N/A	19.69	20.08	20.48	20.48
				Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	%	50.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	80.00
				Jumlah Rencana Pembangunan Infrastruktur Kota yang Sesuai dengan Tata Ruang Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	6
				Jumlah Rencana Penataan Kawasan Strategis Kota yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota	Dokumen	3	1	1	1	1	1	8
				Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan	%	18.17	18.64	18.76	18.88	19.00	19.12	19.12
				Persentase Penyerahan 150 PSU pada tahun 2023	%	17.00	34.00	51.00	68.00	85.00	100.00	100.00
				Persentase penataan dan pemeliharaan reklame	Buah	16 bh	N/A	N/A	8	8	8	16
1	04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
				Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	%	23.88	37.75	44.68	51.61	59.85	66.79	66.79

KODEFIKASI URUSAN				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	
							Target	Target	Target	Target	Target	
				Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	%	5.32	7.99	10.65	13.30	15.97	18.64	18.64
				Persentase Penyediaan/ Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	%	0	91.56	93.70	95.84	97.98	100.00	100.00
				Persentase Luasan Permukiman kumuh dikawasan perkotaan	%	29.07	44.87	53.22	66.76	84.41	100.00	100.00
				Cakupan Yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	18.40	28.01	29.65	33.18	36.71	40.23	40.23
				Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum	Rasio	6.00	6,13	6,30	6,50	6,70	6,91	4,76
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
				Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	Rasio	1:31	1:31	-	1:31	1:31	1:31	1:31
				Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	%	60,00	60,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
				Persentase penegakan pelanggaran perda	%	60,00	5,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
				Persentase kemampuan aparaturnya dan masyarakat dalam menghadapi bencana	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran (BALAKR)	%	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	75.00	75.00
				Persentase pencapaian layanan 150 publikasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	%	25.80	11.70	15.60	15.60	15.60	15.70	100.00

KODEFIKASI URUSAN				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	
							Target	Target	Target	Target	Target	
				Persentase layanan pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran	%	15.00	25.00	35.00	40.00	45.00	50.00	50.00
				Persentase layanan pendataan dan inspeksi dan investigasi pasca kebakaran	%	73.00	78.00	83.00	88.00	93.00	100.00	100.00
				Persentase layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran	%	73.00	75.00	77.00	79.00	80.00	81.00	81.00
				Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran serta non kebakaran	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Presentase penyediaan sarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan	%	17.00	25.00	32.00	39.00	46.00	53.00	53.00
				Presentase penyediaan Prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan	%	50.00	50.00	58.00	67.00	83.00	100.00	100.00
1	06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
				Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ditangani oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat	%	null	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
				Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat	Sekretariat	133	187	260	280	300	320	320
				Persentase penyandang disabilitas telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase anak telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase lanjut usia telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

KODEFIKASI URUSAN				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	
							Target	Target	Target	Target	Target	
				Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Prosentase Peningkatan Pendayagunaan data dan informasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Dokumen	1	1	2	1	2	1	1
				Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Prosentase Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
				Prosentase Cakupan Ketersediaan dokumen	%				20.00	20.00	20.00	20.00
				Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase peningkatan kompetensi bagi pencari kerja	%				20.00	20.00	20.00	20.00
				Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan	%	60.83	60.83	61,15	61.22	61.78	62,09	62.09
				Persentase Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) berizin	%	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase penanganan sengketa pengusaha dengan pekerja	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
				Presentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00

KODEFIKASI URUSAN				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	
							Target	Target	Target	Target	Target	
				Presentase Peningkatan Pemenuhan 5 Klaster KLA	Predikat	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya
2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
				Stabilisasi harga pangan	%	3,70	<5,00	<5,00	<5,00	<5,00	<5,00	<5,00
				Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	%	86.70	88.00	88.50	87.94	87.97	88.00	88.00
				Persentase Penanganan kerawanan pangan	%	69.58	73.76	76.76	80.58	84.00	86.80	86.80
				Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	69.07	75.26	82.00	84.00	85.60	88.00	88.00
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
				Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase Pemenuhan pengadaan tanah	%	67,333	23.00	43.00	63.00	81.00	100,00	100,00
				Penerbitan Izin Membuka Tanah	%	0	23.00	20.00	20.00			
2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
				Indeks kualitas air	Nilai	4 (6,44)	3 (IP=1-5)	3 (IP=1-5)	3 (IP=1-5)	3 (IP=1-5)	3 (IP=1-5)	3 (IP=1-5)
				Indeks kualitas udara	Nilai	82	83	83.4	83.8	84.2	84.6	84.6
				Persentase Usaha Kegiatan yang Memiliki TPS Limbah B3	%	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	65.00
				Persentase pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	40.35	50.00	52.00	55.00	60.00	65.00	65.00
				Persentase Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat tentang Permasalahan Lingkungan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase institusi/keompok masyarakat/lingkungan yang peduli lingkungan	%	NA	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	70.00
				Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Laporan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

KODEFIKASI URUSAN				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	
							Target	Target	Target	Target	Target	
				Presentase Pembangunan Taman Baru	%	15,70	NA	NA	18.03	18.82	19.60	19.60
				Presentase Pemeliharaan Taman	%	44,39			64.95	78.65	94.13	94.13
				Persentase Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	24.94	26.00	27.00	24.00	26.00	27.00	27.00
				Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA	Point	71.72	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00
				Persentase sampah yang terangkut ke TPA	%	67.15	74.00	70.00	64.00	63.00	62.00	62.00
				Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
				cakupan kepemilikan KTP el	%	-	91.4	93.16	94.51	94.82	95.23	95.23
				cakupan kepemilikan kartu keluarga	%	-	66.33	94.24	94.97	97.75	99.60	99.60
				Cakupan Penerbitan KIA	%	-	-	-	65.00	80.00	95.00	95.00
				Cakupan kepemilikan akte kelahiran	%	N/A	66.33	66.96	67.29	67.62	67.96	67.96
				Cakupan Kepemilikan akte perkawinan	%	N/A	60.31	60.52	60.55	60.63	60.71	60.71
				Cakupan kepemilikan akte kematian	%	N/A	64.23	64.24	64.26	64.32	64.32	64.32
				persentase ketersediaan data catatan sipil dan administrasi kependudukan yang lengkap dan terbaru	%	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Pemutakhiran profil kependudukan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
				Jumlah PPKS Aktif di Kecamatan	unit	3	3	5	6	7	8	8
				Persentase Cakupan anggota poktan yang ber KB.	%	50.00	50.00	53.00	55.00	60.00	65.00	65.00
				Persentase pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan Menikah	%	60.00	75.50	76.50	77.00	77.50	78.00	78.00
				Presentase Cakupan Data Mikro Keluarga	%	60.00	60.00	70.00	75.00	80.00	85.00	85.00
2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
				Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan	%	80.00	n/a	n/a	85.00	91.00	91.70	91.70

KODEFIKASI URUSAN				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	
							Target	Target	Target	Target	Target	
				Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi	%	20.00	n/a	n/a	40.00	60.00	100.00	100.00
				Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas	%	2.00	n/a	n/a	26 ²	0.60 ¹	1.70 ¹	11.70
				Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal	%	50.00	n/a	n/a	50.00	60.00	70.00	70.00
				persentase kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor	%	70,00 (59.000 kendaraan)	75,00 (63.750 kendaraan)	76,00 (64.450 kendaraan)	77,00 (65.450 kendaraan)	78,00 (66.300 kendaraan)	80,00 (68.000 kendaraan)	80,00 (68.000 kendaraan)
2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
				Indeks Pengelolaan sitem Layanan Publik Berbasis Digital	Indeks				3.18	4.08	4.96	4.96
				Indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan pengaduan dan informasi publik	Indeks	-	-	-	4.28	4.33	4.38	4.38
2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
				Persentase Koperasi yang memiliki Izin Simpan Pinjam	%	N/A			3.27	13.07	8.17	150 unit
				Persentase PKL yang Menempati Tempat yang telah Ditetapkan	%	613 PKL	5.00	15.00	15.00	15.00	10.00	988 PKL
				Persentase peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi usaha Kecil	%	2.086 Usaha Mikro	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	115 Usaha Kecil
				Persentase jumlah pelaku UMKM kreatif	%	1.000 Unit	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	1300 unit
				Jumlah Koperasi yang Beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	unit	N/A	0	0	100 Unit	100 Unit	100 Unit	376 Unit
				Persentase Koperasi yang telah Tersertifikasi Kesehatannya	%	30 Koperasi (data tahun 2017-2019)			8.17	8.17	8.17	180 Unit
				Peningkatan Skala Usaha Koperasi	Koperasi	N/A	2 Unit	2 Unit	2	2	2	10 Koperasi
				Jumlah Pengurus Koperasi yang telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian	Orang	100 orang pengurus dan pengawas			100 orang pengurus	100 orang pengurus	100 orang pengurus	400 orang pengurus

KODEFIKASI URUSAN				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	
							Target	Target	Target	Target	Target	
2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
				Persentase penerbitan Perizinan Sesuai SOP pada Pelayanan Publik	%	98.96	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
				Jumlah Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Mall Pelayanan Publik	Jumlah	32	55	60	105	110	113	
				Persentase Sistem Pelayanan Perizinan yang terintegrasi	%	43.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
				Persentase Kenaikan Penanaman Modal berdasarkan LKPM	%	Rp. 6.372.571.600.000.00	10.00	10.00	4.00	4.00	4.00	
				Jumlah izin terbit dan izin terbit dengan pemenuhan komitmen pada DPMPSTP	Jumlah	49.973 izin	-	-	12,103	7.866	5.113	
				Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	%	397 Perusahaan	25.00	38.00	24.00	26.00	28.00	
2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
				Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	
				Persentase Komunitas Kreatif yang berperan dalam pembangunan	%	N/A	0	20.00	35.00	50.00	65.00	
				Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	N/A	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	
				Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Representatif	%	N/A	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	
				Cakupan Pembinaan Olahraga	%	N/A	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	
				Persentase Pelatih Yang Bersertifikat	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
				Presentase Gugus Depan Aktif	%				50.00	60.00	70.00	
2	20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
				Indeks ketersediaan data sektoral berbasis digital	Indeks				3.5	4	5	
2	21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
				Indeks penyelenggaraan pengamanan informasi	Indeks				5	5	5	
2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
				Jumlah Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Situs	8	3	3	4	4	5	

KODEFIKASI URUSAN				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	
							Target	Target	Target	Target	Target	
				Jumlah Penyelenggaraan event bekasi kreatif	Event	6	8	5	7	9	11	16 event
2	23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAA								
				Persentase Perpustakaan Aktif	%	N/A	2.00	2.00	5.00	10.00	15.00	20.00
				Persentase Pengunjung Perpustakaan	%	18.20	35.00	35.00	15.00	20.00	25.00	25.00
2	24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
				Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Tertib	%	50.00	50.00	54.00	60.00	70.00	80.00	80.00
				Penambahan khasanah arsip statis pada depo arsip	Boks	2	2	5	10	20	30	30
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
				Jumlah produksi ikan konsumsi	Ton	1.856,36	1.874,92	1.893,6	1.910	1.946,42	1.955,24	1.955,24
				Jumlah Produksi Ikan Hias	ekor	18.622.238	20.616.836	21.649.777	22.737.661	23.863.844	25.110.221	25.110.221
				Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	82.745.20	86.882.46	88.135.58	89.130.50	90.207.31	92.036.18	92.036.18
3	26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
				Jumlah kawasan wisata yang ditata	Lokasi	2	1	1	1	1	1	7
				Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	907729	925883	944,400	963,288	982,553	1,002,204	1002204 orang
				Jumlah SDM yang ditingkatkan kopetensinya sesuai dengan perkembangan dan Tren Kepariwisata	orang	N/A	0	75	75	150	150	300
3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
				Produksi komoditas pertanian	Ton	23,185	27.882.50	30.670.7	34.25.000	32.442.17	33.515.00	33.515.00
				Jumlah produksi peternakan	Ton	10.416.00	15.420.00	10.657.00	10.765.00	10.877.00	10.985.00	10.985.00
				Jumlah produksi olahan Hasil peternakan	Ton	3.511.24	3.582.24	3.654.3	3700	3.721.50	3.777.24	3.777.24
				Terkendalnya Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis	Kasus	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
				Unit Usaha Peternakan Kesehatan dan Produk hewan yang bersertifikat teknis	unit	53	61	69	65	70	90	75
				Persentase produk PAH yang ASUH	%	42.50	42.93	43.35	44.00	44.70	46.00	46.00
3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								

KODEFIKASI URUSAN				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	
							Target	Target	Target	Target	Target	
				Jumlah pasar rakyat bersih yang berbasis modern	Unit	5	7	9	8	9	10	10
				Laju inflasi kelompok pengeluaran bahan makanan	%	<1.50	<1.50	<1.50	<4.00	<4.00	<4.00	<4.00
				Persentase pertumbuhan alat UTTP yang ditera/tera ulang	%	13.000 unit	18.9	13,792	4.00	5.00	6.00	23.150 unit
				Nilai ekspor Kota Bekasi	US Dollar	USD 263.574.932	USD 266.210 .681	USD 268.872 .788	USD 450.000. 000	USD 475.000 .000	USD 500.000. 000	USD 500.000.000
3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
				Persentase peningkatan fasilitas terhadap Industri kecil dan menengah	%	-	-	-	3.00	3.00	3.00	3.00
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	01			SEKRETARIAT DAERAH								
				Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan	%	-	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
				Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan	%		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase peningkatan pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah	%	-	-	-	50.00	60.00	75.00	75.00
				Presentase peningkatan profile kelurahan	%	-	-	-	75.00	75.00	25.00	25.00
				Persentase Fasilitas kegiatan keagamaan, hari besar Nasional dan hari besar lainnya	%	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kescjahteraan Sosial	%		35.00	40.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah	%		20.00	40.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase penyelesaian perkara yang dihadapi pemerintah daerah	%		90.00	93.00	95.00	97.00	100.00	100.00
				Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan	%	-	70.00	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi	%	-	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	100.00

KODEFIKASI URUSAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
				2019	2020	2021	2022	2023	
				Target	Target	Target	Target	Target	
	Persentase fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	%	-	70.00	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Jumlah Bidang Usaha BUMD	Jumlah Bidang Usaha	-	-	-	5	5	5	5
	Persentase Peningkatan Deviden BUMD	%	-	2.00	2.00	1.25	2.25	3.00	3.00
	Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah	%	-	-	-	50.00	60.00	75.00	75.00
	Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	%	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	%	-	9300	9300	100.00	100.00	100.00	100.00
	persentase keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi	%				100.00	100.00	100.00	100.00
	Presentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan	%	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Presentase Ketersediaan gedung pemerintahan dalam kondisi baik	%	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	02		SEKRETARIAT DPRD						
	Optimalisasi peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD	%		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Optimalisasi Disiplin Aparatur Sekretariat DPRD	%		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD	%		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD	%		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD	%		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD	%		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

KODEFIKASI URUSAN				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	
							Target	Target	Target	Target	Target	
				Persentase Terpenuhiya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase Terfasilitasinya informasi DPRD	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase Terfasilitasinya kegiatan DPRD	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	01			PERENCANAAN								
				Persentase kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan	%	61.29	75.00	75.00	80.00	90.00	100.00	100.00
				Persentase kesesuaian antara capaian target pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	N/A	75.00	75.00	80.00	90.00	100.00	100.00
				Persentase kesesuaian antara capaian target pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	N/A	75.00	75.00	80.00	90.00	100.00	100.00
				Persentase kesesuaian antara capaian target pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	N/A	75.00	75.00	80.00	90.00	100.00	100.00
5	02			KEUANGAN								
				Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Grade	A	A	A	A	A	A	A
				Persentase Kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan Dengan SAP dan tepat waktu	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

KODEFIKASI URUSAN				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	
							Target	Target	Target	Target	Target	
				Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPM yang Diterima	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Presentase OPD yang melaksanakan Administrasi Penatausahaan Keuangan dengan Tertib	%	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase Nilai Aset Antara LBMD Dengan LKPD	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Jumlah Bidang tanah milik Pemkot yang bersertifikat	Sertifikat	241	15	20	554	554	555	2302
				Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	%	693.072	1.00	1.00	0.80	0.80	0.80	0.80
				Persentase Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	43.04	35.12	56.81	48.67	49.83	50.99	50.99
				Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	%	90.60	91.00	92.00	97.67	97.69	97.71	97.71
				Nilai IKM	Nilai	76.5	77	77.25	76	77.75	79.25	79.25
5	03			KEPEGAWAIAN DAERAH								
				Mutu Pelayanan Administrasi Kepegawaian Bernilai Baik	Nilai	Baik (76.77)	0	0	Baik (82.39)	Baik (82.89)	Baik (83.39)	Baik (83.39)
				Persentase Prestasi Kerja ASN bernilai Baik	%	64.5	0	0	93.00	93.50	94.00	94.00
				Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	39.63	0	0	40.00	45.00	50.00	50.00
5	05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
				Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	%	N/A	10.00	10.00	20.00	40.00	60.00	60.00
				Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	%		10.00	10.00	20.00	40.00	60.00	60.00
				Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi	%		10.00	10.00	20.00	40.00	60.00	60.00
				Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang mendapatkan predikat	Jumlah	N/A	1	1	1	1	2	2
6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6	01			INSPEKTORAT DAERAH								

KODEFIKASI URUSAN				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	
							Target	Target	Target	Target	Target	
				Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	N/A	74.00	77.00	84.25	84.30	84.35	84.35
				Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP BB keatas	%	-	-	-	98.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase perangkat daerah dengan nilai mturitas SPIP minimal 3.01	%	-	-	-	36.00	39.00	41.00	41.00
				Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal	%	85.00	85.00	85.00	90.00	90.00	92.00	92.00
				Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal	%	71.00	71.00	75.00	75.00	80.00	80.00	80.00
				Jumlah perangkat daerah dengan nilai evaluasi ZI Minimal 70	OPD	-	-	-	5	5	5	5
				Jumlah Perangkat Daerah yang mampu mempertahankan predikat WBBM	OPD	-	-	-	0	1	1	1
				Persentase perangkat daerah dengan nilai evaluasi persepsi korupsi minimal 3.71	%	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase perangkat daerah dengan penatausahaan aset salah saji yang tidak melebihi nilai material	%	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase perangkat daerah dengan nilai kesalahan pertanggungjawaban keuangan tidak melebihi nilai material	%	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00
				Level kapabilitas APIP Inspektorat 3 keatas	Level	-	-	-	3	3	3	3
				Indeks Penerapan Manajaemen Resiko (MR)	Level	-	-	-	1.94	1.97	2	2
7				UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01			KECAMATAN								
				Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase wilayah tertib K3	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

KODEFIKASI URUSAN				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	
							Target	Target	Target	Target	Target	
8				URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
				Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	5.00	10.00	10.00	15.00	30.00	50.00	50.00
				Persentase penanganan konflik yang disebabkan oleh suku. ras dan antar golongan	%	1000 Pantauan	200 Pantauan	200 Pantauan	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase Pembinaan Politik Daerah	%	1.65	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	23.00
				Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina	%				100.00	100.00	100.00	100.00
				Cakupan Masyarakat yang mebnapat pembinaan peningkatan pengembangan ketahanan ekonomi. sosial. budaya	%				0.15	0.17	0.18	0.18
x	x			PENUNJANG URUSAN								
				Optimalisasi Disiplin Aparatur	%		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



BAB 9 PENUTUP

Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. Revisi RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi, RPJPD Provinsi dan RPJMN. Revisi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten pada tahun 2021-2023. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur proses penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2024.

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Revisi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi pemerintah kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019-2023, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh setiap perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Perkembangan kondisi Covid-19 menunjukkan terjadinya dampak yang meluas tidak hanya sektor kesehatan, ekonomi dan sosial namun juga merambat ke kehidupan lainnya. Guna mendukung pemulihan ekonomi regional maka perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah. Amanat peraturan perundang-undangan dan peraturan perencanaan dan pembangunan daerah yang terbit setelah penetapan RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023 diselaraskan dengan dokumen Revisi RPJMD 2018-2023. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kota Bekasi berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota sekitar, serta masyarakat termasuk dunia usaha;
2. Perubahan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan RKPD Tahun 2021-2023;
3. Wali Kota dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
4. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya;
5. Wali Kota berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 kepada masyarakat;

6. Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
7. Penyusunan RKPD Kota Bekasi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Perubahan RPJMD 2018-2023 selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bekasi Tahun 2021 sampai dengan 2023.
8. Kepala Perangkat Daerah Kota Bekasi berkewajiban menyusun Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

9.2. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2023. Sebagaimana diketahui, tahun 2023 adalah tahun terakhir periode RPJMD Kota Bekasi. Penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi 2005-2025, RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPN. Selanjutnya RKPD Tahun 2024 menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Bekasi Tahun 2024. Pemerintah Kota Bekasi akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/ terselesaikan sampai dengan tahun 2023, selain itu untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, dan lain-lain.

